



LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan keuangan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajiban estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 92.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 26 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Ahmad Luthfi H. Rahmatullah S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
Register Negara Akuntan Nomor 2935



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Semarang, 26 Mei 2026



GUBERNUR JAWA TENGAH,

DR. AHMAD LUTHFI, SH., S.St.M.K



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	%	REALISASI Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	15.699.284.656.000,00	14.973.131.878.336,00	95,37	17.650.936.913.504,00
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	12.459.303.870.000,00	11.438.451.030.063,00	91,81	14.210.241.533.541,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	2.172.596.928.000,00	2.673.385.019.574,00	123,05	2.318.821.514.818,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	690.155.713.000,00	546.657.345.508,00	79,21	687.813.166.201,00
6	Lain-lain Pad Yang Sah	5.1.1.1.4	377.228.145.000,00	314.638.483.191,00	83,41	434.060.698.944,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad)		15.699.284.656.000,00	14.973.131.878.336,00	95,37	17.650.936.913.504,00
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	8.792.120.753.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10	8.701.438.866.795,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	8.792.120.753.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10	8.701.438.866.795,00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	0,00	0,00	100,00	8.663.441.298.795,00
11	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.2	8.436.080.000,00	8.436.080.000,00	100,00	37.997.568.000,00
12	Dana Bagi Hasil (dbh)	5.1.1.2.1.3	1.015.927.337.000,00	976.507.947.700,00	96,12	0,00
13	Dana Alokasi Umum (dau)	5.1.1.2.1.4	3.978.828.515.000,00	3.978.828.515.369,00	100,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus (dak)	5.1.1.2.1.5	3.788.928.821.000,00	3.661.591.213.439,00	96,64	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer		8.792.120.753.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10	8.701.438.866.795,00
16	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	163.185.839.000,00	163.473.343.033,00	100,18	26.343.846.120,00
17	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	25.505.460.000,00	25.505.460.000,00	100,00	25.600.169.638,00
18	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	137.680.379.000,00	137.967.883.033,00	100,21	743.676.482,00
19	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		163.185.839.000,00	163.473.343.033,00	100,18	26.343.846.120,00
20	Jumlah Pendapatan Daerah		24.654.591.248.000,00	23.761.968.977.877,00	96,38	26.378.719.626.419,00
21	BELANJA DAERAH	5.1.2				
22	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	16.131.580.750.000,00	15.480.092.183.316,00	95,96	16.083.865.301.964,00
23	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	7.438.563.067.000,00	7.060.692.834.988,00	94,92	7.023.084.524.845,00
24	Belanja Barang Dan Jasa	5.1.2.1.2	6.554.955.733.000,00	6.306.083.040.496,00	96,20	6.234.228.358.506,00
25	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	12.413.000.000,00	12.291.564.636,00	99,02	1.399.999.100,00
26	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	2.093.048.950.000,00	2.068.441.743.196,00	98,82	2.780.143.423.054,00
27	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	32.600.000.000,00	32.583.000.000,00	99,95	45.008.996.459,00
28	Jumlah Belanja Operasi		16.131.580.750.000,00	15.480.092.183.316,00	95,96	16.083.865.301.964,00
29	BELANJA MODAL	5.1.2.2	1.998.205.719.000,00	1.795.558.675.999,00	89,86	1.733.084.096.994,00
30	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	13.932.478.000,00	12.461.205.439,00	89,44	12.221.207.440,00
31	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.1.2.2.2	689.803.271.000,00	636.745.519.547,00	92,31	855.982.713.753,00
32	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	5.1.2.2.3	297.656.452.000,00	205.077.624.565,00	68,90	411.044.257.004,00
33	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	5.1.2.2.4	867.929.940.000,00	815.425.857.816,00	93,95	366.478.924.044,00
34	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	127.390.078.000,00	124.550.819.262,00	97,77	86.434.858.953,00
35	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.493.500.000,00	1.297.649.370,00	86,89	922.135.800,00
36	Jumlah Belanja Modal		1.998.205.719.000,00	1.795.558.675.999,00	89,86	1.733.084.096.994,00
37	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	25.000.000.000,00	7.192.800.000,00	28,77	10.225.800.500,00
38	Belanja Tidak Terduga		25.000.000.000,00	7.192.800.000,00	28,77	10.225.800.500,00
39	Jumlah Belanja Tidak Terduga		25.000.000.000,00	7.192.800.000,00	28,77	10.225.800.500,00
40	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	7.076.818.456.000,00	6.588.994.469.941,00	93,11	9.359.951.298.345,00
41	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	4.494.697.452.000,00	4.084.034.975.804,00	90,86	6.334.544.870.221,00

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	%	REALISASI Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
42	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	2.582.121.004.000,00	2.504.959.494.137,00	97,01	3.025.406.428.124,00
43	Jumlah Belanja Transfer		7.076.818.456.000,00	6.588.994.469.941,00	93,11	9.359.951.298.345,00
44	Jumlah Belanja Daerah		25.231.604.925.000,00	23.871.838.129.256,00	94,61	27.187.126.497.803,00
45	SURPLUS/DEFISIT		(577.013.677.000,00)	(109.869.151.379,00)	19,04	(808.406.871.384,00)
46	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.3				
47	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1	577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,01	1.406.120.547.664,00
48	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	577.013.677.000,00	576.951.194.428,00	99,99	900.186.419.964,00
49	Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2	0,00	0,00	100,00	505.869.400.000,00
50	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3	0,00	98.096.951,00	100,00	64.727.700,00
51	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,01	1.406.120.547.664,00
52	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	20.700.000.000,00
53	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.1	0,00	0,00	100,00	20.700.000.000,00
54	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00	0,00	0,00	20.700.000.000,00
55	Jumlah Pembiayaan Netto		577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,01	1.385.420.547.664,00
56	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.4	0,00	467.180.140.000,00		577.013.676.280,00



GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Per 31 Desember 2025 dan 2024

NO	URAIAN	REF	REALISASI	
			Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	576.951.194.428,00	900.186.419.964,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	576.951.194.428,00	900.186.419.964,00
3	Sub Total (1-2)		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	467.180.140.000,00	577.013.676.280,00
5	Sub Total (3+4)		467.180.140.000,00	577.013.676.280,00
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	6.588.400,00	(62.481.852,00)
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	5.2.5	467.186.728.400,00	576.951.194.428,00



GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
NERACA KOMPARATIF

Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
ASET	5.3.1	42.669.981.048.262,92	40.261.948.714.318,57	2.408.032.333.944,35	5,98
ASET LANCAR	5.3.1.1	3.229.280.800.215,54	3.427.967.953.973,52	(198.687.153.757,98)	(5,80)
Kas Dan Setara Kas	5.3.1.1.1	479.270.048.280,93	587.530.474.411,09	(108.260.426.130,16)	(18,43)
Kas Di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	28.219.099.330,00	130.694.126.408,00	(102.475.027.078,00)	(78,41)
Kas Di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	214.503.000,00	141.221.000,00	73.282.000,00	51,89
Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	0,00	585.782.732,00	(585.782.732,00)	(100,00)
Kas Di Blud	5.3.1.1.1.4	432.067.616.212,93	438.815.860.716,09	(6.748.244.503,16)	(1,54)
Kas Dana Bos	5.3.1.1.1.5	1.517.881.717,00	3.218.476.872,00	(1.700.595.155,00)	(52,84)
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.6	17.250.948.021,00	14.075.006.683,00	3.175.941.338,00	22,56
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2	2.435.663.820.047,00	2.897.664.180.980,00	(462.000.360.933,00)	(15,94)
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (pkb)		2.435.603.872.950,00	2.897.325.081.950,00	(461.721.209.000,00)	(15,94)
Piutang Pajak Air Permukaan		59.947.097,00	339.099.030,00	(279.151.933,00)	(82,32)
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.3	93.556.799.785,66	111.893.619.660,73	(18.336.819.875,07)	(16,39)
Piutang Retribusi Jasa Umum	5.3.1.1.3.1	93.403.308.185,66	111.639.377.130,73	(18.236.068.945,07)	(16,33)
Piutang Retribusi Jasa Usaha	5.3.1.1.3.2	153.491.600,00	254.242.530,00	(100.750.930,00)	(39,63)
Piutang Lain-lain Pad Yang Sah	5.3.1.1.4	1.593.345.868,38	1.832.728.064,88	(239.382.196,50)	(13,06)
Piutang Hasil Pemanfaatan Bmd Yang Tidak Dipisahkan	5.3.1.1.4.1	370.051.669,00	370.051.669,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Blud	5.3.1.1.4.2	1.223.294.199,38	1.462.676.395,88	(239.382.196,50)	(16,37)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.5	432.276.078.000,00	53.079.604.000,00	379.196.474.000,00	714,39
Piutang Dana Perimbangan	5.3.1.1.5.1	0,00	53.079.604.000,00	(53.079.604.000,00)	(100,00)
Piutang Dana Bagi Hasil (dbh)	5.3.1.1.5.2	432.276.078.000,00	0,00	432.276.078.000,00	100,00
Piutang Lainnya	5.3.1.1.6	12.290.770.884,00	15.157.041.204,00	(2.866.270.320,00)	(18,91)
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.1.6.1	8.292.301.233,00	10.690.193.030,00	(2.397.891.797,00)	(22,43)
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	5.3.1.1.6.2	3.998.469.651,00	4.466.848.174,00	(468.378.523,00)	(10,49)
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.7	(528.086.571.242,19)	(560.159.696.288,11)	32.073.125.045,92	(5,73)
Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.1.7.1	(515.795.800.358,19)	(545.002.655.084,11)	29.206.854.725,92	(5,36)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.7.2	(12.290.770.884,00)	(15.157.041.204,00)	2.866.270.320,00	(18,91)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.8	4.989.015.590,64	5.086.493.552,91	(97.477.962,27)	(1,92)
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.8.1	166.346.038,25	518.636.939,82	(352.290.901,57)	(67,93)
Beban Dibayar Dimuka-sewa	5.3.1.1.8.2	2.307.692,31	248.431.033,96	(246.123.341,65)	(99,07)
Beban Dibayar Dimuka Asuransi Barang Milik Daerah	5.3.1.1.8.3	4.820.361.860,08	4.319.425.579,13	500.936.280,95	11,60
Persediaan	5.3.1.1.9	297.727.493.001,12	315.883.508.388,02	(18.156.015.386,90)	(5,75)
Barang Pakai Habis	5.3.1.1.9.1	297.687.688.041,12	315.846.660.398,02	(18.158.972.356,90)	(5,75)
Barang Tak Habis Pakai	5.3.1.1.9.2	39.741.960,00	36.663.990,00	3.077.970,00	8,40
Barang Bekas Dipakai	5.3.1.1.9.3	63.000,00	184.000,00	(121.000,00)	(65,76)
Jumlah Aset Lancar		3.229.280.800.215,54	3.427.967.953.973,52	(198.687.153.757,98)	(5,80)
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	8.366.495.471.980,20	7.929.016.426.114,62	437.479.045.865,58	5,52
Investasi Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.1	8.366.495.471.980,20	7.929.016.426.114,62	437.479.045.865,58	5,52
Penyertaan Modal	5.3.1.2.1.1	8.366.495.471.980,20	7.929.016.426.114,62	437.479.045.865,58	5,52
Jumlah Investasi Jangka Panjang		8.366.495.471.980,20	7.929.016.426.114,62	437.479.045.865,58	5,52
ASET TETAP	5.3.1.3	28.783.275.371.739,16	26.620.736.197.275,90	2.162.539.174.463,26	8,12
Tanah	5.3.1.3.1	13.521.196.119.991,00	12.332.651.846.000,00	1.188.544.273.991,00	9,64
Peralatan Dan Mesin	5.3.1.3.2	10.147.339.396.635,00	9.528.039.167.257,00	619.300.229.378,00	6,50
Gedung Dan Bangunan	5.3.1.3.3	10.866.699.827.129,00	9.849.541.705.895,00	1.017.158.121.234,00	10,33
Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	5.3.1.3.4	13.406.119.577.958,00	12.507.048.034.410,00	899.071.543.548,00	7,19
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	1.156.748.182.680,00	1.056.350.270.097,00	100.397.912.583,00	9,50
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	87.272.764.871,00	287.616.819.183,00	(200.344.054.312,00)	(69,66)
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(20.402.100.497.524,84)	(18.940.511.645.566,10)	(1.461.588.851.958,74)	7,72
Jumlah Aset Tetap		28.783.275.371.739,16	26.620.736.197.275,90	2.162.539.174.463,26	8,12

URAIAN	REF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
DANA CADANGAN	5.3.1.4	0,00	0,00	0,00	100,00
Jumlah Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	100,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5	1.856.864.727.740,53	2.146.938.213.796,85	(290.073.486.056,32)	(13,51)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.1	0,00	96.000.000,00	(96.000.000,00)	(100,00)
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		0,00	96.000.000,00	(96.000.000,00)	(100,00)
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	50.701.186.289,00	45.259.342.410,00	5.441.843.879,00	12,02
Aset Tidak Berwujud		50.701.186.289,00	45.259.342.410,00	5.441.843.879,00	12,02
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	2.878.340.281.412,00	3.160.983.940.233,00	(282.643.658.821,00)	(8,94)
Aset Lain-lain		2.878.340.281.412,00	3.160.983.940.233,00	(282.643.658.821,00)	(8,94)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(42.827.396.148,62)	(36.070.409.125,26)	(6.756.987.023,36)	18,73
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(42.827.396.148,62)	(36.070.409.125,26)	(6.756.987.023,36)	18,73
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.5	(1.029.351.329.915,85)	(1.023.416.071.844,89)	(5.935.258.070,96)	0,58
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(1.029.351.329.915,85)	(1.023.416.071.844,89)	(5.935.258.070,96)	0,58
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	5.3.1.5.6	1.986.104,00	85.412.124,00	(83.426.020,00)	(97,67)
Uang Jaminan Dan/atau Titipan Uang Muka		1.986.104,00	85.412.124,00	(83.426.020,00)	(97,67)
Jumlah Aset Lainnya		1.856.864.727.740,53	2.146.938.213.796,85	(290.073.486.056,32)	(13,51)
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6	434.064.676.587,49	137.289.923.157,68	296.774.753.429,81	216,17
Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	419.661.492.104,00	122.427.169.604,00	297.234.322.500,00	242,78
Properti Investasi Tanah		419.661.492.104,00	122.427.169.604,00	297.234.322.500,00	242,78
Properti Investasi Bangunan Gedung	5.3.1.6.2	35.568.943.531,00	35.568.943.531,00	0,00	0,00
Properti Investasi Bangunan Gedung		35.568.943.531,00	35.568.943.531,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung	5.3.1.6.3	(21.165.759.047,51)	(20.706.189.977,32)	(459.569.070,19)	2,22
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Bangunan Gedung		(21.165.759.047,51)	(20.706.189.977,32)	(459.569.070,19)	2,22
Jumlah Properti Investasi		434.064.676.587,49	137.289.923.157,68	296.774.753.429,81	216,17
JUMLAH ASET		42.669.981.048.262,92	40.261.948.714.318,57	2.408.032.333.944,35	5,98
KEWAJIBAN	5.3.2	652.367.704.988,43	557.443.147.246,98	94.924.557.741,45	17,03
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	652.367.704.988,43	557.443.147.246,98	94.924.557.741,45	17,03
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (pfk)	5.3.2.1.1	310.965.408,00	28.310.064,00	282.655.344,00	998,43
Utang Pph Pusat	5.3.2.1.1.1	16.121.230,00	1.920.064,00	14.201.166,00	739,62
Utang Ppn Pusat	5.3.2.1.1.2	36.613.175,00	0,00	36.613.175,00	100,00
Utang Pihak Ketiga Lainnya	5.3.2.1.1.3	258.231.003,00	26.390.000,00	231.841.003,00	878,52
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	27.846.795.618,43	34.750.163.758,98	(6.903.368.140,55)	(19,87)
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak Iii	5.3.2.1.2.1	26.643.720.096,93	34.048.709.079,09	(7.404.988.982,16)	(21,75)
Pendapatan Diterima Dimuka-belanja Sewa	5.3.2.1.2.2	1.203.075.521,50	701.454.679,89	501.620.841,61	71,51
Utang Belanja	5.3.2.1.3	608.255.159.858,00	507.205.974.758,00	101.049.185.100,00	19,92
Utang Belanja Barang Dan Jasa	5.3.2.1.3.1	143.483.812.221,00	91.831.715.232,00	51.652.096.989,00	56,25
Utang Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.3.2.1.3.2	0,00	48.931.020,00	(48.931.020,00)	(100,00)
Utang Belanja Bagi Hasil	5.3.2.1.3.3	464.771.347.637,00	415.325.328.506,00	49.446.019.131,00	11,91
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	15.954.784.104,00	15.458.698.666,00	496.085.438,00	3,21
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	5.3.2.1.4.1	15.952.798.000,00	15.433.855.000,00	518.943.000,00	3,36
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.3.2.1.4.2	1.986.104,00	24.843.666,00	(22.857.562,00)	(92,01)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		652.367.704.988,43	557.443.147.246,98	94.924.557.741,45	17,03
JUMLAH KEWAJIBAN		652.367.704.988,43	557.443.147.246,98	94.924.557.741,45	17,03
EKUITAS	5.3.3	42.017.613.343.274,49	39.704.505.567.071,59	2.313.107.776.202,90	5,83
EKUITAS		42.017.613.343.274,49	39.704.505.567.071,59	2.313.107.776.202,90	5,83
Ekuitas		42.017.613.343.274,49	39.704.505.567.071,59	2.313.107.776.202,90	5,83
Jumlah Ekuitas		42.017.613.343.274,49	39.704.505.567.071,59	2.313.107.776.202,90	5,83
JUMLAH EKUITAS DANA		42.017.613.343.274,49	39.704.505.567.071,59	2.313.107.776.202,90	5,83

URAIAN	REF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		42.669.981.048.262,92	40.261.948.714.318,57	2.408.032.333.944,35	5,98



GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL

Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	REF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5 = (3-4)	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	5.4.1				
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1	12.092.029.952.030,00	14.591.278.050.113,00	(2.499.248.098.083,00)	(17,13)
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	2.484.384.706.316,54	2.275.251.530.382,75	209.133.175.933,79	9,19
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	1.070.437.854.900,05	895.834.519.652,31	174.603.335.247,74	19,49
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	314.429.805.623,31	433.784.794.046,42	(119.354.988.423,11)	(27,51)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad)-lo		15.961.282.318.869,90	18.196.148.894.194,48	(2.234.866.575.324,58)	(12,28)
PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	5.4.1.2.1	8.602.512.657.508,00	8.598.918.995.795,00	3.593.661.713,00	0,04
Jumlah Pendapatan Transfer-lo		8.602.512.657.508,00	8.598.918.995.795,00	3.593.661.713,00	0,04
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3				
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	1.258.985.786.516,02	1.395.177.617.696,41	(136.191.831.180,39)	(9,76)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	166.273.443.831,00	743.676.482,00	165.529.767.349,00	22.258,30
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-lo		1.425.259.230.347,02	1.395.921.294.178,41	29.337.936.168,61	2,10
JUMLAH PENDAPATAN		25.989.054.206.724,92	28.190.989.184.167,89	(2.201.934.977.442,97)	(7,81)
BEBAN					
BEBAN OPERASI	5.4.2				
Beban Pegawai	5.4.2.1				
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	7.060.692.834.988,00	7.023.084.524.845,00	37.608.310.143,00	0,54
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	6.114.392.812.783,99	6.099.893.594.198,24	14.499.218.585,75	0,24
Beban Barang	5.4.2.1.2.1	1.655.206.979.309,87	1.584.572.836.692,64	70.634.142.617,23	4,46
Beban Jasa	5.4.2.1.2.2	2.712.797.731.160,27	2.690.543.315.809,57	22.254.415.350,70	0,83
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.2.3	325.486.262.631,00	333.417.424.060,00	(7.931.161.429,00)	(2,38)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.2.4	283.821.172.104,00	485.503.261.912,00	(201.682.089.808,00)	(41,54)
Beban Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	5.4.2.1.2.5	328.806.987.202,00	188.795.949.543,00	140.011.037.659,00	74,16
Beban Barang Dan Jasa Bos	5.4.2.1.2.6	0,00	817.060.806.181,03	(817.060.806.181,03)	(100,00)
Beban Barang Dan Jasa Bosp	5.4.2.1.2.7	808.273.680.376,85	0,00	808.273.680.376,85	100,00
Beban Subsidi	5.4.2.1.3	12.291.564.636,00	1.399.999.100,00	10.891.565.536,00	777,97
Beban Hibah	5.4.2.1.4	2.800.761.530.921,45	4.664.175.033.195,08	(1.863.413.502.273,63)	(39,95)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	32.583.000.000,00	45.008.996.459,00	(12.425.996.459,00)	(27,61)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	624.834.360.075,50	141.638.386.323,25	483.195.973.752,25	341,15
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.7	1.622.578.065.883,24	1.499.586.730.397,52	122.991.335.485,72	8,20
Jumlah Beban Operasi		18.268.134.169.288,18	19.474.787.264.518,09	(1.206.653.095.229,91)	(6,20)
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2				
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	4.133.480.994.935,00	6.526.031.425.930,00	(2.392.550.430.995,00)	(36,66)
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	2.504.959.494.137,00	3.025.406.428.124,00	(520.446.933.987,00)	(17,20)
Jumlah Beban Transfer		6.638.440.489.072,00	9.551.437.854.054,00	(2.912.997.364.982,00)	(30,50)
JUMLAH BEBAN		24.906.574.658.360,18	29.026.225.118.572,09	(4.119.650.460.211,91)	(14,19)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		1.082.479.548.364,74	(835.235.934.404,20)	1.917.715.482.768,94	(229,60)
SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	5.4.3				
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-lo	5.4.3.1	3.741.730.029,52	149.081.468.027,08	(145.339.737.997,56)	(97,49)
Jumlah Surplus Non Operasional-lo		3.741.730.029,52	149.081.468.027,08	(145.339.737.997,56)	(97,49)

URAIAN	REFE	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2025	Tahun 2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5 = (3-4)	6
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	5.4.3.2				
Defisit Penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar-lo	5.4.3.2.1	9.974.226.631,72	5.085.523.970,88	4.888.702.660,84	96,13
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-lo	5.4.3.2.2	154.968.413,06	208.043.715.609,97	(207.888.747.196,91)	(99,93)
Jumlah Defisit Non Operasional-lo		10.129.195.044,78	213.129.239.580,85	(203.000.044.536,07)	(95,25)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(6.387.465.015,26)	(64.047.771.553,77)	57.660.306.538,51	(90,03)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		1.076.092.083.349,48	(899.283.705.957,97)	1.975.375.789.307,45	(219,66)
POS LUAR BIASA	5.4.4				
BEBAN LUAR BIASA	5.4.4.1				
Beban Luar Biasa		7.192.800.000,00	10.225.800.500,00	(3.033.000.500,00)	(29,66)
Jumlah Beban Luar Biasa		7.192.800.000,00	10.225.800.500,00	(3.033.000.500,00)	(29,66)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		(7.192.800.000,00)	(10.225.800.500,00)	3.033.000.500,00	(29,66)
SURPLUS/DEFISIT-LO		1.068.899.283.349,48	(909.509.506.457,97)	1.978.408.789.807,45	(217,52)



GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	11.438.451.030.063,00	14.210.241.533.541,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	2.673.385.019.574,00	2.318.821.514.818,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	546.657.345.508,00	687.813.166.201,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	312.752.886.716,00	431.983.440.927,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	973.009.523.700,00	889.020.058.000,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	3.498.424.000,00	7.212.510.000,00
9	Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	3.978.828.515.369,00	3.819.010.791.028,00
10	Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	3.661.591.213.439,00	3.948.197.939.767,00
11	Insentif Fiskal	5.5.1.1.9	8.436.080.000,00	37.997.568.000,00
12	Pendapatan Hibah	5.5.1.1.10	25.505.460.000,00	25.600.169.638,00
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.11	137.967.883.033,00	743.676.482,00
14	Jumlah Arus Masuk Kas		23.760.083.381.402,00	26.376.642.368.402,00
15	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
16	Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	7.060.692.834.988,00	7.023.084.524.845,00
17	Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	6.306.083.040.496,00	6.234.228.358.506,00
18	Belanja Subsidi	5.5.1.2.3	12.291.564.636,00	1.399.999.100,00
19	Belanja Hibah	5.5.1.2.4	2.068.441.743.196,00	2.780.143.423.054,00
20	Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	32.583.000.000,00	45.008.996.459,00
21	Belanja Tidak Terduga	5.5.1.2.6	7.192.800.000,00	10.225.800.500,00
22	Belanja Bagi Hasil	5.5.1.2.7	4.084.034.975.804,00	6.334.544.870.221,00
23	Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.8	2.504.959.494.137,00	3.025.406.428.124,00
24	Jumlah Arus Keluar Kas		22.076.279.453.257,00	25.454.042.400.809,00
25	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		1.683.803.928.145,00	922.599.967.593,00
26	ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.5.2		
27	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
28	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1	1.307.830.775,00	1.032.980.021,00
29	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.2	369.477.200,00	406.282.000,00
30	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.3	92.703.000,00	500.834.700,00
31	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.2.1.4	-	137.161.296,00
32	Pendapatan Penjualan atas Aset Lain-Lain	5.5.2.1.5	115.585.500,00	-
33	Jumlah Arus Masuk Kas		1.885.596.475,00	2.077.258.017,00
34	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
35	Belanja Tanah	5.5.2.2.1	12.461.205.439,00	12.221.207.440,00
36	Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	636.745.519.547,00	855.982.713.753,00
37	Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	205.077.624.565,00	411.044.257.004,00
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	815.425.857.816,00	366.478.924.044,00
39	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	124.550.819.262,00	86.434.858.953,00
40	Belanja Aset Lainnya	5.5.2.2.6	1.297.649.370,00	922.135.800,00
41	Jumlah Arus Keluar Kas		1.795.558.675.999,00	1.733.084.096.994,00
42	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan		(1.793.673.079.524,00)	(1.731.006.838.977,00)
43	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.5.3		
44	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
45	Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.1.1	-	505.869.400.000,00
46	Penerimaan Kembali Pokok Piutang	5.5.3.1.2	98.096.951,00	64.727.700,00
47	Jumlah Arus Masuk Kas		98.096.951,00	505.934.127.700,00
48	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
49	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.1	-	20.700.000.000,00
50	Jumlah Arus Keluar Kas		-	20.700.000.000,00
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan		98.096.951,00	485.234.127.700,00

NO	URAIAN	REF	2025 (AUDITED)	2024
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.5.4		
53	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
54	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	824.281.764.914,00	836.950.837.427,00
55	Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.2	141.221.000,00	348.056.200,00
56	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.3	-	3.172.782,00
57	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	5.5.4.1.4	6.589.500,00	-
58	Jumlah Arus Masuk Kas		824.429.575.414,00	837.302.066.409,00
59	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
60	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	824.281.764.914,00	836.950.837.427,00
61	Kas Di Bendahara Penerimaan- TA Berjalan	5.5.4.2.2	141.193.000,00	141.221.000,00
62	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	5.5.4.2.3	1.100,00	62.481.852,00
63	Jumlah Arus Keluar Kas		824.422.959.014,00	837.154.540.279,00
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		6.616.400,00	147.526.130,00
65	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(109.764.438.028,00)	(323.025.217.554,00)
66	Saldo Awal Kas di BUD		130.694.126.408,00	275.800.966.203,00
67	Saldo Awal Kas di BLUD		435.442.781.537,00	610.166.143.275,00
68	Saldo Awal Kas Dana BOS		3.218.476.872,00	5.903.585.397
69	Saldo Awal Kas Dana Lainnya		7.454.588.611,00	7.964.496.107
70	Saldo Akhir Kas di BUD		28.219.099.330,00	130.694.126.408,00
71	Saldo Akhir Kas di BLUD		428.814.703.116,00	435.442.781.537,00
72	Saldo Akhir Kas Dana BOS		1.476.456.699,00	3.218.476.872,00
73	Saldo Akhir Kas Dana Lainnya		8.535.276.255,00	7.454.588.611,00
74	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		141.193.000,00	141.221.000,00
75	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan (Non SILPA)		73.310.000,00	-
76	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran (Non SILPA)		-	585.782.732,00
77	Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA)		3.252.913.096,93	3.373.079.179,09
78	Saldo Akhir Kas Dana BOS (Non SILPA)		41.425.018,00	-
79	Saldo Akhir Kas Lainnya (Non SILPA)		8.715.671.766,00	6.620.418.072,00
80	Saldo Akhir Kas	5.5.7	479.270.048.280,93	587.530.474.411,09

* Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.



GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Per 31 Desember 2025

URAIAN	REF	JUMLAH	
		Tahun 2025	Tahun 2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	5.6.1	39.704.505.567.071,59	40.503.023.207.483,67
SURPLUS/DEFISIT LO	5.6.2	1.068.899.283.349,48	(909.509.506.457,97)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	5.6.3	1.244.208.492.853,42	110.991.866.045,89
KOREKSI/PENYESUAIAN KAS	5.6.3.1	106.112.372,00	150.631.529,00
KOREKSI/PENYESUAIAN PIUTANG	5.6.3.2	(93.804.451.417,03)	174.033.862.795,00
KOREKSI/PENYESUAIAN PENYISIHAN PIUTANG	5.6.3.3	210.270.276.159,63	(368.533.529,11)
KOREKSI/PENYESUAIAN INVESTASI PERMANEN	5.6.3.4	(86.301.463.526,47)	0,00
KOREKSI/PENYESUAIAN ASET TETAP	5.6.3.5	1.196.803.684.772,00	(6.497.922.576,00)
KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN	5.6.3.6	17.734.307.389,90	(50.440.374.414,20)
KOREKSI/PENYESUAIAN ASET LAINNYA	5.6.3.7	(295.188.244.821,00)	(11.872.738.748,00)
KOREKSI/PENYESUAIAN AMORTISASI	5.6.3.8	(2.941.435.575,61)	(1.906.262.518,40)
KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA	5.6.3.9	324.785.000,00	7.888.103.507,60
KOREKSI/PENYESUAIAN ASET PI	5.6.3.10	297.204.922.500,00	0,00
KOREKSI/PENYESUAIAN HUTANG	5.6.3.11	0,00	5.100.000,00
EKUITAS AKHIR	5.6.4	42.017.613.343.274,49	39.704.505.567.071,59



GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHER



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
- b. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
- c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
- d. Keseimbangan Antargenerasi
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e. Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.



1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai informasi untuk membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- c. Neraca
Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d. Laporan Operasional (LO)
LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.



- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga penyajian informasi yang diharuskan atau dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian kewajaran laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi



13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
20. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 2 EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan



BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
- 4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
- 4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
- 4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
- 4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
- 4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
- 4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi
- 4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
- 4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- 4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 4.14. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
- 4.15. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- 4.16. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- 4.17. Kebijakan Akuntansi Koreksi

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB 7 PENUTUP

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

1.1. Ekonomi Makro

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan positif ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang semakin menguat dan stabil. Pada Tahun 2025, perekonomian Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,37 persen (c-to-c), meningkat dibandingkan Tahun 2024 yang tumbuh 4,95 persen (c-to-c). Capaian ini juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,11 persen (c-to-c). Peningkatan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jawa Tengah semakin resilien dan mampu memanfaatkan momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global.

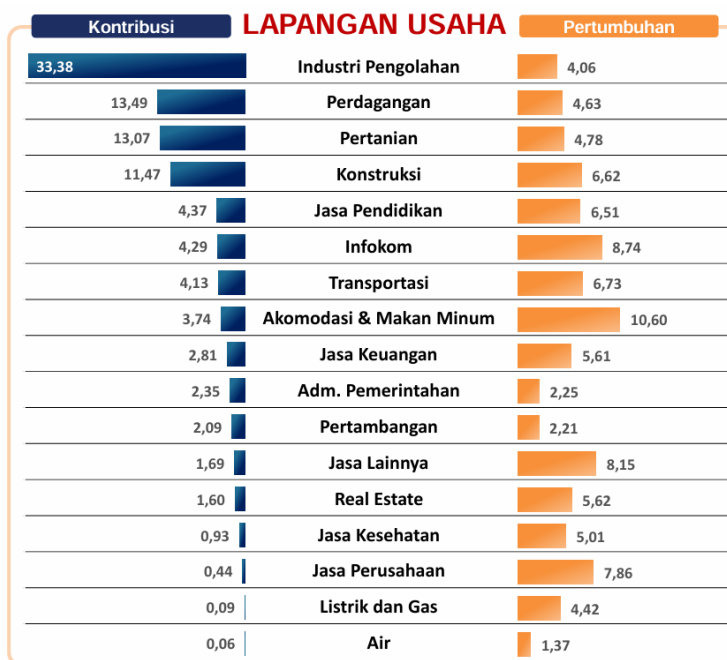
Provinsi Jawa Tengah menempati posisi kedua setelah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertumbuhan sebesar 5,49 persen (c-to-c) dalam tingkat pulau Jawa. Dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berada diatas rata rata pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa yaitu di angka 5,35 persen (c-to-c). Kinerja ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jawa Tengah cukup kuat dan kompetitif di tingkat regional, serta berkontribusi signifikan terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa secara keseluruhan.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 s/d 2025 (c-to-c, %)

Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Gambar 1.2 Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (c-to-c, %)

Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Jawa Tengah masih didominasi oleh Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 33,38 persen, diikuti oleh Perdagangan sebesar 13,49 persen, Pertanian sebesar 13,07 persen, dan Konstruksi sebesar 11,47 persen. Keempat sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Tengah di tahun 2025.

Dilihat dari sisi pertumbuhan, semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif dimana sektor dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025 adalah lapangan usaha Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 10,60 persen, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,74 persen, Jasa Lainnya sebesar 8,15 persen, dan Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 7,86 persen. Pertumbuhan tinggi pada sektor-sektor jasa tersebut menunjukkan meningkatnya mobilitas masyarakat, penguatan aktivitas pariwisata, serta percepatan transformasi digital di Jawa Tengah.

Sementara itu, sektor-sektor utama penyumbang PDRB juga bertumbuh secara positif, diantaranya Industri Pengolahan sebesar 4,06 persen, Perdagangan sebesar 4,63 persen, Pertanian sebesar 4,78 persen, dan Konstruksi sebesar 6,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2025 tidak hanya ditopang oleh sektor jasa, tetapi juga oleh sektor riil yang memiliki basis produksi kuat.



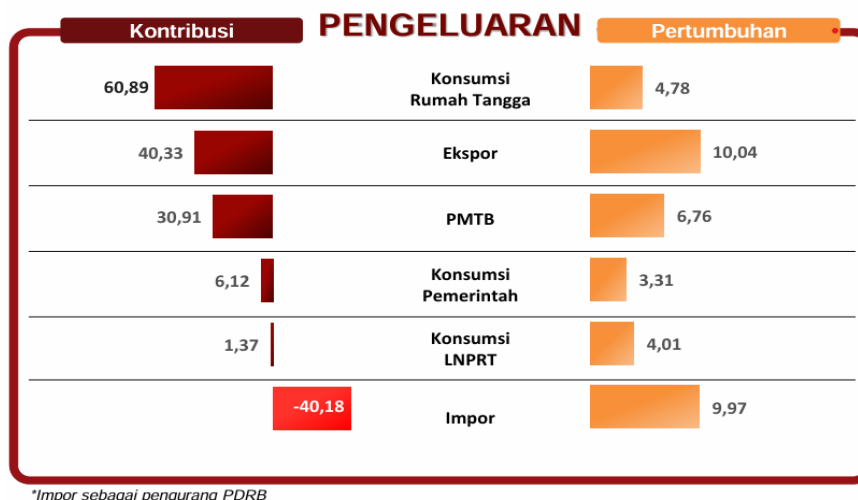
Tabel 1.1 PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Kategori Lapangan Usaha	PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Miliar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	127,065.84	130,762.52	131,330.54	133,162.54	139,530.40
B. Pertambangan dan Penggalian	22,326.16	20,942.66	21,232.09	21,833.06	22,315.21
C. Industri Pengolahan	333,239.63	346,169.65	361,111.03	373,837.72	389,026.51
D. Pengadaan Listrik, Gas	1,170.51	1,214.86	1,297.42	1,387.68	1,448.95
E. Pengadaan Air	744.86	752.41	783.02	800.9	811.85
F. Konstruksi	106,701.15	108,657.61	115,250.87	124,441.81	132,673.93
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	147,313.38	153,670.44	161,240.41	167,931.17	175,700.39
H. Transportasi dan Pergudangan	24,335.82	42,103.03	45,523.39	48,052.76	51,285.06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	32,595.12	38,132.45	42,417.20	46,670.27	51,617.30
J. Informasi dan Komunikasi	62,288.94	63,846.51	70,658.78	77,416.08	84,182.23
K. Jasa Keuangan	27,545.69	27,690.76	28,289.10	28,899.58	30,519.47
L. Real Estate	19,133.49	20,107.10	21,494.52	22,764.06	24,042.70
M,N. Jasa Perusahaan	3,816.62	4,051.19	4,344.41	4,741.92	5,114.67
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24,528.68	24,915.02	25,944.09	27,897.21	28,525.56
P. Jasa Pendidikan	38,974.99	39,589.05	41,951.57	45,530.22	48,491.96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,471.68	9,709.66	10,274.55	11,022.21	11,573.88
R,S,T,U. Jasa lainnya	16,068.57	17,963.16	19,294.49	20,609.68	22,288.53
Produk Domestik Regional Bruto	997,321.13	1,050,278.09	1,102,437.49	1,156,998.88	1,219,148.60

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Pada Tahun 2025, PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 tercatat sebesar Rp1.219.148,60 miliar. Sebagai lapangan usaha yang mendominasi perekonomian Jawa Tengah, PDRB Industri Pengolahan bernilai sebesar Rp389.026,51 miliar, menjadikannya sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah. Sektor utama lainnya yang memiliki peran signifikan adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

sebesar Rp175.700,39 miliar, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp139.530,40 miliar, serta Konstruksi sebesar Rp132.673,93 miliar.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Gambar 1.3 Laju dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2025

Dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2025 masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi sebesar 60,89 persen. Komponen terbesar berikutnya adalah Ekspor dengan kontribusi 40,33 persen dengan pertumbuhan sebesar 10,04 persen, dimana kuatnya pertumbuhan ekspor ini menunjukkan peningkatan permintaan dari luar daerah maupun luar negeri, sekaligus memperkuat kontribusi sektor produksi terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi sebesar 30,91 persen.

Tabel 1.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025 (Miliar Rupiah)

Kategori Pengeluaran	PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Miliar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	584,447.30	616,679.57	651,723.53	685,307.23	718,064.15
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,326.06	10,842.65	11,628.51	13,516.50	14,057.87
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	61,280.82	61,351.97	62,971.77	64,870.03	67,015.29
Pembentukan Modal Tetap Bruto	297,028.56	302,949.27	315,755.79	336,453.49	359,214.21
Perubahan Inventori	9,475.50	11,991.20	12,531.30	8,704.43	7,493.13
Ekspor Luar Negeri	104,222.20	115,030.49	104,053.81	117,267.52	133,212.43
Impor Luar Negeri	143,700.50	166,454.64	161,759.23	181,874.93	181,317.63



Kategori Pengeluaran	PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Miliar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Net Ekspor Antar Daerah	74,241.19	97,887.60	105,532.00	112,754.61	101,409.14
Produk Domestik Regional Bruto	997,321.13	1,050,278.09	1,102,437.49	1,156,998.88	1,219,148.60

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Pada Tahun 2025, seluruh komponen pengeluaran utama menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga meningkat dari Rp685.307,23 miliar menjadi Rp718.064,15 miliar, menunjukkan konsumsi domestik yang tetap kuat sebagai penopang utama ekonomi. Pengeluaran Konsumsi LNPRT juga naik dari Rp13.516,50 miliar menjadi Rp14.057,87 miliar, sementara Konsumsi Pemerintah meningkat dari Rp64.870,03 miliar menjadi Rp67.015,29 miliar.

Dari sisi investasi, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh dari Rp336.453,49 miliar menjadi Rp359.214,21 miliar, mencerminkan masih berlanjutnya aktivitas penanaman modal dan pembangunan fisik. Pada sektor eksternal, Ekspor Luar Negeri meningkat signifikan dari Rp117.267,52 miliar menjadi Rp133.212,43 miliar, sedangkan Impor Luar Negeri relatif stabil dari Rp181.874,93 miliar menjadi Rp181.317,63 miliar.

Tabel 1.3 Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025

Kategori Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.86	13.56	13.23	13.06	13.07
B. Pertambangan dan Penggalan	2.58	2.42	2.25	2.16	2.09
C. Industri Pengolahan	34.3	33.94	33.98	33.81	33.38
D. Pengadaan Listrik, Gas	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09
E. Pengadaan Air	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
F. Konstruksi	11.13	11.04	11.23	11.39	11.47
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.76	13.61	13.61	13.49	13.49
H. Transportasi dan Pergudangan	2.26	3.8	4.1	4.1	4.13
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.03	3.29	3.41	3.56	3.74



Kategori Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
J. Informasi dan Komunikasi	4.29	4.01	4.09	4.21	4.29
K. Jasa Keuangan	3.02	3.01	2.89	2.78	2.81
L. Real Estate	1.67	1.63	1.62	1.6	1.6
M,N. Jasa Perusahaan	0.4	0.4	0.41	0.43	0.44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.53	2.4	2.36	2.42	2.36
P. Jasa Pendidikan	4.55	4.23	4.16	4.29	4.37
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.97	0.92	0.92	0.93	0.93
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.48	1.57	1.59	1.63	1.7
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2021–2025, sektor yang paling mendominasi struktur perekonomian adalah Industri Pengolahan dengan kontribusi konsisten di atas 33 persen, yakni sebesar 34,3% pada 2021, 33,94% pada 2022, 33,98% pada 2023, 33,81% pada 2024, dan 33,38% pada 2025. Selain industri pengolahan, sektor yang juga memiliki kontribusi besar adalah Perdagangan Besar dan Eceran; dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 13,49% pada tahun 2025 serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang menyumbang 13,07%.

Tabel 1.4 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2025

Kategori Pengeluaran	Distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Persen)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	60.19	60.35	60.95	61.29	60.89
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.18	1.22	1.25	1.39	1.37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.1	6.54	6.38	6.25	6.12
Pembentukan Modal Tetap Bruto	31.78	30.69	29.99	30.53	30.91
Perubahan Inventori	0.84	0.99	1.02	0.68	0.56

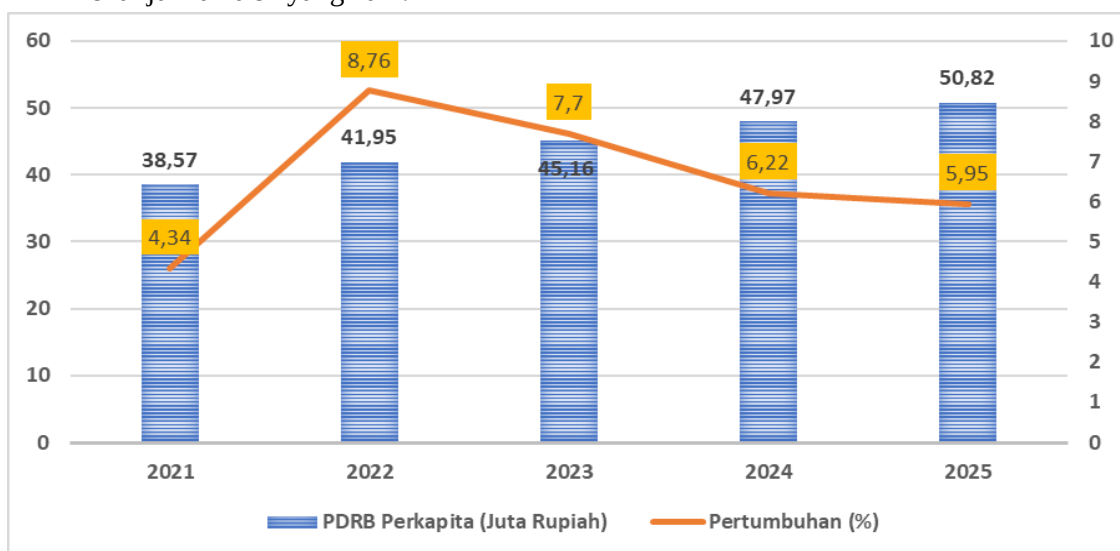
Ekspor Luar Negeri	11.19	11.73	9.46	10.04	10.96
Impor Luar Negeri	14.14	15.42	13.8	14.44	13.8
Net Ekspor Antar Daerah	1.86	3.89	4.75	4.26	2.99
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2026

Berdasarkan distribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku (ADHB), tiga komponen yang paling mendominasi adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor Luar Negeri. Pada tahun 2025, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor terbesar dengan porsi 60,89%, menegaskan bahwa perekonomian Jawa Tengah sangat ditopang oleh daya beli dan aktivitas belanja masyarakat. Komponen terbesar kedua adalah PMTB sebesar 30,91%. Sementara itu, ekspor luar negeri menyumbang 10,96%, menunjukkan kontribusi sektor eksternal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi meskipun porsinya masih jauh di bawah konsumsi domestik dan investasi.

1.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2023-2025, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2025 PDRB Per Kapita Jawa Tengah sebesar 50,82 Juta Rupiah mengalami pertumbuhan sebesar 5,95 persen dibanding dengan tahun 2024 yang sebesar 47,97 Juta Rupiah. PDRB Per kapita Jawa Tengah masih berada dibawah Nasional, namun selalu menunjukkan tren yang naik.

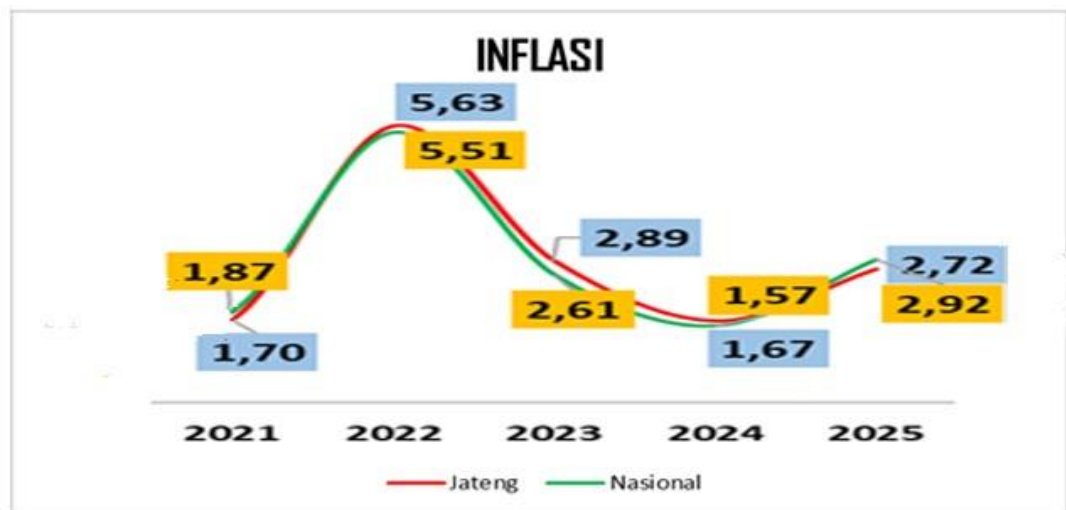


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026.

Gambar 1.4 PDRB Per Kapita Jawa Tengah Tahun 2021 s/d 2025

1.1.3. Inflasi

Pada tahun 2025, laju inflasi Jawa Tengah mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,72 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 1,67 persen. Meskipun meningkat, tingkat inflasi Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional, yang berada pada angka 2,92 persen. Peningkatan inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2025 masih dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok pengeluaran makanan dan minuman, yang secara historis menjadi penyumbang utama inflasi daerah. Selain kelompok makanan, kelompok pengeluaran lainnya juga turut memberikan andil terhadap inflasi, seiring dengan meningkatnya harga beberapa komoditas dan jasa khususnya kenaikan harga emas. Inflasi pada tahun 2025 mencerminkan adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh meningkatnya indeks beberapa kelompok pengeluaran, terutama pada komponen makanan dan minuman, meskipun tekanan inflasi relatif masih terkendali jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional.



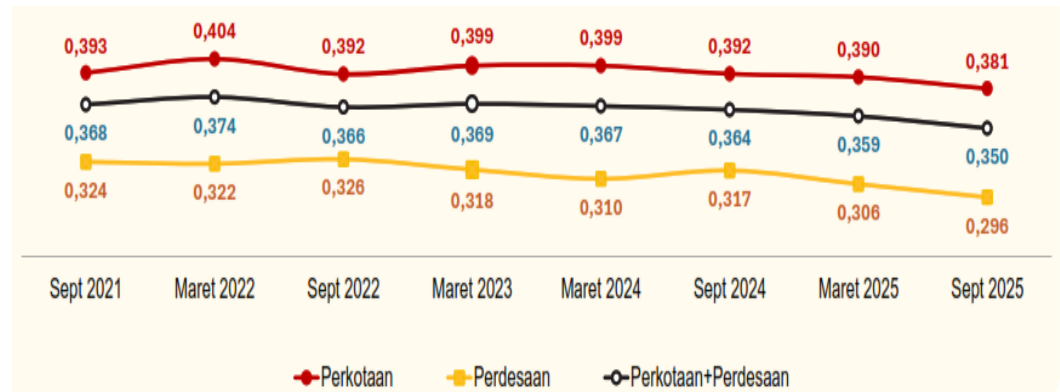
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026.

Gambar 1.5 Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021 s/d 2025 (%)

1.1.4. Indeks Gini

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk dengan nilai berkisar antara 0–1, di mana semakin tinggi nilainya menunjukkan ketimpangan yang semakin besar. Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah pada tahun 2025 menunjukkan kecenderungan membaik dibandingkan periode sebelumnya. Pada Maret 2025, Rasio Gini Jawa Tengah tercatat sebesar 0,359, lebih rendah dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,364, sehingga terjadi penurunan (perbaikan) ketimpangan sebesar 0,005 poin. Selanjutnya, pada September 2025, Rasio Gini kembali menurun menjadi 0,350, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah terus mengalami perbaikan sepanjang tahun 2025. Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan pada Maret 2025 sebesar 0,390, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,392, atau turun sebesar 0,002 poin. Sementara itu, di daerah pedesaan, rasio gini pada Maret 2025 tercatat

sebesar 0,306, lebih rendah dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,317, atau mengalami penurunan sebesar 0,011 poin. Pada September 2025, rasio gini perdesaan kembali menurun menjadi 0,296, sedangkan di perkotaan turun menjadi 0,381. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di Jawa Tengah pada tahun 2025 mengalami tren penurunan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Namun demikian, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan masih relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.



Sumber: BPS Jateng, 2025

Gambar 1.6 Gini Rasio Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

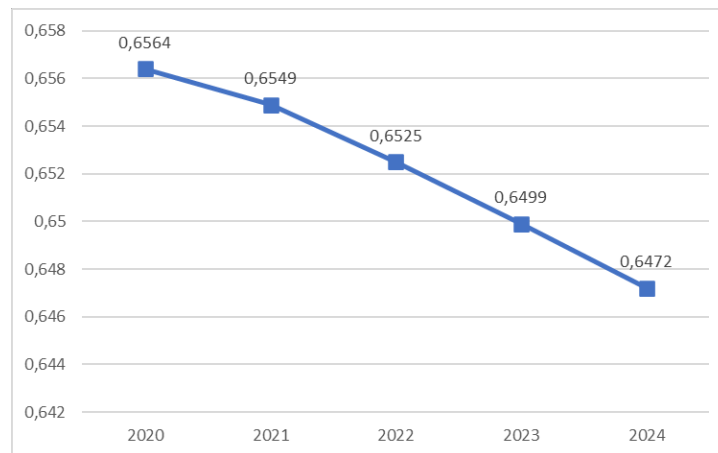
1.1.5. Indeks Williamson

Perbedaan sumber daya alam, keterampilan tenaga kerja, teknologi, dan akumulasi modal lainnya yang dimiliki oleh suatu wilayah telah mengakibatkan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi, heterogenitas karakteristik wilayah juga menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Analisis tingkat ketimpangan pembangunan menggunakan Indeks Williamson dengan menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar, alasannya karena yang diperbandingkan adalah tingkat pembangunan antar wilayah.

Data yang diperlukan untuk mengukur Indeks Williamson adalah dengan PDRB per kapita untuk setiap kabupaten/kota dan jumlah penduduk tiap kabupaten/kota. Bila indeks mendekati 0 (nol) artinya sangat merata, sedangkan semakin jauh dari 0 (nol) artinya sangat timpang.

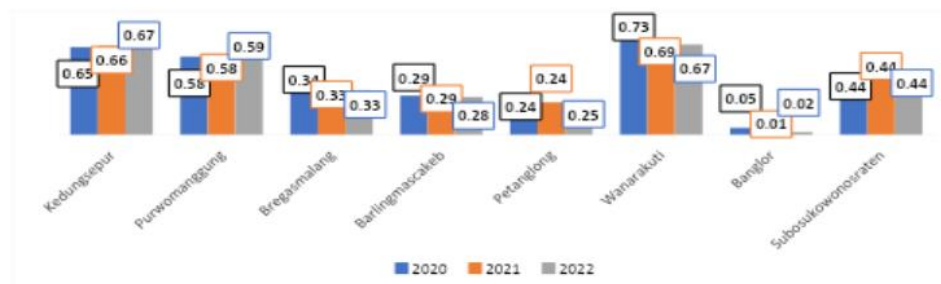
Ketimpangan pembangunan antar wilayah kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah selama 2020-2024 dianalisis menggunakan Indeks Williamson dan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan semakin melebar atau semakin merata dapat dilihat pada Gambar 1.7.

Upaya pemerintah dalam menurunkan ketimpangan telah berhasil pada tahun 2022-2024 yang mencapai 0,6472 dari sebelumnya 0,6525 pada tahun 2022. Pada tahun 2024, Indeks Williamson mengalami penurunan dengan besaran 0,6472 atau turun 0,009 poin. Jawa Tengah masih dalam keadaan pemulihan pasca pandemi tahun 2020. Disparitas indeks Williamson semakin mengecil dari 2020-2024. Ini menandakan penciptaan ekonomi riil Jawa Tengah semakin meningkat.



Sumber: BPS Jateng, 2025

Gambar 1.7 Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 1.8 Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Jika melihat Indeks Williamson berdasarkan wilayah pengembangan, pada tahun 2022 wilayah pengembangan Wanarakuti lebih tinggi dibandingkan wilayah pengembangan yang lainnya yaitu sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Wilayah pengembangan yang kategori ketimpangannya sedang adalah wilayah Purwomangung. Sementara itu Banglor memiliki Indeks Williamson yang paling rendah yang menandakan bahwa wilayah tersebut pembangunannya merata, dimana karakteristik daerahnya hampir mirip yaitu pertanian dan pariwisata.

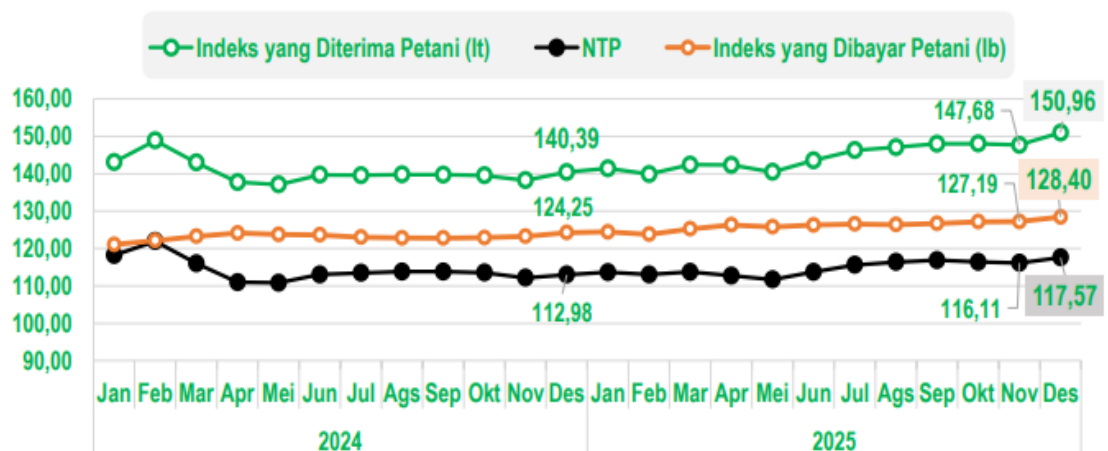
Ketimpangan ini terjadi karena masing-masing kabupaten/kota memiliki sumber daya alam dan infrastruktur yang berbeda-beda dimana hal tersebut menghasilkan pendapatan yang besar bagi daerah yang memilikinya. Seperti Kota Semarang sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan kemajuan perekonomiannya, serta menjadi tempat berkembangnya industri pengolahan, sektor jasa, dan juga tempat wisata. Kota Semarang memiliki berbagai fasilitas seperti pelabuhan antar pulau dan bandara, sehingga menjadi pusat perdagangan di Jawa Tengah.

Disisi lain Kabupaten Pemalang mempunyai PDRB per kapita terendah. Sektor yang berkontribusi menopang perekonomiannya adalah pertanian. Ini merupakan tantangan dan perlu usaha keras pemerintah untuk menciptakan iklim kondusif bagi penanaman modal di dalam maupun modal asing untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dan lebih menggali lagi potensi pertanian yang bisa menjadi produk unggulan dari Kabupaten Pemalang sehingga bisa menambah nilai tambah bruto wilayah tersebut. Dengan bertambahnya nilai tambah bruto diharapkan akan mampu menekan ketimpangan di Jawa Tengah.

1.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP)

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah mencatat Nilai Tukar Petani atau NTP pada Desember 2025 sebesar 117,57 persen lebih baik dari capaian Tahun 2024 sebesar 112,98. Capaian itu menjadi yang tertinggi ketiga di antara provinsi-provinsi lain se Pulau Jawa dibawah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun capaian tersebut masih dibawah capaian Nasional sebesar 125,35.

NTP merupakan indikator untuk melihat kemampuan atau daya beli petani di perdesaan. Di dalamnya terdapat perbandingan indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, serta menunjukkan daya tukar harga produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Secara ringkas, semakin tinggi NTP, maka kemampuan atau daya beli petani relatif semakin tinggi.



Keterangan: Angka NTP yang tersaji dalam grafik dihitung berdasarkan tahun dasar 2018

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

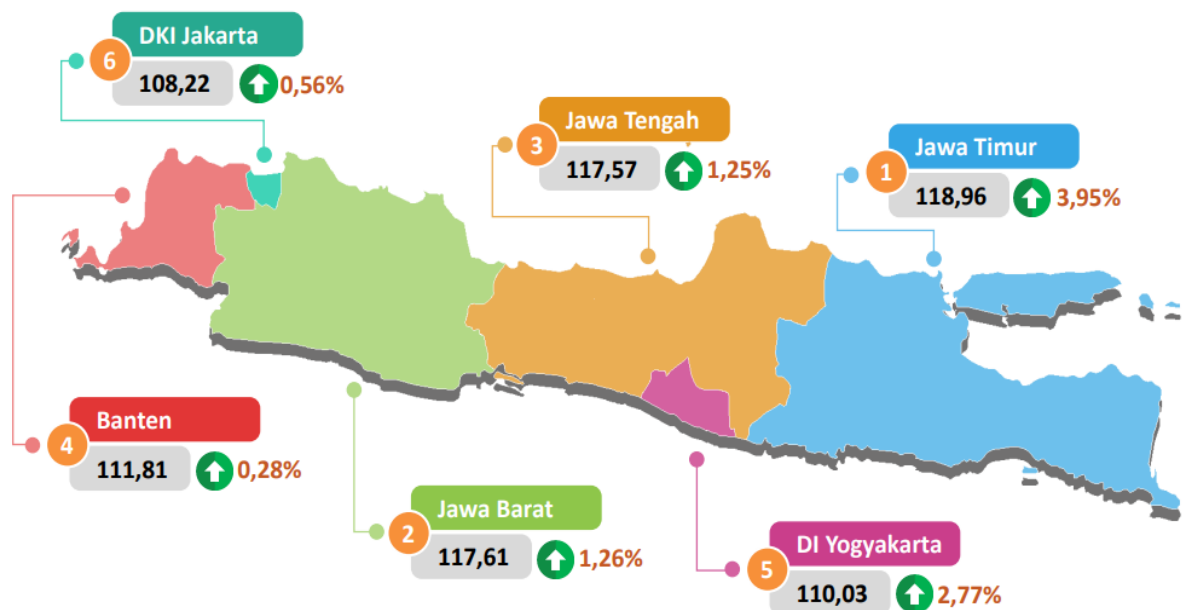
Gambar 1.9 Nilai Tukar Petani Jawa Tengah Tahun 2024-2025

Nilai Tukar Petani Jawa Tengah Desember 2025 sebesar 117,57 atau naik 1,25 persen dibanding NTP bulan sebelumnya sebesar 116,11. Kenaikan NTP disebabkan kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,22 persen lebih cepat dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,96 persen.

Subsektor yang mengalami kenaikan NTP adalah subsektor hortikultura sebesar 10,20 persen; subsektor peternakan sebesar 1,06 persen; dan subsektor perikanan sebesar 0,51 persen. Subsektor yang mengalami penurunan NTP adalah

subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 3,58 persen dan subsektor tanaman pangan sebesar 0,26 persen.

Pada Desember 2025, komoditas pertanian yang mengalami kenaikan harga antara lain cabai rawit, bawang merah, cabai merah, gabah, jagung, ayam ras pedaging, telur ayam ras, wortel, sapi potong, kacang tanah, kopi, tomat, kacang hijau, mangga, semangka, bandeng payau, petai, labu siam, ketela pohon, cabai hijau, dan brokoli. Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain tebu, salak, buncis, kol/kubis, kacang panjang, sawi hijau, bawang daun, melinjo, kambing, jengkol, ketimun, kelapa, nangka, udang laut, kentang, udang payau, kakao/coklat biji, pala biji, bawang putih, tongkol, dan karet.



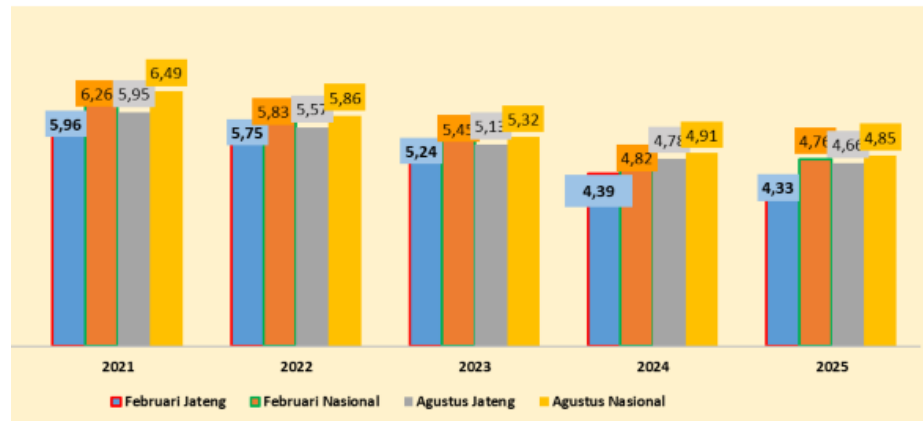
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 1.10 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Se Pulau Jawa Tahun 2025

Perkembangan Nilai Tukar Petani dari 38 provinsi yang diamati, pada Desember 2025 terdapat 23 provinsi mengalami kenaikan dan 15 provinsi lainnya mengalami penurunan. Kenaikan NTP tertinggi terjadi di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 5,60 persen dan penurunan NTP terdalam terjadi di Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 6,16 persen.

1.1.7. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pada Agustus 2025 TPT Jateng sebesar 4,66 persen, turun 0,12 persin jika dibandingkan TPT Agustus 2024. TPT Jateng Agustus 2025 berada dibawah TPT Nasional yaitu 4,85 persen. TPT Agustus 2025 Nasional mengalami penurunan dibanding TPT Agustus 2024 sebesar 0,06 persen.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 1.11

**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025
(Februari-Agustus)(%)**

1.1.8. Kemiskinan

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah dapat digambarkan melalui kondisi kemiskinan. Selama kurun waktu 2021–2025, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin Jawa Tengah tercatat sebesar 9,48 persen atau setara dengan 3.366,69 ribu orang, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 10,47 persen atau 3.704,33 ribu orang. Dengan demikian, terjadi penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,99 persen atau sekitar 337,64 ribu orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, tingkat kemiskinan Jawa Tengah juga menunjukkan penurunan sebesar 1,29 persen, dari 10,77 persen (3.791,50 ribu orang) pada tahun 2023 menjadi 9,48 persen (3.366,69 ribu orang) pada tahun 2025. Berdasarkan daerah tempat tinggal, selama periode 2024–2025, persentase penduduk miskin di perdesaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 1,42 persen, dari 11,34 persen (1.868,82 ribu orang) pada tahun 2024 menjadi 9,92 persen (1.619,97 ribu orang) pada tahun 2025. Jumlah penduduk miskin perdesaan berkurang sebanyak 248,85 ribu orang. Sementara itu, di wilayah perkotaan, persentase penduduk miskin pada tahun 2025 tercatat sebesar 9,10 persen atau 1.746,72 ribu orang, menurun sebesar 0,61 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 9,71 persen atau 1.835,51 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan berkurang sekitar 88,79 ribu orang. Secara keseluruhan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2025 mengalami perbaikan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, dengan penurunan kemiskinan yang lebih besar terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan wilayah perkotaan.



Tabel 1.5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah 2021-2025

Tahun	Penduduk Miskin					
	(ribu orang)			(%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + pedesaan
2021	1.908,33	2.201,43	4.109,75	10,58	13,07	11,79
2022	1.818,25	2.013,20	3.831,44	9,92	12,04	10,93
2023	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77
2024	1.835,51	1.868,82	3.704,33	9,71	11,34	10,47
2025	1.746,72	1.619,97	3.366,69	9,10	9,92	9,48

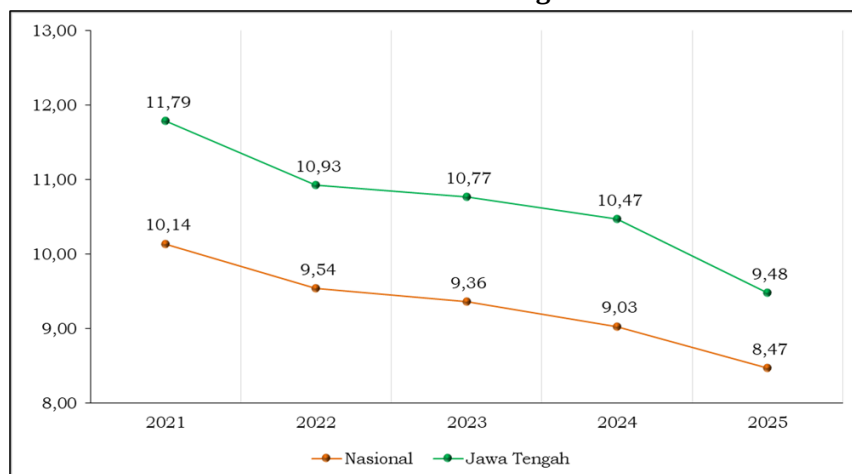
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025 (Rilis Periode Maret)

Catatan: Angka kemiskinan periode september 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode maret.

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.

Gambar 1.12

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

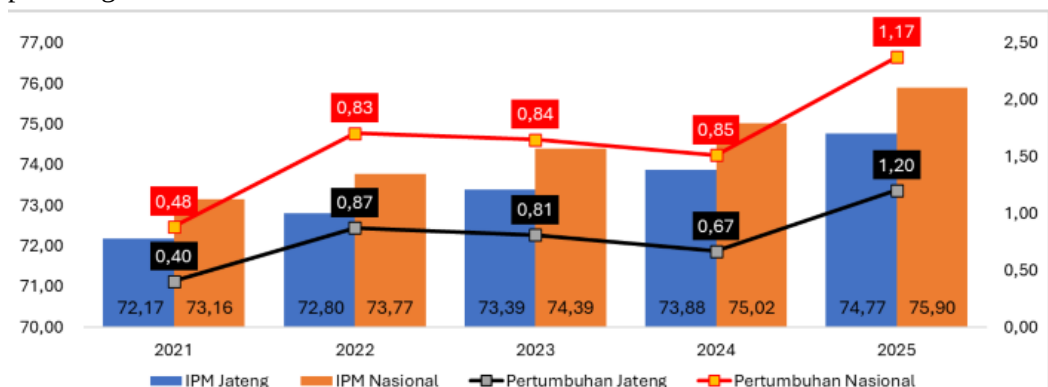


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

1.1.9. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata *geometric*, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024, namun masih berada di bawah capaian nasional, demikian pula dengan laju pertumbuhannya.

Pada tahun 2025, IPM Jawa Tengah naik 1,20 poin menjadi 74,77 dari sebelumnya 73,88. Kenaikan ini jauh lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2024 yang naik 0,67 poin. Semakin meningkatnya nilai IPM ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin lebih baik, sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia secara nasional.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 1.13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

1.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka menggerakkan jalannya roda organisasi guna pencapaian tujuan, pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya. Keuangan daerah merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan good governance dan clean government melalui tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 disusun dengan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

1.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Kebijakan dan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 yang menetapkan tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 yaitu mewujudkan “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”

1.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Seiring dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk periode tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilakukan penyelarasan dengan arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640 SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa semua daerah agar dapat menyesuaikan dan mengakomodir visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta kebijakan Asta Cita Presiden ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 dan tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut didukung dengan 6 (enam) misi yaitu:

1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;

6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Berdasarkan kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, ditetapkan arah dan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Tema pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat Prioritas Daerah (PD) tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

1.2.3. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui berbagai tahapan kebijakan, mulai dari: kebijakan perencanaan, target pendapatan dan upaya-upaya mencapai target.

1.2.3.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Implementasi Undang-Undang tersebut, adanya ketentuan mengenai opsen PKB dan BBNKB yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah.

1.2.3.2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dalam RPD Tahun 2024-2026 ditargetkan sebesar Rp22.457.882.196.000,00. Pada RKPD Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp23.549.642.794.000,00, dan APBD ditargetkan sebesar Rp24.486.526.112.000,00, sedangkan RKPD Perubahan Tahun 2025 Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp24.574.934.505.000,00 dan APBD Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp24.654.591.248.000,00 bertambah sebesar Rp168.065.136.000,00 atau 0,69% dari APBD Murni.

Perubahan APBD merupakan prosedur konstitusional yang lazim dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Secara garis besar, perubahan ini dilakukan karena adanya dinamika antara rencana awal dengan realitas di lapangan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai asumsi, penyesuaian kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dan kebijakan pada harga bahan bakar minyak, dan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif. Rincian target penerimaan pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:



Uraian	Anggaran (Rp)
PENDAPATAN	24.654.591.248.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.699.284.656.000,00
Pendapatan Pajak Daerah	12.459.303.870.000,00
Retribusi Daerah	2.172.596.928.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	690.155.713.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	377.228.145.000,00
PENDAPATAN TRANSFER	8.792.120.753.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.792.120.753.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	163.185.839.000,00
Pendapatan Hibah	25.505.460.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	137.680.379.000,00

1.2.3.3. Upaya - Upaya Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui upaya :

- Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung digitalisasi pelayanan pembayaran pajak;
- Penambahan titik layanan dengan mengoptimalkan pemberdayaan BUMDes, Samsat Corporate, BPR BKK, dan Badan Usaha lainnya (Samsat Budiman);
- Optimalisasi peran Kabupaten/Kota, desa, pemerintah pusat, dan dunia usaha lainnya (Samsat Corporate, Mitra Putra Bangsa);
- Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak (Gerakan Disiplin Pajak untuk Rakyat, Podcast Cara Hebat Informasikan Pajak dan Retribusi (CHIPS), *Lets Activate New Sakpole and Signal* (LANS), kerja sama dengan para influencer Jawa Tengah di media sosial) dan pelaksanaan *door to door*;
- Penerapan kebijakan penanganan piutang dan mempertahankan kepatuhan;
- Menyelenggarakan *Auto Show* serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia *International Auto Show* (GIAS) 2025;
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan);
- Pemutakhiran data objek retribusi, review tarif retribusi serta perbaikan tata kelola retribusi melalui Sistem Informasi Penatausahaan Retribusi (SIPENARI);
- Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
- Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
- Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah; dan



1. Optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah melalui revitalisasi dan kerjasama dengan investor sebagai sumber pendapatan daerah Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.

1.2.4. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer.

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada tema “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter” dengan fokus utama pada :

1. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
 - c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
 - d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
2. Dukungan prioritas nasional meliputi :
 - a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
 - b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
 - c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 - d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millennial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
 - e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 - f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 - g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan; dan
 - h. Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.



3. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20 persen untuk fungsi Pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
4. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's);
5. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
6. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan dan peraturan perundangan yang berlaku; serta
7. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Target belanja daerah dalam RPD Tahun 2024-2026 sebesar Rp26.782.587.536.000,00, Target belanja daerah dalam RKPD sebesar Rp23.911.942.794.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan sebesar Rp25.151.948.182.000,00. APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp24.848.826.112.000,00 selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp25.231.604.925.000,00 bertambah Rp382.778.813.000,00 atau 1,54%. Realisasi belanja daerah mengalami penurunan Rp3.315.288.368.547,00 atau (12,19%) apabila dibandingkan tahun 2024. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
BELANJA	25.231.604.925.000,00	23.871.838.129.256,00
BELANJA OPERASI	16.131.580.750.000,00	15.480.092.183.316,00
Belanja Pegawai	7.438.563.067.000,00	7.060.692.834.988,00
Belanja Barang dan Jasa	6.554.955.733.000,00	6.306.083.040.496,00
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	12.413.000.000,00	12.291.564.636,00
Belanja Hibah	2.093.048.950.000,00	2.068.441.743.196,00
Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000,00	32.583.000.000,00
BELANJA MODAL	1.998.205.719.000,00	1.795.558.675.999,00
Belanja Modal Tanah	13.932.478.000,00	12.461.205.439,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	689.803.271.000,00	636.745.519.547,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	297.656.452.000,00	205.077.624.565,00



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	867.929.940.000,00	815.425.857.816,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	127.390.078.000,00	124.550.819.262,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.493.500.000,00	1.297.649.370,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	7.192.800.000,00
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	7.192.800.000,00
BELANJA TRANSFER	7.076.818.456.000,00	6.588.994.469.941,00
Belanja Bagi Hasil	4.494.697.452.000,00	4.084.034.975.804,00
Belanja Bantuan Keuangan	2.582.121.004.000,00	2.504.959.494.137,00
Jumlah	25.231.604.925.000,00	23.871.838.129.256,00

1.2.5. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah Jawa Tengah untuk penyertaan modal kepada BUMD dilakukan realokasi berdasarkan pada peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal kepada BUMD

Target pembiayaan netto dalam RPD Tahun 2024-2026 sebesar Rp980.000.000.000,00, sedangkan target pembiayaan netto dalam RKPD sebesar Rp362.300.000.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan sebesar Rp577.013.677.000,00. APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp362.300.000.000,00 selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp577.013.677.000,00 bertambah Rp214.713.677.000,00 atau 59,26%. Realisasi pembiayaan netto Rp577.049.291.379,00 atau 100,01% mengalami penurunan Rp808.371.256.285,00 atau (58,35%) apabila dibandingkan tahun anggaran 2024. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Target penerimaan pembiayaan dalam RPD Tahun 2024-2026 sebesar Rp1.050.000.000.000,00, sedangkan target penerimaan pembiayaan dalam RKPD sebesar Rp432.300.000.000,00 kemudian mengalami penyesuaian pada RKPD Perubahan sebesar Rp577.013.677.000,00. APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp432.300.000.000,00 selanjutnya mengalami penyesuaian pada perubahan APBD menjadi Rp577.013.677.000,00 bertambah Rp144.713.677.000,00 atau 33,48%.



Realisasi penerimaan pembiayaan Rp577.049.291.379,00 atau 100,01% mengalami penurunan Rp829.071.256.285,00 atau (58,96%) apabila dibandingkan tahun anggaran 2024.

2. Target pengeluaran pembiayaan dalam RPD Tahun 2024-2026 sebesar Rp70.000.000.000,00, sedangkan target pengeluaran pembiayaan dalam RKPD Rp70.000.000.000,00 dan mengalami realokasi pada RKPD Perubahan. pada APBD tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp70.000.000.000,00 selanjutnya mengalami realokasi dalam perubahan APBD.

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

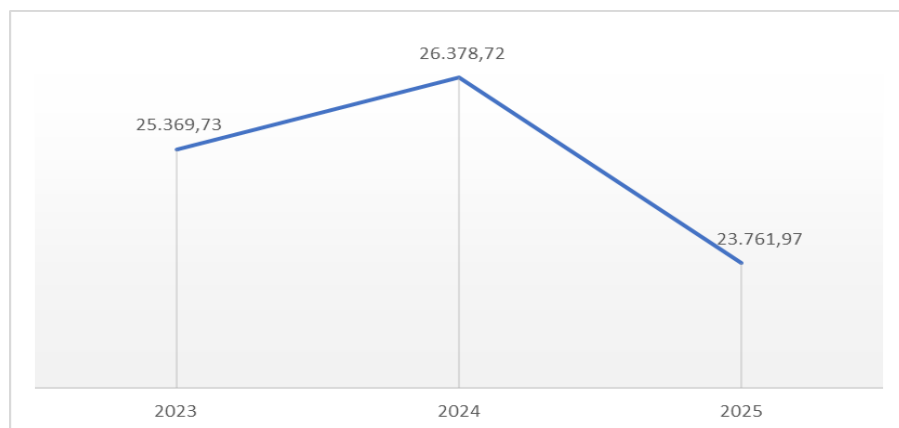
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.1.1. Pendapatan Daerah

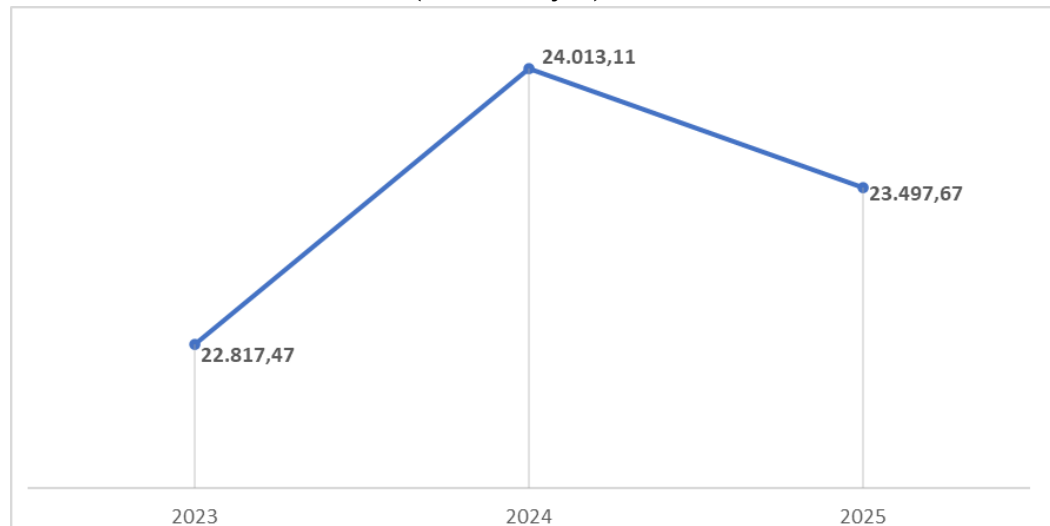
Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 secara signifikan dipengaruhi oleh berlakunya Undang-Undang HKPD dengan penerapan skema opsen dan kebijakan dana transfer dari pusat. Faktor lain yang mempengaruhi seperti pertumbuhan ekonomi, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya juga masih menjadi asumsi perhitungan. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan diarahkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Pendapatan daerah merupakan sumber dana (*source of fund*) dalam menjalankan program kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD tanpa harus dibayar kembali yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak, Retribusi, Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD), Pendapatan Transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Insentif Fiskal), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Penerapan opsen mengurangi pendapatan secara angka, namun tidak secara fiskal karena di sisi belanja juga berkurang senilai bagi hasil pajak yang berubah skema melalui opsen tersebut. Hal ini tercermin pada Pendapatan Asli Daerah tetap sebagai menyumbang porsi terbesar dengan Pendapatan Pajak sebagai kontributor utama. Selama tiga tahun terakhir, realisasi Pendapatan Daerah dapat tumbuh secara positif. Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2025 sebesar Rp23.761.968.977.877,00 dimana secara angka mengalami penurunan, namun secara kapasitas fiskal tidak terlalu berkurang karena penurunan tersebut mayoritas dari skema baru opsen yang di tahun sebelumnya pendapatan tersebut masih terkandung belanja bagi hasil bagian kabupaten/kota sedang skema opsen pendapatan berkurang namun sudah tidak termasuk belanja bagi hasil nya. Perkembangan Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.1
Grafik Tren Capaian Total Pendapatan Daerah 2023 – 2025 (dalam Milyar)

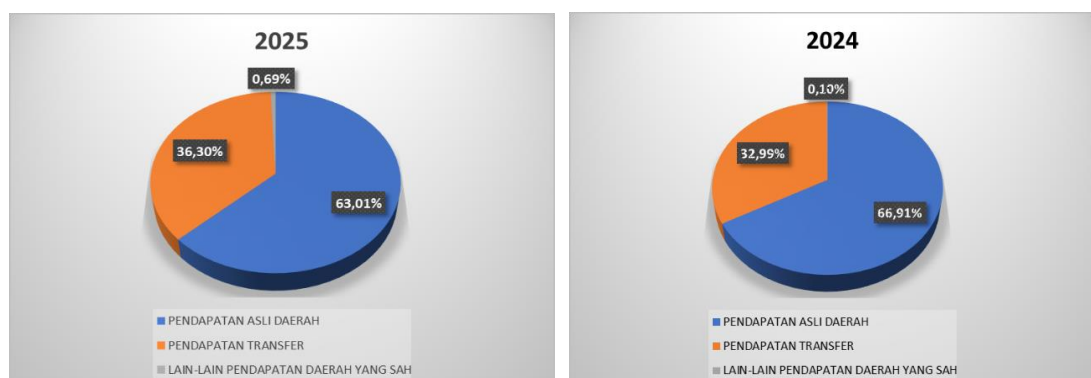


Gambar 3.2
Grafik Tren Capaian Total Pendapatan Daerah-Tanpa Opsen TA 2023 – 2025
(dalam Milyar)



Kontribusi terbesar pendapatan masih diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, diikuti Pendapatan Transfer kemudian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut:

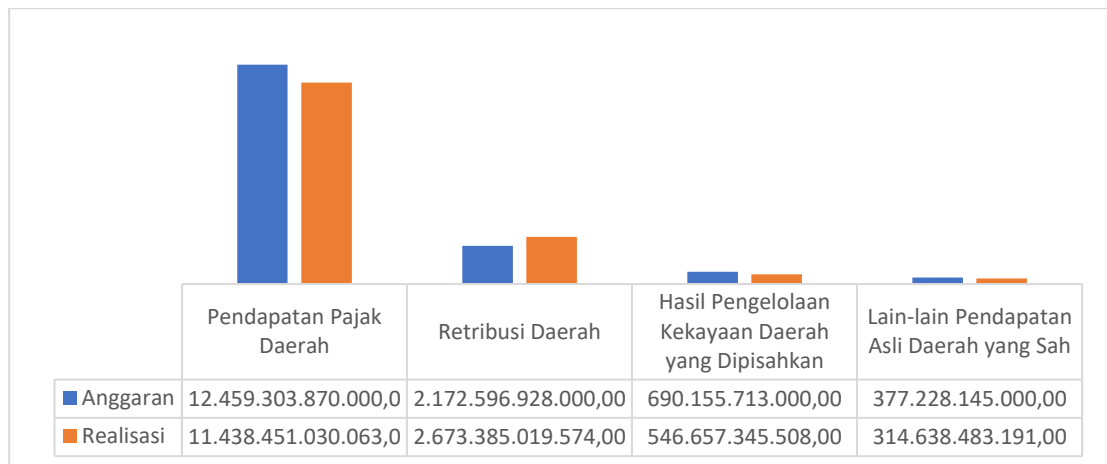
- Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 memberikan kontribusi sebesar 63,01%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 66,91%;
- Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 memberikan kontribusi sebesar 36,30%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 32,99%; dan
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 memberikan kontribusi sebesar 0,69%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,10%.



Gambar 3.3
Persandingan Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2025 dengan 2024

Pendapatan Daerah pada tahun 2025 ditargetkan sejumlah Rp24.654.591.248.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.761.968.977.877,00 atau 96,38%, mengalami penurunan 9,92% atau sejumlah Rp2.616.750.648.542,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Capaian pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 mencapai 95,37% dengan target sebesar Rp15.699.284.656.000,00 terealisasi sejumlah Rp14.973.131.878.336,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.677.805.035.168,00 atau 15,17% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024, terdiri dari:
 - Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp12.459.303.870.000,00 terealisasi Rp11.438.451.030.063,00 atau 91,81%, mengalami penurunan sejumlah Rp2.771.790.503.478,00 atau 19,51% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024;
 - Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp2.172.596.928.000,00 terealisasi Rp2.673.385.019.574,00 atau 123,05%, mengalami kenaikan sejumlah Rp354.563.504.756,00 atau 15,29% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp690.155.713.000,00 terealisasi Rp546.657.345.508,00 atau 79,21%, mengalami penurunan sejumlah Rp141.155.820.693,00 atau 20,52% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024;
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp377.228.145.000,00 terealisasi Rp314.638.483.191,00 atau 83,41%, mengalami penurunan sejumlah Rp119.422.215.753,00 atau 27,51% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

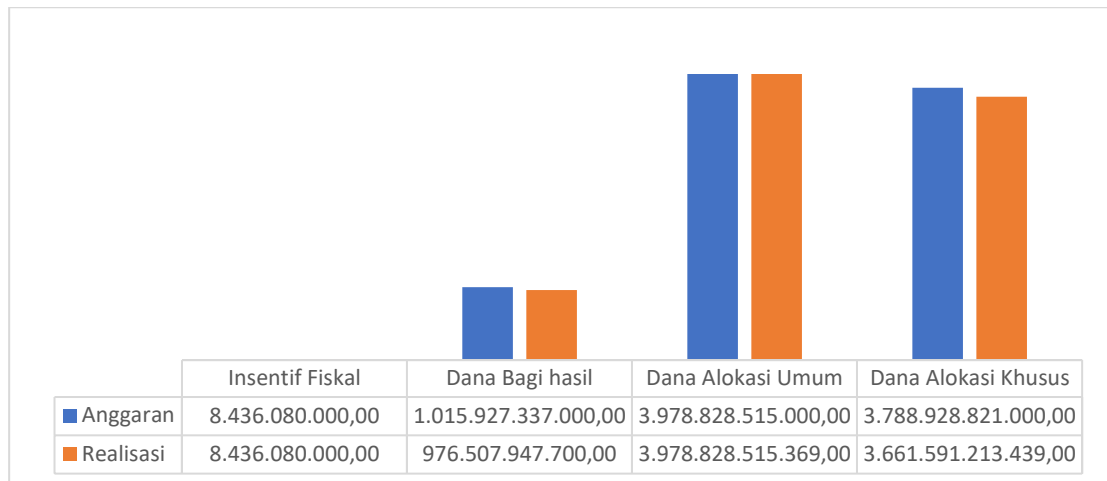


Gambar 3.4
Persandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025

Ketidaktercapaian pajak daerah sebagian besar dikarenakan lesunya volume penjualan kendaraan baru sehingga berdampak pada target pajak kendaraan bermotor dari objek baru dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan tidak tercapainya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan skema yang diambil dalam rangka mengembalikan porsi kepemilikan menjadi lebih dari 51% di Bank Jateng, yaitu sebagian deviden dari Bank Jateng dikonversi menjadi saham.

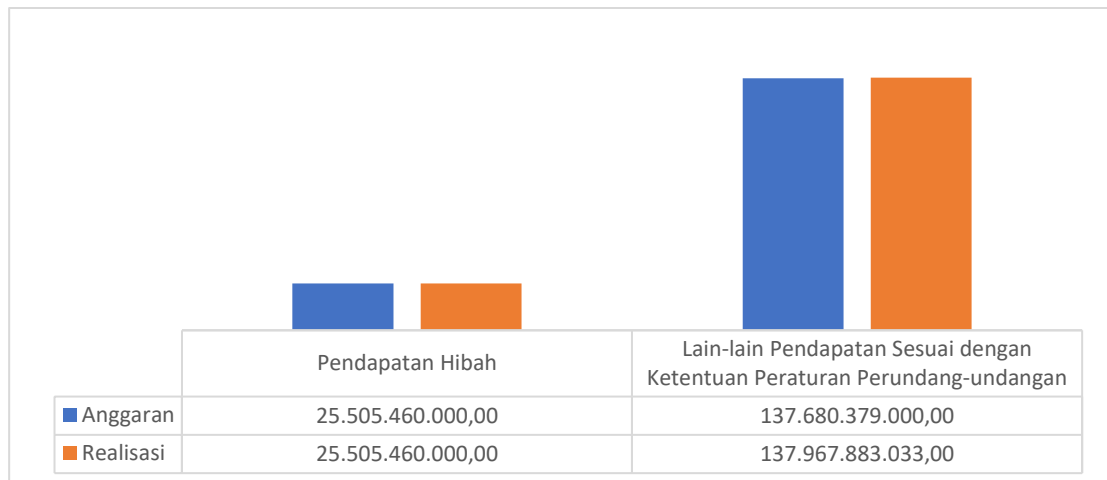


- b. Pendapatan Transfer ditargetkan Rp8.792.120.753.000,00 terealisasi Rp8.625.363.756.508,00 atau 98,10%, mengalami penurunan sejumlah Rp76.075.110.287,00 atau 0,87% apabila dibandingkan realisasi tahun 2024 terdiri dari:
1. Insentif Fiskal atau sebelumnya bernama Dana Insentif Daerah (DID). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu dengan kriteria utama antara lain penyajian laporan keuangan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penyampaian Perda APBD tepat waktu dan melaksanakan *e-Government (e-Budgeting dan e-Planning)*. Tujuan yaitu sebagai *reward* bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum, pemerintahan yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria umum dan kategori kinerja serta memacu daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan. Insentif Fiskal dalam APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sejumlah Rp8.436.080.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp8.436.080.000,00 atau 100,00%
 2. Dana Bagi Hasil pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sejumlah Rp1.015.927.337.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp976.507.947.700,00 atau 96,12%.
 3. Dana Alokasi Umum pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sejumlah Rp3.978.828.515.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp3.978.828.515.369,00 atau 100%.
 4. Dana Alokasi Khusus (Fisik) pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sejumlah Rp150.668.769.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp142.445.000.400,00 atau 94,54%.
 5. Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) pada APBD tahun anggaran 2025 ditargetkan sejumlah Rp3.638.260.052.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp3.519.146.213.039,00 atau 96,73%. Dana Alokasi Khusus non Fisik tersebut terdiri dari:
 - a. Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp2.163.630.770.067,00 (61,48%);
 - b. Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.346.551.341.530,00 (38,26%);
 - c. Bantuan Operasional Keluarga Berencana sebesar Rp200.000.000,00 (0,01%);
 - d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM sebesar Rp2.930.299.748,00 (0,08%);
 - e. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Rp4.944.719.044,00 (0,14%);
 - f. Bantuan Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar Rp536.640.000,00 (0,02%);
 - g. Bantuan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp352.442.650,00 (0,01%).



Gambar 3.5
Persandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan Rp163.185.839.000,00 terealisasi Rp163.473.343.033,00 atau 100,18% dari target. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sejumlah Rp137.129.496.913,00 atau 520,54% dibandingkan realisasi tahun 2024, terdiri dari:
- Pendapatan Hibah berasal dari Jasa Raharja ditargetkan sejumlah Rp25.505.460.000,00 terealisasi Rp25.505.460.000,00 atau 100,00%;
 - Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditargetkan sejumlah Rp137.680.379.000 terealisasi sejumlah Rp137.967.883.033,00 yang sebagian besar merupakan pengembalian hibah yang telah selesai digunakan.



Gambar 3.6
Persandingan Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2025

Adapun permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan antara lain sebagai berikut:

Permasalahan:



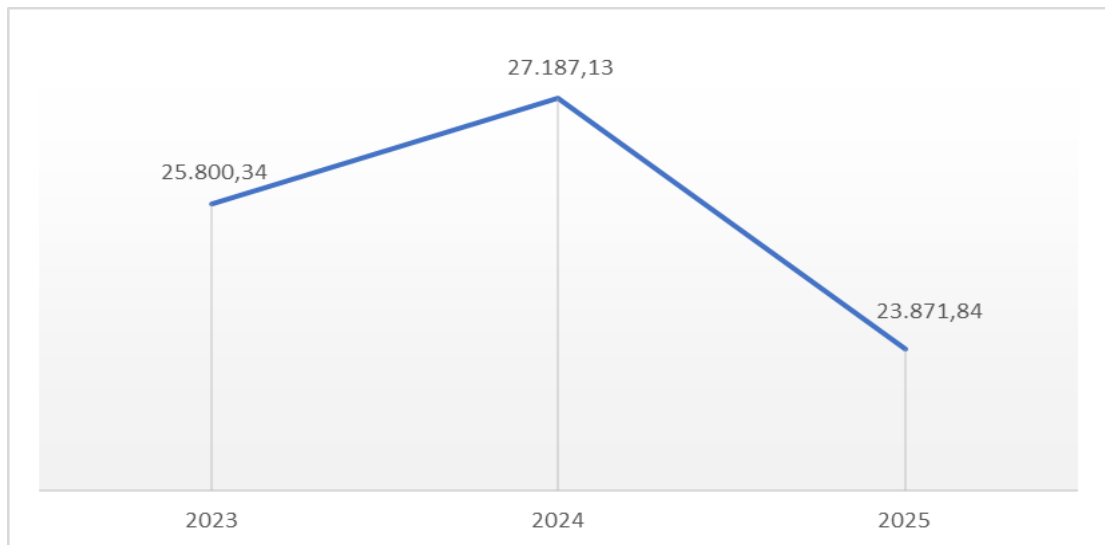
1. Lesunya daya beli masyarakat dan tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak belum optimal hal ini menimbulkan pertumbuhan objek kendaraan dibawah target dan angka piutang yang masih relatif besar;
2. Pendayagunaan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum optimal serta kondisi yang relatif tidak kompetitif apabila dibandingkan dengan penyedia jasa sejenis dalam satu kawasan yang sama;
3. Beberapa dampak kebijakan dalam pengelolaan BUMD seperti ditariknya relaksasi kredit pasca COVID sehingga diperlukan angka cadangan kerugian yang cukup besar dan beberapa BUMD masih perlu dioptimalkan kinerjanya, bahkan masih ada yang mengalami kerugian komulatif.

Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya pengelola pendapatan daerah, telah dilakukan beberapa upaya antara lain:

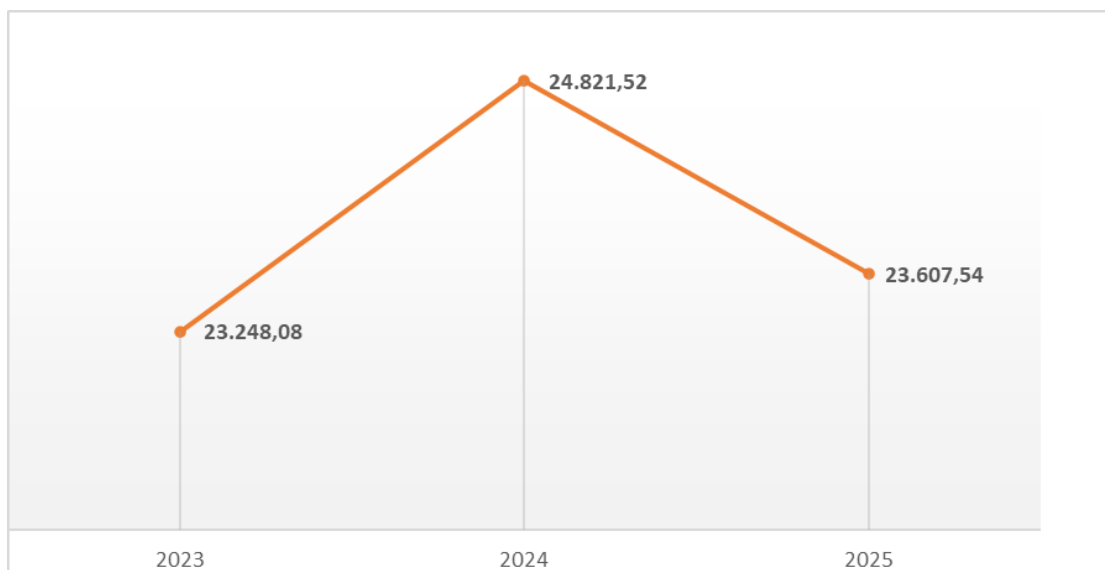
1. Membangun dan meningkatkan sinergi atau kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, badan usaha dan pihak lainnya dalam melakukan sosialisasi, pendataan, pelayanan pemungutan serta penagihan pajak daerah seiring dengan diberlakukannya ketentuan Opsen Pajak pada tahun 2025;
2. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pajak digital dan pelayanan pajak melalui pihak ketiga;
3. Melakukan sosialisasi kepatuhan membayar pajak bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan publikasi melalui berbagai platform media, baik media cetak, online maupun media sosial;
4. Mengupayakan pengelolaan aset/barang milik daerah secara lebih fokus dan profesional dengan melakukan penataan kelembagaan pengelola aset/barang milik daerah dan melakukan pemeliharaan serta pengamanan aset /barang milik daerah untuk meningkatkan daya saing;
5. Melakukan perbaikan tata kelola dan restrukturisasi unit bisnis BUMD.

3.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan setiap penggunaan dana (*use of fund*) untuk menjalankan program kegiatan yang telah tercantum pada APBD tanpa harus diterima kembali. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategori yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Penurunan belanja terjadi pada realisasi belanja transfer karena berubahnya skema belanja bagi hasil pajak daerah menjadi opsen bagi kabupaten/kota. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 3.7
Grafik Tren Realisasi Total Belanja Daerah 2023 – 2025 (dalam Milyar)



Gambar 3.8
Grafik Tren Realisasi Total Belanja Daerah-Tanpa Opsen TA 2023 – 2025 (dalam Milyar)

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada tema “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter” dengan fokus utama pada :

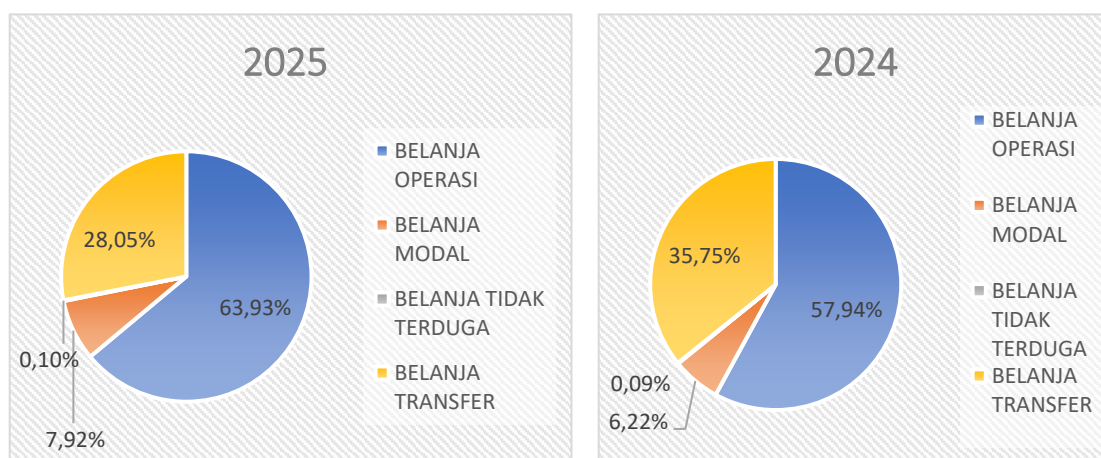
- a. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - 1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
 - 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;



- 3) Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
- 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
- b. Dukungan prioritas nasional meliputi :
 - 1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia;
 - 2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
 - 3) Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Algomaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
 - 4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Millennial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas;
 - 5) Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
 - 6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan;
 - 7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Judi dan Penyeludupan; dan
 - 8) Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur.
- c. Upaya pemenuhan alokasi belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20 persen untuk fungsi pendidikan; secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk fungsi kesehatan; serta mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
- d. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDG's);
- e. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
- f. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku; serta
- g. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Porsi Anggaran masing-masing Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar 63,93% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan anggaran 2024 sebesar 57,94%;
2. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebesar 7,92% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan anggaran 2024 sebesar 6,22%;
3. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sebesar 0,10% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan anggaran 2024 sebesar 0,09%;
4. Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar 28,05% dari total belanja daerah, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan anggaran 2024 sebesar 35,75%.



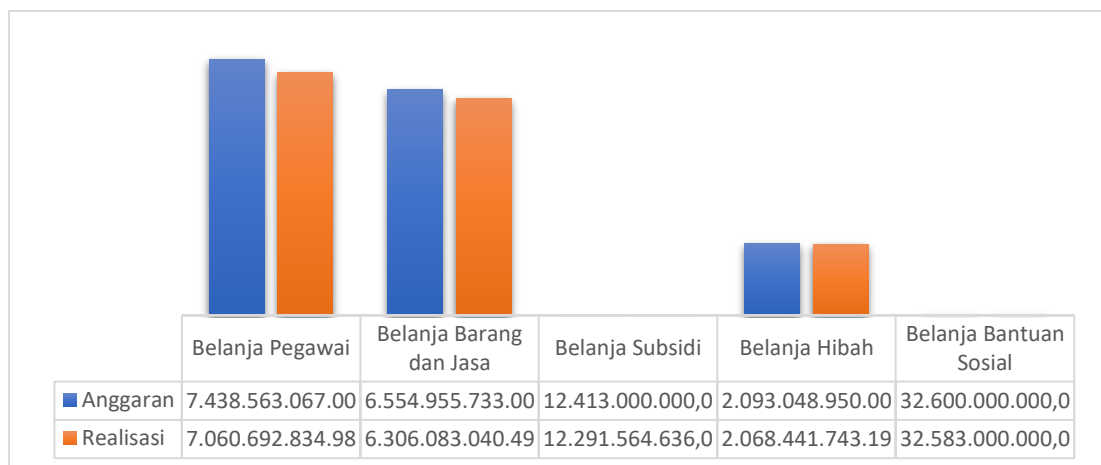
Gambar 3.9
Persandingan Persentase Anggaran Belanja Daerah Tahun 2025 dengan 2024

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sejumlah Rp25.231.604.925.000,00 terealisasi sejumlah Rp23.871.838.129.256,00 atau 94,61%, mengalami penurunan sejumlah Rp3.315.288.368.547,00 atau 12,19% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp27.187.126.497.803,00. Komponen Belanja Daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sejumlah Rp16.131.580.750.000,00 terealisasi sejumlah Rp15.480.092.183.316,00 atau 95,96% mengalami penurunan sejumlah Rp603.773.118.648,00 atau 3,75% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp16.083.865.301.964,00 terdiri dari:
 - Belanja Pegawai dianggarkan Rp7.438.563.067.000,00 terealisasi sejumlah Rp7.060.692.834.988,00 atau 94,92%, mengalami kenaikan sejumlah Rp37.608.310.143,00 atau 0,54% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024;
 - Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sejumlah Rp6.554.955.733.000,00 terealisasi sejumlah Rp6.306.083.040.496,00 atau 96,20%, mengalami kenaikan sejumlah Rp71.854.681.990,00 atau 1,15% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024;
 - Belanja Subsidi dianggarkan sejumlah Rp12.413.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp12.291.564.636,00 atau 99,02%, mengalami kenaikan sejumlah

Rp10.891.565.536,00 atau 777,97% apabila dibandingkan realisasi pada Tahun Anggaran 2024. Kenaikan terbesar pada peningkatan subsidi untuk stabilisasi harga agar inflasi dapat terkendali dan kerawanan pangan;

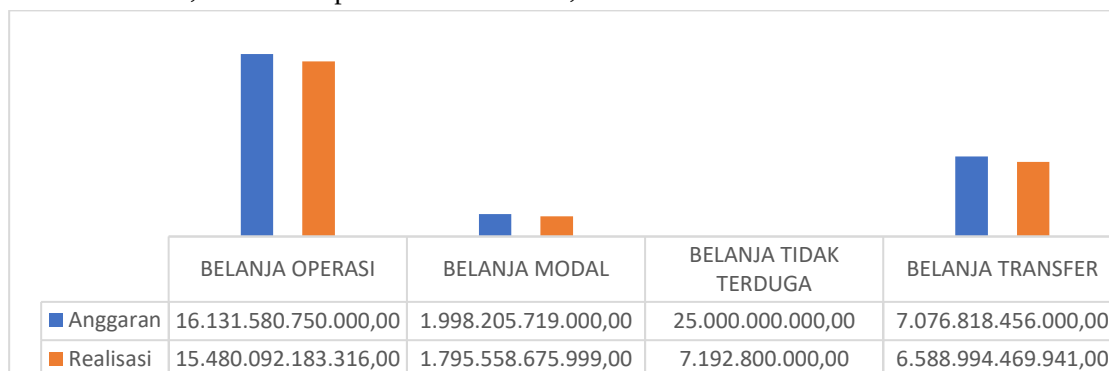
- Belanja Hibah dianggarkan sejumlah Rp2.093.048.950.000,00 terealisasi sejumlah Rp2.068.441.743.196,00 atau 98,82% mengalami penurunan sejumlah Rp711.701.679.858,00 atau 25,60% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024;
- Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sejumlah Rp32.600.000.000,00, terealisasi sejumlah Rp32.583.000.000,00 atau 99,95%, mengalami penurunan sejumlah Rp12.425.996.459,00 atau 27,61% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024.



Gambar 3.10
Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025

- b. Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sejumlah Rp1.998.205.719.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.795.558.675.999,00 atau 89,86% mengalami kenaikan sejumlah Rp62.474.579.005,00 atau 3,60% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.733.084.096.994,00. Perbandingan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 yaitu:
- Realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12.461.205.439,00 atau 89,44%, bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.221.207.440,00 mengalami kenaikan sebesar Rp239.997.999,00 atau 1,96%;
 - Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp636.745.519.547,00 atau 92,31%, bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp855.982.713.753,00 mengalami penurunan sebesar Rp219.237.194.206,00 atau 25,61%;
 - Realisasi belanja modal gedung bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp205.077.624.565,00 atau 68,90%, bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp411.044.257.004,00 mengalami penurunan sebesar Rp205.966.632.439,00 atau 50,11%;

- Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp815.425.857.816,00 atau 93,95%, bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp366.478.924.044,00 mengalami kenaikan sebesar Rp448.946.933.772,00 atau 122,50%;
 - Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp124.550.819.262,00 atau 97,77%, bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp86.434.858.953,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.115.960.309,00 atau 44,10%;
 - Realisasi belanja modal aset lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.297.649.370,00 atau 86,89%, bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp922.135.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp375.513.570,00 atau 40,72%.
- c. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Pada Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sejumlah Rp25.000.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp7.192.800.000,00 atau 28,77%, digunakan untuk penanganan bencana.
- d. Belanja Transfer dianggarkan sejumlah Rp7.076.818.456.000,00 terealisasi sejumlah Rp6.588.994.469.941,00 atau 93,11%, mengalami penurunan sejumlah Rp2.770.956.828.404,00 atau 29,60% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024, penurunan tersebut dikarenakan belanja bagi hasil PKB dan BBNKB ke Kabupaten/Kota menjadi skema opsen. Realisasi belanja transfer terdiri dari:
- Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sejumlah Rp4.494.697.452.000,00 terealisasi sejumlah Rp4.084.034.975.804,00 atau 90,86%, mengalami penurunan sejumlah Rp2.250.509.894.417,00 atau 35,53% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024;
 - Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sejumlah Rp2.582.121.004.000,00 terealisasi sejumlah Rp2.504.959.494.137,00 atau 97,01%, mengalami penurunan sejumlah Rp520.446.933.987,00 atau 17,20% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2024. Belanja ini terdiri dari:
 1. Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dianggarkan Rp589.655.055.000,00 terealisasi 92,01% atau Rp542.528.545.137,00;
 2. Belanja bantuan keuangan desa dianggarkan Rp1.992.465.949.000,00 terealisasi 98,49% atau Rp1.962.430.949.000,00.



Gambar 3.11
Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



Adapun permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahan masalah dalam pengelolaan belanja antara lain sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Adanya kebijakan mengenai Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 setelah penetapan APBD Tahun 2025; dan
2. Belum tertibnya pengelola keuangan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) dan Anggaran Kas.

Upaya-upaya dan alternatif pemecahan masalah yang telah dilakukan antara lain :

1. Melakukan sinkronisasi program kegiatan pusat dan daerah dan melakukan realokasi serta efisiensi belanja rutin sehingga output dan outcome tercapai; dan
2. Melakukan pembinaan dan verifikasi dalam penyusunan RKO dan anggaran kas SKPD sehingga pengelola keuangan SKPD dalam merealisasikan dana memperhatikan waktu pelaksanaan maupun ketersediaan kas.

3.1.3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan daerah dan belanja daerah, terdapat juga komponen pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Masih sama dengan tahun sebelumnya, penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 diarahkan pada pemanfaatan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.

Pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan sejumlah Rp577.013.677.000,00 dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp577.049.291.379,00 atau 100,01% mengalami penurunan sebesar Rp829.071.256.285,00 atau 58,96% apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Penurunan tersebut merupakan pencairan Dana Cadangan yang pada tahun 2024 digunakan untuk Pemilihan Umum sedang pada tahun 2025 belum menghimpun Dana Cadangan. Setelah mendapatkan nilai realisasi pada Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka SILPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp467.180.140.000,00.



3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program pada SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program Kegiatan pada masing-masing SKPD tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp14.316.363.708.000,00 realisasi sebesar Rp13.627.281.170.112,00 atau 95,19% yang dilaksanakan oleh 6 Urusan, yaitu :

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.638.182.450.000,00 realisasi sebesar Rp8.287.069.010.518,00 atau 95,94% yang terdiri dari 10 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	5.241.010.512.000,00	4.990.096.480.372,00	95,21	99,99
2	Program Pengelolaan Pendidikan	3.361.891.269.000,00	3.263.009.476.231,00	97,06	99,95
3	Program Pengembangan Kurikulum	458.646.000,00	401.193.925,00	87,47	100
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	851.994.000,00	796.455.000,00	93,48	100
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	622.844.000,00	520.857.430,00	83,63	100
6	Program Pengembangan Kebudayaan	6.227.041.000,00	5.872.639.432,00	94,31	100
7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	22.786.072.000,00	22.165.827.000,00	97,28	100
8	Program Pembinaan Sejarah	574.051.000,00	517.735.500,00	90,19	100
9	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	857.240.000,00	797.090.624,00	92,98	100
10	Program Pengelolaan Permuseuman	2.902.781.000,00	2.891.255.004,00	99,60	100
	JUMLAH	8.638.182.450.000,00	8.287.069.010.518,00	95,94	99,97

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp3.828.173.206.000,00 realisasi sebesar Rp3.577.234.376.096,00 atau 93,44% yang dilaksanakan oleh 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

1.02.01 DINAS KESEHATAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp587.814.479.000,00 realisasi sebesar Rp558.030.568.263,00 atau 94,93% yang terdiri dari 5 program, yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	136.015.969.000,00	128.388.145.910,00	94,39	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	449.368.779.000,00	427.442.344.783,00	95,12	99,89
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	957.635.000,00	891.856.403,00	93,13	100
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	164.329.000,00	69.969.200,00	42,58	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.307.767.000,00	1.238.251.967,00	94,68	100
	JUMLAH	587.814.479.000,00	558.030.568.263,00	94,93	100

1.02.02 RSUD Dr. MOEWARDI

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSUD Dr. Moewardi sebesar Rp1.357.809.574.000,00 realisasi sebesar Rp1.320.689.251.529,00 atau 97,27% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.298.824.889.000,00	1.268.670.116.683,00	97,68	99,01
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	58.984.685.000,00	52.019.134.846,00	88,19	100
	JUMLAH	1.357.809.574.000,00	1.320.689.251.529,00	97,27	99,98

1.02.03 RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebesar Rp948.803.352.000,00 realisasi sebesar Rp848.586.521.236,00 atau 89,44% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	932.836.273.000,00	833.601.800.562,00	89,36	90,49
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	15.967.079.000,00	14.984.720.674,00	93,85	100
	JUMLAH	948.803.352.000,00	848.586.521.236,00	89,44	90,65



1.02.04 RSUD Dr. ADHYATMA, MPH SEMARANG

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang sebesar Rp329.782.613.000,00 realisasi sebesar Rp296.522.630.690,00 atau 89,91% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	320.782.613.000,00	287.877.775.690,00	89,74	98,35
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.000.000.000,00	8.644.855.000,00	96,05	100
	JUMLAH	329.782.613.000,00	296.522.630.690,00	89,91	98,40

1.02.05 RSUD Dr. REHATTA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSUD Dr. Rehatta Jepara sebesar Rp143.092.590.000,00 realisasi sebesar Rp137.774.573.131,00 atau 96,28% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	111.957.105.000,00	107.895.165.637,00	96,37	99,40
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	30.874.646.000,00	29.623.006.826,00	95,95	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	82.847.000,00	82.685.671,00	99,81	100
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	177.992.000,00	173.714.997,00	97,60	100
	JUMLAH	143.092.590.000,00	137.774.573.131,00	96,28	99,53

1.02.06 RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp172.220.159.000,00 realisasi sebesar Rp150.452.573.248,00 atau 87,36% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	146.456.606.000,00	125.332.367.075,00	85,58	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	25.688.084.000,00	25.050.723.673,00	97,52	100



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	75.469.000,00	69.482.500,00	92,07	100
	JUMLAH	172.220.159.000,00	150.452.573.248,00	87,36	100

1.02.07 RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSJD Dr. Arif Zainudin sebesar Rp146.040.806.000,00 realisasi sebesar Rp131.523.971.709,00 atau 90,06% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	126.607.356.000,00	114.199.896.996,00	90,20	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	19.433.450.000,00	17.324.074.713,00	89,15	94,73
	JUMLAH	146.040.806.000,00	131.523.971.709,00	90,06	99,30

1.02.08 RSJD Dr. RM SOEDJARWADI

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSJD Dr. Rm Soedjarwadi sebesar Rp142.609.633.000,00 realisasi sebesar Rp133.654.286.290,00 atau 93,72% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	113.063.404.000,00	105.152.725.762,00	93,00	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	29.234.777.000,00	28.190.114.528,00	96,43	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	65.888.000,00	65.888.000,00	100	100
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	245.564.000,00	245.558.000,00	100	100
	JUMLAH	142.609.633.000,00	133.654.286.290,00	93,72	100

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.353.640.878.000,00 realisasi sebesar Rp1.286.704.138.386,00 atau 95,06% yang dilaksanakan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :



1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya sebesar Rp1.062.553.158.000,00 realisasi sebesar Rp1.019.417.603.716,00 atau 95,94% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	96.872.387.000,00	91.307.176.945,00	94,26	99,96
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	88.554.782.000,00	85.049.967.911,00	96,04	100
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	364.039.000,00	332.762.000,00	91,41	100
4	Program Penataan Bangunan Gedung	45.795.822.000,00	41.816.393.703,00	91,31	97,05
5	Program Penyelenggaraan Jalan	827.223.417.000,00	797.228.893.131,00	96,37	99,93
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	3.742.711.000,00	3.682.410.026,00	98,39	100
	JUMLAH	1.062.553.158.000,00	1.019.417.603.716,00	95,94	99,81

1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang sebesar Rp291.087.720.000,00 realisasi sebesar Rp267.286.534.670,00 atau 91,86% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	85.942.871.000,00	81.628.664.642,00	94,98	100
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	201.975.653.000,00	182.714.094.363,00	90,46	100
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.169.196.000,00	2.943.775.665,00	92,89	100
	JUMLAH	291.087.720.000,00	267.286.534.670,00	91,82	100

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp47.185.007.000,00 realisasi sebesar Rp46.391.178.837,00 atau 98,32% yang terdiri dari 8 program, yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.601.937.000,00	17.966.434.984,00	96,58	100
2	Program Pengembangan Perumahan	24.128.017.000,00	24.051.869.611,00	99,68	100
3	Program Kawasan Permukiman	2.950.611.000,00	2.911.968.863,00	98,69	100
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	398.605.000,00	396.397.129,00	99,45	100
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	116.447.000,00	115.437.000,00	99,13	100
6	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	246.991.000,00	246.934.370,00	99,98	100
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	411.546.000,00	371.335.000,00	90,23	100
8	Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	330.853.000,00	330.801.880,00	99,98	100
	JUMLAH	47.185.007.000,00	46.391.178.837,00	98,32	100

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp40.733.834.000,00 realisasi sebesar Rp37.293.283.862,00 atau 91,55% yang dilaksanakan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp21.743.274.000,00 realisasi sebesar Rp19.642.572.590,00 atau 90,34% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.244.681.000,00	16.826.217.756,00	97,57	100
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.444.003.000,00	2.761.765.834,00	62,15	67,31
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	54.590.000,00	54.589.000,00	100	100
	JUMLAH	21.743.274.000,00	19.642.572.590,00	90,34	93,32

1.05.02 SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp18.990.560.000,00 realisasi sebesar Rp17.650.711.272,00 atau 92,94% yang terdiri dari 2 program, yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.528.532.000,00	14.214.847.841,00	91,54	100
2	Program Penanggulangan Bencana	3.462.028.000,00	3.435.863.431,00	99,24	100
	JUMLAH	18.990.560.000,00	17.650.711.272,00	92,94	100

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1.06.01 DINAS SOSIAL

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dialokasikan pada Dinas Sosial sebesar Rp408.448.333.000,00 realisasi sebesar Rp392.589.182.413,00 atau 96,12% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	153.970.223.000,00	146.011.986.864,00	94,83	100
2	Program Pemberdayaan Sosial	9.395.763.000,00	7.976.199.500,00	84,89	100
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	129.351.000,00	93.481.600,00	72,27	100
4	Program Rehabilitasi Sosial	74.889.094.000,00	73.264.676.773,00	97,83	100
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	164.746.610.000,00	160.046.643.600,00	97,15	100
6	Program Penanganan Bencana	4.929.673.000,00	4.810.046.126,00	97,57	100
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	387.619.000,00	386.147.950,00	99,62	100
	JUMLAH	408.448.333.000,00	392.589.182.413,00	96,12	100

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp1.085.595.247.000,00 realisasi sebesar Rp1.052.759.791.804,00 atau 96,98% yang dilaksanakan oleh 11 Urusan, yaitu :

2.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp94.912.260.000,00 realisasi sebesar Rp90.711.622.469,00 atau 95,57% yang terdiri dari 7 program, yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	79.907.080.000,00	76.370.473.371,00	95,57	100
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	143.155.000,00	137.322.830,00	95,93	100
3	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.052.222.000,00	9.717.809.176,00	96,67	100
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.561.617.000,00	1.520.932.436,00	97,39	100
5	Program Hubungan Industrial	1.160.639.000,00	987.761.685,00	85,10	100
6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	1.949.837.000,00	1.841.996.946,00	94,47	100
7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	137.710.000,00	135.326.025,00	98,27	100
	JUMLAH	94.912.260.000,00	90.711.622.469,00	95,57	100

2.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp20.811.523.000,00 realisasi sebesar Rp18.944.079.230,00 atau 91,03% yang terdiri dari 10 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.150.329.000,00	14.346.147.049,00	88,83	100
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	990.325.000,00	985.387.656,00	99,50	100
3	Program Perlindungan Perempuan	1.445.555.000,00	1.406.597.769,00	97,31	100
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	93.683.000,00	93.584.760,00	99,90	100
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	89.590.000,00	86.811.348,00	96,90	100
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	596.431.000,00	596.424.000,00	100	100
7	Program Perlindungan Khusus Anak	357.999.000,00	345.477.594,00	96,50	100
8	Program Pengendalian Penduduk	112.524.000,00	112.523.500,00	100	100
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	479.426.000,00	479.234.424,00	99,96	100
10	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	495.661.000,00	491.891.130,00	99,24	100
	JUMLAH	20.811.523.000,00	18.944.079.230,00	91,03	100

2.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang dialokasikan



pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp47.104.866.000,00 realisasi sebesar Rp45.964.951.803,00 atau 97,58% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.316.283.000,00	18.251.737.083,00	94,49	99,82
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	18.903.525.000,00	18.851.154.047,00	99,72	100
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	7.055.935.000,00	7.045.174.098,00	99,85	100
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.829.123.000,00	1.816.886.575,00	99,33	100
	JUMLAH	47.104.866.000,00	45.964.951.803,00	97,58	99,93

2.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2.04.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp145.556.560.000,00 realisasi sebesar Rp139.977.544.259,00 atau 96,17% yang terdiri dari 13 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	130.720.434.000,00	125.271.685.218,00	95,83	100
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	322.986.000,00	322.255.162,00	99,77	100
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.734.292.000,00	1.721.365.071,00	99,25	100
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	681.509.000,00	677.756.510,00	99,45	100
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	25.331.000,00	25.323.440,00	99,97	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	291.345.000,00	290.990.809,00	99,88	100
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	773.364.000,00	767.564.624,00	99,25	100
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	123.428.000,00	123.303.153,00	99,90	100
9	Program Pengelolaan Persampahan	331.520.000,00	307.643.769,00	92,80	100
10	Program Pengelolaan Hutan	8.610.955.000,00	8.548.853.536,00	99,28	100
11	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	874.880.000,00	861.690.829,00	98,49	100
12	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	858.077.000,00	853.390.270,00	99,45	100
13	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	208.439.000,00	205.721.868,00	98,70	100
	JUMLAH	145.556.560.000,00	139.977.544.259,00	96,17	100



2.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.05.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar sebesar Rp25.601.448.000,00 realisasi sebesar Rp23.920.178.934,00 atau 93,43% yang terdiri dari 8 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.794.054.000,00	18.296.442.991,00	92,43	100
2	Program Pendaftaran Penduduk	156.622.000,00	156.316.022,00	99,80	100
3	Program Pencatatan Sipil	154.154.000,00	153.799.945,00	99,77	100
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	134.061.000,00	133.999.978,00	99,95	100
5	Program Penataan Desa	10.669.000,00	10.651.000,00	99,83	100
6	Program Peningkatan Kerjasama Desa	353.476.000,00	352.895.509,00	99,84	100
7	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.072.724.000,00	1.070.177.478,00	99,76	100
8	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.925.688.000,00	3.745.896.011,00	95,42	100
	JUMLAH	25.601.448.000,00	23.920.178.934,00	93,43	100

2.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

2.06.01 DINAS PERHUBUNGAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp211.929.889.000,00 realisasi sebesar Rp207.139.972.066,00 atau 97,74% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	64.239.972.000,00	60.844.811.329,00	94,71	100
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	145.840.735.000,00	144.462.835.697,00	99,06	100
3	Program Pengelolaan Pelayaran	774.340.000,00	760.595.450,00	98,22	100
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.074.842.000,00	1.071.729.590,00	99,71	100
	JUMLAH	211.929.889.000,00	207.139.972.066,00	97,74	100



2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.07.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp98.660.313.000,00 realisasi sebesar Rp96.329.157.359,00 atau 97,64% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	28.140.911.000,00	26.984.189.592,00	95,89	100
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	24.392.986.000,00	24.167.286.549,00	99,07	100
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	42.797.403.000,00	41.875.849.362,00	97,85	100
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial	877.083.000,00	874.174.142,00	99,67	100
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2.451.930.000,00	2.427.657.714,00	99,01	100
	JUMLAH	98.660.313.000,00	96.329.157.359,00	97,64	100

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.08.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp31.970.589.000,00 realisasi sebesar Rp30.627.921.562,00 atau 95,80 % yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	24.802.590.000,00	23.518.143.161,00	94,82	100
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	740.384.000,00	734.959.778,00	99,27	100
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	564.392.000,00	563.484.130,00	99,84	100
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.149.690.000,00	1.133.994.004,00	98,63	100
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.645.647.000,00	2.618.081.756,00	98,96	100
6	Program Pengembangan UMKM	2.067.886.000,00	2.059.258.733,00	99,58	100
	JUMLAH	31.970.589.000,00	30.627.921.562,00	95,80	100

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

2.09.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar



Rp22.012.257.000,00 realisasi sebesar Rp21.213.439.683,00 atau 96,37% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.677.177.000,00	17.904.793.039,00	95,86	100
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	350.519.000,00	349.077.340,00	99,59	100
3	Program Promosi Penanaman Modal	1.091.991.000,00	1.073.813.310,00	98,34	100
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.104.042.000,00	1.100.535.884,00	99,68	100
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	365.326.000,00	365.162.800,00	99,96	100
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	423.202.000,00	420.057.310,00	99,26	100
	JUMLAH	22.012.257.000,00	21.213.439.683,00	96,37	100

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

2.10.01 DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp353.139.046.000,00 realisasi sebesar Rp346.283.801.082,00 atau 98,06% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.317.671.000,00	45.217.224.217,00	93,58	100
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	12.326.093.000,00	12.061.564.340,00	97,85	100
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	278.462.120.000,00	275.759.814.617,00	99,03	100
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6.686.674.000,00	6.559.121.300,00	98,09	100
5	Program Pemasaran Pariwisata	4.810.816.000,00	4.206.009.007,00	87,43	100
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	388.352.000,00	372.095.700,00	95,81	100
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.147.320.000,00	2.107.971.901,00	98,17	100
	JUMLAH	353.139.046.000,00	346.283.801.082,00	98,06	100

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

2.11.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan yang dialokasikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp33.896.496.000,00 realisasi sebesar Rp31.647.123.357,00 atau 93,36% yang terdiri dari 5 program, yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.123.795.000,00	28.949.850.915,00	93,02	100
2	Program Pembinaan Perpustakaan	2.238.809.000,00	2.172.928.228,00	97,06	100
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	132.009.000,00	125.978.460,00	95,43	100
4	Program Pengelolaan Arsip	366.751.000,00	363.359.254,00	99,08	100
5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	35.132.000,00	35.006.500,00	99,64	100
	JUMLAH	33.896.496.000,00	31.647.123.357,00	93,36	100

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan sebesar Rp686.214.820.000,00 realisasi sebesar Rp658.040.625.323,00 atau 95,89% yang dilaksanakan oleh 4 urusan, yaitu :

3.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dialokasikan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp112.755.757.000,00 realisasi sebesar Rp109.248.072.217,00 atau 96,89% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.023.690.000,00	49.005.177.862,00	94,20	100
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.663.292.000,00	1.656.637.421,00	99,60	100
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	42.883.560.000,00	42.568.216.721,00	99,26	100
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	13.231.856.000,00	13.169.340.459,00	99,53	100
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.360.226.000,00	1.357.800.048,00	99,82	100
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.593.133.000,00	1.490.899.706,00	93,58	97,55
	JUMLAH	112.755.757.000,00	109.248.072.217,00	96,89	99,97

3.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sebesar Rp413.479.679.000,00 realisasi sebesar Rp394.700.743.972,00 atau 95,46% yang dilaksanakan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :



3.02.01 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp138.102.466.000,00 realisasi sebesar Rp129.469.652.628,00 atau 93,75% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	51.221.181.000,00	49.226.119.620,00	96,11	100
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	40.124.016.000,00	35.374.332.287,00	88,16	100
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.223.207.000,00	5.207.181.658,00	99,69	100
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	30.208.258.000,00	29.197.545.046,00	96,65	100
5	Program Penyuluhan Pertanian	11.325.804.000,00	10.464.474.017,00	92,39	100
	JUMLAH	138.102.466.000,00	129.469.652.628,00	93,75	100

3.02.02 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp275.377.213.000,00 realisasi sebesar Rp265.231.091.344,00 atau 96,32% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	102.997.104.000,00	98.428.347.324,00	95,56	100
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	106.412.276.000,00	103.061.690.825,00	96,85	99,81
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	52.366.950.000,00	50.373.096.279,00	96,19	100
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.503.760.000,00	4.389.723.001,00	97,47	100
5	Program Penyuluhan Pertanian	9.097.123.000,00	8.978.233.915,00	98,69	100
	JUMLAH	275.377.213.000,00	265.231.091.344,00	96,32	99,93

3.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.03.01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dialokasikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp55.735.792.000,00 realisasi sebesar Rp53.053.517.122,00 atau 95,19% yang terdiri dari 5 program, yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.413.096.000,00	45.795.593.056,00	94,59	100
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	1.390.473.000,00	1.378.616.092,00	99,15	100
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	1.492.688.000,00	1.485.281.566,00	99,50	100
4	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1.997.903.000,00	1.980.934.388,00	99,15	100
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	2.441.632.000,00	2.413.092.020,00	98,83	100
	JUMLAH	55.735.792.000,00	53.053.517.122,00	95,19	100

3.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

3.04.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Bidang Perindustrian yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp.104.243.592.000,00 realisasi sebesar Rp 101.038.292.012,00 atau 96,93% yang terdiri dari 10 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	49.039.510.000,00	46.558.214.037,00	94,94	100
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	493.755.000,00	487.154.624,00	98,66	100
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	159.476.000,00	159.230.532,00	99,85	100
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	32.388.954.000,00	32.385.998.500,00	99,99	100
5	Program Pengembangan Ekspor	581.343.000,00	577.318.184,00	99,31	100
6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	2.216.985.000,00	2.196.801.571,00	99,09	100
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	4.855.472.000,00	4.534.691.432,00	93,39	100
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	14.123.558.000,00	13.758.194.772,00	97,41	100
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	218.061.000,00	217.004.460,00	99,52	100
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	166.478.000,00	163.683.900,00	98,32	100
	JUMLAH	104.243.592.000,00	101.038.292.012,00	96,93	100

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar Rp1.272.357.971.000,00 realisasi sebesar Rp1.214.199.301.963,00 atau 95,43% yang dilaksanakan oleh 2 Urusan, yaitu :



4.01 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp689.371.560.000,00 realisasi sebesar Rp663.569.198.332,00 atau 96,26% yang terdiri dari 8 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	260.293.769.000,00	241.535.320.892,00	92,79	100
2	Program Penataan Organisasi	1.936.969.000,00	1.685.449.927,00	87,01	100
3	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	3.246.217.000,00	2.919.717.080,00	89,94	100
4	Program Kesejahteraan Rakyat	413.371.924.000,00	407.230.574.806,00	98,51	100
5	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.810.651.000,00	2.763.129.720,00	98,31	100
6	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.235.260.000,00	4.015.924.556,00	94,82	100
7	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.761.081.000,00	1.705.972.962,00	96,87	100
8	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.715.689.000,00	1.713.108.389,00	99,85	100
	JUMLAH	689.371.560.000,00	663.569.198.332,00	96,26	100

4.02 SEKRETARIAT DPRD

4.02.01 SEKRETARIAT DPRD

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp582.986.411.000,00 realisasi sebesar Rp550.630.103.631,00 atau 94,45% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	237.231.689.000,00	222.867.595.463,00	93,95	100
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	345.754.722.000,00	327.762.508.168,00	94,80	100
	JUMLAH	582.986.411.000,00	550.630.103.631,00	94,45	100

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp7.635.639.281.000,00 realisasi sebesar Rp7.089.163.718.570,00 atau 92,84% yang dilaksanakan oleh 6 Urusan, yaitu :



5.01 PERENCANAAN

5.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Perencanaan yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp43.158.908.000,00 realisasi sebesar Rp41.952.988.228,00 atau 97,21% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.872.919.000,00	31.785.852.833,00	96,69	100
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	5.301.997.000,00	5.246.620.098,00	98,96	100
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.983.992.000,00	4.920.515.297,00	98,73	100
	JUMLAH	43.158.908.000,00	41.952.988.228,00	97,21	100

5.02 KEUANGAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Keuangan sebesar Rp7.432.297.196.000,00 realisasi sebesar Rp6.895.936.996.244,00 atau 92,78% yang dilaksanakan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

5.02.01 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp266.708.433.000,00 realisasi sebesar Rp238.977.775.068,00 atau 89,6% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	225.743.618.000,00	201.426.121.836,00	89,23	100
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	40.964.815.000,00	37.551.653.232,00	91,67	100
	JUMLAH	266.708.433.000,00	238.977.775.068,00	89,60	100

5.02.02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp7.165.588.763.000,00 realisasi sebesar Rp6.656.959.221.176,00 atau 92,9% yang terdiri dari 3 program, yaitu :



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	44.778.943.000,00	42.627.209.655,00	95,19	99,76
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	7.116.052.366.000,00	6.609.686.008.871,00	92,88	93,89
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.757.454.000,00	4.646.002.650,00	97,66	99,97
	JUMLAH	7.165.588.763.000,00	6.656.959.221.176,00	92,90	93,93

5.03 KEPEGAWAIAN

5.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Kepegawaian yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp36.999.106.000,00 realisasi sebesar Rp35.840.892.016,00 atau 96,87% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.106.030.000,00	30.130.540.177,00	96,86	100
2	Program Kepegawaian Daerah	5.893.076.000,00	5.710.351.839,00	96,90	100
	JUMLAH	36.999.106.000,00	35.840.892.016,00	96,87	100

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.04.01 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp79.694.942.000,00 realisasi sebesar Rp74.035.386.301,00 atau 92,90% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	48.963.219.000,00	46.842.392.129,00	95,67	100
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.731.723.000,00	27.192.994.172,00	88,49	100
	JUMLAH	79.694.942.000,00	74.035.386.301,00	92,90	100



5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5.05.01 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dialokasikan pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah sebesar Rp17.067.494.000,00 realisasi sebesar Rp16.301.805.661,00 atau 95,51% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.652.816.000,00	12.895.551.907,00	94,45	100
2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.414.678.000,00	3.406.253.754,00	99,75	100
	JUMLAH	17.067.494.000,00	16.301.805.661,00	95,51	100

5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN

5.06.01 BADAN PENGHUBUNG

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pengelolaan Penghubung yang dialokasikan pada Badan Penghubung sebesar Rp26.421.635.000,00 realisasi sebesar Rp25.095.650.120,00 atau 94,98% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	22.564.476.000,00	21.303.849.622,00	94,41	100
2	Program Pelayanan Penghubung	3.857.159.000,00	3.791.800.498,00	98,31	100
	JUMLAH	26.421.635.000,00	25.095.650.120,00	94,98	100

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01 INSPEKTORAT

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dialokasikan pada Inspektorat sebesar Rp36.171.749.000,00 realisasi sebesar Rp34.298.123.518,00 atau 94,82% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	29.279.993.000,00	27.521.615.230,00	93,99	100
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.170.183.000,00	4.143.633.344,00	99,36	100



NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.721.573.000,00	2.632.874.944,00	96,74	100
	JUMLAH	36.171.749.000,00	34.298.123.518,00	94,82	100

7. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

7.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

7.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Umum yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar sebesar Rp199.262.149.000,00 realisasi sebesar Rp196.095.397.966,00 atau 98,41% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.240.273.000,00	14.859.208.590,00	91,50	100
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.712.345.000,00	2.679.722.469,00	98,80	100
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	40.473.973.000,00	40.427.319.000,00	99,88	100
4	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	103.350.314.000,00	101.711.364.063,00	98,41	100
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	2.016.444.000,00	1.999.803.514,00	99,17	100
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	34.468.800.000,00	34.417.980.330,00	99,85	100
	JUMLAH	199.262.149.000,00	196.095.397.966,00	98,41	100

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sejak tahun 2016. Adapun kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
2. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
5. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
6. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.2.2 Pendapatan - LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
- c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.



4.2.1 Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Secara rinci Pengakuan Pendapatan-LO berdasarkan jenis pendapatan dijelaskan sebagai berikut :
 - 1) Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi :
 - PAD melalui penetapan
 - PAD tanpa ketetapan
 - PAD dari hasil eksekusi jaminan
 - 2) Pendapatan Transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.
 - 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.
 - 4) Pendapatan BLUD-LO diakui pada saat Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) diterbitkan oleh BUD.
 - 5) Pendapatan Usaha Mandiri-LO diakui pada saat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana usaha mandiri disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 6) Pendapatan dapat dipungut menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan diakui sebesar kas yang diterima.
- d. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Barang

Beban barang dicatat pada saat pembelian barang, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban barang.

2) Beban Jasa

3) Beban Pemeliharaan

4) Beban Perjalanan Dinas



5) Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

6) Beban Barang dan Jasa BOS

c. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

d. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

e. Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

f. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

g. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

(1) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

(2) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya dan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

Beban Operasional didalamnya termasuk beban yang berasal dari pengeluaran BLUD sesuai dengan rincian pada lampiran SP3B dan pengeluaran Usaha mandiri sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana usaha mandiri.

4.3.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan.

4.3.3 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain merupakan beban-beban yang bukan merupakan bagian dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Transfer.

4.3.4 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa merupakan beban atas kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan seperti Pengeluaran atas pos Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
4. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
5. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.
6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana

cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.

2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca, dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.
3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua :

- a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)

- 1) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 2) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid.

- b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD

Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD), Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah dan Kas di Bendahara Sekolah yang merupakan sisa Dana BOS, BOP, Peran Serta Masyarakat, Bantuan Pemerintah dan Usaha Mandiri sampai dengan akhir tahun anggaran.



6. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkapkan penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.

4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.
3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
4. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.
5. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan, Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Jasa Giro, Piutang Pendapatan Bunga, Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah, Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Piutang pendapatan dari pengembalian, Piutang Pendapatan BLUD.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.



8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain Piutang Transfer Pemerintah Pusat yang diakui ketika terbit pernyataan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk surat pemberitahuan atau Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan dan Piutang Transfer Antar Daerah yang berupa Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya yang diakui sesuai dengan hak yang masih harus diterima sampai dengan periode pelaporan keuangan.
9. Piutang lainnya diklasifikasikan berdasarkan peristiwa lainnya, seperti bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang, bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah.
10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Piutang TP/TGR diakui sebesar nilai tagihan TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Kriteria pengakuan piutang pajak :
 - a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
12. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.
13. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
14. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo. Penerbitan SKPD dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen dan informasi Piutang PKB disampaikan kepada Wajib Pajak melalui aplikasi PKB, oleh karenanya menjadi bagian yang dipersamakan dengan SKPD.
15. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan Retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan.
16. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD/BUMN/Badan Usaha Lainnya berdasarkan keputusan RUPS belum dibayarkan.
17. Piutang Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad jual beli.



18. Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan diakui berdasarkan selisih lebih tukar menukar BMD yang belum diterima pembayarannya.
19. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan diakui sesuai kriteria Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; Jumlah piutang dapat diukur dengan andal; Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
20. Piutang Jasa Giro dan Piutang pendapatan Bunga diakui sebesar nilai bunga yang akan diterima sampai dengan akhir periode.
21. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah diakui sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
22. Piutang pendapatan denda diakui pada saat timbulnya denda pendapatan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
23. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui dengan kriteria telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau; telah diterbitkan surat penagihan. Untuk piutang pasien rumah sakit dengan jaminan, dicatat sebesar pengajuan klaim yang telah diverifikasi oleh pihak penjamin sampai dengan tutup tahun buku. Lembaga penjamin antara lain, BPJS, Perusahaan penjamin dan Lembaga lainnya yang memiliki tugas penjaminan atas pasien.
24. Penyisihan piutang tidak tertagih
Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan Piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyesuaian piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang sebagai berikut :

Lama menunggak	Kategori	% diragukan Tertagih
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

25. Penghentian pengakuan piutang

Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

26. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban, sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

27. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis dikonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
4. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
5. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.
6. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

1. Investasi Jangka Pendek :
 - a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
 - b. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.



- c. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - d. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.
 - e. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.
 - f. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
 - g. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - h. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
 - i. Investasi jangka pendek disajikan pada pos asset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.
2. Investasi Jangka Panjang :
- a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
 - b. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen
 - c. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
 - d. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO
3. Metode penilaian investasi pemerintah :
- a. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 - b. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- Metode ekuitas diterapkan untuk :
- 1) Kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan
 - 2) Kepemilikan lebih dari 50%.
 - c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Barang persediaan terdiri dari :
 - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang, obat-obatan/bahan laboratorium; barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda) lain;
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda;
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
 1. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; dan
 2. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
 - e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti minyak dan beras.
3. Persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak menjadi persediaan.
4. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan persediaan untuk operasional kegiatan SKPD adalah materialitas; pencerminan dari tugas dan fungsi utama SKPD; dan pengendalian internal.
5. Jenis-jenis persediaan :
 - a. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas:
 1. Barang habis pakai;
 2. Barang tak habis pakai; dan
 3. Barang bekas pakai.
 - b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:
 1. Barang konsumsi;
 2. Amunisi;
 3. Bahan untuk pemeliharaan;
 4. Suku cadang;
 5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 6. Bahan baku;



7. Barang dalam proses/ setengah jadi;
 8. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
6. Persediaan diakui pada saat :
- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*). *Stock opname* dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
7. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
8. Pemakaian persediaan diakui sebagai beban barang pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurang atau bertambahnya jumlah persediaan.
9. Pengukuran persediaan melalui :
- a. Biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Biaya perolehan persediaan meliputi :
 - 1) harga pembelian;
 - 2) biaya pengangkutan;
 - 3) biaya penanganan; dan
 - 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - 1) potongan harga; dan
 - 2) rabat, dan lainnya yang serupa.
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.



- c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya. Khusus persediaan pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, nilai wajar adalah nilai tarif retribusi atau nilai jual.
10. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
11. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan :
 - a. metode penilaian Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Nilai barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama kali. Dengan demikian nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir;
 - b. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
12. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah lain yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda lain.
13. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).
14. Dalam hal SKPD karena tugas dan fungsinya menerima hibah seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang, persediaan tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.
15. Koreksi atas barang persediaan yang rusak, susut, kadaluarsa dan barang yang tidak terlalu sering diperlukan dan penggunaannya tidak pasti (*slow moving item*) dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan diinformasikan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan berita acara yang menjadi dasar koreksi dimaksud.
16. Persediaan sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan cadangan potensi, cadangan yang dapat dieksplorasi dan sumber daya alam hasil eksplorasi yang tersisa per periode laporan. Harga satuan persediaan dicatat berdasarkan harga pasar/harga standar tarif retribusi.
17. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.
18. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
 - a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap menggunakan azas *substance over form* dan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
 - a. Berwujud
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
7. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :
 - a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
 - b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
 - c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume nilai Aset Tetap tersebut; dan
 - d. penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.
8. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, diungkapkan dalam CaLK.
 - b. Pengadaan aset tetap tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
 - c. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
 - d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan

hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.

9. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
10. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
12. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
13. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
14. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
15. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
16. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
18. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
19. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
20. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtable dan berlaku sejak ditetapkan. Aset ekstrakomtable tidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
21. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (*carrying amount*).
22. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (*expenses*) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

23. Pengeluaran setelah perolehan Saldo awal suatu Aset tetap hanya dapat dikapitalisasi menambah nilai aset dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran tersebut menambah volume/kapasitas aset; atau
 - b. Semua aset tersebut rusak berat dan tidak dapat dipergunakan menjadi siap digunakan.
 - c. Khusus bagi pemeliharaan peralatan mesin dan pemeliharaan gedung, pengeluaran memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap
24. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
25. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama.
26. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
27. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
28. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
29. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
30. Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap dan dikategorikan sebagai Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya berupa alat musik modern dan Aset Tetap Renovasi dilakukan penyusutan secara periodik.
31. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset tidak digunakan operasional pemerintah, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
32. Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat). Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Aset Lainnya (Barang Rusak Berat).

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:



Penyusutan per periode =	$\frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$
------------------------------	--

- a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
- b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02				Peralatan dan Mesin			
1	3	02	01			Alat Besar			
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	01	03		Alat Bantu	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	02			Alat Angkutan			
1	3	02	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	02	02		Alat Angkutan Tak Bermotor	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	02	03		Alat Angkut Apung Bermotor	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4



Kode Akun					Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	02	04	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	02	05	Alat Angkut Bermotor Udara	20	<25%	0
							25%≤ sd <50%	3
							50%≤ sd <75%	6
							≥75%	9
1	3	02	03		Alat Bengkel dan Ukur			
1	3	02	03	01	Alat Bengkel Bermesin	10	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	2
							≥75%	5
1	3	02	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	03	03	Alat Ukur	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	04		Alat Bengkel dan Ukur			
1	3	02	04	01	Alat Pengolahan	4	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	05		Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1	3	02	05	01	Alat Kantor	5	<25%	0
							25%≤ sd <50%	1
							50%≤ sd <75%	1
							≥75%	2
1	3	02	05	02	Alat Rumah Tangga	5	<25%	0



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	05	03		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
1	3	02	06	01		Alat Studio	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	02	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	02	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	08			Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	8
1	3	02	08	03		Alat Praktek Sekolah	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	8
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	08	06		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	7
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	09			Alat Persenjataan			
1	3	02	09	01		Senjata Api	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	1
1	3	02	09	03		Senjata Sinar	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	0
								≥75%	2
1	3	02	09	04		Alat Khusus Kepolisian	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	1
1	3	02	10			Komputer			
1	3	02	10	01		Komputer Unit	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	11			Alat Eksplorasi			
1	3	02	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	3
1	3	02	12			Alat Pengeboran			
1	3	02	12	01		Alat Pengeboran Mesin	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13			Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian			
1	3	02	13	01		Sumur	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13	02		Produksi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	6
1	3	02	14			Alat Bantu Eksplorasi			
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	15			Alat Keselamatan Kerja			
1	3	02	15	01		Alat Deteksi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3
1	3	02	15	02		Alat Pelindung	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	15	03		Alat SAR	2	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	1
1	3	02	15	04		Alat kerja Penerbangan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	16			Alat Peraga			
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	3
1	3	02	17			Peralatan Proses/Produksi			
1	3	02	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	8	<25%	0



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	2
1	3	02	18			Rambu-Rambu			
1	3	02	18	01		Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	18	02		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	18	03		Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	7
1	3	02	19			Peralatan Olahraga			
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	2
1	3	03				Gedung dan Bangunan			
1	3	03	01			Bangunan Gedung			
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja			
						Permanen	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
						Semi Permanen	25	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	7
						Darurat	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								50% ≤ sd < 75%	2
								≥ 75%	5
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
						Permanen	50	< 25%	0
								25% ≤ sd < 50%	5
								50% ≤ sd < 75%	10
								≥ 75%	15
						Semi Permanen	25	< 25%	0
								25% ≤ sd < 50%	1
								50% ≤ sd < 75%	3
								≥ 75%	7
						Darurat	10	< 25%	0
								25% ≤ sd < 50%	1
								50% ≤ sd < 75%	2
								≥ 75%	5
1	3	03	02			Monumen			
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	< 25%	0
								25% ≤ sd < 50%	5
								50% ≤ sd < 75%	10
								≥ 75%	15
1	3	03	03			Menara			
1	3	03	03	01		Bangunan Menara Perambuan	50	< 25%	0
								25% ≤ sd < 50%	5
								50% ≤ sd < 75%	10
								≥ 75%	15
1	3	03	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti			
1	3	03	04	01		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	< 25%	0
								25% ≤ sd < 50%	5
								50% ≤ sd < 75%	10
								≥ 75%	15
1	3	04				Jalan, Irigasi, dan Jaringan			



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan			
1	3	04	01	01		Jalan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	04	01	02		Jembatan	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02			Bangunan Air			
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Baku	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03			Instalasi			
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Baku	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	04	03	07		Instalasi Pertahanan	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	03	08		Instalasi Gas	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman	20	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	3
1	3	04	03	10		Instalasi Lainnya	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	3
1	3	04	04			Jaringan			
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik dan Komputer	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	10
1	3	04	04	04		Jaringan Gas	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	05			Alat Bercorak kebudayaan dan Kesenian			
1	3	04	05	01		Alat Musik Modern/Band	5	<25%	0



Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhaul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								25% ≤ sd < 50%	1
								50% ≤ sd < 75%	1
								≥ 75%	2

33. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan dan pengadaan/perolehan pada bulan tertentu mulai dihitung penyusutannya. Khusus perhitungan penyusutan secara bulanan akan mulai diterapkan Tahun Anggaran 2021. Perhitungan penyusutan dalam penyusunan Laporan Keuangan 2020 dilakukan secara tahunan.
34. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
35. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
36. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
37. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
38. Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
39. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
40. Aset *ekstrakomtable* terdiri dari :
- Aset tetap peralatan dan mesin yang nilainya kurang dari/sama dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Aset tetap gedung dan bangunan yang kurang dari/sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
 - Aset tetap lainnya berupa buku yang dipinjamkan, hewan, biota perairan dan tanaman.
41. Aset *ekstrakomtable* dalam kondisi rusak berat/usang/mati; hilang dan telah selesai proses penggantian/TPTGR; aset yang fisiknya sulit ditemukan dan masa manfaat sudah habis dapat dihapus bukukan.
42. Prosedur pemusnahan aset *ekstrakomtable* dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset *ekstrakomtable* yang akan dimusnahkan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset *ekstrakomtable* belum/tidak diatur, SKPD teknis menyusun prosedur pemusnahan dimaksud.



4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

1. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap);
3. maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan;
4. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi dan biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal;
5. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut;
6. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
7. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan yang mengatur Aset Tetap;
8. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap, dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan, berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi, dan dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi;
9. Properti Investasi Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya;



10. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya; Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
11. Pengungkapan Properti Investasi meliputi:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. metode penyusutan yang digunakan;
 - c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - 1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - 2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - 3) pelepasan;
 - 4) penyusutan;
 - 5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - 6) perubahan lain.
12. Penerapan pertama kali Kebijakan Properti Investasi yang mengklasifikasikan aset ke dalam Properti Investasi dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.

4.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud (ATB), dan aset lain-lain.
2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
3. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
4. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
 1. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah

- Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan. Piutang ini sebagai *contrapost* atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara.
 3. Pengakuan Beban
Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
 7. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya” dan informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 8. Aset Kemitraan merupakan aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
 9. Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pola kerjasama aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsensi).
 10. Jenis-jenis aset kemitraan dengan pihak tiga antara lain :
 - a. Tanah
 - b. Gedung dan bangunan dan/atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan
 - c. BMD selain tanah dan bangunan
 - d. Aset tak berwujud
 11. Aset Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan.
 12. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan harus dicatat sebagai aset kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kemitraan dicatat sebagai penyertaan kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 13. Aset kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
 14. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria: dapat diidentifikasi,



dikuasai/dimiliki, dikendalikan oleh entitas pemerintah, mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh pemerintah, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

15. Jenis-jenis aset tak berwujud dapat dibedakan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya. Menurut jenis sumber dayanya, ATB dapat dibedakan menjadi :
- Perangkat lunak *Software* computer
 - Hak paten, Hak cipta
 - Lisensi dan Waralaba (*Franchise*)
 - Hasil Kajian/ Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
 - Goodwill*
 - Royalti
 - Aset tak berwujud lainnya
 - Aset tak berwujud dalam pengerjaan
16. Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi :
- Pembelian
 - Pengembangan internal
 - Pertukaran
 - Kerjasama
 - Donasi/hibah; dan
 - Warisan budaya/sejarah
17. Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi :
- ATB dengan masa manfaat terbatas; dan
 - ATB dengan masa manfaat tak terbatas
18. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.
19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi dibagi menjadi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
20. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).



- b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.
21. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya dengan keadaan dan alasan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu digantikan dengan yang baru. Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan Aset Tak Berwujud dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan.
22. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas dari penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.
23. Software komputer sebagai ATB yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat diakui sebagai berikut :
- a. *Software* yang dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah (swakelola) tidak diakui sebagai ATB
 - b. *Software* komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.
 - c. *Software* yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum;
 - d. *Software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan;
 - e. Apabila *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian *integral* dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan.
24. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.
25. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
- a. masa manfaat dan metode amortisasi;
 - b. nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
 - c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
26. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
27. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain, meliputi :
- a. aset tetap yang rusak berat/usang;
 - b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
 - c. aset lain-lain lainnya antara lain:
 - kas/setara kas yang diblokir, disita atau kepemilikannya belum dapat teridentifikasi;



- aset tetap yang sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, tukar menukar);
 - aset hilang karena akibat bencana atau kelalaian;
 - aset yang masih dalam proses kepastian status hukum.
28. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
29. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.15 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
6. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology*.
7. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
8. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

4.16 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Dalam Basis Akruai, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
 - a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
 - b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
5. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.



6. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

- a) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- b) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)

(1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

- (a) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
- (b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

(2) Belanja dan Beban

- (a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;
- (b) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.



- (3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- (4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- (5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,
- (6) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Kesalahan berulang dan sistematis

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.



BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2025 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA 2025. Struktur penyajian Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan 2024 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan	24.654.591.248.000,00	23.761.968.977.877,00	96,38	26.378.719.626.419,00	(2.616.750.648.542,00)
2	Belanja dan transfer	25.231.604.925.000,00	23.871.838.129.256,00	94,61	27.187.126.497.803,00	(3.315.288.368.547,00)
	Surplus/(Defisit)	(577.013.677.000,00)	(109.869.151.379,00)	19,04	(808.406.871.384,00)	698.537.720.005,00
3	Penerimaan Pembiayaan	577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,01	1.406.120.547.664,00	(829.071.256.285,00)
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	20.700.000.000,00	(20.700.000.000,00)
	Pembiayaan netto	577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,01	1.385.420.547.664,00	(808.371.256.285,00)
5	SILPA	-	467.180.140.000,00	-	577.013.676.280,00	(109.833.536.280,00)

Penjelasan terinci realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Rp23.761.968.977.877,00

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp24.654.591.248.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.761.968.977.877,00 atau 96,38% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.378.719.626.419,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.616.750.648.542,00 atau 9,92% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	15.699.284.656.000,00	14.973.131.878.336,00	95,37	17.650.936.913.504,00	(2.677.805.035.168,00)
2	Pendapatan Transfer	8.792.120.753.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10	8.701.438.866.795,00	(76.075.110.287,00)
3	Pendapatan Lain-Lain	163.185.839.000,00	163.473.343.033,00	100,18	26.343.846.120,00	137.129.496.913,00
	Jumlah	24.654.591.248.000,00	23.761.968.977.877,00	96,38	26.378.719.626.419,00	(2.616.750.648.542,00)

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rp14.973.131.878.336,00

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp15.699.284.656.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.973.131.878.336,00 atau 95,37% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp17.650.936.913.504,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.677.805.035.168,00 atau 15,17% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	12.459.303.870.000,00	11.438.451.030.063,00	91,81	14.210.241.533.541,00	(2.771.790.503.478,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.172.596.928.000,00	2.673.385.019.574,00	123,05	2.318.821.514.818,00	354.563.504.756,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	690.155.713.000,00	546.657.345.508,00	79,21	687.813.166.201,00	(141.155.820.693,00)
4	Lain-Lain PAD yang Sah	377.228.145.000,00	314.638.483.191,00	83,41	434.060.698.944,00	(119.422.215.753,00)
Jumlah		15.699.284.656.000,00	14.973.131.878.336,00	95,37	17.650.936.913.504,00	(2.677.805.035.168,00)

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Rp11.438.451.030.063,00

Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp12.459.303.870.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.438.451.030.063,00 atau 91,81% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.210.241.533.541,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.771.790.503.478,00 atau 19,51%. Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	4.155.214.820.000,00	3.960.139.868.900,00	95,31	5.474.932.909.600,00	(1.514.793.040.700,00)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2.529.132.809.000,00	1.741.611.744.500,00	68,86	3.068.323.586.500,00	(1.326.711.842.000,00)
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.619.000.000.000,00	2.690.646.253.813,00	102,74	2.693.880.376.743,00	(3.234.122.930,00)
4	Pajak Air Permukaan	18.900.000.000,00	20.925.885.996,00	110,72	18.993.373.282,00	1.932.512.714,00
5	Pajak Rokok	3.115.022.833.000,00	3.001.754.723.736,00	96,36	2.954.059.323.916,00	47.695.399.820,00
6	Pajak Alat Berat (PAB)	33.408.000,00	134.045.500,00	401,24	51.963.500,00	82.082.000,00
7	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	22.000.000.000,00	23.238.507.618,00	105,63	-	23.238.507.618,00
Jumlah		12.459.303.870.000,00	11.438.451.030.063,00	91,81	14.210.241.533.541,00	(2.771.790.503.478,00)

Pendapatan Pajak Daerah **tidak mencapai target** dikarenakan:

- Belum optimalnya kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB secara tepat waktu. Hal ini ditandai dengan masih tingginya tingkat piutang/tunggakan PKB;
- Adanya penurunan atau tidak tercapainya target penjualan kendaraan bermotor dan masyarakat beralih ke kendaraan listrik yang bebas BBNKB; dan
- Pajak Rokok dipengaruhi oleh capaian kinerja penerimaan cukai rokok oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-49/PK/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Proporsi Dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2025; Konsumen beralih dari rokok golongan 1 (mahal) ke rokok golongan 2 atau 3 yang memiliki tarif cukai lebih rendah dan Kenaikan harga jual eceran (HJE) yang tinggi akibat kenaikan tarif cukai menyebabkan penurunan volume produksi, terutama pada produsen besar



5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Rp2.673.385.019.574,00

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp2.172.596.928.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.673.385.019.574,00 atau 123,05% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.318.821.514.818,00 mengalami kenaikan sebesar Rp354.563.504.756,00 atau 15,29%. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	2.068.079.800.000,00	2.559.393.583.760,00	123,76	2.219.653.775.575,00	339.739.808.185,00
2	Retribusi Jasa Usaha	103.307.528.000,00	105.892.413.738,00	102,50	92.761.371.908,00	13.131.041.830,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.209.600.000,00	8.099.022.076,00	669,56	6.406.367.335,00	1.692.654.741,00
Jumlah		2.172.596.928.000,00	2.673.385.019.574,00	123,05	2.318.821.514.818,00	354.563.504.756,00

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum

Rp2.559.393.583.760,00

Pendapatan Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp2.068.079.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.559.393.583.760,00 atau 123,76% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.219.653.775.575,00 mengalami kenaikan sebesar Rp339.739.808.185,00 atau 15,31% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.068.079.800.000,00	2.559.393.583.760,00	123,76	2.217.602.631.575,00	341.790.952.185,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	2.051.144.000,00	(2.051.144.000,00)
Jumlah		2.068.079.800.000,00	2.559.393.583.760,00	123,76	2.219.653.775.575,00	339.739.808.185,00

5.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rp2.559.393.583.760,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp2.068.079.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.559.393.583.760,00 atau 123,76% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.217.602.631.575,00 mengalami kenaikan sebesar Rp341.790.952.185,00 atau 15,41% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	16.911.850.000,00	28.652.944.116,00	169,43	27.231.223.894,00	1.421.720.222,00
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.078.887.500.000,00	1.217.075.353.072,00	112,81	1.051.958.578.478,00	165.116.774.594,00
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	584.183.800.000,00	909.500.137.860,00	155,69	769.086.700.599,00	140.413.437.261,00
4	RSUD dr. Adhyatma MPH	171.958.000.000,00	181.317.535.662,00	105,44	162.221.548.649,00	19.095.987.013,00
5	RSUD dr. Rehatta	66.681.000.000,00	67.306.925.589,00	100,94	61.118.196.043,00	6.188.729.546,00
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	54.520.400.000,00	53.203.658.202,00	97,58	52.463.679.746,00	739.978.456,00
7	RSJD Dr. Arif Zainudin	42.237.250.000,00	42.993.539.829,00	101,79	41.513.253.313,00	1.480.286.516,00
8	RSJD Dr. RM Sedjarwadi Klaten	52.700.000.000,00	59.343.489.430,00	112,61	52.009.450.853,00	7.334.038.577,00
Jumlah		2.068.079.800.000,00	2.559.393.583.760,00	123,76	2.217.602.631.575,00	341.790.952.185,00



5.1.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar

Rp0,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.051.144.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.051.144.000,00 atau 100,00%. Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diklasifikasikan sebagai Retribusi Jasa Usaha, dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	-	-	-	1.990.420.000,00	(1.990.420.000,00)
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	15.725.000,00	(15.725.000,00)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	44.999.000,00	(44.999.000,00)
	Jumlah	-	-	-	2.051.144.000,00	(2.051.144.000,00)

5.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Rp105.892.413.738,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp103.307.528.000,00 dengan realisasi sebesar Rp105.892.413.738,00 atau 102,50% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp92.761.371.908,00 mengalami kenaikan sebesar Rp13.131.041.830,00 atau 14,16% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	50.284.681.535,00	(50.284.681.535,00)
2	Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	92.042.000,00	(92.042.000,00)
3	Retribusi Terminal	-	-	-	315.420.000,00	(315.420.000,00)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	5.160.417.195,00	(5.160.417.195,00)
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila"	10.196.965.000,00	9.154.865.000,00	89,78	7.927.263.000,00	1.227.602.000,00
6	Retribusi Kepelabuhan	-	-	-	11.368.920.000,00	(11.368.920.000,00)
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	2.266.141.000,00	(2.266.141.000,00)
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	15.346.487.178,00	(15.346.487.178,00)
9	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	10.397.090.031,00	10.723.607.278,00	103,14	-	10.723.607.278,00
10	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	49.875.000,00	12.662.500,00	25,39	-	12.662.500,00
11	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	5.922.933.500,00	6.026.009.500,00	101,74	-	6.026.009.500,00
12	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	8.562.710.000,00	11.855.310.000,00	138,45	-	11.855.310.000,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	5.413.737.000,00	5.113.405.700,00	94,45	-	5.113.405.700,00
14	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	18.513.337.369,00	16.047.506.362,00	86,68	-	16.047.506.362,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
15	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	44.250.880.100,00	46.959.047.398,00	106,12	-	46.959.047.398,00
	Jumlah	103.307.528.000,00	105.892.413.738,00	102,50	92.761.371.908,00	13.131.041.830,00

Tahun 2024 terdapat Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, kepelabuhan, tempat rekreasi dan produksi usaha daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami perubahan nomenklatur. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha telah mencapai target, namun terdapat SKPD yang **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan:

- Objek Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga tidak mencapai target karena Stadion Jatidiri yang merupakan objek potensial, pada Tahun 2025 ini mengalami penurunan realisasi pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya turunnya Divisi PSIS dari liga I ke liga II (Degradasi) yang sangat berpengaruh terhadap harga sewa lapangan dan penjualan tiket;
- Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha tidak mencapai target antara lain karena penanaman padi atau tanaman lainnya di beberapa daerah pada Dinas Pertanian dan Perkebunan terkena serangan hama (OPT, tikus, fusarium, ulat grayak) sehingga mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu sehingga hasil tidak optimal.
- Penurunan hasil industri kayu sehingga lelang kurang diminati oleh produsen.

5.1.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp0,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp50.284.681.535,00 mengalami penurunan sebesar Rp50.284.681.535,00 atau 100,00%. dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	5.519.168.000,00	(5.519.168.000,00)
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	2.863.625.000,00	(2.863.625.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	12.879.094.115,00	(12.879.094.115,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	4.710.789.537,00	(4.710.789.537,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	410.578.640,00	(410.578.640,00)
6	Dinas Sosial	-	-	-	229.047.200,00	(229.047.200,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	510.497.750,00	(510.497.750,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	70.690.000,00	(70.690.000,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	1.695.195.500,00	(1.695.195.500,00)
10	Dinas Perhubungan	-	-	-	419.035.000,00	(419.035.000,00)
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	96.000.000,00	(96.000.000,00)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	33.000.000,00	(33.000.000,00)
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	253.549.000,00	(253.549.000,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	38.738.500,00	(38.738.500,00)
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	4.129.098.010,00	(4.129.098.010,00)
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	2.170.406.450,00	(2.170.406.450,00)
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	1.212.125.500,00	(1.212.125.500,00)
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	1.627.146.749,00	(1.627.146.749,00)
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	2.040.526.525,00	(2.040.526.525,00)
20	Sekretariat Daerah	-	-	-	769.740.000,00	(769.740.000,00)
21	Sekretariat DPRD	-	-	-	552.600.000,00	(552.600.000,00)
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	30.240.000,00	(30.240.000,00)
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	2.742.883.434,00	(2.742.883.434,00)
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	2.626.637.625,00	(2.626.637.625,00)
25	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	12.000.000,00	(12.000.000,00)
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	2.612.469.000,00	(2.612.469.000,00)
27	Badan Penghubung	-	-	-	29.800.000,00	(29.800.000,00)
Jumlah		-	-	-	50.284.681.535,00	(50.284.681.535,00)

5.1.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan **Rp0,00**

Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp92.042.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp92.042.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	92.042.000,00	(92.042.000,00)
Jumlah		-	-	-	92.042.000,00	(92.042.000,00)

5.1.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Terminal **Rp0,00**

Pendapatan Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp315.420.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp315.420.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	315.420.000,00	(315.420.000,00)
Jumlah		-	-	-	315.420.000,00	(315.420.000,00)

5.1.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir **Rp0,00**

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.160.417.195,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.160.417.195,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	42.413.000,00	(42.413.000,00)
2	Dinas Perhubungan	-	-	-	2.030.965.000,00	(2.030.965.000,00)
3	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	3.087.039.195,00	(3.087.039.195,00)
Jumlah		-	-	-	5.160.417.195,00	(5.160.417.195,00)

**5.1.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/
Pesanggrahan/Villa Rp9.154.865.000,00**

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditargetkan sebesar Rp10.196.965.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.154.865.000,00 atau 89,78% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.927.263.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.227.602.000,00 atau 15,49% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	253.550.000,00	332.915.000,00	131,30	707.623.000,00	(374.708.000,00)
2	Dinas Kesehatan	1.775.700.000,00	1.888.250.000,00	106,34	-	1.888.250.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	128.000.000,00	44.000.000,00	34,38	-	44.000.000,00
4	Dinas Sosial	25.050.000,00	25.200.000,00	100,60	-	25.200.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	223.550.000,00	206.500.000,00	92,37	189.000.000,00	17.500.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00
7	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	940.525.000,00	327.150.000,00	34,78	413.180.000,00	(86.030.000,00)
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.840.000,00	1.200.000,00	42,25	-	1.200.000,00
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	62.100.000,00	56.100.000,00	90,34	78.100.000,00	(22.000.000,00)
10	Sekretariat Daerah	172.500.000,00	131.925.000,00	76,48	126.400.000,00	5.525.000,00
11	Sekretariat DPRD	325.450.000,00	382.450.000,00	117,51	325.450.000,00	57.000.000,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.747.500.000,00	4.971.800.000,00	86,50	5.354.650.000,00	(382.850.000,00)
13	Badan Penghubung	540.200.000,00	784.875.000,00	145,29	732.860.000,00	52.015.000,00
Jumlah		10.196.965.000,00	9.154.865.000,00	89,78	7.927.263.000,00	1.227.602.000,00

5.1.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp0,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.368.920.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.368.920.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	11.368.920.000,00	(11.368.920.000,00)
Jumlah		-	-	-	11.368.920.000,00	(11.368.920.000,00)



5.1.1.1.2.2.7 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp0,00

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.266.141.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.266.141.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	856.566.000,00	(856.566.000,00)
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	1.409.575.000,00	(1.409.575.000,00)
Jumlah		-	-	-	2.266.141.000,00	(2.266.141.000,00)

5.1.1.1.2.2.8 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp0,00

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp15.346.487.178,00 mengalami penurunan sebesar Rp15.346.487.178,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	7.740.000,00	(7.740.000,00)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	2.238.831.600,00	(2.238.831.600,00)
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	4.944.791.687,00	(4.944.791.687,00)
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	8.154.569.891,00	(8.154.569.891,00)
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	554.000,00	(554.000,00)
Jumlah		-	-	-	15.346.487.178,00	(15.346.487.178,00)

5.1.1.1.2.2.9 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya Rp10.723.607.278,00

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya ditargetkan sebesar Rp10.397.090.031,00 dengan realisasi sebesar Rp10.723.607.278,00 atau 103,14% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.723.607.278,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.379.150.000,00	3.388.194.000,00	100,27	-	3.388.194.000,00
2	Dinas Kesehatan	38.400.000,00	46.800.000,00	121,88	-	46.800.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	-	9.600.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	7.200.000,00	4.800.000,00	66,67	-	4.800.000,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.750.000,00	12.000.000,00	102,13	-	12.000.000,00
6	Dinas Sosial	34.700.000,00	34.700.000,00	100,00	-	34.700.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.700.000,00	4.300.000,00	116,22	-	4.300.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.800.000,00	5.100.000,00	106,25	-	5.100.000,00
9	Dinas Perhubungan	2.029.440.000,00	2.208.650.000,00	108,83	-	2.208.650.000,00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	318.300.000,00	411.875.000,00	129,40	-	411.875.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.750.000,00	21.750.000,00	100,00	-	21.750.000,00
12	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	83.640.000,00	78.890.000,00	94,32	-	78.890.000,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22.620.000,00	22.620.000,00	100,00	-	22.620.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.864.294.031,00	1.817.398.617,00	97,48	-	1.817.398.617,00
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.900.000,00	7.335.000,00	124,32	-	7.335.000,00
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	39.540.000,00	42.032.000,00	106,30	-	42.032.000,00
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	-	1.200.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.900.000,00	20.600.000,00	103,52	-	20.600.000,00
19	Sekretariat Daerah	343.300.000,00	391.300.000,00	113,98	-	391.300.000,00
20	Sekretariat DPRD	522.000.000,00	522.000.000,00	100,00	-	522.000.000,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.240.000,00	31.185.000,00	103,13	-	31.185.000,00
22	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.569.366.000,00	1.604.977.661,00	102,27	-	1.604.977.661,00
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.500.000,00	31.500.000,00	100,00	-	31.500.000,00
24	Badan Penghubung	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	-	4.800.000,00
Jumlah		10.397.090.031,00	10.723.607.278,00	103,14	-	10.723.607.278,00

5.1.1.1.2.2.10 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan **Rp12.662.500,00**

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan ditargetkan sebesar Rp49.875.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.662.500,00 atau 25,39% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.662.500,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	49.875.000,00	12.662.500,00	25,39	-	12.662.500,00
Jumlah		49.875.000,00	12.662.500,00	25,39	-	12.662.500,00



5.1.1.1.2.2.11 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir **Rp6.026.009.500,00**
Di Luar Badan Jalan

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan ditargetkan sebesar Rp5.922.933.500,00 dengan realisasi sebesar Rp6.026.009.500,00 atau 101,74% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.026.009.500,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	25.650.000,00	47.308.000,00	184,44	-	47.308.000,00
2	Dinas Perhubungan	2.039.563.000,00	2.160.523.000,00	105,93	-	2.160.523.000,00
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	99.108.000,00	104.078.000,00	105,01	-	104.078.000,00
4	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24.000.000,00	24.256.000,00	101,07	-	24.256.000,00
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.734.612.500,00	3.689.844.500,00	98,80	-	3.689.844.500,00
Jumlah		5.922.933.500,00	6.026.009.500,00	101,74	-	6.026.009.500,00

5.1.1.1.2.2.12 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan **Rp11.855.310.000,00**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan ditargetkan sebesar Rp8.562.710.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.855.310.000,00 atau 138,45% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.855.310.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.562.710.000,00	11.855.310.000,00	138,45	-	11.855.310.000,00
Jumlah		8.562.710.000,00	11.855.310.000,00	138,45	-	11.855.310.000,00

**5.1.1.1.2.2.13 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi,
Pariwisata, dan Olahraga** **Rp5.113.405.700,00**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ditargetkan sebesar Rp5.413.737.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.113.405.700,00 atau 94,45% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.113.405.700,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	360.800.000,00	492.869.000,00	136,60	-	492.869.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.700.000,00	780.000,00	28,89	-	780.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	874.585.000,00	978.467.000,00	111,88	-	978.467.000,00
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	4.166.202.000,00	3.634.089.700,00	87,23	-	3.634.089.700,00
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	-	7.200.000,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.250.000,00	-	-	-	-
Jumlah		5.413.737.000,00	5.113.405.700,00	94,45	-	5.113.405.700,00



5.1.1.1.2.2.14 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha **Rp16.047.506.362,00**
Pemerintah Daerah

Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah ditargetkan sebesar Rp18.513.337.369,00 dengan realisasi sebesar Rp16.047.506.362,00 atau 86,68% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.047.506.362,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.750.000,00	8.919.000,00	101,93	-	8.919.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.240.957.369,00	2.171.623.000,00	96,91	-	2.171.623.000,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.716.072.000,00	4.873.431.442,00	103,34	-	4.873.431.442,00
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.547.558.000,00	8.993.126.920,00	77,88	-	8.993.126.920,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	406.000,00	-	-	406.000,00
Jumlah		18.513.337.369,00	16.047.506.362,00	86,68	-	16.047.506.362,00

5.1.1.1.2.2.15 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah **Rp46.959.047.398,00**

Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditargetkan sebesar Rp44.250.880.100,00 dengan realisasi sebesar Rp46.959.047.398,00 atau 106,12% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp46.959.047.398,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.373.400.000,00	2.505.076.000,00	105,55	-	2.505.076.000,00
2	Dinas Kesehatan	748.400.000,00	507.650.000,00	67,83	-	507.650.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	10.190.992.000,00	13.639.891.551,00	133,84	-	13.639.891.551,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.215.714.000,00	4.534.334.684,00	86,94	-	4.534.334.684,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	398.828.000,00	405.550.632,00	101,69	-	405.550.632,00
6	Dinas Sosial	172.070.000,00	167.970.900,00	97,62	-	167.970.900,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.123.150.000,00	940.616.000,00	44,30	-	940.616.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	26.880.000,00	110.955.000,00	412,78	-	110.955.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.790.327.000,00	1.322.299.250,00	73,86	-	1.322.299.250,00
10	Dinas Perhubungan	411.820.000,00	488.560.625,00	118,63	-	488.560.625,00
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	92.915.000,00	97.795.000,00	105,25	-	97.795.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.850.000,00	14.850.000,00	100,00	-	14.850.000,00
13	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	215.525.000,00	147.060.000,00	68,23	-	147.060.000,00
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	23.380.000,00	18.132.000,00	77,55	-	18.132.000,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.514.643.600,00	2.996.032.532,00	119,14	-	2.996.032.532,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.165.716.000,00	2.410.668.000,00	111,31	-	2.410.668.000,00
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.343.602.000,00	2.757.515.501,00	205,23	-	2.757.515.501,00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.682.200.000,00	1.905.936.000,00	113,30	-	1.905.936.000,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.038.460.000,00	4.537.408.884,00	112,35	-	4.537.408.884,00
20	Sekretariat Daerah	447.240.000,00	223.150.000,00	49,89	-	223.150.000,00
21	Sekretariat DPRD	30.600.000,00	30.600.000,00	100,00	-	30.600.000,00
22	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.190.862.500,00	1.451.061.339,00	121,85	-	1.451.061.339,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.773.580.000,00	1.177.796.500,00	42,46	-	1.177.796.500,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-	12.000.000,00
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.173.725.000,00	4.520.137.000,00	108,30	-	4.520.137.000,00
26	Badan Penghubung	80.000.000,00	36.000.000,00	45,00	-	36.000.000,00
Jumlah		44.250.880.100,00	46.959.047.398,00	106,12	-	46.959.047.398,00

5.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

Rp8.099.022.076,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp1.209.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.099.022.076,00 atau 669,56% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.406.367.335,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.692.654.741,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.209.600.000,00	8.099.022.076,00	669,56	6.406.367.335,00	1.692.654.741,00
Jumlah		1.209.600.000,00	8.099.022.076,00	669,56	6.406.367.335,00	1.692.654.741,00

5.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Rp8.099.022.076,00

Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditargetkan sebesar Rp1.209.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.099.022.076,00 atau 669,56% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.406.367.335,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.692.654.741,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.209.600.000,00	8.099.022.076,00	669,56	6.406.367.335,00	1.692.654.741,00
Jumlah		1.209.600.000,00	8.099.022.076,00	669,56	6.406.367.335,00	1.692.654.741,00

Kenaikan Pendapatan Retribusi Perpanjangan IMTA terealisasi sangat signifikan dikarenakan bertambahnya perusahaan asing yang berinvestasi sehingga berdampak pada pekerja asing yang bekerja di wilayah Jawa Tengah.



**5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan**

Rp546.657.345.508,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp690.155.713.000,00 dengan realisasi sebesar Rp546.657.345.508,00 atau 79,21% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp687.813.166.201,00 mengalami penurunan sebesar Rp141.155.820.693,00 atau 20,52% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.256.000.000,00	-	-	1.839.800.755,00	(1.839.800.755,00)
2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	688.899.713.000,00	546.657.345.508,00	79,35	685.973.365.446,00	(139.316.019.938,00)
Jumlah	690.155.713.000,00	546.657.345.508,00	79,21	687.813.166.201,00	(141.155.820.693,00)

**5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN**

Rp0,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ditargetkan sebesar Rp1.256.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.839.800.755,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.839.800.755,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Deviden PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	1.256.000.000,00	-	-	1.839.800.755,00	(1.839.800.755,00)
2 Deviden PT Asuransi Bangun Askrida	-	-	-	-	-
Jumlah	1.256.000.000,00	-	-	1.839.800.755,00	(1.839.800.755,00)

Tidak tercapainya target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BUMN dikarenakan deviden PT Kawasan Industri Wijayakusuma yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham menunggu persetujuan dari Danantara dan Kementerian BUMN. Sementara, untuk PT Askrida, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ASKRIDA tanggal 5 Agustus 2024 dan sesuai himbauan Otoritas Jasa keuangan, deviden tahun buku Tahun 2025 tidak dibagikan kepada pemegang saham.

**5.1.1.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
(Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**

Rp546.657.345.508,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp688.899.713.000,00 dengan realisasi sebesar Rp546.657.345.508,00 atau 79,35% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp685.973.365.446,00 mengalami penurunan sebesar Rp139.316.019.938,00 atau 20,31% dengan rincian sebagai berikut:



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagian Laba PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	4.712.725.000,00	4.712.725.152,00	100,00	1.668.816.220,00	3.043.908.932,00
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng	560.145.738.000,00	417.903.370.127,00	74,61	550.244.937.092,00	(132.341.566.965,00)
3	Bagian Laba BPR- BKK Se-Jateng (Perseroda)	58.679.975.000,00	58.679.974.552,00	100,00	70.945.400.423,00	(12.265.425.871,00)
4	Bagian Laba PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	10.340.882.000,00	10.340.882.136,00	100,00	7.444.261.200,00	2.896.620.936,00
5	Bagian Laba PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	12.334.438.000,00	12.334.438.119,00	100,00	10.715.302.586,00	1.619.135.533,00
6	Bagian Laba PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	-	-	-	-	-
7	Bagian Laba PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	5.788.118.000,00	5.788.118.477,00	100,00	3.878.979.438,00	1.909.139.039,00
8	Bagian Laba PT Jateng Petro Energi (Perseroda)	28.691.238.000,00	28.691.237.844,00	100,00	34.097.271.465,00	(5.406.033.621,00)
9	Bagian Laba PT Jamkrida Jateng (Perseroda)	8.206.599.000,00	8.206.599.101,00	100,00	6.978.397.022,00	1.228.202.079,00
Jumlah		688.899.713.000,00	546.657.345.508,00	79,35	685.973.365.446,00	(139.316.019.938,00)

PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah Tahun Anggaran tidak menyetorkan deviden dikarenakan mengalami kerugian kumulatif, sedangkan tidak tercapainya target penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari BUMD-Bank Jateng dikarenakan sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 April 2025, deviden tahap 2 dikonversi menjadi penyertaan modal untuk menjaga kepemilikan saham 51% sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda).

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Rp314.638.483.191,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp377.228.145.000,00 dengan realisasi sebesar Rp314.638.483.191,00 atau 83,41% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp434.060.698.944,00 mengalami penurunan sebesar Rp119.422.215.753,00 atau 27,51% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	565.500.000,00	1.885.596.475,00	333,44	2.077.258.017,00	(191.661.542,00)
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	15.238.790,00	-	411.000,00	14.827.790,00
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.855.439.000,00	4.502.314.827,00	242,65	2.531.327.437,00	1.970.987.390,00
4	Hasil Kerja Sama Daerah	-	572.000,00	-	-	572.000,00
5	Jasa Giro	20.000.000.000,00	13.723.294.067,00	68,62	18.876.876.300,00	(5.153.582.233,00)
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Bunga Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	80.000.000.000,00	14.374.219.008,00	17,97	32.911.785.082,00	(18.537.566.074,00)
8		-	3.700.000,00	-	1.800.000,00	1.900.000,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	58.567.656.000,00	97.583.966.225,00	166,62	67.056.903.649,00	30.527.062.576,00
10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	3.246.408.417,00	-	2.642.694.739,00	603.713.678,00
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	160.000.000.000,00	113.450.318.619,00	70,91	241.621.801.355,00	(128.171.482.736,00)
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	42.955.007,00	-	62.417.887,00	(19.462.880,00)
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	474.991.000,00	(474.991.000,00)
15	Pendapatan dari Pengembalian	-	1.795.000,00	-	2.979.350.614,00	(2.977.555.614,00)
16	Pendapatan BLUD	56.166.050.000,00	65.780.604.756,00	117,12	62.793.535.998,00	2.987.068.758,00
17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	-	2.545.866,00	(2.545.866,00)
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	-
19	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	-	-	-
20	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-	-
21	Pendapatan Zakat	-	-	-	-	-
22	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	73.500.000,00	27.500.000,00	37,41	27.000.000,00	500.000,00
23	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa	-	-	-	-	-
24	Pendapatan Lain- Lain SKPKD	-	-	-	-	-
Jumlah		377.228.145.000,00	314.638.483.191,00	83,41	434.060.698.944,00	(119.422.215.753,00)

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan **Rp1.885.596.475,00**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan berupa Hasil Penjualan Aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan, Bangunan Air dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya ditargetkan sebesar Rp565.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.885.596.475,00 atau 333,44% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.077.258.017,00 mengalami penurunan sebesar Rp191.661.542,00 atau 9,23% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	50.585.500,00	-	86.343.000,00	(35.757.500,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	65.000.000,00	-	2.000.000,00	63.000.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	565.500.000,00	1.770.010.975,00	313,00	1.988.915.017,00	(218.904.042,00)
Jumlah		565.500.000,00	1.885.596.475,00	333,44	2.077.258.017,00	(191.661.542,00)



5.1.1.1.4.2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD

Rp15.238.790,00

yang Tidak Dipisahkan

Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp15.238.790,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp411.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.827.790,00 atau 3.607,73% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	15.238.790,00	-	411.000,00	14.827.790,00
Jumlah	-	15.238.790,00	-	411.000,00	14.827.790,00

5.1.1.1.4.3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Rp4.502.314.827,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp1.855.439.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.502.314.827,00 atau 242,65% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.531.327.437,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.970.987.390,00 atau 77,86%. Kenaikan dikarenakan adanya aset-aset daerah yang dikersamakan dengan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	102.648.057,00	-	-	102.648.057,00
2 Dinas Koperasi dan UMKM	200.010.000,00	305.435.175,00	152,71	275.535.261,00	29.899.914,00
3 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	21.000.000,00	(21.000.000,00)
4 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.655.429.000,00	2.008.680.000,00	121,34	1.740.001.176,00	268.678.824,00
5 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	184.000.000,00	(184.000.000,00)
6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	2.085.551.595,00	-	310.791.000,00	1.774.760.595,00
Jumlah	1.855.439.000,00	4.502.314.827,00	242,65	2.531.327.437,00	1.970.987.390,00

5.1.1.1.4.4 Hasil Kerja Sama Daerah

Rp572.000,00

Hasil Kerja Sama Daerah terealisasi sebesar Rp572.000,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp572.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	572.000,00	-	-	572.000,00
Jumlah	-	572.000,00	-	-	572.000,00

5.1.1.1.4.5 Jasa Giro

Rp13.723.294.067,00

Jasa Giro terdiri dari Jasa Giro atas Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara SKPD ditargetkan sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.723.294.067,00 atau 68,62% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp18.876.876.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.153.582.233,00 atau 27,30% dengan rincian sebagai berikut:



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.000.000.000,00	13.723.294.067,00	68,62	18.876.876.300,00	(5.153.582.233,00)
	Jumlah	20.000.000.000,00	13.723.294.067,00	68,62	18.876.876.300,00	(5.153.582.233,00)

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Bunga **Rp14.374.219.008,00**

Pendapatan Bunga merupakan bunga atas penempatan deposito pada Bank Jateng ditargetkan sebesar Rp80.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.374.219.008,00 atau 17,97% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp32.911.785.082,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.537.566.074,00 atau 56,33% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	80.000.000.000,00	14.374.219.008,00	17,97	32.911.785.082,00	(18.537.566.074,00)
	Jumlah	80.000.000.000,00	14.374.219.008,00	17,97	32.911.785.082,00	(18.537.566.074,00)

5.1.1.1.4.7 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah **Rp3.700.000,00**

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp3.700.000,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.800.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	3.700.000,00	-	1.800.000,00	1.900.000,00
	Jumlah	-	3.700.000,00	-	1.800.000,00	1.900.000,00

5.1.1.1.4.8 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain **Rp97.583.966.225,00**

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yang berisi pendapatan yang tidak ada dalam klasifikasi pendapatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ditargetkan sebesar Rp58.567.656.000,00 dengan realisasi sebesar Rp97.583.966.225,00 atau 166,62% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp67.056.903.649,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.527.062.576,00 atau 45,52% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	50.897.117,00	-	32.314.125,00	18.582.992,00
2	Dinas Kesehatan	-	152.855.093,00	-	12.920.000,00	139.935.093,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	287.911.000,00	-	2.154.650.700,00	(1.866.739.700,00)
4	Dinas Ketahanan Pangan	95.000.000,00	118.585.000,00	124,83	57.712.962,00	60.872.038,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	649.267.500,00	-	17.970.750,00	631.296.750,00
6	Dinas Perhubungan	31.807.482.000,00	34.462.553.400,00	108,35	32.476.216.700,00	1.986.336.700,00
7	Dinas Penanaman Modal dan	-	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu					
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	556.384.950,00	-	172.034.500,00	384.350.450,00
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	12.125.000,00	-	2.650.000,00	9.475.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	113.678.124,00	-	104.588.560,00	9.089.564,00
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	1.000.000,00	-	670.916.715,00	(669.916.715,00)
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	14.509.500,00	-	-	14.509.500,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.625.043.000,00	1.640.360.900,00	100,94	2.700.909.505,00	(1.060.548.605,00)
14	Sekretariat DPRD	-	12.138.909,00	-	-	12.138.909,00
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	15.144.825,00	-	74.161.355,00	(59.016.530,00)
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.090.601.000,00	32.432.033.899,00	2.973,78	7.693.130.898,00	24.738.903.001,00
17	Badan Kepegawaian Daerah	492.155.000,00	564.800.000,00	114,76	888.950.000,00	(324.150.000,00)
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.457.375.000,00	26.475.721.008,00	112,87	19.997.776.879,00	6.477.944.129,00
	Jumlah	58.567.656.000,00	97.583.966.225,00	166,62	67.056.903.649,00	30.527.062.576,00

5.1.1.1.4.9 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp3.246.408.417,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp3.246.408.417,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.642.694.739,00 mengalami kenaikan sebesar Rp603.713.678,00 atau 22,84% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	3.246.408.417,00	-	2.642.694.739,00	603.713.678,00
	Jumlah	-	3.246.408.417,00	-	2.642.694.739,00	603.713.678,00

5.1.1.1.4.10 Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp113.450.318.619,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp160.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp113.450.318.619,00 atau 70,91% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp241.621.801.355,00 mengalami penurunan sebesar Rp128.171.482.736,00 atau 53,05% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	160.000.000.000,00	113.450.318.619,00	70,91	241.621.801.355,00	(128.171.482.736,00)
	Jumlah	160.000.000.000,00	113.450.318.619,00	70,91	241.621.801.355,00	(128.171.482.736,00)



5.1.1.1.4.11 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Rp42.955.007,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp42.955.007,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp62.417.887,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.462.880,00 atau 31,18% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	1.047.495,00	-	2.155.325,00	(1.107.830,00)
2	Dinas Kesehatan	-	3.000,00	-	25.000,00	(22.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	943.700,00	-	-	943.700,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	216.894,00	-	452.837,00	(235.943,00)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.000,00	-	-	1.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	200.000,00	(200.000,00)
7	Dinas Perhubungan	-	14.094.400,00	-	12.291.580,00	1.802.820,00
8	Dinas Kelautan dan perikanan	-	24.757.171,00	-	45.373.245,00	(20.616.074,00)
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	2.250,00	-	6.000,00	(3.750,00)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	591.300,00	-	900.000,00	(308.700,00)
11	Sekretariat DPRD	-	-	-	10.000,00	(10.000,00)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	18.900,00	(18.900,00)
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	1.297.797,00	-	985.000,00	312.797,00
Jumlah		-	42.955.007,00	-	62.417.887,00	(19.462.880,00)

5.1.1.1.4.12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Rp0,00

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp474.991.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp474.991.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	474.991.000,00	(474.991.000,00)
Jumlah		-	-	-	474.991.000,00	(474.991.000,00)

5.1.1.1.4.13 Pendapatan dari Pengembalian

Rp1.795.000,00

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp1.795.000,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.979.350.614,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.977.555.614,00 atau 99,94% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.795.000,00	-	2.979.350.614,00	(2.977.555.614,00)
Jumlah		-	1.795.000,00	-	2.979.350.614,00	(2.977.555.614,00)



5.1.1.1.4.14 Pendapatan BLUD

Rp65.780.604.756,00

Pendapatan BLUD ditargetkan sebesar Rp56.166.050.000,00 dengan realisasi sebesar Rp65.780.604.756,00 atau 117,12% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp62.793.535.998,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.987.068.758,00 atau 4,76% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	25.612.500.000,00	26.061.743.656,00	101,75	25.111.658.406,00	950.085.250,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	15.816.200.000,00	26.197.850.789,00	165,64	18.384.128.455,00	7.813.722.334,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	4.542.000.000,00	5.373.243.563,00	118,30	5.922.622.780,00	(549.379.217,00)
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.869.000.000,00	1.628.328.760,00	87,12	1.996.469.454,00	(368.140.694,00)
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.463.600.000,00	2.335.092.794,00	159,54	2.463.797.273,00	(128.704.479,00)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	5.262.750.000,00	2.917.148.430,00	55,43	4.756.827.856,00	(1.839.679.426,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.600.000.000,00	1.267.196.764,00	79,20	4.158.031.774,00	(2.890.835.010,00)
	Jumlah	56.166.050.000,00	65.780.604.756,00	117,12	62.793.535.998,00	2.987.068.758,00

5.1.1.1.4.15 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Rp0,00

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.545.866,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.545.866,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	2.545.866,00	(2.545.866,00)
	Jumlah	-	-	-	2.545.866,00	(2.545.866,00)

5.1.1.1.4.16 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak

Rp0,00

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak ditargetkan sebesar Rp73.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.500.000,00 atau 37,41% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp27.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp500.000,00 atau 1,85% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73.500.000,00	27.500.000,00	37,41	27.000.000,00	500.000,00
	Jumlah	73.500.000,00	27.500.000,00	37,41	27.000.000,00	500.000,00

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Rp8.625.363.756.508,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Surat Kementerian Keuangan Nomor S-128/PK/2024 tentang



Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Anggaran 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota ditargetkan sebesar Rp8.792.120.753.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.625.363.756.508,00 atau 98,10% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.701.438.866.795,00 mengalami penurunan sebesar Rp76.075.110.287,00 atau 0,87% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.792.120.753.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10	8.701.438.866.795,00	(76.075.110.287,00)
	Jumlah	8.792.120.753.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10	8.701.438.866.795,00	(76.075.110.287,00)

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat **Rp8.625.363.756.508,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp8.792.120.753.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.625.363.756.508,00 atau 98,10% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.701.438.866.795,00 mengalami penurunan sebesar Rp76.075.110.287,00 atau 0,87% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Perimbangan	-	-	-	8.663.441.298.795,00	(8.663.441.298.795,00)
2	Insentif Fiskal	8.436.080.000,00	8.436.080.000,00	100,00	37.997.568.000,00	(29.561.488.000,00)
3	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.015.927.337.000,00	976.507.947.700,00	96,12	-	976.507.947.700,00
4	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.978.828.515.000,00	3.978.828.515.369,00	100,00	-	3.978.828.515.369,00
5	Dana Alokasi Khusus (DAK)	3.788.928.821.000,00	3.661.591.213.439,00	96,64	-	3.661.591.213.439,00
	Jumlah	8.792.120.753.000,00	8.625.363.756.508,00	98,10	8.701.438.866.795,00	(76.075.110.287,00)

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan **Rp0,00**

Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.663.441.298.795,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.663.441.298.795,00 atau 100,00% Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami perubahan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-	-	896.232.568.000,00	(896.232.568.000,00)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-	-	3.819.010.791.028,00	(3.819.010.791.028,00)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-	-	473.940.472.839,00	(473.940.472.839,00)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	-	-	-	3.474.257.466.928,00	(3.474.257.466.928,00)



	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Jumlah	-	-	-	8.663.441.298.795,00	(8.663.441.298.795,00)

5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp0,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp896.232.568.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp896.232.568.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	42.401.279.000,00	(42.401.279.000,00)
2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	-	-	-	528.584.330.000,00	(528.584.330.000,00)
3 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	-	-	-	318.034.449.000,00	(318.034.449.000,00)
4 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	-	-	-	3.875.740.000,00	(3.875.740.000,00)
5 Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	-	-	-	-	-
6 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	-	-	-	1.000.329.000,00	(1.000.329.000,00)
7 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	-	-	-	1.744.962.000,00	(1.744.962.000,00)
8 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	459.912.000,00	(459.912.000,00)
9 Bagi Hasil Dari Minerba	-	-	-	131.567.000,00	(131.567.000,00)
Jumlah	-	-	-	896.232.568.000,00	(896.232.568.000,00)

5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp0,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.819.010.791.028,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.819.010.791.028,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 DAU	-	-	-	3.550.426.222.000,00	(3.550.426.222.000,00)
2 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-	-	62.181.181.028,00	(62.181.181.028,00)
3 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-	-	187.324.934.000,00	(187.324.934.000,00)
4 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	-	-	-	-
5 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	19.078.454.000,00	(19.078.454.000,00)
Jumlah	-	-	-	3.819.010.791.028,00	(3.819.010.791.028,00)



5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp0,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp473.940.472.839,00 mengalami penurunan sebesar Rp473.940.472.839,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	-	-	-	264.965.344.449,00	(264.965.344.449,00)
2	DAK Bidang Kesehatan	-	-	-	40.866.296.330,00	(40.866.296.330,00)
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	-	-	-	12.845.424.770,00	(12.845.424.770,00)
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	-	-	-	4.203.097.231,00	(4.203.097.231,00)
5	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-	34.887.433.699,00	(34.887.433.699,00)
6	DAK Bidang Pertanian	-	-	-	38.482.249.589,00	(38.482.249.589,00)
7	DAK Bidang Air Minum	-	-	-	59.040.205.500,00	(59.040.205.500,00)
8	DAK Bidang Pariwisata	-	-	-	3.710.771.899,00	(3.710.771.899,00)
9	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	14.939.649.372,00	(14.939.649.372,00)
Jumlah		-	-	-	473.940.472.839,00	(473.940.472.839,00)

5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp0,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.474.257.466.928,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.474.257.466.928,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	-	-	-	1.322.069.021.439,00	(1.322.069.021.439,00)
2	Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	2.099.515.123.235,00	(2.099.515.123.235,00)
3	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	-	-	-	33.834.592.742,00	(33.834.592.742,00)
4	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	-	-	-	10.343.179.000,00	(10.343.179.000,00)
5	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	-	-	-	2.850.000.000,00	(2.850.000.000,00)
6	Bantuan Biaya Pengolahan Layanan Sampah	-	-	-	1.367.855.300,00	(1.367.855.300,00)
7	Fasilitasi Penanaman Modal Pelayanan	-	-	-	-	-
8	Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	340.234.100,00	(340.234.100,00)
9	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	-	-	-	-	-
10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya	-	-	-	3.937.461.112,00	(3.937.461.112,00)
Jumlah		-	-	-	3.474.257.466.928,00	(3.474.257.466.928,00)



5.1.1.2.1.2 Insentif Fiskal

Rp8.436.080.000,00

Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan yaitu sebagai reward bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum, pemerintahan yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria umum dan kategori kinerja serta memacu daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan. Dasar pemberian Insentif Fiskal :

- a. kriteria utama antara lain penyajian laporan keuangan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penetapan Perda APBD tepat waktu, melaksanakan *e-Government (e-Budgeting dan e-Planning)*
- b. nilai kategori kinerja meliputi :
 - 1) Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah melalui tingkat kemandirian daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - 2) Kinerja Pelayanan Dasar melalui imunisasi lengkap, indeks SPM pendidikan, cakupan sanitasi, pengelolaan air minum, penurunan pengangguran, peningkatan IPM;
 - 3) Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional melalui penurunan stunting, kemiskinan dan pengendalian inflasi; dan
 - 4) Kinerja Sinergi Kebijakan Pemerintah dari Pelayanan (30%) melalui PTSP dan PBB, penghargaan pelayanan daerah, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; Inovasi (30%) melalui inovasi daerah, pelayanan daerah dan penghargaan lingkungan hidup; Korupsi (40%) melalui tingkat persepsi korupsi.

Insentif Fiskal Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk Penyediaan Operasional Kendaraan BRT ditargetkan sebesar Rp8.436.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.436.080.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp37.997.568.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp29.561.488.000,00 atau 77,80% dikarenakan adanya penyesuaian APBN dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Insentif Fiskal	-	-	-	37.997.568.000,00	(37.997.568.000,00)
2 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	8.436.080.000,00	8.436.080.000,00	100,00	-	8.436.080.000,00
Jumlah	8.436.080.000,00	8.436.080.000,00	100,00	37.997.568.000,00	(29.561.488.000,00)

5.1.1.2.1.3 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Rp976.507.947.700,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan sebesar Rp1.015.927.337.000,00 dengan realisasi sebesar Rp976.507.947.700,00 atau 96,12% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp976.507.947.700,00 atau 100,00% karena perubahan penggunaan nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	DBH Pajak	1.012.562.223.000,00	973.009.523.700,00	96,09	-	973.009.523.700,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	3.365.114.000,00	3.498.424.000,00	103,96	-	3.498.424.000,00
	Jumlah	1.015.927.337.000,00	976.507.947.700,00	96,12	-	976.507.947.700,00

5.1.1.2.1.3.1 DBH Pajak

Rp973.009.523.700,00

DBH Pajak ditargetkan sebesar Rp1.012.562.223.000,00 dengan realisasi sebesar Rp973.009.523.700,00 atau 96,09% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp973.009.523.700,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	46.977.489.000,00	43.534.435.100,00	92,67	-	43.534.435.100,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	575.727.394.000,00	529.801.160.600,00	92,02	-	529.801.160.600,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	389.857.340.000,00	399.673.928.000,00	102,52	-	399.673.928.000,00
	Jumlah	1.012.562.223.000,00	973.009.523.700,00	96,09	-	973.009.523.700,00

5.1.1.2.1.3.2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)

Rp3.498.424.000,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) ditargetkan sebesar Rp3.365.114.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.498.424.000,00 atau 103,96% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.498.424.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.234.862.000,00	2.234.862.000,00	100,00	-	2.234.862.000,00
2	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi	47.016.000,00	47.016.000,00	100,00	-	47.016.000,00
3	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	270.579.000,00	270.579.000,00	100,00	-	270.579.000,00
4	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	591.284.000,00	591.284.000,00	100,00	-	591.284.000,00
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	124.740.000,00	218.862.000,00	175,45	-	218.862.000,00
6	Bagi Hasil Dari Minerba	96.633.000,00	135.821.000,00	140,55	-	135.821.000,00
	Jumlah	3.365.114.000,00	3.498.424.000,00	103,96	-	3.498.424.000,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Rp3.978.828.515.369,00

Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp3.978.828.515.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.978.828.515.369,00 atau 100,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.978.828.515.369,00 atau 100,00% karena perubahan penggunaan nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	3.642.269.672.000,00	3.642.269.672.369,00	100,00	-	3.642.269.672.369,00
2	DAU Yang Ditentukan Penggunaannya	336.558.843.000,00	336.558.843.000,00	100,00	-	336.558.843.000,00
	Jumlah	3.978.828.515.000,00	3.978.828.515.369,00	100,00	-	3.978.828.515.369,00

5.1.1.2.1.4.1 DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya **Rp3.642.269.672.369,00**

DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya ditargetkan sebesar Rp3.642.269.672.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.642.269.672.369,00 atau 100,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.642.269.672.369,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	DAU	3.642.269.672.000,00	3.642.269.672.369,00	100,00	-	3.642.269.672.369,00
	Jumlah	3.642.269.672.000,00	3.642.269.672.369,00	100,00	-	3.642.269.672.369,00

5.1.1.2.1.4.2 DAU Yang Ditentukan Penggunaannya **Rp336.558.843.000,00**

DAU Yang Ditentukan Penggunaannya ditargetkan sebesar Rp336.558.843.000,00 dengan realisasi sebesar Rp336.558.843.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp336.558.843.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	97.130.383.000,00	97.130.383.000,00	100,00	-	97.130.383.000,00
2	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	185.898.217.000,00	185.898.217.000,00	100,00	-	185.898.217.000,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	53.530.243.000,00	53.530.243.000,00	100,00	-	53.530.243.000,00
	Jumlah	336.558.843.000,00	336.558.843.000,00	100,00	-	336.558.843.000,00

5.1.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) **Rp3.661.591.213.439,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK) ditargetkan sebesar Rp3.788.928.821.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.661.591.213.439,00 atau 96,64% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.661.591.213.439,00 atau 100,00% karena perubahan penggunaan nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	DAK Fisik	150.668.769.000,00	142.445.000.400,00	94,54	-	142.445.000.400,00
2	DAK Non Fisik	3.638.260.052.000,00	3.519.146.213.039,00	96,73	-	3.519.146.213.039,00
	Jumlah	3.788.928.821.000,00	3.661.591.213.439,00	96,64	-	3.661.591.213.439,00

5.1.1.2.1.5.1 DAK Fisik

Rp142.445.000.400,00

DAK Fisik ditargetkan sebesar Rp150.668.769.000,00 dengan realisasi sebesar Rp142.445.000.400,00 atau 94,54% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp142.445.000.400,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	74.302.585.000,00	68.857.015.403,00	92,67	-	68.857.015.403,00
2	DAK Bidang Kesehatan	16.366.185.000,00	15.555.919.997,00	95,05	-	15.555.919.997,00
3	DAK Bidang Air Minum	59.999.999.000,00	58.032.065.000,00	96,72	-	58.032.065.000,00
	Jumlah	150.668.769.000,00	142.445.000.400,00	94,54	-	142.445.000.400,00

5.1.1.2.1.5.2 DAK Non Fisik

Rp3.519.146.213.039,00

DAK Non Fisik ditargetkan sebesar Rp3.638.260.052.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.519.146.213.039,00 atau 96,73% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.519.146.213.039,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.451.279.213.000,00	1.346.551.341.530,00	92,78	-	1.346.551.341.530,00
2	Bantuan Operasional Sekolah	2.146.468.390.000,00	2.140.007.610.800,00	99,70	-	2.140.007.610.800,00
3	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	31.468.649.000,00	23.823.159.267,00	75,70	-	23.823.159.267,00
4	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	3.106.500.000,00	2.930.299.748,00	94,33	-	2.930.299.748,00
5	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	352.442.650,00	87,97	-	352.442.650,00
6	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	536.640.000,00	536.640.000,00	100,00	-	536.640.000,00
7	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya	4.000.000.000,00	3.944.719.044,00	98,62	-	3.944.719.044,00
8	Bantuan Pengembangan Kerasipan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-	1.000.000.000,00
	Jumlah	3.638.260.052.000,00	3.519.146.213.039,00	96,73	-	3.519.146.213.039,00

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp163.473.343.033,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan sebesar Rp163.185.839.000,00 dengan realisasi sebesar Rp163.473.343.033,00 atau 100,18% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar



Rp26.343.846.120,00 mengalami kenaikan sebesar Rp137.129.496.913,00 atau 520,54% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Pendapatan Hibah	25.505.460.000,00	25.505.460.000,00	100,00	25.600.169.638,00	(94.709.638,00)
2 Dana Darurat	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	137.680.379.000,00	137.967.883.033,00	100,21	743.676.482,00	137.224.206.551,00
Jumlah	163.185.839.000,00	163.473.343.033,00	100,18	26.343.846.120,00	137.129.496.913,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Rp25.505.460.000,00

Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp25.505.460.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.505.460.000,00 atau 100,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp25.600.169.638,00 mengalami penurunan sebesar Rp94.709.638,00 atau 0,37% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	25.505.460.000,00	25.505.460.000,00	100,00	25.593.372.000,00	(87.912.000,00)
2 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-	6.797.638,00	(6.797.638,00)
Jumlah	25.505.460.000,00	25.505.460.000,00	100,00	25.600.169.638,00	(94.709.638,00)

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Rp137.967.883.033,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditargetkan sebesar Rp137.680.379.000,00 dengan realisasi sebesar Rp137.967.883.033,00 atau 100,21% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp743.676.482,00 mengalami kenaikan sebesar Rp137.224.206.551,00 atau 18.452,14% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Lain-lain Pendapatan	137.680.379.000,00	137.967.883.033,00	100,21	743.676.482,00	137.224.206.551,00
Jumlah	137.680.379.000,00	137.967.883.033,00	100,21	743.676.482,00	137.224.206.551,00

Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan naik sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pengembalian Hibah KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan pemilu Tahun 2024.

5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp25.231.604.925.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.871.838.129.256,00 atau 94,61%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp27.187.126.497.803,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.315.288.368.547,00 atau 12,19% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Operasional	16.131.580.750.000,00	15.480.092.183.316,00	95,96	16.083.865.301.964,00	(603.773.118.648,00)
2 Belanja Modal	1.998.205.719.000,00	1.795.558.675.999,00	89,86	1.733.084.096.994,00	62.474.579.005,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	7.192.800.000,00	28,77	10.225.800.500,00	(3.033.000.500,00)
4	Belanja Transfer	7.076.818.456.000,00	6.588.994.469.941,00	93,11	9.359.951.298.345,00	(2.770.956.828.404,00)
	Jumlah	25.231.604.925.000,00	23.871.838.129.256,00	94,61	27.187.126.497.803,00	(3.315.288.368.547,00)

Belanja daerah di dalamnya telah termasuk *mandatory spending* atau belanja wajib merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Adapun belanja yang wajib dialokasikan dengan proporsi tertentu antara lain :

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	A Urusan Bidang Pendidikan	8.604.835.265.000,00	8.254.824.462.958,00
	1) Belanja Operasi	8.218.705.483.000,00	7.878.436.968.085,00
	a. Belanja Pegawai	5.081.921.333.000,00	4.839.531.445.895,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.802.226.410.000,00	1.713.550.756.952,00
	c. Belanja Hibah	1.319.557.740.000,00	1.310.371.765.238,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	15.000.000.000,00	14.983.000.000,00
	2) Belanja Modal	386.129.782.000,00	376.387.494.873,00
	B Urusasn Bidang Kebudayaan	33.347.185.000,00	32.244.547.560,00
	1) Belanja Operasi	33.347.185.000,00	32.244.547.560,00
	a. Belanja Pegawai		
	b. Belanja Barang dan Jasa	10.606.185.000,00	10.123.547.560,00
	c. Belanja Hibah	22.741.000.000,00	22.121.000.000,00
	d. Belanja Bantuan Sosial		
	2) Belanja Modal		
	C Urusan Bidang Perpustakaan	42.362.604.000,00	31.122.779.143,00
	1) Belanja Operasi	32.158.714.000,00	29.944.873.774,00
	a. Belanja Pegawai	26.124.564.000,00	24.096.760.416,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.034.150.000,00	5.848.113.358,00
	c. Belanja Hibah		
	d. Belanja Bantuan Sosial		
	2) Belanja Modal	1.203.890.000,00	1.177.905.369,00
	D Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	339.105.824.000,00	333.038.603.174,00
	1) Belanja Operasi	329.535.884.000,00	324.641.157.794,00
	a. Belanja Pegawai	24.657.828.000,00	23.194.870.852,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	222.978.056.000,00	219.646.286.942,00
	c. Belanja Hibah	81.900.000.000,00	81.800.000.000,00



No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
	d. Belanja Bantuan Sosial		
	2) Belanja Modal	9.570.000.000,00	8.397.445.380,00
E	Belanja di Luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang Kebutuhan Masyarakat di Bidang Pendidikan	20.515.000.000,00	14.008.940.405,00
	Belanja Transfer Bantuan Keuangan Pendidikan	20.515.000.000,00	14.008.940.405,00
2	Total Anggaran Fungsi Pendidikan (A+B+C+D+E)	9.021.387.337.360,00	8.656.610.534.851,00
3	Total Belanja Daerah	25.231.604.925.000,00	23.871.838.129.256,00
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100 %	35,76	36,26

2. Besaran anggaran infrastruktur pelayanan publik pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 40% dari Total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa (UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	BELANJA MODAL	1.998.205.719.000,00	1.795.558.675.999,00	89,86
	1) Belanja Modal Tanah	13.932.478.000,00	12.461.205.439,00	89,44
	2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	689.803.271.000,00	636.745.519.547,00	92,31
	3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	297.656.452.000,00	205.077.624.565,00	68,90
	4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	867.929.940.000,00	815.425.857.816,00	93,95
	5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	127.390.078.000,00	124.550.819.262,00	97,77
	6) Belanja Modal Aset Lainnya	1.493.500.000,00	1.297.649.370,00	86,89
2	BELANJA PEMELIHARAAN	591.267.346.000,00	527.578.497.265,00	89,23
3	BELANJA HIBAH	23.939.020.000,00	22.458.573.650,00	93,82
4	BELANJA BANTUAN SOSIAL	17.600.000.000,00	17.600.000.000,00	100,00
5	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2+3+4)	2.631.012.085.000,00	2.363.195.746.914,00	89,82
	Prosentase Belanja Infrastruktur terhadap belanja diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	36,23%	34,18%	

3. Dana Alokasi Umum selain untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 diarahkan penggunaannya untuk :
- Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebesar Rp97.130.383.000 terealisasi sebesar Rp97.130.383.000 atau 100%
 - Bidang Pendidikan, dianggarkan sebesar Rp185.898.217.000,00 terealisasi sebesar Rp185.283.536.126,00 atau 99,67%
 - Bidang Kesehatan dianggarkan sebesar Rp53.530.243.000,00 terealisasi sebesar Rp52.205.949.335,00 atau 97,53%



4. Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk Inspektorat/APIP sebesar Rp36.171.749.000,00 dari total APBD sebesar Rp25.231.604.925.000,00 atau 0,14% dan terealisasi sebesar Rp342.981.235.18,00 atau 94,82%

5.1.2.1 Belanja Operasional

Rp15.480.092.183.316,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp16.131.580.750.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.480.092.183.316,00 atau 95,96%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16.083.865.301.964,00 mengalami penurunan sebesar Rp603.773.118.648,00 atau 3,75% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Pegawai	7.438.563.067.000,00	7.060.692.834.988,00	94,92	7.023.084.524.845,00	37.608.310.143,00
2 Belanja Barang dan Jasa	6.554.955.733.000,00	6.306.083.040.496,00	96,20	6.234.228.358.506,00	71.854.681.990,00
3 Belanja Subsidi	12.413.000.000,00	12.291.564.636,00	99,02	1.399.999.100,00	10.891.565.536,00
4 Belanja Hibah	2.093.048.950.000,00	2.068.441.743.196,00	98,82	2.780.143.423.054,00	(711.701.679.858,00)
5 Belanja Bantuan Sosial	32.600.000.000,00	32.583.000.000,00	99,95	45.008.996.459,00	(12.425.996.459,00)
Jumlah	16.131.580.750.000,00	15.480.092.183.316,00	95,96	16.083.865.301.964,00	(603.773.118.648,00)

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Rp7.060.692.834.988,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp7.438.563.067.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.060.692.834.988,00 atau 94,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp37.608.310.143,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.608.310.143,00 atau 0,54% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.702.653.292.000,00	3.529.849.223.893,00	95,33	3.466.656.991.194,00	63.192.232.699,00
2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.404.979.839.000,00	3.221.792.651.827,00	94,62	1.868.016.557.613,00	1.353.776.094.214,00
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	1.393.631.458.256,00	(1.393.631.458.256,00)
4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	155.429.605.000,00	146.700.126.696,00	94,38	132.534.438.978,00	14.165.687.718,00
5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.743.094.000,00	1.519.812.634,00	55,41	983.377.690,00	536.434.944,00
6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	24.104.091.000,00	23.521.341.000,00	97,58	19.738.507.200,00	3.782.833.800,00
7 Belanja Pegawai BLUD	148.653.146.000,00	137.309.678.938,00	92,37	141.523.193.914,00	(4.213.514.976,00)
Jumlah	7.438.563.067.000,00	7.060.692.834.988,00	94,92	7.023.084.524.845,00	37.608.310.143,00



Belanja Pegawai **tidak terealisasi** antara lain dikarenakan sisa gaji yang memang dicadangkan untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan adanya mutasi pegawai serta yang meninggal dunia.

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Rp3.529.849.223.893,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp3.702.653.292.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.529.849.223.893,00 atau 95,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.466.656.991.194,00 mengalami kenaikan sebesar Rp63.192.232.699,00 atau 1,82% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.719.199.943.000,00	2.604.878.910.767,00	95,80	2.556.547.871.794,00	48.331.038.973,00
2	Dinas Kesehatan	46.081.807.000,00	43.915.873.388,00	95,30	42.753.215.313,00	1.162.658.075,00
3	RSUD Dr. Moewardi	113.474.812.000,00	107.127.452.497,00	94,41	105.892.903.693,00	1.234.548.804,00
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	67.813.915.000,00	65.734.927.661,00	96,93	64.565.719.804,00	1.169.207.857,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	65.404.382.000,00	60.966.085.865,00	93,21	57.972.907.156,00	2.993.178.709,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	19.867.265.000,00	18.840.889.489,00	94,83	17.720.327.552,00	1.120.561.937,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	36.438.798.000,00	34.987.457.401,00	96,02	33.309.642.970,00	1.677.814.431,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	34.286.460.000,00	32.128.775.758,00	93,71	31.810.498.104,00	318.277.654,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	24.824.098.000,00	24.120.430.341,00	97,17	23.517.341.285,00	603.089.056,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	33.769.948.000,00	31.306.739.529,00	92,71	32.218.723.533,00	(911.984.004,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	35.462.918.000,00	33.504.976.855,00	94,48	33.627.082.557,00	(122.105.702,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.891.559.000,00	5.665.925.944,00	96,17	5.648.705.720,00	17.220.224,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	5.683.545.000,00	5.404.769.176,00	95,10	5.043.207.021,00	361.562.155,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.135.000.000,00	2.849.751.919,00	90,90	2.835.717.481,00	14.034.438,00
15	Dinas Sosial	45.556.100.000,00	42.510.237.537,00	93,31	42.211.457.067,00	298.780.470,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.422.978.000,00	29.297.270.691,00	93,24	29.836.918.379,00	(539.647.688,00)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.804.228.000,00	5.179.904.347,00	89,24	4.494.694.088,00	685.210.259,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	6.526.371.000,00	6.136.474.324,00	94,03	6.399.361.974,00	(262.887.650,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58.270.047.000,00	55.475.614.460,00	95,20	55.084.105.533,00	391.508.927,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.244.014.000,00	5.649.882.002,00	90,48	5.570.176.777,00	79.705.225,00
21	Dinas Perhubungan	22.778.857.000,00	21.028.782.710,00	92,32	19.712.377.249,00	1.316.405.461,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.053.500.000,00	8.486.969.907,00	93,74	8.449.747.822,00	37.222.085,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.927.527.000,00	6.465.295.877,00	93,33	6.611.823.824,00	(146.527.947,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.411.950.000,00	6.110.587.610,00	95,30	5.651.007.112,00	459.580.498,00
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.366.936.000,00	11.145.144.951,00	90,12	10.843.716.091,00	301.428.860,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.705.588.000,00	11.584.807.078,00	91,18	12.260.435.558,00	(675.628.480,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.135.871.000,00	18.865.271.848,00	93,69	18.088.919.723,00	776.352.125,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.700.491.000,00	14.975.938.266,00	95,39	14.706.395.034,00	269.543.232,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	40.895.995.000,00	39.045.717.427,00	95,48	39.264.799.113,00	(219.081.686,00)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	16.348.150.000,00	15.068.923.704,00	92,18	13.400.742.991,00	1.668.180.713,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.473.600.000,00	13.599.001.647,00	93,96	13.643.541.018,00	(44.539.371,00)
32	Sekretariat Daerah	42.362.423.000,00	37.571.668.261,00	88,69	37.173.574.950,00	398.093.311,00
33	Sekretariat DPRD	9.072.068.000,00	8.530.494.514,00	94,03	8.326.827.834,00	203.666.680,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.419.641.000,00	9.089.319.193,00	96,49	9.205.694.694,00	(116.375.501,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	43.179.000.000,00	40.105.911.621,00	92,88	39.898.301.334,00	207.610.287,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.445.574.000,00	8.845.309.113,00	93,65	8.638.749.520,00	206.559.593,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	11.038.870.000,00	10.740.929.105,00	97,30	10.442.176.249,00	298.752.856,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	11.561.221.000,00	11.167.500.462,00	96,59	11.939.500.263,00	(771.999.801,00)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.519.853.000,00	4.245.684.225,00	93,93	3.997.667.153,00	248.017.072,00
40	Badan Penghubung	3.678.512.000,00	3.508.195.552,00	95,37	3.437.762.040,00	70.433.512,00
41	Inspektorat	10.948.843.000,00	10.147.855.551,00	92,68	9.993.104.631,00	154.750.920,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.470.634.000,00	3.837.565.320,00	85,84	3.909.549.190,00	(71.983.870,00)
Jumlah		3.702.653.292.000,00	3.529.849.223.893,00	95,33	3.466.656.991.194,00	63.192.232.699,00

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Rp3.221.792.651.827,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp3.404.979.839.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.221.792.651.827,00 atau 94,62%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.868.016.557.613,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.353.776.094.214,00 atau 72,47%, dikarenakan perubahan nomenkatur dari Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.362.721.390.000,00	2.234.652.535.128,00	94,58	855.798.983.033,00	1.378.853.552.095,00
2	Dinas Kesehatan	57.792.693.000,00	54.860.402.147,00	94,93	47.674.726.347,00	7.185.675.800,00
3	RSUD Dr. Moewardi	93.345.231.000,00	88.975.845.310,00	95,32	91.310.778.888,00	(2.334.933.578,00)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	56.895.000.000,00	55.404.396.844,00	97,38	56.317.776.389,00	(913.379.545,00)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	52.874.442.000,00	49.138.553.884,00	92,93	49.119.564.510,00	18.989.374,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	22.900.379.000,00	22.073.883.010,00	96,39	22.047.866.409,00	26.016.601,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	38.390.572.000,00	37.535.800.736,00	97,77	38.370.406.727,00	(834.605.991,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LRA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	36.808.716.000,00	36.072.272.562,00	98,00	37.006.833.210,00	(934.560.648,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	28.388.000.000,00	26.994.019.131,00	95,09	27.810.686.356,00	(816.667.225,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	34.894.239.000,00	33.265.035.883,00	95,33	37.109.272.445,00	(3.844.236.562,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	35.410.500.000,00	34.242.539.201,00	96,70	37.134.348.276,00	(2.891.809.075,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.291.500.000,00	7.033.009.128,00	96,45	7.516.943.484,00	(483.934.356,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	6.116.732.000,00	6.039.658.826,00	98,74	6.237.572.876,00	(197.914.050,00)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.015.000.000,00	3.762.048.570,00	93,70	4.023.343.972,00	(261.295.402,00)
15	Dinas Sosial	51.043.900.000,00	48.725.752.399,00	95,46	51.759.484.219,00	(3.033.731.820,00)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.476.000.000,00	31.751.785.493,00	97,77	34.563.694.761,00	(2.811.909.268,00)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.806.500.000,00	5.682.435.393,00	83,49	6.616.198.875,00	(933.763.482,00)
18	Dinas Ketahanan Pangan	7.728.068.000,00	7.369.459.696,00	95,36	8.091.807.162,00	(722.347.466,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60.342.388.000,00	58.238.987.683,00	96,51	61.698.358.278,00	(3.459.370.595,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	8.142.000.000,00	7.582.693.120,00	93,13	7.853.142.363,00	(270.449.243,00)
21	Dinas Perhubungan	23.170.309.000,00	22.101.516.868,00	95,39	23.337.876.407,00	(1.236.359.539,00)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.846.500.000,00	9.603.174.388,00	97,53	10.109.657.706,00	(506.483.318,00)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.027.006.000,00	7.750.701.016,00	96,56	8.391.858.169,00	(641.157.153,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.246.000.000,00	7.856.334.278,00	95,27	8.070.861.688,00	(214.527.410,00)
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.290.892.000,00	12.049.725.901,00	98,04	12.976.657.076,00	(926.931.175,00)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.418.976.000,00	12.511.953.338,00	93,24	13.991.340.550,00	(1.479.387.212,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.608.190.000,00	21.979.834.915,00	93,10	23.267.714.155,00	(1.287.879.240,00)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.427.709.000,00	14.784.622.272,00	95,83	15.496.840.036,00	(712.217.764,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	38.966.032.000,00	37.448.129.224,00	96,10	40.440.483.124,00	(2.992.353.900,00)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19.606.950.000,00	18.591.774.783,00	94,82	18.882.858.312,00	(291.083.529,00)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.387.000.000,00	15.482.468.803,00	94,48	16.697.354.239,00	(1.214.885.436,00)
32	Sekretariat Daerah	55.467.192.000,00	49.019.892.107,00	88,38	50.704.517.703,00	(1.684.625.596,00)
33	Sekretariat DPRD	9.887.554.000,00	9.568.697.287,00	96,78	9.649.423.521,00	(80.726.234,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.567.097.000,00	11.008.847.796,00	95,17	11.606.981.882,00	(598.134.086,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	69.110.111.000,00	59.993.392.530,00	86,81	50.020.518.362,00	9.972.874.168,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.120.000.000,00	10.930.087.306,00	98,29	11.369.730.278,00	(439.642.972,00)
37	Badan Kepegawaian Daerah	13.778.227.000,00	13.311.475.765,00	96,61	13.578.541.145,00	(267.065.380,00)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.071.411.000,00	12.243.931.792,00	93,67	13.566.705.258,00	(1.322.773.466,00)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.823.000.000,00	4.582.042.443,00	95,00	4.758.644.240,00	(176.601.797,00)
40	Badan Penghubung	5.394.900.000,00	5.121.268.284,00	94,93	5.245.500.342,00	(124.232.058,00)
41	Inspektorat	12.301.034.000,00	11.935.056.058,00	97,02	12.639.977.924,00	(704.921.866,00)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.080.499.000,00	4.516.610.529,00	88,90	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)
Jumlah		3.404.979.839.000,00	3.221.792.651.827,00	94,62	1.868.016.557.613,00	1.353.776.094.214,00

5.1.2.1.1.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Rp0,00 Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.393.631.458.256,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.393.631.458.256,00 atau 100,00% dikarenakan perubahan nomenklatur menjadi Belanja Tambahan Penghasilan ASN dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	1.348.529.659.200,00	(1.348.529.659.200,00)
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	9.393.249.569,00	(9.393.249.569,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	-	-	-	-
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-	-	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	-
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	1.801.902.000,00	(1.801.902.000,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	841.910.000,00	(841.910.000,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	437.760.000,00	(437.760.000,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	295.200.000,00	(295.200.000,00)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	216.000.000,00	(216.000.000,00)
15	Dinas Sosial	-	-	-	986.980.000,00	(986.980.000,00)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	78.135.000,00	(78.135.000,00)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	290.280.000,00	(290.280.000,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
18	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	325.410.000,00	(325.410.000,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	656.200.000,00	(656.200.000,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	344.360.000,00	(344.360.000,00)
21	Dinas Perhubungan	-	-	-	676.550.000,00	(676.550.000,00)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	362.600.000,00	(362.600.000,00)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	438.080.000,00	(438.080.000,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	729.680.000,00	(729.680.000,00)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	222.680.000,00	(222.680.000,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	917.280.000,00	(917.280.000,00)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	295.800.000,00	(295.800.000,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	708.800.000,00	(708.800.000,00)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	1.203.915.000,00	(1.203.915.000,00)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	980.870.000,00	(980.870.000,00)
32	Sekretariat Daerah	-	-	-	2.033.783.716,00	(2.033.783.716,00)
33	Sekretariat DPRD	-	-	-	744.490.000,00	(744.490.000,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	307.920.000,00	(307.920.000,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	17.053.083.771,00	(17.053.083.771,00)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	1.079.280.000,00	(1.079.280.000,00)
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	537.520.000,00	(537.520.000,00)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	430.480.000,00	(430.480.000,00)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	218.860.000,00	(218.860.000,00)
40	Badan Penghubung	-	-	-	36.600.000,00	(36.600.000,00)
41	Inspektorat	-	-	-	238.780.000,00	(238.780.000,00)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	217.360.000,00	(217.360.000,00)
Jumlah		-	-	-	1.393.631.458.256,00	(1.393.631.458.256,00)

5.1.2.1.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Rp146.700.126.696,00

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp155.429.605.000,00 dengan realisasi sebesar Rp146.700.126.696,00 atau 94,38%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp132.534.438.978,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.165.687.718,00 atau 10,69% dengan rincian sebagai berikut:



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat DPRD	155.429.605.000,00	146.700.126.696,00	94,38	132.534.438.978,00	14.165.687.718,00
	Jumlah	155.429.605.000,00	146.700.126.696,00	94,38	132.534.438.978,00	14.165.687.718,00

5.1.2.1.1.3 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp1.519.812.634,00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp2.743.094.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.519.812.634,00 atau 55,41%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp983.377.690,00 mengalami kenaikan sebesar Rp536.434.944,00 atau 54,55% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat Daerah	2.743.094.000,00	1.519.812.634,00	55,41	983.377.690,00	536.434.944,00
	Jumlah	2.743.094.000,00	1.519.812.634,00	55,41	983.377.690,00	536.434.944,00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tidak terealisasi dikarenakan Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH triwulan IV tidak dibayarkan akibat pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah tidak mencapai target.

5.1.2.1.1.4 Belanja Penerimaan Lainnya Rp23.521.341.000,00 Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp24.104.091.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.521.341.000,00 atau 97,58%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp19.738.507.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.782.833.800,00 atau 19,16% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat Daerah	23.427.291.000,00	22.844.541.000,00	97,51	19.127.707.200,00	3.716.833.800,00
2	Sekretariat DPRD	676.800.000,00	676.800.000,00	100,00	610.800.000,00	66.000.000,00
	Jumlah	24.104.091.000,00	23.521.341.000,00	97,58	19.738.507.200,00	3.782.833.800,00

5.1.2.1.1.5 Belanja Pegawai BLUD Rp137.309.678.938,00

Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp148.653.146.000,00 dengan realisasi sebesar Rp137.309.678.938,00 atau 92,37%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp141.523.193.914,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.213.514.976,00 atau 2,98% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	34.813.100.000,00	33.351.025.000,00	95,80	34.354.871.596,00	(1.003.846.596,00)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	56.528.041.000,00	55.179.669.313,00	97,61	53.915.471.957,00	1.264.197.356,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	19.200.000.000,00	17.507.444.000,00	91,18	21.398.150.000,00	(3.890.706.000,00)
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	13.504.631.000,00	12.560.898.500,00	93,01	12.406.098.955,00	154.799.545,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	6.726.123.000,00	4.900.051.000,00	72,85	5.240.408.000,00	(340.357.000,00)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	8.857.451.000,00	6.113.850.000,00	69,02	6.534.150.000,00	(420.300.000,00)



	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	9.023.800.000,00	7.696.741.125,00	85,29	7.674.043.406,00	22.697.719,00
Jumlah	148.653.146.000,00	137.309.678.938,00	92,37	141.523.193.914,00	(4.213.514.976,00)

Adapun rincian Belanja Pegawai BLUD adalah sebagai berikut :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan **Rp128.199.993.651,00**

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	34.813.100.000,00	33.351.025.000,00
2 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	55.019.091.000,00	54.288.994.313,00
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	19.200.000.000,00	17.507.444.000,00
4 RSUD dr. Rehatta Jepara	9.097.931.000,00	8.604.916.000,00
5 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	5.585.123.000,00	3.930.731.000,00
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	7.356.586.000,00	5.639.750.000,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.600.000.000,00	4.877.133.338,00
Jumlah	136.671.831.000,00	128.199.993.651,00

b. Belanja Tambahan Penghasilan **Rp1.630.112.787,00**

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-
2 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	-
4 RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-
5 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	850.000.000,00	689.920.000,00
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	-
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.043.000.000,00	940.192.787,00
Jumlah	1.893.000.000,00	1.630.112.787,00

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya **Rp7.479.572.500,00**

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-
2 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.508.950.000,00	890.675.000,00
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	-
4 RSUD dr. Rehatta Jepara	4.406.700.000,00	3.955.982.500,00
5 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	291.000.000,00	279.400.000,00
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	1.500.865.000,00	474.100.000,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.380.800.000,00	1.879.415.000,00
Jumlah	10.088.315.000,00	7.479.572.500,00

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa **Rp6.306.083.040.496,00**

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp6.554.955.733.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.306.083.040.496,00 atau 96,20%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.234.228.358.506,00 mengalami kenaikan sebesar Rp71.854.681.990,00 atau 1,15% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Barang	741.840.669.000,00	711.913.166.446,00	95,97	708.560.237.105,00	3.352.929.341,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Belanja Jasa	1.855.781.265.000,00	1.784.318.444.092,00	96,15	1.768.827.289.459,00	15.491.154.633,00
3	Belanja Pemeliharaan	591.267.346.000,00	527.578.497.265,00	89,23	317.243.346.886,00	210.335.150.379,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	302.113.060.000,00	278.394.574.631,00	92,15	470.946.243.471,00	(192.551.668.840,00)
5	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	334.642.670.000,00	328.277.094.338,00	98,10	187.527.908.292,00	140.749.186.046,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	824.613.027.478,00	(824.613.027.478,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	820.050.561.000,00	815.656.243.699,00	99,46	-	815.656.243.699,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.909.260.162.000,00	1.859.945.020.025,00	97,42	1.956.510.305.815,00	(96.565.285.790,00)
Jumlah		6.554.955.733.000,00	6.306.083.040.496,00	96,20	6.234.228.358.506,00	71.854.681.990,00

Belanja Barang dan Jasa **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan realisasi sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi serta terjadi sisa lelang/pengadaan.

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Rp711.913.166.446,00

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp741.840.669.000,00 dengan realisasi sebesar Rp711.913.166.446,00 atau 95,97%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp708.560.237.105,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.352.929.341,00 atau 0,47% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.952.457.000,00	77.773.812.566,00	89,44	124.813.799.122,00	(47.039.986.556,00)
2	Dinas Kesehatan	58.550.390.000,00	48.787.493.299,00	83,33	55.906.538.450,00	(7.119.045.151,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	127.848.500,00	(127.848.500,00)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	393.059.500,00	(393.059.500,00)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	-	-	353.093.700,00	(353.093.700,00)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	138.020.000,00	135.464.997,00	98,15	469.823.499,00	(334.358.502,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.522.213.000,00	2.515.140.185,00	99,72	311.018.000,00	2.204.122.185,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	2.000.000.000,00	1.993.138.116,00	99,66	286.251.600,00	1.706.886.516,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	8.710.184.000,00	8.709.483.298,00	99,99	3.584.162.930,00	5.125.320.368,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	73.104.288.000,00	72.662.282.059,00	99,40	71.351.945.770,00	1.310.336.289,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	12.851.327.000,00	12.711.615.387,00	98,91	18.058.322.901,00	(5.346.707.514,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.701.040.000,00	2.653.595.691,00	98,24	4.341.255.193,00	(1.687.659.502,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	893.296.000,00	816.141.700,00	91,36	1.544.292.800,00	(728.151.100,00)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.339.968.000,00	2.282.227.526,00	97,53	3.156.352.639,00	(874.125.113,00)
15	Dinas Sosial	70.696.041.000,00	69.329.805.881,00	98,07	59.765.426.484,00	9.564.379.397,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.147.301.000,00	7.914.387.655,00	97,14	10.704.232.251,00	(2.789.844.596,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LRA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.381.890.000,00	2.358.958.470,00	99,04	1.902.827.929,00	456.130.541,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	9.010.538.000,00	8.948.981.959,00	99,32	8.890.171.057,00	58.810.902,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.274.453.000,00	9.184.389.847,00	99,03	23.032.682.351,00	(13.848.292.504,00)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.435.945.000,00	2.266.217.590,00	93,03	2.042.079.250,00	224.138.340,00
21	Dinas Perhubungan	9.409.066.000,00	9.180.770.393,00	97,57	4.487.993.244,00	4.692.777.149,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.309.742.000,00	3.283.543.896,00	99,21	3.453.054.435,00	(169.510.539,00)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.880.952.000,00	1.869.417.370,00	99,39	5.823.643.148,00	(3.954.225.778,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	592.604.000,00	590.582.850,00	99,66	997.719.341,00	(407.136.491,00)
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	16.526.047.000,00	15.969.939.905,00	96,63	25.029.283.170,00	(9.059.343.265,00)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.303.297.000,00	1.249.732.508,00	95,89	9.828.914.829,00	(8.579.182.321,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.554.583.000,00	4.546.318.855,00	99,82	5.730.175.427,00	(1.183.856.572,00)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	20.311.125.000,00	19.842.345.306,00	97,69	16.353.536.190,00	3.488.809.116,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	134.237.680.000,00	131.001.477.698,00	97,59	71.599.249.106,00	59.402.228.592,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.143.159.000,00	3.098.615.950,00	98,58	13.374.786.635,00	(10.276.170.685,00)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	36.616.242.000,00	36.542.273.490,00	99,80	7.575.625.160,00	28.966.648.330,00
32	Sekretariat Daerah	27.958.841.000,00	26.689.378.211,00	95,46	18.201.666.936,00	8.487.711.275,00
33	Sekretariat DPRD	77.797.816.000,00	76.834.372.101,00	98,76	77.575.744.314,00	(741.372.213,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.776.630.000,00	2.757.367.800,00	99,31	4.399.862.722,00	(1.642.494.922,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	19.555.212.000,00	19.295.972.825,00	98,67	26.731.197.309,00	(7.435.224.484,00)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.768.975.000,00	7.636.985.130,00	98,30	9.151.563.466,00	(1.514.578.336,00)
37	Badan Kepegawaian Daerah	1.532.121.000,00	1.513.959.103,00	98,81	3.251.750.489,00	(1.737.791.386,00)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.733.532.000,00	12.108.603.008,00	95,09	6.231.722.510,00	5.876.880.498,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.008.910.000,00	986.648.300,00	97,79	1.623.104.400,00	(636.456.100,00)
40	Badan Penghubung	2.378.417.000,00	2.144.899.900,00	90,18	2.213.707.073,00	(68.807.173,00)
41	Inspektorat	667.214.000,00	662.747.310,00	99,33	1.207.985.675,00	(545.238.365,00)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.069.153.000,00	3.064.078.311,00	99,83	2.682.767.600,00	381.310.711,00
Jumlah		741.840.669.000,00	711.913.166.446,00	95,97	708.560.237.105,00	3.352.929.341,00

Realisasi belanja barang naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan Dana Transfer DBHCHT yang digunakan untuk pengadaan obat-obatan pada RSJD dan belanja untuk paket sembako murah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.



5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

Rp1.784.318.444.092,00

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp1.855.781.265.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.784.318.444.092,00 atau 96,15%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.768.827.289.459,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.491.154.633,00 atau 0,88% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	523.572.341.000,00	511.164.505.587,00	97,63	491.268.312.955,00	19.896.192.632,00
2	Dinas Kesehatan	404.166.358.000,00	391.059.036.716,00	96,76	382.577.431.266,00	8.481.605.450,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	-	-	363.418.464,00	(363.418.464,00)
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.081.819.000,00	982.128.658,00	90,78	1.227.481.744,00	(245.353.086,00)
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	203.691.000,00	187.237.488,00	91,92	221.783.040,00	(34.545.552,00)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	470.000.000,00	362.969.449,00	77,23	344.363.751,00	18.605.698,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	69.300.000,00	69.300.000,00	100,00	170.358.320,00	(101.058.320,00)
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	26.085.339.000,00	24.625.335.336,00	94,40	27.162.877.229,00	(2.537.541.893,00)
9	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	44.462.416.000,00	42.276.587.719,00	95,08	46.407.166.433,00	(4.130.578.714,00)
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.064.090.000,00	9.904.196.944,00	98,41	6.425.238.501,00	3.478.958.443,00
11	Satuan Polisi Pamong Praja	3.498.689.000,00	3.393.130.689,00	96,98	3.179.222.580,00	213.908.109,00
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.107.093.000,00	3.810.137.399,00	92,77	3.845.658.058,00	(35.520.659,00)
13	Dinas Sosial	46.950.596.000,00	43.656.149.291,00	92,98	35.176.468.856,00	8.479.680.435,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.566.017.000,00	12.985.838.286,00	95,72	16.556.836.323,00	(3.570.998.037,00)
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.241.460.000,00	4.156.388.344,00	97,99	3.735.718.039,00	420.670.305,00
16	Dinas Ketahanan Pangan	8.215.576.000,00	7.949.187.175,00	96,76	6.563.019.607,00	1.386.167.568,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.645.907.000,00	11.116.223.592,00	95,45	14.026.497.639,00	(2.910.274.047,00)
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.547.107.000,00	4.402.782.925,00	96,83	3.531.940.104,00	870.842.821,00
19	Dinas Perhubungan	130.477.083.000,00	129.130.890.387,00	98,97	125.267.349.359,00	3.863.541.028,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.775.395.000,00	44.005.945.090,00	98,28	30.890.919.200,00	13.115.025.890,00
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.577.513.000,00	11.011.198.786,00	95,11	21.801.671.247,00	(10.790.472.461,00)
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.495.702.000,00	4.441.965.024,00	98,80	4.679.827.928,00	(237.862.904,00)
23	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	45.542.431.000,00	42.630.878.748,00	93,61	104.573.513.603,00	(61.942.634.855,00)
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.991.817.000,00	3.864.467.091,00	96,81	3.619.541.120,00	244.925.971,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.378.399.000,00	17.153.228.727,00	98,70	17.940.428.811,00	(787.200.084,00)
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.671.675.000,00	13.134.407.995,00	96,07	12.176.248.154,00	958.159.841,00
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan	26.906.288.000,00	25.686.870.075,00	95,47	20.016.922.544,00	5.669.947.531,00
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.009.972.000,00	10.707.657.676,00	97,25	12.226.768.596,00	(1.519.110.920,00)
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.811.420.000,00	21.989.254.862,00	96,40	25.160.314.506,00	(3.171.059.644,00)
30	Sekretariat Daerah	58.868.432.000,00	56.289.754.418,00	95,62	41.548.352.528,00	14.741.401.890,00
31	Sekretariat DPRD	159.608.452.000,00	154.086.628.190,00	96,54	126.690.148.366,00	27.396.479.824,00
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.562.594.000,00	11.320.135.979,00	97,90	9.849.367.399,00	1.470.768.580,00
33	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	108.022.893.000,00	93.691.382.787,00	86,73	100.606.527.808,00	(6.915.145.021,00)
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.300.771.000,00	18.683.721.130,00	92,03	19.820.568.790,00	(1.136.847.660,00)
35	Badan Kepegawaian Daerah	4.550.019.000,00	4.321.331.741,00	94,97	8.604.043.861,00	(4.282.712.120,00)
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	25.947.728.000,00	23.684.438.292,00	91,28	16.793.471.444,00	6.890.966.848,00
37	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.753.137.000,00	3.621.023.838,00	96,48	4.028.277.025,00	(407.253.187,00)
38	Badan Penghubung	8.885.624.000,00	8.464.561.398,00	95,26	7.758.656.644,00	705.904.754,00
39	Inspektorat	3.425.048.000,00	3.289.220.595,00	96,03	3.256.463.220,00	32.757.375,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.271.073.000,00	11.008.345.665,00	97,67	8.734.114.397,00	2.274.231.268,00
Jumlah		1.855.781.265.000,00	1.784.318.444.092,00	96,15	1.768.827.289.459,00	15.491.154.633,00

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Rp527.578.497.265,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp591.267.346.000,00 dengan realisasi sebesar Rp527.578.497.265,00 atau 89,23%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp317.243.346.886,00 mengalami kenaikan sebesar Rp210.335.150.379,00 atau 66,30% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	356.733.364.000,00	297.375.743.432,00	83,36	122.285.285.950,00	175.090.457.482,00
2	Dinas Kesehatan	4.705.562.000,00	4.629.338.089,00	98,38	3.304.911.398,00	1.324.426.691,00
3	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.613.076.000,00	1.565.740.540,00	97,07		1.565.740.540,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	106.238.537.000,00	105.147.692.640,00	98,97	85.926.602.414,00	19.221.090.226,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	23.811.101.000,00	23.282.567.099,00	97,78	25.819.812.716,00	(2.537.245.617,00)
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	570.258.000,00	566.949.914,00	99,42	686.716.971,00	(119.767.057,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	285.708.000,00	285.240.391,00	99,84	460.360.971,00	(175.120.580,00)
8	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	983.940.000,00	918.681.273,00	93,37	745.202.077,00	173.479.196,00
9	Dinas Sosial	23.959.852.000,00	22.865.982.818,00	95,43	6.783.155.054,00	16.082.827.764,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.204.546.000,00	2.142.923.640,00	97,20	2.436.001.814,00	(293.078.174,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LRA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	264.980.000,00	264.689.808,00	99,89	419.801.062,00	(155.111.254,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan	853.080.000,00	844.244.250,00	98,96	679.763.280,00	164.480.970,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.605.160.000,00	1.595.871.012,00	99,42	3.271.311.635,00	(1.675.440.623,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	461.544.000,00	458.070.787,00	99,25	519.369.128,00	(61.298.341,00)
15	Dinas Perhubungan	4.463.067.000,00	4.312.340.791,00	96,62	3.696.760.340,00	615.580.451,00
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.745.227.000,00	2.735.376.190,00	99,64	2.142.275.413,00	593.100.777,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.084.072.000,00	1.073.184.394,00	99,00	1.462.108.518,00	(388.924.124,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	521.427.000,00	518.416.362,00	99,42	528.509.281,00	(10.092.919,00)
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.105.376.000,00	4.091.682.564,00	99,67	1.802.985.746,00	2.288.696.818,00
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	479.271.000,00	477.028.349,00	99,53	692.599.339,00	(215.570.990,00)
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.932.305.000,00	1.928.978.860,00	99,83	2.210.803.279,00	(281.824.419,00)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.395.572.000,00	3.333.216.060,00	98,16	2.824.797.390,00	508.418.670,00
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.483.712.000,00	2.457.470.907,00	98,94	3.355.130.582,00	(897.659.675,00)
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.344.986.000,00	1.327.258.931,00	98,68	1.954.882.624,00	(627.623.693,00)
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.456.540.000,00	2.448.790.853,00	99,68	3.880.592.052,00	(1.431.801.199,00)
26	Sekretariat Daerah	11.494.619.000,00	11.231.220.535,00	97,71	8.592.928.731,00	2.638.291.804,00
27	Sekretariat DPRD	6.269.405.000,00	5.841.204.809,00	93,17	5.888.340.366,00	(47.135.557,00)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.731.477.000,00	2.698.004.036,00	98,77	2.742.666.455,00	(44.662.419,00)
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.861.295.000,00	7.786.387.068,00	99,05	10.444.143.894,00	(2.657.756.826,00)
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.609.580.000,00	5.546.869.559,00	98,88	4.221.718.101,00	1.325.151.458,00
31	Badan Kepegawaian Daerah	661.378.000,00	660.337.573,00	99,84	760.860.393,00	(100.522.820,00)
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.657.343.000,00	3.584.941.383,00	98,02	2.254.965.644,00	1.329.975.739,00
33	Badan Riset dan Inovasi Daerah	937.429.000,00	888.671.435,00	94,80	1.020.164.301,00	(131.492.866,00)
34	Badan Penghubung	888.425.000,00	868.809.956,00	97,79	1.284.011.306,00	(415.201.350,00)
35	Inspektorat	1.376.875.000,00	1.360.883.941,00	98,84	1.368.859.356,00	(7.975.415,00)
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	477.257.000,00	463.687.016,00	97,16	774.949.305,00	(311.262.289,00)
	Jumlah	591.267.346.000,00	527.578.497.265,00	89,23	317.243.346.886,00	210.335.150.379,00

Realisasi belanja pemeliharaan naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbaikan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan, Panti Pelayanan Sosial dan pemeliharaan sarana dan prasarana GOR Jatidiri pada Dinas Pemuda dan Olahraga.



5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Rp278.394.574.631,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp302.113.060.000,00 dengan realisasi sebesar Rp278.394.574.631,00 atau 92,15%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp470.946.243.471,00 mengalami penurunan sebesar Rp192.551.668.840,00 atau 40,89% dikarenakan adanya pergeseran yang dilakukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.376.455.000,00	15.476.666.228,00	89,07	40.946.101.790,00	(25.469.435.562,00)
2	Dinas Kesehatan	5.469.577.000,00	4.816.706.017,00	88,06	8.326.322.524,00	(3.509.616.507,00)
3	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-	-	3.997.500,00	(3.997.500,00)
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	49.565.000,00	46.027.500,00	92,86	128.121.500,00	(82.094.000,00)
5	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	-	-	118.859.000,00	(118.859.000,00)
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	31.968.000,00	31.968.000,00	100,00	2.250.000,00	29.718.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.943.483.000,00	3.771.059.567,00	95,63	9.526.321.743,00	(5.755.262.176,00)
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.527.447.000,00	5.241.770.220,00	94,83	12.965.438.861,00	(7.723.668.641,00)
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.354.960.000,00	2.278.625.347,00	96,76	5.721.158.906,00	(3.442.533.559,00)
10	Satuan Polisi Pamong Praja	2.255.029.000,00	2.240.949.276,00	99,38	4.980.189.887,00	(2.739.240.611,00)
11	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.166.559.000,00	1.163.804.404,00	99,76	2.599.740.753,00	(1.435.936.349,00)
12	Dinas Sosial	7.192.465.000,00	6.905.693.030,00	96,01	8.460.112.106,00	(1.554.419.076,00)
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.030.434.000,00	4.627.208.654,00	91,98	11.654.204.935,00	(7.026.996.281,00)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.157.105.000,00	1.146.773.868,00	99,11	3.216.481.450,00	(2.069.707.582,00)
15	Dinas Ketahanan Pangan	1.405.283.000,00	1.377.953.763,00	98,06	3.580.940.344,00	(2.202.986.581,00)
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.754.212.000,00	2.742.584.444,00	99,58	12.912.015.338,00	(10.169.430.894,00)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.816.598.000,00	2.631.777.510,00	93,44	4.064.293.843,00	(1.432.516.333,00)
18	Dinas Perhubungan	2.329.494.000,00	2.294.406.560,00	98,49	4.817.944.951,00	(2.523.538.391,00)
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.604.814.000,00	3.588.640.987,00	99,55	7.909.721.726,00	(4.321.080.739,00)
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.395.819.000,00	2.384.774.119,00	99,54	15.900.181.734,00	(13.515.407.615,00)
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.361.460.000,00	1.341.028.559,00	98,50	2.987.809.976,00	(1.646.781.417,00)
22	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.028.489.000,00	5.593.366.633,00	92,78	15.310.683.289,00	(9.717.316.656,00)
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	650.763.000,00	640.120.624,00	98,36	1.605.303.982,00	(965.183.358,00)
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.455.781.000,00	2.445.872.222,00	99,60	5.761.806.971,00	(3.315.934.749,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.356.084.000,00	2.288.981.386,00	97,15	4.557.003.550,00	(2.268.022.164,00)
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	10.600.199.000,00	8.964.941.648,00	84,57	12.044.533.214,00	(3.079.591.566,00)
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.872.929.000,00	2.867.465.087,00	99,81	10.783.901.958,00	(7.916.436.871,00)
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.514.988.000,00	3.458.240.144,00	98,39	11.341.115.119,00	(7.882.874.975,00)
29	Sekretariat Daerah	21.795.892.000,00	20.205.983.583,00	92,71	27.362.320.081,00	(7.156.336.498,00)
30	Sekretariat DPRD	143.817.907.000,00	130.119.137.813,00	90,47	150.159.698.001,00	(20.040.560.188,00)
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.582.469.000,00	3.573.782.349,00	99,76	7.301.998.866,00	(3.728.216.517,00)
32	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	8.823.794.000,00	8.342.451.227,00	94,54	15.341.235.204,00	(6.998.783.977,00)
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.383.367.000,00	5.063.998.997,00	94,07	10.623.116.533,00	(5.559.117.536,00)
34	Badan Kepegawaian Daerah	2.542.948.000,00	2.527.612.029,00	99,40	6.443.730.260,00	(3.916.118.231,00)
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.112.770.000,00	5.990.578.707,00	84,22	10.819.367.289,00	(4.828.788.582,00)
36	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.374.265.000,00	1.363.070.420,00	99,19	3.024.917.894,00	(1.661.847.474,00)
37	Badan Penghubung	610.422.000,00	608.213.030,00	99,64	1.093.819.856,00	(485.606.826,00)
38	Inspektorat	6.347.123.000,00	6.222.393.254,00	98,03	9.012.629.108,00	(2.790.235.854,00)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.020.143.000,00	4.009.947.425,00	99,75	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)
Jumlah		302.113.060.000,00	278.394.574.631,00	92,15	470.946.243.471,00	(192.551.668.840,00)

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp328.277.094.338,00

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan sebesar Rp334.642.670.000,00 dengan realisasi sebesar Rp328.277.094.338,00 atau 98,10%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp187.527.908.292,00 mengalami kenaikan sebesar Rp140.749.186.046,00 atau 75,06% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.147.417.000,00	6.227.333.000,00	76,43	6.940.270.000,00	(712.937.000,00)
2	Dinas Kesehatan	389.137.000,00	364.432.750,00	93,65	275.700.000,00	88.732.750,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	128.500.000,00	120.000.000,00	93,39	208.300.000,00	(88.300.000,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	99.600.000,00	82.800.000,00	83,13	18.000.000,00	64.800.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	21.875.000,00	18.000.000,00	82,29	28.000.000,00	(10.000.000,00)
7	Dinas Sosial	153.327.354.000,00	149.204.680.000,00	97,31	170.219.570.000,00	(21.014.890.000,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.400.000,00	50.400.000,00	100,00	93.280.000,00	(42.880.000,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
9	Dinas Ketahanan Pangan	103.850.000,00	103.850.000,00	100,00	130.125.000,00	(26.275.000,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	385.193.000,00	384.863.662,00	99,91	756.174.292,00	(371.310.630,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	860.240.000,00	842.215.000,00	97,90	280.300.000,00	561.915.000,00
12	Dinas Perhubungan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	166.250.000,00	166.250.000,00	100,00	212.000.000,00	(45.750.000,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.690.000,00	19.425.000,00	98,65	55.440.000,00	(36.015.000,00)
15	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	164.483.875.000,00	164.280.617.000,00	99,88	6.508.550.000,00	157.772.067.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	112.697.000,00	112.697.000,00	100,00	59.850.000,00	52.847.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00	13.500.000,00	3.000.000,00
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.876.600.000,00	1.871.444.750,00	99,73	531.400.000,00	1.340.044.750,00
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.584.800.000,00	1.584.789.876,00	100,00	714.999.000,00	869.790.876,00
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.050.000,00	2.050.000,00	100,00	10.000.000,00	(7.950.000,00)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	544.400.000,00	542.170.300,00	99,59	215.200.000,00	326.970.300,00
22	Sekretariat Daerah	64.042.000,00	63.687.500,00	99,45	50.050.000,00	13.637.500,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.300.000,00	4.323.500,00	68,63	-	4.323.500,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	1.675.000.000,00	1.673.000.000,00	99,88	-	1.673.000.000,00
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	4.500.000,00	(4.500.000,00)
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	500.900.000,00	465.565.000,00	92,95	136.700.000,00	328.865.000,00
27	Badan Penghubung	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	30.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah		334.642.670.000,00	328.277.094.338,00	98,10	187.527.908.292,00	140.749.186.046,00

Realisasi belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan untuk pemberian penghargaan kepada pemenang PON dan PEPARNAS Tahun 2024 untuk atlet dan pelatih pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Pemberian pemenang lomba desa dan kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberian Penghargaan Anugerah Karya Riset Pembangunan (AKRP) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS

Rp0,00

Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp824.613.027.478,00 mengalami penurunan sebesar Rp824.613.027.478,00 atau 100,00% karena perbedaan nomenklatur yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	824.613.027.478,00	(824.613.027.478,00)
	Jumlah	-	-	-	824.613.027.478,00	(824.613.027.478,00)

5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BOSP

Rp815.656.243.699,00

Belanja Barang dan Jasa BOSP dianggarkan sebesar Rp820.050.561.000,00 dengan realisasi sebesar Rp815.656.243.699,00 atau 99,46%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp815.656.243.699,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	820.050.561.000,00	815.656.243.699,00	99,46	-	815.656.243.699,00
	Jumlah	820.050.561.000,00	815.656.243.699,00	99,46	-	815.656.243.699,00

5.1.2.1.2.8 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Rp1.859.945.020.025,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp1.909.260.162.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.859.945.020.025,00 atau 97,42%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.956.510.305.815,00 mengalami penurunan sebesar Rp96.565.285.790,00 atau 4,94% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	973.600.068.000,00	973.588.039.413,00	100,00	1.029.810.939.533,00	(56.222.900.120,00)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	580.499.317.000,00	559.239.621.957,00	96,34	584.642.293.470,00	(25.402.671.513,00)
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	161.445.137.000,00	152.159.505.079,00	94,25	160.348.121.971,00	(8.188.616.892,00)
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	52.559.630.000,00	52.503.873.358,00	99,89	50.932.104.215,00	1.571.769.143,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	59.886.001.000,00	46.760.978.464,00	78,08	48.585.113.818,00	(1.824.135.354,00)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	40.053.790.000,00	36.182.325.025,00	90,33	40.955.681.141,00	(4.773.356.116,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	41.216.219.000,00	39.510.676.729,00	95,86	41.236.051.667,00	(1.725.374.938,00)
	Jumlah	1.909.260.162.000,00	1.859.945.020.025,00	97,42	1.956.510.305.815,00	(96.565.285.790,00)

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD, adalah sebagai berikut :

a. Belanja Barang

Rp853.953.230.305,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	452.832.631.000,00	452.828.578.681,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	288.270.593.000,00	275.996.129.231,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	72.783.200.000,00	68.461.690.782,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	21.282.870.000,00	21.268.336.672,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	17.303.677.000,00	14.709.669.974,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	11.815.290.000,00	11.442.893.096,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	10.274.364.000,00	9.245.931.869,00
	Jumlah	874.562.625.000,00	853.953.230.305,00



b. Belanja Jasa

Rp932.989.113.318,00

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	496.563.621.000,00	496.559.701.822,00
2 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	256.424.929.000,00	250.369.030.678,00
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	81.256.937.000,00	78.099.885.789,00
4 RSUD dr. Rehatta Jepara	29.204.260.000,00	29.167.772.311,00
5 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	38.586.425.366,00	28.478.998.165,00
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	25.374.000.000,00	22.602.884.733,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	28.258.850.000,00	27.710.839.820,00
Jumlah	955.669.022.366,00	932.989.113.318,00

c. Belanja Pemeliharaan

Rp68.975.578.367,00

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	23.676.816.000,00	23.673.033.365,00
2 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	34.753.795.000,00	32.085.998.596,00
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	6.990.000.000,00	5.211.383.313,00
4 RSUD dr. Rehatta Jepara	1.771.000.000,00	1.766.377.100,00
5 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	3.430.898.634,00	3.037.428.600,00
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	1.980.000.000,00	1.322.623.271,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.993.000.000,00	1.878.734.122,00
Jumlah	74.595.509.634,00	68.975.578.367,00

d. Belanja Perjalanan Dinas

Rp3.949.965.335,00

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	517.300.000,00	517.125.545,00
2 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.050.000.000,00	788.463.452,00
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	393.000.000,00	386.545.195,00
4 RSUD dr. Rehatta Jepara	301.500.000,00	301.387.275,00
5 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	562.000.000,00	531.881.725,00
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	868.500.000,00	805.423.925,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	630.005.000,00	619.138.218,00
Jumlah	4.322.305.000,00	3.949.965.335,00

**e. Belanja Barang, Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/
Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga**

Rp77.132.700,00

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	9.700.000,00	9.600.000,00
2 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	22.000.000,00	-
4 RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-
5 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	3.000.000,00	3.000.000,00
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	16.000.000,00	8.500.000,00



7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten

Jumlah

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)
60.000.000,00	56.032.700,00
110.700.000,00	77.132.700,00

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Rp12.291.564.636,00

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp12.413.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.291.564.636,00 atau 99,02%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.399.999.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.891.565.536,00 atau 777,97% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Subsidi kepada BUMN	2.429.000.000,00	2.424.635.550,00	99,82	-	2.424.635.550,00
2 Belanja Subsidi kepada BUMD	9.984.000.000,00	9.866.929.086,00	98,83	1.399.999.100,00	8.466.929.986,00
Jumlah	12.413.000.000,00	12.291.564.636,00	99,02	1.399.999.100,00	10.891.565.536,00

5.1.2.1.3.1 Belanja Subsidi kepada BUMN

Rp2.424.635.550,00

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp2.429.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.424.635.550,00 atau 99,82%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.424.635.550,00 atau 100,00% dikarenakan Subsidi imbal jasa penjaminan bagi Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) yang mengajukan kredit ke PT BPR BKK Kab Pemalang, Tegal, dan Demak dengan rincian sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Dinas Ketahanan Pangan	2.429.000.000,00	2.424.635.550,00	99,82	-	2.424.635.550,00
Jumlah	2.429.000.000,00	2.424.635.550,00	99,82	-	2.424.635.550,00

5.1.2.1.3.2 Belanja Subsidi kepada BUMD

Rp9.866.929.086,00

Belanja Subsidi kepada BUMD dianggarkan sebesar Rp9.984.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.866.929.086,00 atau 98,83%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.399.999.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.466.929.986,00 atau 604,78%, dikarenakan kebijakan penambahan alokasi dalam rangka memperluas sasaran penerima manfaat yang masuk dalam bagian program prioritas daerah pada Dinas Ketahanan Pangan. Subsidi diberikan untuk harga pangan intervensi pada masyarakat rawan pangan, harga pangan tingkat produsen dan konsumen, harga pangan lokal dan harga promosi organik dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	150.000.000,00	36.000.000,00	24,00	-	36.000.000,00
2 Dinas Ketahanan Pangan	9.834.000.000,00	9.830.929.086,00	99,97	1.399.999.100,00	8.430.929.986,00
Dinas Ketahanan Pangan	9.984.000.000,00	9.866.929.086,00	98,83	1.399.999.100,00	8.466.929.986,00



5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Rp2.068.441.743.196,00

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp2.093.048.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.068.441.743.196,00 atau 98,82%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.780.143.423.054,00 mengalami penurunan sebesar Rp711.701.679.858,00 atau 25,60% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	339.782.470.000,00	339.782.470.000,00	100,00	1.017.439.472.000,00	(677.657.002.000,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	646.056.758.000,00	624.844.636.650,00	96,72	690.622.077.108,00	(65.777.440.458,00)
3	Belanja Hibah Dana BOS	1.069.123.540.000,00	1.065.728.454.546,00	99,68	1.036.753.274.946,00	28.975.179.600,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000,00	38.086.182.000,00	100,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00
	Jumlah	2.093.048.950.000,00	2.068.441.743.196,00	98,82	2.780.143.423.054,00	(711.701.679.858,00)

5.1.2.1.4.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Rp339.782.470.000,00

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp339.782.470.000,00 dengan realisasi sebesar Rp339.782.470.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.017.439.472.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp677.657.002.000,00 atau 66,60% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	100,00	4.250.000.000,00	-
2	Sekretariat Daerah	304.450.000.000,00	304.450.000.000,00	100,00	304.450.000.000,00	-
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.082.470.000,00	31.082.470.000,00	100,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)
	Jumlah	339.782.470.000,00	339.782.470.000,00	100,00	1.017.439.472.000,00	(677.657.002.000,00)

Adapun rincian belanja hibah dari pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	5.552.500.000,00	5.552.500.000,00	100,00	4.063.250.000,00	1.489.250.000,00
2	Kepolisian Daerah (Polda) Jateng Pengamanan Pemilu (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	21.029.970.000,00	21.029.970.000,00	100,00	62.696.843.000,00	(41.666.873.000,00)
3	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	474.965.178.000,00	(474.965.178.000,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LRA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo (Jl. Adi Soemarmo Malangwijan Colonadu Pulosari, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, KAB. KARANGANYAR) Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Semarang (Jl. Re. Martadinata No.12, Tawang Sari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG) Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Cilacap (Jl. Niaga No. 2 Klega, Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, KAB. CILACAP) Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Tegal (Jl. Proklamasi, Tegalsari, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah, KOTA TEGAL) Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Jend. Soedirman Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah Komando Operasi Udara II pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman (Area Sawah, Wirasaba, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, KAB. PURBALINGGA)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	205.000.000,00	295.000.000,00
4						
5		500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	250.000.000,00	250.000.000,00
6		500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	125.000.000,00	375.000.000,00
7		250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	150.000.000,00	100.000.000,00
8		250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	-	250.000.000,00
9		-	-	-	250.000.000,00	(250.000.000,00)
10		-	-	-	116.230.722.000,00	(116.230.722.000,00)
11		-	-	-	125.000.000,00	(125.000.000,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
12	Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Pengamanan Pemilu (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG) Komite Intelijen Daerah (KOMINDA)	-	-	-	7.545.329.000,00	(7.545.329.000,00)
13	Provinsi Jawa Tengah (Jl. Untung Suropati Kota Semarang, KOTA SEMARANG) Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (Jl. Mardukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	650.000.000,00	350.000.000,00
14	Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Pengamanan Pemilu (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
15	Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Pengamanan Pemilu (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)
16	Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	2.655.000.000,00	(2.655.000.000,00)
17	Komando Resor Militer 071/Wijayakusuma	-	-	-	900.000.000,00	(900.000.000,00)
18	Komando Resor Militer 073/Makutarama	-	-	-	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
19	Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	-	-	-	4.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)
20	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	28.428.150.000,00	(28.428.150.000,00)
21	KANWIL KEMENAG PROV. JATENG	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	100,00	4.250.000.000,00	-
22	Jumlah	304.450.000.000,00	304.450.000.000,00	100,00	304.450.000.000,00	-
		339.782.470.000,00	339.782.470.000,00	100,00	1.017.439.472.000,00	(677.657.002.000,00)



**5.1.2.1.4.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga,
Organisasi Kemasyarakatan yang
Berbadan Hukum Indonesia**

Rp624.844.636.650,00

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp646.056.758.000,00 dengan realisasi sebesar Rp624.844.636.650,00 atau 96,72%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp690.622.077.108,00 mengalami penurunan sebesar Rp65.777.440.458,00 atau 9,52% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	273.175.200.000,00	266.764.310.692,00	97,65	282.600.286.698,00	(15.835.976.006,00)
2	Dinas Kesehatan	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	300.000.000,00	150.000.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	225.000.000,00	224.089.999,00	99,60	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)
4	Dinas Sosial	809.000.000,00	769.000.000,00	95,06	840.000.000,00	(71.000.000,00)
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	394.000.000,00	386.831.315,00	98,18	14.862.655.950,00	(14.475.824.635,00)
6	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	82.225.000.000,00	82.125.000.000,00	99,88	138.633.255.000,00	(56.508.255.000,00)
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.630.000.000,00	2.524.216.030,00	95,98	3.919.125.922,00	(1.394.909.892,00)
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	63.733.000.000,00	57.622.600.000,00	90,41	48.268.167.500,00	9.354.432.500,00
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	10.378.820.000,00	9.997.572.424,00	96,33	11.356.542.906,00	(1.358.970.482,00)
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.269.000.000,00	1.254.278.190,00	98,84	8.606.154.498,00	(7.351.876.308,00)
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.185.000.000,00	5.725.000.000,00	92,56	865.000.000,00	4.860.000.000,00
12	Sekretariat Daerah	103.278.000.000,00	97.332.000.000,00	94,24	94.103.500.000,00	3.228.500.000,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	101.304.738.000,00	99.669.738.000,00	98,39	84.817.555.000,00	14.852.183.000,00
Jumlah		646.056.758.000,00	624.844.636.650,00	96,72	690.622.077.108,00	(65.777.440.458,00)

Adapun rincian belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Hibah Bidang Pendidikan	273.175.200.000,00	266.764.310.692,00	97,65	282.600.286.698,00	(15.835.976.006,00)
2	Hibah Bidang Kesehatan	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	300.000.000,00	150.000.000,00
3	Hibah Bidang Konstruksi	225.000.000,00	224.089.999,00	99,60	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)
4	Hibah Bidang Sosial	809.000.000,00	769.000.000,00	95,06	840.000.000,00	(71.000.000,00)
5	Hibah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional	82.225.000.000,00	82.125.000.000,00	99,88	138.633.255.000,00	(56.508.255.000,00)
6	Hibah Bidang Keagamaan	103.278.000.000,00	97.332.000.000,00	94,24	94.103.500.000,00	3.228.500.000,00
7	Hibah Bidang Kesatuan Bangsa & Politik	101.304.738.000,00	99.669.738.000,00	98,39	84.817.555.000,00	14.852.183.000,00
8	Hibah Bidang Lingkungan Hidup	394.000.000,00	386.831.315,00	98,18	14.862.655.950,00	(14.475.824.635,00)
9	Hibah Bidang Energi	1.269.000.000,00	1.254.278.190,00	98,84	8.606.154.498,00	(7.351.876.308,00)
10	Hibah Bidang Pertanian	10.378.820.000,00	9.997.572.424,00	96,33	11.356.542.906,00	(1.358.970.482,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
11	Hibah Bidang Perindustrian & Perdagangan	6.185.000.000,00	5.725.000.000,00	92,56	865.000.000,00	4.860.000.000,00
12	Hibah Bidang Pernakanan	63.733.000.000,00	57.622.600.000,00	90,41	48.268.167.500,00	9.354.432.500,00
13	Hibah Bidang Kelautan & Perikanan	2.630.000.000,00	2.524.216.030,00	95,98	3.919.125.922,00	(1.394.909.892,00)
Jumlah		646.056.758.000,00	624.844.636.650,00	96,72	690.622.077.108,00	(65.777.440.458,00)

5.1.2.1.4.3 Belanja Hibah Dana BOS

Rp1.065.728.454.546,00

Belanja Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp1.069.123.540.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.065.728.454.546,00 atau 99,68%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.036.753.274.946,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.975.179.600,00 atau 2,79% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.069.123.540.000,00	1.065.728.454.546,00	99,68	1.036.753.274.946,00	28.975.179.600,00
Jumlah		1.069.123.540.000,00	1.065.728.454.546,00	99,68	1.036.753.274.946,00	28.975.179.600,00

5.1.2.1.4.4 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Rp38.086.182.000,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp38.086.182.000,00 dengan realisasi sebesar Rp38.086.182.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp35.328.599.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.757.583.000,00 atau 7,81% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.086.182.000,00	38.086.182.000,00	100,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00
Jumlah		38.086.182.000,00	38.086.182.000,00	100,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00

Adapun rincian belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	10.540.522.000,00	10.540.522.000,00	100,00	11.436.936.000,00	(896.414.000,00)
2	Partai Kebangkitan Bangsa	6.072.928.000,00	6.072.928.000,00	100,00	5.629.037.000,00	443.891.000,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.185.772.000,00	5.185.772.000,00	100,00	3.892.255.000,00	1.293.517.000,00
4	Partai Keadilan Sejahtera	3.242.138.000,00	3.242.138.000,00	100,00	2.729.993.000,00	512.145.000,00
5	Partai Golongan Karya	4.507.394.000,00	4.507.394.000,00	100,00	3.775.870.000,00	731.524.000,00
6	Partai Demokrat	2.319.820.000,00	2.319.820.000,00	100,00	2.045.608.000,00	274.212.000,00
7	Partai Amanat Nasional	1.681.634.000,00	1.681.634.000,00	100,00	1.713.433.000,00	(31.799.000,00)
8	Partai Persatuan Pembangunan	2.028.070.000,00	2.028.070.000,00	100,00	2.153.618.000,00	(125.548.000,00)
9	Partai Solidaritas Indonesia	956.126.000,00	956.126.000,00	100,00	318.709.000,00	637.417.000,00
10	Partai Nasional Demokrat	1.551.778.000,00	1.551.778.000,00	100,00	1.633.140.000,00	(81.362.000,00)
Jumlah		38.086.182.000,00	38.086.182.000,00	100,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00



5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Rp32.583.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp32.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.583.000.000,00 atau 99,95%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp45.008.996.459,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.425.996.459,00 atau 27,61% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	32.600.000.000,00	32.583.000.000,00	99,95	44.433.400.750,00	(11.850.400.750,00)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	575.595.709,00	(575.595.709,00)
	Jumlah	32.600.000.000,00	32.583.000.000,00	99,95	45.008.996.459,00	(12.425.996.459,00)

5.1.2.1.5.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Rp32.583.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp32.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.583.000.000,00 atau 99,95%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp44.433.400.750,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.850.400.750,00 atau 26,67% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.000.000.000,00	14.983.000.000,00	99,89	14.430.000.000,00	553.000.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.600.000.000,00	17.600.000.000,00	100,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	1.253.400.750,00	(1.253.400.750,00)
	Jumlah	32.600.000.000,00	32.583.000.000,00	99,95	44.433.400.750,00	(11.850.400.750,00)

5.1.2.1.5.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Rp0,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp575.595.709,00 mengalami penurunan sebesar Rp575.595.709,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	575.595.709,00	(575.595.709,00)
	Jumlah	-	-	-	575.595.709,00	(575.595.709,00)

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Rp1.795.558.675.999,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.998.205.719.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.795.558.675.999,00 atau 89,86%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.733.084.096.994,00 mengalami kenaikan sebesar Rp62.474.579.005,00 atau 3,60% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	13.932.478.000,00	12.461.205.439,00	89,44	12.221.207.440,00	239.997.999,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	689.803.271.000,00	636.745.519.547,00	92,31	855.982.713.753,00	(219.237.194.206,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	297.656.452.000,00	205.077.624.565,00	68,90	411.044.257.004,00	(205.966.632.439,00)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	867.929.940.000,00	815.425.857.816,00	93,95	366.478.924.044,00	448.946.933.772,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	127.390.078.000,00	124.550.819.262,00	97,77	86.434.858.953,00	38.115.960.309,00
6	Belanja Modal Aset lainnya	1.493.500.000,00	1.297.649.370,00	86,89	922.135.800,00	375.513.570,00
Jumlah		1.998.205.719.000,00	1.795.558.675.999,00	89,86	1.733.084.096.994,00	62.474.579.005,00

Belanja Modal **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan waktu pengadaan paket pekerjaan tidak mencukupi, efisiensi dan sisa lelang pengadaan pekerjaan.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Rp12.461.205.439,00

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp13.932.478.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.461.205.439,00 atau 89,44%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp12.221.207.440,00 mengalami kenaikan sebesar Rp239.997.999,00 atau 1,96% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	11.732.478.000,00	10.485.930.103,00	89,38	12.221.207.440,00	(1.735.277.337,00)
3	Belanja Modal Tanah BLUD	2.200.000.000,00	1.975.275.336,00	89,79	-	1.975.275.336,00
Jumlah		13.932.478.000,00	12.461.205.439,00	89,44	12.221.207.440,00	239.997.999,00

5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Tanah

Rp10.485.930.103,00

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp11.732.478.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.485.930.103,00 atau 89,38%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp12.221.207.440,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.735.277.337,00 atau 14,20% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	10.852.478.000,00	9.629.699.859,00	88,73	11.352.237.652,00	(1.722.537.793,00)
2	Dinas Sosial	680.000.000,00	679.637.000,00	99,95	-	679.637.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200.000.000,00	176.593.244,00	88,30	868.969.788,00	(692.376.544,00)
Jumlah		11.732.478.000,00	10.485.930.103,00	89,38	12.221.207.440,00	(1.735.277.337,00)

5.1.2.2.1.2 Belanja Modal Tanah BLUD

Rp1.975.275.336,00

Belanja Modal Tanah BLUD dianggarkan sebesar Rp2.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.975.275.336,00 atau 89,79%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.975.275.336,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	2.200.000.000,00	1.975.275.336,00	89,79	-	1.975.275.336,00
	Jumlah	2.200.000.000,00	1.975.275.336,00	89,79	-	1.975.275.336,00

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp636.745.519.547,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp689.803.271.000,00 dengan realisasi sebesar Rp636.745.519.547,00 atau 92,31%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp855.982.713.753,00 mengalami penurunan sebesar Rp219.237.194.206,00 atau 25,61% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	19.381.361.000,00	16.675.226.681,00	86,04	4.967.732.000,00	11.707.494.681,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	65.805.937.000,00	64.848.997.892,00	98,55	12.383.533.084,00	52.465.464.808,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000,00	475.000,00	95,00	3.442.982.230,00	(3.442.507.230,00)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	3.576.762.000,00	3.536.647.317,00	98,88	13.457.024.775,00	(9.920.377.458,00)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	37.863.631.000,00	35.129.174.264,00	92,78	236.597.198.336,00	(201.468.024.072,00)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.209.736.000,00	13.094.661.091,00	92,15	6.187.189.000,00	6.907.472.091,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	159.973.370.000,00	147.223.403.986,00	92,03	81.391.770.385,00	65.831.633.601,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	58.948.255.000,00	54.668.375.687,00	92,74	168.516.471.727,00	(113.848.096.040,00)
9	Belanja Modal Komputer	50.116.385.000,00	47.474.690.090,00	94,73	16.972.995.167,00	30.501.694.923,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	260.455.000,00	230.224.595,00	88,39	294.910.500,00	(64.685.905,00)
11	Belanja Modal Alat Pengeboran	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	-	37.000.000,00
12	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	30.000.000,00	29.901.000,00	99,67	83.614.000,00	(53.713.000,00)
13	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	101.325.000,00	(101.325.000,00)
14	Belanja Modal Alat Peraga	319.000.000,00	310.790.510,00	97,43	70.161.057.989,00	(69.850.267.479,00)
15	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)
16	Belanja Modal Rambu-rambu	1.462.098.000,00	1.421.977.300,00	97,26	916.794.400,00	505.182.900,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	155.553.654.501,00	(155.553.654.501,00)
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	144.066.536.000,00	144.066.946.033,00	100,00	-	144.066.946.033,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	133.752.245.000,00	107.997.028.101,00	80,74	84.944.460.659,00	23.052.567.442,00
	Jumlah	689.803.271.000,00	636.745.519.547,00	92,31	855.982.713.753,00	(219.237.194.206,00)



5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar

Rp16.675.226.681,00

Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp19.381.361.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.675.226.681,00 atau 86,04%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.967.732.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.707.494.681,00 atau 235,67% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	380.000.000,00	377.075.000,00	99,23	215.640.000,00	161.435.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.635.000.000,00	1.945.860.000,00	73,85	-	1.945.860.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	164.353.000,00	163.850.000,00	99,69	350.000.000,00	(186.150.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	10.616.008.000,00	10.491.700.000,00	98,83	155.100.000,00	10.336.600.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2.035.000.000,00	496.379.000,00	24,39	-	496.379.000,00
6	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.000.000.000,00	2.654.960.181,00	88,50	-	2.654.960.181,00
7	Dinas Sosial	333.000.000,00	330.600.000,00	99,28	-	330.600.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	4.000.000,00	2.500.000,00	62,50	-	2.500.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	15.030.000,00	(7.030.000,00)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	200.000.000,00	(200.000.000,00)
11	Dinas Perhubungan	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90	-	29.970.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	34.000.000,00	33.884.000,00	99,66	465.054.000,00	(431.170.000,00)
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	7.643.000,00	(7.643.000,00)
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	3.464.500.000,00	(3.464.500.000,00)
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.000.000,00	53.869.000,00	97,94	57.765.000,00	(3.896.000,00)
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00	-	11.000.000,00
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	76.000.000,00	75.579.500,00	99,45	37.000.000,00	38.579.500,00
Jumlah		19.381.361.000,00	16.675.226.681,00	86,04	4.967.732.000,00	11.707.494.681,00

Realisasi belanja Alat Berat naik cukup signifikan antara lain dikarenakan pengadaan mobil pompa air untuk mitigasi bencana banjir, tanggap darurat dan meminimalisasi banjir.

5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat Angkutan

Rp64.848.997.892,00

Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp65.805.937.000,00 dengan realisasi sebesar Rp64.848.997.892,00 atau 98,55%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp12.383.533.084,00 mengalami kenaikan sebesar Rp52.465.464.808,00 atau 423,67% dengan rincian sebagai berikut:



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.000.000.000,00	2.920.769.996,00	97,36	-	2.920.769.996,00
2	RSUD Dr. Moewardi	5.000.000.000,00	4.867.948.346,00	97,36	-	4.867.948.346,00
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	3.000.000.000,00	2.920.769.997,00	97,36	-	2.920.769.997,00
4	RSUD Dr. Rehatta	1.000.000.000,00	973.589.999,00	97,36	-	973.589.999,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.192.400.000,00	2.163.509.999,00	98,68	-	2.163.509.999,00
6	RSJD Dr. Arif Zainudin	1.000.000.000,00	973.589.999,00	97,36	-	973.589.999,00
7	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	1.000.000.000,00	973.589.999,00	97,36	-	973.589.999,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	555.121.000,00	(555.121.000,00)
9	Satuan Polisi Pamong Praja	559.900.000,00	559.900.000,00	100,00	-	559.900.000,00
10	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.000.000,00	76.100.000,00	92,80	-	76.100.000,00
11	Dinas Sosial	1.125.000.000,00	1.124.997.210,00	100,00	3.500.000,00	1.121.497.210,00
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	700.000.000,00	688.496.550,00	98,36	305.361.000,00	383.135.550,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	565.200.000,00	562.200.000,00	99,47	862.189.084,00	(299.989.084,00)
14	Dinas Perhubungan	2.079.000.000,00	2.078.150.000,00	99,96	-	2.078.150.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	550.000.000,00	548.000.000,00	99,64	-	548.000.000,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	536.000.000,00	513.700.000,00	95,84	-	513.700.000,00
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan	975.000.000,00	963.600.000,00	98,83	247.500.000,00	716.100.000,00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	691.541.000,00	(691.541.000,00)
19	Sekretariat Daerah	16.508.809.000,00	16.448.602.077,00	99,64	5.255.800.000,00	11.192.802.077,00
20	Sekretariat DPRD	16.231.628.000,00	16.230.783.720,00	99,99	-	16.230.783.720,00
21	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.890.000.000,00	3.731.400.000,00	95,92	3.040.000.000,00	691.400.000,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.275.000.000,00	1.212.100.000,00	95,07	-	1.212.100.000,00
23	Badan Kepegawaian Daerah	580.000.000,00	558.100.000,00	96,22	-	558.100.000,00
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	100,00	553.400.000,00	(488.400.000,00)
25	Badan Penghubung	3.891.000.000,00	3.694.100.000,00	94,94	-	3.694.100.000,00
26	Inspektorat	-	-	-	869.121.000,00	(869.121.000,00)
Jumlah		65.805.937.000,00	64.848.997.892,00	98,55	12.383.533.084,00	52.465.464.808,00

Realisasi Belanja Alat Angkutan naik cukup signifikan dikarenakan untuk pengadaan mobil ambulan pada Dinas Sosial dan kendaraan operasional kepala daerah pada Sekretariat Daerah

5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur

Rp475.000,00

Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur dianggarkan sebesar Rp500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp475.000,00 atau 95,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.442.982.230,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.442.507.230,00 atau 99,99% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	3.388.963.000,00	(3.388.963.000,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	16.600.000,00	(16.600.000,00)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	500.000,00	475.000,00	95,00	10.000.000,00	(9.525.000,00)
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	27.419.230,00	(27.419.230,00)
Jumlah		500.000,00	475.000,00	95,00	3.442.982.230,00	(3.442.507.230,00)

5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat Pertanian

Rp3.536.647.317,00

Belanja Modal Alat Pertanian dianggarkan sebesar Rp3.576.762.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.536.647.317,00 atau 98,88%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp13.457.024.775,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.920.377.458,00 atau 73,72%, Tahun Anggaran 2025 difokuskan untuk pembangunan infrastruktur khususnya pembangunan irigasi pertanian dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	196.828.500,00	(196.828.500,00)
2	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	-
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	157.200.000,00	157.175.757,00	99,98	110.249.183,00	46.926.574,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	94.658.000,00	(94.658.000,00)
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.406.562.000,00	3.366.571.560,00	98,83	13.055.289.092,00	(9.688.717.532,00)
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.000.000,00	2.900.000,00	96,67	-	2.900.000,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	10.000.000,00
Jumlah		3.576.762.000,00	3.536.647.317,00	98,88	13.457.024.775,00	(9.920.377.458,00)

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp35.129.174.264,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp37.863.631.000,00 dengan realisasi sebesar Rp35.129.174.264,00 atau 92,78%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp236.597.198.336,00 mengalami penurunan sebesar Rp201.468.024.072,00 atau 85,15% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.663.257.000,00	7.033.992.792,00	81,19	209.081.495.500,00	(202.047.502.708,00)
2	Dinas Kesehatan	196.750.000,00	184.929.871,00	93,99	131.380.000,00	53.549.871,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	673.420.000,00	668.476.000,00	99,27	2.098.570.000,00	(1.430.094.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	242.170.000,00	233.800.000,00	96,54	832.190.000,00	(598.390.000,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	87.500.000,00	85.100.000,00	97,26	359.240.800,00	(274.140.800,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	42.000.000,00	(42.000.000,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LRA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
7	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)
8	Dinas Sosial	3.830.440.000,00	3.807.158.000,00	99,39	280.050.000,00	3.527.108.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	713.582.000,00	675.492.500,00	94,66	1.559.653.384,00	(884.160.884,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	58.380.000,00	57.979.000,00	99,31	519.170.000,00	(461.191.000,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	486.103.000,00	(461.103.000,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	327.174.000,00	(327.174.000,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	59.480.000,00	(59.480.000,00)
14	Dinas Perhubungan	487.000.000,00	457.700.061,00	93,98	571.175.000,00	(113.474.939,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	91.000.000,00	90.500.000,00	99,45	16.800.000,00	73.700.000,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.700.000,00	2.550.000,00	94,44	224.965.000,00	(222.415.000,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	193.773.000,00	179.350.000,00	92,56	54.400.000,00	124.950.000,00
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	1.999.582.000,00	(1.999.582.000,00)
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	206.895.000,00	206.294.800,00	99,71	420.820.000,00	(214.525.200,00)
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	173.200.000,00	172.785.000,00	99,76	884.479.850,00	(711.694.850,00)
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	33.100.000,00	32.420.000,00	97,95	195.922.000,00	(163.502.000,00)
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	295.600.000,00	282.316.450,00	95,51	183.694.000,00	98.622.450,00
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	67.557.000,00	64.706.000,00	95,78	637.398.500,00	(572.692.500,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	233.900.000,00	233.489.000,00	99,82	1.110.591.000,00	(877.102.000,00)
25	Sekretariat Daerah	9.869.146.000,00	9.394.282.672,00	95,19	3.813.679.802,00	5.580.602.870,00
26	Sekretariat DPRD	2.053.176.000,00	1.910.933.501,00	93,07	1.749.502.000,00	161.431.501,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	285.000.000,00	281.150.000,00	98,65	207.700.000,00	73.450.000,00
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.078.500.000,00	6.030.877.010,00	99,22	7.318.032.500,00	(1.287.155.490,00)
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	875.400.000,00	874.390.000,00	99,88	443.720.000,00	430.670.000,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	208.643.000,00	187.710.000,00	89,97	79.925.000,00	107.785.000,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.848.437.000,00	1.611.927.267,00	87,20	105.400.000,00	1.506.527.267,00
32	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	49.970.000,00	(49.970.000,00)
33	Badan Penghubung	159.730.000,00	158.202.000,00	99,04	512.770.000,00	(354.568.000,00)
34	Inspektorat	63.000.000,00	61.436.640,00	97,52	130.205.000,00	(68.768.360,00)
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	147.375.000,00	124.225.700,00	84,29	69.960.000,00	54.265.700,00
Jumlah		37.863.631.000,00	35.129.174.264,00	92,78	236.597.198.336,00	(201.468.024.072,00)



Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga naik cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan antara lain untuk pengadaan sarana dan prasarana Panti Pelayanan Sosial dan Sekretariat Daerah serta pembuatan *Smart Class* pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar **Rp13.094.661.091,00**

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp14.209.736.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.094.661.091,00 atau 92,15%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.187.189.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.907.472.091,00 atau 111,64% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.439.058.000,00	2.227.531.905,00	91,33	176.858.000,00	2.050.673.905,00
2	Dinas Kesehatan	150.750.000,00	149.175.000,00	98,96	1.300.000,00	147.875.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	1.766.467.500,00	(1.766.467.500,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	193.180.000,00	(193.180.000,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	49.600.000,00	99,20	493.800.000,00	(444.200.000,00)
6	Dinas Sosial	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	128.170.000,00	(117.670.000,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	94.700.000,00	86.450.000,00	91,29	62.500.000,00	23.950.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	42.300.000,00	(42.300.000,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	638.000.000,00	627.000.000,00	98,28	74.350.000,00	552.650.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	40.000.000,00	37.600.000,00	94,00	71.000.000,00	(33.400.000,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	62.710.000,00	(62.710.000,00)
12	Dinas Perhubungan	43.500.000,00	43.440.000,00	99,86	-	43.440.000,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	683.625.000,00	680.924.600,00	99,60	198.000.000,00	482.924.600,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	115.580.000,00	(115.580.000,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	15.600.000,00	(15.600.000,00)
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	55.250.000,00	54.900.000,00	99,37	34.398.000,00	20.502.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.525.000,00	24.525.000,00	100,00	14.000.000,00	10.525.000,00
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.000.000,00	9.400.000,00	94,00	-	9.400.000,00
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	42.500.000,00	41.139.000,00	96,80	245.000.000,00	(203.861.000,00)
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	17.039.000,00	17.038.800,00	100,00	98.385.000,00	(81.346.200,00)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.322.000,00	18.322.000,00	100,00	157.190.000,00	(138.868.000,00)
22	Sekretariat Daerah	5.027.962.000,00	4.744.362.721,00	94,36	1.387.840.500,00	3.356.522.221,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	146.000.000,00	(136.000.000,00)
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	378.000.000,00	372.900.000,00	98,65	-	372.900.000,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
25	Badan Kepegawaian Daerah	81.900.000,00	-	-	-	-
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.872.500.000,00	2.796.931.896,00	97,37	430.215.000,00	2.366.716.896,00
27	Badan Penghubung	482.605.000,00	477.800.000,00	99,00	272.345.000,00	205.455.000,00
28	Inspektorat	980.000.000,00	557.120.169,00	56,85	-	557.120.169,00
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59.000.000,00	58.000.000,00	98,31	-	58.000.000,00
Jumlah		14.209.736.000,00	13.094.661.091,00	92,15	6.187.189.000,00	6.907.472.091,00

Realisasi Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi naik cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan antara lain pengadaan sarana dan prasarana gedung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta *Smart Class* pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan **Rp147.223.403.986,00**

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp159.973.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp147.223.403.986,00 atau 92,03%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp81.391.770.385,00 mengalami kenaikan sebesar Rp65.831.633.601,00 atau 80,88% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	219.525.000,00	216.241.125,00	98,50	-	216.241.125,00
2	RSUD Dr. Moewardi	53.984.685.000,00	47.151.186.500,00	87,34	19.015.400.000,00	28.135.786.500,00
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	12.967.079.000,00	12.063.950.677,00	93,04	35.804.996.000,00	(23.741.045.323,00)
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	9.000.000.000,00	8.644.855.000,00	96,05	14.781.638.700,00	(6.136.783.700,00)
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	27.302.570.000,00	26.222.483.300,00	96,04	1.809.500.000,00	24.412.983.300,00
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	20.753.084.000,00	20.165.691.004,00	97,17	2.150.126.330,00	18.015.564.674,00
7	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	15.963.450.000,00	13.994.377.149,00	87,67	6.381.999.355,00	7.612.377.794,00
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	19.734.777.000,00	18.717.219.231,00	94,84	1.448.110.000,00	17.269.109.231,00
9	Dinas Sosial	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	-	13.200.000,00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	-
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	35.000.000,00	34.200.000,00	97,71	-	34.200.000,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
Jumlah		159.973.370.000,00	147.223.403.986,00	92,03	81.391.770.385,00	65.831.633.601,00

Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan naik cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan pengadaan alat kedokteran untuk peningkatan pelayanan dan pemenuhan standar kompetensi rumah sakit yang bersumber dari DBHCHT



5.1.2.2.2.8 Belanja Modal Alat Laboratorium

Rp54.668.375.687,00

Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp58.948.255.000,00 dengan realisasi sebesar Rp54.668.375.687,00 atau 92,74%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp168.516.471.727,00 mengalami penurunan sebesar Rp113.848.096.040,00 atau 67,56% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.383.840.000,00	50.367.138.691,00	92,61	159.557.667.911,00	(109.190.529.220,00)
2	Dinas Kesehatan	3.104.150.000,00	2.850.873.777,00	91,84	-	2.850.873.777,00
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	53.000.000,00	(53.000.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	4.007.358.996,00	(4.007.358.996,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	475.405.000,00	474.905.000,00	99,89	1.100.503.000,00	(625.598.000,00)
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.750.000,00	42.982.000,00	90,01	1.281.480.000,00	(1.238.498.000,00)
7	Dinas Ketahanan Pangan	168.000.000,00	168.000.000,00	100,00	120.000.000,00	48.000.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22.000.000,00	19.500.000,00	88,64	158.500.000,00	(139.000.000,00)
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	503.000.000,00	501.968.199,00	99,79	27.975.000,00	473.993.199,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	119.110.000,00	118.608.020,00	99,58	56.500.000,00	62.108.020,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	1.350.975.570,00	(1.350.975.570,00)
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	125.000.000,00	124.400.000,00	99,52	802.511.250,00	(678.111.250,00)
Jumlah		58.948.255.000,00	54.668.375.687,00	92,74	168.516.471.727,00	(113.848.096.040,00)

Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium naik cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan antara lain untuk pengadaan Alat Laboratorium pada Balai Dinas Kelautan dan Perikanan.

5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Komputer

Rp47.474.690.090,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp50.116.385.000,00 dengan realisasi sebesar Rp47.474.690.090,00 atau 94,73%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16.972.995.167,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.501.694.923,00 atau 179,71% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.678.129.000,00	13.470.724.028,00	91,77	3.135.567.000,00	10.335.157.028,00
2	Dinas Kesehatan	223.700.000,00	206.594.000,00	92,35	177.869.769,00	28.724.231,00
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	42.600.000,00	42.599.997,00	100,00	-	42.599.997,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.729.500.000,00	1.703.945.998,00	98,52	914.250.000,00	789.695.998,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	296.500.000,00	294.700.000,00	99,39	1.425.050.000,00	(1.130.350.000,00)
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	84.500.000,00	84.500.000,00	100,00	348.300.000,00	(263.800.000,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LRA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	127.500.000,00	122.895.750,00	96,39	15.000.000,00	107.895.750,00
8	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	106.000.000,00	106.000.000,00	100,00		106.000.000,00
9	Dinas Sosial	1.196.535.000,00	1.138.300.000,00	95,13	674.380.000,00	463.920.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	423.890.000,00	414.050.000,00	97,68	1.387.250.000,00	(973.200.000,00)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46.580.000,00	46.550.000,00	99,94	187.838.000,00	(141.288.000,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan	74.100.000,00	70.600.000,00	95,28	401.520.000,00	(330.920.000,00)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	705.615.000,00	(705.615.000,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	84.000.000,00	76.560.000,00	91,14	-	76.560.000,00
15	Dinas Perhubungan	33.500.000,00	31.413.000,00	93,77	80.740.000,00	(49.327.000,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.977.760.000,00	19.282.432.301,00	96,52	515.820.600,00	18.766.611.701,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	75.000.000,00	70.800.000,00	94,40	313.325.000,00	(242.525.000,00)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	169.651.000,00	155.750.000,00	91,81	-	155.750.000,00
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	551.450.000,00	(551.450.000,00)
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	220.593.000,00	201.478.000,00	91,33	258.040.000,00	(56.562.000,00)
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	129.665.000,00	129.665.000,00	100,00	517.272.998,00	(387.607.998,00)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	183.000.000,00	181.950.000,00	99,43	22.775.000,00	159.175.000,00
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	286.800.000,00	283.150.008,00	98,73	229.890.000,00	53.260.008,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	51.000.000,00	50.848.001,00	99,70	672.209.000,00	(621.360.999,00)
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	363.200.000,00	361.925.000,00	99,65	871.435.000,00	(509.510.000,00)
26	Sekretariat Daerah	6.050.817.000,00	5.759.012.613,00	95,18	1.194.400.800,00	4.564.611.813,00
27	Sekretariat DPRD	142.000.000,00	130.925.000,00	92,20	658.400.000,00	(527.475.000,00)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	950.000.000,00	944.230.200,00	99,39	349.700.000,00	594.530.200,00
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	187.628.000,00	-	-	-	-
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	875.000.000,00	871.933.200,00	99,65	212.680.000,00	659.253.200,00
31	Badan Kepegawaian Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	74.000.000,00	76.000.000,00
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	739.000.000,00	696.499.994,00	94,25	-	696.499.994,00
33	Badan Riset dan Inovasi Daerah	150.000.000,00	149.100.000,00	99,40	251.920.000,00	(102.820.000,00)
34	Badan Penghubung	12.000.000,00	9.600.000,00	80,00	50.950.000,00	(41.350.000,00)
35	Inspektorat	62.612.000,00	61.410.000,00	98,08	-	61.410.000,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	193.625.000,00	174.548.000,00	90,15	775.347.000,00	(600.799.000,00)
Jumlah		50.116.385.000,00	47.474.690.090,00	94,73	16.972.995.167,00	30.501.694.923,00



5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Alat Eksplorasi

Rp230.224.595,00

Belanja Modal Alat Eksplorasi dianggarkan sebesar Rp260.455.000,00 dengan realisasi sebesar Rp230.224.595,00 atau 88,39%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp294.910.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp64.685.905,00 atau 21,93% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.855.000,00	31.855.000,00	100,00	188.665.000,00	(156.810.000,00)
2	Dinas Sosial	53.600.000,00	24.500.000,00	45,71	21.775.000,00	2.725.000,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	156.500.000,00	155.400.000,00	99,30	-	155.400.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.500.000,00	18.469.595,00	99,84	48.000.000,00	(29.530.405,00)
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	36.470.500,00	(36.470.500,00)
Jumlah		260.455.000,00	230.224.595,00	88,39	294.910.500,00	(64.685.905,00)

5.1.2.2.2.11 Belanja Modal Alat Pengeboran

Rp37.000.000,00

Belanja Modal Alat Pengeboran dianggarkan sebesar Rp37.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.000.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	-	37.000.000,00
Jumlah		37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	-	37.000.000,00

5.1.2.2.2.12 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian

Rp29.901.000,00

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.901.000,00 atau 99,67%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp83.614.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp53.713.000,00 atau 64,24% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	83.614.000,00	(83.614.000,00)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	30.000.000,00	29.901.000,00	99,67	-	29.901.000,00
Jumlah		30.000.000,00	29.901.000,00	99,67	83.614.000,00	(53.713.000,00)

5.1.2.2.2.13 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Rp0,00

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp101.325.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp101.325.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	2.250.000,00	(2.250.000,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	99.075.000,00	(99.075.000,00)
	Jumlah	-	-	-	101.325.000,00	(101.325.000,00)

5.1.2.2.2.14 Belanja Modal Alat Peraga

Rp310.790.510,00

Belanja Modal Alat Peraga dianggarkan sebesar Rp319.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp310.790.510,00 atau 97,43%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp70.161.057.989,00 mengalami penurunan sebesar Rp69.850.267.479,00 atau 99,56% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	300.000.000,00	291.790.510,00	97,26	68.539.185.000,00	(68.247.394.490,00)
2	Dinas Sosial	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-	4.000.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	1.621.872.989,00	(1.606.872.989,00)
	Jumlah	319.000.000,00	310.790.510,00	97,43	70.161.057.989,00	(69.850.267.479,00)

5.1.2.2.2.15 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi

Rp0,00

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)
	Jumlah	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)

5.1.2.2.2.16 Belanja Modal Rambu-Rambu

Rp1.421.977.300,00

Belanja Modal Rambu-Rambu dianggarkan sebesar Rp1.462.098.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.421.977.300,00 atau 97,26%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp916.794.400,00 mengalami kenaikan sebesar Rp505.182.900,00 atau 55,10% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan Badan Pengelola	1.342.098.000,00	1.301.977.300,00	97,01	916.794.400,00	385.182.900,00
2	Keuangan dan Aset Daerah	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	-	120.000.000,00
	Jumlah	1.462.098.000,00	1.421.977.300,00	97,26	916.794.400,00	505.182.900,00

5.1.2.2.2.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Rp0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp155.553.654.501,00 mengalami penurunan sebesar Rp155.553.654.501,00 atau 100,00% karena perubahan penggunaan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor



050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	155.553.654.501,00	(155.553.654.501,00)
	Jumlah	-	-	-	155.553.654.501,00	(155.553.654.501,00)

5.1.2.2.2.18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP **Rp144.066.946.033,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP dianggarkan sebesar Rp144.066.536.000,00 dengan realisasi sebesar Rp144.066.946.033,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp144.066.946.033,00 atau 100,00% karena perubahan penggunaan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	144.066.536.000,00	144.066.946.033,00	100,00	-	144.066.946.033,00
	Jumlah	144.066.536.000,00	144.066.946.033,00	100,00	-	144.066.946.033,00

5.1.2.2.2.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD **Rp107.997.028.101,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp133.752.245.000,00 dengan realisasi sebesar Rp107.997.028.101,00 atau 80,74%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp84.944.460.659,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.052.567.442,00 atau 27,14% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	35.000.000.000,00	31.604.238.157,00	90,30	13.122.681.203,00	18.481.556.954,00
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	71.100.000.000,00	65.042.790.117,00	91,48	54.364.215.851,00	10.678.574.266,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	12.253.652.000,00	4.157.153.362,00	33,93	11.776.180.504,00	(7.619.027.142,00)
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	2.056.200.000,00	1.532.511.290,00	74,53	1.017.563.125,00	514.948.165,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	5.010.112.000,00	1.148.079.474,00	22,92	1.317.545.730,00	(169.466.256,00)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	5.075.939.000,00	2.772.108.301,00	54,61	1.777.197.489,00	994.910.812,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	3.256.342.000,00	1.740.147.400,00	53,44	1.569.076.757,00	171.070.643,00
	Jumlah	133.752.245.000,00	107.997.028.101,00	80,74	84.944.460.659,00	23.052.567.442,00



5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp205.077.624.565,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp297.656.452.000,00 dengan realisasi sebesar Rp205.077.624.565,00 atau 68,90%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp411.044.257.004,00 mengalami penurunan sebesar Rp205.966.632.439,00 atau 50,11% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	142.107.258.000,00	134.712.646.781,00	94,80	297.916.636.832,00	(163.203.990.051,00)
2	Belanja Modal Bangunan Menara	200.000.000,00	198.787.800,00	99,39	-	198.787.800,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.502.571.000,00	2.149.067.739,00	85,87	775.701.990,00	1.373.365.749,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	152.846.623.000,00	68.017.122.245,00	44,50	112.351.918.182,00	(44.334.795.937,00)
Jumlah		297.656.452.000,00	205.077.624.565,00	68,90	411.044.257.004,00	(205.966.632.439,00)

5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Bangunan Gedung

Rp134.712.646.781,00

Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp142.107.258.000,00 dengan realisasi sebesar Rp134.712.646.781,00 atau 94,80%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp297.916.636.832,00 mengalami penurunan sebesar Rp163.203.990.051,00 atau 54,78% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.468.120.000,00	40.353.938.780,00	95,02	111.066.591.195,00	(70.712.652.415,00)
2	Dinas Kesehatan RSUD dr. Rehatta	151.080.000,00	151.012.788,00	99,96	16.715.123.485,00	(16.564.110.697,00)
3	Jepara	100.000.000,00	97.854.889,00	97,85	51.190.393.785,00	(51.092.538.896,00)
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	20.012.844.110,00	(20.012.844.110,00)
5	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	-	-	17.413.539.210,00	(17.413.539.210,00)
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	890.431.401,00	(890.431.401,00)
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	28.854.017.000,00	27.545.318.750,00	95,46	12.218.133.265,00	15.327.185.485,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	266.000.000,00	265.507.782,00	99,81	1.003.021.327,00	(737.513.545,00)
9	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.000.000,00	27.000.000,00	49,09	193.300.000,00	(166.300.000,00)
10	Dinas Sosial	1.666.250.000,00	1.488.989.247,00	89,36	168.511.819,00	1.320.477.428,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.062.000,00	69.737.000,00	99,54	1.107.531.310,00	(1.037.794.310,00)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	-	-	-	361.590.750,00	(361.590.750,00)
13	Dinas Ketahanan Pangan	90.000.000,00	86.136.000,00	95,71	1.604.635.500,00	(1.518.499.500,00)
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	632.668.219,00	(632.668.219,00)
15	Dinas Perhubungan	15.268.915.000,00	15.130.613.996,00	99,09	6.272.377.280,00	8.858.236.716,00
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9.020.000.000,00	7.849.445.380,00	87,02	3.196.744.849,00	4.652.700.531,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	226.769.000,00	226.767.810,00	100,00	5.667.437.999,00	(5.440.670.189,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	37.696.685.000,00	37.466.979.188,00	99,39	27.013.060.318,00	10.453.918.870,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.050.000.000,00	1.040.149.211,00	99,06	465.516.216,00	574.632.995,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.380.380.000,00	2.173.031.647,00	91,29	12.720.593.827,00	(10.547.562.180,00)
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	387.301.304,00	(387.301.304,00)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	493.980.000,00	492.955.913,00	99,79	6.540.539.696,00	(6.047.583.783,00)
23	Sekretariat DPRD	2.000.000.000,00	-	-	-	-
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000.000,00	197.658.000,00	98,83	346.247.511,00	(148.589.511,00)
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	728.502.456,00	(728.502.456,00)
26	Badan Kepegawaian Daerah	50.000.000,00	49.550.400,00	99,10	-	49.550.400,00
Jumlah		142.107.258.000,00	134.712.646.781,00	94,80	297.916.636.832,00	(163.203.990.051,00)

5.1.2.2.3.2 Belanja Modal Bangunan Menara Rp198.787.800,00

Belanja Modal Bangunan Menara dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp198.787.800,00 atau 99,39%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp198.787.800,00 atau 100,00% karena pembangunan lampu penerangan kolam pelabuhan di PP Tasikagung Kabupaten Rembang dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	200.000.000,00	198.787.800,00	99,39	-	198.787.800,00
Jumlah		200.000.000,00	198.787.800,00	99,39	-	198.787.800,00

5.1.2.2.3.3 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.149.067.739,00

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dianggarkan sebesar Rp2.502.571.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.149.067.739,00 atau 85,87%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp775.701.990,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.373.365.749,00 atau 177,05% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.101.231.000,00	1.748.601.939,00	83,22	-	1.748.601.939,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	14.985.000,00	(14.985.000,00)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	252.499.590,00	(252.499.590,00)
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	49.890.000,00	(49.890.000,00)
5	Sekretariat DPRD	-	-	-	44.536.000,00	(44.536.000,00)
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	401.340.000,00	400.465.800,00	99,78	413.791.400,00	(13.325.600,00)
Jumlah		2.502.571.000,00	2.149.067.739,00	85,87	775.701.990,00	1.373.365.749,00



5.1.2.2.3.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp68.017.122.245,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp152.846.623.000,00 dengan realisasi sebesar Rp68.017.122.245,00 atau 44,50%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp112.351.918.182,00 mengalami penurunan sebesar Rp44.334.795.937,00 atau 39,46% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	37.791.678.000,00	27.147.369.375,00	71,83	100.749.919.695,00	(73.602.550.320,00)
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	100.000.000.000,00	33.000.394.670,00	33,00	-	33.000.394.670,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	9.500.000.000,00	3.944.109.500,00	41,52	1.589.199.400,00	2.354.910.100,00
4	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	1.500.000.000,00	908.000.000,00	60,53	3.604.969.950,00	(2.696.969.950,00)
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	4.054.945.000,00	3.017.248.700,00	74,41	6.407.829.137,00	(3.390.580.437,00)
Jumlah		152.846.623.000,00	68.017.122.245,00	44,50	112.351.918.182,00	(44.334.795.937,00)

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp815.425.857.816,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp867.929.940.000,00 dengan realisasi sebesar Rp815.425.857.816,00 atau 93,95%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp366.478.924.044,00 mengalami kenaikan sebesar Rp448.946.933.772,00 atau 122,50%, dikarenakan perbaikan jalan dan jembatan sesuai program dan kegiatan infrastruktur yang diarahkan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	662.023.168.000,00	634.548.423.651,00	95,85	261.861.477.144,00	372.686.946.507,00
2	Bangunan Air	123.094.773.000,00	105.720.286.189,00	85,89	31.664.291.043,00	74.055.995.146,00
3	Instalasi	872.000.000,00	346.665.142,00	39,76	7.804.224.246,00	(7.457.559.104,00)
4	Jaringan	70.949.999.000,00	67.846.048.903,00	95,63	61.344.606.781,00	6.501.442.122,00
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD	10.990.000.000,00	6.964.433.931,00	63,37	3.804.324.830,00	3.160.109.101,00
Jumlah		867.929.940.000,00	815.425.857.816,00	93,95	366.478.924.044,00	448.946.933.772,00

5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp634.548.423.651,00

Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp662.023.168.000,00 dengan realisasi sebesar Rp634.548.423.651,00 atau 95,85%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp261.861.477.144,00 mengalami kenaikan sebesar Rp372.686.946.507,00 atau 142,32% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Rehatta	240.000.000,00	230.255.101,00	95,94	-	230.255.101,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	661.179.315.000,00	633.717.644.109,00	95,85	255.964.041.090,00	377.753.603.019,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.000.000,00	48.285.000,00	96,57	134.504.000,00	(86.219.000,00)
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	353.853.000,00	352.870.079,00	99,72	3.411.312.287,00	(3.058.442.208,00)
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	200.000.000,00	199.369.362,00	99,68	-	199.369.362,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	2.351.619.767,00	(2.351.619.767,00)
	Jumlah	662.023.168.000,00	634.548.423.651,00	95,85	261.861.477.144,00	372.686.946.507,00

5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air

Rp105.720.286.189,00

Belanja Modal Bangunan Air dianggarkan sebesar Rp123.094.773.000,00 dengan realisasi sebesar Rp105.720.286.189,00 atau 85,89%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp31.664.291.043,00 mengalami kenaikan sebesar Rp74.055.995.146,00 atau 233,88% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	121.258.428.000,00	103.885.983.189,00	85,67	28.664.604.720,00	75.221.378.469,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	50.000.000,00	(50.000.000,00)
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.836.345.000,00	1.834.303.000,00	99,89	2.949.686.323,00	(1.115.383.323,00)
	Jumlah	123.094.773.000,00	105.720.286.189,00	85,89	31.664.291.043,00	74.055.995.146,00

5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi

Rp346.665.142,00

Belanja Modal Instalasi dianggarkan sebesar Rp872.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp346.665.142,00 atau 39,76%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.804.224.246,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.457.559.104,00 atau 95,56% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	44.721.750,00	(44.721.750,00)
2	Dinas Kesehatan	143.000.000,00	142.000.000,00	99,30	-	142.000.000,00
3	RSUD Dr. Rehatta	579.000.000,00	55.000.000,00	9,50	-	55.000.000,00
4	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	-	-	335.522.000,00	(335.522.000,00)
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	3.407.100.000,00	(3.407.100.000,00)
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	1.660.791.670,00	(1.660.791.670,00)
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	68.613.172,00	(68.613.172,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	13.800.000,00	(13.800.000,00)
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	150.000.000,00	149.665.142,00	99,78	25.000.000,00	124.665.142,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	29.999.000,00	(29.999.000,00)
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	1.392.322.974,00	(1.392.322.974,00)
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	826.353.680,00	(826.353.680,00)
	Jumlah	872.000.000,00	346.665.142,00	39,76	7.804.224.246,00	(7.457.559.104,00)



5.1.2.2.4.4 Belanja Modal Jaringan

Rp67.846.048.903,00

Belanja Modal Jaringan dianggarkan sebesar Rp70.949.999.000,00 dengan realisasi sebesar Rp67.846.048.903,00 atau 95,63%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp61.344.606.781,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.501.442.122,00 atau 10,60% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	106.574.781,00	(106.574.781,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	70.604.999.000,00	67.511.091.903,00	95,62	61.238.032.000,00	6.273.059.903,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	345.000.000,00	334.957.000,00	97,09	-	334.957.000,00
Jumlah		70.949.999.000,00	67.846.048.903,00	95,63	61.344.606.781,00	6.501.442.122,00

5.1.2.2.4.5 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD

Rp6.964.433.931,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp10.990.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.964.433.931,00 atau 63,37%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.804.324.830,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.160.109.101,00 atau 83,07% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	10.790.000.000,00	6.866.246.931,00	63,64	3.152.858.480,00	3.713.388.451,00
2	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	100.000.000,00	-	-	67.128.000,00	(67.128.000,00)
3	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-	-	185.000.000,00	(185.000.000,00)
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	21.090.000,00	(21.090.000,00)
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	100.000.000,00	98.187.000,00	98,19	378.248.350,00	(280.061.350,00)
Jumlah		10.990.000.000,00	6.964.433.931,00	63,37	3.804.324.830,00	3.160.109.101,00

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rp124.550.819.262,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp127.390.078.000,00 dengan realisasi sebesar Rp124.550.819.262,00 atau 97,77%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp86.434.858.953,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.115.960.309,00 atau 44,10% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	597.580.000,00	588.332.634,00	98,45	984.924.745,00	(396.592.111,00)
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-	-	66.500.000,00	(66.500.000,00)
3	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	10.266.242.000,00	7.620.521.083,00	74,23	-	7.620.521.083,00
4	Belanja Aset Tetap Tak Berwujud	-	-	-	96.875.250,00	(96.875.250,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	-	-	85.256.873.221,00	(85.256.873.221,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	116.486.256.000,00	116.304.576.195,00	99,84	-	116.304.576.195,00
7	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	40.000.000,00	37.389.350,00	93,47	29.685.737,00	7.703.613,00
Jumlah		127.390.078.000,00	124.550.819.262,00	97,77	86.434.858.953,00	38.115.960.309,00

5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Rp588.332.634,00

Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp597.580.000,00 dengan realisasi sebesar Rp588.332.634,00 atau 98,45%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp984.924.745,00 mengalami penurunan sebesar Rp396.592.111,00 atau 40,27% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.500.000,00	3.487.000,00	99,63	-	3.487.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	25.000.000,00	24.911.000,00	99,64	24.818.000,00	93.000,00
3	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	1.449.000,00	(1.449.000,00)
4	Dinas Sosial	500.000,00	-	-	-	-
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	1.984.000,00	(1.984.000,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	1.992.000,00	(1.992.000,00)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	10.000.000,00	9.980.000,00	99,80	-	9.980.000,00
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	524.580.000,00	516.876.759,00	98,53	919.336.945,00	(402.460.186,00)
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	500.000,00	(500.000,00)
10	Sekretariat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-	5.000.000,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.000.000,00	18.623.875,00	98,02	19.946.000,00	(1.322.125,00)
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.000.000,00	9.454.000,00	94,54	14.898.800,00	(5.444.800,00)
Jumlah		597.580.000,00	588.332.634,00	98,45	984.924.745,00	(396.592.111,00)

5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/

Rp0,00

Kebudayaan/ Olahraga

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp66.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp66.500.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	66.500.000,00	(66.500.000,00)
Jumlah		-	-	-	66.500.000,00	(66.500.000,00)



5.1.2.2.5.3 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Rp7.620.521.083,00

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi dianggarkan sebesar Rp10.266.242.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.620.521.083,00 atau 74,23%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.620.521.083,00 atau 100,00%. Kenaikan Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi dari tahun sebelumnya merupakan renovasi rumah Dinas Wakil Gubernur dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	10.266.242.000,00	7.620.521.083,00	74,23	-	7.620.521.083,00
	Jumlah	10.266.242.000,00	7.620.521.083,00	74,23	-	7.620.521.083,00

5.1.2.2.5.4 Belanja Modal Aset Tetap Tak Berwujud

Rp0,00

Belanja Modal Aset Tetap Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp96.875.250,00 mengalami penurunan sebesar Rp96.875.250,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Inspektorat	-	-	-	96.875.250,00	(96.875.250,00)
	Jumlah	-	-	-	96.875.250,00	(96.875.250,00)

5.1.2.2.5.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Rp0,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp85.256.873.221,00 mengalami penurunan sebesar Rp85.256.873.221,00 atau 100,00% dikarenakan perubahan penggunaan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	85.256.873.221,00	(85.256.873.221,00)
	Jumlah	-	-	-	85.256.873.221,00	(85.256.873.221,00)

5.1.2.2.5.6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP

Rp116.304.576.195,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP dianggarkan sebesar Rp116.486.256.000,00 dengan realisasi sebesar Rp116.304.576.195,00 atau 99,84%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp116.304.576.195,00 atau 100,00% dikarenakan perubahan penggunaan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian sebagai berikut:



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116.486.256.000,00	116.304.576.195,00	99,84	-	116.304.576.195,00
	Jumlah	116.486.256.000,00	116.304.576.195,00	99,84	-	116.304.576.195,00

5.1.2.2.5.7 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp37.389.350,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.389.350,00 atau 93,47%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp29.685.737,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.703.613,00 atau 25,95% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	-	9.900.000,00
2	RSUD Dr. Adhyatma MPH	5.000.000,00	4.924.000,00	98,48	4.952.250,00	(28.250,00)
3	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	25.000.000,00	22.565.350,00	90,26	24.733.487,00	(2.168.137,00)
	Jumlah	40.000.000,00	37.389.350,00	93,47	29.685.737,00	7.703.613,00

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya Rp1.297.649.370,00

Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.493.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.297.649.370,00 atau 86,89%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp922.135.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp375.513.570,00 atau 40,72% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.488.500.000,00	1.297.649.370,00	87,18	772.135.800,00	525.513.570,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	5.000.000,00	-	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)
	Jumlah	1.493.500.000,00	1.297.649.370,00	86,89	922.135.800,00	375.513.570,00

5.1.2.2.6.1 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp1.297.649.370,00

Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud dianggarkan sebesar Rp1.488.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.297.649.370,00 atau 87,18%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp772.135.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp525.513.570,00 atau 68,06% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.000.000,00	109.837.000,00	85,81	-	109.837.000,00
2	Dinas Kesehatan	385.000.000,00	379.829.300,00	98,66	124.970.000,00	254.859.300,00
3	RSUD Dr. Rehatta	150.000.000,00	-	-	-	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	200.000.000,00	190.433.000,00	95,22	-	190.433.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	165.000.000,00	162.785.870,00	98,66	168.553.500,00	(5.767.630,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
6	Dinas Sosial	-	-	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)
7	Dinas Perhubungan	-	-	-	50.987.850,00	(50.987.850,00)
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	24.431.000,00	(24.431.000,00)
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	100.500.000,00	100.010.400,00	99,51	-	100.010.400,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-	20.000.000,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	190.000.000,00	187.867.500,00	98,88	188.500.000,00	(632.500,00)
13	Badan Kepegawaian Daerah	150.000.000,00	146.886.300,00	97,92	143.733.450,00	3.152.850,00
14	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	49.960.000,00	(49.960.000,00)
Jumlah		1.488.500.000,00	1.297.649.370,00	87,18	772.135.800,00	525.513.570,00

5.1.2.2.6.2 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

Rp0,00

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp150.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp150.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)
2	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	5.000.000,00	-	-	-	-
Jumlah		5.000.000,00	-	-	150.000.000,00	(150.000.000,00)

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Rp7.192.800.000,00

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.192.800.000,00 atau 28,77%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10.225.800.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.033.000.500,00 atau 29,66% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	7.192.800.000,00	28,77	10.225.800.500,00	(3.033.000.500,00)
Jumlah		25.000.000.000,00	7.192.800.000,00	28,77	10.225.800.500,00	(3.033.000.500,00)

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk Korban Bencana Banjir di Kabupaten Grobogan; tanah longsor dan gerak di Kabupaten Banjarnegara dan Brebes; Kebakaran Rumah di Kabupaten Grobogan; Darurat Bencana di Kabupaten Demak; kebakaran Kantor Walikota dan DPRD Kota Pekalongan; dan Kebakaran Pasar Kota Kabupaten Wonogiri.



5.1.2.4 Belanja Transfer

Rp6.588.994.469.941,00

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp7.076.818.456.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.588.994.469.941,00 atau 93,11%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.359.951.298.345,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.770.956.828.404,00 atau 29,60% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Bagi Hasil	4.494.697.452.000,00	4.084.034.975.804,00	90,86	6.334.544.870.221,00	(2.250.509.894.417,00)
2 Belanja Bantuan Keuangan	2.582.121.004.000,00	2.504.959.494.137,00	97,01	3.025.406.428.124,00	(520.446.933.987,00)
Jumlah	7.076.818.456.000,00	6.588.994.469.941,00	93,11	9.359.951.298.345,00	(2.770.956.828.404,00)

Belanja transfer **tidak terealisasi** antara lain dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan kabupaten telah menerima bantuan dari pemerintah pusat.

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Rp4.084.034.975.804,00

Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp4.494.697.452.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.084.034.975.804,00 atau 90,86%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.334.544.870.221,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.250.509.894.417,00 atau 35,53% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.494.697.452.000,00	4.084.034.975.804,00	90,86	6.334.544.870.221,00	(2.250.509.894.417,00)
Jumlah	4.494.697.452.000,00	4.084.034.975.804,00	90,86	6.334.544.870.221,00	(2.250.509.894.417,00)

Adapun rincian belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa adalah sebagai berikut :

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Kabupaten Semarang	138.064.813.000,00	125.439.229.708,00	90,86	205.824.764.480,00	(80.385.534.772,00)
2 Kabupaten Kendal	134.186.113.000,00	121.404.561.134,00	90,47	182.743.499.170,00	(61.338.938.036,00)
3 Kabupaten Demak	143.397.446.000,00	131.270.431.705,00	91,54	204.204.249.782,00	(72.933.818.077,00)
4 Kabupaten Grobogan	156.157.780.000,00	141.766.230.648,00	90,78	209.011.181.807,00	(67.244.951.159,00)
5 Kabupaten Pati	160.272.326.000,00	146.078.507.181,00	91,14	233.915.365.918,00	(87.836.858.737,00)
6 Kabupaten Kudus	124.038.039.000,00	112.599.774.237,00	90,78	177.332.887.514,00	(64.733.113.277,00)
7 Kabupaten Jepara	144.115.663.000,00	130.663.957.384,00	90,67	200.149.530.398,00	(69.485.573.014,00)
8 Kabupaten Rembang	87.771.994.000,00	69.900.355.806,00	79,64	126.552.960.032,00	(56.652.604.226,00)
9 Kabupaten Blora	101.125.929.000,00	93.149.509.713,00	92,11	136.360.848.209,00	(43.211.338.496,00)
10 Kabupaten Pekalongan	109.182.831.000,00	102.273.558.003,00	93,67	145.056.178.359,00	(42.782.620.356,00)
11 Kabupaten Batang	103.178.418.000,00	93.835.829.426,00	89,48	139.810.287.894,00	(45.974.458.468,00)
12 Kabupaten Peralang	151.488.343.000,00	135.550.547.295,00	91,47	191.738.404.378,00	(56.187.857.083,00)
13 Kabupaten Tegal	169.322.774.000,00	154.873.323.614,00	91,47	226.314.945.686,00	(71.441.622.072,00)
14 Kabupaten Brebes	190.269.470.000,00	173.208.138.520,00	91,03	247.112.559.819,00	(73.904.421.299,00)
15 Kabupaten Banyumas	191.203.346.000,00	173.630.003.883,00	90,81	268.279.615.582,00	(94.649.611.699,00)
16 Kabupaten Cilacap	202.361.348.000,00	185.205.155.241,00	91,52	274.488.276.998,00	(89.283.121.757,00)
17 Kabupaten Purbalingga	108.795.036.000,00	99.411.763.040,00	91,38	137.555.419.492,00	(38.143.656.452,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
18	Kabupaten Banjarnegara	108.183.686.000,00	100.137.723.482,00	92,56	143.349.394.057,00	(43.211.670.575,00)
19	Kabupaten Magelang	143.569.088.000,00	129.910.254.195,00	90,49	198.413.893.632,00	(68.503.639.437,00)
20	Kabupaten Temanggung	93.447.572.000,00	84.221.871.572,00	90,13	125.426.694.912,00	(41.204.823.340,00)
21	Kabupaten Wonosobo	94.419.621.000,00	86.873.498.177,00	92,01	124.196.881.222,00	(37.323.383.045,00)
22	Kabupaten Purworejo	93.891.286.000,00	85.869.941.637,00	91,46	123.330.794.714,00	(37.460.853.077,00)
23	Kabupaten Kebumen	141.342.483.000,00	129.339.182.267,00	91,51	181.816.080.313,00	(52.476.898.046,00)
24	Kabupaten Klaten	163.818.275.000,00	147.485.148.963,00	90,03	222.910.299.938,00	(75.425.150.975,00)
25	Kabupaten Boyolali	127.416.606.000,00	117.814.358.787,00	92,46	177.670.667.066,00	(59.856.308.279,00)
26	Kabupaten Sragen	131.014.373.000,00	118.614.664.580,00	90,54	191.330.567.896,00	(72.715.903.316,00)
27	Kabupaten Sukoharjo	132.358.642.000,00	120.472.202.465,00	91,02	194.613.756.219,00	(74.141.553.754,00)
28	Kabupaten Karanganyar	127.704.554.000,00	116.173.900.726,00	90,97	186.729.872.109,00	(70.555.971.383,00)
29	Kabupaten Wonogiri	113.890.573.000,00	103.830.489.599,00	91,17	154.333.901.275,00	(50.503.411.676,00)
30	Kota Semarang	309.524.693.000,00	279.028.263.571,00	90,15	570.096.274.220,00	(291.068.010.649,00)
31	Kota Pekalongan	56.314.951.000,00	51.343.814.084,00	91,17	74.727.559.186,00	(23.383.745.102,00)
32	Kota Surakarta	105.519.834.000,00	94.878.157.181,00	89,91	168.446.634.112,00	(73.568.476.931,00)
33	Kota Salatiga	47.886.318.000,00	44.234.941.060,00	92,37	68.637.111.128,00	(24.402.170.068,00)
34	Kota Tegal	52.564.665.000,00	49.199.377.241,00	93,60	71.660.821.321,00	(22.461.444.080,00)
35	Kota Magelang	36.898.563.000,00	34.346.309.679,00	93,08	50.402.691.383,00	(16.056.381.704,00)
	Jumlah	4.494.697.452.000,00	4.084.034.975.804,00	90,86	6.334.544.870.221,00	(2.250.509.894.417,00)

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Rp2.504.959.494.137,00

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp2.582.121.004.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.504.959.494.137,00 atau 97,01%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.025.406.428.124,00 mengalami penurunan sebesar Rp520.446.933.987,00 atau 17,20% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	589.655.055.000,00	542.528.545.137,00	92,01	1.045.686.246.124,00	(503.157.700.987,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.992.465.949.000,00	1.962.430.949.000,00	98,49	1.979.720.182.000,00	(17.289.233.000,00)
	Jumlah	2.582.121.004.000,00	2.504.959.494.137,00	97,01	3.025.406.428.124,00	(520.446.933.987,00)

5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah

Rp542.528.545.137,00

Provinsi ke Kabupaten/Kota

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp589.655.055.000,00 dengan realisasi sebesar Rp542.528.545.137,00 atau 92,01%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.045.686.246.124,00 mengalami penurunan sebesar Rp503.157.700.987,00 atau 48,12% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Kabupaten Semarang	51.656.500.000,00	50.029.229.991,00	96,85	38.569.432.136,00	11.459.797.855,00
2	Kabupaten Kendal	5.431.000.000,00	4.934.830.000,00	90,86	20.498.405.846,00	(15.563.575.846,00)
3	Kabupaten Demak	64.348.000.000,00	63.882.866.717,00	99,28	46.206.818.600,00	17.676.048.117,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
4	Kabupaten Grobogan	19.672.000.000,00	11.100.304.000,00	56,43	24.234.190.000,00	(13.133.886.000,00)
5	Kabupaten Pati	18.931.000.000,00	18.402.017.743,00	97,21	28.670.690.373,00	(10.268.672.630,00)
6	Kabupaten Kudus	11.913.500.000,00	11.666.896.830,00	97,93	15.539.244.500,00	(3.872.347.670,00)
7	Kabupaten Jepara	20.893.500.000,00	20.500.231.781,00	98,12	45.392.524.634,00	(24.892.292.853,00)
8	Kabupaten Rembang	7.751.000.000,00	1.001.000.000,00	12,91	44.248.149.500,00	(43.247.149.500,00)
9	Kabupaten Blora	49.191.000.000,00	47.808.306.602,00	97,19	57.697.584.762,00	(9.889.278.160,00)
10	Kabupaten Pekalongan	10.148.500.000,00	9.961.067.613,00	98,15	38.476.758.851,00	(28.515.691.238,00)
11	Kabupaten Batang	8.106.500.000,00	8.079.315.297,00	99,66	6.096.409.000,00	1.982.906.297,00
12	Kabupaten Pemalang	981.000.000,00	981.000.000,00	100,00	19.042.046.340,00	(18.061.046.340,00)
13	Kabupaten Tegal	8.930.653.500,00	8.748.661.166,00	97,96	23.182.098.500,00	(14.433.437.334,00)
14	Kabupaten Brebes	16.001.000.000,00	15.521.928.196,00	97,01	55.449.287.170,00	(39.927.358.974,00)
15	Kabupaten Banyumas	9.563.000.000,00	9.184.200.885,00	96,04	21.590.289.925,00	(12.406.089.040,00)
16	Kabupaten Cilacap	16.106.515.000,00	15.758.217.008,00	97,84	17.658.621.000,00	(1.900.403.992,00)
17	Kabupaten Purbalingga	6.012.180.000,00	5.975.140.399,00	99,38	7.112.788.000,00	(1.137.647.601,00)
18	Kabupaten Banjarnegara	12.941.326.000,00	11.512.738.000,00	88,96	53.085.735.000,00	(41.572.997.000,00)
19	Kabupaten Magelang	10.370.000.000,00	5.283.063.000,00	50,95	37.894.514.652,00	(32.611.451.652,00)
20	Kabupaten Temanggung	14.913.500.000,00	14.685.167.062,00	98,47	59.521.364.000,00	(44.836.196.938,00)
21	Kabupaten Wonosobo	48.108.000.000,00	47.086.515.200,00	97,88	57.545.230.500,00	(10.458.715.300,00)
22	Kabupaten Purworejo	14.751.000.000,00	14.596.049.800,00	98,95	22.978.010.200,00	(8.381.960.400,00)
23	Kabupaten Kebumen	29.031.000.000,00	28.396.934.262,00	97,82	86.528.970.500,00	(58.132.036.238,00)
24	Kabupaten Klaten	6.641.000.000,00	4.720.758.000,00	71,09	31.710.767.500,00	(26.990.009.500,00)
25	Kabupaten Boyolali	9.147.000.000,00	8.589.075.000,00	93,90	6.370.723.500,00	2.218.351.500,00
26	Kabupaten Sragen	21.886.088.500,00	20.999.968.000,00	95,95	18.197.132.500,00	2.802.835.500,00
27	Kabupaten Sukoharjo	2.738.500.000,00	2.664.740.000,00	97,31	17.983.398.000,00	(15.318.658.000,00)
28	Kabupaten Karanganyar	37.060.667.000,00	34.567.106.475,00	93,27	64.728.188.000,00	(30.161.081.525,00)
29	Kabupaten Wonogiri	6.001.000.000,00	5.955.700.000,00	99,25	26.695.463.000,00	(20.739.763.000,00)
30	Kota Semarang	21.559.500.000,00	14.564.933.339,00	67,56	8.966.172.320,00	5.598.761.019,00
31	Kota Pekalongan	3.901.500.000,00	3.879.249.953,00	99,43	20.387.693.500,00	(16.508.443.547,00)
32	Kota Surakarta	6.648.625.000,00	4.193.620.000,00	63,07	3.432.607.500,00	761.012.500,00
33	Kota Salatiga	10.926.500.000,00	10.068.663.000,00	92,15	9.659.516.350,00	409.146.650,00
34	Kota Tegal	946.500.000,00	946.500.000,00	100,00	6.730.666.465,00	(5.784.166.465,00)
35	Kota Magelang	6.446.500.000,00	6.282.549.818,00	97,46	3.604.753.500,00	2.677.796.318,00
	Jumlah	589.655.055.000,00	542.528.545.137,00	92,01	1.045.686.246.124,00	(503.157.700.987,00)

5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi
atau Kabupaten/Kota kepada Desa

Rp1.962.430.949.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa dianggarkan sebesar Rp1.992.465.949.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.962.430.949.000,00 atau 98,49%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.979.720.182.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp17.289.233.000,00 atau 0,87% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Kabupaten Semarang	36.113.500.000,00	34.723.500.000,00	96,15	37.180.000.000,00	(2.456.500.000,00)
2	Kabupaten Kendal	90.817.500.000,00	89.417.500.000,00	98,46	73.720.000.000,00	15.697.500.000,00
3	Kabupaten Demak	54.657.500.000,00	54.657.500.000,00	100,00	55.058.750.000,00	(401.250.000,00)
4	Kabupaten Grobogan	110.780.000.000,00	110.580.000.000,00	99,82	140.331.378.000,00	(29.751.378.000,00)
5	Kabupaten Pati	202.676.500.000,00	202.676.500.000,00	100,00	180.349.330.000,00	22.327.170.000,00
6	Kabupaten Kudus	23.517.949.000,00	23.317.949.000,00	99,15	15.980.000.000,00	7.337.949.000,00
7	Kabupaten Jepara	60.650.000.000,00	60.150.000.000,00	99,18	62.825.000.000,00	(2.675.000.000,00)
8	Kabupaten Rembang	32.317.500.000,00	31.017.500.000,00	95,98	27.327.500.000,00	3.690.000.000,00
9	Kabupaten Blora	97.231.000.000,00	94.131.000.000,00	96,81	82.083.000.000,00	12.048.000.000,00



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
10	Kabupaten Pekalongan	31.031.500.000,00	31.031.500.000,00	100,00	40.882.300.000,00	(9.850.800.000,00)
11	Kabupaten Batang	61.497.500.000,00	61.497.500.000,00	100,00	46.335.000.000,00	15.162.500.000,00
12	Kabupaten Pemalang	110.675.000.000,00	106.825.000.000,00	96,52	83.867.250.000,00	22.957.750.000,00
13	Kabupaten Tegal	51.840.000.000,00	51.740.000.000,00	99,81	51.105.000.000,00	635.000.000,00
14	Kabupaten Brebes	111.722.500.000,00	111.322.500.000,00	99,64	106.057.500.000,00	5.265.000.000,00
15	Kabupaten Banyumas	58.886.500.000,00	58.686.500.000,00	99,66	74.082.500.000,00	(15.396.000.000,00)
16	Kabupaten Cilacap	43.364.000.000,00	43.264.000.000,00	99,77	48.992.500.000,00	(5.728.500.000,00)
17	Kabupaten Purbalingga	47.314.500.000,00	47.214.500.000,00	99,79	52.868.750.000,00	(5.654.250.000,00)
18	Kabupaten Banjarnegara	45.370.000.000,00	45.170.000.000,00	99,56	55.307.000.000,00	(10.137.000.000,00)
19	Kabupaten Magelang	117.698.000.000,00	117.698.000.000,00	100,00	95.985.345.000,00	21.712.655.000,00
20	Kabupaten Temanggung	55.822.500.000,00	55.222.500.000,00	98,93	52.180.000.000,00	3.042.500.000,00
21	Kabupaten Wonosobo	73.874.000.000,00	73.774.000.000,00	99,86	94.566.250.000,00	(20.792.250.000,00)
22	Kabupaten Purworejo	40.577.500.000,00	40.577.500.000,00	100,00	35.935.751.000,00	4.641.749.000,00
23	Kabupaten Kebumen	47.941.500.000,00	45.691.500.000,00	95,31	47.327.500.000,00	(1.636.000.000,00)
24	Kabupaten Klaten	96.170.000.000,00	95.070.000.000,00	98,86	104.925.000.000,00	(9.855.000.000,00)
25	Kabupaten Boyolali	34.317.000.000,00	33.517.000.000,00	97,67	20.855.000.000,00	12.662.000.000,00
26	Kabupaten Sragen	44.972.500.000,00	42.452.500.000,00	94,40	51.103.750.000,00	(8.651.250.000,00)
27	Kabupaten Sukoharjo	49.092.500.000,00	47.642.500.000,00	97,05	69.680.000.000,00	(22.037.500.000,00)
28	Kabupaten Karanganyar	113.047.500.000,00	108.522.500.000,00	96,00	127.715.578.000,00	(19.193.078.000,00)
29	Kabupaten Wonogiri	48.490.000.000,00	44.840.000.000,00	92,47	45.093.250.000,00	(253.250.000,00)
Jumlah		1.992.465.949.000,00	1.962.430.949.000,00	98,49	1.979.720.182.000,00	(17.289.233.000,00)

5.1.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Rp577.049.291.379,00

Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp577.013.677.000,00 dengan realisasi sebesar Rp577.049.291.379,00 atau 100,01%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.385.420.547.664,00 mengalami penurunan sebesar Rp808.371.256.285,00 atau 58,35% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,01	1.406.120.547.664,00	(829.071.256.285,00)
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	20.700.000.000,00	(20.700.000.000,00)
Jumlah		577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,01	1.385.420.547.664,00	(808.371.256.285,00)

5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Rp577.049.291.379,00

Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp577.013.677.000,00 dengan realisasi sebesar Rp577.049.291.379,00 atau 100,01%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.406.120.547.664,00 mengalami penurunan sebesar Rp829.071.256.285,00 atau 58,96% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	577.013.677.000,00	576.951.194.428,00	99,99	900.186.419.964,00	(323.235.225.536,00)
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	505.869.400.000,00	(505.869.400.000,00)



		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	98.096.951,00	-	64.727.700,00	33.369.251,00
Jumlah		577.013.677.000,00	577.049.291.379,00	100,01	1.406.120.547.664,00	(829.071.256.285,00)

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya **Rp576.951.194.428,00**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ditargetkan sebesar Rp577.013.677.000,00 dengan realisasi sebesar Rp576.951.194.428,00 atau 99,99%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp900.186.419.964,00 mengalami penurunan sebesar Rp323.235.225.536,00 atau 35,91% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	90.952.107.000,00	90.952.110.795,00	100,00	59.042.755.000,00	31.909.355.795,00
2	Penghematan Belanja	50.618.784.000,00	50.556.302.096,00	99,88	230.977.517.964,00	(180.421.215.868,00)
3	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	435.442.786.000,00	435.442.781.537,00	100,00	610.166.147.000,00	(174.723.365.463,00)
Jumlah		577.013.677.000,00	576.951.194.428,00	99,99	900.186.419.964,00	(323.235.225.536,00)

5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan **Rp0,00**

Pencairan Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp505.869.400.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp505.869.400.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	505.869.400.000,00	(505.869.400.000,00)
Jumlah		-	-	-	505.869.400.000,00	(505.869.400.000,00)

5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah **Rp98.096.951,00**

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah terealisasi sebesar Rp98.096.951,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp64.727.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp33.369.251,00 atau 51,55% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	14.950.496,00	-	-	14.950.496,00
2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	83.146.455,00	-	64.727.700,00	18.418.755,00
Jumlah		-	98.096.951,00	-	64.727.700,00	33.369.251,00



5.1.3.1.3.1 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp14.950.496,00 kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp14.950.496,00 atas Dana Talangan Kabupaten Cilacap, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.950.496,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Dana Talangan Kab Cilacap	-	14.950.496,00	-	-	14.950.496,00
Jumlah	-	14.950.496,00	-	-	14.950.496,00

5.1.3.1.3.2 Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat Rp83.146.455,00

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat terealisasi sebesar Rp83.146.455,00 atas pengembalian dana bergulir, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp64.727.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.418.755,00 atau 28,46% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	-	8.500.000,00	-	6.950.000,00	1.550.000,00
2 Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	-	9.500.000,00	-	-	9.500.000,00
3 Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM (Disperindag)	-	63.146.455,00	-	57.277.700,00	5.868.755,00
4 Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan & Keswan)	-	-	-	500.000,00	(500.000,00)
5 Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
Jumlah	-	83.146.455,00	-	64.727.700,00	18.418.755,00

5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp0,00

Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp20.700.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.700.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	20.700.000.000,00	(20.700.000.000,00)
Jumlah	-	-	-	20.700.000.000,00	(20.700.000.000,00)



5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Rp0,00

Penyertaan Modal Daerah terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp20.700.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.700.000.000,00 atau 100,00% karena dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2025 (Rp)	%	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1 Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	-	-	-	20.700.000.000,00	(20.700.000.000,00)
Jumlah	-	-	-	20.700.000.000,00	(20.700.000.000,00)

5.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp467.180.140.000,00, SiLPA tersebut dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Pelampauan Penerimaan PAD	(726.152.777.664,00)	(943.125.711.496,00)
2 Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(166.756.996.492,00)	90.952.110.795,00
3 Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	287.504.033,00	750.474.120,00
4 Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	35.614.379,00	2.245.812,00
5 Penghematan Belanja	1.359.766.795.744,00	1.379.134.557.049,00
6 Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan		
7 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	-	49.300.000.000,00
Jumlah	467.180.140.000,00	577.013.676.280,00

Penjelasan SiLPA Tahun Anggaran 2025 dimaksud termasuk di dalamnya :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kas di Rekening Kas Umum Daerah	28.219.099.330,00	130.694.126.408,00
2 Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	-	-
3 Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	141.193.000,00	141.221.000,00
4 Kas di Bendahara BLUD	428.814.703.116,00	435.442.781.537,00
5 Kas di Bendahara Sekolah	10.005.144.554,00	10.735.547.335,00
6 Setara Kas (Deposito RKUD)	-	-
Jumlah	467.180.140.000,00	577.013.676.280,00

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan kebudayaan	1.014.000,00	4.093.500,00
2 Dinas Kesehatan	12.675.000,00	-
3 Dinas Perhubungan	115.357.000,00	106.366.000,00
4 Dinas LH & Kehutanan	9.434.500,00	14.983.000,00



		2025 (Rp)	2024 (Rp)
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.400.000,00	-
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	312.500,00	15.778.500,00
Jumlah		141.193.000,00	141.221.000,00

Kas di Bendahara BLUD

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	165.595.192.433,00	84.505.649.118,00
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	183.004.388.768,00	265.055.669.054,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	37.924.908.216,00	44.778.372.589,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	2.676.627.671,00	1.457.564.612,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	18.762.536.485,00	20.517.112.138,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	8.419.475.883,00	11.154.728.701,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	12.431.573.660,00	7.973.685.325,00
Jumlah		428.814.703.116,00	435.442.781.537,00

Kas di Bendahara Sekolah

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.469.867.199,00	3.241.878.486,00
2	Bantuan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.535.277.355,00	7.493.668.849,00
Jumlah		10.005.144.554,00	10.735.547.335,00

➤ SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp467.180.140.000,00 terdapat SiLPA Terikat dari :

a. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Jenis DAK Non Fisik	Tahun 2024	Tahun 2025
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	336.004.882,00	336.004.882,00
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	48.217.350,00	28.266.050,00
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	176.200.252,00	98.939.391,00
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	7.251.749,00	7.251.749,00
Bantuan Operasional Sekolah	3.218.476.872,00	1.475.509.129,00
Bantuan Operasional Kesehatan & KB	7.645.489.733,00	9.734.681.584,00
Tunjangan Profesi Guru	1.072.217.400,00	1.072.217.400,00
Tambahan Penghasilan Guru	566.370.999,00	566.370.999,00
Tunjangan Khusus Guru	610.588.000,00	610.588.000,00
Ketahanan pangan dan Pertanian	-	2.714.650,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum & Taman Budaya	55.280.956,00	74.530.633,00
Bantuan Pengembangan Kerasipan	-	59.136.381,00
Total DAK Non Fisik	13.736.098.193,00	14.066.210.848,00

b. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

1	Sisa DBH CT s.d TA 2024	14.743.784.419,00
2	Transfer DBH CT TA 2024 (Reguler)	389.857.340.000,00



3	Kurang Bayar tahun sebelumnya yang dibayarkan di Tahun 2024	9.816.588.000,000
4	Ketersediaan DBH CT di Kasda TA 2024 (4=1+2+3)	414.417.712.419,00
5	Realisasi penggunaan DBH CT TA 2024	381.639.675.608,00
6	Sisa DBH CT s.d TA 2024 (6=4-5)	32.778.036.811,00

- c. Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan, disalurkan sebesar Rp185.898.217.000,00 terealisasi sebesar Rp185.283.536.126,00 atau 99,67% sisa sebesar Rp614.680.874,00, sedangkan DAU bidang Kesehatan disalurkan sebesar Rp53.530.243.000,00 terealisasi sebesar Rp52.205.949.335,00 atau 97,53% sisa sebesar Rp1.324.293.665,00



5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Rp576.951.194.428,00

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2025 sebesar Rp576.951.194.428,00 merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 terdiri dari:

No	Uraian	2025	2024
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	130.694.126.408,00	275.800.966.203,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	3.172.782,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	141.221.000,00	348.056.200,00
4	Kas di BLUD	435.442.781.537,00	610.166.143.275,00
5	Kas di Bendahara Sekolah	10.673.065.483,00	13.868.081.504,00
Jumlah		576.951.194.428,00	900.186.419.964,00

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Rp576.951.194.428,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan sebesar Rp576.951.194.428,00 merupakan penggunaan atas bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

Rp467.180.140.000,00

Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp467.180.140.000,00 terdiri dari:

No	Uraian	2025	2024
1	Pendapatan Asli daerah	14.973.131.878.336,00	17.650.936.913.504,00
2	Pendapatan Transfer	8.625.363.756.508,00	8.701.438.866.795,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	163.473.343.033,00	26.343.846.120,00
Jumlah		23.761.968.977.877,00	26.378.719.626.419,00
1	Belanja Operasi	15.480.092.183.316,00	16.083.865.301.964,00
2	Belanja Modal	1.795.558.675.999,00	1.733.084.096.994,00
3	Belanja Tidak Terduga	7.192.800.000,00	10.225.800.500,00
4	Belanja Transfer	6.588.994.469.941,00	9.359.951.298.345,00
Jumlah		23.871.838.129.256,00	27.187.126.497.803,00
1	Penerimaan Pembiayaan	577.049.291.379,00	1.406.120.547.664,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	-	20.700.000.000,00
Jumlah		577.049.291.379,00	1.385.420.547.664,00
SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan		467.180.140.000,00	577.013.676.280,00



5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya **Rp6.588.400,00**

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp6.588.400,00 merupakan koreksi atas Sisa Dana BOP tahun sebelumnya sebesar (Rp1.100,00) yang terdiri dari SMKN 1 Warureja sebesar (Rp300,00), SMAN 1 Kersana sebesar (Rp800,00), serta Sisa Dana BOS tahun sebelumnya sebesar Rp6.589.500,00 yang terdiri dari SMKN 1 Tembarak sebesar Rp4.500,00, SMKN 1 Alian sebesar Rp6.586.000,00, dan SMKN 2 Wonogiri sebesar (Rp1.000,00).

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir **Rp467.180.140.000,00**

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2025 sebesar Rp467.180.140.000,00 berasal dari:

No	Uraian	2025	2024
1	Realisasi Pendapatan	23.761.968.977.877,00	26.378.719.626.419,00
2	Realisasi Belanja dan Transfer	23.871.838.129.256,00	27.187.126.497.803,00
3	Penerimaan Pembiayaan	577.049.291.379,00	1.406.120.547.664,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	20.700.000.000,00
SILPA		467.180.140.000,00	577.013.676.280,00

Saldo ini terdiri dari:

No	Uraian	2025	2024
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah		
	- Giro di bank Jateng	28.219.099.330,00	130.694.126.408,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan (Pendapatan yg Blm disetor ke RKUD)		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.014.000,00	4.093.500,00
	- Dinas Kesehatan	12.675.000,00	-
	- Dinas Perhubungan	115.357.000,00	106.366.000,00
	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.434.500,00	14.983.000,00
	- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.400.000,00	-
	- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	312.500,00	15.778.500,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Kas di BLUD		
	Rekening Giro Kas Bendahara BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta	135.482.681.453,00	84.413.911.050,00
	- RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	32.982.430.169,00	25.022.145.973,00
	- RSUD Adhyatma Semarang	37.904.427.216,00	44.775.042.139,00
	- RSUD Rehatta kelet/Donorojo	1.674.927.936,00	1.439.571.287,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang	18.240.302.198,00	20.007.805.816,00
	- RSJD Arif Zainudin Surakarta	8.320.843.727,00	11.091.349.565,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	10.429.047.361,00	5.971.752.581,00
	Setara Kas BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BTN)	30.000.000.000,00	-
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (BNI)	30.000.000.000,00	45.000.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (Bank Jateng)	30.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (BRI)	35.000.000.000,00	45.000.000.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LPSAL
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No	Uraian	2025	2024
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (Mandiri)	-	50.000.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (BTN)	5.000.000.000,00	-
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (BSI)	50.000.000.000,00	-
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo (BTN)	500.000.000,00	500.000.000,00
	- RSUD Rehatta kelet/Donorojo (Bank Jateng)	1.000.000.000,00	-
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten (Bank Jateng)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta	112.510.980,00	91.738.068,00
	- RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	21.958.599,00	33.523.081,00
	- RSUD Adhyatma Semarang	20.481.000,00	3.330.450,00
	- RSUD Rehatta kelet/Donorojo	1.699.735,00	17.993.325,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang	22.234.287,00	9.306.322,00
	- RSJD Arif Zainudin Surakarta	98.632.156,00	63.379.136,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	2.526.299,00	1.932.744,00
5	Kas di Bendahara Sekolah		
	- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.476.456.699,00	3.218.476.872,00
	- Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	8.535.276.255,00	7.454.588.611,00
	Jumlah	467.186.728.400,00	576.951.194.428,00



5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Struktur penyajian Neraca Tahun Anggaran 2025 dan 2024 mendasari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ringkasan Neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 ASET

Rp42.669.981.048.262,92

Total Aset sebesar Rp42.669.981.048.262,92 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40.261.948.714.318,57 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.408.032.333.944,35 atau 5,98%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Aset Lancar	3.229.280.800.215,54	3.427.967.953.973,52
2 Investasi Jangka Panjang	8.366.495.471.980,20	7.929.016.426.114,62
3 Aset Tetap	28.783.275.371.739,16	26.620.736.197.275,90
4 Dana Cadangan	-	-
5 Aset Lainnya	1.856.864.727.740,53	2.146.938.213.796,85
6 Properti Investasi	434.064.676.587,49	137.289.923.157,68
Jumlah	42.669.981.048.262,92	40.261.948.714.318,57

5.3.1.1 ASET LANCAR

Rp3.229.280.800.215,54

Aset Lancar sebesar Rp3.229.280.800.215,54 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.427.967.953.973,52 mengalami **penurunan** sebesar (Rp198.687.153.757,98) atau (5,80%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kas dan Setara Kas	479.270.048.280,93	587.530.474.411,09
2 Investasi Jangka Pendek	-	-
3 Piutang Pajak Daerah	2.435.663.820.047,00	2.897.664.180.980,00
4 Piutang Retribusi Daerah	93.556.799.785,66	111.893.619.660,73
5 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6 Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.593.345.868,38	1.832.728.064,88
7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	432.276.078.000,00	53.079.604.000,00
8 Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9 Piutang Lainnya	12.290.770.884,00	15.157.041.204,00
10 Penyisihan Piutang	(528.086.571.242,19)	(560.159.696.288,11)
11 Beban Dibayar Dimuka	4.989.015.590,64	5.086.493.552,91
12 Persediaan	297.727.493.001,12	315.883.508.388,02
Jumlah	3.229.280.800.215,54	3.427.967.953.973,52

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Rp479.270.048.280,93

Kas dan Setara Kas sebesar Rp479.270.048.280,93 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp587.530.474.411,09 mengalami **penurunan** sebesar (Rp108.260.426.130,16) atau (18,43%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kas di Kas Daerah	28.219.099.330,00	130.694.126.408,00



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2 Kas di Bendahara Penerimaan	214.503.000,00	141.221.000,00
3 Kas di Bendahara Pengeluaran	-	585.782.732,00
4 Kas di BLUD	432.067.616.212,93	438.815.860.716,09
5 Kas Dana BOS	1.517.881.717,00	3.218.476.872,00
6 Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-
7 Kas Lainnya	17.250.948.021,00	14.075.006.683,00
8 Setara Kas	-	-
Jumlah	479.270.048.280,93	587.530.474.411,09

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Rp28.219.099.330,00

Kas di Kas Daerah sebesar Rp28.219.099.330,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp130.694.126.408,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp102.475.027.078,00) atau (78,41%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kas di BUD No rek 1.034.01504.7	28.219.099.330,00	130.694.126.408,00
Jumlah	28.219.099.330,00	130.694.126.408,00

Kas di Kas Daerah sebesar Rp28.219.099.330,00 didalamnya termasuk transaksi pemindahbukuan Kas dari Rekening Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto ke Rekening Kas Umum Daerah dalam rangka Manajemen Kas Pemerintah Daerah sebesar Rp250.000.000.000,00 tanggal 24 Desember 2025 sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 100.3.3.4/65 Tahun 2025 tanggal 15 Desember 2025. Atas transaksi tersebut, telah dilakukan pemindahbukuan dari Rekening kas Umum Daerah ke Rekening Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto senilai Rp250.000.000.000,00 tanggal 3 Februari 2026.

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Rp214.503.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp214.503.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp141.221.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp73.282.000,00 atau 51,89% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kas Bendahara Penerimaan SiLPA	141.193.000,00	141.221.000,00
2 Kas Bendahara Penerimaan Non SiLPA	73.310.000,00	-
Jumlah	214.503.000,00	141.221.000,00

5.3.1.1.1.2.1 Kas di Bendahara Penerimaan SiLPA

Rp141.193.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan SiLPA sebesar Rp141.193.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp141.221.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp28.000,00) atau (0,02%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.014.000,00	4.093.500,00
2 Dinas Kesehatan	12.675.000,00	-
3 Dinas Perhubungan	115.357.000,00	106.366.000,00
4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.434.500,00	14.983.000,00
5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	312.500,00	15.778.500,00
6 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.400.000,00	-
Jumlah	141.193.000,00	141.221.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan SiLPA Tahun 2025 telah disetor ke rekening kas daerah pada Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	No. STS / Slip Setor	Tgl Penyetoran	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
a.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III			
	Pembayaran Kantin Tipe B - SLBN Lasem tahun 2025	-	19 Februari 2026	1.014.000,00
	Total Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			1.014.000,00
2	Dinas Kesehatan			
a.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Balkesmas Wilayah Pati hari Klaim TCM TW III Tahun 2025	3310919000090500	2 Januari 2026	3.295.000,00
b.	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Balai Pengobatan, Klaim TCM TW III Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025	3310916000075700	6 Januari 2026	9.380.000,00
	Total Dinas Kesehatan			12.675.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			
a.	Sekretariat			
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Tiket Masuk Wisata Mongkrang tanggal 31 Desember 2025	-	02 Januari 2026	4.434.500,00
b.	Kebun Raya Baturraden			
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Tiket Kendaraan Kebun Raya Baturraden tanggal 31 Desember 2025	-	02 Januari 2026	210.000,00
	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Tiket Pengunjung Kebun Raya Baturraden tanggal 31 Desember 2025	-	02 Januari 2026	4.790.000,00
	Total Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			9.434.500,00
4	Dinas Perhubungan			
a.	BPSPP Wilayah I			
	Retribusi Parkir Terminal Penggaron Periode 31 Desember 2025. 8/2000, 19/3000, 6/4000, 1/20000	3310941000127000	02 Januari 2026	117.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Purwodadi Tanggal 31 Desember 2025, 2000/13, 3000/4, 4000/112, 20000/4	3310941000126800	02 Januari 2026	566.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Bintoro Tanggal 31 Desember 2025, 2000/07, 3000/02, 4000/10	3310941000126900	02 Januari 2026	60.000,00
b.	BPSPP Wilayah II			
	Retribusi Parkir Terminal Gagak Rimang Tanggal 31 Desember 2025, 2000/0, 3000/1, 4000/9, 20000/8	3310942000049200	02 Januari 2026	199.000,00
c.	BPSPP Wilayah III			
	Retribusi Parkir Terminal Tawangmangu Tanggal 31 Desember 2025 2000/52 3000/44 4000/31 20000/1 Pariwisata 20000/1 15000/2 10000/2	3310943000487400	02 Januari 2026	450.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Jatisrono Tanggal 31 Desember 2025, 2000/20, 3000/10, 4000/41	3310943000487300	02 Januari 2026	234.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Sukoharjo Tanggal 31 Desember 2025 RD 2 2.000 (11) RD 4 3.000 (9) RD 4 4.000 (58) TBB BB 20.000 (1)	3310943000487200	02 Januari 2026	301.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Tegalgede Tanggal 31 Desember 2025 , 2000/75, 3000/45, 4000/13	3310943000487000	02 Januari 2026	337.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Pracimantoro Tanggal 31 Desember 2025, 2000/12, 3000/12, 4000/20	3310943000487100	02 Januari 2026	140.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Purwantoro Tanggal 31 Desember 2025, (2.000-16), (3.000-8), (4.000-36)	3310943000486800	02 Januari 2026	200.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Kartasura Tanggal 31 Desember 2025, 2000/15, 3000/30, 4000/60, 20.000/2	3310943000486900	02 Januari 2026	400.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Penggung Tanggal 31 Desember 2025 2000/22, 3000/21, 4000/26	3310943000486700	02 Januari 2026	211.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	No. STS / Slip Setor	Tgl Penyetoran	Nilai
	Retribusi Parkir Terminal Pilangsari Tanggal 31 Desember 2025, 2000/40, 3000/29, 4000/65, 20000/2	3310943000486600	02 Januari 2026	467.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Baturetno Tanggal 31 Desember 2025, 2.000(13), 3.000(13), 4.000(20)	3310943000486400	02 Januari 2026	145.000,00
d.	BPSPP Wilayah IV			
	Retribusi Parkir Terminal Drs. Prajitno tgl. 31 Desember 2025, 2.000/9 3.000/41 4.000/25	3310944000156500	02 Januari 2026	241.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Madureso tgl. 31 Desember 2025, 2.000/7 3.000/6 4.000/40	3310944000156400	02 Januari 2026	192.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Kutoarjo tgl. 31 Desember 2025, 2.000/6 3.000/6 4.000/7	3310944000156100	02 Januari 2026	58.000,00
e.	BPSPP Wilayah V			
	Retribusi Parkir Terminal Purbalingga Tanggal 31 Desember 2025, 2000/16, 3000/68, 4000/60	3310945000107200	02 Januari 2026	476.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Banjarnegara Tanggal 31 Desember 2025, 2000/45, 3000/42, 4000/30, 20.000/1	3310945000107100	02 Januari 2026	356.000,00
f.	BPSPP Wilayah VI			
	Retribusi Parkir Terminal Tanjung tanggal 31 Desember 2025, 2000/3, 4000/58, 20000/3	3310946000193400	02 Januari 2026	298.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Kajen tanggal 31 Desember 2025, 3000/18, 4000/16, 20000/4	3310946000193300	02 Januari 2026	198.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Bumiayu tanggal 31 Desember 2025, 2000/40, 3000/4, 4000/12, 20000/2	3310946000193200	02 Januari 2026	180.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Banyuputih tanggal 31 Desember 2025, 2000/7, 3000/18, 4000/17, 20000/4	3310946000193100	02 Januari 2026	216.000,00
g.	Balai Transportasi Jawa Tengah			
	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2025 Barlingmascakeb U.1.700.000 P.17.000 B.8.000 V.0 D.1.000 L.14.000 (NON TUNAI)	3310947000266600	02 Januari 2026	1.740.000,00
	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2025 Barlingmascakeb U.11.560.000 P.152.000 B.569.000 V.0 D.17.000 L.520.000 (TUNAI)	3310947000266500	02 Januari 2026	12.818.000,00
	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng (Non Tunai) Periode Tanggal 31 Desember 2025 Semarang - Bawen U.3.715.000 P.50.000 B.11.000 V.1.000 D.0 L.21.000	3310947000266400	02 Januari 2026	3.798.000,00
	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2025 Semarang - Gubug U.13.150.000 P.103.000 B.756.000 V.1.000 D.3.000 L.378.000	3310947000266200	02 Januari 2026	13.676.000,00
				715.000,00
	Penyetoran Pendapatan (Non Tunai) BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2025 Rute Semarang - Kendal U.1.080.000 P.19.000 B.25.000 V.0 D.0 L.0	3310947000265900	02 Januari 2026	1.124.000,00
	Penyetoran Pendapatan NonTunai BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2025 Rute Solo-Wonogiri U.3.505.000 P.28.000 B.12.000 V.0 D.0 L.47.000	3310947000265800	02 Januari 2026	3.592.000,00
	Penyetoran Pendapatan Non Tunai BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2025 Rute Solo - Sragen U.795.000 P.9.000 B.6.000 V.0 D.0 L.12.000	3310947000265500	02 Januari 2026	822.000,00
	Penyetoran Pendapatan Tunai BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2025 Rute Solo-Wonogiri U.13.245.000 P.201.000 B.230.000 V.1.000 D.14.000 L.536.000	3310947000265600	02 Januari 2026	14.227.000,00
	Penyetoran Pendapatan Non Tunai BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2025 Rute Magelang - Purworejo U.1.570.000 P.7.000 B.0 V.0 D.0 L.10.000	3310947000266000	02 Januari 2026	1.587.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	No. STS / Slip Setor	Tgl Penyetoran	Nilai
	Penyetoran Pendapatan Tunai BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2025 Rute Magelang - Purworejo U.12.205.000 P.189.000 B.3.000 V.0 D.9.000 L.289.000	3310947000266100	02 Januari 2026	12.695.000,00
	Penyetoran Pendapatan (Tunai) BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2025 Rute Semarang - Kendal U.12.230.000 P.266.000 B.347.000 V.0 D.12.000 L.377.000	3310947000265700	02 Januari 2026	13.232.000,00
	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng (Tunai) Periode Tanggal 31 Desember 2025 Semarang - Bawen U.20.280.000 P.288.000 B.472.000 V.1.000 D.9.000 L.496.000	3310947000266300	02 Januari 2026	21.546.000,00
	Penyetoran Pendapatan Tunai BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2025 Rute Solo - Sragen U.6.995.000 P.94.000 B.225.000 V.0 D.9.000 L.420.000	3310947000265400	02 Januari 2026	7.743.000,00
	Total Dinas Perhubungan			115.357.000,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			
a.	Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu			
	Pembayaran Sewa Rumah Dinas periode bulan Januari s/d Desember 2025, pada Tgl. 2 Januari 2026, - di Rumdis Sumberejo, Kab. Kendal	-	03 Februari 2026	2.400.000,00
	Total Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan			2.400.000,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah			
a.	UPPD Kabupaten Sragen			
	Penerimaan Opsen Pajak MBLB	3316194000001600	9 Januari 2026	312.500,00
	Total Badan Pengelola Pendapatan Daerah			312.500,00
	Jumlah			141.193.000,00

5.3.1.1.1.2.2 Kas di Bendahara Penerimaan non SiLPA

Rp73.310.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan non SiLPA sebesar Rp73.310.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.800.000,00	-
2 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.685.000,00	-
3 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.825.000,00	-
	73.310.000,00	-

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan non SiLPA dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	No. STS / Slip Setor	Tgl Penyetoran	Nilai
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
a.	Sekretariat			
	Pembayaran Gedung Serbaguna - Gedung Semeru bulan Januari 2026	3314193000000100	28 Januari 2026	3.500.000,00
	Pembayaran Aula Diksus bulan Januari 2026	3314193000000300	28 Januari 2026	600.000,00
	Pembayaran Aula Diksus bulan Januari 2026	33141930000003900	31 Januari 2026	200.000,00
	Pembayaran Aula Dikjur Besar - Siang bulan Januari 2026	33141930000001400	31 Januari 2026	6.500.000,00
	Pembayaran Gedung Serbaguna - Gedung Semeru bulan Februari 2026	33241930000005300	10 Februari 2026	1.000.000,00
	Pembayaran Gedung Serbaguna - Gedung Semeru bulan Februari 2026	33141930000006000	19 Februari 2026	1.000.000,00
	Pembayaran Gedung Serbaguna - Gedung Semeru bulan Februari 2026	33141930000006200	20 Februari 2026	500.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	Uraian	No. STS / Slip Setor	Tgl Penyetoran	Nilai
	Pembayaran Aula Dikjur Besar - Siang bulan Februari 2026	3314193000006600	20 Februari 2026	2.000.000,00
	Pembayaran Gedung Serbaguna - Gedung Semeru	-	-	15.000.000,00
	Pembayaran Aula Diksus	-	-	5.500.000,00
	Total Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			35.800.000,00
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah			
a.	UPPD Kabupaten Demak			
	Pembayaran Sewa Ruang Usaha III	3316176000000700	2 Januari 2026	4.685.000,00
	Total Badan Pengelola Pendapatan Daerah			4.685.000,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			
a	Unit Pengelolaan Asrama Donohudan			
	DP an. Supriyanti Sewa Gd. Arofah dan 640 Kursi untuk Acara Tanggal 29 Maret 2026	-	-	500.000,00
	DP an. Mihati Latifah Sewa Gd. Muzdalifah dan 1500 Kursi untuk Acara Tanggal 18 Januari 2026	-	-	500.000,00
	DP an. Rudy Prayitno Sewa Gd. Muzdalifah dan 400 Kursi untuk Acara Tanggal 4 April 2026	-	-	2.000.000,00
	DP Sewa Gedung Untuk Acara Bulan Februari 2026	-	-	5.000.000,00
	DP an. Rina Eko Sulistyati Sewa Penginapan Gedung Mekah untuk Acara Bulan Januari 2026	-	-	1.150.000,00
	DP an. Rina Eko Sulistyati Sewa Penginapan Gedung Mekah untuk Acara Bulan Januari 2026	-	-	650.000,00
	DP an. Mary Sewa Gd. Jeddah Untuk Acara Tanggal 1 Agustus 2026	-	-	3.000.000,00
	DP an. Helman Qomary Sewa Kamar Reguler Mekah/Madinah 180 Orang, Manasik 140 Orang Ruang Makan Mekah/Madinah 2 Hari	-	-	1.000.000,00
	DP an. Mulyono Eko Cahyono Untuk Kegiatan Manasik Bulan Januari 2026	-	-	1.100.000,00
	DP an. Listyowati Sewa Gd. Jeddah Untuk Acara Tanggal 5 April 2026	-	-	200.000,00
	DP an. Rukani KBIHU Pelita Haji Sewa Kamar Reguler, Mekah/Madinah 95 Orang, Kamar VIP 2 Kamar, Manasik 95 Orang Untuk Acara Tanggal 17 Januari 2026	-	-	5.725.000,00
	DP an. Daryanto Gd. Muzdalifah dan 1000 Kursi Untuk Acara Tanggal 25 Januari 2026	-	-	10.500.000,00
	DP an. Rahayu Wiyono Gd. Muzdalifah dan 100 Kursi Untuk Acara Tanggal 8 Februari 2026	-	-	1.000.000,00
	DP an. Aprilia Kusuma Pertiwi Gd. Muzdalifah dan 1000 Kursi Untuk Acara Tanggal 5 April 2026	-	-	500.000,00
	Total Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			32.825.000,00
Jumlah				73.310.000,00

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp585.782.732,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp585.782.732,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kas Bendahara Pengeluaran SiLPA	-	-
2 Kas Bendahara Pengeluaran Non SiLPA	-	585.782.732,00
Jumlah	-	585.782.732,00



5.3.1.1.1.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Non SiLPA

Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Non SiLPA sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp585.782.732,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp585.782.732,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	583.937.668,00
2 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	18.000,00
3 Sekretariat Daerah-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	22.824,00
4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	834.240,00
5 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	280.000,00
6 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	690.000,00
	-	585.782.732,00

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Rp432.067.616.212,93

Kas di BLUD sebesar Rp432.067.616.212,93, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp438.815.860.716,09 mengalami **penurunan** sebesar (Rp6.748.244.503,16) atau (1,54%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kas Di Rekening BLUD	245.034.660.060,00	192.721.578.411,00
2 Kas Tunai BLUD-SiLPA	-	366.879,00
3 Kas Mesin EDC-SiLPA	94.827.873,00	57.632.414,00
4 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD-SiLPA	185.215.183,00	163.203.833,00
5 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (Uang Titipan Pasien)-Non SiLPA	3.252.913.096,93	3.373.079.179,09
6 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (Bunga Jamkesmas)-Non SiLPA	-	-
7 Deposito BLUD	183.500.000.000,00	242.500.000.000,00
Jumlah	432.067.616.212,93	438.815.860.716,09

Saldo ini merupakan kas di BLUD yang berada di bank dan tunai, merupakan kas di BLUD yang terdapat di bank dan tunai dengan rincian sebagai berikut :

No.	BLUD	EDC	Tunai	Bank	Jumlah
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	112.510.980,00	168.174.920.059,00	168.287.431.039,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	21.958.599,00	183.183.763.076,93	183.205.721.675,93
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.000.000,00	19.481.000,00	38.263.768.799,00	38.284.249.799,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	1.699.735,00	2.674.927.936,00	2.676.627.671,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.599.656,00	20.634.631,00	18.740.302.198,00	18.762.536.485,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	92.228.217,00	6.403.939,00	8.320.843.727,00	8.419.475.883,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	2.526.299,00	12.429.047.361,00	12.431.573.660,00
Jumlah					432.067.616.212,93

5.3.1.1.1.4.1 Kas di Rekening BLUD

Rp245.034.660.060,00

Kas di Rekening BLUD sebesar Rp245.034.660.060,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp192.721.578.411,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp52.313.081.649,00 atau 27,14% dengan rincian sebagai berikut :

Berikut bagian dari SiLPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJD dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	135.482.681.453,00	84.413.911.050,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	32.982.430.169,00	25.022.145.973,00
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	18.240.302.198,00	20.007.805.816,00
4 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	37.904.427.216,00	44.775.042.139,00
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	1.674.927.936,00	1.439.571.287,00
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	8.320.843.727,00	11.091.349.565,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	10.429.047.361,00	5.971.752.581,00
Jumlah	245.034.660.060,00	192.721.578.411,00

5.3.1.1.1.4.2 Kas Tunai BLUD - SiLPA

Rp0,00

Kas Tunai BLUD - SiLPA sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp366.879,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp366.879,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	366.879,00
Jumlah	-	366.879,00

5.3.1.1.1.4.3 Kas Mesin EDC – SiLPA

Rp94.827.873,00

Kas Mesin EDC - SiLPA sebesar Rp94.827.873,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp57.632.414,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp37.195.459,00 atau 64,54% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	101.157,00
2 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.599.656,00	1.700.400,00
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.000.000,00	1.000.000,00
4 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	92.228.217,00	54.830.857,00
Jumlah	94.827.873,00	57.632.414,00

5.3.1.1.1.4.4 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD – SiLPA

Rp185.215.183,00

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD - SiLPA sebesar Rp185.215.183,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp163.203.833,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp22.011.350,00 atau 13,49% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	112.510.980,00	91.636.911,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	21.958.599,00	33.523.081,00
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	20.634.631,00	7.605.922,00
4 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	19.481.000,00	2.330.450,00
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	1.699.735,00	17.993.325,00
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	6.403.939,00	8.181.400,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.526.299,00	1.932.744,00
Jumlah	185.215.183,00	163.203.833,00

5.3.1.1.1.4.5 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Non SiLPA

Rp3.252.913.096,93

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Non SiLPA yang merupakan Uang Titipan Pasien sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.252.913.096,93, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.373.079.179,09 mengalami **penurunan** sebesar (Rp120.166.082,16) atau (3,56%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	2.692.238.606,00	3.099.744.988,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	201.332.907,93	190.924.236,09
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	359.341.583,00	82.409.955,00
Jumlah	3.252.913.096,93	3.373.079.179,09

5.3.1.1.1.4.6 Deposito BLUD

Rp183.500.000.000,00

Deposito BLUD sebesar Rp183.500.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp242.500.000.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp59.000.000.000,00) atau (24,33%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	30.000.000.000,00	-
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	150.000.000.000,00	240.000.000.000,00
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	500.000.000,00	500.000.000,00
4 RSUD dr. Rehatta Jepara	1.000.000.000,00	-
5 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah	183.500.000.000,00	242.500.000.000,00

No.	SKPD	BANK	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	BTN	3000282500	20 Desember 2025	45.205.479,45	30.000.000.000,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	BNI	2182220	07 Februari 2025	44.383.561,64	15.000.000.000,00
		BNI	1983757497	06 Agustus 2025	30.465.950,00	10.000.000.000,00
		BNI	1983327725	06 Oktober 2025	15.232.975,00	5.000.000.000,00
		Bank Jateng	A416435	04 Agustus 2025	73.972.602,74	20.000.000.000,00
		Bank Jateng	A416442	07 Agustus 2025	31.506.849,32	10.000.000.000,00
		BRI	007701009443404	04 Juni 2025	31.438.356,16	10.000.000.000,00
		BRI	007701009557407	22 September 2025	26.198.630,14	25.000.000.000,00
		BSI	AB00516400	26 Juni 2024	13.424.657,53	20.000.000.000,00
		BSI	AB00516469	06 Desember 2024	33.561.643,84	10.000.000.000,00
		BSI	AB00700070	30 Juli 2025	630.136,99	5.000.000.000,00
		BSI	AB00700072	04 Agustus 2025	51.041.095,89	15.000.000.000,00
		BTN	2353179	04 Agustus 2025	14.794.520,55	5.000.000.000,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	BTN	0032501400003248	10 April 2015	2.013.698,63	500.000.000,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	Bank Jateng	A398649	02 Januari 2025	2.542.466,00	1.000.000.000,00
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Bank Jateng	A384112	12 Agustus 2024	5.479.452,05	2.000.000.000,00
Jumlah					421.892.075,93	183.500.000.000,00

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOS

Rp1.517.881.717,00

Kas Dana BOS sebesar Rp1.517.881.717,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.218.476.872,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.700.595.155,00) atau (52,84%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kas Dana BOS-SiLPA	1.476.456.699,00	3.218.476.872,00
2 Kas Dana BOS (Bunga Bank)-SiLPA	-	-
3 Kas Dana BOS (Utang Pajak)-Non SiLPA	41.425.018,00	-
4 Kas Dana BOSDA/BOP-SiLPA	-	-



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
5 Kas Dana BOSDA (Bunga Bank)-SiLPA	-	-
6 Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak)-Non SiLPA	-	-
7 Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat-Non SiLPA	-	-
8 Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat (Utang Pajak)-Non SiLPA	-	-
Jumlah	1.517.881.717,00	3.218.476.872,00

5.3.1.1.1.5.1 Kas Dana BOS-SiLPA

Rp1.476.456.699,00

Kas Dana BOS-SiLPA sebesar Rp1.476.456.699,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.218.476.872,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.700.595.155,00) atau (52,84%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 SMA Negeri	1.208.738.326,00	2.116.100.446,00
2 SMK Negeri	214.053.793,00	907.098.069,00
3 SLB Negeri	53.664.580,00	195.278.357,00
Jumlah	1.476.456.699,00	3.218.476.872,00

5.3.1.1.1.5.2 Kas Dana BOS (Utang Pajak)-Non SiLPA

Rp41.425.018,00

Kas Dana BOS (Utang Pajak)-Non SiLPA sebesar Rp41.425.018,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp41.425.018,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 SMA Negeri	37.728.191,00	-
2 SMK Negeri	-	-
3 SLB Negeri	3.696.827,00	-
Jumlah	41.425.018,00	-

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

Rp17.250.948.021,00

Kas Lainnya sebesar Rp17.250.948.021,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.075.006.683,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.175.941.338,00 atau 22,56% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.250.948.021,00	14.075.006.683,00
Jumlah	17.250.948.021,00	14.075.006.683,00

Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kas Dana BOSDA/BOP-SiLPA	8.526.391.285,00	7.450.545.588,00
2 Kas Dana BOSDA/BOP (Bunga Bank) – SiLPA	8.884.970,00	4.043.023,00
3 Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak)-Non SiLPA	11.174.587,00	-
4 Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat-Non SiLPA	258.231.003,00	26.390.000,00
5 Kas Dana Usaha Mandiri-Non SiLPA	8.446.131.376,00	6.594.028.072,00
6 Kas Dana Usaha Mandiri (Utang Pajak) -Non SiLPA	134.800,00	-
Jumlah	17.250.948.021,00	14.075.006.683,00

Kas lainnya senilai Rp17.250.948.021,00 belum termasuk sisa kas atas pengelolaan swakelola sebesar Rp835.363.727,34 dengan rincian sebagai berikut :



No.	Nama SKPD	UPT	Nama Rekening	No. Rekening	Nama Bank	Saldo per 31 Desember 2025 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Bapelkes Jateng	Swakelola Bapelkes Jateng	1066001861	Bank Jateng Capem Gombong	224.152.214,00
2	RSUD Dr. Adhyatma, MPH	-	Bendahara Swakelola RSDA	3021331685	Bank Jateng Cabang Semarang	37.879.082,00
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	RSJD Dr Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah	971253754	Bank Permata Syariah KCS Pandanaran Semarang	17.174.514,00
			Swakelola Amino Hospital	9220000092	BSI KCP Semarang Majapahit	64.524.668,34
4	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	-	Tim Swakelola Disporapar JTG	1034040873	Bank Jateng Cabang Semarang	157.741.787,00
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	Swakelola BPSDM Prov Jateng	1034035870	Bank Jateng Cabang Semarang	41.062.802,00
6	Badan Kepegawaian Daerah	Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A (UPK ASN)	Bendahara Swakelola UPK ASN	3057086636	Bank Jateng Capem Setwilda	292.828.660,00
Jumlah						835.363.727,34

5.3.1.1.1.6.1 Kas Dana BOSDA/BOP – SiLPA

Rp8.526.391.285,00

Kas Dana BOSDA/BOP – SiLPA sebesar Rp8.526.391.285,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.450.545.588,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.075.845.697,00 atau 14,44% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 SMA Negeri	4.895.137.764,00	4.875.587.925,00
2 SMK Negeri	3.339.611.781,00	2.322.968.509,00
3 SLB Negeri	291.641.740,00	251.989.154,00
Jumlah	8.526.391.285,00	7.450.545.588,00

5.3.1.1.1.6.2 Kas Dana BOSDA (Bunga Bank) – SiLPA

Rp8.884.970,00

Kas Dana BOSDA (Bunga Bank) – SiLPA sebesar Rp8.884.970,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.043.023,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.841.947,00 atau 119,76% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 SMA Negeri	-	3.170.350,00
2 SMK Negeri	-	872.630,00
3 SLB Negeri	8.884.970,00	43,00
Jumlah	8.884.970,00	4.043.023,00

5.3.1.1.1.6.3 Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak) – Non SiLPA

Rp11.174.587,00

Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak) – Non SiLPA sebesar Rp11.174.587,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp11.174.587,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 SMA Negeri	6.262.178,00	-
2 SMK Negeri	3.729.976,00	-
3 SLB Negeri	1.182.433,00	-
Jumlah	11.174.587,00	-



5.3.1.1.1.6.4 Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat – Non SiLPA Rp258.231.003,00

Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat – Non SiLPA sebesar Rp258.231.003,00. apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.390.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp231.841.003,00 atau 878,52% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	258.231.003,00	26.390.000,00
Jumlah	258.231.003,00	26.390.000,00

5.3.1.1.1.6.5 Kas Dana Usaha Mandiri – Non SiLPA Rp8.446.131.376,00

Kas Dana Usaha Mandiri – Non SiLPA sebesar Rp8.446.131.376,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.594.028.072,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.852.103.304,00 atau 28,09% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.446.131.376,00	6.594.028.072,00
Jumlah	8.446.131.376,00	6.594.028.072,00

5.3.1.1.1.6.6 Kas Dana Usaha Mandiri (Utang Pajak) – Non SiLPA Rp134.800,00

Kas Dana Usaha Mandiri (Utang Pajak) – Non SiLPA sebesar Rp134.800,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp134.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	134.800,00	-
Jumlah	134.800,00	-

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah Rp2.435.663.820.047,00

Piutang Pajak Daerah sebesar Rp2.435.663.820.047,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.897.664.180.980,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp462.000.360.933,00) atau (15,94%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.435.603.872.950,00	2.897.325.081.950,00
2 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)		-
3 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)		-
4 Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	59.947.097,00	339.099.030,00
5 Piutang Pajak Rokok		-
Jumlah	2.435.663.820.047,00	2.897.664.180.980,00

(Dalam ribuan)

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2025					Saldo Akhir
			Tambah		Kurang			
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Penghapusan	Koreksi	
	Piutang Pajak Daerah	2.897.664.180,00	6.136.892.261,00	133.200.866,00	5.490.559.202,00	438.200.992,00	803.333.294,00	2.435.663.820,00
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.897.325.081,00	6.136.832.314,00	133.200.866,00	5.490.220.103,00	438.200.992.,00	803.333.294,00	2.435.603.872,00
2	Pajak Air Permukaan	339.099,00	59.947,00		339.099,00			59.947,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

SALDO AWAL PIUTANG PER 1 JANUARI 2025		2.897.325.081.950,00
1 PENAMBAHAN :		6.261.001.679.400,00
A. MUTASI TAMBAH (PENETAPAN)	4.497.224.133.000,00	
PENETAPAN OBJEK JATUH TEMPO	4.108.638.412.000,00	
PENETAPAN ATAS PIUTANG YANG DIHAPUSBUKU	112.084.620.500,00	
PENETAPAN MUTASI DARI LUAR PROVINSI	60.014.057.000,00	
PENETAPAN KENDARAAN BARU	193.057.276.500,00	
PENETAPAN SEBELUM JATUH TEMPO	23.429.767.000,00	
B. KOREKSI TAMBAH	1.763.777.546.400,00	
KOREKSI PENETAPAN TAHUN LALU	133.200.866.000,00	
KOREKSI PENETAPAN TAHUN BERKENAAN	1.630.576.680.400,00	
2 PENGURANGAN :		6.722.722.888.400,00
A. MUTASI (PEMBAYARAN)	3.960.139.868.900,00	
PEMBAYARAN PIUTANG TAHUN LALU	295.568.926.000,00	
PEMBAYARAN OBJEK JATUH TEMPO	3.275.985.221.900,00	
PEMBAYARAN SEBELUM JATUH TEMPO	23.429.767.000,00	
PEMBAYARAN OBJEK PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN	112.084.620.500,00	
PEMBAYARAN MUTASI DARI LUAR PROVINSI	60.014.057.000,00	
PEMBAYARAN KENDARAAN BARU	193.057.276.500,00	
B. KOREKSI KURANG	2.762.583.019.500,00	
PENGHAPUSAN PIUTANG PKB	438.200.992.000,00	
PENYESUAIAN NILAI TAHUN LALU	803.333.294.000,00	
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERKENAAN	1.521.048.733.500,00	
SALDO AKHIR PIUTANG PER 31 DESEMBER 2025		2.435.603.872.950,00

Keterangan :

➤ Mutasi Tambah

- Penetapan Objek Jatuh Tempo merupakan penetapan atas seluruh objek kendaraan bermotor jatuh tempo tahun 2025.
- Penetapan Sebelum Jatuh Tempo merupakan Penetapan atas obyek jatuh tempo 2026 yang dibayar di tahun 2025 (30 hari sebelum Jatuh Tempo).
- Penetapan atas Piutang yang Dihapusbuku merupakan Penetapan atas objek kendaraan bermotor diluar pencatatan Piutang awal 2025. Antara lain:
 - Kendaraan hilang kemudian ditemukan kembali
 - Kendaraan rusak berat yang difungsikan kembali
 - Pencabutan registrasi kendaraan bermotor oleh Kepolisian
- Penetapan Mutasi Dari Luar Provinsi merupakan Penetapan atas objek kendaraan bermotor yang masuk dari luar provinsi.
- Penetapan Kendaraan Baru merupakan Penetapan atas objek kendaraan bermotor baru tahun 2025.
- Koreksi Penetapan merupakan penetapan ulang atas objek yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain:
 - Objek kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk



- Objek kendaraan bermotor yang melakukan ubah fungsi
 - Penerapan program relaksasi pajak/insentif pajak, sesuai Keputusan Gubernur No. 973.1/42 Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/87 Tahun 2025
- Mutasi Kurang
- a. Pembayaran Piutang Lalu merupakan pembayaran atas piutang tahun lalu.
 - b. Pembayaran Objek Jatuh Tempo merupakan pembayaran atas seluruh objek kendaraan bermotor jatuh tempo tahun 2025.
 - c. Pembayaran Sebelum Jatuh Tempo merupakan pembayaran atas obyek jatuh tempo 2026 yang dibayar di tahun 2025 (30 hari sebelum Jatuh Tempo).
 - d. Pembayaran atas Piutang yang Dihapusbuku merupakan pembayaran atas objek kendaraan bermotor diluar pencatatan Piutang awal 2025. Antara lain:
 - Kendaraan hilang kemudian ditemukan kembali
 - Kendaraan rusak berat yang difungsikan kembali
 - Pencabutan registrasi kendaraan bermotor oleh Kepolisian
 - e. Pembayaran Mutasi Dari Luar Provinsi merupakan Pembayaran atas objek kendaraan bermotor yang masuk dari luar provinsi.
 - f. Pembayaran Kendaraan Baru merupakan Pembayaran atas objek kendaraan bermotor baru tahun 2025.
 - g. Penghapusan Piutang merupakan penghapusbukuan terhadap objek piutang yang tidak tertagih karena umur piutang atau pertimbangan objektif, antara lain:
 - Penanggung utang atau subjek pajak sudah tidak menguasai kendaraan bermotor dikarenakan telah pindah tangan termasuk dijual kepada pihak lain yang sulit ditemukan fisik dan alamat pemilik yang baru berdasarkan hasil validasi
 - Objek pajak dalam kondisi rusak berat atau musnah dan tidak dapat dipergunakan lagi
 - Objek pajak hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh instansi berwenang
 - Objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi berwenang
 - Meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan/atau tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat berwenang
 - Tempat kedudukan Penanggung Utang atau subjek pajak sudah pindah alamat dan sulit ditemukan lagi melalui pernyataan pejabat kelurahan/desa, serta telah menunggak pajak 5 (lima) tahun berturut-turut
 - Usia objek pajak lebih dari 15 (lima belas) tahun dan telah menunggak pajak 5 (lima) tahun berturut-turut
 - h. Penyesuaian Nilai merupakan koreksi kurang atas penetapan awal, Antara lain:
 - Objek kendaraan bermotor yang melakukan ubah bentuk
 - Objek kendaraan bermotor yang melakukan ubah fungsi
 - Penerapan program relaksasi pajak/insentif pajak, sesuai Keputusan Gubernur No. 973.1/42 Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/87 Tahun 2025
- Penyelesaian Piutang PKB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Atas piutang pajak daerah tersebut dilakukan langkah-langkah penagihan secara *door to door* kepada wajib pajak, sinergitas dengan pemerintah kabupaten/kota melalui program Sengkuyung, penambahan titik layanan dan pengembangan aplikasi SAMSAT Digital Mandiri



- Terhadap piutang yang tidak tertagih dilakukan penghapusbukuan oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah, penghapusbukuan piutang yang tak tertagih yang dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
- Piutang PKB kedaluarsa sebesar Rp122.774.098.500,00
 - Piutang PKB tidak tertagih sebesar Rp.315.426.893.500,00 terdiri atas:
 - Penanggung utang atau subjek pajak sudah tidak menguasai kendaraan bermotor dikarenakan telah pindah tangan termasuk dijual kepada pihak lain yang sulit ditemukan fisik dan alamat pemilik yang baru, berdasarkan hasil validasi sebesar Rp87.657.760.500,00
 - Objek pajak dalam kondisi rusak berat atau musnah dan tidak dapat dipergunakan lagi sebesar Rp102.722.000,00
 - Objek pajak hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh instansi berwenang sebesar Rp72.996.000,00
 - Objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi berwenang sebesar Rp453.000,00
 - Meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan/atau tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat berwenang Rp.67.529.000,00
 - Tempat kedudukan Penanggung Utang atau subjek pajak sudah pindah alamat dan sulit ditemukan lagi melalui pernyataan pejabat kelurahan/desa, serta telah menunggak pajak 5 (lima) tahun berturut-turut sebesar Rp681.676.500,00
 - Usia objek pajak lebih dari 15 (lima belas) tahun dan telah menunggak pajak 5 (lima) tahun berturut-turut sebesar Rp226.843.756.500,00
- Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, jumlah piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.435.603.872.950,00. Sebagai bagian dari kebijakan akuntansi berbasis prinsip kehati-hatian dalam penyajian piutang, telah dilakukan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp502.998.752.750,00. Dengan demikian, nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan adalah *Net Realizable Value* (NRV) sebesar Rp1.932.605.120.200.
- Saldo Piutang PKB sebesar Rp2.435.603.872.950,00 menurut umur piutang sebagai berikut :
- | UMUR PIUTANG | PIUTANG (Rp) |
|-----------------------|-----------------------------|
| Lebih dari 5 Tahun | 20.229.500,00 |
| 2 s.d 5 Tahun | 436.159.208.650,00 |
| 1 s.d 2 Tahun | 62.108.408.915,00 |
| Kurang dari 1 Tahun | 4.710.905.685,00 |
| JUMLAH PIUTANG | 2.435.603.872.950,00 |
- Penyajian piutang PKB dalam NRV ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam Kebijakan Akuntansi Piutang yang tertuang dalam Lampiran III, yang mengatur bahwa piutang daerah harus disajikan dalam nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV) setelah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih
- Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan kualitas atau umur piutang, dengan kategori sebagai berikut:
- Lancar (0 – 1 tahun): Penyisihan sebesar 0,5%
 - Kurang Lancar (1 – 2 tahun): Penyisihan sebesar 10%



- c. Diragukan (2 – 5 tahun): Penyisihan sebesar 50%
d. Macet (lebih dari 5 tahun): Penyisihan sebesar 100%

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah

Rp93.556.799.785,66

Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp93.556.799.785,66, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp111.893.619.660,73 mengalami **penurunan** sebesar (Rp18.336.819.875,07) atau (16,39%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Piutang Retribusi Jasa Umum	93.403.308.185,66	111.639.377.130,73
2 Piutang Retribusi Jasa Usaha	153.491.600,00	254.242.530,00
3 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
Jumlah	93.556.799.785,66	111.893.619.660,73

No	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2025					Saldo Akhir
			Tambah		Kurang			
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Penghapusan	Koreksi	
	Piutang Retribusi Daerah	111.893.619.660,73	2.112.852.803.686,56	175.681.774.107,97	2.301.518.574.599,61	5.026.345.698,00	326.477.372,00	93.556.799.785,66
1	Dinas Kesehatan	69.321.200,00	40.000,00	-	69.321.200,00	-	-	40.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	29.140.930,00	-	-	29.140.930,00	-	-	-
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	193.060.000,00	-	-	71.610.000,00	-	-	121.450.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.041.600,00	-	-	-	-	-	32.041.600,00
5	RSUD Dr Moewardi Surakarta	75.904.919.117,00	985.979.188.396,63	175.681.742.266,97	1.156.566.901.516,00	2.366.301.806,00	151.579.963,00	78.481.066.495,60
6	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	16.739.887.527,41	876.154.116.835,94	-	881.689.955.463,03	-	1.632.025,00	11.202.416.875,32
7	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	16.784.172.802,60	160.431.315.279,00	31.841,00	172.865.675.664,60	1.619.173.947,00	66.989.074,00	2.663.681.237,00
8	RSUD dr. Rehatta Jepara	97.847.398,72	-	-	24.548.258,98	-	-	73.299.139,74
9	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.535.793.043,00	42.052.142.315,00	-	42.058.246.753,00	654.526.369,00	-	875.162.236,00
10	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	346.352.590,00	161.624.543,00	-	152.889.728,00	301.205.595,00	-	53.881.810,00
11	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	161.083.452,00	48.074.376.317,00	-	47.990.285.086,00	85.137.981,00	106.276.310,00	53.760.392,00

5.3.1.1.3.1 Piutang Retribusi Jasa Umum

Rp93.403.308.185,66

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp93.403.308.185,66 , apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp111.639.377.130,73 mengalami **penurunan** sebesar (Rp18.236.068.945,07) atau (16,33%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	93.403.308.185,66	111.639.377.130,73
2 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	-
3 Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	93.403.308.185,66	111.639.377.130,73



5.3.1.1.3.1.1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rp93.403.308.185,66

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp93.403.308.185,66 , apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp111.639.377.130,73 mengalami **penurunan** sebesar (Rp18.236.068.945,07) atau (16,33%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	40.000,00	69.321.200,00
2 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	93.403.268.185,66	111.570.055.930,73
Jumlah	93.403.308.185,66	111.639.377.130,73

5.3.1.1.3.1.1.1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan

Rp40.000,00

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan sebesar Rp40.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp69.321.200,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp69.281.200,00) atau (99,94%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Kesehatan	40.000,00	69.321.200,00
	40.000,00	69.321.200,00

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan adalah hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas pendapatan retribusi yang timbul dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Balai Pengobatan kepada masyarakat atau pihak lain yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diterima pembayarannya namun telah diverifikasi keabsahannya oleh pihak penjamin per 31 Desember 2025.

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan sebesar Rp40.000,00 merupakan klaim non-kapitasi BPJS Kesehatan bulan pelayanan November 2025 atas pelayanan promotif skrining kepada pasien. Klaim sudah diverifikasi pada bulan November 2025 namun belum terdapat pencairan.

Selain Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan senilai Rp40.000,00, juga terdapat klaim atas tagihan Tahun 2025 maupun tahun sebelumnya yang belum diakui sebagai piutang karena baru diverifikasi pada tahun 2026 sebesar Rp594.909.280,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tgl Pengajuan Klaim	Tgl Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
Balkesmas Wilayah Semarang	-	-	-	-	-
Balkesmas Wilayah Ambarawa	Desember 2025	150.449.300	21/01/2026	27/01/2026	02/02/2026
	Susulan Agustus	2.128.800	23/01/2026	28/01/2026	04/02/2026
	Susulan September	9.253.560	23/01/2026	28/01/2026	04/02/2026
	Obat Kronik Desember 2025	90.572.677	08/01/2026	15/01/2026	21/01/2026
Balkesmas Wilayah Magelang	Klaim BPJS Obat Desember 2025	40.985.887	08/01/2026	15/01/2026	21/01/2026
	Pending klaim BPJS Obat November 2025	128.181	08/01/2026	15/01/2026	21/01/2026
	Klaim Pelkes BPJS Desember 2025	72.217.560	07/01/2026	15/01/2026	21/01/2026
	Pending klaim Pelkes BPJS November 2025	2.486.570	07/01/2026	15/01/2026	21/01/2026
	Pending klaim Pelkes BPJS Oktober 2025	1.465.600	07/01/2026	15/01/2026	21/01/2026
Balkesmas Wilayah Klaten	Klaim BPJS Obat Desember 2025	26.545.483	12/01/2026	20/01/2026	26/01/2026



Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tgl Pengajuan Klaim	Tgl Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	Klaim BPJS Rawat Jalan Desember 2025	38.097.800	07/01/2026	27/01/2026	02/02/2026
	Klaim BPJS Rawat Inap Desember 2025	5.534.200	07/01/2026	27/01/2026	02/02/2026
Balkesmas Wilayah Pati	Pending Klaim INACBG Bulan Agustus 2025	5.022.520	24/12/2025	08/01/2026	14/01/2026
	Pending Klaim Obat Kronis Bulan November 2025	3.255.286	05/01/2026	15/01/2026	21/01/2026
	Obat Kronik Desember 2025	41.834.656	13/01/2026	28/01/2026	03/02/2026
	Klaim INACBG Pending September 2025	1.282.400	19/01/2026	04/02/2026	09/02/2026
	Klaim Reguler INACBG Desember 2025	88.064.600,00	07/01/2026	22/01/2026	28/01/2026
BKIM Prov. Jateng	Klaim Pending Bulan Oktober 2025	11.112.200,00	31/12/2025	05/01/2026	28/01/2026
	Klaim Pending Bulan November 2025	4.352.000,00	13/01/2026	15/01/2026	26/01/2026
Balabkes dan PAK	Klaim Desember 2025	120.000,00	02/01/2026	21/01/2026	31/01/2026
	Total	594.909.280,00			

5.3.1.1.3.1.1.2 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Rp93.403.268.185,66

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp93.403.268.185,66 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp111.570.055.930,73 mengalami **penurunan** sebesar (Rp18.166.787.745,07) atau (16,28%) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	78.481.066.495,60	75.904.919.117,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	11.202.416.875,32	16.739.887.527,41
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	875.162.236,00	1.535.793.043,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	2.663.681.237,00	16.784.172.802,60
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	73.299.139,74	97.847.398,72
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	53.881.810,00	346.352.590,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	53.760.392,00	161.083.452,00
	Jumlah	93.403.268.185,66	111.570.055.930,73

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas pendapatan retribusi yang timbul dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kepada masyarakat atau pihak lain yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum diterima pembayarannya namun telah diverifikasi keabsahannya oleh pihak penjamin per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.

Selain Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp93.403.268.185,66, juga terdapat klaim atas tagihan Tahun 2025 maupun tahun sebelumnya yang belum diakui sebagai piutang karena baru diverifikasi pada tahun 2026 sebesar Rp125.868.016.167,00 dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran ajuan klaim tagihan tahun 2025 yang diverifikasi di 2026.



5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha

Rp153.491.600,00

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp153.491.600,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp254.242.530,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp100.750.930,00) atau (39,63%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	254.242.530,00
2 Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	153.491.600,00	
Jumlah	153.491.600,00	254.242.530,00

Piutang Retribusi Jasa Usaha mengalami perubahan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.3.1.1.3.2.1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Rp0,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp254.242.530,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp254.242.530,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	-	29.140.930,00
2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	193.060.000,00
3 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	32.041.600,00
Jumlah	-	254.242.530,00

5.3.1.1.3.2.2 Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Rp153.491.600,00

Piutang Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar Rp153.491.600,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp153.491.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	121.450.000,00	-
2 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.041.600,00	-
Jumlah	153.491.600,00	-

5.3.1.1.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Rp1.593.345.868,38

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp1.593.345.868,38, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.832.728.064,88 mengalami **penurunan** sebesar (Rp239.382.196,50) atau (13,06%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	370.051.669,00	370.051.669,00
2 Piutang Jasa Giro	-	-
3 Piutang Pendapatan Bunga	-	-
4 Piutang Pendapatan BLUD	1.223.294.199,38	1.462.676.395,88
Jumlah	1.593.345.868,38	1.832.728.064,88

5.3.1.1.4.1 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Rp 370.051.669,00

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp370.051.669,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	370.051.669,00	370.051.669,00
Jumlah	370.051.669,00	370.051.669,00

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan piutang yang timbul dari kerja sama pemanfaatan GOR Jatidiri antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan PT Puramas Mahardika yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Nomor 019.6.11936 dan Nomor 059/V/PM/2009 tentang Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Jatidiri Jawa Tengah tanggal 29 Mei 2009. Pembayaran bagi hasil dari PT Puramas Mahardika atas pemanfaatan GOR Jatidiri telah macet meskipun usia kerjasama belum mencapai satu tahun. Pada tanggal 25 Januari 2010, 18 Februari 2010, dan 18 Maret 2010, DPPAD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan upaya penagihan secara tertulis kepada PT Puramas Mahardika, namun tidak membuahkan hasil dan pada tanggal 14 Mei 2010, dibuat surat pemutusan kerjasama. PT Puramas Mahardika saat ini sudah tidak beroperasi dan pengurus perusahaan tidak diketahui keberadaannya.

5.3.1.1.4.2 Piutang Pendapatan BLUD

Rp1.223.294.199,38

Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp1.223.294.199,38 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.462.676.395,88 mengalami **penurunan** sebesar (Rp239.382.196,50) atau (16,37%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr Moewardi Surakarta	155.366.979,44	44.083.333,34
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	369.650.979,79	599.857.666,39
3 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	955.479,00	2.013.699,00
4 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	360.581.290,00	361.188.790,00
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	263.197.300,00	185.542.500,00
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	68.062.719,00	264.510.955,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.479.452,15	5.479.452,15
Jumlah	1.223.294.199,38	1.462.676.395,88

Rincian piutang pendapatan BLUD per Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

RSUD Dr Moewardi Surakarta

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Piutang Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	45.205.479,45	-
2 Piutang Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	110.161.499,99	44.083.333,34
Jumlah	155.366.979,44	44.083.333,34

RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Piutang Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	366.650.979,79	599.857.666,39
2 Piutang Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	3.000.000,00	-
Jumlah	369.650.979,79	599.857.666,39

RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Piutang Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	955.479,00	2.013.699,00



- 2 Piutang Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha

Jumlah

955.479,00

2.013.699,00

RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang

- 1 Piutang Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha

Jumlah

2025 (Rp)

2024 (Rp)

360.581.290,00

361.188.790,00

360.581.290,00

361.188.790,00

RSUD dr. Rehatta Jepara

- 1 Piutang Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha

Jumlah

2025 (Rp)

2024 (Rp)

263.197.300,00

185.542.500,00

263.197.300,00

185.542.500,00

RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta

- 1 Piutang Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD
- 2 Piutang Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha

Jumlah

2025 (Rp)

2024 (Rp)

56.055.069,00

247.825.005,00

12.007.650,00

16.685.950,00

68.062.719,00

264.510.955,00

RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten

- 1 Piutang Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga

Jumlah

2025 (Rp)

2024 (Rp)

5.479.452,15

5.479.452,15

5.479.452,15

5.479.452,15

5.3.1.1.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Rp432.276.078.000,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp432.276.078.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp53.079.604.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp379.196.474.000,00 atau 714,39% dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Piutang Dana Perimbangan
- 2 Piutang Dana Bagi Hasil

Jumlah

2025 (Rp)

2024 (Rp)

-

-

432.276.078.000,00

53.079.604.000,00

432.276.078.000,00

53.079.604.000,00

5.3.1.1.5.1 Piutang Dana Perimbangan

Rp0,00

Piutang Dana Perimbangan sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan**.

5.3.1.1.5.2 Piutang Dana Bagi Hasil

Rp432.276.078.000,00

Piutang Dana Bagi Hasil sebesar Rp432.276.078.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp53.079.604.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp379.196.474.000,00 atau 714,39% dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Piutang Dana Transfer Umum-PBB
- 2 Piutang Dana Transfer Umum-PPh 21
- 3 Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN

2025 (Rp)

2024 (Rp)

-

2.914.465.000,00

15.800.186.000,00

26.809.534.000,00

264.858.750.000,00

243.536.000,00



		2025 (Rp)	2024 (Rp)
4	Piutang Dana Transfer Umum-Cukai dan Tembakau	48.500.042.000,00	22.802.449.000,00
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	101.216.041.000,00	-
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	-	-
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	-	218.630.000,00
8	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	124.508.000,00	90.962.000,00
9	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	91.843.000,00	28.000,00
10	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	-	-
11	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH	1.631.381.000,00	-
12	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR	-	-
13	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	53.327.000,00	-
	Jumlah	432.276.078.000,00	53.079.604.000,00

Piutang Dana Bagi Hasil didasarkan pada terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025.

5.3.1.1.6 Piutang Lainnya

Rp12.290.770.884,00

Piutang Lainnya sebesar Rp12.290.770.884,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.157.041.204,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.866.270.320,00) atau (18,91%) dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	8.292.301.233,00	10.690.193.030,00
2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	3.998.469.651,00	4.466.848.174,00
	Jumlah	12.290.770.884,00	15.157.041.204,00

Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

5.3.1.1.6.1 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Rp8.292.301.233,00

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp8.292.301.233,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.690.193.030,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.397.891.797,00) atau (22,43%) dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	8.292.301.233,00	10.690.193.030,00
		8.292.301.233,00	10.690.193.030,00
	Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Sekretariat Daerah - Biro Perekonomian	1.683.883.264,00	1.710.392.264,00



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	914.895.122,00	1.747.711.038,00
3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.355.855.800,00	1.403.855.800,00
4 Dinas Ketahanan Pangan	-	33.800.000,00
5 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	636.383.975,00	2.030.004.401,00
6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.882.500.000,00	2.882.500.000,00
7 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	818.783.072,00	881.929.527,00
Jumlah	8.292.301.233,00	10.690.193.030,00

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp8.292.301.233,00 merupakan dana bergulir yang dipinjamkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada masyarakat dengan tujuan untuk penguatan modal usaha dan peningkatan ekonomi masyarakat.

5.3.1.1.6.2 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang **Rp3.998.469.651,00**

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang sebesar Rp3.998.469.651,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.466.848.174,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp468.378.523,00) atau (10,49%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah	82.049.504,00	361.545.456,00
2 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat	3.916.420.147,00	4.105.302.718,00
	3.998.469.651,00	4.466.848.174,00

5.3.1.1.6.2.1 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah **Rp82.049.504,00**

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp82.049.504,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp361.545.456,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp279.495.952,00) atau (77,31%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	82.049.504,00	361.545.456,00
Jumlah	82.049.504,00	361.545.456,00

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah senilai Rp71.594.960,00 merupakan pinjaman dana talangan pangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap.

5.3.1.1.6.2.2 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat **Rp3.916.420.147,00**

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat sebesar Rp3.916.420.147,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami **penurunan** sebesar (Rp188.882.571,00) atau (4,60%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Kelautan dan Perikanan	3.916.420.147,00	4.105.302.718,00
	3.916.420.147,00	4.105.302.718,00

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat sebesar Rp3.916.420.147,00 merupakan saldo piutang yang berasal dari piutang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang belum



tertagih. Piutang tersebut timbul pada masa pengelolaan TPI masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2003, dengan mekanisme pemungutan retribusi yang dikelola melalui PUSKUD Mina Baruna. Seiring terbitnya PP Nomor 38 Tahun 2007, kewenangan pengelolaan TPI beralih dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Setelah pengalihan tersebut, PUSKUD Mina Baruna tidak lagi memiliki tanggung jawab operasional maupun akses terhadap pengelolaan TPI.

Upaya penagihan dan koordinasi telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, upaya tersebut belum memperoleh hasil yang memadai karena keberadaan debitur sudah tidak dapat diketahui, data pendukung piutang yang tidak memadai, serta PUSKUD Mina Baruna sudah tidak memiliki kewenangan maupun akses operasional terhadap TPI.

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang (Rp528.086.571.242,19)

Penyisihan Piutang sebesar (Rp528.086.571.242,19) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp560.159.696.288,11) mengalami **penurunan** sebesar Rp32.073.125.045,92 atau (5,73%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Penyisihan Piutang Pendapatan	(515.795.800.358,19)	(545.002.655.084,11)
2 Penyisihan Piutang Lainnya	(12.290.770.884,00)	(15.157.041.204,00)
Jumlah	(528.086.571.242,19)	(560.159.696.288,11)

5.3.1.1.7.1 Penyisihan Piutang Pendapatan (Rp515.795.800.358,19)

Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar (Rp515.795.800.358,19) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp545.002.655.084,11) mengalami **penurunan** sebesar Rp29.206.854.725,93 atau (5,36%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(502.999.052.485,49)	(527.521.633.943,40)
2 Penyisihan Piutang Retribusi	(12.074.821.475,89)	(16.623.089.457,71)
3 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
4 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(721.926.396,81)	(857.931.683,00)
5 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
6 Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
Jumlah	(515.795.800.358,19)	(545.002.655.084,11)

5.3.1.1.7.1.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah (Rp502.999.052.485,49)

Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar (Rp502.999.052.485,49) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp527.521.633.943,40) mengalami **penurunan** sebesar Rp24.522.581.457,92 atau (4,65%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	(502.998.752.750,00)	(527.519.938.448,25)
2 Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-
3 Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-
4 Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	(299.735,49)	(1.695.495,15)
5 Penyisihan Piutang Pajak Rokok	-	-
Jumlah	(502.999.052.485,49)	(527.521.633.943,40)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Rincian penyisihan piutang pajak Tahun 2025 berdasarkan umur piutang pada tabel berikut:

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2025					Saldo Akhir
			Tambah		Kurang			
			Beban	Koreksi	Penyesuaian	Penghapusan	Koreksi	
	Piutang Pajak Daerah	527.521.633.943,40	624.438.231.649,25	41.428.711.650,00	243.378.407,17	438.200.992.000,00	251.945.154.350,00	502.999.052.485,49
1	Pajak Kendaraan Bermotor	527.519.938.448,25	624.438.231.649,25	41.428.711.650,00	241.982.647,50	438.200.992.000,00	251.945.154.350,00	502.998.752.750,00
2	Pajak Air Permukaan	1.695.495,15	-	-	1.395.759,67	-	-	299.735,49

5.3.1.1.7.1.2 Penyisihan Piutang Retribusi

(Rp12.074.821.475,89)

Penyisihan Piutang Retribusi sebesar (Rp12.074.821.475,89), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp16.623.089.457,71) mengalami **penurunan** sebesar Rp4.548.267.981,82 atau (27,36%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan	(12.030.634.875,89)	(16.589.936.853,06)
2 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	-	(33.152.604,65)
3 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah	(44.186.600,00)	-
Jumlah	(12.074.821.475,89)	(16.623.089.457,71)

Perhitungan penyisihan piutang retribusi daerah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2025					Saldo Akhir
			Tambah		Kurang			
			Beban	Koreksi	Penyesuaian	Penghapusan	Koreksi	
	Piutang Retribusi Daerah	16.623.089.457,71	4.971.520.376,17	909.136.874,87	5.401.284.879,30	5.026.345.698,00	1.294.655,54	12.074.821.475,90
1	Dinas Kesehatan	346.606,00	200,00	-	346.606,00	-	-	200,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	145.704,65	-	-	145.704,65	-	-	-
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	965.300,00	11.179.700,00	-	-	-	-	12.145.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.041.600,00	-	-	-	-	-	32.041.600,00
5	RSUD Dr Moewardi Surakarta	5.414.124.930,58	4.178.916.600,68	909.136.874,87	4.940.214.685,75	2.366.301.806,00	755.113,87	3.194.906.800,52
6	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	6.436.211.137,79	304.635.524,41	-	143.868.136,10	-	8.160,13	6.596.970.365,97
7	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	2.859.200.733,84	176.236.197,92	-	66.223.276,97	1.619.173.947,00	-	1.350.039.707,79
8	RSUD dr. Rehatta Jepara	80.973.791,71	-	-	7.674.651,97	-	-	73.299.139,74
9	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.363.609.738,00	37.616.711,00	-	130.519,00	654.526.369,00	-	746.569.561,00
10	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	303.935.468,44	21.597.966,15	-	2.729.873,44	301.205.595,00	-	21.597.966,15
11	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	131.534.446,70	241.337.476,02	-	239.951.425,43	85.137.981,00	531.381,55	47.251.134,74



5.3.1.1.7.1.2.1 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum (Rp12.030.634.875,89)
Pelayanan Kesehatan

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan sebesar (Rp12.030.634.875,89), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp16.589.936.853,06) mengalami **penurunan** sebesar Rp4.559.301.977,17 atau (27,48%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	(200,00)	(346.606,00)
2 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(12.030.634.675,89)	(16.589.590.247,06)
Jumlah	(12.030.634.875,89)	(16.589.936.853,06)

5.3.1.1.7.1.2.1.1 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan (Rp200,00)

Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar (Rp200,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp346.606,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp346.406,00 atau (99,94%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Kesehatan	(200,00)	(346.606,00)
Jumlah	(200,00)	(346.606,00)

5.3.1.1.7.1.2.1.2 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Rp12.030.634.675,89)

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar (Rp12.030.634.675,89), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp16.589.590.247,06) mengalami **penurunan** sebesar Rp4.558.955.571,17 atau (27,48%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(3.194.906.800,51)	(5.414.124.930,58)
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(6.596.970.365,97)	(6.436.211.137,79)
3 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(746.569.561,00)	(1.363.609.738,00)
4 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(1.350.039.707,79)	(2.859.200.733,84)
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	(73.299.139,74)	(80.973.791,72)
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(21.597.966,15)	(303.935.468,44)
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(47.251.134,74)	(131.534.446,70)
	(12.030.634.675,89)	(16.589.590.247,06)

5.3.1.1.7.1.2.2 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha (Rp0,00)
Pemakaian Kekayaan Daerah

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar (Rp0,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp33.152.604,65) mengalami **penurunan** sebesar 33.152.604,65 atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	-	(145.704,65)
2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	(965.300,00)
3 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(32.041.600,00)
Jumlah	-	(33.152.604,65)



5.3.1.1.7.1.2.3 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha (Rp44.186.600,00)
Pemanfaatan Aset Daerah

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemanfaatan Aset Daerah sebesar (Rp44.186.600,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar (Rp44.186.600,00) atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(12.145.000,00)	-
2 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(32.041.600,00)	-
Jumlah	(44.186.600,00)	-

5.3.1.1.7.1.3 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Rp721.926.396,81)

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar (Rp721.926.396,81), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp857.931.683,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp136.005.286,19 atau (15,85%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(370.051.669,00)	(370.051.669,00)
2 Penyisihan Piutang Bunga	-	-
3 Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(351.874.727,81)	(487.880.014,00)
Jumlah	(721.926.396,81)	(857.931.683,00)

Perhitungan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2025					Saldo Akhir
			Tambah		Kurang			
			Beban	Koreksi	Penyesuaian	Penghapusan	Koreksi	
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	857.931.683,00	71.083.458,29	80.957.340,00	15.318.808,48	-	272.727.276,00	721.926.396,81
A	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	370.051.669,00	-	-	-	-	-	370.051.669,00
1	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	370.051.669,00	-	-	-	-	-	370.051.669,00
B	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	487.880.014,00	71.083.458,29	80.957.340,00	15.318.808,48	-	272.727.276,00	351.874.727,81
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	220.416,67	776.834,90	-	220.416,67	-	-	776.834,90
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	2.999.288,33	1.848.254,90	-	2.999.288,33	-	-	1.848.254,90
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	218.344.682,50	40.375.000,00	-	3.037,50	-	-	258.716.645,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	18.369.726,50	27.991.155,98	-	11.975.170,98	-	-	34.385.711,50
5	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	10.068,00	4.777,00	-	10.068,00	-	-	4.777,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	247.908.434,75	60.038,25	80.957.340,00	83.429,75	-	272.727.276,00	56.115.107,25
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	27.397,25	27.397,26	-	27.397,25	-	-	27.397,26

5.3.1.1.7.2 Penyisihan Piutang Lainnya (Rp12.290.770.884,00)

Penyisihan Piutang Lainnya sebesar (Rp12.290.770.884,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp15.157.041.204,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp2.866.270.320,00 atau (18,91%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	(8.292.301.233,00)	(10.690.193.030,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

2	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	(3.998.469.651,00)	(361.545.456,00)
		(12.290.770.884,00)	(15.157.041.204,00)

Rincian penyisihan piutang lainnya 2025 berdasarkan umur piutang pada tabel berikut:

NO	Keterangan	Penyisihan Piutang	Kategori Penyisihan Piutang				Total
			0,50%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Lainnya	12.290.770.884,00	-	-	-	12.290.770.884,00	12.290.770.884,00
A	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	8.292.301.233,00	-	-	-	8.292.301.233,00	8.292.301.233,00
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	8.292.301.233,00	-	-	-	8.363.896.193,00	8.363.896.193,00
B	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	3.998.469.651,00	-	-	-	3.998.469.651,00	3.998.469.651,00
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	82.049.504,00	-	-	-	82.049.504,00	82.049.504,00
2	Dinas Kelautan & Perikanan	3.916.420.147,00	-	-	-	3.916.420.147,00	3.916.420.147,00

5.3.1.1.7.2.1 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang (Rp8.292.301.233,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar (Rp8.292.301.233,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp10.690.193.030,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp2.397.891.797,00 atau (22,43%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	(8.292.301.233,00)	(10.690.193.030,00)
Jumlah	(8.292.301.233,00)	(10.690.193.030,00)

5.3.1.1.7.2.2 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang (Rp3.998.469.651,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang sebesar (Rp3.998.469.651,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp4.466.848.174,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp468.378.523,00 atau (10,49%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah	(82.049.504,00)	(361.545.456,00)
2 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat	(3.916.420.147,00)	(4.105.302.718,00)
	(3.998.469.651,00)	(4.466.848.174,00)

5.3.1.1.7.2.2.1 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah (Rp82.049.504,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah sebesar (Rp82.049.504,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp361.545.456,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp279.495.952,00 atau (77,31%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	(82.049.504,00)	(361.545.456,00)
Jumlah	(82.049.504,00)	(361.545.456,00)



5.3.1.1.7.2.2.2 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat (Rp3.916.420.147,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat sebesar (Rp3.916.420.147,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp4.105.302.718,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp188.882.571,00 atau (4,60%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Kelautan dan Perikanan	(3.916.420.147,00)	(4.105.302.718,00)
Jumlah	(3.916.420.147,00)	(4.105.302.718,00)

5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka Rp4.989.015.590,64

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp4.989.015.590,64 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.086.493.552,91 mengalami **penurunan** sebesar (Rp97.477.962,27) atau (1,92%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Beban Dibayar Dimuka	166.346.038,25	518.636.939,82
2 Beban Dibayar Dimuka-Sewa	2.307.692,31	248.431.033,96
3 Beban Dibayar Dimuka-Asuransi Barang Milik Daerah	4.820.361.860,08	4.319.425.579,13
Jumlah	4.989.015.590,64	5.086.493.552,91

5.3.1.1.8.1 Beban Dibayar Dimuka Rp166.346.038,25

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp166.346.038,25 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp518.636.939,82 mengalami **penurunan** sebesar (Rp352.290.901,57) atau (67,93%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	341.377.202,19
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	143.099.699,45	153.785.765,03
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	23.246.338,80	23.473.972,60
Jumlah	166.346.038,25	518.636.939,82

Beban Dibayar Dimuka senilai Rp166.346.038,25 merupakan belanja premi asuransi tanggung gugat profesi dokter pada RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto dan RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang.

5.3.1.1.8.2 Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rp 2.307.692,31

Beban Dibayar Dimuka-Sewa sebesar Rp 2.307.692,31 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp248.431.033,96 mengalami **penurunan** sebesar (Rp246.123.341,65) atau (99,07%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	228.526.920,98
2 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	2.307.692,31	29.598.092,64
3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	664.850,14
Jumlah	2.307.692,31	258.789.863,76

Beban dibayar dimuka sewa sebesar Rp2.307.692,31 merupakan biaya sewa rumah dinas RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta kepada atas nama Sundari untuk masa sewa 1 September 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.



5.3.1.1.8.3 Beban Dibayar Dimuka-Asuransi Barang Milik Daerah **Rp4.820.361.860,08**

Beban Dibayar Dimuka-Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp4.820.361.860,08 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.319.425.579,13 mengalami **kenaikan** sebesar Rp500.936.280,95 atau 11,60% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	309.705.362,93	241.095.527,91
2 Dinas Kesehatan	192.317.891,05	86.437.923,90
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	278.937.886,00	268.308.119,85
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	286.365.603,80	286.340.137,01
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	187.879.810,44	188.294.397,28
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	27.637.573,78	14.221.028,47
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	14.723.066,46	14.533.516,76
8 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	41.795.694,66	44.329.246,58
9 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	239.034.610,58	228.873.610,63
10 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	107.581.359,87	99.783.319,46
11 Satuan Polisi Pamong Praja	57.411.991,68	73.099.350,42
12 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	46.400.792,46	83.010.937,38
13 Dinas Sosial	64.671.507,05	44.204.270,44
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	49.903.252,59	1.052.394,75
15 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.094.766,08	32.861.059,29
16 Dinas Ketahanan Pangan	-	6.572.344,89
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	186.509.230,57	194.431.540,32
18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	74.046.833,00	74.542.265,11
19 Dinas Perhubungan	211.865.311,48	213.150.426,23
20 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	250.152.158,34	178.310.277,56
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	17.634.792,35	15.326.924,03
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	65.738.697,92	94.289.411,00
23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	17.361.978,08
24 Dinas Pertanian dan Perkebunan	81.975.520,21	115.665.989,52
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	78.549.640,24	128.147.590,10
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	132.061.600,13
27 Sekretariat Daerah	558.892.773,03	253.666.709,76
28 Sekretariat DPRD	574.647.879,86	440.432.084,41
29 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	313.671.338,15	296.195.344,74
30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	182.858.239,76	180.792.204,10
31 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.612.430,37	12.589.671,70
32 Badan Penghubung	121.190.756,63	109.363.038,20
33 Inspektorat	134.865.494,72	132.044.997,54
34 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.689.594,02	18.036.341,58
Jumlah	4.820.361.860,08	4.319.425.579,13

5.3.1.1.9 Persediaan **Rp297.727.493.001,12**

Persediaan sebesar Rp297.727.493.001,12 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp315.883.508.388,02 mengalami **penurunan** sebesar (Rp18.156.015.386,91) atau (5,75%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Barang Pakai Habis	297.687.688.041,12	315.846.660.398,02
2 Barang Tak Habis Pakai	39.741.960,00	36.663.990,00
3 Barang Bekas Pakai	63.000,00	184.000,00
Jumlah	297.727.493.001,12	315.883.508.388,02



5.3.1.1.9.1 Barang Pakai Habis

Rp297.687.688.041,12

Barang Pakai Habis adalah barang yang sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun yaitu sebesar Rp297.687.688.041,12 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp315.846.660.398,02 mengalami **penurunan** sebesar (Rp18.158.972.356,91) atau (5,75%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Bahan	32.335.360.036,64	24.998.064.293,69
2 Suku Cadang	6.857.331.138,43	11.719.784.532,71
3 Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	108.178.837.063,97	121.204.057.287,08
4 Obat-obatan	130.271.314.891,99	135.280.930.289,50
5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	7.279.454.841,42	7.422.222.755,72
6 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	7.751.168.530,00	8.854.369.300,00
7 Natura dan Pakan	4.273.543.964,91	5.226.531.855,58
8 Persediaan Penelitian	740.677.573,75	1.140.700.083,74
9 Persediaan dalam Proses	-	-
Jumlah	297.687.688.041,12	315.846.660.398,02

5.3.1.1.9.1.1 Bahan

Rp32.335.360.036,64

Bahan sebesar Rp32.335.360.036,64 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.998.064.293,69 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.337.295.742,95 atau 29,35%. Komponen bahan antara lain bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan/bibit tanaman, bahan/bibit ternak dan ikan, serta bahan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.727.176.462,00	2.507.896.264,80
2 Dinas Kesehatan	9.779.194.718,12	4.442.264.051,90
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	178.841.645,28	196.763.943,93
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	2.053.424.232,70	1.992.328.844,70
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	128.239.192,26	134.551.174,42
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	31.040.887,64	25.909.838,86
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	405.977.246,32	493.497.198,80
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	11.040.350,00	5.374.375,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	18.000.390,00	17.302.510,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.520.360.453,60	2.276.688.448,60
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.142.676.500,00	1.007.714.645,00
12 Satuan Polisi Pamong Praja	-	10.850.000,00
13 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	152.239.200,00	165.460.450,00
14 Dinas Sosial	28.669.100,00	40.184.000,00
15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.632.600,00	-
16 Dinas Ketahanan Pangan	108.040.500,00	122.916.900,00
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	339.150.542,23	540.803.987,17
18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	1.100.000,00	-
19 Dinas Perhubungan	1.528.274.640,00	-
20 Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	250.000,00
21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	3.751.966,00
22 Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	-	13.000.000,00
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.075.000,00	-
24 Dinas Kelautan dan Perikanan	410.759.736,73	288.747.355,74
25 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	10.266.845.212,76	9.295.392.471,00
26 Dinas Pertanian dan Perkebunan	124.478.101,00	661.384.382,77
27 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	70.000,00
28 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	31.121.140,00	170.126.700,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
29	Sekretariat Daerah	114.770.138,00	-
30	Sekretariat DPRD	42.046.848,00	-
31	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	124.766.200,00	263.858.185,00
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	42.819.000,00	320.775.000,00
33	Badan Penghubung	-	201.600,00
34	Inspektorat	1.600.000,00	-
	Jumlah	32.335.360.036,64	24.998.064.293,69

Bahan senilai Rp32.335.360.036,64, tidak termasuk :

1. Persediaan berupa 20 gulungan kabel yang tidak tercatat pada BA *Stock Opname* per 31 Desember 2025 di BPJ Wilayah Surakarta. Untuk persediaan berupa gulungan kabel tersebut tidak diketahui dokumen sumber, nilai, dan peruntukannya, sehingga tidak dapat dicatat sebagai persediaan per 31 Desember 2025
2. *Dropping* Aramco di gudang BPJ wilayah Cilacap dari BP2 pada tahun 2024, sesuai dengan BAST nomor 604.3/578 tanggal 2 Oktober 2024 sebanyak 20 pasang yang belum tercantum dalam BA *Stock Opname* per 31 Desember 2025. Dalam BAST tersebut juga tidak mencantumkan nilai dari barang tersebut

5.3.1.1.9.1.2 Suku Cadang

Rp6.857.331.138,43

Suku Cadang sebesar Rp6.857.331.138,43 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.719.784.532,71 mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.862.453.394,28) atau (41,49%). Komponen Suku cadang antara lain suku cadang kedokteran, suku cadang alat laboratorium dan suku cadang alat bengkel dengan rincian sebagai berikut:

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.694.542.408,00	2.156.089.433,00
2	Dinas Kesehatan	2.623.427.461,73	8.060.515.728,71
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	578.137.800,53	571.144.724,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	568.231.185,31	407.840.276,78
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	62.337.951,50	342.000,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	9.474.262,14	5.077.342,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	15.293.151,22	21.110.603,62
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	4.509.388,00	52.296.574,60
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.131.000,00	-
11	Dinas Sosial	-	38.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	56.000,00	56.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	10.345.000,00	14.845.000,00
14	Dinas Perhubungan	40.920.780,00	55.737.000,00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	4.312.500,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	351.000,00	1.344.000,00
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	217.924.250,00	365.670.350,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.435.500,00	3.365.000,00
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	26.958.000,00	-
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	256.000,00	-
	Jumlah	6.857.331.138,43	11.719.784.532,71

5.3.1.1.9.1.3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor

Rp108.178.837.063,97

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp108.178.837.063,97 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp121.204.057.287,08 mengalami **penurunan** sebesar (Rp13.025.220.223,11) atau (10,75%). Komponen alat/bahan untuk kegiatan kantor antara lain alat tulis kantor, kertas dan



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

cover, bahan cetak, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik dan perlengkapan dinas, perlengkapan pendukung olahraga, souvenir dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.998.416.807,53	33.164.750.462,93
2	Dinas Kesehatan	23.908.825.053,39	23.290.592.786,11
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	27.414.790.261,60	37.670.313.157,56
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	5.410.389.695,47	5.893.052.496,57
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	5.797.460.486,12	7.361.969.796,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.939.272.825,54	1.899.789.777,83
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.062.431.078,35	2.354.051.733,26
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	423.185.373,54	411.134.755,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.461.341.315,31	976.476.306,53
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.837.500,00	15.551.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	161.789.650,00	300.970.200,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.479.000,00	1.384.400,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	88.183.500,00	45.639.000,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.742.273.866,00	2.035.963.128,40
15	Dinas Sosial	114.306.135,15	109.109.400,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.045.500,00	14.849.100,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.250.000,00	6.521.000,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	41.641.562,00	26.033.992,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22.375.500,00	37.191.500,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	178.424.500,00	12.784.000,00
21	Dinas Perhubungan	247.089.858,00	373.313.264,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00	605.000,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	595.984,00	60.041.051,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	82.737.100,00	64.063.500,00
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	750.000,00	126.020.690,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.978.285,00	8.459.375,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	81.646.725,00	56.617.949,39
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	157.549.516,00	1.257.073.146,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	54.093.800,00	105.738.785,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.081.200,00	6.052.200,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	253.493.827,00	206.630.071,00
32	Sekretariat Daerah	6.062.400,00	6.238.400,00
33	Sekretariat DPRD	26.847.800,00	14.144.000,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.849.500,00	21.005.000,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.124.321.484,97	3.107.005.192,50
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	53.813.000,00	30.615.000,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	27.744.000,00	30.460.947,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	199.402.874,00	71.465.874,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.905.000,00	2.607.000,00
40	Badan Penghubung	1.761.400,00	3.891.000,00
41	Inspektorat	11.695.700,00	12.914.850,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	698.000,00	10.967.000,00
	Jumlah	108.178.837.063,97	121.204.057.287,08

Persediaan di atas belum termasuk tambahan atas TBPKP (Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran) di Bapenda pada bulan November sampai dengan Desember 2025 sebanyak 1.580.000 lembar. Penerimaan barang hanya berdasarkan surat pengantar barang dari penyedia yang tidak mencantumkan harga, karena surat pesanan atas pengadaan TBPKP baru diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2026, dengan menggunakan anggaran tahun 2026.



5.3.1.1.9.1.4 Obat-Obatan

Rp130.271.314.891,99

Obat-Obatan sebesar Rp130.271.314.891,99 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp135.280.930.289,50 mengalami **penurunan** sebesar (Rp5.009.615.397,51) atau (3,70%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	630.697.279,00	599.097.965,11
2 Dinas Kesehatan	73.101.604.751,24	44.275.689.465,72
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	21.800.479.705,97	31.174.325.210,96
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	25.106.797.685,44	47.611.959.893,53
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	3.346.347.892,53	5.368.897.618,45
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	954.376.783,43	941.948.885,10
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.590.009.077,13	540.760.159,28
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	635.902.190,82	766.389.171,81
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.775.758.277,43	1.703.757.680,54
10 Dinas Sosial	20.981.575,00	15.125.766,00
11 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	47.326.500,00	120.281.500,00
12 Dinas Kelautan dan Perikanan	1.186.000,00	6.341.500,00
13 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	227.346.246,00	2.118.656.642,00
14 Dinas Pertanian dan Perkebunan	18.968.728,00	30.341.989,00
15 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	129.542,00
16 Sekretariat Daerah	-	1.701.000,00
17 Sekretariat DPRD	2.872.300,00	1.769.800,00
18 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.659.900,00	3.756.500,00
Jumlah	130.271.314.891,99	135.280.930.289,50

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi terdapat persediaan yang kadaluarsa diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan kadaluarsa per 31 Desember 2025 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp667.941.939,92 terdiri dari:

Persediaan Kadaluarsa/Rusak
Obat, Bahan Medis dan Alat Kesehatan Habis Pakai
di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah
per 31 Desember 2025

No	OPD	Obat/Reagen	Alkes dan Bahan Habis Pakai
1	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	169.638.518,59	17.281.340,00
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	212.727.693,95	66.143.182,48
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	87.901.860,00	8.366.439,00
4	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang	16.121.391,00	705.600,00
5	RSUD Dr. Rehatta Jepara	42.772.068,72	-
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.180.791,00	-
7	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	20.439.706,04	-
8	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	24.471.996,24	191.352,90
Total		575.254.025,54	92.687.914,38

5.3.1.1.9.1.5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan

Rp7.279.454.841,42

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp7.279.454.841,42 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.422.222.755,72 mengalami **penurunan** sebesar (Rp142.767.914,30) atau (1,92%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.293.194.682,42	2.405.267.073



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2 Dinas Kesehatan	132.771.908,00	133.996.558
3 Dinas Sosial	53.174.000,00	-
4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	178.808.000,00	840.374.600
5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.400.000,00	6.300.000
8 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.655.210.000,00	3.327.791.525
9 Dinas Pertanian dan Perkebunan	963.896.251,00	708.493.000
Jumlah	7.279.454.841,42	7.422.222.755,72

5.3.1.1.9.1.6 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga **Rp7.751.168.530,00**

Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga sebesar Rp7.751.168.530,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.854.369.300,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.103.200.770,00) atau (12,46%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.750.000,00	-
2 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.749.418.530,00	8.854.369.300,00
Jumlah	7.751.168.530,00	8.854.369.300,00

5.3.1.1.9.1.7 Natura dan Pakan **Rp4.273.543.964,91**

Natura dan Pakan sebesar Rp4.273.543.964,91 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.226.531.855,58 mengalami **penurunan** sebesar (Rp952.987.890,67) atau (18,23%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	289.261.145,00	218.355.514,00
2 Dinas Kesehatan	279.978,08	281.593,60
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	203.239.289,56	275.672.985,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	423.159.531,17	337.954.709,93
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	162.510.578,99	137.111.266,57
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	28.088.345,00	22.145.561,00
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	98.809.997,62	190.420.405,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	86.685.800,00	31.023.250,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	40.139.640,00	26.060.910,00
10 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	20.000,00
11 Dinas Sosial	13.797.550,00	20.205.260,00
12 Dinas Ketahanan Pangan	2.353.318.850,00	2.430.242.800,00
13 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	48.800.000,00
14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	1.000.000,00
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	1.175.000,00
16 Dinas Kelautan dan Perikanan	101.898.449,49	117.476.940,48
17 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	472.354.810,00	1.368.392.160,00
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	193.500,00
Jumlah	4.273.543.964,91	5.226.531.855,58

5.3.1.1.9.1.8 Persediaan Penelitian **Rp740.677.573,75**

Persediaan Penelitian sebesar Rp740.677.573,75 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.140.700.083,74 mengalami **penurunan** sebesar (Rp400.022.509,99) atau (35,07%). Komponen persediaan penelitian yaitu untuk penelitian biologi dan teknologi dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.085.000,00	19.875.980,00



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	125.641.000,00	125.641.000,00
3 Dinas Kelautan dan Perikanan	565.419.073,75	640.314.734,74
5 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	62.500,00	43.750.000,00
6 Dinas Pertanian dan Perkebunan	40.470.000,00	311.118.369,00
Jumlah	740.677.573,75	1.140.700.083,74

5.3.1.1.9.2 Barang Tak Habis Pakai

Rp39.741.960,00

Persediaan Barang Tak Habis Pakai merupakan barang untuk keperluan dinas yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun yaitu sebesar Rp39.741.960,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp36.663.990,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.077.970,00 atau 8,40% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Komponen	-	195.000,00
2 Pipa	39.741.960,00	36.468.990,00
Jumlah	39.741.960,00	36.663.990,00

5.3.1.1.9.2.1 Komponen

Rp0,00

Persediaan Komponen sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp195.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp195.000,00) atau (100,00 %) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	195.000,00
Jumlah	-	195.000,00

5.3.1.1.9.2.2 Pipa

Rp39.741.960,00

Persediaan Pipa sebesar Rp39.741.960,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp36.468.990,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.272.970,00 atau 8,97% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.965.560,00	28.132.490,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	1.431.900,00	-
3 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	508.000,00	894.000,00
4 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	6.836.500,00	7.442.500,00
Jumlah	39.741.960,00	36.468.990,00

5.3.1.1.9.3 Barang Bekas Pakai

Rp63.000,00

Persediaan Barang Bekas Pakai merupakan barang bekas yang merupakan sisa dari suatu kegiatan yang masih dapat digunakan kembali yaitu sebesar Rp63.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp184.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp121.000,00) atau (65,76 %) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Komponen Bekas dan Pipa Bekas	63.000,00	184.000,00
Jumlah	63.000,00	184.000,00

5.3.1.1.9.3.1 Komponen Bekas dan Pipa Bekas

Rp63.000,00

Persediaan Komponen Bekas dan Pipa Bekas sebesar Rp63.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp184.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp121.000,00) atau (65,76 %) dengan rincian sebagai berikut :



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	63.000,00	184.000,00
	63.000,00	184.000,00

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG Rp8.366.495.471.980,20

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp8.366.495.471.980,20 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.929.016.426.114,62 mengalami **kenaikan** sebesar Rp437.479.045.865,58 atau 5,52% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
2 Investasi Jangka Panjang Permanen	8.366.495.471.980,20	7.929.016.426.114,62
Jumlah	8.366.495.471.980,20	7.929.016.426.114,62

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen Rp8.366.495.471.980,20

Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp8.366.495.471.980,20 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.929.016.426.114,62 mengalami **kenaikan** sebesar Rp437.479.045.865,58 atau 5,52% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Penyertaan Modal	8.366.495.471.980,20	7.929.016.426.114,62
2 Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah	8.366.495.471.980,20	7.929.016.426.114,62

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal Rp8.366.495.471.980,20

Penyertaan Modal sebesar Rp8.366.495.471.980,20 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.929.016.426.114,62 mengalami **kenaikan** sebesar Rp437.479.045.865,58 atau 5,52% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Jateng	5.865.809.903.200,50	5.477.307.326.730,39
2 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BPR & BKK	843.864.263.800,22	804.026.122.816,69
3 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Jateng	244.267.630.247,50	233.623.139.314,25
4 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Klaten	-	-
5 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Pringsurat	-	-
6 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asuransi Bangun Askrida	19.960.000.000,00	19.960.000.000,00
7 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT PRPP	44.803.153.372,81	46.144.593.329,52
8 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAB Tirta Utama	174.564.697.676,13	168.108.759.266,18
9 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jawa Tengah Agro Berdikari	181.819.948.177,33	177.308.842.712,41
10 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	558.284.595.730,60	557.030.063.296,26
11 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jawa Tengah Petroleum Energy	239.208.596.406,00	259.635.702.789,00
12 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida	183.466.683.369,11	175.425.875.859,92
13 Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	10.446.000.000,00	10.446.000.000,00
Jumlah	8.366.495.471.980,20	7.929.016.426.114,62



Metode penilaian investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 6 Paragraf 36 dan 37. Seluruh Investasi Permanen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma yang menggunakan metode biaya. Berikut di bawah ini perhitungan nilai dengan menggunakan metode ekuitas:

Investasi Permanen - Penyertaan Modal Audited TA 2024 **7.929.016.426.114,62**

Tambah:

Penyertaan Modal TA 2025 -

Penyesuaian Investasi Permanen BUMD 437.479.045.865,58

Pengakuan atas Laba BUMD/BUMN 1.070.437.854.900,05

Jumlah Tambah 1.507.916.900.765,63

Kurang:

Pengakuan Rugi BUMD (3.034.184.899,89)

Penerimaan Dividen (546.657.345.508,00)

Penyesuaian Pengakuan Laba/Rugi (520.746.324.492,16)

Jumlah Kurang (1.070.437.854.900,05)

Investasi Permanen - Penyertaan Modal TA 2025 **8.366.495.471.980,20**

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di BUMD baik berupa pengurangan maupun penambahan modal adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Jateng

Setoran modal Pemda yang belum disetujui RUPS dicatat sebagai Dana Setoran Modal dan tidak diperhitungkan dividen (tidak diberikan imbal Jasa) sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 pasal 14 Ayat (1) huruf a, angka 7 yang antara lain menyatakan :

- o Dana Setoran Modal adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang
- o ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) yang tidak diberikan imbal hasil;

UU PT pasal 71 ayat (2) bahwa Dividen diberikan kepada Pemegang Saham (pemilik Modal Disetor). Dana Setoran Modal belum menjadi Modal Disetor, sehingga belum dapat dijadikan dasar pembagian dividen.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Jateng tanggal 17 April 2025 memutuskan :

- o Menyetujui setoran tambahan modal Pemkab/Pemkot sebesar Rp.155.739.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) setelah adanya tambahan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar) yang berasal dari:



- a. Konversi deviden tahap kedua tahun 2025 yang belum disetorkan sebesar Rp.242.242.368.037,- (dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh tujuh rupiah); dan
 - b. hasil konversi cadangan untuk tambahan deviden sebesar Rp.7.757.631.963,- (tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
 - o Perubahan komposisi kepemilikan modal disetor Bank Jateng menjadi:
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.2.455.289.000.000,- (dua trilyun empat ratus lima puluh lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atau 51,01%.
 - b. Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah sebesar Rp.2.357.805.000.000,- (dua trilyun tiga ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus lima juta rupiah) atau 49,99%.
 - o Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan keputusan penambahan modal tersebut
2. PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) PD BKK di Jawa Tengah diantaranya adalah PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dan pada RUPS-LB tanggal 2 Juli 2019, salah satu amanatnya menyebutkan bahwa RUPS menyetujui Penggabungan 27 PD BKK (tanpa PD BKK PRINGSURAT dan PD BKK KLATEN) menjadi PT BKK JAWA TENGAH.

Terhitung sejak tidak diikutkannya konsolidasi, maka PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam proses untuk likuidasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. PD BKK PRINGSURAT
 - ✓ Berhenti Operasional dikarenakan tidak mempunyai likuiditas
 - ✓ Performa keuangan berhenti per 29 Juni 2019 (audited)
- b. PD BKK KLATEN
 - ✓ Berhenti secara operasional dikarenakan kendala likuiditas
 - ✓ Performa keuangan *cut off* 31 Agustus 2025

Sampai dengan tanggal pemeriksaan, pada tanggal 16 Maret 2023 telah diundangkan Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, namun belum diundangkan Pergub untuk petunjuk pelaksanaannya. Klausul pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dituangkan dalam pasal 76A.

Sebagai tindak lanjut telah dibuat draft Pergub tentang Pembubaran Dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten serta draft Tim Pembubaran dan Likuidasi serta penyusunan SOP. Berdasarkan Hasil rapat paparan dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 2 Agustus 2022 terkait penyelesaian permasalahan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten Bahwa penyelesaian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten diputuskan menggunakan opsi penyesatan yang memiliki tujuan untuk:

- a. Penyelamatan simpanan/tabungan masyarakat/nasabah yang ada di PD BKK Pringsurat dan Klaten;
- b. Terdapat potensi pergerakan ekonomi atau perputaran ekonomi sebesar penyertaan modal dan simpanan masyarakat;
- c. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemprov. Jateng dan BUMD lainnya.



Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 2 Agustus 2022, Biro Perekonomian telah mengadakan rapat dan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Prov. Jateng dan OJK Regional 3 Jateng dan DIY dengan pembahasan terkait:

- a. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah, dengan ketentuan:
 - 1) Memberlakukan Perseroan (merubah) Pasal 79 Perda 4/2017 tentang Pembentukan BPR BKK Jawa Tengah sebagai dasar hukum pendirian PD BKK Pringsurat dan Klaten dengan:
 - a) Menghapuskan klausul pembubaran atas 2 PD BKK (pasal 76A);
 - b) Menambahkan klausul penyehatan atas 2 PD BKK;
 - c) Menambahkan klausul penyertaan modal/suntikan modal dalam rangka penyehatan;
 - 2) Menambahkan klausul tentang status PD BKK setelah disehatkan menjadi BPR melalui merger dengan PT BPR BKK Jateng atau menjadi BPR yang mandiri.
- b. Perubahan Perda 10/2019 Tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD, BUMN, dan Pihak Ketiga dengan menambahkan penyertaan modal kepada PD BKK Pringsurat dan Klaten.

Telah mengajukan perubahan Peraturan Daerah kepada Bامpeperda DPRD melalui Surat Sekretaris Daerah:

- a. Surat Nomor 180/0012294 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Tahun 2022.
- b. Surat Nomor 180/0003545 tanggal 27 Februari 2023 tentang Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Tahun 2023

Untuk mengajukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD, BUMD, dan Pihak Ketiga.

Dengan terbitnya Undang – Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan di tanggal 12 Januari 2023, maka pada tanggal 21 Maret 2023 kami melakukan audiensi dengan DPIP OJK KR 3 DIY & Yogyakarta untuk berdiskusi tentang peluang penggabungan dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dengan BPR BKK setempat guna percepatan penyelesaian dengan berpedoman pada UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 28A pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa BPR dapat melakukan Penggabungan dengan Perseroan keuangan mikro. Dalam hal ini, OJK akan melakukan koordinasi internal untuk mengakomodir usulan penggabungan dari Pemprov Jateng.

Proses pengajuan Usulan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD, BUMD, dan Pihak Ketiga masih dalam penundaan, karena berdasarkan :

- a. Surat Kakanwil Kemenkumham Jateng nomor W.13-PP.04.02-485 tanggal 8 September 2023 perihal penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep raperda menegaskan bahwa



- 1) mengingat bahwa usulan pasal 79 raperda Perubahan kedua atas Perda 4 tahun 2017 tertulis bahwa “Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tentang PD BKK di Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku **dengan pengecualian sepanjang mengatur PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten**”
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tentang PD BKK Usulan Peraturan Dasar sebagai payung hukum BUMD berupa PD BKK yang **telah dicabut** pada rencana merger PT BPR BKK Jateng melalui Perda 4 tahun 2017.
- 3) Rancangan perubahan perda perlu dipertimbangkan kembali karena menambah kalimat bercetak tebal pada poin 1. Berdasarkan surat Kakanwil Kemenkumham Jateng, Perda yang telah dicabut tidak bisa dihidupkan kembali. Sehingga bahasa “**dengan pengecualian sepanjang mengatur PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten**” tidak bisa ditambahkan karena pasal 79 telah mencabut Perda 19 tahun 2002 tentang PD BKK dan pencabutan Perda tidak bisa dibatalkan.
- b. Berdasarkan Dirjen Bina keuangan Daerah pada *Focus Group Discussion* dengan Bapemperda Prov. Jateng :
 - 1) Dalam konteks Perda penyertaan modal untuk memfasilitasi penyehatan kedua PD BKK untuk menjadi LKM perlu dipertimbangkan kembali, karena sebagaimana pada PP 54 tahun 2017 bahwa penyertaan modal harus ditujukan untuk pengembangan bisnis perusahaan dan **bukan untuk pengembalian dana masyarakat**.
 - 2) Terkait munculnya wacana perubahan perda untuk mengubah kedua PD BKK menjadi LKM harus melalui mekanisme perda baru sehingga membutuhkan waktu yang lama. Perubahan perda untuk mengubah kedua PD BKK menjadi LKM tidak bisa dilakukan karena **ketidaksesuaian substansi peraturan daerah**. Ketidaksesuaian ini terjadi karena Perda 6 tahun 2021 berjudul tentang pembentukan PT BPR BKK Jateng yang berarti perda tersebut merupakan dasar hukum pembentukan BPR bukan LKM.
- c. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Mei 2025 menyepakati dalam salah satu agenda bahwa laporan Komisi C tentang usulan Perubahan Kedua atas Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah, bahwa Raperda perubahan kedua Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah tidak dapat dilanjutkan atau tidak dapat disetujui penetapannya dengan urgensi :
 - a. PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten telah dibubarkan sejak diundangkannya Perda 6 Tahun 2021.
 - b. Apabila dihidupkan kembali, terlebih dahulu harus bertransformasi menjadi LKM dan membutuhkan waktu.
 - c. Diperlukan kehati-hatian bersama dalam penanganan permasalahan tata kelola PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.
 - d. Penyehatan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten membutuhkan penyertaan modal dari Pemegang Saham cukup besar.
 - e. Pembubaran dan likuidasi kedua PD BKK akan menjadi pembelajaran yang baik dalam tata kelola BUMD di Provinsi Jawa Tengah.
- d. Menindaklanjuti terhadap usulan Raperda yang masih belum dapat disetujui, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah sedang dalam proses pembahasan terhadap opsi lain yang dapat menjadi langkah penyelesaian kewajiban PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten.



3. PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) / PT JTAB (Perseroda)

Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah / PD CMJT diubah bentuk hukumnya menjadi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari, dengan modal dasar sebesar Rp 200.000.000.000,-. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal disetor paling sedikit sebesar 25% dari modal dasar atau Rp 50.000.000.000,-, sedangkan posisi modal disetor PD. CMJT saat itu sebesar Rp 31.861.846.791,-. Maka dalam Rapat Tahunan PD. CMJT tanggal 20 Juni 2022 (Akta Notaris Dewi Wikaningsih Nomor 136 Tanggal 20 Juni 2022) telah diputuskan pengalihan laba ditahan menjadi modal disetor Pemprov. Jateng sebesar Rp 68.138.153.209,- sehingga total modal disetor menjadi Rp 100.000.000.000,- dan memenuhi syarat untuk menjadi Perseroda (kemudian disahkan pendiriannya dengan Akta Pendirian PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) Nomor 77 Tanggal 24 Januari 2023).

Di samping itu pada RUPS Tahunan tanggal 26 Juli 2023 (Akta Notaris Dewi Wikaningsih Nomor 111 tanggal 26 Juli 2023) ditetapkan pengalihan modal yang belum ditetapkan penggunaannya sebesar Rp 65.309.044.136,- menjadi modal disetor Pemprov. Jateng.

Pada tahun anggaran 2024 dan 2025 tidak dilakukan penyertaan modal oleh Pemprov. Jateng, sehingga posisi modal disetor s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp165.309.044.136,-.

4. PT Jateng Petro Energi (Perseroda) / PT JPEN (Perseroda)

PT JPEN (Perseroda) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT JPEN (Perseroda) Nomor 29 tanggal 8 Oktober 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn) dengan modal dasar Rp100.000.000.000,00 yang terbagi atas 100.000 lembar saham. Dari modal dasar dimaksud telah disetorkan atau ditempatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 25% atau sejumlah 25.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (memenuhi ketentuan minimal modal disetor Perseroan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

Sumber modal disetor Pemerintah Provinsi Jateng sebesar Rp25.000.000.000,00 berasal dari pengalihan saham Pemerintah Provinsi Jateng pada PT SPHC sebesar Rp10.223.766.000,00 atau setara sebanyak 10.200 lembar saham dan sebesar Rp14.776.234.000,00 atas pengalihan ekuitas dari PT SPHC yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat RUPS LB PT SPHC Nomor 68 dan RUPS LB PT JPEN (Perseroda) Nomor 69 tanggal 12 November 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn).

Cadangan PT SPHC posisi sebelum 12 November 2020 atau sebelum menjadi anak Perseroan PT JPEN (Perseroda) adalah hak pemegang saham pada saat itu, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Yakekar (proporsional sesuai proporsi saham). Cadangan PT SPHC posisi tanggal 11 November 2020 adalah sebesar US\$4.925.902,44, yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar US\$4.704.729,42 dan hak Yakekar sebesar US\$221.173,02. Cadangan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dialihkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PT JPEN sebesar US\$ 1.029.272,36 atau Rp14.776.234.000,00 (kurs Rp.14.356/ US\$ 1 sesuai kurs yang berlaku pada saat realisasi), sehingga sisa Perseroan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp US\$3.675.457,06 atau Rp57.307.726.479,52 (kurs Rp.15.592,00/ US\$ 1 sesuai hasil Laporan Keuangan Audited PT SPHC per 31 Desember 2022). Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 539/0002283 tanggal 3 Februari 2022 telah dilakukan reklasifikasi pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 yang semula dicatat pada akun kewajiban lain-lain ke akun ekuitas dengan pertimbangan guna memenuhi ketentuan Perseroan minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tidak mengurangi hak Pemerintah



Provinsi Jawa Tengah. Ekuitas PT SPHC terkonsolidasi dengan PT JPEN (Perseroda) dalam laporan keuangan konsolidasi dan saham PT JPEN dimiliki 100% oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada Tahun Anggaran 2022 telah diberikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. JPEN (Perseroda) sebesar Rp 14.887.500.000,- yang digunakan untuk pengembangan usaha yaitu pengembangan PLTS, niaga CNG serta kegiatan usaha migas dan penunjang lainnya (disetujui dan disahkan dalam RUPS tanggal 30 Desember 2022).

Pada tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 tidak dilakukan penyertaan modal oleh Pemprov. Jateng, sehingga posisi modal disetor s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp54.887.500.000,-.

5. PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) / PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda)

Pada Tahun Anggaran 2022 telah diberikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp 25.000.000.000,- yang digunakan untuk pengurusan sertifikat dan peningkatan status tanah PT. PRPP (disetujui dan disahkan dalam RUPS tanggal 20 April 2022);

Tidak ada penambahan penyertaan modal di tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 sehingga posisi modal disetor Pemprov. Jateng s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp64.252.000.000,-.

6. PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) / PT SPJT (Perseroda)

Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT. SPJT) tanggal 31 Desember 2021 telah menyetujui dan mengesahkan pengurangan modal disetor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PT. SPJT sebesar Rp 474.000.000.000,- dan telah disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga modal disetor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PT. SPJT menjadi sebesar Rp 375.392.000.000,-. Hal ini didasarkan atas pertimbangan untuk mendorong manajemen PT. SPJT agar lebih mandiri, kreatif dan Perseroan terhadap bisnis yang potensial sehingga menghasilkan pendapatan usaha yang optimal dan tercipta efisiensi dalam pengelolaan Perseroan. Dana dapat dialihkan untuk pengembangan bisnis BUMD lain yang lebih potensial. Pengurangan modal disetor ini telah memperhitungkan bahwa Perseroan PT. SPJT masih memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu minimal 20% dari modal disetor.

Bentuk hukum PT SPJT dirubah menjadi perseroda dengan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).

Tidak ada perubahan komposisi modal dalam peralihan PT SPJT menjadi PT SPJT (Perseroda) di tahun anggaran 2023, 2024 dan 2025 tidak dilakukan penyertaan modal, maka posisi modal disetor oleh Pemprov. Jateng s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp375.392.000.000,-.

7. PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)

Pada Tahun Anggaran 2022 telah diberikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp 22.112.500.000,- yang digunakan untuk pembebasan lahan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu SPAM Regional Wosusokas (disetujui dan disahkan dalam RUPS tanggal 31 Desember 2021).

Pada tahun anggaran 2023, 2024 dan 2025 tidak ada penyertaan modal oleh Pemprov. Jateng, maka posisi modal disetor oleh Pemprov. Jateng s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp109.197.500.000,-.

8. PT Kawasan Industri Wijayakusuma

Pada tanggal 12 Maret 2020, PT KIW mengajukan surat nomor: 44/S/KIW/3/2020 perihal Pengajuan Permohonan Penyertaan Modal Negara kepada Wakil Menteri II BUMN untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah. Pada tanggal 06 Juli 2020, Menteri BUMN memberikan surat nomor: S-47/MBU/07/2020 kepada Menteri Keuangan yang berisi



tentang Usulan Penambahan PMN Tunai pada BUMN dari APBN TA 2021 kepada PT KIW (Persero) sebesar Rp 1,5 T untuk Mendukung Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Industri Batang Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 26 Oktober 2020, terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021, erseer dalam UU tersebut, PT KIW menjadi salah satu penerima dana tambahan PMN sebesar Rp977 Milyar.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Ditandatangani Kajian Perseroan penambahan penyertaan modal negara pada Perseroan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Tahun Anggaran 2021 oleh Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media dan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pada tanggal 30 Agustus 2021, Terbit Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT KIW.

Pada tanggal 30 September 2021, dilakukan valuasi saham dengan hasil laporan nomor 01001/2.0041-03/BS/03/0566/1/IX/2021 yang dilaksanakan oleh KJPP Dasa'tat Yudhistira & Rekan. Nilai saham per lembar Rp15.355.450,-. Sehingga menyebabkan perubahan kepemilikan saham, yang mulanya Republik Indonesia 51,09%, Provinsi Jawa Tengah 40,39% dan Kabupaten Cilacap 8,52% menjadi Republik Indonesia 85,87%, Provinsi Jawa Tengah 11,67% dan Kabupaten Cilacap 2,46%.

Pada tanggal 17 Desember 2021, Dilaksanakan RUPS LB PT KIW secara sirkuler untuk memutuskan harga per lembar saham dan Perubahan AD ART. No. S-933/MBU/12/2021, 539/0017754, 538.3/08882/06 tanggal 17 Desember 2021.

Hingga 31 Desember 2025, Pemprov. Jateng belum melakukan penambahan setoran modal, maka posisi modal disetor oleh Pemprov. Jateng s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp10.446.000.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

Rp28.783.275.371.739,16

Aset Tetap sebesar Rp28.783.275.371.739,16 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.620.736.197.275,90 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.162.539.174.463,26 atau 8,12% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Tanah	13.521.196.119.991,00	12.332.651.846.000,00
2 Peralatan dan Mesin	10.147.339.396.635,00	9.528.039.167.257,00
3 Gedung dan Bangunan	10.866.699.827.129,00	9.849.541.705.895,00
4 Jalan,Irigasi, dan Jaringan	13.406.119.577.958,00	12.507.048.034.410,00
5 Aset Tetap Lainnya	1.156.748.182.680,00	1.056.350.270.097,00
6 Konstruksi dalam Pengerjaan	87.272.764.871,00	287.616.819.183,00
7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(20.402.100.497.524,84)	(18.940.511.645.566,10)
Jumlah	28.783.275.371.739,16	26.620.736.197.275,90

Nilai Aset tetap di atas adalah nilai aset tetap setelah dilakukan penyusutan sebesar (Rp20.402.100.497.524,84) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.836.982.692.077,80)	(7.175.487.568.983,53)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.837.792.215.131,30)	(2.651.567.872.774,62)
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(9.723.664.295.695,34)	(9.110.161.814.096,63)
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.661.294.620,40)	(3.294.389.711,32)
Jumlah	(20.402.100.497.524,84)	(18.940.511.645.566,10)



Nilai aset tetap di atas tidak termasuk aset bersejarah yang harus menunggu persetujuan terlebih dahulu dengan Kementerian Kebudayaan. Total aset bersejarah yang sudah selesai proses identifikasi dan pendataan sebesar 13.946 dari target sebesar 60.000. Dari data tersebut masih terdapat 46.054 aset bersejarah yang belum selesai teridentifikasi dan mendapat persetujuan dari Kementerian Kebudayaan. Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal **45.561.247.842.842,00**

Penambahan

Belanja Modal	1.794.198.281.629,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	307.851.217.962,00
Hibah	565.358.321.594,00
Hasil Usaha Mandiri	741.409.901,00
Mutasi Masuk	126.306.526.200,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	709.297.684.968,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	14.871.495.837,00
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	32.500.000,00
Koreksi	1.542.453.360.587,00
Jumlah	5.061.110.798.678,00

Berkurang

Mutasi Keluar	126.306.526.200,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	709.297.684.968,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	238.750.408.441,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	29.400.000,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	36.135.409.929,00
Koreksi Belanja Modal	1.421.315.338,00
Koreksi Belanja Hutang	48.931.020,00
Koreksi Tahun Lalu	324.993.096.360,00
Jumlah	1.436.982.772.256,00

Saldo Akhir **49.185.375.869.264,00**

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2025.
2. Belanja Hutang adalah aset tetap yang diterima dari pengadaan aset tahun 2025 akan tetapi pelunasan pembayannya dilaksanakan tahun depan.
3. Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2025 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
4. Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Hasil Usaha Mandiri adalah aset yang dibeli dari Dana Usaha Mandiri Satuan Pendidikan Khusus Negeri
6. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.



7. Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
8. Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi perpindahan dari Properti Investasi ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
9. Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel adalah aset ekstrakomtabel yang dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang atau aset tetap dikarenakan pemeliharaan sehingga meningkatkan nilai aset.
10. Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

1. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
2. Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
3. Reklasifikasi Kurang Properti Investasi adalah perpindahan dari aset tetap ke Properti Investasi
4. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemda.
5. Koreksi Belanja Modal pengurangan nilai aset tetap dikarenakan perolehannya berasal dari jenis belanja lainnya.
6. Koreksi Belanja Hutang pengurangan nilai aset tetap dikarenakan perolehannya berasal dari tahun sebelumnya dan baru dibayarkan pada tahun selanjutnya.
7. Koreksi Tahun Lalu adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.3.1.3.1 Tanah

Rp13.521.196.119.991,00

Tanah sebesar Rp13.521.196.119.991,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.332.651.846.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.188.544.273.991,00 atau 9,64% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Tanah Persil	6.326.724.040.576,00	6.267.024.067.860,00
2 Tanah Non Persil	1.721.419.048.302,00	1.476.068.419.053,00
3 Lapangan	5.473.053.031.113,00	4.589.559.359.087,00
Jumlah	13.521.196.119.991,00	12.332.651.846.000,00

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal

12.332.651.846.000,00

Penambahan

Belanja Modal	12.264.752.019,00
Hibah	15.943.320.491,00
Mutasi Masuk	95.009.839.913,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	369.690.225.632,00
Koreksi	1.207.752.774.724,00
Jumlah	1.700.660.912.779,00

Berkurang

Mutasi Keluar	95.009.839.913,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	370.228.971.232,00



Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	1.779.900.000,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	29.400.000,00
Koreksi Tahun Lalu	45.068.527.643,00
Jumlah	512.116.638.788,00

Saldo Akhir **13.521.196.119.991,00**

Tanah senilai Rp13.521.196.119.991,00, di dalamnya sudah termasuk koreksi kurang dan koreksi tambah dengan rincian keterangan sebagai berikut :

SKPD	Koreksi Kurang	Koreksi Tambah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koreksi Pencatatan Tanah Kas Desa yang tercatat oleh Sekolah : Rp1.344.819.150,00 Koreksi Pencatatan Tanah Keraton Solo yang tercatat oleh Sekolah : Rp270.000.000,00 Double Catat : Rp6.286.215.121,00 Sewa Beli Sebagian : Rp16.110.400,00	Pencatatan Pecah Sertifikat : Rp5.061.115.097,00 Pencatatan Penggabungan Sertifikat : Rp2.855.500.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Double Catat : Rp272.988.000,00	
Satuan Polisi Pamong Praja		Pencatatan Pecah Sertifikat : Rp3.076.000.000,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Pencatatan Pecah Sertifikat : Rp868.969.788,00
Dinas Pertanian dan Perkebunan	Double Catat : Rp2.058.750.000,00 Hibah Sebagian ke Pemkab Jepara : Rp159.770.287,00 Pengurangan luas dan nilai atas bidang tanah yang terdampak pembangunan jalan Tol: Rp317.250.000,00 Pengurangan luas dan nilai atas bidang tanah yang terdampak pembangunan jalan Tol : Rp5.056.950.000,00	Pencatatan Pecah Sertifikat : Rp9.281.220.287,00
Sekretariat Daerah	Double Catat : Rp1.732.500.000,00	
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Double Catat : Rp13.496.250.000,00 Tanah Waqaf MAJT : Rp506.839.800,00	

Atas tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu tanah Kuwiran, telah terdampak Jalan Tol Solo-Yogyakarta dengan kronologis sebagai berikut :

1. Mendasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 030/59 Tahun 2021 tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Berupa sebagian Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Desa Kuwiran Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali Kepada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Untuk Pembangunan Akses Keluar Masuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta Dengan Cara Ganti Rugi, intinya tanah seluas $\pm 29.771 \text{ m}^2$ di Boyolali



- telah disetujui untuk pembangunan akses keluar masuk Jalan Tol Solo-Yogyakarta dengan cara ganti rugi berupa tanah pengganti senilai Rp55.185.841.250,00;
2. Pengadaan tanah pengganti terdampak jalan tol yang telah direalisasikan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol 1.17, secara bertahap dengan data sebagai berikut:
 - a. Tanah di Desa Ngimbrang dan Desa Kedu Kab. Temanggung seluas 60.946 m² (3 bidang tanah) : Rp24.276.872.000,00;
 - b. Tanah di Desa Ketaon Kab. Boyolali seluas 17.287 m² (14 bidang tanah) : Rp11.873.904.403,00 dan Biaya *Appraisal* Tanah Di Desa Ketaon Kab. Boyolali Rp96.810.000,00;
 - c. Tanah Di Desa Bangak Kab. Boyolali seluas 17.276 m² (9 bidang tanah) : Rp14.626.871.336,00 dan Biaya *Appraisal* Tanah Di Desa Bangak Kab. Boyolali Rp61.830.000,00.
 3. Nilai Tanah pengganti yang sudah diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.50.936.287.469,00, sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah Rp4.249.553.781,00 (Empat miliar dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah), yang penggunaannya untuk pengganti tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang terdampak Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Kabupaten Boyolali.
 4. Bahwa atas pembayaran dimaksud, telah diterbitkan Akta Pelepasan Hak oleh Notaris dan telah ditandatangani oleh Pihak Pemilik Tanah yang sebagai syarat untuk proses balik nama menjadi SHP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan diproses oleh Kementerian PU melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.

5.3.1.3.1.1 Tanah Persil

Rp6.326.724.040.576,00

Tanah Persil sebesar Rp6.326.724.040.576,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.267.024.067.860,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp59.699.972.716,00 atau 0,95% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.951.343.186.644,00	1.906.466.132.064,00
2 Dinas Kesehatan	60.100.940.000,00	60.100.940.000,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	111.661.068.000,00	111.661.068.000,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	104.929.400.000,00	104.730.000.000,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	41.950.458.143,00	41.950.458.143,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	653.830.890.470,00	653.830.890.470,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	90.572.000.000,00	90.572.000.000,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	50.269.000.000,00	50.269.000.000,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	16.167.775.336,00	14.192.500.000,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	144.693.365.304,00	144.121.032.704,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.366.552.025.850,00	1.366.572.425.850,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.513.941.740,00	1.513.941.740,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	3.076.000.000,00	3.076.000.000,00
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
15 Dinas Sosial	146.262.672.440,00	144.843.035.440,00
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	74.891.123.000,00	75.011.123.000,00
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	834.078.750,00	834.078.750,00
18 Dinas Ketahanan Pangan	599.040.000,00	599.040.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.835.730.000,00	13.275.730.000,00
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	7.849.500.000,00	7.849.500.000,00
21 Dinas Perhubungan	88.103.059.505,00	88.196.559.505,00
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	6.977.000.000,00	6.977.000.000,00
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.764.500.000,00	6.764.500.000,00
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	57.524.367.000,00	57.524.367.000,00
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	132.504.482.203,00	115.567.637.203,00
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	238.041.533.504,00	325.576.613.417,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	180.239.255.130,00	178.780.147.130,00
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.773.358.000,00	4.773.358.000,00
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.444.664.587,00	22.444.664.587,00
32 Sekretariat Daerah	159.033.877.490,00	159.033.877.490,00
33 Sekretariat DPRD	18.995.750.000,00	12.678.250.000,00
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	116.085.000.000,00	116.085.000.000,00
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	106.715.362.582,00	108.205.162.582,00
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	89.342.501.985,00	103.373.741.785,00
37 Badan Kepegawaian Daerah	6.427.650.000,00	6.427.650.000,00
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	124.074.000.000,00	124.074.000.000,00
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	90.772.839.913,00	4.100.000.000,00
40 Badan Penghubung	7.015.000.000,00	7.015.000.000,00
41 Inspektorat	-	-
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
Jumlah	6.326.724.040.576,00	6.267.024.067.860,00

5.3.1.3.1.2 Tanah Non Persil

Rp1.721.419.048.302,00

Tanah Non Persil sebesar Rp1.721.419.048.302,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.476.068.419.053,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp245.350.629.249,00 atau 16,62% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.635.554.500,00	37.125.224.197,00
2 Dinas Kesehatan	998.800.000,00	998.800.000,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	509.250.000,00	509.250.000,00
4 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	56.226.820.600,00	56.226.820.600,00
5 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	868.150.662.418,00	650.528.926.168,00
6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00
7 Dinas Sosial	453.000.000,00	453.000.000,00
8 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	246.400.000,00	-
9 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.000.000,00	6.000.000,00
10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.156.815.411,00	11.980.222.167,00
11 Dinas Perhubungan	1.848.750.000,00	1.848.750.000,00
12 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.050.622.500,00	4.050.622.500,00
13 Dinas Kelautan dan Perikanan	59.866.580.297,00	61.155.080.297,00
14 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	22.376.100.000,00	22.376.100.000,00
15 Dinas Pertanian dan Perkebunan	640.715.743.576,00	599.187.674.124,00
16 Sekretariat Daerah	2.569.320.000,00	4.301.820.000,00
17 Sekretariat DPRD	1.288.500.000,00	-
18 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.420.129.000,00	9.420.129.000,00
Jumlah	1.721.419.048.302,00	1.476.068.419.053,00

5.3.1.3.1.3 Lapangan

Rp5.473.053.031.113,00

Tanah Lapangan sebesar Rp5.473.053.031.113,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.589.559.359.087,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp883.493.672.026,00 atau 19,25% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.272.877.331,00	29.672.652.100,00
2 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	3.998.392.532,00	3.998.392.532,00
3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.794.390.581.411,00	1.781.455.928.416,00
4 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	3.510.988.017.527,00	2.628.562.723.727,00
5 Dinas Sosial	1.066.019.500,00	1.066.019.500,00
6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.620.066.304,00	29.180.066.304,00
7 Dinas Perhubungan	104.196.424.008,00	104.102.924.008,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
8 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	11.299.344.000,00	11.299.344.000,00
9 Dinas Kelautan dan Perikanan	7.500.000,00	7.500.000,00
10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	213.808.500,00	213.808.500,00
Jumlah	5.473.053.031.113,00	4.589.559.359.087,00

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Rp10.147.339.396.635,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.147.339.396.635,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.528.039.167.257,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp619.300.229.378,00 atau 6,50% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Alat Besar	351.181.678.257,00	348.940.995.677,00
2 Alat Angkutan	791.415.386.656,00	713.838.056.417,00
3 Alat Bengkel dan Alat Ukur	423.541.230.118,00	411.910.130.760,00
4 Alat Pertanian	76.395.039.636,00	76.049.332.741,00
5 Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.296.531.663.988,00	2.204.347.125.605,00
6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	342.812.953.476,00	316.516.398.408,00
7 Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.849.833.025.824,00	2.636.823.706.032,00
8 Alat Laboratorium	836.681.383.137,00	787.044.524.650,00
9 Alat Persenjaan	7.060.860.787,00	6.821.949.562,00
10 Komputer	1.858.339.581.639,00	1.728.176.960.196,00
11 Alat Eksplorasi	472.508.022,00	465.328.022,00
12 Alat Pengeboran	217.320.298,00	163.699.298,00
13 Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.016.096.250,00	991.096.250,00
14 Alat Bantu Eksplorasi	21.180.000,00	21.180.000,00
15 Alat Keselamatan Kerja	8.655.120.253,00	7.788.907.858,00
16 Alat Peraga	200.678.533.384,00	190.513.544.558,00
17 Peralatan Proses/Produksi	5.950.591.334,00	5.674.378.534,00
18 Rambu-rambu	34.002.177.768,00	31.105.185.581,00
19 Peralatan Olahraga	62.533.065.808,00	60.846.667.108,00
Jumlah	10.147.339.396.635,00	9.528.039.167.257,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	9.528.039.167.257,00
Penambahan	
Belanja Modal	650.160.113.509,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	5.690.848.865,00
Hibah	41.883.519.698,00
Hasil Usaha Mandiri	741.409.901,00
Mutasi Masuk	10.639.534.656,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	18.183.138.491,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	1.504.349.737,00
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	14.793.913.117,00
Jumlah	743.596.827.974,00
Berkurang	
Mutasi Keluar	10.639.534.656,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	17.843.602.491,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	82.133.876.697,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-



Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	6.721.694.474,00
Koreksi Belanja Modal	32.634.000,00
Koreksi Belanja Hutang	48.931.020,00
Koreksi Tahun Lalu	6.876.325.258,00
Jumlah	124.296.598.596,00

Saldo Akhir **10.147.339.396.635,00**

Penambahan Peralatan dan Mesin yang bersumber dari belanja modal senilai Rp650.160.113.509,00, termasuk penambahan yang berasal dari Belanja Modal Non Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	Nilai Perolehan Aset Tetap	Belanja Modal pada LRA	Pencacatan pada Neraca
1.	RSUD Dr Moewardi Surakarta	Rp34.809.600,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin
		Rp5.419.475.595,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Peralatan dan Mesin
2.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Rp1.823.056.525,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin
		Rp3.727.690.531,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin
3.	Dinas Perhubungan	Rp75.592.380,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin
4.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Rp2.326.649.580,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin
5.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp198.787.800,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp943.500,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin
7.	Dinas Kesehatan	Rp142.000.000,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Peralatan dan Mesin
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp9.980.000,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin
	TOTAL	Rp13.758.985.511,00		

Saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2025 senilai Rp10.146.710.746.635,00 tidak termasuk 662 unit *Smart TV*, 652 unit *Laptop*, dan 600 unit *Hardisk* yang merupakan bantuan Pemerintah Pusat kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang belum dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran Bantuan Pemerintah tanpa BAST.

5.3.1.3.2.1 Alat Besar

Rp351.181.678.257,00

Alat Besar sebesar Rp351.181.678.257,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp348.940.995.677,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.240.682.580,00 atau 0,64% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.866.567.656,00	24.031.267.856,00
2 Dinas Kesehatan	5.109.477.825,00	5.019.577.825,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	19.183.808.570,00	18.999.051.070,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	21.208.346.104,00	21.208.346.104,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	15.999.450.466,00	15.999.450.466,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	3.358.243.889,00	3.358.243.889,00
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	6.682.524.900,00	6.682.524.900,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	5.165.770.861,00	5.355.770.861,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.641.566.715,00	1.641.566.715,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	119.622.126.718,00	120.989.176.718,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	36.827.944.955,00	31.582.971.615,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	575.080.900,00	575.080.900,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.201.797.550,00	7.575.199.050,00
15	Dinas Sosial	1.932.287.298,00	1.601.687.298,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	305.786.400,00	305.786.400,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	622.400.000,00	622.400.000,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	489.597.500,00	488.497.500,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	486.420.768,00	486.420.768,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	1.458.167.018,00	1.458.167.018,00
21	Dinas Perhubungan	1.922.986.500,00	1.967.974.500,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.458.677.900,00	3.611.911.900,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.355.770.000,00	1.355.770.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	621.842.250,00	621.842.250,00
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.905.318.819,00	2.905.318.819,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.793.220.260,00	4.793.220.260,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.494.247.000,00	2.543.991.000,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	661.974.100,00	661.974.100,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	8.099.533.734,00	8.066.033.734,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.909.716.500,00	2.909.716.500,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.549.963.135,00	6.511.813.135,00
32	Sekretariat Daerah	12.530.872.816,00	12.866.827.816,00
33	Sekretariat DPRD	4.738.116.720,00	4.561.572.720,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.976.297.500,00	2.922.428.500,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.491.969.184,00	15.751.428.018,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.899.016.860,00	2.899.016.860,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	1.505.960.000,00	1.505.960.000,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.758.286.486,00	2.682.706.986,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	497.780.000,00	497.780.000,00
40	Badan Penghubung	430.760.400,00	430.760.400,00
41	Inspektorat	201.852.000,00	201.852.000,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	640.150.000,00	689.909.226,00
	Jumlah	351.181.678.257,00	348.940.995.677,00

5.3.1.3.2.2 Alat Angkutan

Rp791.415.386.656,00

Alat Angkutan sebesar Rp791.415.386.656,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp713.838.056.417,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp77.577.330.239,00 atau 10,87% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	160.812.003.310,00	157.868.020.144,00
2	Dinas Kesehatan	36.703.079.367,00	32.434.889.918,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	16.531.791.541,00	11.536.743.191,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	14.484.971.662,00	12.868.590.363,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	7.373.890.990,00	6.973.990.990,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	9.160.316.344,00	7.557.057.344,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	8.464.702.660,00	6.012.757.660,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	8.312.348.173,00	7.450.890.470,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	6.832.341.442,00	5.602.981.742,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	29.390.729.161,00	29.390.729.161,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	28.986.753.819,00	22.607.374.440,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.042.985.783,00	4.042.985.783,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	5.476.956.752,00	4.917.056.752,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.581.452.065,00	23.085.106.395,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
15 Dinas Sosial	19.935.347.409,00	18.702.644.199,00
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.054.846.719,00	10.522.333.469,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.422.237.245,00	2.437.237.245,00
18 Dinas Ketahanan Pangan	4.351.957.514,00	3.682.307.514,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.355.038.535,00	19.109.152.323,00
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	3.840.926.723,00	3.366.748.909,00
21 Dinas Perhubungan	30.586.003.326,00	28.507.853.326,00
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	7.878.739.373,00	8.429.296.173,00
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.198.439.126,00	3.198.439.126,00
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.052.121.061,00	3.052.121.061,00
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.901.338.082,00	5.122.638.082,00
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.723.636.345,00	5.723.636.345,00
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	20.814.530.358,00	20.159.038.318,00
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.655.014.643,00	6.655.014.643,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	19.827.240.954,00	17.529.390.951,00
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.983.445.778,00	9.799.045.778,00
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.932.069.245,00	6.932.069.245,00
32 Sekretariat Daerah	91.712.474.795,00	75.617.941.218,00
33 Sekretariat DPRD	43.597.080.233,00	27.366.296.513,00
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.672.561.737,00	5.672.561.737,00
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	52.317.686.373,00	48.199.841.942,00
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.819.535.023,00	19.136.174.957,00
37 Badan Kepegawaian Daerah	4.749.310.721,00	3.935.704.721,00
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.001.829.838,00	3.936.829.838,00
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.647.105.256,00	2.647.105.256,00
40 Badan Penghubung	16.493.875.484,00	13.310.787.484,00
41 Inspektorat	5.652.013.291,00	5.652.013.291,00
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
Jumlah	791.415.386.656,00	713.838.056.417,00

5.3.1.3.2.3 Alat Bengkel dan Ukur

Rp423.541.230.118,00

Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp423.541.230.118,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp411.910.130.760,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp11.631.099.358,00 atau 2,82% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	366.444.866.149,00	357.122.522.939,00
2 Dinas Kesehatan	4.344.138.433,00	3.021.535.934,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.715.548.338,00	1.715.005.638,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	4.671.351.192,00	4.081.951.191,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	698.034.069,00	680.226.269,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	613.544.725,00	613.544.725,00
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	51.018.592,00	50.130.592,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	848.958.990,00	832.583.990,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	844.529.275,00	832.929.275,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.134.397.677,00	1.134.397.677,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	3.034.167.002,00	2.484.667.002,00
12 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.187.735.275,00	1.187.735.275,00
13 Dinas Sosial	205.706.450,00	203.406.450,00
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.118.328.704,00	4.087.266.304,00
15 Dinas Ketahanan Pangan	189.088.000,00	229.288.000,00
16 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.548.651.234,00	2.548.651.234,00
17 Dinas Perhubungan	1.602.016.200,00	1.588.566.200,00
18 Dinas Komunikasi dan Informatika	57.044.700,00	57.044.700,00
19 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	83.582.005,00	83.582.005,00
20 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	191.256.100,00	80.800.000,00
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.053.754.956,00	2.053.754.956,00
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	921.904.195,00	872.904.195,00
23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	969.904.956,00	895.004.956,00
24 Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.180.937.900,00	3.180.937.900,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.607.500.590,00	7.607.500.590,00
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.799.918.311,00	13.954.136.663,00
27 Sekretariat Daerah	184.476.000,00	134.876.000,00
28 Sekretariat DPRD	2.740.000,00	-
29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.951.600,00	3.951.600,00
30 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	133.850.000,00	474.850.000,00
31 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.328.500,00	15.328.500,00
32 Badan Penghubung	11.600.000,00	9.650.000,00
33 Inspektorat	71.400.000,00	71.400.000,00
Jumlah	423.541.230.118,00	411.910.130.760,00

5.3.1.3.2.4 Alat Pertanian

Rp76.395.039.636,00

Alat Pertanian sebesar Rp76.395.039.636,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp76.049.332.741,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp345.706.895,00 atau 0,45% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.959.970.551,00	18.549.580.858,00
2 Dinas Kesehatan	11.600.000,00	11.600.000,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	-
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	43.982.500,00	43.982.500,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	384.992.795,00	384.992.795,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	126.640.630,00	126.640.630,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	14.996.100,00	14.996.100,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	11.317.500,00	11.317.500,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	7.330.060,00	7.330.060,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	31.200.000,00	12.000.000,00
11 Dinas Sosial	27.935.000,00	27.935.000,00
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.235.689.925,00	2.235.689.925,00
13 Dinas Ketahanan Pangan	1.091.459.070,00	1.592.744.070,00
14 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	566.817.500,00	566.817.500,00
15 Dinas Komunikasi dan Informatika	999.000,00	999.000,00
16 Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	103.696.200,00	-
17 Dinas Kelautan dan Perikanan	856.502.460,00	856.502.460,00
18 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.681.535.943,00	8.986.635.943,00
19 Dinas Pertanian dan Perkebunan	43.181.174.402,00	42.564.018.400,00
20 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.900.000,00	-
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38.500.000,00	39.750.000,00
22 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.800.000,00	15.800.000,00
Jumlah	76.395.039.636,00	76.049.332.741,00

5.3.1.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp2.296.531.663.988,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.296.531.663.988,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.204.347.125.605,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp92.184.538.383,00 atau 4,18% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.373.323.843.080,00	1.301.287.896.469,00
2 Dinas Kesehatan	44.637.885.197,00	43.959.546.060,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	70.474.028.793,00	66.872.460.843,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	89.524.051.864,00	84.000.738.869,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	48.147.244.677,00	48.793.879.702,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	21.035.756.274,00	20.506.846.124,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	19.732.203.164,00	18.189.938.743,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	37.304.708.696,00	36.703.617.995,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	16.844.387.568,00	15.620.488.623,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	18.981.374.613,00	13.609.853.462,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	11.145.106.473,00	10.636.006.473,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.396.028.520,00	3.261.328.520,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	2.687.734.774,00	2.583.484.774,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.173.013.420,00	8.887.403.239,00
15	Dinas Sosial	29.682.042.496,00	23.833.154.517,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.098.489.057,00	16.494.344.807,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.708.722.309,00	2.687.925.675,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	3.985.870.755,00	3.902.203.355,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.221.756.394,00	12.145.756.394,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	5.478.688.857,00	5.256.073.857,00
21	Dinas Perhubungan	8.820.391.223,00	8.295.833.944,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.135.663.329,00	11.605.530.329,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.694.573.257,00	10.636.223.257,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.845.657.409,00	2.666.307.409,00
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	59.329.201.240,00	85.754.657.110,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.264.062.258,00	13.836.690.408,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.981.912.045,00	9.230.605.146,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.213.900.362,00	9.162.473.362,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	19.233.141.879,00	17.715.341.216,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	15.237.342.447,00	15.120.365.045,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.657.276.026,00	20.305.261.066,00
32	Sekretariat Daerah	53.076.394.656,00	48.496.676.716,00
33	Sekretariat DPRD	61.296.212.530,00	59.142.087.968,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.433.501.958,00	7.112.951.958,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	67.008.628.807,00	67.177.129.557,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.704.760.850,00	29.719.280.850,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	7.759.238.271,00	7.571.528.271,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	25.481.907.470,00	22.891.010.665,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.378.872.000,00	2.378.872.000,00
40	Badan Penghubung	6.153.836.283,00	5.976.831.564,00
41	Inspektorat	6.394.035.508,00	6.536.132.764,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.848.217.199,00	3.782.386.499,00
Jumlah		2.296.531.663.988,00	2.204.347.125.605,00

5.3.1.3.2.6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Rp342.812.953.476,00

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp342.812.953.476,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp316.516.398.408,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp26.296.555.068,00 atau 8,31% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	185.680.106.842,00	173.759.438.859,00
2	Dinas Kesehatan	6.392.893.651,00	6.422.368.613,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	5.105.216.023,00	4.957.930.523,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	8.205.052.616,00	8.196.290.736,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	4.582.324.186,00	4.563.138.686,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.632.652.239,00	1.632.652.239,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.003.023.946,00	817.445.446,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	1.604.579.909,00	1.597.984.909,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	741.099.353,00	754.694.353,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	7.729.868.840,00	7.208.532.410,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.970.073.793,00	1.970.073.793,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.060.974.537,00	1.060.974.537,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.055.394.000,00	663.265.000,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.325.544.999,00	2.325.544.999,00
15	Dinas Sosial	596.716.000,00	582.376.000,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.272.278.111,00	2.195.598.111,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	232.494.850,00	232.494.850,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	1.170.579.038,00	547.419.038,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.706.043.530,00	2.634.443.530,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	1.759.146.883,00	1.759.146.883,00
21	Dinas Perhubungan	1.700.782.197,00	1.671.830.873,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.437.033.894,00	13.098.151.934,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.596.584.028,00	1.596.584.028,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	675.393.383,00	675.393.383,00
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.888.797.916,00	5.990.732.766,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.626.627.090,00	4.524.881.090,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.528.473.964,00	1.525.448.964,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	976.798.100,00	973.178.100,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	4.520.419.900,00	4.215.655.900,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.329.152.386,00	4.348.069.302,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.674.978.928,00	2.647.181.928,00
32	Sekretariat Daerah	30.834.759.672,00	27.877.818.774,00
33	Sekretariat DPRD	5.182.141.096,00	5.074.345.402,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.070.434.856,00	1.060.434.856,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.747.036.938,00	5.783.961.387,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.510.667.075,00	3.167.593.374,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	353.357.219,00	353.357.219,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.419.121.997,00	4.209.355.291,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	446.543.500,00	446.543.500,00
40	Badan Penghubung	2.162.526.657,00	1.675.327.657,00
41	Inspektorat	1.575.058.334,00	1.019.738.165,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	730.201.000,00	699.001.000,00
	Jumlah	342.812.953.476,00	316.516.398.408,00

5.3.1.3.2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan

Rp2.849.833.025.824,00

Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp2.849.833.025.824,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.636.823.706.032,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp213.009.319.792,00 atau 8,08% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.985.034.237,00	12.156.887.513,00
2 Dinas Kesehatan	110.744.114.392,00	104.803.041.213,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.101.329.065.406,00	1.024.799.808.175,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	792.578.878.252,00	734.286.032.530,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	380.738.623.206,00	379.792.173.918,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	176.151.151.841,00	149.710.909.042,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	105.313.644.369,00	86.088.314.366,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	78.293.557.086,00	62.345.943.426,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	87.684.411.842,00	79.195.572.706,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	14.374.082,00	4.351.032,00
11 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.779.600,00	190.779.600,00
12 Dinas Sosial	952.633.275,00	621.124.275,00
13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	265.268.685,00	263.868.685,00
14 Dinas Perhubungan	8.150.000,00	8.150.000,00
15 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.960.000,00	9.960.000,00
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.875.000,00	3.875.000,00
17 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	20.100.000,00	20.100.000,00
18 Dinas Kelautan dan Perikanan	8.277.500,00	8.277.500,00
19 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.373.709.800,00	1.339.509.800,00
20 Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.100.000,00	7.100.000,00
21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.500.000,00	2.500.000,00
22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	109.729.636,00	109.729.636,00
23 Sekretariat Daerah	204.665.000,00	204.665.000,00
24 Sekretariat DPRD	243.215.000,00	243.215.000,00
25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.275.000,00	3.275.000,00
26 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	135.475.000,00	138.165.000,00
27 Badan Kepegawaian Daerah	216.001.615,00	216.001.615,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
28 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	244.656.000,00	249.576.000,00
29 Badan Riset dan Inovasi Daerah	800.000,00	800.000,00
Jumlah	2.849.833.025.824,00	2.636.823.706.032,00

5.3.1.3.2.8 Alat Laboratorium

Rp836.681.383.137,00

Alat Laboratorium sebesar Rp836.681.383.137,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp787.044.524.650,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp49.636.858.487,00 atau 6,31% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	478.509.522.465,00	445.861.763.603,00
2 Dinas Kesehatan	54.964.639.936,00	52.251.848.183,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	73.972.685.711,00	70.515.573.709,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	78.828.992.131,00	66.731.271.858,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	22.519.720.430,00	22.519.720.430,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	2.731.899.728,00	2.631.440.578,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.910.072.827,00	2.910.072.827,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	2.203.079.252,00	2.203.079.252,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	3.399.968.251,00	3.385.395.251,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.407.025.114,00	9.571.469.114,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	4.038.098.289,00	3.699.598.289,00
12 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115.090.700,00	115.090.700,00
13 Dinas Sosial	60.430.100,00	46.630.100,00
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.478.296.710,00	8.449.896.710,00
15 Dinas Ketahanan Pangan	6.091.876.339,00	6.728.918.672,00
16 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.693.115.451,00	12.561.449.951,00
17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	44.715.000,00	44.715.000,00
18 Dinas Komunikasi dan Informatika	3.996.000,00	3.996.000,00
19 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41.857.050,00	41.857.050,00
20 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	203.850.000,00	203.850.000,00
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	78.430.000,00	78.430.000,00
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	6.604.058.355,00	6.521.976.455,00
23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	18.188.605.240,00	19.544.082.860,00
24 Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.310.773.145,00	12.262.773.145,00
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.124.037.122,00	9.124.037.122,00
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.404.085.741,00	28.289.785.741,00
27 Sekretariat DPRD	9.950.000,00	9.950.000,00
28 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	13.785.000,00	7.125.000,00
29 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	606.705.050,00	606.705.050,00
30 Inspektorat	122.022.000,00	122.022.000,00
Jumlah	836.681.383.137,00	787.044.524.650,00

5.3.1.3.2.9 Alat Persenjataan

Rp7.060.860.787,00

Alat Persenjataan sebesar Rp7.060.860.787,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.821.949.562,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp238.911.225,00 atau 3,50% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.878.113.849,00	3.710.201.349,00
2 RSUD dr. Rehatta Jepara	187.829.055,00	187.829.055,00
3 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.953.500,00	5.953.500,00
4 Satuan Polisi Pamong Praja	179.710.000,00	179.710.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
5 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.659.729.175,00	1.659.729.175,00
6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	9.812.400,00
7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	138.450.000,00	138.450.000,00
8 Dinas Perhubungan	-	3.254.725,00
9 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	84.065.850,00	-
10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	187.600.000,00	187.600.000,00
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	42.000.000,00	42.000.000,00
12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.882.000,00	19.882.000,00
13 Sekretariat Daerah	94.300.000,00	94.300.000,00
14 Sekretariat DPRD	-	-
15 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.650.000,00	23.650.000,00
16 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	551.077.358,00	551.077.358,00
17 Inspektorat	8.500.000,00	8.500.000,00
Jumlah	7.060.860.787,00	6.821.949.562,00

5.3.1.3.2.10 Komputer

Rp1.858.339.581.639,00

Komputer sebesar Rp1.858.339.581.639,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.728.176.960.196,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp130.162.621.443,00 atau 7,53% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.344.869.510.403,00	1.253.413.097.888,00
2 Dinas Kesehatan	16.001.883.114,00	15.951.405.142,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	39.648.396.060,00	37.164.338.062,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	49.823.823.846,00	49.758.705.046,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	19.801.977.714,00	18.498.987.714,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	4.309.075.717,00	3.538.305.577,00
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	4.197.867.614,00	4.263.230.543,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	6.281.175.141,00	5.998.155.141,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	4.765.748.091,00	4.625.370.541,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.440.901.536,00	7.910.292.388,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	7.985.061.219,00	7.684.361.219,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.117.217.580,00	2.032.717.580,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	2.063.332.220,00	1.940.436.470,00
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.479.869.784,00	2.373.869.784,00
15 Dinas Sosial	7.592.240.025,00	6.442.444.225,00
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.769.858.739,00	8.379.307.160,00
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.068.056.865,00	1.185.734.533,00
18 Dinas Ketahanan Pangan	2.398.444.915,00	2.569.344.915,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.608.411.326,00	6.568.411.326,00
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	3.303.959.077,00	3.149.999.077,00
21 Dinas Perhubungan	3.367.917.398,00	4.595.028.222,00
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	124.011.705.500,00	106.521.800.399,00
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.821.464.386,00	2.806.464.386,00
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.778.847.823,00	3.623.097.823,00
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.786.398.990,00	4.786.398.990,00
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.763.913.519,00	5.664.099.519,00
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	3.700.226.773,00	3.517.087.461,00
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.776.032.143,00	3.614.129.143,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	6.243.045.254,00	5.969.895.246,00
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.957.522.413,00	7.960.928.742,00
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.450.713.388,00	7.088.324.752,00
32 Sekretariat Daerah	23.848.875.843,00	20.126.512.108,00
33 Sekretariat DPRD	14.469.740.499,00	13.709.102.999,00



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.275.700.881,00	6.389.920.681,00
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	64.303.487.431,00	59.041.929.876,00
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.042.782.217,00	8.523.823.517,00
37 Badan Kepegawaian Daerah	7.408.753.125,00	7.258.753.125,00
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.251.463.276,00	6.341.358.082,00
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.825.852.600,00	1.676.752.600,00
40 Badan Penghubung	1.221.665.652,00	1.212.065.652,00
41 Inspektorat	2.537.284.418,00	2.439.842.418,00
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.969.377.124,00	1.861.130.124,00
Jumlah	1.858.339.581.639,00	1.728.176.960.196,00

5.3.1.3.2.11 Alat Eksplorasi **Rp472.508.022,00**

Alat Eksplorasi sebesar Rp472.508.022,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp465.328.022,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.180.000,00 atau 1,54% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	450.338.022,00	443.158.022,00
2 Dinas Kesehatan	1.800.000,00	1.800.000,00
3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20.370.000,00	20.370.000,00
Jumlah	472.508.022,00	465.328.022,00

5.3.1.3.2.12 Alat Pengeboran **Rp217.320.298,00**

Alat Pengeboran sebesar Rp217.320.298,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp163.699.298,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp53.621.000,00 atau 32,76% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	217.320.298,00	163.699.298,00
Jumlah	217.320.298,00	163.699.298,00

5.3.1.3.2.13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian **Rp1.016.096.250,00**

Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp1.016.096.250,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp991.096.250,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp25.000.000,00 atau 2,52% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	937.723.050,00	912.723.050,00
2 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	78.373.200,00	78.373.200,00
Jumlah	1.016.096.250,00	991.096.250,00

5.3.1.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi **Rp21.180.000,00**

Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp21.180.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	21.180.000,00	21.180.000,00
Jumlah	21.180.000,00	21.180.000,00



5.3.1.3.2.15 Alat Keselamatan Kerja

Rp8.655.120.253,00

Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp8.655.120.253,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.788.907.858,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp866.212.395,00 atau 11,12% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.012.910.162,00	6.179.378.167,00
2 Dinas Kesehatan	183.305.400,00	153.375.000,00
3 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	51.326.000,00	51.326.000,00
4 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	73.800.000,00	73.800.000,00
5 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	526.500.000,00	526.500.000,00
6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	63.033.200,00	63.033.200,00
7 Dinas Ketahanan Pangan	16.790.000,00	15.740.000,00
8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.890.000,00	28.890.000,00
9 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	390.665.891,00	390.665.891,00
10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	34.875.000,00	34.875.000,00
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	197.324.600,00	197.324.600,00
12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.700.000,00	-
13 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00
14 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	54.000.000,00	54.000.000,00
Jumlah	8.655.120.253,00	7.788.907.858,00

5.3.1.3.2.16 Alat Peraga

Rp200.678.533.384,00

Alat Peraga sebesar Rp200.678.533.384,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp190.513.544.558,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.164.988.826,00 atau 5,34% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	197.094.937.069,00	187.917.956.244,00
2 Dinas Kesehatan	59.534.300,00	59.534.300,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.335.877.692,00	1.335.877.692,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	1.372.883.883,00	390.625.882,00
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	12.150.000,00	12.150.000,00
6 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	26.664.000,00	26.664.000,00
7 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	41.200.000,00	41.200.000,00
8 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	99.825.000,00	99.825.000,00
9 Dinas Sosial	112.890.000,00	112.890.000,00
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	522.571.440,00	516.821.440,00
Jumlah	200.678.533.384,00	190.513.544.558,00

5.3.1.3.2.17 Peralatan Proses/Produksi

Rp5.950.591.334,00

Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp5.950.591.334,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.674.378.534,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp276.212.800,00 atau 4,87% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.020.139.534,00	3.823.567.534,00
2 Dinas Kesehatan	22.500.000,00	22.500.000,00
3 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	95.000.000,00	95.000.000,00
4 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	67.314.000,00	67.314.000,00
5 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	690.000,00	-
6 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	93.000.000,00	93.000.000,00
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.327.696.000,00	1.327.696.000,00
8 Dinas Perhubungan	74.958.000,00	-
9 Dinas Kelautan dan Perikanan	27.795.800,00	23.803.000,00
10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	50.948.000,00	50.948.000,00
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	135.550.000,00	135.550.000,00
12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.000.000,00	35.000.000,00
Jumlah	5.950.591.334,00	5.674.378.534,00



5.3.1.3.2.18 Rambu-Rambu

Rp34.002.177.768,00

Rambu-Rambu sebesar Rp34.002.177.768,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp31.105.185.581,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.896.992.187,00 atau 9,31% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	275.373.290,00	264.910.790,00
2 RSUD dr. Rehatta Jepara	20.682.300,00	20.682.300,00
3 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	9.500.000,00	9.500.000,00
4 Dinas Perhubungan	33.269.303.043,00	30.502.773.356,00
5 Dinas Komunikasi dan Informatika	65.537.000,00	65.537.000,00
6 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	179.314.135,00	179.314.135,00
7 Dinas Kelautan dan Perikanan	11.000.000,00	11.000.000,00
8 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.708.000,00	6.708.000,00
9 Sekretariat DPRD	9.450.000,00	9.450.000,00
10 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	120.000.000,00	-
11 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	35.310.000,00	35.310.000,00
Jumlah	34.002.177.768,00	31.105.185.581,00

5.3.1.3.2.19 Peralatan Olahraga

Rp62.533.065.808,00

Peralatan Olahraga sebesar Rp62.533.065.808,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp60.846.667.108,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.686.398.700,00 atau 2,77% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.941.173.706,00	17.622.991.806,00
2 Dinas Kesehatan	90.239.200,00	90.239.200,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	49.004.000,00	25.800.000,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	20.079.600,00	20.079.600,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	21.475.000,00	21.475.000,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	232.223.649,00	232.223.649,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	86.900.000,00	86.900.000,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	47.575.000,00	47.575.000,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	28.600.000,00	29.975.000,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.000.000,00	2.000.000,00
11 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.100.000,00	10.100.000,00
12 Satuan Polisi Pamong Praja	27.550.000,00	27.550.000,00
13 Dinas Sosial	61.695.000,00	61.695.000,00
14 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.000.000,00	5.000.000,00
15 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	126.625.000,00	126.625.000,00
16 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	40.428.681.783,00	40.390.181.783,00
17 Dinas Kelautan dan Perikanan	399.271.800,00	200.484.000,00
18 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23.750.000,00	23.750.000,00
19 Dinas Pertanian dan Perkebunan	25.263.350,00	25.263.350,00
20 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	80.160.000,00	80.160.000,00
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.906.250,00	200.906.250,00
22 Sekretariat Daerah	437.653.000,00	328.553.000,00
23 Sekretariat DPRD	11.000.000,00	11.000.000,00
24 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	694.752.000,00	694.752.000,00
25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.985.000,00	13.985.000,00
26 Badan Kepegawaian Daerah	170.542.750,00	170.542.750,00
27 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	273.959.720,00	273.959.720,00
28 Badan Penghubung	22.900.000,00	22.900.000,00
Jumlah	62.533.065.808,00	60.846.667.108,00

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Rp10.866.699.827.129,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.866.699.827.129,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.849.541.705.895,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.017.158.121.234,00 atau 10,33% dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Bangunan Gedung	10.673.340.045.446,00	9.665.496.855.408,00
2 Monumen	30.939.924.649,00	29.550.739.782,00
3 Bangunan Menara	3.036.143.895,00	3.036.143.895,00
4 Tugu Titik Kontrol/Pasti	159.383.713.139,00	151.457.966.810,00
Jumlah	10.866.699.827.129,00	9.849.541.705.895,00

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal **9.849.541.705.895,00**

Penambahan

Belanja Modal	120.057.693.327,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	300.855.603.282,00
Hibah	308.552.938.721,00
Hasil Usaha Mandiri	-
Mutasi Masuk	20.657.151.631,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	321.181.731.145,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	1.101.572.251,00
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	32.500.000,00
Koreksi	218.873.857.421,00
Jumlah	1.291.313.047.778,00

Berkurang

Mutasi Keluar	20.657.151.631,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	16.648.386.632,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	6.653.995.289,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	28.588.430.255,00
Koreksi Belanja Modal	25.402.084,00
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	201.581.560.653,00
Jumlah	274.154.926.544,00

Saldo Akhir **10.866.699.827.129,00**

Penambahan Gedung dan Bangunan yang bersumber dari belanja modal senilai Rp120.057.693.327,00, termasuk penambahan yang berasal dari Belanja Modal Non Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	Nilai Perolehan Aset Tetap	Belanja Modal pada LRA	Pencatatan pada Neraca
1.	RSUD dr. Rehatta Jepara	Rp3.202.350,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan
2.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Rp136.405.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan
3.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Rp69.552.600,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-*NERACA*
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

No.	SKPD	Nilai Perolehan Aset Tetap	Belanja Modal pada LRA	Pencatatan pada Neraca
4.	RSUD Dr Moewardi Surakarta	Rp835.919.799,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan
5.	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Rp98.187.000,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan
6.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Rp3.238.130.000,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan
		Rp3.892.830.552,00	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Gedung dan Bangunan
7.	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Rp139.734.000,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp149.665.142,00	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Gedung dan Bangunan
	TOTAL	Rp8.563.626.443,00		

5.3.1.3.3.1 Bangunan Gedung

Rp10.673.340.045.446,00

Bangunan Gedung sebesar Rp10.673.340.045.446,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.665.496.855.408,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.007.843.190.038,00 atau 10,43% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.646.281.393.124,00	5.069.767.168.151,00
2 Dinas Kesehatan	152.522.802.157,00	152.323.184.847,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	803.138.232.682,00	572.769.544.782,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	369.916.882.967,00	369.681.090.967,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	172.238.152.104,00	168.294.042.604,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	135.895.873.057,00	87.286.472.035,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	102.150.863.788,00	102.123.863.788,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	110.967.159.684,00	110.059.159.684,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	74.369.497.600,00	71.442.953.650,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	211.761.719.444,00	184.837.059.107,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	27.663.266.972,00	23.986.808.972,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.620.119.060,00	10.620.119.060,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	19.720.844.109,00	19.455.336.327,00
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.446.194.642,00	9.085.312.742,00
15 Dinas Sosial	202.915.433.829,00	183.378.360.857,00
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	57.897.032.408,00	57.470.832.811,00
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.235.424.715,00	20.235.424.715,00
18 Dinas Ketahanan Pangan	16.399.926.750,00	17.146.497.586,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	81.828.399.898,00	81.162.088.398,00
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	10.683.134.037,00	10.683.134.037,00
21 Dinas Perhubungan	153.654.887.338,00	136.037.247.668,00
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	18.460.190.806,00	18.460.190.806,00
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	27.620.607.063,00	27.159.422.183,00
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.536.050.985,00	7.491.574.985,00
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	766.273.575.910,00	760.610.780.110,00
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	28.637.001.408,00	28.340.680.998,00
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	127.892.480.994,00	121.774.468.302,00
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	112.798.464.253,00	85.936.095.615,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	168.380.411.511,00	165.610.429.532,00
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	69.129.739.022,00	40.994.740.756,00
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	91.616.687.169,00	91.140.474.756,00
32 Sekretariat Daerah	99.695.837.654,00	97.554.519.179,00
33 Sekretariat DPRD	139.286.482.282,00	135.643.359.413,00
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.686.290.124,00	14.488.632.124,00
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	239.398.540.029,00	241.325.445.029,00
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	262.184.104.073,00	263.113.986.073,00
37 Badan Kepegawaian Daerah	8.943.257.902,00	8.844.922.902,00
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	58.310.866.547,00	57.531.473.483,00
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	6.824.639.800,00	6.824.639.800,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
40 Badan Penghubung	15.013.884.014,00	14.860.161.039,00
41 Inspektorat	13.524.113.450,00	13.125.575.450,00
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.819.580.085,00	6.819.580.085,00
Jumlah	10.673.340.045.446,00	9.665.496.855.408,00

5.3.1.3.3.2 Monumen

Rp30.939.924.649,00

Monumen sebesar Rp30.939.924.649,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.550.739.782,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.389.184.867,00 atau 4,70% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.651.686.262,00	12.282.501.706,00
2 Dinas Kesehatan	144.162.000,00	144.162.000,00
3 RSUD dr. Rehatta Jepara	223.611.000,00	223.611.000,00
4 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	814.052.600,00	814.052.600,00
5 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.500.000,00	1.500.000,00
6 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	286.009.000,00	286.009.000,00
7 Dinas Sosial	52.619.311,00	32.619.000,00
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	106.992.570,00	106.992.570,00
9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	322.003.450,00	322.003.450,00
10 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.653.127.820,00	3.653.127.820,00
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.800.000,00	7.800.000,00
12 Sekretariat DPRD	8.773.667.996,00	8.773.667.996,00
13 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	846.935.000,00	846.935.000,00
14 Badan Penghubung	2.055.757.640,00	2.055.757.640,00
Jumlah	30.939.924.649,00	29.550.739.782,00

5.3.1.3.3.3 Bangunan Menara

Rp3.036.143.895,00

Bangunan Menara sebesar Rp3.036.143.895,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.036.143.895,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	917.962.130,00	917.962.130,00
2 Dinas Perhubungan	386.581.815,00	386.581.815,00
3 Dinas Kelautan dan Perikanan	210.185.093,00	210.185.093,00
4 Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.485.744.857,00	1.485.744.857,00
5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	34.500.000,00	34.500.000,00
6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.170.000,00	1.170.000,00
Jumlah	3.036.143.895,00	3.036.143.895,00

5.3.1.3.3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti

Rp159.383.713.139,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp159.383.713.139,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp151.457.966.810,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.925.746.329,00 atau 5,23% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	76.467.617.616,00	72.667.986.143,00
2 Dinas Kesehatan	4.933.166.740,00	4.933.166.740,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.408.599.263,00	442.159.000,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	508.200.000,00	508.200.000,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.300.955.769,00	1.300.955.769,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	4.467.220.000,00	4.467.220.000,00
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	175.858.000,00	175.858.000,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	491.070.000,00	491.070.000,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.941.352.081,00	1.941.352.081,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	12.939.643.506,00	1.265.781.506,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	139.508.000,00	139.508.000,00
12 Dinas Sosial	6.363.357.217,00	3.649.069.108,00
13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	917.686.100,00	917.686.100,00
14 Dinas Ketahanan Pangan	464.660.000,00	464.660.000,00
15 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.006.826.000,00	2.006.826.000,00
16 Dinas Perhubungan	974.927.508,00	974.927.508,00
17 Dinas Komunikasi dan Informatika	793.494.572,00	793.494.572,00
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	139.732.800,00	139.732.800,00
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110.020.000,00	110.020.000,00
20 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9.382.256.227,00	9.382.256.227,00
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	342.880.670,00	342.880.670,00
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	6.154.943.011,00	6.044.191.677,00
23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.693.562.468,00	4.523.612.468,00
24 Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.635.569.912,00	13.635.569.912,00
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	488.620.500,00	488.620.500,00
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	56.522.500,00	56.522.500,00
27 Sekretariat DPRD	418.598.000,00	418.598.000,00
28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	94.220.000,00	94.220.000,00
29 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.792.711.410,00	1.792.711.410,00
30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.922.503.119,00	15.431.679.969,00
31 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.711.470.150,00	1.711.470.150,00
32 Inspektorat	14.310.000,00	14.310.000,00
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	131.650.000,00	131.650.000,00
Jumlah	159.383.713.139,00	151.457.966.810,00

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp13.406.119.577.958,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp13.406.119.577.958,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.507.048.034.410,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp899.071.543.548,00 atau 7,19% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Jalan dan Jembatan	11.251.982.496.399,00	10.529.107.433.563,00
2 Bangunan Air	1.697.320.586.129,00	1.541.673.798.149,00
3 Instalasi	96.715.122.115,00	122.948.090.550,00
4 Jaringan	360.101.373.315,00	313.318.712.148,00
Jumlah	13.406.119.577.958,00	12.507.048.034.410,00

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal

12.507.048.034.410,00

Penambahan

Belanja Modal	838.713.846.278,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	1.281.538.815,00
Hibah	198.515.348.184,00
Hasil Usaha Mandiri	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	74.320.400,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	12.251.933.849,00
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	100.156.721.825,00
Jumlah	1.150.993.709.351,00



Berkurang

Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	48.225.202.680,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	132.269.286.560,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Belanja Modal	271.628.537,00
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	71.156.048.026,00
Jumlah	251.922.165.803,00

Saldo Akhir

13.406.119.577.958,00

Penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang bersumber dari belanja modal senilai Rp838.713.846.278,00, termasuk penambahan yang berasal dari Belanja Modal Non Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	Nilai Perolehan Aset Tetap	Belanja Modal pada LRA	Pencatatan pada Neraca
1.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Rp730.582.251,00	Belanja Modal Tanah	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
		Rp1.177.708.625,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp29.901.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
3.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp76.900.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
4.	Dinas Sosial	Rp60.898.499,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.	Dinas Perhubungan	Rp664.406.616,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp31.698.262.636,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
7.	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Rp74.418.000,00	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	TOTAL	Rp34.513.077.627,00		

5.3.1.3.4.1 Jalan dan Jembatan

Rp11.251.982.496.399,00

Jalan dan Jembatan sebesar Rp11.251.982.496.399,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.529.107.433.563,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp722.875.062.836,00 atau 6,87% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.019.494.652,00	19.587.514.650,00
2 Dinas Kesehatan	57.825.000,00	57.825.000,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	952.451.000,00	952.451.000,00
4 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	49.950.000,00	49.950.000,00
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	4.442.601.976,00	4.212.346.875,00
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	2.895.101.000,00	2.895.101.000,00
7 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	3.416.771.073,00	3.416.771.073,00
8 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	119.263.000,00	119.263.000,00
9 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	11.060.594.328.716,00	10.342.692.925.219,00
10 Dinas Sosial	52.859.000,00	52.859.000,00
11 Dinas Ketahanan Pangan	164.387.000,00	164.387.000,00
12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.121.303.425,00	18.051.490.425,00
13 Dinas Perhubungan	32.838.590.089,00	32.672.423.373,00
14 Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	15.537.621.527,00	15.537.621.527,00
15 Dinas Kelautan dan Perikanan	51.084.983.588,00	47.080.703.430,00
16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.159.122.612,00	4.087.958.250,00
17 Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.884.915.271,00	7.884.915.271,00
18 Sekretariat DPRD	387.415.000,00	387.415.000,00
19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.900.626.970,00	26.900.626.970,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
20 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.302.885.500,00	2.302.885.500,00
Jumlah	11.251.982.496.399,00	10.529.107.433.563,00

5.3.1.3.4.2 Bangunan Air

Rp1.697.320.586.129,00

Bangunan Air sebesar Rp1.697.320.586.129,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.541.673.798.149,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp155.646.787.980,00 atau 10,10% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.670.416.923,00	17.605.494.646,00
2 Dinas Kesehatan	835.756.500,00	835.756.500,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	2.821.073.315,00	2.821.073.315,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	175.000.000,00	175.000.000,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.013.070.158,00	1.013.070.158,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	3.626.015.250,00	3.626.015.250,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	98.529.000,00	98.529.000,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	100.621.000,00	100.621.000,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.158.273.500,00	1.158.273.500,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	154.401.729.054,00	154.045.441.560,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.201.946.468.067,00	1.077.752.394.878,00
12 Satuan Polisi Pamong Praja	159.200.000,00	159.200.000,00
13 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.000.000,00	89.000.000,00
14 Dinas Sosial	3.902.055.119,00	3.527.870.556,00
15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	54.487.600,00	54.487.600,00
16 Dinas Ketahanan Pangan	25.900.000,00	25.900.000,00
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.525.975.654,00	3.525.975.654,00
18 Dinas Perhubungan	5.200.837.575,00	4.702.597.675,00
19 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	233.520.000,00	233.520.000,00
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	85.794.000,00	85.794.000,00
21 Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	4.540.916.652,00	4.540.916.652,00
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	190.275.000,00	190.275.000,00
23 Dinas Kelautan dan Perikanan	238.353.133.798,00	210.253.880.241,00
24 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.462.395.001,00	4.413.945.001,00
25 Dinas Pertanian dan Perkebunan	24.688.461.953,00	22.677.084.953,00
26 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	25.651.073.221,00	25.651.073.221,00
27 Sekretariat Daerah	82.858.935,00	82.858.935,00
28 Sekretariat DPRD	1.173.201.000,00	1.173.201.000,00
29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	273.169.389,00	273.169.389,00
30 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	184.250.000,00	184.250.000,00
31 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	597.128.465,00	597.128.465,00
Jumlah	1.697.320.586.129,00	1.541.673.798.149,00

5.3.1.3.4.3 Instalasi

Rp96.715.122.115,00

Instalasi sebesar Rp96.715.122.115,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp122.948.090.550,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp26.232.968.435,00) atau (21,34%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.957.964.251,00	17.862.823.561,00
2 Dinas Kesehatan	3.558.144.564,00	3.558.144.564,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	9.712.830.276,00	9.101.978.739,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	515.891.455,00	376.921.875,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	18.651.259.120,00	18.651.259.120,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	4.055.724.214,00	4.000.724.214,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.819.860.000,00	2.819.860.000,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	6.718.206.791,00	6.718.206.791,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	8.413.141.599,00	8.413.141.599,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.174.560.400,00	1.174.560.400,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	664.938.567,00	664.938.567,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.142.400,00	39.142.400,00
13 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91.433.000,00	91.433.000,00
14 Dinas Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00
15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	798.195.492,00	798.195.492,00
16 Dinas Ketahanan Pangan	14.500.000,00	14.500.000,00
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.434.465.013,00	1.434.465.013,00
18 Dinas Perhubungan	198.190.000,00	10.287.642.897,00
19 Dinas Komunikasi dan Informatika	1.815.817.500,00	1.815.817.500,00
20 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	33.665.810,00	33.665.810,00
21 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	36.582.000,00	36.582.000,00
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	2.498.531.577,00	2.498.531.577,00
23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.335.832.475,00	2.335.832.475,00
24 Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.744.116.410,00	1.744.116.410,00
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.591.526.418,00	25.917.859.565,00
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.751.450,00	50.751.450,00
27 Sekretariat DPRD	975.049.350,00	975.049.350,00
28 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	233.186.880,00	233.186.880,00
29 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	711.070.553,00	382.553.273,00
30 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	855.544.550,00	855.544.550,00
31 Badan Penghubung	-	45.661.478,00
Jumlah	96.715.122.115,00	122.948.090.550,00

5.3.1.3.4.4 Jaringan

Rp360.101.373.315,00

Jaringan sebesar Rp360.101.373.315,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp313.318.712.148,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp46.782.661.167,00 atau 14,93% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.653.035.629,00	21.751.617.229,00
2 Dinas Kesehatan	808.726.228,00	808.726.228,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	447.980.000,00	447.980.000,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	4.120.527.975,00	4.120.527.975,00
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	3.109.059.219,00	3.109.059.219,00
6 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.567.161.390,00	1.567.161.390,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	256.173.000,00	256.173.000,00
8 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	290.426.056.188,00	222.914.964.285,00
9 Dinas Sosial	500.000,00	500.000,00
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.236.800,00	23.236.800,00
11 Dinas Ketahanan Pangan	71.708.800,00	71.708.800,00
12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.547.760.100,00	1.547.760.100,00
13 Dinas Perhubungan	73.196.000,00	20.703.045.136,00
14 Dinas Komunikasi dan Informatika	113.983.400,00	113.983.400,00
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.744.873,00	5.744.873,00
16 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	24.980.000,00	24.980.000,00
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.700.000,00	16.700.000,00
18 Dinas Kelautan dan Perikanan	743.504.987,00	743.504.987,00
19 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	857.173.400,00	857.173.400,00
20 Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.238.625.000,00	1.238.625.000,00
21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	30.481.926.400,00	30.481.926.400,00
22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	261.556.700,00	261.556.700,00
23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.421.797.750,00	1.421.797.750,00
24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	634.327.476,00	634.327.476,00
25 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	195.932.000,00	195.932.000,00
Jumlah	360.101.373.315,00	313.318.712.148,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Rp1.156.748.182.680,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.156.748.182.680,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.056.350.270.097,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp100.397.912.583,00 atau 9,50% dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Bahan Perpustakaan	1.112.413.439.500,00	1.013.896.621.087,00
2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	38.458.019.698,00	36.598.633.127,00
3 Hewan	4.283.383.560,00	4.272.583.560,00
4 Biota Perairan	3.328.600,00	2.878.600,00
5 Tanaman	1.169.070.323,00	1.161.841.323,00
6 Barang Koleksi Non Budaya	67.263.099,00	64.034.500,00
7 Aset Tetap Dalam Renovasi	353.677.900,00	353.677.900,00
Jumlah	1.156.748.182.680,00	1.056.350.270.097,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.156.748.182.680,00 belum termasuk Aset Lainnya sebesar Rp2.876.956.387.074,00 dan Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp433.304.937.674,00. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan, sehingga penyajiannya terpisah dari kelompok Aset Tetap Lainnya. Adapun Aset Ekstrakomptabel merupakan aset tetap yang memiliki nilai satuan di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak disajikan sebagai aset tetap.

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	1.056.350.270.097,00
Penambahan	
Belanja Modal	116.962.903.778,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	23.227.000,00
Hibah	463.194.500,00
Hasil Usaha Mandiri	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	78.265.700,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	13.640.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomptabel	-
Koreksi	331.093.500,00
Jumlah	117.872.324.478,00
Berkurang	
Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	465.696.300,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	15.913.349.895,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	825.285.200,00
Koreksi Belanja Modal	4.787.000,00
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	265.293.500,00
Jumlah	17.474.411.895,00
Saldo Akhir	1.156.748.182.680,00



Penambahan Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari belanja modal senilai Rp116.962.903.778,00, termasuk penambahan yang berasal dari Belanja Modal Non Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	Nilai Perolehan Aset Tetap	Belanja Modal pada LRA	Pencatatan pada Neraca
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp39.357.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya
	TOTAL	Rp39.357.000,00		

5.3.1.3.5.1 Bahan Perpustakaan

Rp1.112.413.439.500,00

Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.112.413.439.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.013.896.621.087,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp98.516.818.413,00 atau 9,72% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.088.968.935.884,00	991.066.674.455,00
2 Dinas Kesehatan	232.446.464,00	232.446.464,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	503.263.865,00	493.363.865,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	195.908.140,00	195.908.140,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	347.851.581,00	342.927.581,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	337.390.600,00	337.390.600,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	38.858.950,00	38.858.950,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	102.636.143,00	79.570.793,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	74.995.830,00	74.995.830,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	417.895.391,00	392.984.391,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	84.542.066,00	84.542.066,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	151.002.400,00	151.002.400,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	25.500.000,00	25.500.000,00
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.083.955,00	55.083.955,00
15 Dinas Sosial	311.244.882,00	307.644.882,00
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	190.250.092,00	190.250.092,00
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64.410.400,00	64.410.400,00
18 Dinas Ketahanan Pangan	108.482.200,00	108.482.200,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	896.738.709,00	896.738.709,00
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	17.147.000,00	17.147.000,00
21 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	253.501.715,00	253.501.715,00
22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	135.443.600,00	135.443.600,00
23 Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	222.467.500,00	222.467.500,00
24 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.498.565.541,00	14.984.688.782,00
25 Dinas Kelautan dan Perikanan	148.213.324,00	148.213.324,00
26 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	138.522.750,00	138.522.750,00
27 Dinas Pertanian dan Perkebunan	221.762.731,00	220.560.731,00
28 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	317.964.400,00	317.964.400,00
29 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	215.438.036,00	215.438.036,00
30 Sekretariat Daerah	606.089.961,00	601.089.961,00
31 Sekretariat DPRD	348.689.983,00	348.689.983,00
32 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	455.947.525,00	437.323.650,00
33 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	53.884.000,00	53.884.000,00
34 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.078.000,00	9.078.000,00
35 Badan Kepegawaian Daerah	35.073.100,00	35.073.100,00
36 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	526.180.482,00	516.726.482,00
37 Inspektorat	21.412.900,00	21.412.900,00
38 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.619.400,00	80.619.400,00
Jumlah	1.112.413.439.500,00	1.013.896.621.087,00



5.3.1.3.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga **Rp38.458.019.698,00**

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp38.458.019.698,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp36.598.633.127,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.859.386.571,00 atau 5,08% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.122.741.555,00	28.267.854.984,00
2 Dinas Kesehatan	105.951.000,00	105.951.000,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	33.525.000,00	33.525.000,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	68.612.500,00	68.612.500,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	55.000.000,00	55.000.000,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	501.733.666,00	501.733.666,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	418.240.750,00	418.240.750,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	41.085.000,00	41.085.000,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	378.588.000,00	378.588.000,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	128.635,00	128.635,00
11 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.000,00	170.000,00
12 Satuan Polisi Pamong Praja	500.219.500,00	500.219.500,00
13 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	750.000,00	750.000,00
14 Dinas Sosial	352.274.000,00	350.774.000,00
15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77.908.500,00	77.908.500,00
16 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.215.000,00	22.215.000,00
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	455.754.000,00	455.754.000,00
18 Dinas Perhubungan	378.775.000,00	378.775.000,00
19 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	95.637.290,00	95.637.290,00
20 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	368.113.753,00	368.113.753,00
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.038.571,00	10.038.571,00
22 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44.860.000,00	44.860.000,00
23 Dinas Pertanian dan Perkebunan	58.667.000,00	58.667.000,00
24 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	80.581.000,00	80.581.000,00
25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	102.258.236,00	102.258.236,00
26 Sekretariat Daerah	211.606.342,00	211.606.342,00
27 Sekretariat DPRD	498.273.000,00	498.273.000,00
28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.600.000,00	24.600.000,00
29 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	414.975.000,00	414.975.000,00
30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100.000,00	100.000,00
31 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	164.956.250,00	164.956.250,00
32 Badan Penghubung	2.864.681.150,00	2.864.681.150,00
33 Inspektorat	2.000.000,00	2.000.000,00
Jumlah	38.458.019.698,00	36.598.633.127,00

5.3.1.3.5.3 Hewan **Rp4.283.383.560,00**

Hewan sebesar Rp4.283.383.560,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.272.583.560,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.800.000,00 atau 0,25% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	241.469.000,00	230.669.000,00
2 Dinas Kesehatan	7.000.000,00	7.000.000,00
3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	236.072.000,00	236.072.000,00
4 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.798.842.560,00	3.798.842.560,00
Jumlah	4.283.383.560,00	4.272.583.560,00

5.3.1.3.5.4 Biota Perairan **Rp3.328.600,00**

Biota Perairan sebesar Rp3.328.600,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.878.600,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp450.000,00 atau 15,63% dengan rincian sebagai berikut :



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.328.600,00	2.878.600,00
Jumlah	3.328.600,00	2.878.600,00

5.3.1.3.5.5 Tanaman

Rp1.169.070.323,00

Tanaman sebesar Rp1.169.070.323,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.161.841.323,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.229.000,00 atau 0,62% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	757.550.490,00	750.321.490,00
2 Dinas Kesehatan	34.650.000,00	34.650.000,00
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	295.101.633,00	295.101.633,00
4 Dinas Perhubungan	39.465.000,00	39.465.000,00
5 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	42.303.200,00	42.303.200,00
Jumlah	1.169.070.323,00	1.161.841.323,00

5.3.1.3.5.6 Barang Koleksi Non Budaya

Rp67.263.099,00

Barang Koleksi Non Budaya sebesar Rp67.263.099,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp64.034.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.228.599,00 atau 5,04% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.263.099,00	34.034.500,00
2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.000.000,00	30.000.000,00
Jumlah	67.263.099,00	64.034.500,00

5.3.1.3.5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi

Rp353.677.900,00

Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp353.677.900,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	353.677.900,00	353.677.900,00
Jumlah	353.677.900,00	353.677.900,00

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp87.272.764.871,00

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp87.272.764.871,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp287.616.819.183,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp200.344.054.312,00) atau (69,66%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Tanah	917.226.000,00	917.226.000,00
2 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	61.775.670.546,00	263.493.902.508,00
3 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, Irigasi	24.530.808.325,00	23.156.630.675,00
4 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Aset Tetap Lainnya	49.060.000,00	49.060.000,00
Jumlah	87.272.764.871,00	287.616.819.183,00

Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**



Saldo Awal	287.616.819.183,00
Penambahan	
Belanja Modal	56.038.972.718,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Hasil Usaha Mandiri	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	90.003.600,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	545.000.000,00
Jumlah	56.673.976.318,00
Berkurang	
Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	255.885.825.633,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Belanja Modal	1.086.863.717,00
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	45.341.280,00
Jumlah	257.018.030.630,00
Saldo Akhir	87.272.764.871,00

Konstruksi dalam Pengerjaan senilai Rp87.272.764.871,00, termasuk Konstruksi dalam Pengerjaan dengan usia lebih dari 5 (lima) tahun dan berstatus tidak dilanjutkan yang sedang dalam proses pengusulan penghapusan oleh Pengelola Barang. Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan dengan usia lebih dari 5 (lima) tahun dan berstatus tidak dilanjutkan terlampir pada lampiran Konstruksi dalam Pengerjaan yang Tidak Dilanjutkan.

5.3.1.3.6.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan – Tanah **Rp917.226.000,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan – Tanah sebesar Rp917.226.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp917.226.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	917.226.000,00	917.226.000,00
	Jumlah	917.226.000,00	917.226.000,00

5.3.1.3.6.2 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan **Rp61.775.670.546,00**

Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan sebesar Rp61.775.670.546,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp263.493.902.508,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp201.718.231.962,00) atau (76,56%) dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.768.215.782,00	6.030.338.000,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2 Dinas Kesehatan	619.204.000,00	619.204.000,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	228.194.400,00	198.473.357.041,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	33.000.394.670,00	-
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	545.000.000,00	47.882.390.643,00
6 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	397.407.750,00	-
7 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.107.758.000,00	2.573.507.000,00
8 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.579.936.373,00	2.579.936.373,00
9 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	710.423.000,00	710.423.000,00
10 Dinas Ketahanan Pangan	86.136.000,00	-
11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	67.534.000,00	67.534.000,00
12 Dinas Perhubungan	2.554.392.221,00	2.450.347.221,00
13 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	89.551.000,00	89.551.000,00
14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.069.202.800,00	1.069.202.800,00
15 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	133.276.000,00	133.276.000,00
16 Dinas Kelautan dan Perikanan	328.093.000,00	328.093.000,00
17 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	329.850.550,00	329.850.550,00
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.245.600,00	15.245.600,00
19 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	45.341.280,00
20 Badan Kepegawaian Daerah	145.855.400,00	96.305.000,00
Jumlah	61.775.670.546,00	263.493.902.508,00

5.3.1.3.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, Irigasi Rp24.530.808.325,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, Irigasi sebesar Rp24.530.808.325,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23.156.630.675,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.374.177.650,00 atau 5,93% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	6.582.567.515,00	6.582.567.515,00
2 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	17.394.579.815,00	16.197.973.815,00
3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48.285.000,00	-
4 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	48.621.100,00	48.621.100,00
5 Dinas Perhubungan	306.192.350,00	176.905.700,00
6 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	72.915.700,00	72.915.700,00
7 Dinas Kelautan dan Perikanan	68.608.200,00	68.608.200,00
8 Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.038.645,00	9.038.645,00
Jumlah	24.530.808.325,00	23.156.630.675,00

5.3.1.3.6.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Aset Tetap Lainnya Rp49.060.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp49.060.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp49.060.000,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** sebesar dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pertanian dan Perkebunan	49.060.000,00	49.060.000,00
Jumlah	49.060.000,00	49.060.000,00

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp20.402.100.497.524,84)

Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp20.402.100.497.524,84) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp18.940.511.645.566,10) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp1.461.588.851.958,74) atau 7,72% dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.836.982.692.077,80)	(7.175.487.568.983,53)
2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.837.792.215.131,30)	(2.651.567.872.774,62)
3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(9.723.664.295.695,34)	(9.110.161.814.096,63)
4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.661.294.620,40)	(3.294.389.711,32)
Jumlah	(20.402.100.497.524,84)	(18.940.511.645.566,10)

Rincian mutasi akumulasi penyusutan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja akumulasi penyusutan terlampir)**

Saldo Awal **18.940.511.645.566,10**

Penambahan

Hibah	3.302.717.258,98
Mutasi Masuk	15.321.181.599,44
Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap	24.667.214.899,05
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	6.345.383.663,67
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel	7.500.000,00
Koreksi Tambah	112.268.477.653,88
Jumlah	161.912.475.075,02

Berkurang

Mutasi Keluar	15.321.181.599,44
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	27.147.614.635,39
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	140.361.783.690,49
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	2.859.010.297,13
Koreksi Kurang	127.145.501.704,98
Jumlah	312.835.091.927,43

Beban Penyusutan **1.612.511.468.811,15**

Saldo Akhir **20.402.100.497.524,84**

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp7.836.982.692.077,80)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp7.836.982.692.077,80) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp7.175.487.568.983,53) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp661.495.123.094,27) atau 9,22% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(303.096.026.906,36)	(291.733.962.373,83)
2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(603.392.882.560,17)	(564.866.078.679,05)
3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(343.105.795.758,76)	(320.226.114.289,29)
4 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(66.623.362.539,26)	(61.998.352.504,62)
5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.768.315.598.200,34)	(1.628.899.922.676,85)
6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(267.634.924.270,21)	(247.546.781.827,13)
7 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(2.225.969.342.600,56)	(2.059.280.462.821,85)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(541.555.354.270,27)	(479.352.987.771,17)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(6.290.136.524,67)	(5.899.324.985,81)
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.521.619.420.906,72)	(1.361.784.543.489,28)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(341.691.448,66)	(307.946.679,80)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	(94.442.406,65)	(77.625.635,18)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(343.815.672,26)	(251.591.913,92)
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	(14.826.000,00)	(12.708.000,00)
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(6.262.847.650,40)	(5.350.516.385,50)
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(96.705.645.185,99)	(77.235.213.445,86)
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(2.906.653.249,64)	(2.139.616.182,92)
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	(26.612.218.352,84)	(22.923.607.162,99)
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(56.097.707.574,04)	(45.600.212.158,48)
	Jumlah	(7.836.982.692.077,80)	(7.175.487.568.983,53)

Rincian mutasi akumulasi penyusutan peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja akumulasi penyusutan terlampir)**

Saldo Awal **7.175.487.568.983,53**

Penambahan

Hibah	1.777.713.041,64
Mutasi Masuk	9.269.985.399,54
Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap	12.578.695.077,09
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	1.445.573.570,32
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Tambah	1.590.457.993,21
Jumlah	26.662.425.081,80

Berkurang

Mutasi Keluar	9.269.985.399,54
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	12.593.789.074,77
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	81.934.424.034,19
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	23.070.826,54
Koreksi Kurang	871.714.769,02
Jumlah	104.692.984.104,06

Beban Penyusutan **739.525.682.116,53**

Saldo Akhir **7.836.982.692.077,80**

5.3.1.3.7.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar (Rp303.096.026.906,36)

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar (Rp303.096.026.906,36) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp291.733.962.373,83) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp11.362.064.532,53) atau 3,89% dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(18.039.923.701,36)	(16.427.017.067,51)
2 Dinas Kesehatan	(4.811.517.170,83)	(4.574.159.798,09)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(18.097.437.398,13)	(17.816.754.924,17)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(20.651.219.304,00)	(19.768.662.504,00)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(14.641.038.213,93)	(14.329.348.938,93)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(3.358.243.889,00)	(3.358.243.889,00)
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(6.193.667.046,88)	(5.739.235.309,38)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(3.354.458.416,82)	(3.011.275.809,20)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(1.641.566.715,00)	(1.491.776.828,21)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(101.785.711.435,10)	(98.080.776.400,34)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(26.664.111.770,82)	(24.172.162.011,82)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(483.370.787,50)	(411.485.675,00)
13 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(5.120.376.462,49)	(7.062.976.936,65)
14 Dinas Sosial	(1.574.066.239,94)	(1.542.151.952,68)
15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(264.963.058,34)	(258.420.918,34)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(622.400.000,00)	(622.400.000,00)
17 Dinas Ketahanan Pangan	(203.131.526,05)	(152.166.588,55)
18 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(470.368.713,67)	(456.231.242,67)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(1.304.000.351,33)	(1.279.000.351,33)
20 Dinas Perhubungan	(1.768.439.337,50)	(1.784.058.300,00)
21 Dinas Komunikasi dan Informatika	(2.357.266.612,50)	(2.173.199.250,00)
22 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(1.355.770.000,00)	(1.260.386.250,00)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(544.111.968,75)	(466.381.687,50)
24 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(2.761.374.847,20)	(2.698.630.726,53)
25 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(4.793.220.260,00)	(4.793.220.260,00)
26 Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.926.993.707,30)	(1.695.404.557,30)
27 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(487.496.775,00)	(431.292.987,50)
28 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(6.279.129.417,32)	(5.863.365.463,15)
29 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(2.762.582.192,71)	(2.686.821.005,21)
30 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(6.346.180.931,66)	(6.210.493.895,41)
31 Sekretariat Daerah	(12.390.495.145,21)	(11.877.237.816,71)
32 Sekretariat DPRD	(3.223.719.756,25)	(2.627.365.678,75)
33 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(2.732.987.710,42)	(2.699.788.537,50)
34 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(15.480.917.934,00)	(15.541.646.686,75)
35 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.899.016.860,00)	(2.787.278.922,50)
36 Badan Kepegawaian Daerah	(1.505.960.000,00)	(1.505.960.000,00)
37 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.583.235.261,85)	(2.454.025.477,15)
38 Badan Riset dan Inovasi Daerah	(497.780.000,00)	(497.780.000,00)
39 Badan Penghubung	(294.177.112,50)	(256.927.125,00)
40 Inspektorat	(183.448.875,00)	(178.541.375,00)
41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(640.150.000,00)	(689.909.226,00)
Jumlah	(303.096.026.906,36)	(291.733.962.373,83)

5.3.1.3.7.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

(Rp603.392.882.560,17)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar (Rp603.392.882.560,17) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp564.866.078.679,05) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp38.526.803.881,12) atau 6,82% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(137.014.762.865,01)	(130.002.403.006,01)
2 Dinas Kesehatan	(24.207.580.539,98)	(20.753.630.506,79)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(7.690.291.160,19)	(7.240.435.406,70)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(8.149.024.703,63)	(8.271.038.995,29)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(5.225.668.681,67)	(4.848.180.373,34)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(7.003.849.430,38)	(5.984.682.641,75)
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(5.090.169.378,13)	(4.304.982.004,80)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(6.564.217.412,68)	(6.133.258.082,27)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(5.094.446.337,84)	(4.367.057.054,50)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(20.299.244.223,59)	(17.669.363.348,59)





Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(14.938.343.024,45)	(12.501.510.034,20)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(3.754.548.283,00)	(3.696.860.783,00)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	(4.928.649.460,33)	(4.745.167.939,50)
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(22.659.501.026,11)	(21.873.945.275,18)
15 Dinas Sosial	(18.149.782.305,35)	(17.583.591.817,75)
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(8.633.175.226,29)	(8.856.813.441,91)
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(2.422.237.245,00)	(2.437.237.245,00)
18 Dinas Ketahanan Pangan	(3.199.504.389,00)	(3.012.392.722,34)
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(18.280.634.990,71)	(17.869.450.426,57)
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(3.423.187.868,84)	(2.878.406.304,84)
21 Dinas Perhubungan	(28.570.317.576,00)	(28.179.858.965,58)
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	(6.197.596.039,65)	(6.319.740.214,65)
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(2.903.462.271,83)	(2.844.290.146,83)
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.955.191.311,00)	(2.842.687.717,25)
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(4.841.174.540,33)	(4.596.794.332,00)
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(5.393.605.095,00)	(5.258.031.407,50)
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	(19.184.689.586,14)	(18.268.420.398,22)
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(5.794.288.609,67)	(5.333.702.951,88)
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(16.682.347.434,96)	(15.960.597.727,12)
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(8.322.448.944,67)	(7.593.861.815,50)
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(6.635.850.495,00)	(6.543.444.245,00)
32 Sekretariat Daerah	(62.566.978.552,58)	(57.871.940.777,53)
33 Sekretariat DPRD	(23.127.335.805,11)	(20.130.610.158,85)
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.679.103.403,66)	(4.270.326.903,66)
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(38.978.338.893,82)	(35.496.465.593,04)
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(15.466.612.481,34)	(15.789.133.623,67)
37 Badan Kepegawaian Daerah	(3.890.943.012,66)	(3.555.496.387,66)
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.918.311.088,00)	(2.742.334.004,67)
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	(1.497.574.005,99)	(1.244.067.505,99)
40 Badan Penghubung	(8.328.877.680,00)	(7.620.617.774,04)
41 Inspektorat	(4.644.358.780,58)	(4.360.718.655,58)
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.084.658.400,00)	(3.012.529.962,50)
Jumlah	(603.392.882.560,17)	(564.866.078.679,05)

5.3.1.3.7.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur (Rp343.105.795.758,76)

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur sebesar (Rp343.105.795.758,76) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp320.226.114.289,29) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp22.879.681.469,47) atau 7,14% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(294.903.437.346,99)	(273.903.656.197,14)
2 Dinas Kesehatan	(2.528.342.192,28)	(2.260.280.883,99)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(1.441.796.349,67)	(1.314.602.604,67)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(2.278.243.156,20)	(1.946.692.902,70)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(612.573.506,20)	(590.744.927,37)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(596.610.976,25)	(587.104.481,25)
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(46.299.137,47)	(45.015.219,07)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(597.303.103,34)	(559.261.150,00)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(818.293.011,66)	(810.635.604,16)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(596.896.006,60)	(395.043.715,70)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(2.758.342.201,58)	(2.425.936.434,73)
12 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.052.821.816,31)	(988.210.101,31)
13 Dinas Sosial	(193.548.950,01)	(191.247.283,34)
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(3.099.708.142,05)	(2.912.914.648,05)
15 Dinas Ketahanan Pangan	(170.358.083,34)	(200.102.583,34)
16 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(2.487.260.284,01)	(2.466.946.484,01)
17 Dinas Perhubungan	(1.555.829.116,60)	(1.507.311.616,60)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
18 Dinas Komunikasi dan Informatika	(39.550.623,34)	(32.795.683,34)
19 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(34.618.070,59)	(23.812.364,09)
20 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(69.807.703,34)	(50.195.833,34)
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(1.892.338.444,60)	(1.757.607.688,90)
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	(792.498.995,01)	(748.918.645,01)
23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(822.849.462,64)	(750.046.532,64)
24 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(3.081.131.320,00)	(3.056.365.060,00)
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(7.306.265.608,99)	(7.163.203.770,99)
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(12.980.633.398,02)	(12.964.347.990,22)
27 Sekretariat Daerah	(125.162.491,67)	(121.745.666,66)
Sekretariat DPRD	(137.000,00)	-
28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.383.060,00)	(987.900,00)
29 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(127.655.000,00)	(358.606.666,67)
30 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(12.856.200,00)	(11.023.650,00)
31 Badan Penghubung	(9.845.000,00)	(9.350.000,00)
32 Inspektorat	(71.400.000,00)	(71.400.000,00)
Jumlah	(343.105.795.758,76)	(320.226.114.289,29)

5.3.1.3.7.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian (Rp66.623.362.539,26)

Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian sebesar (Rp66.623.362.539,26) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp61.998.352.504,62) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp4.625.010.034,64) atau 7,46% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(17.200.587.486,78)	(15.734.259.188,01)
2 Dinas Kesehatan	(11.600.000,00)	(10.150.000,00)
3 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(43.982.500,00)	(43.140.312,50)
4 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(359.940.711,67)	(336.815.711,67)
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	(126.640.630,00)	(126.640.630,00)
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(14.058.843,75)	(10.309.818,75)
7 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(8.937.656,25)	(6.108.281,25)
8 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(7.330.060,00)	(7.330.060,00)
9 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(15.600.000,00)	(12.000.000,00)
10 Dinas Sosial	(24.044.375,00)	(20.931.875,00)
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(2.173.996.383,32)	(2.148.416.383,32)
12 Dinas Ketahanan Pangan	(926.156.986,67)	(1.310.066.986,67)
13 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(548.244.583,34)	(531.394.583,34)
14 Dinas Komunikasi dan Informatika	(374.625,00)	(124.875,00)
15 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(4.320.675,00)	-
16 Dinas Kelautan dan Perikanan	(812.407.255,01)	(770.075.648,34)
17 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(8.199.528.866,06)	(8.360.611.241,76)
18 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(36.090.827.568,08)	(32.514.426.909,01)
19 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(483.333,33)	-
20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(38.500.000,00)	(39.750.000,00)
21 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(15.800.000,00)	(15.800.000,00)
Jumlah	(66.623.362.539,26)	(61.998.352.504,62)

5.3.1.3.7.1.5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rp1.768.315.598.200,34)

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar (Rp1.768.315.598.200,34) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.628.899.922.676,85) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp139.415.675.523,49) atau 8,56% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(996.787.264.297,35)	(871.352.528.105,31)
2 Dinas Kesehatan	(35.436.075.819,16)	(34.212.246.043,43)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(55.144.799.414,61)	(49.714.425.050,64)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(70.730.285.172,28)	(64.030.977.920,88)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(42.295.781.397,47)	(40.454.804.912,60)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(17.649.829.942,06)	(16.450.384.661,83)
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(17.131.077.872,73)	(16.651.822.441,20)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-*NERACA*
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(30.666.925.710,35)	(28.256.241.369,93)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(14.866.938.670,00)	(13.985.068.908,37)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(8.944.316.075,90)	(6.422.647.454,07)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(9.599.722.107,11)	(8.822.480.977,07)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(2.869.324.057,33)	(2.699.310.269,33)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.545.583.107,41)	(2.527.638.107,36)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.816.093.609,33)	(8.430.944.639,67)
15	Dinas Sosial	(23.242.998.680,03)	(21.463.300.884,48)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(13.411.186.901,72)	(12.242.612.380,61)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(2.204.943.804,94)	(2.085.536.891,86)
18	Dinas Ketahanan Pangan	(3.261.435.673,57)	(3.002.177.978,73)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(11.137.424.291,28)	(10.689.896.453,16)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(5.352.358.275,67)	(5.077.991.365,01)
21	Dinas Perhubungan	(7.445.386.241,27)	(6.939.516.533,70)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	(9.288.302.157,55)	(7.776.791.887,22)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(9.330.593.613,82)	(8.609.969.729,49)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(2.588.022.159,08)	(2.525.029.412,37)
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(50.607.207.580,42)	(74.420.200.330,62)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(13.637.370.506,89)	(13.142.711.803,95)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	(8.448.411.731,83)	(8.090.048.340,54)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(8.269.138.637,24)	(7.728.974.202,31)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(17.452.028.830,63)	(17.276.689.246,88)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(13.955.104.905,36)	(13.338.396.018,83)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(18.796.832.081,75)	(18.065.082.243,39)
32	Sekretariat Daerah	(39.501.335.782,48)	(42.848.562.912,20)
33	Sekretariat DPRD	(54.539.932.951,01)	(49.939.196.487,86)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(6.575.407.851,80)	(6.302.548.369,54)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(62.491.093.055,96)	(62.045.134.969,79)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(29.105.518.032,81)	(28.878.922.753,06)
37	Badan Kepegawaian Daerah	(7.165.045.291,89)	(6.946.343.931,52)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(21.271.725.218,93)	(20.384.270.481,74)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(1.937.656.433,18)	(1.763.828.033,18)
40	Badan Penghubung	(5.564.218.409,22)	(5.432.670.397,30)
41	Inspektorat	(5.171.363.086,39)	(4.942.570.338,26)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.079.538.760,53)	(2.929.427.437,56)
Jumlah		(1.768.315.598.200,34)	(1.628.899.922.676,85)

5.3.1.3.7.1.6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (Rp267.634.924.270,21)

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar (Rp267.634.924.270,21) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp247.546.781.827,13) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp20.088.142.443,08) atau 8,11% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(147.486.757.026,46)	(134.521.148.723,86)
2	Dinas Kesehatan	(5.065.005.231,06)	(4.725.170.898,88)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(4.713.347.881,33)	(4.538.716.264,68)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(7.408.715.824,70)	(7.152.837.750,03)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(4.207.791.089,89)	(4.032.997.741,01)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(1.613.817.255,70)	(1.601.437.655,70)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(764.731.804,40)	(703.136.921,05)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(1.236.611.187,24)	(1.113.328.298,71)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(574.860.116,79)	(529.641.802,85)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(2.608.092.812,96)	(1.662.178.702,09)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(1.867.707.826,35)	(1.811.627.326,35)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(699.179.320,33)	(590.517.520,33)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	(652.819.566,64)	(593.106.666,64)
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.314.086.794,81)	(2.308.123.484,81)
15 Dinas Sosial	(425.717.033,33)	(391.735.999,99)
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.970.283.818,45)	(1.892.581.842,59)
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(188.052.375,01)	(172.818.405,01)
18 Dinas Ketahanan Pangan	(531.029.595,80)	(427.542.454,86)
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(2.171.797.555,10)	(2.035.789.038,43)
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(1.716.708.029,68)	(1.685.566.389,68)
21 Dinas Perhubungan	(1.591.714.247,00)	(1.544.923.723,00)
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	(12.053.664.979,20)	(10.261.815.467,00)
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(1.262.612.861,34)	(1.079.764.861,34)
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(633.211.249,66)	(614.764.149,66)
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(4.479.688.341,50)	(3.721.051.518,90)
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(4.559.347.390,01)	(4.489.747.290,01)
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.380.116.676,41)	(1.337.359.396,94)
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(742.275.941,69)	(672.607.041,69)
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(4.009.043.069,17)	(3.937.044.197,83)
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(4.152.654.921,71)	(4.097.479.722,91)
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.071.138.236,58)	(645.138.953,44)
32 Sekretariat Daerah	(22.122.284.966,13)	(21.923.023.323,86)
33 Sekretariat DPRD	(4.642.967.179,29)	(4.402.707.551,95)
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(927.426.236,81)	(888.772.193,49)
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(5.646.194.058,00)	(5.685.329.087,00)
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.420.795.241,66)	(2.133.015.874,00)
37 Badan Kepegawaian Daerah	(335.911.655,65)	(326.705.695,65)
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(3.767.746.202,99)	(3.875.289.913,42)
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	(417.416.499,98)	(406.462.499,98)
40 Badan Penghubung	(1.550.048.126,58)	(1.421.702.120,84)
41 Inspektorat	(974.168.942,81)	(937.003.456,66)
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(677.385.100,01)	(655.069.900,01)
Jumlah	(267.634.924.270,21)	(247.546.781.827,13)

5.3.1.3.7.1.7 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran & Kesehatan (Rp2.225.969.342.600,56)

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar (Rp2.225.969.342.600,56) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.059.280.462.821,85) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp166.688.879.778,71) atau 8,09% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(10.679.721.123,49)	(9.805.704.325,83)
2 Dinas Kesehatan	(73.753.887.762,66)	(65.293.291.826,70)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(837.909.230.317,21)	(741.656.566.019,17)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(626.186.703.164,04)	(579.252.900.261,42)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(331.967.327.670,77)	(323.537.275.427,43)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(143.520.937.309,74)	(138.753.202.179,28)
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(77.998.657.352,87)	(73.465.137.678,77)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(55.767.062.502,44)	(52.290.320.556,85)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(64.734.845.975,91)	(72.158.194.635,94)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(8.917.253,90)	(1.812.930,00)
11 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(190.779.600,00)	(190.779.600,00)
12 Dinas Sosial	(712.048.941,56)	(550.787.941,69)
13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(256.568.685,00)	(263.868.685,00)
14 Dinas Perhubungan	(5.369.166,67)	(3.739.166,67)
15 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(5.478.000,00)	(3.486.000,00)
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.875.000,00)	(3.875.000,00)
17 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(20.100.000,00)	(20.100.000,00)
18 Dinas Kelautan dan Perikanan	(7.587.708,34)	(5.932.208,34)
19 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(1.101.583.980,02)	(915.489.420,02)
20 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(7.100.000,00)	(7.100.000,00)
21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(2.500.000,00)	(2.500.000,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(107.796.520,93)	(106.824.593,73)
23 Sekretariat Daerah	(192.141.666,67)	(168.166.666,67)
24 Sekretariat DPRD	(236.615.000,00)	(233.015.000,00)
25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.419.166,67)	(764.166,67)
26 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(135.475.000,00)	(138.165.000,00)
27 Badan Kepegawaian Daerah	(216.001.615,00)	(216.001.615,00)
28 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(239.105.450,00)	(235.115.250,00)
29 Badan Riset dan Inovasi Daerah	(506.666,67)	(346.666,67)
Jumlah	(2.225.969.342.600,56)	(2.059.280.462.821,85)

5.3.1.3.7.1.8 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium (Rp541.555.354.270,27)

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium sebesar (Rp541.555.354.270,27) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp479.352.987.771,17) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp62.202.366.499,10) atau 12,98% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(330.284.823.131,17)	(292.814.003.693,88)
2 Dinas Kesehatan	(38.198.076.183,07)	(32.306.028.727,77)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(31.746.471.337,52)	(24.331.190.140,10)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(18.668.012.362,16)	(12.986.149.655,88)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(19.611.091.761,13)	(18.697.713.566,75)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(2.197.021.307,06)	(2.082.312.390,29)
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(2.723.887.232,33)	(2.604.357.199,86)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(1.848.990.536,39)	(1.751.957.957,25)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(2.809.737.395,85)	(2.564.420.376,76)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(4.611.431.873,68)	(3.878.137.867,32)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(2.758.220.616,34)	(2.578.430.261,63)
12 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(92.229.325,00)	(86.023.825,00)
13 Dinas Sosial	(47.003.536,66)	(45.959.183,33)
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.607.781.858,00)	(5.027.395.761,17)
15 Dinas Ketahanan Pangan	(5.067.031.710,60)	(5.674.213.664,34)
16 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(11.904.857.826,05)	(11.493.551.890,77)
17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(13.414.500,00)	(10.433.500,00)
18 Dinas Komunikasi dan Informatika	(749.250,00)	(249.750,00)
19 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(16.123.068,06)	(11.341.550,11)
20 Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(150.703.888,89)	(125.315.972,22)
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(77.323.333,33)	(77.243.333,33)
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	(5.971.902.622,31)	(5.823.383.507,55)
23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(14.919.668.178,17)	(15.104.558.566,15)
24 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(9.715.482.435,65)	(9.293.882.606,48)
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(6.236.910.006,34)	(5.421.231.763,94)
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(25.596.550.912,09)	(23.897.760.616,45)
27 Sekretariat DPRD	(1.050.277,78)	(386.944,44)
28 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(3.879.999,99)	(2.850.000,00)
29 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(552.905.804,65)	(540.481.498,40)
30 Inspektorat	(122.022.000,00)	(122.022.000,00)
Jumlah	(541.555.354.270,27)	(479.352.987.771,17)

5.3.1.3.7.1.9 Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan (Rp6.290.136.524,67)

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan sebesar (Rp6.290.136.524,67) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp5.899.324.985,81) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp390.811.538,86) atau 6,62% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.317.741.254,04)	(3.091.386.273,43)
2 RSUD dr. Rehatta Jepara	(187.829.055,00)	(187.829.055,00)
3 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(5.953.500,00)	(5.953.500,00)
4 Satuan Polisi Pamong Praja	(179.710.000,00)	(171.450.000,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
5 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.659.729.175,00)	(1.641.279.175,00)
6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	(3.270.800,00)
7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(138.450.000,00)	(138.450.000,00)
8 Dinas Perhubungan	-	(3.254.725,00)
9 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(3.502.743,75)	-
10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(184.100.000,00)	(181.100.000,00)
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(42.000.000,00)	(42.000.000,00)
12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(19.882.000,00)	(19.882.000,00)
13 Sekretariat Daerah	(94.300.000,00)	(94.300.000,00)
14 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(23.650.000,00)	(23.650.000,00)
15 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(424.788.796,88)	(287.019.457,38)
16 Inspektorat	(8.500.000,00)	(8.500.000,00)
Jumlah	(6.290.136.524,67)	(5.899.324.985,81)

5.3.1.3.7.1.10 Akumulasi Penyusutan Komputer (Rp1.521.619.420.906,72)

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar (Rp1.521.619.420.906,72) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.361.784.543.489,28) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp159.834.877.417,44) atau 11,74% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.104.785.422.675,64)	(989.018.269.356,91)
2 Dinas Kesehatan	(14.149.220.041,65)	(12.831.066.120,36)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(29.960.749.877,98)	(24.575.566.900,16)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(43.325.646.571,44)	(36.237.452.022,38)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(12.103.675.703,90)	(8.696.638.105,50)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(3.170.516.943,47)	(2.818.944.107,78)
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(3.536.126.199,01)	(3.305.961.549,95)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(5.454.917.702,11)	(4.953.774.513,34)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(3.666.130.443,19)	(3.535.877.126,13)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(6.833.416.273,43)	(5.430.364.218,21)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(6.525.982.781,61)	(5.951.975.385,77)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(1.723.918.680,70)	(1.482.663.186,53)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	(1.885.246.850,21)	(1.827.032.824,17)
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.360.303.117,37)	(2.317.121.979,91)
15 Dinas Sosial	(5.770.064.227,55)	(5.234.979.405,97)
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(6.792.750.384,81)	(5.901.052.305,75)
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(857.635.460,80)	(912.671.849,67)
18 Dinas Ketahanan Pangan	(1.943.233.414,44)	(1.939.065.110,61)
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(5.827.285.999,25)	(5.312.590.575,69)
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(3.138.236.577,02)	(3.107.549.202,02)
21 Dinas Perhubungan	(3.196.020.981,37)	(4.356.035.513,70)
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	(96.683.748.017,19)	(83.216.664.945,50)
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(2.440.304.406,76)	(2.123.219.135,95)
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.503.266.801,76)	(3.332.689.243,80)
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(4.567.413.803,17)	(4.424.572.785,00)
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(5.339.341.998,15)	(5.288.388.543,22)
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	(3.244.745.818,45)	(3.008.447.995,84)
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(3.179.191.536,51)	(2.735.577.392,34)
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(5.794.776.548,97)	(5.659.869.860,59)
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(7.297.167.940,80)	(6.869.568.179,28)
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(5.714.145.512,34)	(4.964.302.685,74)
32 Sekretariat Daerah	(16.519.003.228,13)	(17.053.653.393,92)
33 Sekretariat DPRD	(12.960.753.467,32)	(11.673.356.081,87)
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(5.420.761.454,87)	(4.585.841.829,01)
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(54.449.558.274,77)	(51.166.467.292,63)
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(7.809.146.444,06)	(7.689.323.323,26)
37 Badan Kepegawaian Daerah	(7.030.487.427,12)	(6.610.098.760,51)



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(5.989.850.150,50)	(5.489.310.451,02)
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	(1.373.640.099,93)	(1.096.272.099,93)
40 Badan Penghubung	(1.150.896.902,00)	(1.118.345.860,33)
41 Inspektorat	(2.422.528.167,99)	(2.304.335.126,30)
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.722.191.998,98)	(1.627.587.142,73)
Jumlah	(1.521.619.420.906,72)	(1.361.784.543.489,28)

5.3.1.3.7.1.11 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi (Rp341.691.448,66)

Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi sebesar (Rp341.691.448,66) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp307.946.679,80) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp33.744.768,86) atau 10,96% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(320.571.448,66)	(287.006.679,80)
2 Dinas Kesehatan	(750.000,00)	(570.000,00)
4 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(20.370.000,00)	(20.370.000,00)
Jumlah	(341.691.448,66)	(307.946.679,80)

5.3.1.3.7.1.12 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran (Rp94.442.406,65)

Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran sebesar (Rp94.442.406,65) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp77.625.635,18) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp16.816.771,47) atau 21,66% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(94.442.406,65)	(77.625.635,18)
Jumlah	(94.442.406,65)	(77.625.635,18)

5.3.1.3.7.1.13 Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (Rp343.815.672,26)

Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar (Rp343.815.672,26) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp251.591.913,92) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp92.223.758,34) atau 36,66% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(296.791.752,26)	(212.405.313,92)
2 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(47.023.920,00)	(39.186.600,00)
Jumlah	(343.815.672,26)	(251.591.913,92)

5.3.1.3.7.1.14 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi (Rp14.826.000,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi sebesar (Rp14.826.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp12.708.000,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp2.118.000,00) atau 16,67% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(14.826.000,00)	(12.708.000,00)
Jumlah	(14.826.000,00)	(12.708.000,00)

5.3.1.3.7.1.15 Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja (Rp6.262.847.650,40)

Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja sebesar (Rp6.262.847.650,40) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp5.350.516.385,50) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp912.331.264,90) atau 17,05% dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(5.155.960.804,03)	(4.381.562.201,57)
2 Dinas Kesehatan	(89.357.753,33)	(50.833.333,33)
3 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(51.326.000,00)	(50.753.083,33)
4 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(18.450.000,00)	(11.070.000,00)
5 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(526.500.000,00)	(526.500.000,00)
6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(35.590.000,00)	(30.350.600,00)
7 Dinas Ketahanan Pangan	(16.023.333,33)	(14.773.333,33)
8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(10.468.500,00)	(5.599.500,00)
9 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(120.455.316,39)	(81.388.727,29)
10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(11.868.749,99)	(8.381.249,99)
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(152.634.693,33)	(115.304.356,66)
12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(212.500,00)	-
13 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
14 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(54.000.000,00)	(54.000.000,00)
Jumlah	(6.262.847.650,40)	(5.350.516.385,50)

5.3.1.3.7.1.16 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga (Rp96.705.645.185,99)

Akumulasi Penyusutan Alat Peraga sebesar (Rp96.705.645.185,99) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp77.235.213.445,86) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp19.470.431.740,13) atau 25,21% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(95.561.442.389,15)	(76.348.482.109,75)
2 Dinas Kesehatan	(18.059.610,83)	(12.106.180,83)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(577.275.057,56)	(443.687.288,36)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(150.749.351,85)	(87.100.313,62)
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	(1.316.250,00)	(101.250,00)
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(18.224.800,00)	(15.558.400,00)
7 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(8.583.333,33)	(4.463.333,33)
8 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(41.593.749,96)	(31.611.249,96)
9 Dinas Sosial	(107.503.333,33)	(106.043.333,33)
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(220.897.309,98)	(186.059.986,68)
Jumlah	(96.705.645.185,99)	(77.235.213.445,86)

5.3.1.3.7.1.17 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi (Rp2.906.653.249,64)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi sebesar (Rp2.906.653.249,64) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.139.616.182,92) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp767.037.066,72) atau 35,85% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(2.116.289.714,20)	(1.651.153.047,48)
2 Dinas Kesehatan	(12.421.875,00)	(9.609.375,00)
3 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(83.125.000,00)	(71.250.000,00)
4 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(52.765.041,67)	(44.538.291,67)
5 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(28.750,00)	-
6 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(69.750.000,00)	(58.125.000,00)
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(336.010.031,25)	(170.048.031,25)
8 Dinas Perhubungan	(74.958.000,00)	-
9 Dinas Kelautan dan Perikanan	(9.749.025,02)	(6.648.875,02)
10 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(45.823.000,00)	(39.454.500,00)
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(70.732.812,50)	(53.789.062,50)
12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(35.000.000,00)	(35.000.000,00)
Jumlah	(2.906.653.249,64)	(2.139.616.182,92)

5.3.1.3.7.1.18 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu (Rp26.612.218.352,84)

Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu sebesar (Rp26.612.218.352,84) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp22.923.607.162,99) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp3.688.611.189,85) atau 16,09% dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(191.317.892,08)	(157.720.058,93)
2 RSUD dr. Rehatta Jepara	(7.540.421,85)	(4.955.134,35)
3 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(1.484.375,00)	(296.875,00)
4 Dinas Perhubungan	(26.258.780.491,59)	(22.651.462.689,04)
5 Dinas Komunikasi dan Informatika	(59.637.000,00)	(58.437.000,00)
6 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(35.489.255,85)	(13.074.989,00)
7 Dinas Kelautan dan Perikanan	(7.572.916,67)	(6.197.916,67)
8 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(5.031.000,00)	(4.192.500,00)
9 Sekretariat DPRD	(1.968.750,00)	(787.500,00)
10 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(12.499.999,80)	-
11 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(30.896.250,00)	(26.482.500,00)
Jumlah	(26.612.218.352,84)	(22.923.607.162,99)

5.3.1.3.7.1.19 Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga (Rp56.097.707.574,04)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga sebesar (Rp56.097.707.574,04) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp45.600.212.158,48) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp10.497.495.415,56) atau 23,02% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(16.480.842.844,89)	(15.259.490.295,97)
2 Dinas Kesehatan	(83.218.366,66)	(79.468.366,66)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(28.217.083,33)	(25.800.000,00)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(20.079.600,00)	(20.079.600,00)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(16.502.083,33)	(13.789.583,33)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(230.871.794,42)	(229.713.061,92)
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(86.900.000,00)	(86.900.000,00)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(34.957.395,84)	(28.283.645,84)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(28.600.000,00)	(24.263.020,83)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
11 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(10.100.000,00)	(10.100.000,00)
12 Satuan Polisi Pamong Praja	(27.550.000,00)	(27.550.000,00)
13 Dinas Sosial	(59.563.750,00)	(57.713.750,00)
14 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(5.000.000,00)	(4.895.833,33)
15 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(115.862.500,00)	(106.455.208,33)
16 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(36.866.480.573,06)	(27.687.598.513,93)
17 Dinas Kelautan dan Perikanan	(229.473.887,50)	(200.484.000,00)
18 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(23.750.000,00)	(23.750.000,00)
19 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(25.263.350,00)	(25.263.350,00)
20 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(76.516.250,00)	(74.528.750,00)
21 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(200.906.250,00)	(200.906.250,00)
22 Sekretariat Daerah	(260.204.041,68)	(229.081.125,01)
23 Sekretariat DPRD	(8.708.333,33)	(5.958.333,33)
24 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(694.752.000,00)	(694.752.000,00)
25 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(13.985.000,00)	(13.985.000,00)
26 Badan Kepegawaian Daerah	(170.542.750,00)	(170.542.750,00)
27 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(273.959.720,00)	(273.959.720,00)
28 Badan Penghubung	(22.900.000,00)	(22.900.000,00)
Jumlah	(56.097.707.574,04)	(45.600.212.158,48)

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp2.837.792.215.131,30)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp2.837.792.215.131,30) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.651.567.872.774,62) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp186.224.342.356,68) atau 7,02% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.795.985.412.150,28)	(2.614.011.397.421,00)
2 Akumulasi Penyusutan Monumen	(6.959.561.248,16)	(6.325.079.285,82)
3 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(760.947.100,67)	(700.304.282,00)



4	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(34.086.294.632,19)	(30.531.091.785,80)
	Jumlah	(2.837.792.215.131,30)	(2.651.567.872.774,62)

Rincian mutasi akumulasi penyusutan gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja akumulasi penyusutan terlampir)**

Saldo Awal **2.651.567.872.774,62**

Penambahan

Hibah	116.484.130,82
Mutasi Masuk	6.051.196.199,90
Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap	12.019.870.371,96
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	395.085.929,69
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel	7.500.000,00
Koreksi Tambah	31.452.378.011,33
Jumlah	50.042.514.643,70

Berkurang

Mutasi Keluar	6.051.196.199,90
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	3.331.354.570,11
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	2.218.597.274,51
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	2.835.939.470,59
Koreksi Kurang	61.598.390.503,12
Jumlah	76.035.478.018,23

Beban Penyusutan **212.217.305.731,21**

Saldo Akhir **2.837.792.215.131,30**

5.3.1.3.7.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (Rp2.795.985.412.150,28)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar (Rp2.795.985.412.150,28) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.614.011.397.421,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp181.974.014.729,28) atau 6,96% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.509.071.568.904,08)	(1.434.630.660.759,23)
2 Dinas Kesehatan	(32.032.587.048,37)	(29.322.462.735,11)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(108.468.115.181,81)	(92.147.013.049,82)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(90.062.738.719,75)	(82.627.518.484,73)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(44.844.846.715,67)	(41.423.622.343,16)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(23.137.363.823,09)	(21.317.490.363,37)
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(20.868.109.493,34)	(18.586.687.670,76)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(20.375.588.581,82)	(18.086.001.578,35)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(19.344.649.836,75)	(17.477.818.642,63)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(21.386.853.070,78)	(17.631.663.037,96)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(12.961.148.503,10)	(11.142.735.325,11)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(3.808.920.124,41)	(3.750.405.283,32)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	(5.838.142.031,83)	(5.436.303.064,42)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.393.678.929,44)	(2.206.260.735,10)
15 Dinas Sosial	(94.032.327.363,81)	(89.457.802.094,67)
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(23.805.704.115,67)	(22.655.909.478,73)
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(10.619.287.320,07)	(10.214.993.347,44)
18 Dinas Ketahanan Pangan	(4.169.111.237,93)	(4.140.783.580,01)
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(21.632.984.938,68)	(18.994.923.178,60)
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(4.292.948.118,69)	(4.078.801.931,08)
21 Dinas Perhubungan	(47.212.695.386,14)	(41.853.339.787,77)
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.303.548.157,72)	(3.925.283.934,63)
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(12.859.845.430,50)	(12.396.602.485,77)
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(4.252.309.308,30)	(4.042.833.355,56)
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(77.751.357.586,86)	(62.335.013.865,19)
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(13.210.940.079,58)	(12.639.897.270,48)
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	(38.882.377.162,57)	(36.178.905.152,16)
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(27.233.118.863,23)	(25.473.549.387,38)
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(61.308.845.277,49)	(57.976.058.894,09)
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(15.279.875.242,19)	(10.482.039.794,52)
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(33.734.194.635,67)	(31.046.265.345,02)
32 Sekretariat Daerah	(57.071.987.014,78)	(55.555.983.791,78)
33 Sekretariat DPRD	(30.758.930.679,16)	(25.826.891.990,92)
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(10.085.117.541,80)	(9.610.463.096,25)
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(85.825.516.317,91)	(82.528.150.816,93)
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(138.068.624.253,53)	(134.034.228.315,54)
37 Badan Kepegawaian Daerah	(4.684.476.120,36)	(4.729.686.100,59)
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(35.766.357.138,72)	(34.635.015.028,70)
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	(5.317.849.153,75)	(5.112.035.538,06)
40 Badan Penghubung	(8.743.887.256,81)	(8.302.209.020,61)
41 Inspektorat	(7.510.951.228,52)	(7.161.106.065,72)
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.975.934.255,60)	(2.835.981.699,73)
Jumlah	(2.795.985.412.150,28)	(2.614.011.397.421,00)

5.3.1.3.7.2.2 Akumulasi Penyusutan Monumen

(Rp6.959.561.248,16)

Akumulasi Penyusutan Monumen sebesar (Rp6.959.561.248,16) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.325.079.285,82) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp634.481.962,34) atau 10,03% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.005.291.970,78)	(2.897.204.402,79)
2 Dinas Kesehatan	(31.715.640,00)	(28.832.400,00)
3 RSUD dr. Rehatta Jepara	(49.798.200,00)	(44.479.980,00)
4 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(195.372.624,00)	(179.091.572,00)
5 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(690.000,00)	(660.000,00)
6 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(87.632.920,00)	(81.912.740,00)
7 Dinas Sosial	(17.067.788,99)	(16.309.500,00)
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(71.992.570,00)	(69.192.570,00)
9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(73.371.125,87)	(66.906.801,55)
10 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(664.930.867,60)	(587.948.351,20)
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(3.432.000,00)	(3.276.000,00)
12 Sekretariat DPRD	(1.790.751.937,72)	(1.439.805.217,88)
13 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(186.325.700,00)	(169.387.000,00)
14 Badan Penghubung	(781.187.903,20)	(740.072.750,40)
Jumlah	(6.959.561.248,16)	(6.325.079.285,82)



5.3.1.3.7.2.3 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara (Rp760.947.100,67)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara sebesar (Rp760.947.100,67) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp700.304.282,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp60.642.818,67) atau 8,66% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(234.507.417,00)	(216.212.392,00)
2 Dinas Perhubungan	(54.121.454,10)	(46.389.817,80)
3 Dinas Kelautan dan Perikanan	(50.581.770,83)	(46.378.068,97)
4 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(415.736.458,74)	(386.014.003,23)
5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(4.830.000,00)	(4.140.000,00)
6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.170.000,00)	(1.170.000,00)
Jumlah	(760.947.100,67)	(700.304.282,00)

5.3.1.3.7.2.4 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti (Rp34.086.294.632,19)

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar (Rp34.086.294.632,19) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp30.531.091.785,80) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp3.555.202.846,39) atau 11,64% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(16.697.641.415,63)	(14.730.802.168,66)
2 Dinas Kesehatan	(1.181.306.809,43)	(1.082.643.474,63)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(190.861.867,43)	(176.863.600,00)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(203.280.000,00)	(193.116.000,00)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(148.434.575,21)	(123.289.888,37)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(1.177.921.758,00)	(1.089.699.840,00)
7 RSJD Dr. Aminio Gondhohutomo Semarang	(45.723.080,00)	(42.205.920,00)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(12.276.750,00)	(2.455.350,00)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(570.753.812,24)	(537.739.425,66)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(3.076.625.207,96)	(50.983.225,84)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(33.481.920,00)	(30.691.760,00)
12 Dinas Sosial	(515.407.411,00)	(436.461.152,69)
13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(187.028.085,33)	(168.956.568,33)
14 Dinas Ketahanan Pangan	(122.653.200,00)	(113.360.000,00)
15 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(385.087.135,00)	(344.950.615,00)
16 Dinas Perhubungan	(135.980.523,94)	(108.340.071,43)
17 Dinas Komunikasi dan Informatika	(48.932.165,27)	(33.062.273,83)
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(13.369.938,00)	(10.575.282,00)
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(24.204.400,00)	(22.004.000,00)
20 Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(999.612.837,78)	(813.836.440,12)
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(113.560.510,48)	(106.428.774,82)
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.428.129.369,00)	(1.306.485.119,23)
23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(1.081.848.445,94)	(991.737.404,93)
24 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(3.707.587.379,45)	(3.436.102.756,44)
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(65.484.795,00)	(55.712.385,00)
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(2.449.308,33)	(1.318.858,33)
27 Sekretariat DPRD	(100.984.501,33)	(92.638.085,33)
28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(32.034.800,00)	(30.150.400,00)
29 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(344.529.060,80)	(308.714.410,16)
30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(667.624.875,64)	(3.357.945.252,00)
31 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(719.145.894,00)	(682.407.683,00)
32 Inspektorat	(4.006.800,00)	(3.720.600,00)
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(48.326.000,00)	(45.693.000,00)
Jumlah	(34.086.294.632,19)	(30.531.091.785,80)

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rp9.723.664.295.695,34)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp9.723.664.295.695,34) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp9.110.161.814.096,63) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp613.502.481.598,71) atau 6,73% dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Jalan dan Jembatan	(9.042.719.943.626,81)	(8.504.768.071.702,56)
2 Bangunan Air	(603.708.025.614,00)	(531.373.868.859,72)
3 Instalasi	(36.096.442.614,90)	(39.137.469.578,15)
4 Jaringan	(41.139.883.839,63)	(34.882.403.956,20)
Jumlah	(9.723.664.295.695,34)	(9.110.161.814.096,63)

Rincian mutasi akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja akumulasi penyusutan terlampir)**

Saldo Awal 9.110.161.814.096,63

Penambahan

Hibah	1.408.520.086,52
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap	68.649.450,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	4.499.950.163,66
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Tambah	79.222.004.316,01
Jumlah	85.199.124.016,19

Berkurang

Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	11.222.470.990,51
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	56.208.762.381,79
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Kurang	64.675.396.432,84
Jumlah	132.106.629.805,14

Beban Penyusutan 660.409.987.387,66

Saldo Akhir 9.723.664.295.695,34

5.3.1.3.7.3.1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (Rp9.042.719.943.626,81)

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar (Rp9.042.719.943.626,81) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp8.504.768.071.702,56) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp537.951.871.924,25) atau 6,33% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(16.428.669.370,28)	(15.698.215.787,67)
2 Dinas Kesehatan	(57.825.000,00)	(57.825.000,00)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(133.343.140,00)	(114.294.120,00)
4 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(49.950.000,00)	(49.950.000,00)
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	(3.904.927.767,51)	(3.813.982.875,00)
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(2.650.715.000,00)	(2.643.926.500,00)
7 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(1.442.856.685,33)	(766.086.038,13)
8 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(119.263.000,00)	(119.263.000,00)
9 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(8.917.928.196.851,13)	(8.389.274.039.044,54)
10 Dinas Sosial	(52.859.000,00)	(52.859.000,00)
11 Dinas Ketahanan Pangan	(164.387.000,00)	(164.387.000,00)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(11.951.612.625,84)	(10.540.134.183,34)
13 Dinas Perhubungan	(16.722.618.322,00)	(14.465.656.524,50)
14 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(5.919.237.725,10)	(4.102.311.114,58)
15 Dinas Kelautan dan Perikanan	(26.924.005.028,00)	(25.371.936.834,31)
16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(3.487.756.215,20)	(3.252.876.902,37)
17 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(5.190.793.426,42)	(4.689.400.308,12)
18 Sekretariat DPRD	(387.415.000,00)	(387.415.000,00)
19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(26.900.626.970,00)	(26.900.626.970,00)
20 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.302.885.500,00)	(2.302.885.500,00)
Jumlah	(9.042.719.943.626,81)	(8.504.768.071.702,56)

5.3.1.3.7.3.2 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Rp603.708.025.614,00)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air sebesar (Rp603.708.025.614,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp531.373.868.859,72) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp72.334.156.754,28) atau 13,61% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(5.801.972.776,32)	(5.427.973.503,36)
2 Dinas Kesehatan	(315.952.700,00)	(292.330.066,67)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(633.714.211,67)	(571.871.946,73)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(175.000.000,00)	(175.000.000,00)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(310.505.525,51)	(280.652.317,57)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(1.426.222.748,33)	(1.333.463.333,33)
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(49.264.500,00)	(45.980.200,00)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(54.721.000,00)	(51.530.475,00)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(417.121.291,67)	(381.670.270,83)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(55.365.060.914,31)	(52.262.682.433,83)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(455.635.098.836,98)	(400.800.305.617,67)
12 Satuan Polisi Pamong Praja	(37.146.666,67)	(31.840.000,00)
13 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(46.725.000,00)	(44.500.000,00)
14 Dinas Sosial	(1.617.733.451,69)	(1.532.958.487,69)
15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(33.165.350,00)	(31.911.100,00)
16 Dinas Ketahanan Pangan	(9.712.500,00)	(9.065.000,00)
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(1.860.284.117,64)	(1.641.564.551,16)
18 Dinas Perhubungan	(1.770.310.311,63)	(1.530.157.600,22)
19 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(79.407.455,00)	(74.010.450,00)
20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(34.317.600,00)	(31.457.800,00)
21 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(1.452.509.791,22)	(1.049.105.368,67)
22 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(107.814.516,13)	(101.983.064,52)
23 Dinas Kelautan dan Perikanan	(61.566.511.165,91)	(50.195.288.348,43)
24 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(999.312.725,98)	(886.996.470,79)
25 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(5.498.824.371,57)	(4.977.774.615,93)
26 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(7.324.508.936,32)	(6.579.379.452,53)
27 Sekretariat Daerah	(24.857.680,50)	(22.786.207,13)
28 Sekretariat DPRD	(794.905.441,67)	(771.743.683,34)
29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(43.213.821,11)	(36.826.166,44)
30 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(42.991.666,67)	(36.850.000,00)
31 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(179.138.539,50)	(164.210.327,88)
Jumlah	(603.708.025.614,00)	(531.373.868.859,72)

5.3.1.3.7.3.3 Akumulasi Penyusutan Instalasi (Rp36.096.442.614,90)

Akumulasi Penyusutan Instalasi sebesar (Rp36.096.442.614,90) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp39.137.469.578,15) mengalami **penurunan** sebesar Rp3.041.026.963,25 atau (7,77%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(5.637.685.894,01)	(5.215.522.381,74)
2 Dinas Kesehatan	(1.416.077.074,31)	(1.300.649.726,30)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(7.450.347.229,46)	(6.010.614.852,19)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(124.310.646,08)	(110.952.952,50)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(6.900.788.572,30)	(6.362.567.569,41)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(1.402.969.520,73)	(1.271.836.806,05)
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(2.030.701.811,12)	(1.998.563.877,79)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(2.000.417.429,18)	(1.778.630.137,73)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(1.887.582.231,27)	(1.638.740.686,22)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(93.629.282,50)	(62.600.272,50)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(223.770.396,27)	(207.601.150,46)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(1.060.106,67)	(81.546,67)
13 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(34.287.375,00)	(32.001.550,00)
14 Dinas Sosial	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)
15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(278.512.583,98)	(254.919.172,31)
16 Dinas Ketahanan Pangan	(5.437.500,00)	(5.075.000,00)
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(799.314.919,47)	(763.605.929,14)
18 Dinas Perhubungan	(98.233.499,99)	(2.729.635.784,47)
19 Dinas Komunikasi dan Informatika	(234.687.869,79)	(188.740.765,63)
20 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(12.624.678,75)	(11.783.033,50)
21 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(13.413.400,00)	(12.194.000,00)
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	(951.460.597,89)	(871.537.613,00)
23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(710.553.393,80)	(625.940.099,79)
24 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(203.509.173,46)	(146.550.868,83)
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(2.738.315.962,46)	(6.719.548.773,59)
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(22.370.220,00)	(20.522.527,50)
27 Sekretariat DPRD	(170.633.636,25)	(146.257.402,50)
28 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(106.100.786,00)	(99.702.446,13)
29 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(200.919.302,08)	(180.869.507,53)
30 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(331.727.522,08)	(309.561.666,67)
31 Badan Penghubung	-	(45.661.478,00)
Jumlah	(36.096.442.614,90)	(39.137.469.578,15)

5.3.1.3.7.3.4 Akumulasi Penyusutan Jaringan (Rp41.139.883.839,63)

Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar (Rp41.139.883.839,63) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp34.882.403.956,20) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp6.257.479.883,43) atau 17,94% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(6.992.044.730,91)	(6.459.321.887,07)
2 Dinas Kesehatan	(221.846.084,34)	(199.666.988,84)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(81.619.827,35)	(68.297.746,33)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(1.374.979.537,50)	(1.237.628.605,00)
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	(585.230.994,84)	(511.060.758,00)
6 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(531.796.255,00)	(486.758.979,50)
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(6.938.018,75)	(533.693,75)
8 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(19.382.021.924,72)	(11.730.680.104,55)
9 Dinas Sosial	(383.333,33)	(366.666,67)
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(4.647.360,00)	(4.066.440,00)
11 Dinas Ketahanan Pangan	(47.342.286,67)	(44.951.993,34)
12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(510.217.393,34)	(463.562.232,50)
13 Dinas Perhubungan	(63.436.533,33)	(3.246.075.462,94)
14 Dinas Komunikasi dan Informatika	(29.371.265,00)	(26.521.680,00)
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.303.301,98)	(3.159.680,15)
16 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(4.996.000,00)	(4.371.500,00)
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(12.942.500,00)	(12.525.000,00)
18 Dinas Kelautan dan Perikanan	(249.708.809,03)	(230.841.159,47)
19 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(288.274.515,70)	(261.465.621,34)
20 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(325.442.083,34)	(294.274.374,98)
21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(9.760.340.844,39)	(8.997.833.064,80)
22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(125.256.974,16)	(118.355.556,67)
23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(422.119.700,00)	(385.340.056,25)
24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(69.584.165,95)	(53.725.979,05)
25 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(46.039.400,00)	(41.018.725,00)
Jumlah	(41.139.883.839,63)	(34.882.403.956,20)



5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Rp3.661.294.620,40)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp3.661.294.620,40) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.294.389.711,32) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp366.904.909,08) atau 11,14% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	(3.661.294.620,40)	(3.294.389.711,32)
2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
Jumlah	(3.661.294.620,40)	(3.294.389.711,32)

Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja akumulasi penyusutan terlampir)**

Saldo Awal 3.294.389.711,32

Penambahan

Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk antar Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	4.774.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Tambah	3.637.333,33
Jumlah	8.411.333,33

Berkurang

Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Kurang	-
Jumlah	-

Beban Penyusutan 358.493.575,75

Saldo Akhir 3.661.294.620,40

5.3.1.3.7.4.1 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (Rp3.661.294.620,40)

Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar (Rp3.661.294.620,40) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.294.389.711,32) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp366.904.909,08) atau 11,14% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(2.980.376.120,40)	(2.615.271.211,32)
2 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(18.000.000,00)	(18.000.000,00)
3 Satuan Polisi Pamong Praja	(500.219.500,00)	(500.219.500,00)
4 Dinas Sosial	(60.035.000,00)	(58.235.000,00)



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
5 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(77.164.000,00)	(77.164.000,00)
6 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(25.500.000,00)	(25.500.000,00)
Jumlah	(3.661.294.620,40)	(3.294.389.711,32)

5.3.1.5 Aset Lainnya

Rp1.856.864.727.740,53

Aset Lainnya sebesar Rp1.856.864.727.740,53 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.146.938.213.796,85 mengalami **penurunan** sebesar (Rp290.073.486.056,32) atau (13,51%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	96.000.000,00
2 Aset Tak Berwujud	50.701.186.289,00	45.259.342.410,00
3 Aset Lain-lain	2.878.340.281.412,00	3.160.983.940.233,00
4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(42.827.396.148,62)	(36.070.409.125,26)
5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.029.351.329.915,85)	(1.023.416.071.844,89)
6 Kas yang Dibatasi Penggunaannya	1.986.104,00	85.412.124,00
7 Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	-	-
Jumlah	1.856.864.727.740,53	2.146.938.213.796,85

Rincian mutasi aset lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset lainnya terlampir)**

Saldo Awal **3.206.339.282.643,00**

Penambahan

Belanja Modal	1.360.394.370,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	534.832.730,00
Hibah	179.005.000,00
Hasil Usaha Mandiri	7.500.000
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	238.750.408.441,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	5.304.434.517,00
Jumlah	246.136.575.058,00

Berkurang

Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	14.871.495.837,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Penjualan	115.049.420.687,00
Hibah	94.404.688.476,00
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	299.108.785.000,00
Jumlah	523.434.390.000,00

Saldo Akhir **2.929.041.467.701,00**



Penambahan Aset Lainnya yang bersumber dari belanja modal senilai Rp1.360.394.370,00, termasuk penambahan yang berasal dari Belanja Modal Non Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No.	SKPD	Nilai Perolehan Aset Tetap	Belanja Modal pada LRA	Pencatatan pada Neraca
1.	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	Rp41.625.000,00	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud)
	TOTAL	Rp41.625.000,00		

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp96.000.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp96.000.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Sewa	-	96.000.000,00
Jumlah	-	96.000.000,00

5.3.1.5.1.1 Sewa Rp0,00

Sewa sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp96.000.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp96.000.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	96.000.000,00
Jumlah	-	96.000.000,00

5.3.1.5.2 Aset Tak Berwujud Rp50.701.186.289,00

Aset Tak Berwujud sebesar Rp50.701.186.289,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45.259.342.410,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.441.843.879,00 atau 12,02% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Goodwill	-	-
2 Lisensi dan Franchise	332.630.000,00	327.130.000,00
3 Hak Cipta	-	-
4 Hak Paten	-	-
5 Software	46.805.682.022,00	41.520.038.143,00
6 Kajian	3.224.419.360,00	3.224.419.360,00
7 Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
8 Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
9 Aset Tidak Berwujud Lainnya	338.454.907,00	187.754.907,00
Jumlah	50.701.186.289,00	45.259.342.410,00

5.3.1.5.2.1 Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise Rp332.630.000,00

Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise sebesar Rp332.630.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp327.130.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.500.000,00 atau 1,68% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Kesehatan	7.950.000,00	2.450.000,00
2 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	319.680.000,00	319.680.000,00
3 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.000.000,00	5.000.000,00
Jumlah	332.630.000,00	327.130.000,00



5.3.1.5.2.2 Aset Tidak Berwujud-Software

Rp46.805.682.022,00

Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp46.805.682.022,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp41.520.038.143,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.285.643.879,00 atau 12,73% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.796.691.805,00	3.274.210.305,00
2 Dinas Kesehatan	3.514.025.250,00	3.172.786.350,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	4.776.375.378,00	4.776.375.378,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	749.632.740,00	749.632.740,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.340.090.000,00	1.340.090.000,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	3.541.151.000,00	3.524.151.000,00
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.630.654.500,00	1.589.029.500,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	2.168.846.409,00	2.168.846.409,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.428.312.469,00	1.423.192.169,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	668.696.600,00	598.461.600,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	647.181.500,00	416.748.500,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.391.045.490,00	1.189.065.520,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	318.425.000,00	189.500.000,00
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.000.000,00	45.000.000,00
15 Dinas Sosial	162.650.500,00	162.650.500,00
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.111.382.940,00	1.046.970.940,00
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	308.320.000,00	404.194.000,00
18 Dinas Ketahanan Pangan	444.022.000,00	414.385.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	214.909.400,00	-
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	466.119.750,00	515.253.950,00
21 Dinas Perhubungan	388.096.450,00	164.987.850,00
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	2.344.206.099,00	1.834.786.200,00
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	262.064.000,00	262.064.000,00
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.001.224.980,00	765.815.130,00
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.492.919.150,00	1.455.385.400,00
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	322.824.480,00	193.550.000,00
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	49.300.650,00	-
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	312.173.550,00	616.990.900,00
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	361.500.400,00	134.500.000,00
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	950.571.900,00	508.013.000,00
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	435.779.040,00	415.779.040,00
32 Sekretariat Daerah	1.871.641.535,00	1.743.850.535,00
33 Sekretariat DPRD	386.301.000,00	386.301.000,00
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	168.936.700,00	45.000.000,00
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.158.526.180,00	648.552.730,00
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.965.835.500,00	1.558.018.000,00
37 Badan Kepegawaian Daerah	2.393.519.580,00	2.081.133.280,00
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	827.761.687,00	640.561.687,00
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	352.654.700,00	124.450.000,00
40 Badan Penghubung	194.050.000,00	145.550.000,00
41 Inspektorat	472.572.250,00	422.747.750,00
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	369.689.460,00	371.457.780,00
Jumlah	46.805.682.022,00	41.520.038.143,00

5.3.1.5.2.3 Aset Tidak Berwujud-Kajian

Rp3.224.419.360,00

Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar Rp3.224.419.360,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.224.419.360,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	3.035.053.360,00	3.035.053.360,00



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	189.366.000,00	189.366.000,00
Jumlah	3.224.419.360,00	3.224.419.360,00

5.3.1.5.2.4 Aset Tidak Berwujud-Lainnya **Rp338.454.907,00**

Aset Tidak Berwujud-Lainnya sebesar Rp338.454.907,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp187.754.907,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp150.700.000,00 atau 80,26% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.693.157,00	54.193.157,00
2 Dinas Kesehatan	148.200.000,00	
3 Dinas Perhubungan	133.561.750,00	133.561.750,00
Jumlah	338.454.907,00	187.754.907,00

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain **Rp2.878.340.281.412,00**

Aset Lain-Lain sebesar Rp2.878.340.281.412,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.160.983.940.233,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp282.643.658.821,00) atau (8,94%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Aset Rusak Berat/Usang	1.669.337.860.887,00	1.712.103.673.159,00
2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.209.002.420.525,00	1.448.880.267.074,00
Jumlah	2.878.340.281.412,00	3.160.983.940.233,00

5.3.1.5.3.1 Aset Rusak Berat/Usang **Rp1.669.337.860.887,00**

Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp1.669.337.860.887,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.712.103.673.159,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp42.765.812.272,00) atau (2,50%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.155.161.447.107,00	1.143.873.216.543,00
2 Dinas Kesehatan	23.838.466.306,00	26.439.405.727,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	35.995.880.496,00	36.263.702.496,00
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	94.946.007.332,00	108.920.367.799,00
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	13.152.791.717,00	16.163.770.864,00
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	5.416.335.089,00	13.085.514.972,00
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	5.590.569.609,00	8.279.734.662,00
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	13.968.664.766,00	13.945.122.469,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	12.080.584.623,00	8.211.483.136,00
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	49.986.663.641,00	51.494.622.307,00
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	18.366.686.799,00	19.426.355.702,00
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	1.192.992.110,00
13 Satuan Polisi Pamong Praja	705.823.794,00	705.823.794,00
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
15 Dinas Sosial	16.655.198.172,00	21.818.265.762,00
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.768.681.101,00	18.053.502.413,00
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	387.446.168,00	433.804.467,00
18 Dinas Ketahanan Pangan	6.555.767.583,00	5.329.562.250,00
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22.966.380.809,00	22.966.380.809,00
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	942.327.540,00	984.193.854,00
21 Dinas Perhubungan	32.041.650.749,00	35.452.077.249,00
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	4.453.295.940,00	4.061.061.940,00
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.012.758.659,00	3.030.321.159,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	704.807.500,00	2.049.467.556,00
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.759.614.646,00	18.413.344.646,00
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.867.757.155,00	2.867.757.155,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	26.092.860.718,00	26.757.435.053,00
27 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	35.170.374.461,00	37.713.006.449,00
28 Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.308.448.700,00	11.333.448.700,00
29 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.858.292.187,00	8.080.459.783,00
30 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.958.310.148,00	9.378.116.084,00
31 Sekretariat Daerah	10.703.175.758,00	2.613.787.678,00
32 Sekretariat DPRD	1.231.439.565,00	1.231.439.565,00
33 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	456.909.300,00	1.513.753.689,00
34 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	16.972.692.478,00	18.079.274.650,00
35 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.490.512.549,00	6.583.393.762,00
36 Badan Kepegawaian Daerah	324.981.400,00	324.981.400,00
37 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	599.510.452,00	709.390.000,00
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	1.051.789.976,00
40 Badan Penghubung	-	1.367.400.197,00
41 Inspektorat	332.144.811,00	162.842.915,00
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	512.601.059,00	1.741.301.417,00
Jumlah	1.669.337.860.887,00	1.712.103.673.159,00

**5.3.1.5.3.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan
dalam Operasional Pemerintah**

Rp1.209.002.420.525,00

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp1.209.002.420.525,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.448.880.267.074,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp239.877.846.549,00) atau (16,56%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.161.539.893,00	10.329.940.029,00
2 Dinas Kesehatan	8.675.125.071,00	9.981.655.344,00
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.031.360.566,00	-
4 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	190.000.000,00	-
5 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	709.797.277.696,00	589.582.987.448,00
6 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	448.099.186.573,00	448.119.286.573,00
7 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.403.401.500,00	-
8 Dinas Sosial	859.535.000,00	859.535.000,00
9 Dinas Ketahanan Pangan	3.611.294.000,00	3.653.783.251,00
10 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	700.000,00	48.317.200.000,00
11 Dinas Perhubungan	497.097.867,00	497.097.867,00
12 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	115.500.000,00	115.500.000,00
13 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	196.782.700,00	196.782.700,00
14 Dinas Kelautan dan Perikanan	6.982.800,00	6.982.800,00
15 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	279.964.000,00	429.920.000,00
16 Dinas Pertanian dan Perkebunan	6.673.173.473,00	20.347.179.176,00
17 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	461.343.000,00	461.343.000,00
18 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	304.271.654,00	304.271.654,00
19 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.637.884.732,00	315.598.364.732,00
20 Badan Penghubung	-	78.437.500,00
Jumlah	1.209.002.420.525,00	1.448.880.267.074,00

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah senilai Rp1.209.002.420.525,00 di dalamnya termasuk koreksi kekurangan *volume*, perbedaan spesifikasi, dan kelebihan pembayaran item penyambungan listrik serta uang jaminan layanan PLN dengan rincian sebagai berikut :

SKPD	Uraian Temuan	Nominal Koreksi
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Kekurangan Volume pada Preservasi Jalan Parakan - Patean/Bts. Kab. Temanggung	643.321,44
	Kekurangan Volume pada Peningkatan Jalan Bts. Kab. Boyolali-Klaten	6.351.187,03



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

SKPD	Uraian Temuan	Nominal Koreksi
	Kekurangan Volume pada Preservasi Ruas Jalan Galeh-Ngrampal	15.005.310,80
	Preservasi Jalan Buntu - Kroya - Slarang	134.660.357,62
	Kekurangan Volume pada Preservasi Jalan Bantarsari - Sidareja - Cukangleuleus	19.190.212,33
	Perbedaan Spesifikasi pada Preservasi Jalan Parakan - Patean/Bts. Kab. Temanggung	33.677.997,33
	Perbedaan Spesifikasi pada Preservasi Jalan Buntu - Kroya - Slarang	4.827.609,85
	Preservasi Jalan Bantarsari - Sidareja - Cukangleuleus	57.272.540,64
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Unit Sekolah Baru SLB N Purwokerto)	21.898.530,68
	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Unit Sekolah Baru SMAN 1 Kemalang Klaten)	19.281.260,00
	Kekurangan Volume pada Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Unit Sekolah Baru SMA NEGERI GARUNG KAB. WONOSOBO)	32.968.890,71
	Kelebihan Pembayaran Item Penyambungan Listrik dan Uang Jaminan Layanan PLN atas Pekerjaan Pembangunan USB SMAN 1 Kemalang Kab. Klaten	3.253.000,00
	Perbedaan Spesifikasi pada Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan (Unit Sekolah Baru SLB N Purwokerto)	3.503.553,54
RSUD Dr. Adhyatma	Kekurangan Volume pada Pembangunan Bunker LINAC	15.706.606,00
	Perbedaan Spesifikasi pada Pembangunan Bunker LINAC RSUD Dr. Adhyatma	1.699.538,25
RSUD Moewardi	Kekurangan Volume pada Pembangunan Gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap III	331.310.566,10
	Kelebihan Pembayaran Item Penyambungan Listrik dan Uang Jaminan Layanan PLN atas Pekerjaan Pembangunan gedung Critical Center dan Pelayanan Penunjang Tahap III pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Moewardi	700.050.000,00
TOTAL		1.401.300.482,31

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp42.827.396.148,62)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp42.827.396.148,62) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp36.070.409.125,26) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp6.756.987.023,36) atau 18,73% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	(242.054.000,00)	(172.618.000,00)
2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(40.701.924.859,95)	(34.485.418.630,76)
5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	(1.883.417.288,67)	(1.255.412.816,67)
6 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya	-	(156.959.677,83)
Jumlah	(42.827.396.148,62)	(36.070.409.125,26)

Rincian mutasi akumulasi amortisasi aset tidak berwujud terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja akumulasi amortisasi terlampir)**



Saldo Awal 36.070.409.125,26

Penambahan

Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	5.500.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Tambah	2.941.435.575,61
Jumlah	2.946.935.575,61

Berkurang

Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	564.561.008,62
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Kurang	-
Jumlah	564.561.008,62

Beban Penyusutan 4.374.612.456,37

Saldo Akhir 42.827.396.148,62

5.3.1.5.4.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise (Rp242.054.000,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise sebesar (Rp242.054.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp172.618.000,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp69.436.000,00) atau 40,23% rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Kesehatan	(7.950.000,00)	(2.450.000,00)
2 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(229.104.000,00)	(165.168.000,00)
3 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
Jumlah	(242.054.000,00)	(172.618.000,00)

5.3.1.5.4.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software (Rp40.701.924.859,95)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software sebesar (Rp40.701.924.859,95) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp34.485.418.630,76) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp6.216.506.229,19) atau 18,03% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.353.540.704,76)	(3.003.536.361,84)
2 Dinas Kesehatan	(2.539.826.188,80)	(2.144.990.238,32)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(4.458.372.192,82)	(4.205.584.503,93)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(746.388.603,00)	(733.412.055,00)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(1.339.756.666,67)	(1.335.756.666,67)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(3.078.944.210,00)	(2.723.277.533,33)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
7 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(1.616.205.535,25)	(1.568.567.958,33)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(2.168.846.409,00)	(2.168.846.409,00)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(1.428.141.792,33)	(1.423.192.169,00)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(536.447.166,67)	(383.186.430,00)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(209.075.887,50)	(85.325.125,00)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(944.630.287,43)	(715.052.201,64)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	(318.425.000,00)	(189.500.000,00)
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(24.198.717,95)	(15.814.102,56)
15 Dinas Sosial	(162.650.500,00)	(154.317.166,67)
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(819.823.638,96)	(630.940.404,43)
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(293.628.333,33)	(368.414.036,78)
18 Dinas Ketahanan Pangan	(414.878.950,00)	(414.385.000,00)
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(143.575.120,00)	-
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(358.189.066,22)	(336.682.362,50)
21 Dinas Perhubungan	(408.838.342,78)	(99.794.926,53)
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	(2.245.610.044,29)	(1.777.502.043,34)
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(232.668.041,67)	(219.100.676,28)
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(857.064.158,13)	(603.607.630,92)
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(1.267.898.243,51)	(1.053.045.909,89)
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(309.617.952,00)	(193.550.000,00)
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	(49.300.650,00)	-
28 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(284.820.097,50)	(615.940.900,00)
29 Dinas Pertanian dan Perkebunan	(205.545.565,96)	(96.583.333,33)
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(950.238.691,67)	(508.013.000,00)
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(344.227.474,45)	(277.037.141,94)
32 Sekretariat Daerah	(1.603.111.508,57)	(1.313.167.226,89)
33 Sekretariat DPRD	(365.128.451,63)	(342.031.126,14)
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(46.906.116,67)	(17.250.000,00)
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(856.618.286,10)	(347.206.494,58)
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.943.197.166,67)	(1.558.018.000,00)
37 Badan Kepegawaian Daerah	(2.023.112.746,60)	(1.577.806.504,08)
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(821.247.374,50)	(621.018.749,50)
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	(159.447.065,59)	(31.218.833,33)
40 Badan Penghubung	(134.801.556,01)	(96.157.627,12)
41 Inspektorat	(390.457.225,00)	(318.316.175,00)
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(246.523.129,96)	(218.271.606,89)
Jumlah	(40.701.924.859,95)	(34.485.418.630,76)

5.3.1.5.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian (Rp1.883.417.288,67)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar (Rp1.883.417.288,67) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.255.412.816,67) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp628.004.472,00) atau 50,02% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(1.723.792.505,34)	(1.116.781.833,34)
2 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(159.624.783,33)	(138.630.983,33)
Jumlah	(1.883.417.288,67)	(1.255.412.816,67)

5.3.1.5.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp0,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp156.959.677,83) mengalami **penurunan** sebesar Rp156.959.677,83 atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	(45.923.990,33)
2 Dinas Perhubungan	-	(111.035.687,50)
Jumlah	-	(156.959.677,83)

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp1.029.351.329.915,85)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp1.029.351.329.915,85) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.023.416.071.844,89) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp5.935.258.070,96) atau 0,58% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	(28.320.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(1.029.351.329.915,85)	(1.023.387.751.844,89)
Jumlah	(1.029.351.329.915,85)	(1.023.416.071.844,89)

Rincian mutasi akumulasi penyusutan aset lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja akumulasi penyusutan terlampir)**

Saldo Awal	1.023.416.071.844,89
Penambahan	
Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	140.356.283.690,49
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	564.561.008,62
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Tambah	-
Jumlah	140.920.844.699,11
Berkurang	
Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	6.345.383.663,67
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Penjualan	105.075.194.055,28
Hibah	28.472.639.454,73
Koreksi Kurang	324.785.000,00
Jumlah	140.218.002.173,68
Beban Penyusutan	5.232.415.545,53
Saldo Akhir	1.029.351.329.915,85

5.3.1.5.5.1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp0,00

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp28.320.000,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp28.320.000,00 atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	-	(28.320.000,00)
2 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	-	-
3 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	-
4 Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-	-
Jumlah	-	(28.320.000,00)

5.3.1.5.5.1.1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa **Rp0,00**

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp28.320.000,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp28.320.000,00 atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	(28.320.000,00)
Jumlah	-	(28.320.000,00)

5.3.1.5.5.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain **(Rp1.029.351.329.915,85)**

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar (Rp1.029.351.329.915,85) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.023.387.751.844,89) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp5.963.578.070,96) atau 0,58% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(875.757.059.892,23)	(928.718.796.695,39)
2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(153.594.270.023,62)	(94.668.955.149,50)
Jumlah	(1.029.351.329.915,85)	(1.023.387.751.844,89)

5.3.1.5.5.2.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang **(Rp875.757.059.892,23)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar (Rp875.757.059.892,23) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp928.718.796.695,39) mengalami **penurunan** sebesar Rp52.961.736.803,16 atau (5,70%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(439.747.607.101,10)	(445.636.035.140,01)
2 Dinas Kesehatan	(21.037.015.601,35)	(23.645.925.914,27)
3 RSUD Dr Moewardi Surakarta	(35.572.771.496,00)	(35.614.283.906,00)
4 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(93.845.606.041,84)	(107.477.783.720,09)
5 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(13.152.791.717,00)	(16.009.808.956,08)
6 RSUD dr. Rehatta Jepara	(2.461.368.315,47)	(10.130.548.198,47)
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(5.579.746.275,71)	(7.624.602.065,84)
8 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(12.575.977.814,84)	(12.552.435.517,84)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(12.077.534.248,00)	(8.211.483.136,00)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(33.908.487.978,17)	(35.215.473.524,17)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(4.366.824.241,28)	(5.407.567.144,28)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	(1.192.992.110,00)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	(690.769.794,00)	(690.769.794,00)
14 Dinas Sosial	(12.314.666.922,35)	(17.087.771.769,37)
15 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(15.618.816.987,08)	(17.902.323.632,41)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(386.047.143,29)	(433.729.467,00)
17	Dinas Ketahanan Pangan	(4.996.911.193,14)	(3.770.705.860,14)
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(22.423.275.454,53)	(22.423.275.454,53)
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(821.858.272,67)	(868.940.786,67)
20	Dinas Perhubungan	(26.586.946.592,79)	(29.997.373.092,79)
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.451.474.037,84)	(4.059.240.037,84)
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(2.949.755.349,00)	(2.967.317.849,00)
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(703.644.000,00)	(2.048.304.056,00)
24	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(12.443.362.612,12)	(13.911.726.140,08)
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(2.867.757.155,00)	(2.867.757.155,00)
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	(19.121.242.157,56)	(19.785.816.492,56)
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(21.012.589.099,25)	(21.551.623.175,76)
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(10.612.277.851,71)	(10.637.277.851,71)
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(4.597.157.624,66)	(5.943.331.292,68)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(4.370.760.968,98)	(8.598.089.067,76)
32	Sekretariat Daerah	(9.662.640.214,00)	(2.579.564.303,00)
33	Sekretariat DPRD	(1.225.397.898,33)	(1.225.397.898,33)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(453.073.931,25)	(1.509.751.653,58)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(16.940.986.747,89)	(18.049.723.919,89)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(4.439.313.382,03)	(6.298.582.225,24)
37	Badan Kepegawaian Daerah	(324.981.400,00)	(324.981.400,00)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(599.510.452,00)	(424.785.200,00)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	(1.051.789.976,00)
40	Badan Penghubung	-	(1.117.933.529,00)
41	Inspektorat	(303.510.761,00)	(134.208.865,00)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(512.601.059,00)	(1.737.765.417,00)
	Jumlah	(875.757.059.892,23)	(928.718.796.695,39)

5.3.1.5.5.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah **(Rp153.594.270.023,62)**

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar (Rp153.594.270.023,62) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp94.668.955.149,50) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp58.925.314.874,12) atau 62,24% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.576.675.435,15)	(1.682.874.478,79)
2	Dinas Kesehatan	(6.669.345.693,25)	(5.982.189.923,34)
3	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(190.000.000,00)	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(129.921.300.411,33)	(74.193.306.066,95)
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(234.980.760,00)	(262.671.200,00)
6	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.403.401.500,00)	-
7	Dinas Ketahanan Pangan	(3.611.294.000,00)	(3.632.538.625,50)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(700.000,00)	(700.000,00)
9	Dinas Perhubungan	(348.797.003,34)	(338.855.046,00)
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(115.500.000,00)	(115.500.000,00)
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(95.639.311,11)	(91.593.575,56)
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	(6.982.800,00)	(6.982.800,00)
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(76.592.080,00)	(101.744.009,60)
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(5.200.613.580,00)	(5.200.613.580,00)
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(138.688.829,44)	(129.991.424,32)
16	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(302.171.654,00)	(302.171.654,00)
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.701.586.966,00)	(2.595.847.765,44)



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
18 Badan Penghubung	-	(31.375.000,00)
Jumlah	(153.594.270.023,62)	(94.668.955.149,50)

5.3.1.5.6 Kas Yang Dibatasi Penggunaannya

Rp1.986.104,00

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp1.986.104,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp85.412.124,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp83.426.020,00) atau (97,67)% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.986.104,00	24.843.666,00
2 Sekretariat Daerah	-	60.568.458,00
Jumlah	1.986.104,00	85.412.124,00

Kas yang dibatasi penggunaannya Provinsi Jawa Tengah tersebut, belum termasuk di dalamnya Kas yang dibatasi penggunaannya atas jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pemegang ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Surat Ijin Penambangan Batuan (SIPB) wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang ditempatkan pada bank pemerintah. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dan Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang. Rincian jaminan kesungguhan eksplorasi, jaminan reklamasi, dan jaminan pascatambang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Kegiatan Pertambangan terdiri dari :

Cabang Dinas	Nominal Jaminan
Cabang Dinas Kendeng Muria	232.447.500,00
Cabang Dinas Kendeng Selatan	379.037.370,00
Cabang Dinas Merapi	445.000.000,00
Cabang Dinas Slamet Selatan	376.283.000,00
Cabang Dinas Slamet Utara	246.000.000,00
Cabang Dinas Serayu Selatan	220.000.000,00
Cabang Dinas Serayu Tengah	266.883.100,00
Cabang Dinas Serayu Utara	50.000.000,00
Cabang Dinas Sewu Lawu	661.419.000,00
Cabang Dinas Semarang Demak	330.000.000,00
Cabang Dinas Solo	90.000.000,00
Cabang Dinas Ungaran Telomoyo	26.814.500,00
Total	3.323.884.470,00

2. Jaminan Reklamasi terdiri dari :

Cabang Dinas	Nominal Jaminan
Cabang Dinas Kendeng Muria	4.371.686.677,00
Cabang Dinas Kendeng Selatan	27.348.581.550,00



Cabang Dinas	Nominal Jaminan
Cabang Dinas Merapi	11.785.807.036,00
Cabang Dinas Slamet Selatan	31.903.108.362,00
Cabang Dinas Slamet Utara	12.566.903.747,00
Cabang Dinas Serayu Selatan	3.861.527.830,00
Cabang Dinas Serayu Tengah	4.035.965.647,00
Cabang Dinas Serayu Utara	4.947.858.443,00
Cabang Dinas Sewu Lawu	6.408.548.838,00
Cabang Dinas Semarang Demak	5.981.681.381,00
Cabang Dinas Solo	4.480.285.260,00
Cabang Dinas Ungaran Telomoyo	2.625.324.175,00
Total	120.317.278.946,00

3. Jaminan Pascatambang terdiri dari:

Cabang Dinas	Nominal Jaminan
Cabang Dinas Kendeng Muria	1.767.316.833,00
Cabang Dinas Kendeng Selatan	8.044.825.613,00
Cabang Dinas Merapi	3.303.087.022,00
Cabang Dinas Slamet Selatan	17.936.677.742,30
Cabang Dinas Slamet Utara	2.671.486.534,00
Cabang Dinas Serayu Selatan	3.107.576.553,00
Cabang Dinas Serayu Tengah	3.242.194.080,00
Cabang Dinas Serayu Utara	1.605.037.225,00
Cabang Dinas Sewu Lawu	1.002.668.700,00
Cabang Dinas Semarang Demak	1.712.792.310,00
Cabang Dinas Solo	1.140.268.735,00
Cabang Dinas Ungaran Telomoyo	830.498.850,00
Total	Rp46.364.430.197,30

5.3.1.6 Properti Investasi

Rp434.064.676.587,49

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat. Properti Investasi sebesar Rp434.064.676.587,49 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp137.289.923.157,68 mengalami **kenaikan** sebesar Rp296.774.753.429,81 atau 216,17% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Properti Investasi Tanah	419.661.492.104,00	122.427.169.604,00
2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan	35.568.943.531,00	35.568.943.531,00
3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(21.165.759.047,51)	(20.706.189.977,32)
Jumlah	434.064.676.587,49	137.289.923.157,68



Rincian mutasi properti investasi terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja properti investasi terlampir)**

Saldo Awal	157.996.113.135,00
Penambahan	
Belanja Modal	-
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	-
Hasil Usaha Mandiri	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	29.400.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Tambah	298.784.000.000,00
Jumlah	298.813.400.000,00
Berkurang	
Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Penjualan	-
Hibah	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	1.579.077.500,00
Jumlah	1.579.077.500,00
Saldo Akhir	455.230.435.635,00

5.3.1.6.1 Properti Investasi Tanah

Rp419.661.492.104,00

Properti Investasi Tanah sebesar Rp419.661.492.104,00 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp122.427.169.604,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp297.234.322.500,00 atau 242,78% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	357.900.000,00	328.500.000,00
2 Dinas Sosial	2.537.290.000,00	2.537.290.000,00
3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.172.550.000,00	1.172.550.000,00
4 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	21.287.000.000,00	21.287.000.000,00
5 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.504.850.000,00	4.504.850.000,00
6 Dinas Pertanian dan Perkebunan	33.493.071.000,00	33.493.071.000,00
7 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.841.848.000,00	1.841.848.000,00
8 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	661.500.000,00	661.500.000,00
9 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	353.805.483.104,00	56.600.560.604,00
Jumlah	419.661.492.104,00	122.427.169.604,00



5.3.1.6.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Rp35.568.943.531,00

Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.568.943.531,00 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp35.568.943.531,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Sosial	16.200.000,00	16.200.000,00
2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	25.029.925.063,00	25.029.925.063,00
3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	214.421.868,00	214.421.868,00
4 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	213.000.000,00	213.000.000,00
5 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.095.396.600,00	10.095.396.600,00
Jumlah	35.568.943.531,00	35.568.943.531,00

5.3.1.6.3 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

(Rp21.165.759.047,51)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi (Rp21.165.759.047,51) apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar (Rp20.706.189.977,32) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp459.569.070,19) atau 2,22% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Sosial	(8.424.000,00)	(8.100.000,00)
2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(15.221.462.011,99)	(14.965.194.673,16)
3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(47.172.810,96)	(42.884.373,60)
4 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(136.320.000,00)	(132.060.000,00)
5 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(5.752.380.224,56)	(5.557.950.930,56)
Jumlah	(21.165.759.047,51)	(20.706.189.977,32)

Rincian mutasi akumulasi penyusutan properti investasi terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja akumulasi penyusutan terlampir)**

Saldo Awal

20.706.189.977,32

Penambahan

Hibah	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Tambah	-
Jumlah	-

Berkurang

Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Penjualan	-
Hibah	-
Koreksi Kurang	-
Jumlah	-



Beban Penyusutan

459.569.070,19

Saldo Akhir

21.165.759.047,51

5.3.2 KEWAJIBAN

Rp652.367.704.988,43

Kewajiban sebesar Rp652.367.704.988,43 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp557.443.147.246,98 mengalami **kenaikan** sebesar Rp94.924.557.741,44 atau 17,03% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kewajiban Jangka Pendek	652.367.704.988,43	557.443.147.246,98
2 Kewajiban Jangka Panjang	-	-
Jumlah	652.367.704.988,43	557.443.147.246,98

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rp652.367.704.988,43

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp652.367.704.988,43 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp557.443.147.246,98 mengalami **kenaikan** sebesar Rp94.924.557.741,44 atau 17,03% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	310.965.408,00	28.310.064,00
2 Utang Bunga	-	-
3 Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
5 Pendapatan Dibayar Dimuka	27.846.795.618,43	34.750.163.758,98
6 Utang Belanja	608.255.159.858,00	507.205.974.758,00
7 Utang Jangka Pendek Lainnya	15.954.784.104,00	15.458.698.666,00
Jumlah	652.367.704.988,43	557.443.147.246,98

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Rp310.965.408,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp310.965.408,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.310.064,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp282.655.344,00 atau 998,43% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Utang Taspen	-	-
2 Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	-
3 Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	-	-
4 Utang Iuran Jaminan Kematian	-	-
5 Utang PPh Pusat	16.121.230,00	1.920.064,00
6 Utang PPN Pusat	36.613.175,00	-
7 Utang Taperum	-	-
8 Utang Iuran Wajib Pegawai	-	-
9 Utang Pihak Ketiga Lainnya	258.231.003,00	26.390.000,00
Jumlah	310.965.408,00	28.310.064,00

5.3.2.1.1.1 Utang PPh Pusat

Rp16.121.230,00

Utang PPh Pusat sebesar Rp16.121.230,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.920.064,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.201.166,00 atau 739,62% dengan rincian sebagai berikut :

2025 (Rp)	2024 (Rp)
-----------	-----------



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.121.230,00	75.000,00
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	18.000,00
3	Sekretariat Daerah	-	22.824,00
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	834.240,00
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	280.000,00
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	690.000,00
Jumlah		16.121.230,00	1.920.064,00

5.3.2.1.1.2 Utang PPN Pusat

Rp36.613.175,00

Utang PPN Pusat sebesar Rp36.613.175,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp36.613.175,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36.613.175,00	-
Jumlah	36.613.175,00	-

5.3.2.1.1.3 Utang Pihak Ketiga Lainnya

Rp258.231.003,00

Utang Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp258.231.003,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.390.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp231.841.003,00 atau 878,52% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	258.231.003,00	26.390.000,00
Jumlah	258.231.003,00	26.390.000,00

Adapun rincian utang pihak ketiga lainnya terdiri dari:

REKAP SISA SALDO KAS BANTUAN PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2025

NO.	NAMA SEKOLAH	SALDO	TANGGAL PENYETORAN
1	SMK NEGERI 1 KALIWUNGU	236.801.118,00	02 Januari 2026
2	SMKN 1 PURWOKERTO	11.927.032,00	10 Januari 2026
3	SMAN 1 AJIBARANG	3.017.378,00	21 Januari 2026
4	SLBN 1 DEMAK	3.267.000,00	20 Januari 2026
5	SLBN WONOGIRI	796.075,00	19 Januari 2026
6	SMK NEGERI 2 TEMANGGUNG	840.000,00	BELUM SETOR
7	SLBN KOTA MAGELANG	1.582.400,00	20 Januari 2026
	TOTAL	258.231.003,00	

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Rp27.846.795.618,43

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp27.846.795.618,43 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp34.750.163.758,98 mengalami **penurunan** sebesar (Rp6.903.368.140,56) atau (19,87%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	26.643.720.096,93	34.048.709.079,09
2 Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	1.203.075.521,50	701.454.679,89
Jumlah	27.846.795.618,43	34.750.163.758,98



5.3.2.1.2.1 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III **Rp26.643.720.096,93**

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan pendapatan yang diterima atas pelayanan rumah sakit maupun pajak kendaraan bermotor namun belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut. Adapun jumlahnya adalah sebesar Rp26.643.720.096,93 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp34.048.709.079,09 mengalami **penurunan** sebesar (Rp7.404.988.982,16) atau (21,75%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr Moewardi Surakarta	2.692.238.606,00	3.099.744.988,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	201.332.907,93	190.924.236,09
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	320.381.583,00	82.409.955,00
5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	23.429.767.000,00	30.675.629.900,00
Jumlah	26.643.720.096,93	34.048.709.079,09

Setoran kelebihan pembayaran dari Pihak III 2025 terdiri atas:

REKAP UANG TITIPAN PASIEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH

BULAN DESEMBER 2025

NO	NAMA	TAHUN	JUMLAH
1	Jasa Raharja	2025	795.597.203,00
2	Diklat dan Transfer Pasien	2025	1.568.791.403,00
3	Titipan Rawat Inap Pasien	2025	327.850.000,00
TOTAL			2.692.238.606,00

REKAP UANG TITIPAN PASIEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

BULAN DESEMBER 2025

NO.	NAMA	TAHUN	JUMLAH
1	Titipan Pasien	2025	201.332.907,93
TOTAL			201.332.907,93

REKAP UANG TITIPAN PASIEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH.PROVINSI JAWA TENGAH

BULAN DESEMBER 2025

NO	NAMA	TAHUN	JUMLAH
1	Titipan Pasien	2025	125.242.800,00
2	Diklat	2025	195.138.783,00
TOTAL			320.381.583,00

REKAPITULASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	PEMBAYARAN JATUH TEMPO 2026 DIBAYAR DI 2025
----	--------	--



	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	23.429.767.000,00
1	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan	373.384.500,00
2	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.065.085.000,00
3	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus	11.763.887.000,00
4	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus	117.787.500,00
5	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus	38.302.500,00
6	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	799.155.000,00
7	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	966.543.500,00
8	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	212.931.000,00
9	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	101.913.000,00
10	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	7.975.426.000,00
11	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	15.352.000,00
	JUMLAH	23.429.767.000,00

5.3.2.1.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa

Rp1.203.075.521,50

Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa sebesar Rp1.203.075.521,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp701.454.679,89 mengalami **kenaikan** sebesar Rp501.620.841,60 atau 71,51% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.800.000,00	
2 RSUD Dr Moewardi Surakarta	16.546.575,34	82.573.506,41
3 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	237.658.718,58	216.403.269,78
4 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	217.151.780,82	-
5 RSUD dr. Rehatta Jepara	75.332.728,23	95.687.719,59
6 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	48.000.000,00	-
7 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.685.000,00	-
8 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	567.900.718,53	306.790.184,11
Jumlah	1.203.075.521,50	701.454.679,89

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Rp608.255.159.858,00

Utang Belanja sebesar Rp608.255.159.858,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp507.205.974.758,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp101.049.185.100,00 atau 19,92% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Utang Belanja Pegawai	-	-
2 Utang Belanja Barang dan Jasa	143.483.812.221,00	91.831.715.232,00
3 Utang Belanja Bunga	-	-
4 Utang Belanja Subsidi	-	-
5 Utang Belanja Hibah	-	-
6 Utang Belanja Modal Tanah	-	-
7 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	48.931.020,00
8 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-
9 Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
10 Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
11 Utang Belanja Tidak Terduga	-	-
12 Utang Belanja Bagi Hasil	464.771.347.637,00	415.325.328.506,00
13 Utang Belanja Bantuan Keuangan	-	-
Jumlah	608.255.159.858,00	507.205.974.758,00



Utang belanja sebesar Rp608.255.159.858,00 belum termasuk utang Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD sebesar Rp131.171.931.306,30 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	NOMINAL
1	Dinas Kesehatan	
	Balkesmas Wilayah Semarang	-
	Balkesmas Wilayah Ambarawa	314.544.248,00
	Balkesmas Wilayah Magelang	93.811.164,00
	Balkesmas Wilayah Klaten	40.558.880,00
	Balkesmas Wilayah Pati	79.571.380,00
	BKIM Provinsi Jawa Tengah	699.647.778,00
	Balai Labkes dan PAK Provinsi Jawa Tengah	629.188.105,00
	Total	1.857.321.555,00
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	36.970.610.839,00
3	RSUD. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	81.434.101.928,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	3.654.579.442,00
5	RSUD dr Rehatta Jepara	2.624.688.982,30
6	RSJD. Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.554.503.230,00
7	RSJD dr. Arif Zainuddin Surakarta	1.392.986.126,00
8	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten	1.683.139.204,00
	JUMLAH	131.171.931.306,30

5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Barang dan Jasa

Rp143.483.812.221,00

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp143.483.812.221,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp91.831.715.232,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp51.652.096.989,00 atau 56,25% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr Moewardi Surakarta	135.310.679.939,00	82.314.194.859,00
2 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	5.976.784.801,00	9.194.932.933,00
3 RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	72.307.166,00	-
4 RSUD dr. Rehatta Jepara	1.708.560.381,00	30.400.715,00
5 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	178.722.510,00	202.290.923,00
6 RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	70.415.578,00	42.484.143,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	166.341.846,00	47.411.659,00
Jumlah	143.483.812.221,00	91.831.715.232,00

Adapun rincian atas utang belanja barang dan jasa tersebut antara lain:

RSUD Dr Moewardi Surakarta		
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28.909.517,00
2	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	2.207.544.654,00
3	Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	163.395.147,00
4	Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.336.300,00
5	Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	511.934.118,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

6	Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	78.033.855.736,00
7	Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	36.682.346.710,00
8	Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	630.530.643,00
9	Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.550.000,00
10	Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	24.365.400,00
11	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	11.900.000,00
12	Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi	4.029.300,00
13	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	286.197.113,00
14	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	32.000.000,00
15	Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	3.750.000,00
16	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	5.875.722,00
17	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	69.720.900,00
18	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.051.509.309,00
19	Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	14.609.700,00
20	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	610.430.319,00
21	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum	14.925.889.351,00
Total		135.310.679.939,00
RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto		
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	122.355.300,00
2	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	198.293.653,00
3	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	791.775.000,00
4	Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.771.530.993,00
5	Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.330.000,00
6	Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	1.762.500,00
7	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	89.094.611,00
8	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	7.753.470,00
9	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	74.242.675,00
10	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	843.459.377,00
11	Belanja Jasa Kantor-Langgan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	68.187.222,00
Total		5.976.784.801,00
RSUD dr. Adhyatma, MPH		
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	72.307.166,00
Total		72.307.166,00
RSUD dr. Rehatta Jepara		
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	77.693.989,00
2	Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	713.204.921,00
3	Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	917.661.471,00
Total		1.708.560.381,00
RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang		
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	4.920.499,00
2	Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	408.000,00
3	Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	2.247.676,00
4	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	11.697.362,00
5	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.115.990,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

6	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	909.500,00
7	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	137.326.803,00
8	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	20.096.680,00
Total		178.722.510,00
RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta		
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.450.000,00
2	Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	41.500.000,00
3	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	2.461.148,00
4	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	6.987.800,00
5	Belanja Jasa Kantor-Medical Check Up	8.439.030,00
6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	7.392.600,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	185.000,00
Total		70.415.578,00
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten		
No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	15.643.428,00
2	Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	510.000,00
3	Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	110.294.300,00
4	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	15.481.850,00
5	Belanja Jasa Kantor-Registrasi/Keanggotaan	2.400.000,00
6	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.072.268,00
7	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Utang Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.940.000,00
Total		166.341.846,00

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Rp0,00

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya Rp48.931.020,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp48.931.020,00) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto		48.931.020,00
Jumlah	-	48.931.020,00

5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Bagi Hasil

Rp464.771.347.637,00

Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp464.771.347.637,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp415.325.328.506,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp49.446.019.131,00 atau 11,91% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Kabupaten Semarang	15.379.183.838,00	13.284.383.848,00
2 Kabupaten Kendal	13.969.780.713,00	13.118.005.707,00
3 Kabupaten Demak	15.139.227.536,00	13.356.404.423,00
4 Kabupaten Grobogan	15.149.770.687,00	12.880.399.943,00
5 Kabupaten Pati	16.926.468.033,00	16.451.751.196,00
6 Kabupaten Kudus	13.724.169.201,00	12.667.990.191,00
7 Kabupaten Jepara	15.175.811.334,00	14.163.777.208,00
8 Kabupaten Rembang	8.106.050.709,00	8.613.841.673,00
9 Kabupaten Blora	9.106.068.256,00	8.394.489.424,00
10 Kabupaten Pekalongan	10.252.326.660,00	8.433.061.835,00
11 Kabupaten Batang	9.696.466.639,00	9.277.853.350,00
12 Kabupaten Pemalang	14.029.597.205,00	11.807.936.241,00
13 Kabupaten Tegal	16.315.489.447,00	14.798.408.069,00
14 Kabupaten Brebes	17.144.255.410,00	16.125.644.657,00
15 Kabupaten Banyumas	19.859.482.073,00	16.886.079.712,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
16	Kabupaten Cilacap	20.635.689.527,00	17.909.368.547,00
17	Kabupaten Purbalingga	9.718.765.985,00	7.751.364.405,00
18	Kabupaten Banjarnegara	9.627.892.693,00	8.396.532.072,00
19	Kabupaten Magelang	13.867.213.390,00	11.453.643.762,00
20	Kabupaten Temanggung	7.991.949.073,00	6.862.854.722,00
21	Kabupaten Wonosobo	8.073.002.693,00	6.167.940.036,00
22	Kabupaten Purworejo	8.289.669.402,00	7.767.172.625,00
23	Kabupaten Kebumen	12.910.973.094,00	10.733.320.624,00
24	Kabupaten Klaten	18.091.407.397,00	13.969.379.755,00
25	Kabupaten Boyolali	13.325.073.428,00	11.008.705.337,00
26	Kabupaten Sragen	14.605.789.509,00	9.805.958.239,00
27	Kabupaten Sukoharjo	14.998.603.721,00	14.000.104.048,00
28	Kabupaten Karanganyar	14.200.613.071,00	12.265.068.549,00
29	Kabupaten Wonogiri	10.731.336.625,00	7.867.799.025,00
30	Kota Semarang	47.282.524.945,00	51.353.262.468,00
31	Kota Pekalongan	4.766.838.546,00	4.402.647.632,00
32	Kota Surakarta	13.860.732.725,00	12.504.500.963,00
33	Kota Salatiga	4.288.594.469,00	4.416.374.330,00
34	Kota Tegal	4.693.456.092,00	4.348.816.029,00
35	Kota Magelang	2.837.073.511,00	2.080.487.861,00
Jumlah		464.771.347.637,00	415.325.328.506,00

Utang Belanja Bagi Hasil senilai Rp464.758.947.637,00 merupakan kurang salur Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/ Kota pada tahun 2025 yang akan dibayarkan pada tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KURANG SALUR THN 2025					KURANG SALUR TA 2025
		PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	ROKOK	
1	SEMARANG	4.258.529.037,00	359.099.972,00	10.683.308.426,00	78.246.403,00	-	15.379.183.838,00
2	KENDAL	3.555.360.512,00	387.673.635,00	9.980.065.647,00	46.680.919,00	-	13.969.780.713,00
3	DEMAK	4.221.275.654,00	332.539.289,00	10.525.783.074,00	47.229.519,00	-	15.126.827.536,00
4	GROBOGAN	4.185.882.711,00	251.265.350,00	10.593.864.776,00	118.757.850,00	-	15.149.770.687,00
5	PATI	4.671.944.880,00	266.747.813,00	11.919.565.649,00	68.209.691,00	-	16.926.468.033,00
6	KUDUS	3.474.366.226,00	434.115.492,00	9.796.620.478,00	19.067.005,00	-	13.724.169.201,00
7	JEPARA	4.143.213.835,00	520.312.015,00	10.469.284.073,00	43.001.411,00	-	15.175.811.334,00
8	REMBANG	2.132.877.153,00	155.196.729,00	5.771.966.256,00	46.010.571,00	-	8.106.050.709,00
9	BLORA	2.381.814.116,00	181.926.833,00	6.457.504.773,00	84.822.534,00	-	9.106.068.256,00



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-NERACA
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

NO	URAIAN	KURANG SALUR THN 2025					KURANG SALUR TA 2025
		PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	ROKOK	
10	PEKALONGAN	2.714.922.547,00	205.967.500,00	7.283.803.090,00	47.633.523,00	-	10.252.326.660,00
11	BATANG	2.582.731.997,00	211.593.681,00	6.853.326.624,00	48.814.337,00	-	9.696.466.639,00
12	PEMALANG	3.965.190.443,00	213.862.625,00	9.793.836.022,00	56.708.115,00	-	14.029.597.205,00
13	TEGAL	4.310.179.020,00	396.817.897,00	11.555.875.338,00	52.617.192,00	-	16.315.489.447,00
14	BREBES	4.784.689.493,00	454.988.461,00	11.824.685.793,00	79.891.663,00	-	17.144.255.410,00
15	BANYUMAS	5.904.250.497,00	380.710.229,00	13.494.659.455,00	79.861.892,00	-	19.859.482.073,00
16	CILACAP	5.825.035.464,00	480.522.199,00	14.047.126.092,00	283.005.772,00	-	20.635.689.527,00
17	PURBALINGGA	2.747.373.372,00	187.076.525,00	6.736.164.424,00	48.151.664,00	-	9.718.765.985,00
18	BANJARNEGARA	2.784.816.611,00	198.333.769,00	6.483.292.178,00	161.450.135,00	-	9.627.892.693,00
19	MAGELANG	3.874.008.619,00	234.178.288,00	9.687.142.603,00	71.883.880,00	-	13.867.213.390,00
20	TEMANGGUNG	2.195.044.947,00	162.189.221,00	5.590.272.220,00	44.442.685,00	-	7.991.949.073,00
21	WONOSOBO	2.467.304.961,00	148.635.041,00	5.400.110.735,00	56.951.956,00	-	8.073.002.693,00
22	PURWOREJO	2.269.551.327,00	160.450.471,00	5.810.655.685,00	49.011.919,00	-	8.289.669.402,00
23	KEBUMEN	3.374.840.655,00	290.347.256,00	9.164.060.830,00	81.724.353,00	-	12.910.973.094,00
24	KLATEN	4.692.875.178,00	297.553.945,00	13.060.871.965,00	40.106.309,00	-	18.091.407.397,00
25	BOYOLALI	3.717.986.718,00	258.439.609,00	9.296.947.450,00	51.699.651,00	-	13.325.073.428,00
26	SRAGEN	3.886.068.345,00	236.535.127,00	10.440.515.306,00	42.670.731,00	-	14.605.789.509,00
27	SUKOHARDJO	4.052.272.255,00	297.999.366,00	10.622.898.550,00	25.433.550,00	-	14.998.603.721,00
28	KARANGANYAR	3.948.383.825,00	374.333.735,00	9.832.818.806,00	45.076.705,00	-	14.200.613.071,00
29	WONOGIRI	3.122.604.078,00	172.167.390,00	7.349.040.812,00	87.524.345,00	-	10.731.336.625,00
30	SEMARANG	16.340.414.967,00	1.408.366.141,00	29.489.878.017,00	43.865.820,00	-	47.282.524.945,00
31	PEKALONGAN	1.356.872.578,00	113.744.868,00	3.294.274.819,00	1.946.281,00	-	4.766.838.546,00



NO	URAIAN	KURANG SALUR THN 2025					KURANG SALUR TA 2025
		PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	ROKOK	
32	SURAKARTA	4.592.678.164,00	300.327.343,00	8.964.329.845,00	3.397.373,00	-	13.860.732.725,00
33	SALATIGA	1.325.177.841,00	111.207.649,00	2.848.403.803,00	3.805.176,00	-	4.288.594.469,00
34	T E G A L	1.369.457.295,00	109.281.797,00	3.213.075.781,00	1.641.219,00	-	4.693.456.092,00
35	MAGELANG	881.502.050,00	47.243.038,00	1.904.093.828,00	4.234.595,00	-	2.837.073.511,00
	JUMLAH	132.111.497.371,00	10.341.750.299,00	320.240.123.223,00	2.065.576.744,00	-	464.758.947.637,00

Utang Belanja Bagi Hasil senilai Rp12.400.000,00 merupakan utang bagi hasil Sewa Lahan/Kios yang berada di PPP Morodemak antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak yang berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 36/2010 dan Nomor 523/045 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Pantai Morodemak Kabupaten Demak.

Dalam kesepakatan tersebut, pembagian bagi hasil adalah 60% untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan 40% untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak. Petugas yang berwenang menarik retribusi sewa lahan/kios adalah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pada kesepakatan tersebut, hasil penarikan disetorkan seluruhnya ke kas daerah Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya bagian 40% akan disetorkan dari kas daerah Provinsi Jawa Tengah ke kas daerah Kabupaten Demak. Namun dalam pelaksanaannya, penyetoran tersebut tidak mudah, sehingga dilakukan *addendum* perjanjian kerja sama untuk pemungutan mulai tahun 2012 yang dibakukan dalam *addendum* perjanjian kerja sama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak nomor 523/425/2012 dan nomor 523/121/2012 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Maret 2012. Dalam *addendum* tersebut, pendapatan pengelolaan PPP Morodemak dibagi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Demak dengan bagian masing-masing:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 60% termasuk biaya operasional
2. Pemerintah Kabupaten Demak sebesar 40%

Penyetoran bagian langsung dimasukkan kepada kas daerah masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Rp15.954.784.104,00

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp15.954.784.104,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.458.698.666,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp496.085.438,00 atau 3,21% dengan rincian sebagai berikut :



	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Utang Kelebihan Pembayaran PAD	-	-
2 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	15.952.798.000,00	15.433.855.000,00
3 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.986.104,00	24.843.666,00
Jumlah	15.954.784.104,00	15.458.698.666,00

5.3.2.1.4.1 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer **Rp15.952.798.000,00**

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer terdiri atas lebih salur atas dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2025 berdasarkan PMK 120 Tahun 2025 sebesar Rp15.952.798.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.433.855.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp518.943.000,00 atau 3,36% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	15.952.798.000,00	15.433.855.000,00
Jumlah	15.952.798.000,00	15.433.855.000,00

5.3.2.1.4.2 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah **Rp1.986.104,00**

Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sisa titipan uang muka pasien pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang sampai akhir periode 31 Desember 2025 belum diambil oleh pasien yaitu sebesar Rp1.986.104,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.843.666,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp22.857.562,00) atau (92,01%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1 RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.986.104,00	24.843.666,00
Jumlah	1.986.104,00	24.843.666,00

Adapun rincian utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

	TAHUN	JUMLAH	
		PASIEN	NOMINAL
RSUD Dr Moewardi Surakarta	2025	6	1.986.104,00
TOTAL		6	1.986.104,00

5.3.2.1 Kewajiban Kontijensi

Kewajiban Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontinjensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

- Barang Milik Daerah berupa bangunan SMA Negeri 1 Tegal dan tanah seluas 6.890 m2 senilai Rp 2.219.562.000,- di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok atas nama Perwakilan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) digugat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Gugatan didaftarkan di PTUN Semarang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 23/G/2017/PTUN.Smg tanggal 18 Oktober 2017 yang intinya mengabulkan



gugatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok dan memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencoret dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 24/B/2018/PT.TUN.Sby tanggal 12 Pebruari 2018 yang intinya menguatkan Putusan PTUN Semarang. Berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 414 K/TUN/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang intinya menolak permohonan Kasasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap Putusan dimaksud Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2019 dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 129 PK/TUN/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung untuk membatalkan sertifikat adalah:

1. Tanah tersebut merupakan bagian dari Tanah milik PT.KAI (persero) berdasarkan bukti kepemilikan masa lampau berupa *groundkaart*.
2. Pemecahan sebagian tanah tersebut menjadi SMAN 1 Tegal tidak dilengkapi dengan dokumen persetujuan dari Menteri Keuangan sebagai Pejabat yang berwenang.

Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Pbt/BPN-33/IV/2020 membatalkan sertifikat HP.01/Desa Slerok.

Mempertimbangkan SMAN 1 Tegal saat ini digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh unsur termasuk BUMN dalam hal ini PT. KAI (Persero) agar dapat melepaskan tanah dimaksud untuk pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Mendasarkan hasil rapat dengan MCP KPK pada tanggal 27 Maret 2024, Tim MCP KPK bersama dengan Kanwil BPN Jawa Tengah dan ASDATUN Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyampaikan agar segera menindaklanjuti rapat dengan jajaran direksi PT. KAI serta Pimpinan Tinggi Kementerian BUMN dengan pertimbangan kondisi fisik saat ini digunakan untuk pelayanan pendidikan.

Pemprov Jateng mengirim surat nomor 475.287/643 Tanggal 14 Juni 2024 ke Kantor Pertanahan Kota Tegal untuk menanyakan terkait informasi dan dokumen status tanah Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok yang akan digunakan sebagai dokumen pelengkap dalam permasalahan sengketa aset dengan PT. KAI.

Kantor pertanahan Kota Tegal membalas dengan surat nomor MP.01.02/197-33.76/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang intinya tanah tersebut merupakan tanah eygendom Verp. No. 2577 dan mendasarkan SK Gubernur Nomor SK.DA.II/HP/36/74 tanggal 15 juli 1974, eygendom tersebut diterbitkan Hak Pakai Nomor 1/Slerok a.n Perwakilan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk SMAN 1 Tegal.

Pada Kartu Eygendom terdapat catatan menggunakan tinta merah yang intinya bahwa mendasarkan SK Menteri Pertanian tanah menjadi tanah negara dengan memberi ganti rugi kepada Pemiliknya.



Mendasarkan Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria, tanah negara bekas partikelir dan surat keputusan mengenai kesediaan pemberian ganti rugi oleh pemerintah, pengelolaan arsip dan dokumen adalah kewenangan kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Surat Nomor 030/0005695 Tanggal 23 Agustus 2024 hal Permohonan Informasi dan Dokumen terkait Status Tanah Hak Pakai Nomor 1/Slerok kepada Kementerian ATR/BPN RI.

Tanggal 25 November 2024, Kementerian ATR/BPN menanggapi dengan surat Sekretaris Dirjen Penataan Ruang Nomor 268/500.22.LR.03.01/XI/2024 yang intinya pemenuhan Fotocopy SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK 454/Ka/60 Tanggal 19 Maret 1960 dan Surat keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 11/Ka/64 tanggal 2 Maret 1964.

- b. Tanah bersertifikat HP Nomor 4 tanggal 31 Juli 1997 luas 7.125 m² terletak di Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal merupakan Tanah Bekas Waduk Lapangan BE 2. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat HP Nomor 4, pada tanggal 13 Mei 2003, Bachrudin Ratib melalui kuasa hukumnya yaitu Untoro Sulaiman, SH dan Ajar, SH, keduanya beralamat di Jalan DR. Ciptomangunkusumo No. 9 Dukuhsalam Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2003 telah mengajukan gugatan yang deregister di Kepaniteraan PN Slawi No. 10/Pdt/G/2003/PN.Slw tanggal 13 Mei 2003, merasa dirugikan haknya karena seharusnya atas tanah obyek sengketa menjadi haknya dan perbuatan penerbitan sertipikat dianggap perbuatan melawan hukum karena tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau melibatkan penggugat. Pada tanggal 4 November 2004, Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/ 2003/PN.Slw memenangkan Tergugat : Pemerintah RI cq. DPU Pengairan Kab. Tegal dan Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq. BPN Kab. Tegal.

Berdasarkan Putusan PN Slawi tersebut, penggugat pada tanggal 8 November 2004 mengajukan permohonan banding, pada tanggal 14 Juli 2005, Putusan Perkara Nomor 62/Pdt/2005/PT.Smg jo. 10/Pdt.G/2003/PN.Slw memutuskan menguatkan putusan PN Slawi.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, penggugat mengajukan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2005, dan mendasarkan Putusan Kasasi No. 10/Pdt.G/2003/PN.Slw. Jo No.2061 K/Pdt/ 2006 Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2061 K/Pdt/2006. Jo No. 10/Pdt.G/2003/ PN.Slw tanggal 21 Pebruari 2008 yang bunyi putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Bachrudin Ratib.

Pada 23 Juli 2012, Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor: 20/ Pbt/ BPN.33/ 2012 tentang Pembatalan Sertifikat HP Nomor 4 Desa Tegalandong Luas $\pm$ 7.125 M2 atas nama Pemprov. Dati I Jateng Semarang terletak di Desa Tegalandong, Kec. Lebaksiu, Kab.Tegal sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tanggal 27 Maret 2014, diselenggarakan rapat di Dinas PSDA Prov. Jateng dengan hasil:

1. Peserta rapat sepakat untuk mempertahankan aset sertifikat HP No. 4 di Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal tetap menjadi milik Pemerintah Prov. Jateng dengan upaya mengajukan Gugatan Baru kepada Bachrudin Ratib.
2. Dinas PSDA Prov. Jateng menjawab surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tegal untuk tidak mencoret aset sertifikat HP No. 4 dari daftar inventarisasi BMD sampai dengan dilakukannya upaya hukum.



3. Dinas PSDA Prov. Jateng membuat surat kepada Gubernur berkaitan dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tegal.

Pada tanggal 27 Maret 2014, Kepala Dinas PSDA Prov. Jateng mengirimkan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tegal Nomor 594.3/1128 perihal Pencoretan Daftar inventarisasi Barang Milik Daerah atas Tanah, yang intinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan gugatan baru kepada Bachrudin Ratib.

Pada tanggal 12 Agustus 2014 konsultasi dengan Kabag. Bantuan Hukum Kemendagri yang hasilnya yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Tegal dimohon mengajukan PK berkaitan dengan adanya novum (bukti baru) antara lain bahwa Pemerintah Kab. Tegal bukan sebagai tergugat.
2. Pemprov.Jateng akan melakukan upaya hukum apabila dilakukan eksekusi.

Mendasarkan surat Kepala Dinas PUSDATARU Nomor 028/3063 tanggal 30 Mei 2018 Perihal : Pelepasan Hak/Penghapusan dari Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah atas Tanah Hak Pakai No. 4 Di Desa Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal kepada Ketua Yayasan Darul Hasanah di Slawi yang intinya yaitu :

1. Berdasarkan Pasal 329 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, bahwa barang milik daerah yang dapat dipindah tangankan adalah barang yang tidak diperlukan lagi dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah;
2. Tanah HP No. 4 di Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kab.Tegal merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 1997, yang mana tanah tersebut akan dikembalikan sebagai fungsi semula menjadi embung dalam rangka mendukung program ketahanan pangan;
3. Sehubungan dengan hal tersebut permohonan pelepasan hak/penghapusan tidak dapat dikabulkan.

Pada tanggal 15 Juli 2019 Surat Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Setneg RI Nomor B-2404/ Kemensetneg/ DM.05/07/2019 Perihal Pengaduan Masyarakat ditujukan Kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah yang ditidklanjuti Rapat Koordinasi Pada 17 September 2019 hasilnya :

1. Aset tanah di Desa Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal diupayakan untuk dipertahankan.
2. Ditempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui Kabupaten Tegal
3. Kabupaten Tegal bersama Balai PSDA Pemali Comal akan berupaya mencari dokumen perijinan asli sebagai bukti baru.

Pada tanggal 25 Maret 2021 Yayasan Darul Hasanah melalui Kantor Advokat Dedy Riyanto, SH beralamat di Jl. Pala Barat 1 Blok F Mejasem, Kab.Tegal mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di kepaniteraan PN. Slawi nomor : 12/Pdt.G/2021/ PN.Slw.

Telah dilaksanakan Sidang Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021.PN.Slw. tanggal 3 Juni 2021 dengan hasil :

1. Tergugat I Pemprov. Jateng dan Tergugat II Dinas PUSDATARU diwakili oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
2. Tergugat III Pemerintah Kabupaten Tegal diwakili oleh JPN;



3. Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kab. Tegal diwakili Sdr.Makmur;
4. Sidang selanjutnya dilakukan secara E-Court (secara elektronik).

Tanggal 24 Juni 2021 agenda sidang penyerahan bukti atas eksepsi kompetensi absolute.

Tanggal 29 Juli 2021 agenda Putusan Sela memutuskan:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I II dan III tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan PN. Slawi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp. 1.297.000,00.

Setelah tanggal putusan tidak ada upaya hukum oleh Penggugat. Untuk penyelesaian melalui Peninjauan Kembali (PK), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mencari bukti baru/*novum*.

c. Data Barang Milik Daerah:

Luas Lahan : 5.450 m²
Kelurahan : Mangkang Kulon.
Kecamatan : Tugu.
Kota : Semarang.
Sertifikat : Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Kelurahan Mangkang Kulon atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah c.q. Dinas Pekerjaan Umum (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)

Kronologis Sengketa :

1. Penguasaan Fisik
 - Penguasaan fisik tanah Mangkang kulon oleh DPU Provinsi Jawa Tengah Tingkat I Jawa Tengah sejak tahun 1980
 - Dipergunakan untuk rumah mantri pengairan kemantren plumbon pada cabang Dinas Pengairan Tuntang Hilir DPU Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 - Tanah tersebut terdiri dari 2 bagian :
 - Sebelah Barat : dipergunakan sebagai rumah penjaga pintu air (PPA) D.I Plumbon (sebelah barat), sebagian telah dilakukan pemagaran permanen oleh Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah dan di dalamnya ada bangunan.
 - Sebelah Timur : digunakan sebagai gudang material (aspal) jalan dan jembatan Dinas Binamarga Provinsi Jawa Tengah.
2. Permohonan Hak Pakai
 - Tanggal 7 Mei 1988 Kepala Kantor Agraria a/n Wali Kota Madya Kepala Daerah Tingkat II Semarang mengirim surat kepada Gubernur KDH Up. Kepala Direktorat Agraria Provinsi Jawa Tengah perihal persetujuan permohonan Hak Pakai terhadap 3 bidang usulan sertifikasi dan salah satunya adalah tanah mangkang kulon seluas ±5.450M² dengan data dasar yang kuat.
 - Ditindaklanjuti dengan tinjauan lokasi oleh BPN Kota Semarang.
 - Selanjutnya BPN menerbitkan Sertifikat Hp. No 12 tanggal 15 Februari 1989 a/n Pemegang Hak Pemprov.Jateng cq DPU Dati I Jawa Tengah.
3. Pencatatan Aset
 - Semula tercatat dalam buku Inventarisasi Aset DPU Pengairan Provinsi Jawa Tengah wilayah Cabang Dinas Tuntang Hilir sejak tanggal 29 Februari Tahun 2000 sebagai tanah lambiran seluas ±5.450M².



- Selanjutnya dicatat dalam KIB-A Dinas PSDA Prov.Jateng sejak tahun 2003 dan masuk dalam Neraca Aset Provinsi Jawa Tengah.
- 4. Surat Sekda Prov. Jateng kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Nomor: 593/013218 tgl. 22 Juli 2013 Perihal: Permohonan Warkah Hak Pakai GS. No.8511/ 1987, No. 8512/1987, dan No. 8513/1987.
 - Tanah Negara 3 bidang di Kel. Mangkang Kulon dlm pengelolaan Dinas PSDA diajukan permohonan haknya belum selesai.
 - Permohonan hak pakai pada dasarnya setuju untuk dikabulkan.
 - GS. No. 8513/1987 dipermasalahkan status kepemilikan oleh pihak lain (Sdr. Puanah).
 - Mohon:
 - Mohon dilakukan pemblokiran atas bidang tanah GS. No. 8513/1987.
 - Mohon rekaman warkah GS. No.8511/ 1987, No. 8512/1987, dan No. 8513/1987.
- 5. Surat Kantor Pertanahan Kota Semarang kepada Sekda Provinsi Jawa Tengah No. 2641/600-33.74/IX/2013 tgl. 11 September 2013 Perihal: Warkah permohonan Hak Pakai GS GS. No.8511/ 1987, No. 8512/1987, dan No. 8513/1987.
 - Pemblokiran terhadap GS. No. 8513/1987 telah dilakukan, sedangkan kondisi fisik di lapangan menjadi kewajiban pemilik tanah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Meneg Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 19.
 - Data warkah belum diketemukan.
- 6. Gugatan di Pengadilan
 - Pengadilan Tata Usaha Semarang Th. 2016 (Pemprov Kalah).

Penggugat : Ny. Puanah Cs.
Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah
Materi Gugatan : Tanah tersebut adalah milik penggugat dengan bukti C desa No 1057 persil 93 tahun 1963
Mediasi sudah dilaksanakan, tidak dapat tercapai kesepakatan.
Putusan PTUN Semarang : (Pemprov KALAH).

 - Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
 - Menyatakan batal Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang berupa sertifikat HP No 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang yang terbit tanggal 15 Februari 1989.
 - Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dan mencabut Sertifikat HP No 12 Desa/Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang yang terbit tanggal 15 Februari 1989 seluas ± 5450 M2 a/n Pemprov Jateng cq DPU Dati I Jawa Tengah.
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara secara tanggung renteng.
 - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Th.2017) – Pemprov KALAH.
 - Pengadilan tingkat banding terdaftar dan teregistrasi dengan No. Perkara 40/B/2017/PT.TUN.SBY
 - Putusan dikeluarkan tanggal 8 Mei 2017 oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya :
 - a) Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi.
 - b) menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No:



026/G/2016/PTUN.Smg tanggal 3 November 2016 yang dimohonkan banding.

- c) Menghukum Pembanding/T II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan.
 - Mahkamah Agung Th. 2018 (Pemprov Kalah).
 - Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. Perkara 40/B/2017/PT.TUN.SBY dengan melakukan upaya hukum luar biasa (Kasasi Dan Peninjauan Kembali) :
 - Putusan Kasasi Mahkamah agung RI No. 427K/TUN/2017 tanggal 12 Oktober 2017. Putusan : Menolak permohonan Kasasi Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No. 165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018. Putusan : menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) Pembatalan Sertifikat HP No. 12 Tanah Mangkang Kulon Kota Semarang.
7. Surat Kepala Dinas PU SDA TARU Prov. Jateng kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang No. 028/2856 tgl. 18 Mei 2018 Perihal: Permohonan dokumen usulkan penggabungan SPT-PBB di Kel. Mangkang Kulon Kota Semarang atas nama Puanah dan Sapuan.
 - Akan digunakan sebagai pertimbangan bahan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung.
8. Notulen tanggal 11 Desember 2018 Rakor tindak lanjut terhadap putusan Mahkamah Agung RI. No.165 PK/TUN/2018 tanggal 4 Oktober 2018 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali pembatalan sertifikat HP.12 Tanah Mangkang Kulon Kota Semarang.
Kesimpulan Rapat :
 - Mengajukan perlindungan hukum kepada Kemendagri;
 - Menunggu selesainya proses peradilan perdata.
9. Surat Nomor 056/SBYT-ADV/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dari Kantor advokat Dr.H Subyakto, SH, MH, MM & Asc kepada Gubernur Jawa Tengah.
 - Meminta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menghapus Aset tanah Hp.12 dari daftar Aset BMD Pemprov.Jateng.
10. Surat Nomor 057/SBYT-ADV/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dari Kantor advokat Dr.H Subyakto, SH, MH, MM & Asc kepada Kepala Kantor BPN Kota Semarang.
 - Meminta kepada Kepala Kantor BPN Kota Semarang untuk membatalkan Sertifikat Hp.12.
11. Surat Nomor 594.3/4846 tanggal 9 Agustus 2019 dari PUSDATARU Jateng kepada Kepala Biro Hukum SETDA Prov.Jateng Perihal Status Tanah Sertifikat HP.12 milik Pemprov Jateng.
 - Pusdataru mohon petunjuk sebagai tindak lanjut atas Surat Nomor 056/SBYT-ADV/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 dari Kantor advokat Dr.H Subyakto, SH, MH, MM & Asc kepada Gubernur Jawa Tengah yang pada pokok suratnya Meminta kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menghapus Aset tanah Hp.12 dari daftar Aset BMD Pemprov Jateng.
12. Surat Nomor MP.01.02/2922.33.74/VIII/2019 dari Kantor BPN Kota Semarang kepada Kantor advokat Dr.H Subyakto, SH, MH, MM & Asc sebagai jawaban atas Surat Nomor 057/SBYT-ADV/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.
 - Menjawab tentang syarat permohonan yang dimohon oleh Kantor advokat Dr.H Subyakto, SH, MH, MM.



13. Rapat tanggal 26 Agustus 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan PK No.026/2016/PTUN.Smg Hasil Rapat :
 - PSDA buat surat ke Sekda perihal pengembalian aset karena sudah tidak digunakan
 - Sekda buat Surat perlindungan hukum kepada MA dan Kemendagri dan di tanda tangani Sekda
 - Ajukan Blokir Koordinasi dengan BPKAD ke BPN Kota
 - Surat agar segera diproses untuk menjawab surat dari Subyakto (Kuasa Hukum Puanah)
 - Bagi rekan – rekan bagian aset/barang jangan sekali – sekali mencoret aset dari daftar.
14. Surat Kepala Dinas PU SDA TARU Prov. Jateng kepada Gubernur Jateng melalui Sekda Prov. Jateng No. 028/5153 tgl.27 Agustus 2019 Perihal: Penyerahan aset tanah Pemprov. Jateng Sertifikat HP.12 Kel. Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang.
 - Dalam sertifikat HP tersebut tercantum lamanya hak berlaku selama dipergunakan untuk waduk bangunan pengairan, kenyataan di lapangan penggunaannya tidak seperti peruntukan dalam sertifikat.
 - Berdasar Perda No. 5 Th. 2017 Pasal 39, menyatakan bahwa pengguna barang wajib menyerahkan BMD berupa tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang kepada Gubernur melalui Pengelola Barang.
 - Sehubungan hal tersebut kami serahkan aset tanah seluas 5.450 M2 di Kel. Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang Sertifikat HP. No.12.
15. Surat Dinas PU SDA TARU Prov.Jateng nomor: 028/5856 tanggal 30 September 2019 Kepada Kepala Biro Hukum SETDA Prov.Jateng, Perihal : Penyampaian Surat Permintaan Penghapusan Aset Milik Daerah.
16. Surat No: 030/0022873 Tanggal 16 Oktober 2019 dari SEKDA Prov.Jateng Kepada Dinas PU SDA TARU Prov.Jateng, Perihal : Pertimbangan belum bersedia menerima aset Milik Pemprov Jateng.
17. Surat Dinas PU SDA TARU Prov.Jateng No. 183/66755 Tanggal 5 November 2019 Kepada Kepala Biro Hukum SETDA Prov.Jateng, Perihal : Permohonan Kajian atas Putusan Pengadilan Negeri (Tindak lanjut atas Surat No: 030/0022873 Tanggal 16 Oktober 2019 dari SEKDA Prov. Jateng).
18. Surat BPN Kanwil Provinsi Jawa Tengah Nomor : MP.01/881-33/V/2020 Tanggal 15 Mei 2020 Perihal : Pemberitahuan Pembatalan Hak Pakai Nomor 12 Mangkang Kulon atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PSDA) terletak di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang.
19. Surat (Keputusan) BPN Kanwil Provinsi Jawa Tengah Nomor : 07/Pbt/BPN-33/VI/2020 tanggal 11 Juni 2020 Perihal : Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Nomor.12 Mangkang Kulon Seluas 5450 M2 Tercatat Atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Dinas Pekerjaan Umum Terletak Di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.
20. Nota Dinas Satpol PP Prov.Jateng Nomor : 303/2961/Pol PP/IX/2020 Tanggal 23 September 2020 Perihal : Tindaklanjut Penanganan Permasalahan Aset Tanah Eks. Hak Pakai Nomor 12 Mangkang Kulon Kota Semarang.
Inti Nota Dinas :
Perlu pencermatan upaya hukum lebih lanjut oleh Biro Hukum SETDA Prov.Jateng yang akan



- mengajukan kembali Sertifikat Hak Pakai kepada BPN Kota Semarang sesuai peruntukan, sehingga perlu menunggu terbitnya Sertifikat Hak Pakai baru sebagai landasan yuridis normatif sebelum menerbitkan SP 1, 2 dan 3 hingga upaya pengosongan.
21. Penggugat mengajukan kembali gugatan dengan Perkara No. 542/PDT.G/2020/ PN.SMG dimenangkan oleh Pihak Penggugat, Pemprov. Jateng menempuh upaya hukum yang akan ditempuh Upaya Banding pada tanggal 3 Agustus 2021 dengan register perkara 59/Pdt.U/2021/PN.Smg
 22. Putusan Perkara Banding No. 495/Pdt/2021/PT/SMG Antara Gubernur Jawa Tengah Melawan Puanah, DKK (Pemprov.Jateng Kalah) Pemprov. Jateng menempuh upaya hukum Kasasi tanggal 19 Januari 2022.
 23. Relas Putusan Kasasi nomor 1825 K/Pdt/2022 disampaikan melalui Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 September 2022; Inti isi Relas Pemprov.Jateng Menang.
 24. Surat SEKDA Provinsi Jawa Tengah No. 180/0015270 tanggal 4 Oktober 2022 Perihal : Tindaklanjut Putusan Kasasi No : 1825 K/Pdt/2022 Kepada Kepala Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah, Inti Surat : Bahwa Putusan Kasasi telah Inkracht untuk itu agar segera berkoordinasi terkait tindaklanjut proses permohonan penerbitan sertipikat.
 25. Pada tanggal 27 Oktober 2022 pihak Puanah (Bp.Maskur Ridwan) menggugat di PTUN Semarang NOMOR : 86/G/TF/2022/PTUN.SMG di PTUN Semarang yang hasilnya Pemprov Jateng Kalah dan saat ini sedang dalam proses banding;
Pokok isi Putusan :
 - Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan batal tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II berupa tindakan Gubernur Jawa Tengah dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tidak melakukan penghapusan aset bekas alas hak SHP No.12 Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu tanggal 15 februari 1989 gambar situasi no.8513/1987 tanggal 30 Desember 1987 luas $\pm 5.450M^2$ atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Dinas Pekerjaan Umum Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - Mewajibkan kepada Tergugat I dan II untuk melakukan tindakan Pemerintahan berupa penghapusan aset bekas alas hak SHP No.12 Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu tanggal 15 februari 1989 gambar situasi no.8513/1987 tanggal 30 Desember 1987 luas $\pm 5450M^2$ atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Cq Dinas Pekerjaan Umum Dari Daftar Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah
 - Menghukum kepada tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 350.000,-
 26. Selanjutnya proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang dimana Tanggal 13 Juli 2023, telah terbit sertifikat atas BMD dimaksud dengan nomor Sertifikat HP.429/Wonosari, Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencatat aset Hak Pakai No.429 seluas 5.242 M² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB.A) Milik Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah;
 27. Surat Sekda Prov. Jateng No.028.3/0005681 tanggal 31 Juli 2024 Perihal : Penyampaian Keputusan Gubernur (T.L Surat panggilan panitera PTUN SMG 86/G/TF/2022/PTUN.SMG tanggal 7 Mei 2024 dan telah dilaksanakannya upaya penyelesaian oleh pengadilan tanggal 30 Mei 2024 yang hasilnya bahwa Pemprov Jateng melaksanakan putusan PTUN (menyetujui penghapusan aset eks hak pakai no.12)



28. Pada tanggal 22 Januari 2025 pada lokasi eks.HP 12 mendapatkan laporan bahwa terpasang papan plang dari ahli waris Khatimah Badriyah
29. Pada tanggal 26 Februari 2025 mendapat informasi bahwa dilokasi eks.HP 12 terdapat papan plang dari ahli waris Sapoean Soeti.
30. Tanggal 21 Maret 2025, Surat Sekda ke pengacara Sdr. Medijanto Suharsono,dkk Nomor 030/0002272 Hal Klarifikasi Pemasangan Plang/Label dan Pagar.
31. Tanggal 04 Juli 2025, dikarenakan tidak adanya tanggapan dari pihak terkait maka dikirimkan surat sekda ke pengacara Sdr. Medijanto Suharsono,dkk Nomor 030/ 0004049 Hal Klarifikasi Kedua Pemasangan Plang/Label dan Pagar.

5.3.3 EKUITAS

Rp42.017.613.343.274,49

Ekuitas sebesar Rp42.017.613.343.274,49, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp39.704.505.567.071,59 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.313.107.776.202,90 atau 5,83% dengan rincian sebagai berikut :

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.184.430.927.143,26	8.640.677.235.717,17
2	Dinas Kesehatan	386.285.008.270,25	367.739.690.324,63
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.314.429.887.698,16	1.309.471.788.987,96
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	901.511.875.186,53	971.963.381.341,43
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	305.775.404.350,05	342.797.214.043,72
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	826.749.324.380,99	806.199.970.891,01
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	231.297.820.554,57	219.865.211.491,29
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	194.414.219.090,31	189.455.944.652,88
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	126.077.529.631,10	100.812.091.013,79
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.369.166.051.727,53	5.018.751.000.573,52
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	7.022.252.110.798,85	5.843.867.701.635,55
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.402.471.372,54	27.919.956.443,68
13	Satuan Polisi Pamong Praja	18.538.023.663,59	17.812.093.071,33
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.667.995.604,65	23.807.880.324,59
15	Dinas Sosial	284.330.535.746,27	259.526.923.100,12
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	125.189.049.155,36	128.141.267.272,87
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.393.919.385,64	11.995.300.451,53
18	Dinas Ketahanan Pangan	21.974.911.795,46	22.307.437.706,13
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	134.707.198.110,02	187.745.237.708,70
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	15.725.123.257,88	15.896.654.756,98
21	Dinas Perhubungan	343.441.897.573,44	355.598.934.022,99
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	65.018.872.168,66	57.601.287.045,02
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	55.917.956.538,69	57.592.389.727,15
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.912.354.405,34	13.197.909.502,79
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	812.537.321.421,81	837.403.679.701,11
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.586.971.589,18	37.595.754.461,30
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	503.339.134.732,11	465.365.772.496,45
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	396.850.491.732,17	467.268.976.455,84
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.018.283.518.944,29	989.913.668.890,57
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	113.773.405.017,81	109.860.538.927,16
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	91.593.811.743,60	97.480.509.481,21
32	Sekretariat Daerah	266.244.102.475,63	240.554.542.108,40
33	Sekretariat DPRD	169.632.092.015,68	153.852.046.651,92
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	126.873.738.081,98	127.402.752.156,01
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.204.272.521.574,72	2.639.716.041.916,27
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.953.805.567.739,79	8.318.378.432.533,88
37	Badan Kepegawaian Daerah	13.113.783.063,72	12.888.751.184,99
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	157.864.513.292,27	155.611.042.881,05



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-**NERACA**
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		2025 (Rp)	2024 (Rp)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	94.549.122.843,91	8.547.538.978,86
40	Badan Penghubung	27.182.649.490,31	24.968.504.716,56
41	Inspektorat	9.270.164.289,43	9.402.906.843,02
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.229.965.616,94	17.549.604.880,16
	Jumlah	42.017.613.343.274,49	39.704.505.567.071,59



5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Struktur penyajian LO Tahun 2023 dan 2024 mendasari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ringkasan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan	23.761.968.977.877,00	6.049.074.319.052,68	3.821.989.090.204,76	25.989.054.206.724,92	28.190.989.184.167,89	(2.201.934.977.442,97)	(7,81)
2 Beban	22.069.086.653.257,00	25.554.887.488.701,07	22.717.399.483.597,89	24.906.574.658.360,18	29.026.225.118.572,09	(4.119.650.460.211,91)	(14,19)
Surplus/(Defisit) Operasional	1.692.882.324.620,00	(19.505.813.169.648,30)	(18.895.410.393.393,00)	1.082.479.548.364,74	(835.235.934.404,20)	1.917.715.482.768,93	(229,60)
3 Kegiatan Non Operasional	-	(6.387.465.015,26)	-	(6.387.465.015,26)	(64.047.771.553,77)	57.660.306.538,52	(90,03)
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	1.692.882.324.620,00	(19.512.200.634.663,60)	(18.895.410.393.393,00)	1.076.092.083.349,48	(899.283.705.957,97)	1.975.375.789.307,45	(219,66)
4 Pos Luar Biasa	(7.192.800.000,00)	-	-	(7.192.800.000,00)	(10.225.800.500,00)	3.033.000.500,00	(29,66)
Jumlah	1.685.689.524.620,00	(19.512.200.634.663,60)	(18.895.410.393.393,00)	1.068.899.283.349,48	(909.509.506.457,97)	1.978.408.789.807,45	(217,52)

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Rp25.989.054.206.724,92

Pendapatan Daerah adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp25.989.054.206.724,92 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.190.989.184.167,89 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.201.934.977.442,97) atau (7,81%) dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Asli Daerah – LO	14.973.131.878.336,00	4.335.756.838.479,68	3.347.606.397.945,78	15.961.282.318.869,90	18.196.148.894.194,48	(2.234.866.575.324,58)	(12,28)
2 Pendapatan Transfer - LO	8.625.363.756.508,00	448.228.876.000,00	471.079.975.000,00	8.602.512.657.508,00	8.598.918.995.795,00	3.593.661.713,00	0,04
3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO	163.473.343.033,00	1.265.088.604.573,00	3.302.717.258,98	1.425.259.230.347,02	1.395.921.294.178,41	29.337.936.168,61	2,10
Jumlah	23.761.968.977.877,00	6.049.074.319.052,68	3.821.989.090.204,76	25.989.054.206.724,92	28.190.989.184.167,89	(2.201.934.977.442,97)	(7,81)

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp25.989.054.206.724,92 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :



Referensi		
Pendapatan LRA		23.761.968.977.877,00
Mutasi Tambah		
	CALK Neraca	
	5.3.1.1.2	
Saldo Akhir Piutang	5.3.1.1.3	2.963.090.043.701,04
	5.3.1.1.4	
	5.3.1.1.7	
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	CALK Neraca	31.377.084.579,89
	5.3.2.1.6.5	
Hibah Berupa Aset	KK Aset Tetap dan KK ATB Penambahan dari Hibah	565.537.326.594,00
Hibah Berupa Bahan Habis Pakai	KK Persediaan Penambahan dari Hibah	647.997.850.810,00
Bantuan Pemerintah berupa uang yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa	KK Bantah Realisasi Beban Barang dan Jasa	23.247.866.371,00
Saldo Awal Lebih Salur	CALK Neraca	15.433.855.000,00
	5.3.2.1.6.7.1	
Aset Hasil Usaha Mandiri	KK Usaha Mandiri Sekolah	28.305.560.798,00
Koreksi atas Lebih Salur Tahun sebelumnya	KK Kurang Lebih Salur	518.943.000,00
Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD	KK Penyertaan Modal	526.180.007.732,75
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	KK Piutang	443.227.337.698,00
Reklasifikasi Antar Akun		332.200.930,00
Koreksi Kurang Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	KK Piutang	803.826.241.838,00
Total Penambahan		6.049.074.319.052,68
Mutasi Kurang		
	CALK Neraca	
	5.3.1.1.2	
Saldo Awal Piutang	5.3.1.1.3	3.064.470.132.705,61
	5.3.1.1.4	
	5.3.1.1.7	
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	CALK Neraca	24.520.572.521,50
	5.3.2.1.6.5	
Saldo Akhir Lebih Salur	CALK Neraca	15.952.798.000,00
	5.3.2.1.6.7.1	
Penyusutan atas Hibah Berupa Aset	KK Aset	3.302.717.258,98
Reklasifikasi Antar Akun	KK Piutang	332.200.930,00



Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD		2.399.498.340,70	
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	KK Piutang	711.011.170.447,97	
Total Pengurangan			3.821.989.090.204,76
Pendapatan-LO			25.989.054.206.724,92

Keterangan:

- Saldo Pendapatan Diterima Dimuka di luar Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III terdapat pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta, RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto dan RSUD Dr.Rehatta berupa Titipan Uang Muka Pasien.

Pendapatan-LO tidak termasuk pendapatan dari pihak ke tiga diluar mekanisme APBD yang dikelola secara swakelola sebesar Rp38.481.938.892,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan sebesar Rp33.564.904.846,00.
2. RSUD Dr. Adhyatma, MPH sebesar Rp37.782.082,00.
3. RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp708.607.464,00.
4. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp388.000.000,00.
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp1.736.890.000,00
6. Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp2.004.492.500,00
7. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp41.262.000,00

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO **Rp15.961.282.318.869,90**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp15.961.282.318.869,90, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.196.148.894.194,48, mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.234.866.575.324,58) atau (12,28%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Pajak Daerah – LO	11.438.451.030.063,00	3.707.873.735.947,00	3.054.294.813.980,00	12.092.029.952.030,00	14.591.278.050.113,00	(2.499.248.098.083,00)	(17,13)
2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2.673.385.019.574,00	99.387.357.159,77	288.387.670.417,23	2.484.384.706.316,54	2.275.251.530.382,75	209.133.175.933,79	9,19
3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO	546.657.345.508,00	526.180.007.732,75	2.399.498.340,70	1.070.437.854.900,05	895.834.519.652,31	174.603.335.247,74	19,49
4 Lain-Lain PAD yang Sah - LO	314.638.483.191,00	2.315.737.640,16	2.524.415.207,85	314.429.805.623,31	433.784.794.046,42	(119.354.988.423,11)	(27,51)
Jumlah	14.973.131.878.336,00	4.335.756.838.479,68	3.347.606.397.945,78	15.961.282.318.869,90	18.196.148.894.194,48	(2.234.866.575.324,58)	(12,28)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp15.961.282.318.869,90 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA	14.973.131.878.336,00
Mutasi Tambah	
Saldo Akhir Piutang	2.530.813.965.701,04
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	31.377.084.579,89
Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD	526.180.007.732,75
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	443.227.337.698,00
Reklasifikasi Antar Akun	332.200.930,00
Koreksi Kurang Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	803.826.241.838,00
Total Penambahan	4.335.756.838.479,68
Mutasi Kurang	



Saldo Awal Piutang	3.011.390.528.705,61
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	24.520.572.521,50
Reklasifikasi Antar Akun	332.200.930,00
Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD	2.399.498.340,70
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	308.963.597.447,97
Total Pengurangan	3.347.606.397.945,78
Pendapatan-LO	15.961.282.318.869,90

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Rp12.092.029.952.030,00

Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp12.092.029.952.030,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.591.278.050.113,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.499.248.098.083,00) atau (17,13%), dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	3.960.139.868.900,00	3.707.813.788.850,00	3.053.955.714.950,00	4.613.997.942.800,00	5.855.965.003.850,00	(1.241.967.061.050,00)	(21,21)
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	1.741.611.744.500,00	-	-	1.741.611.744.500,00	3.068.323.586.500,00	(1.326.711.842.000,00)	(43,24)
3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO	2.690.646.253.813,00	-	-	2.690.646.253.813,00	2.693.880.376.743,00	(3.234.122.930,00)	(0,12)
4 Pajak Air Permukaan - LO	20.925.885.996,00	59.947.097,00	339.099.030,00	20.646.734.063,00	18.997.795.604,00	1.648.938.459,00	8,68
5 Pajak Rokok - LO	3.001.754.723.736,00	-	-	3.001.754.723.736,00	2.954.059.323.916,00	47.695.399.820,00	1,61
6 Pajak Alat Berat (PAB)	134.045.500,00	-	-	134.045.500,00	51.963.500,00	82.082.000,00	157,96
7 Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO	23.238.507.618,00	-	-	23.238.507.618,00	-	23.238.507.618,00	100,00
Jumlah	11.438.451.030.063,00	3.707.873.735.947,00	3.054.294.813.980,00	12.092.029.952.030,00	14.591.278.050.113,00	(2.499.248.098.083,00)	(17,13)

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp12.092.029.952.030,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA	11.438.451.030.063,00
Mutasi Tambah	
Saldo Akhir Piutang	2.435.663.820.047,00
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	30.675.629.900,00
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	438.200.992.000,00
Koreksi Kurang Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	803.333.294.000,00
Total Penambahan	3.707.873.735.947,00
Mutasi Kurang	
Saldo Awal Piutang	2.897.664.180.980,00
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	23.429.767.000,00
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	133.200.866.000,00
Total Pengurangan	3.054.294.813.980,00
Pendapatan-LO	12.092.029.952.030,00



5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Rp2.484.384.706.316,54

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp2.484.384.706.316,54, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.275.251.530.382,75 mengalami **kenaikan** sebesar Rp209.133.175.933,79 atau 9,19%, dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Retribusi Jasa Umum – LO	2.559.393.583.760,00	98.649.874.445,66	287.321.151.238,70	2.370.722.306.966,96	2.175.849.148.306,50	194.873.158.660,46	8,96
2 Retribusi Jasa Usaha - LO	105.892.413.738,00	737.482.714,11	1.066.519.178,53	105.563.377.273,58	92.996.014.741,25	12.567.362.532,33	13,51
3 Retribusi Perizinan Tertentu - LO	8.099.022.076,00	-	-	8.099.022.076,00	6.406.367.335,00	1.692.654.741,00	26,42
Jumlah	2.673.385.019.574,00	99.387.357.159,77	288.387.670.417,23	2.484.384.706.316,54	2.275.251.530.382,75	209.133.175.933,79	9,19

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp2.484.384.706.316,54, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA

2.673.385.019.574,00

Mutasi Tambah

Saldo Akhir Piutang	93.556.799.785,66
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	306.790.184,11
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	5.026.345.698,00
Reklasifikasi Antar Akun	277.200.930,00
Koreksi Kurang Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	220.220.562,00

Total Penambahan

99.387.357.159,77

Mutasi Kurang

Saldo Awal Piutang	111.893.619.660,73
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	535.075.718,53
Reklasifikasi Antar Akun	277.200.930,00
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	175.681.774.107,97

Total Pengurangan

288.387.670.417,23

Total Pendapatan-LO

2.484.384.706.316,54

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO

Rp2.370.722.306.966,96

Pendapatan Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp2.370.722.306.966,96 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.175.849.148.306,50 mengalami **kenaikan** sebesar Rp194.873.158.660,46 atau 8,96% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	2.559.393.583.760,00	98.649.874.445,66	287.321.151.238,70	2.370.722.306.966,96	2.173.798.004.306,50	196.924.302.660,46	9,06
2 Retribusi Pelayanan Pasar-LO	-	-	-	-	2.051.144.000,00	(2.051.144.000,00)	(100,00)
3 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	-	-	-	-	-	-	-
4 Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.559.393.583.760,00	98.649.874.445,66	287.321.151.238,70	2.370.722.306.966,96	2.175.849.148.306,50	194.873.158.660,46	8,96



Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.370.722.306.966,96 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA	2.559.393.583.760,00
Mutasi Tambah	
Saldo Akhir Piutang	93.403.308.185,66
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluaarsa	5.026.345.698,00
Koreksi Kurang Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	220.220.562,00
Total Penambahan	98.649.874.445,66
Mutasi Kurang	
Saldo Awal Piutang	111.639.377.130,73
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	175.681.774.107,97
Total Pengurangan	287.321.151.238,70
Total Pendapatan-LO	2.370.722.306.966,96

5.4.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO **Rp2.370.722.306.966,95**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp2.370.722.306.966,95, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.173.798.004.306,50 mengalami **kenaikan** sebesar Rp196.924.302.660,46 atau 9,06% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Kesehatan	28.652.944.116,00	40.000,00	69.321.200,00	28.583.662.916,00	27.248.557.486,00	1.335.105.430,00	4,90
2 RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.217.075.353.072,00	80.998.948.264,60	251.586.661.383,97	1.046.487.639.952,62	992.395.109.996,00	54.092.529.956,63	5,45
3 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	909.500.137.860,00	11.204.048.900,32	16.739.887.527,41	903.964.299.232,91	776.059.069.867,50	127.905.229.365,41	16,48
4 RSUD dr. Adhyatma MPH	181.317.535.662,00	4.349.844.258,00	16.784.204.643,60	168.883.175.276,40	172.130.389.216,00	(3.247.213.939,60)	(1,89)
5 RSUD dr. Rehatta	67.306.925.589,00	73.299.139,74	97.847.398,72	67.282.377.330,02	60.880.500.166,00	6.401.877.164,02	10,52
6 RSJD Dr. Amino Gondohuto	53.203.658.202,00	1.529.688.605,00	1.535.793.043,00	53.197.553.764,00	52.392.441.177,00	805.112.587,00	1,54
7 RSJD Dr. Arif Zainudin	42.993.539.829,00	355.087.405,00	346.352.590,00	43.002.274.644,00	40.879.508.905,00	2.122.765.739,00	5,19
8 RSJD Dr. RM Sedjarwadi Klaten	59.343.489.430,00	138.917.873,00	161.083.452,00	59.321.323.851,00	51.812.427.493,00	7.508.896.358,00	14,49
Jumlah	2.559.393.583.760,00	98.649.874.445,66	287.321.151.238,70	2.370.722.306.966,95	2.173.798.004.306,50	196.924.302.660,46	9,06

5.4.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar **Rp0,00**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.051.144.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.051.144.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Perhubungan	-	-	-	-	1.990.420.000,00	(1.990.420.000,00)	(100,00)
2 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	-	-	-	15.725.000,00	(15.725.000,00)	(100,00)
3 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	44.999.000,00	(44.999.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	2.051.144.000,00	(2.051.144.000,00)	(100,00)

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor



12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diklasifikasikan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

5.4.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO

Rp105.563.377.273,59

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp105.563.377.273,59 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp92.996.014.741,25 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.567.362.532,33 atau 13,51% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	-	222.200.930,00	222.200.930,00	-	50.519.324.368,25	(50.519.324.368,25)	(100,00)
2 Retribusi Tempat Pelelangan-LO	-	-	-	-	92.042.000,00	(92.042.000,00)	(100,00)
3 Retribusi Terminal-LO	-	-	-	-	315.420.000,00	(315.420.000,00)	(100,00)
4 Retribusi Tempat Khusus Parkir -LO	-	-	-	-	5.160.417.195,00	(5.160.417.195,00)	(100,00)
5 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa-LO	9.154.865.000,00	306.790.184,11	535.075.718,53	8.926.579.465,58	7.927.263.000,00	999.316.465,58	12,61
6 Retribusi Kepelabuhanan-LO	-	-	-	-	11.368.920.000,00	(11.368.920.000,00)	(100,00)
7 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga -LO	-	-	-	-	2.266.141.000,00	(2.266.141.000,00)	(100,00)
8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	-	-	-	-	15.346.487.178,00	(15.346.487.178,00)	(100,00)
9 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	10.724.007.278,00	-	1.250.000,00	10.722.757.278,00	-	10.722.757.278,00	100,00
10 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	12.662.500,00	-	-	12.662.500,00	-	12.662.500,00	100,00
11 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	6.026.009.500,00	-	-	6.026.009.500,00	-	6.026.009.500,00	100,00
12 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	11.855.310.000,00	-	-	11.855.310.000,00	-	11.855.310.000,00	100,00
13 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	5.113.405.700,00	-	-	5.113.405.700,00	-	5.113.405.700,00	100,00
14 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	16.047.506.362,00	-	-	16.047.506.362,00	-	16.047.506.362,00	100,00
15 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	46.958.647.398,00	208.491.600,00	307.992.530,00	46.859.146.468,00	-	46.859.146.468,00	100,00
Jumlah	105.892.413.738,00	737.482.714,11	1.066.519.178,53	105.563.377.273,59	92.996.014.741,25	12.567.362.532,33	13,51

Tahun 2024 terdapat Pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, kepelabuhanan, tempat rekreasi dan produksi usaha daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami perubahan nomenklatur. Realisasi Retribusi Jasa Usaha-LO sebesar Rp105.563.377.273,59, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :



Pendapatan LRA	105.892.413.738,00
Mutasi Tambah	
Saldo Akhir Piutang	153.491.600,00
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	306.790.184,11
Reklasifikasi Antar Akun	277.200.930,00
Total Penambahan	737.482.714,11
Mutasi Kurang	
Saldo Awal Piutang	254.242.530,00
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	535.075.718,53
Reklasifikasi Antar Akun	277.200.930,00
Total Pengurangan	1.066.519.178,53
Total Pendapatan-LO	105.563.377.273,59

5.4.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah -LO

Rp0,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp50.519.324.368,25 mengalami **penurunan** sebesar (Rp50.519.324.368,25) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	5.519.168.000,00	(5.519.168.000,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	2.863.625.000,00	(2.863.625.000,00)	(100,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	-	12.879.094.115,00	(12.879.094.115,00)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	29.140.930,00	29.140.930,00	-	4.737.923.717,00	(4.737.923.717,00)	(100,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	410.578.640,00	(410.578.640,00)	(100,00)
6	Dinas Sosial	-	-	-	-	229.047.200,00	(229.047.200,00)	(100,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	510.497.750,00	(510.497.750,00)	(100,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	70.690.000,00	(70.690.000,00)	(100,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	1.695.195.500,00	(1.695.195.500,00)	(100,00)
10	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	419.035.000,00	(419.035.000,00)	(100,00)
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	96.000.000,00	(96.000.000,00)	(100,00)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	33.000.000,00	(33.000.000,00)	(100,00)
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-	253.549.000,00	(253.549.000,00)	(100,00)
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	38.738.500,00	(38.738.500,00)	(100,00)
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	4.129.098.010,00	(4.129.098.010,00)	(100,00)
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-	1.212.125.500,00	(1.212.125.500,00)	(100,00)
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	2.170.406.450,00	(2.170.406.450,00)	(100,00)



		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	1.627.146.749,00	(1.627.146.749,00)	(100,00)
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	193.060.000,00	193.060.000,00	-	2.233.586.525,00	(2.233.586.525,00)	(100,00)
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	30.240.000,00	(30.240.000,00)	(100,00)
21	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-	2.742.883.434,00	(2.742.883.434,00)	(100,00)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	2.641.086.278,25	(2.641.086.278,25)	(100,00)
23	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	2.612.469.000,00	(2.612.469.000,00)	(100,00)
25	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	769.740.000,00	(769.740.000,00)	(100,00)
26	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	552.600.000,00	(552.600.000,00)	(100,00)
27	Badan Penghubung	-	-	-	-	29.800.000,00	(29.800.000,00)	(100,00)
	Jumlah	-	222.200.930,00	222.200.930,00	-	50.519.324.368,25	(50.519.324.368,25)	(100,00)

5.4.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan-LO Rp0,00

Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp92.042.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp92.042.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	92.042.000,00	(92.042.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	92.042.000,00	(92.042.000,00)	(100,00)

5.4.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Terminal-LO Rp0,00

Pendapatan Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp315.420.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp315.420.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	315.420.000,00	(315.420.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	315.420.000,00	(315.420.000,00)	(100,00)

5.4.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp0,00

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.160.417.195,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp5.160.417.195,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Kesehatan	-	-	-	-	42.413.000,00	(42.413.000,00)	(100,00)
2 Dinas Perhubungan	-	-	-	-	2.030.965.000,00	(2.030.965.000,00)	(100,00)
3 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-	3.087.039.195,00	(3.087.039.195,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	5.160.417.195,00	(5.160.417.195,00)	(100,00)



5.4.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Tempat

Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO

Rp8.926.579.465,58

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terealisasi sebesar Rp8.926.579.465,58 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.927.263.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp999.316.465,58 atau 12,61% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	332.915.000,00	-	-	332.915.000,00	707.623.000,00	(374.708.000,00)	(52,95)
2 Dinas Kesehatan	1.888.250.000,00	-	-	1.888.250.000,00	-	1.888.250.000,00	100,00
3 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	44.000.000,00	-	-	44.000.000,00	-	44.000.000,00	100,00
4 Dinas Sosial	25.200.000,00	-	-	25.200.000,00	-	25.200.000,00	100,00
5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	206.500.000,00	-	-	206.500.000,00	189.000.000,00	17.500.000,00	9,26
6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	-	2.500.000,00	100,00
7 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	327.150.000,00	-	-	327.150.000,00	413.180.000,00	(86.030.000,00)	(20,82)
8 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	100,00
9 Dinas Pertanian dan Perkebunan	56.100.000,00	-	-	56.100.000,00	78.100.000,00	(22.000.000,00)	(28,17)
10 Sekretariat Daerah	131.925.000,00	-	-	131.925.000,00	126.400.000,00	5.525.000,00	4,37
11 Sekretariat DPRD	382.450.000,00	-	-	382.450.000,00	325.450.000,00	57.000.000,00	17,51
12 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.971.800.000,00	306.790.184,11	535.075.718,53	4.743.514.465,58	5.354.650.000,00	(611.135.534,42)	(11,41)
13 Badan Penghubung	784.875.000,00	-	-	784.875.000,00	732.860.000,00	52.015.000,00	7,10
Jumlah	9.154.865.000,00	306.790.184,11	535.075.718,53	8.926.579.465,58	7.927.263.000,00	999.316.465,58	12,61

5.4.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Kepelabuhan-LO

Rp0,00

Pendapatan Retribusi Kepelabuhan terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.368.920.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp11.368.920.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	11.368.920.000,00	(11.368.920.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	11.368.920.000,00	(11.368.920.000,00)	(100,00)

5.4.1.1.2.2.7 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO

Rp0,00

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.266.141.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.266.141.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	856.566.000,00	(856.566.000,00)	(100,00)
2 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-	1.409.575.000,00	(1.409.575.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	2.266.141.000,00	(2.266.141.000,00)	(100,00)



5.4.1.1.2.2.8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO

Rp0,00

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.346.487.178,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp15.346.487.178,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	7.740.000,00	(7.740.000,00)	(100,00)
2 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	2.238.831.600,00	(2.238.831.600,00)	(100,00)
3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	4.944.791.687,00	(4.944.791.687,00)	(100,00)
4 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-	8.154.569.891,00	(8.154.569.891,00)	(100,00)
5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	554.000,00	(554.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	15.346.487.178,00	(15.346.487.178,00)	(100,00)

5.4.1.1.2.2.9 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO

Rp10.722.757.278,00

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp10.722.757.278,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.722.757.278,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.388.194.000,00	-	-	3.388.194.000,00	-	3.388.194.000,00	100,00
2 Dinas Kesehatan	46.800.000,00	-	-	46.800.000,00	-	46.800.000,00	100,00
3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	100,00
4 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	4.800.000,00	-	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	100,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	100,00
6 Dinas Sosial	34.700.000,00	-	-	34.700.000,00	-	34.700.000,00	100,00
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00	-	4.300.000,00	100,00
8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.100.000,00	-	-	5.100.000,00	-	5.100.000,00	100,00
9 Dinas Perhubungan	2.208.650.000,00	-	-	2.208.650.000,00	-	2.208.650.000,00	100,00
10 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	412.275.000,00	-	-	412.275.000,00	-	412.275.000,00	100,00
11 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.750.000,00	-	-	21.750.000,00	-	21.750.000,00	100,00
12 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	78.890.000,00	-	-	78.890.000,00	-	78.890.000,00	100,00
13 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22.620.000,00	-	-	22.620.000,00	-	22.620.000,00	100,00
14 Dinas Kelautan dan Perikanan	1.817.398.617,00	-	-	1.817.398.617,00	-	1.817.398.617,00	100,00
15 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.335.000,00	-	-	7.335.000,00	-	7.335.000,00	100,00
16 Dinas Pertanian dan Perkebunan	42.032.000,00	-	-	42.032.000,00	-	42.032.000,00	100,00
17 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	1.200.000,00	100,00
18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.600.000,00	-	1.250.000,00	19.350.000,00	-	19.350.000,00	100,00
19 Sekretariat Daerah	391.300.000,00	-	-	391.300.000,00	-	391.300.000,00	100,00
20 Sekretariat DPRD	522.000.000,00	-	-	522.000.000,00	-	522.000.000,00	100,00
21 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.185.000,00	-	-	31.185.000,00	-	31.185.000,00	100,00
22 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.604.977.661,00	-	-	1.604.977.661,00	-	1.604.977.661,00	100,00
23 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	31.500.000,00	-	-	31.500.000,00	-	31.500.000,00	100,00
24 Badan Penghubung	4.800.000,00	-	-	4.800.000,00	-	4.800.000,00	100,00
Jumlah	10.724.007.278,00	-	1.250.000,00	10.722.757.278,00	-	10.722.757.278,00	100,00



**5.4.1.1.2.2.10 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak,
Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya
dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO**

Rp12.662.500,00

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-LO terealisasi sebesar Rp12.662.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.662.500,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.662.500,00	-	-	12.662.500,00	-	12.662.500,00	100,00
Jumlah	12.662.500,00	-	-	12.662.500,00	-	12.662.500,00	100,00

**5.4.1.1.2.2.11 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir
Diluar Badan Jalan-LO**

Rp6.026.009.500,00

Pendapatan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-LO terealisasi sebesar Rp6.026.009.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.026.009.500,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Kesehatan	47.308.000,00	-	-	47.308.000,00	-	47.308.000,00	100,00
2 Dinas Perhubungan	2.160.523.000,00	-	-	2.160.523.000,00	-	2.160.523.000,00	100,00
3 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	104.078.000,00	-	-	104.078.000,00	-	104.078.000,00	100,00
4 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24.256.000,00	-	-	24.256.000,00	-	24.256.000,00	100,00
5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.689.844.500,00	-	-	3.689.844.500,00	-	3.689.844.500,00	100,00
Jumlah	6.026.009.500,00	-	-	6.026.009.500,00	-	6.026.009.500,00	100,00

5.4.1.1.2.2.12 Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO

Rp11.855.310.000,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO terealisasi sebesar Rp11.855.310.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp11.855.310.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Kelautan dan Perikanan	11.855.310.000,00	-	-	11.855.310.000,00	-	11.855.310.000,00	100,00
Jumlah	11.855.310.000,00	-	-	11.855.310.000,00	-	11.855.310.000,00	100,00

**5.4.1.1.2.2.13 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata,
dan Olahraga-LO**

Rp5.113.405.700,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO terealisasi sebesar Rp5.113.405.700,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.113.405.700,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	492.869.000,00	-	-	492.869.000,00	-	492.869.000,00	100,00
2 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	780.000,00	-	-	780.000,00	-	780.000,00	100,00
3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	978.467.000,00	-	-	978.467.000,00	-	978.467.000,00	100,00
4 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3.634.089.700,00	-	-	3.634.089.700,00	-	3.634.089.700,00	100,00
5 Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	-	7.200.000,00	100,00
Jumlah	5.113.405.700,00	-	-	5.113.405.700,00	-	5.113.405.700,00	100,00



5.4.1.1.2.2.14 Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha

Pemerintah Daerah-LO

Rp16.047.506.362,00

Pendapatan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO terealisasi sebesar Rp16.047.506.362,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.047.506.362,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.919.000,00	-	-	8.919.000,00	-	8.919.000,00	100,00
2 Dinas Kelautan dan Perikanan	2.171.623.000,00	-	-	2.171.623.000,00	-	2.171.623.000,00	100,00
3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.873.431.442,00	-	-	4.873.431.442,00	-	4.873.431.442,00	100,00
4 Dinas Pertanian dan Perkebunan	8.993.126.920,00	-	-	8.993.126.920,00	-	8.993.126.920,00	100,00
5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	406.000,00	-	-	406.000,00	-	406.000,00	100,00
Jumlah	16.047.506.362,00	-	-	16.047.506.362,00	-	16.047.506.362,00	100,00

5.4.1.1.2.2.15 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO

Rp 46.859.146.468,00

Pendapatan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO terealisasi sebesar Rp46.859.146.468,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 46.859.146.468,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.505.076.000,00	-	-	2.505.076.000,00	-	2.505.076.000,00	100,00
2 Dinas Kesehatan	507.650.000,00	-	-	507.650.000,00	-	507.650.000,00	100,00
3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	13.639.891.551,00	-	-	13.639.891.551,00	-	13.639.891.551,00	100,00
4 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	4.534.334.684,00	-	29.140.930,00	4.505.193.754,00	-	4.505.193.754,00	100,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja	405.550.632,00	-	-	405.550.632,00	-	405.550.632,00	100,00
6 Dinas Sosial	167.970.900,00	-	-	167.970.900,00	-	167.970.900,00	100,00
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	940.616.000,00	-	-	940.616.000,00	-	940.616.000,00	100,00
8 Dinas Ketahanan Pangan	110.955.000,00	-	-	110.955.000,00	-	110.955.000,00	100,00
9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.322.299.250,00	-	-	1.322.299.250,00	-	1.322.299.250,00	100,00
10 Dinas Perhubungan	488.560.625,00	-	-	488.560.625,00	-	488.560.625,00	100,00
11 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	97.395.000,00	-	-	97.395.000,00	-	97.395.000,00	100,00
12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.850.000,00	-	-	14.850.000,00	-	14.850.000,00	100,00
13 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	147.060.000,00	-	-	147.060.000,00	-	147.060.000,00	100,00
14 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	18.132.000,00	-	-	18.132.000,00	-	18.132.000,00	100,00
15 Dinas Kelautan dan Perikanan	2.996.032.532,00	-	-	2.996.032.532,00	-	2.996.032.532,00	100,00
16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.410.668.000,00	-	-	2.410.668.000,00	-	2.410.668.000,00	100,00
17 Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.757.515.501,00	-	-	2.757.515.501,00	-	2.757.515.501,00	100,00
18 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.905.936.000,00	-	-	1.905.936.000,00	-	1.905.936.000,00	100,00
19 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.482.408.884,00	176.450.000,00	246.810.000,00	4.467.048.884,00	-	4.467.048.884,00	100,00
20 Sekretariat Daerah	223.150.000,00	-	-	223.150.000,00	-	223.150.000,00	100,00
21 Sekretariat DPRD	30.600.000,00	-	-	30.600.000,00	-	30.600.000,00	100,00
22 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.451.061.339,00	-	-	1.451.061.339,00	-	1.451.061.339,00	100,00
23 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.177.796.500,00	32.041.600,00	32.041.600,00	1.177.796.500,00	-	1.177.796.500,00	100,00
24 Badan Kepegawaian Daerah	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	-	12.000.000,00	100,00
25 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.520.137.000,00	-	-	4.520.137.000,00	-	4.520.137.000,00	100,00
26 Badan Penghubung	36.000.000,00	-	-	36.000.000,00	-	36.000.000,00	100,00
Jumlah	46.903.647.398,00	208.491.600,00	307.992.530,00	46.859.146.468,00	-	46.859.146.468,00	100,00

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Rp8.099.022.076,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp8.099.022.076,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.406.367.335,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.692.654.741,00 atau 26,42% dengan rincian sebagai berikut :



	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	8.099.022.076,00	-	-	8.099.022.076,00	6.406.367.335,00	1.692.654.741,00	26,42
Jumlah	8.099.022.076,00	-	-	8.099.022.076,00	6.406.367.335,00	1.692.654.741,00	26,42

5.4.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan

Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO

Rp8.099.022.076,00

Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO terealisasi sebesar Rp8.099.022.076,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.406.367.335,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.692.654.741,00 atau 26,42% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.099.022.076,00	-	-	8.099.022.076,00	6.406.367.335,00	1.692.654.741,00	26,42
Jumlah	8.099.022.076,00	-	-	8.099.022.076,00	6.406.367.335,00	1.692.654.741,00	26,42

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan-LO

Rp1.070.437.854.900,05

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.070.437.854.900,05, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp895.834.519.652,31 mengalami **kenaikan** sebesar Rp174.603.335.247,74 atau 19,49% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO	-	-	-	-	1.839.800.755,00	(1.839.800.755,00)	(100,00)
2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	546.657.345.508,00	526.180.007.732,75	2.399.498.340,70	1.070.437.854.900,05	893.994.718.897,31	176.443.136.002,74	19,74
Jumlah	546.657.345.508,00	526.180.007.732,75	2.399.498.340,70	1.070.437.854.900,05	895.834.519.652,31	174.603.335.247,74	19,49

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO sebesar Rp1.070.437.854.900,05, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA

546.657.345.508,00

Mutasi Tambah

Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD

526.180.007.732,75

Total Penambahan

526.180.007.732,75

Mutasi Kurang

Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD

2.399.498.340,70

Total Pengurangan

2.399.498.340,70

Pendapatan-LO

1.070.437.854.900,05



5.4.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah

(Dividen) atas Penyertaan pada BUMN-LO

Rp0,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMN terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.839.800.755,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.839.800.755,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida – LO	-	-	-	-	1.839.800.755,00	(1.839.800.755,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	1.839.800.755,00	(1.839.800.755,00)	(100,00)

PT Asuransi Bangun Askrida masih menanggung kerugian kumulatif, dan cenderung tidak sehat, maka kebijakan dari OJK yang melarang PT Asuransi Bangun Askrida untuk melakukan pembagian deviden dan pembentukan cadangan teknis sesuai surat OJK Nomor S-362/PD.11/2024 tanggal 18 April 2024 hal larangan pembagian deviden dan pembentukan cadangan teknis yang mencukupi dan Surat OJK Nomor S-37/PD.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal Reminder terkait larangan pembagian deviden masih berlaku.

5.4.1.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah

(Dividen) atas Penyertaan pada BUMD-LO

Rp1.070.437.854.900,05

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMD terealisasi sebesar Rp1.070.437.854.900,05, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp893.994.718.897,31 mengalami **kenaikan** sebesar Rp176.443.136.002,74 atau 19,74% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Bagian Laba PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	4.712.725.152,00	5.334.592.176,55	-	10.047.317.328,55	6.200.954.148,62	3.846.363.179,93	62,03
2 Bagian Laba PT. Bank Jateng	417.903.370.127,00	413.366.495.763,99	-	831.269.865.890,99	654.740.513.695,73	176.529.352.195,26	26,96
3 Bagian Laba BPR-BKK Se- Jateng (Perseroda)	58.679.974.552,00	55.781.673.953,36	-	114.461.648.505,36	106.752.188.517,38	7.709.459.987,98	7,22
4 Bagian Laba PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	10.340.882.136,00	4.114.901.382,07	-	14.455.783.518,07	18.814.496.496,95	(4.358.712.978,88)	(23,17)
5 Bagian Laba PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	12.334.438.119,00	11.204.684.755,00	-	23.539.122.874,00	22.426.251.126,00	1.112.871.748,00	4,96
6 Deviden PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	5.788.118.477,00	-	2.399.498.340,70	3.388.620.136,30	10.520.018.600,53	(7.131.398.464,23)	(67,79)
7 Deviden PT Jateng Petro Energi (Perseroda)	28.691.237.844,00	26.127.201.076,00	-	54.818.438.920,00	58.875.579.618,00	(4.057.140.698,00)	(6,89)
8 Deviden PT Jamkrida Jateng (Perseroda)	8.206.599.101,00	10.250.458.625,78	-	18.457.057.726,78	15.664.716.694,10	2.792.341.032,68	17,83
Jumlah	546.657.345.508,00	526.180.007.732,75	2.399.498.340,70	1.070.437.854.900,05	893.994.718.897,31	176.443.136.002,74	19,74



5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Rp314.429.805.623,31

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp314.429.805.623,31, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp433.784.794.046,42 mengalami **penurunan** sebesar (Rp119.354.988.423,11) atau (27,51%) dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	1.885.596.475,00	-	-	1.885.596.475,00	2.077.258.017,00	(191.661.542,00)	(9,23)
2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	15.238.790,00	-	-	15.238.790,00	411.000,00	14.827.790,00	3.607,73
3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	4.502.314.827,00	370.051.669,00	370.051.669,00	4.502.314.827,00	2.531.327.437,00	1.970.987.390,00	77,86
4 Hasil Kerja Sama Daerah - LO	572.000,00	-	-	572.000,00	-	572.000,00	100,00
5 Jasa Giro - LO	13.723.294.067,00	-	-	13.723.294.067,00	18.858.533.445,00	(5.135.239.378,00)	(27,23)
6 Pendapatan Bunga - LO	14.374.219.008,00	-	-	14.374.219.008,00	32.911.785.082,00	(18.537.566.074,00)	(56,33)
7 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	47.014.956,00	-	-	47.014.956,00	1.800.000,00	45.214.956,00	2.511,94
8 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	97.540.651.269,00	55.000.000,00	55.000.000,00	97.540.651.269,00	67.427.652.977,00	30.112.998.292,00	44,66
9 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	3.246.408.417,00	-	-	3.246.408.417,00	2.642.694.739,00	603.713.678,00	22,84
10 Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	113.450.318.619,00	-	-	113.450.318.619,00	241.621.801.355,00	(128.171.482.736,00)	(53,05)
11 Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	42.955.007,00	-	-	42.955.007,00	62.417.887,00	(19.462.880,00)	(31,18)
12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	-	-	-	-	474.991.000,00	(474.991.000,00)	
13 Pendapatan dari Pengembalian - LO	1.795.000,00	-	-	1.795.000,00	2.979.350.614,00	(2.977.555.614,00)	(99,94)
14 Pendapatan BLUD - LO	65.780.604.756,00	1.890.685.971,16	2.099.363.538,85	65.571.927.188,31	62.165.224.627,42	3.406.702.560,89	5,48
15 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-	2.545.866,00	(2.545.866,00)	(100,00)
16 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	27.500.000,00	-	-	27.500.000,00	27.000.000,00	500.000,00	1,85
Jumlah	314.638.483.191,00	2.315.737.640,16	2.524.415.207,85	314.429.805.623,31	433.784.794.046,42	(119.354.988.423,11)	(27,51)

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp314.429.805.623,31, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA

314.638.483.191,00

Mutasi Tambah

Saldo Akhir Piutang 1.593.345.868,38
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka 394.664.495,78
Reklasifikasi Antar Akun 55.000.000,00

Koreksi Kurang Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya 272.727.276,00

Total Penambahan

2.315.737.640,16

Mutasi Kurang

Saldo Awal Piutang 1.832.728.064,88
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka 555.729.802,97
Reklasifikasi Antar Akun 55.000.000,00
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya 80.957.340,00



**Total Pengurangan
Pendapatan-LO**

**2.524.415.207,85
314.429.805.623,31**

5.4.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Rp1.885.596.475,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.885.596.475,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.077.258.017,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp191.661.542,00) atau (9,23%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	50.585.500,00	-	-	50.585.500,00	86.343.000,00	(35.757.500,00)	(41,41)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	65.000.000,00	-	-	65.000.000,00	2.000.000,00	63.000.000,00	3.150,00
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.770.010.975,00	-	-	1.770.010.975,00	1.988.915.017,00	(218.904.042,00)	(11,01)
	Jumlah	1.885.596.475,00	-	-	1.885.596.475,00	2.077.258.017,00	(191.661.542,00)	(9,23)

5.4.1.1.4.2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar

BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Rp15.238.790,00

Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan (LO) terealisasi sebesar Rp15.238.790,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp411.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.827.790,00 atau 3.607,73% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.238.790,00	-	-	15.238.790,00	411.000,00	14.827.790,00	3.607,73
	Jumlah	15.238.790,00	-	-	15.238.790,00	411.000,00	14.827.790,00	3.607,73

5.4.1.1.4.3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Rp4.502.314.827,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp4.502.314.827,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.531.327.437,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.970.987.390,00 atau 77,86% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	102.648.057,00	-	-	102.648.057,00	-	102.648.057,00	100,00
2	Dinas Koperasi dan UMKM	305.435.175,00	-	-	305.435.175,00	275.535.261,00	29.899.914,00	10,85
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	21.000.000,00	(21.000.000,00)	(100,00)
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.008.680.000,00	-	-	2.008.680.000,00	1.740.001.176,00	268.678.824,00	15,44
5	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	-	370.051.669,00	370.051.669,00	-	-	-	-
6	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	184.000.000,00	(184.000.000,00)	(100,00)
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.085.551.595,00	-	-	2.085.551.595,00	310.791.000,00	1.774.760.595,00	571,05
	Jumlah	4.502.314.827,00	370.051.669,00	370.051.669,00	4.502.314.827,00	2.531.327.437,00	1.970.987.390,00	77,86

5.4.1.1.4.4 Hasil Kerja Sama Daerah

Rp572.000,00

Pendapatan dari Hasil Kerja Sama Daerah terealisasi sebesar Rp572.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00, mengalami **kenaikan** sebesar Rp572.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :



	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	572.000,00	-	-	572.000,00	-	572.000,00	100,00
Jumlah	572.000,00	-	-	572.000,00	-	572.000,00	100,00

5.4.1.1.4.5 Jasa Giro-LO

Rp13.723.294.067,00

Pendapatan dari Jasa Giro terealisasi sebesar Rp13.723.294.067,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.858.533.445,00, mengalami **penurunan** sebesar (Rp5.135.239.378,00) atau (27,23%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.723.294.067,00	-	-	13.723.294.067,00	18.858.533.445,00	(5.135.239.378,00)	(27,23)
Jumlah	13.723.294.067,00	-	-	13.723.294.067,00	18.858.533.445,00	(5.135.239.378,00)	(27,23)

5.4.1.1.4.6 Pendapatan Bunga-LO

Rp14.374.219.008,00

Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp14.374.219.008,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.911.785.082,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp18.537.566.074,00) atau (56,33%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.374.219.008,00	-	-	14.374.219.008,00	32.911.785.082,00	(18.537.566.074,00)	(56,33)
Jumlah	14.374.219.008,00	-	-	14.374.219.008,00	32.911.785.082,00	(18.537.566.074,00)	(56,33)

5.4.1.1.4.7 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO

Rp3.700.000,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp3.700.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.800.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.900.000,00 atau 105,56% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.700.000,00	-	-	3.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	105,56
Jumlah	3.700.000,00	-	-	3.700.000,00	1.800.000,00	1.900.000,00	105,56

5.4.1.1.4.8 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO

Rp97.583.966.225,00

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terealisasi sebesar Rp97.583.966.225,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67.427.652.977,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp30.156.313.248,00 atau 44,72% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	50.897.117,00	-	-	50.897.117,00	403.063.453,00	(352.166.336,00)	(87,37)
2 Dinas Kesehatan	152.855.093,00	-	-	152.855.093,00	12.920.000,00	139.935.093,00	1.083,09
3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	287.911.000,00	-	-	287.911.000,00	2.154.650.700,00	(1.866.739.700,00)	(86,64)
4 Dinas Ketahanan Pangan	118.585.000,00	-	-	118.585.000,00	57.712.962,00	60.872.038,00	105,47
5 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	649.267.500,00	-	-	649.267.500,00	17.970.750,00	631.296.750,00	3.512,91
6 Dinas Perhubungan	34.462.553.400,00	-	-	34.462.553.400,00	32.476.216.700,00	1.986.336.700,00	6,12
7 Dinas Penanaman Modal dan	24.000.000,00	-	-	24.000.000,00	-	24.000.000,00	100,00

4



		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	556.384.950,00	-	-	556.384.950,00	172.034.500,00	384.350.450,00	223,41
9	Dinas Arsip dan Perpustakaan	12.125.000,00	-	-	12.125.000,00	2.650.000,00	9.475.000,00	357,55
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	113.678.124,00	-	-	113.678.124,00	104.588.560,00	9.089.564,00	8,69
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	670.916.715,00	(669.916.715,00)	(99,85)
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	14.509.500,00	-	-	14.509.500,00	-	14.509.500,00	100,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.640.360.900,00	55.000.000,00	55.000.000,00	1.640.360.900,00	2.700.909.505,00	(1.060.548.605,00)	(39,27)
14	Sekretariat DPRD	12.138.909,00	-	-	12.138.909,00	-	12.138.909,00	100,00
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.144.825,00	-	-	15.144.825,00	74.161.355,00	(59.016.530,00)	(79,58)
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.432.033.899,00	-	-	32.432.033.899,00	7.693.130.898,00	24.738.903.001,00	321,57
17	Badan Kepegawaian Daerah	564.800.000,00	-	-	564.800.000,00	888.950.000,00	(324.150.000,00)	(36,46)
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.475.721.008,00	-	-	26.475.721.008,00	19.997.776.879,00	6.477.944.129,00	32,39
	Jumlah	97.583.966.225,00	55.000.000,00	55.000.000,00	97.583.966.225,00	67.427.652.977,00	30.156.313.248,00	44,72

5.4.1.1.4.9 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO

Rp3.246.408.417,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp3.246.408.417,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.642.694.739,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp603.713.678,00 atau 22,84% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.246.408.417,00	-	-	3.246.408.417,00	2.642.694.739,00	603.713.678,00	22,84
	Jumlah	3.246.408.417,00	-	-	3.246.408.417,00	2.642.694.739,00	603.713.678,00	22,84

5.4.1.1.4.10 Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO

Rp113.450.318.619,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp113.450.318.619,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp241.621.801.355,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp128.171.482.736,00) atau (53,05%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	113.450.318.619,00	-	-	113.450.318.619,00	241.621.801.355,00	(128.171.482.736,00)	(53,05)
	Jumlah	113.450.318.619,00	-	-	113.450.318.619,00	241.621.801.355,00	(128.171.482.736,00)	(53,05)

5.4.1.1.4.11 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO

Rp42.955.007,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp42.955.007,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp62.417.887,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp19.462.880,00) atau (31,18%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.047.495,00	-	-	1.047.495,00	2.155.325,00	(1.107.830,00)	(51,40)
2	Dinas Kesehatan	3.000,00	-	-	3.000,00	25.000,00	(22.000,00)	(88,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	943.700,00	-	-	943.700,00	-	943.700,00	100,00



		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	216.894,00	-	-	216.894,00	452.837,00	(235.943,00)	(52,10)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.000,00	-	-	1.000,00	-	1.000,00	100,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
7	Dinas Perhubungan	14.094.400,00	-	-	14.094.400,00	12.291.580,00	1.802.820,00	14,67
8	Dinas Kelautan dan perikanan	24.757.171,00	-	-	24.757.171,00	45.373.245,00	(20.616.074,00)	(45,44)
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.250,00	-	-	2.250,00	6.000,00	(3.750,00)	(62,50)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	591.300,00	-	-	591.300,00	900.000,00	(308.700,00)	(34,30)
11	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	10.000,00	(10.000,00)	(100,00)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	18.900,00	(18.900,00)	(100,00)
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.297.797,00	-	-	1.297.797,00	985.000,00	312.797,00	31,76
Jumlah		42.955.007,00	-	-	42.955.007,00	62.417.887,00	(19.462.880,00)	(31,18)

5.4.1.1.4.12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO Rp0,00

Pendapatan dari Hasil Eksekusi atas Jaminan terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp474.991.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp474.991.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	474.991.000,00	(474.991.000,00)	(100,00)
Jumlah		-	-	-	-	474.991.000,00	(474.991.000,00)	(100,00)

5.4.1.1.4.13 Pendapatan dari Pengembalian-LO Rp1.795.000,00

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp1.795.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.979.350.614,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.977.555.614,00) atau sebesar (99,94%), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.795.000,00	-	-	1.795.000,00	2.979.350.614,00	(2.977.555.614,00)	(99,94)
Jumlah		1.795.000,00	-	-	1.795.000,00	2.979.350.614,00	(2.977.555.614,00)	(99,94)

5.4.1.1.4.14 Pendapatan BLUD-LO Rp65.571.927.188,31

Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp65.571.927.188,31, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp62.165.224.627,42 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.406.702.560,89 atau sebesar 5,48%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	26.061.743.656,00	237.940.485,85	60.629.908,68	26.239.054.233,17	24.841.956.835,28	1.397.097.397,89	5,62
2	RSUD Dr. Margono Soekarno Purwokerto	26.197.850.789,00	586.054.249,57	837.516.384,97	25.946.388.653,60	18.765.733.341,48	7.180.655.312,12	38,26
3	RSUD dr. Adyatma, MPH	5.373.243.563,00	360.581.290,00	539.380.570,82	5.194.444.282,18	5.950.098.360,03	(755.654.077,85)	(12,70)
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.628.328.760,00	358.885.019,59	260.875.228,23	1.726.338.551,36	2.061.821.286,37	(335.482.735,01)	(16,27)
5	RSUD dr. Rehatta	2.335.092.794,00	955.479,00	50.013.699,00	2.286.034.574,00	2.463.797.273,00	(177.762.699,00)	(7,21)
6	RSUD dr. Arif Zainuddin	2.917.148.430,00	340.789.995,00	345.468.295,00	2.912.470.130,00	3.927.895.346,21	(1.015.425.216,21)	(25,85)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.267.196.764,00	5.479.452,15	5.479.452,15	1.267.196.764,00	4.153.922.185,05	(2.886.725.421,05)	(69,49)
Jumlah		65.780.604.756,00	1.890.685.971,16	2.099.363.538,85	65.571.927.188,31	62.165.224.627,42	3.406.702.560,89	5,48



5.4.1.1.4.15 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD

yang tidak Dipisahkan – LO

Rp0,00

Pendapatan Dari Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.545.866,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.545.866,00) atau (100,00%), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	2.545.866,00	(2.545.866,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	2.545.866,00	(2.545.866,00)	(100,00)

5.4.1.1.4.16 Pendapatan Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/

Kontrak-LO

Rp27.500.000,00

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terealisasi sebesar Rp27.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp27.000.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp500.000,00 atau 1,85%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.500.000,00	-	-	27.500.000,00	27.000.000,00	500.000,00	1,85
Jumlah	27.500.000,00	-	-	27.500.000,00	27.000.000,00	500.000,00	1,85

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Rp8.602.512.657.508,00

Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp8.602.512.657.508,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.598.918.995.795,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.593.661.713,00 atau 0,04% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	8.625.363.756.508,00	448.228.876.000,00	471.079.975.000,00	8.602.512.657.508,00	8.598.918.995.795,00	3.593.661.713,00	0,04
2 Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8.625.363.756.508,00	448.228.876.000,00	471.079.975.000,00	8.602.512.657.508,00	8.598.918.995.795,00	3.593.661.713,00	0,04

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami perubahan nomenklatur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp8.602.512.657.508,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA	8.625.363.756.508,00
Mutasi Tambah	
Saldo Akhir Piutang	432.276.078.000,00
Saldo Awal Lebih Salur	15.433.855.000,00
Koreksi atas Lebih Salur Tahun sebelumnya	518.943.000,00
Total Penambahan	448.228.876.000,00
Mutasi Kurang	
Saldo Awal Piutang	53.079.604.000,00
Saldo Akhir Lebih Salur	15.952.798.000,00



Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya 402.047.573.000,00

**Total Pengurangan
Pendapatan-LO**

**471.079.975.000,00
8.602.512.657.508,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Rp8.602.512.657.508,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp8.602.512.657.508,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.598.918.995.795,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.593.661.713,00 atau 0,04% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dana Perimbangan-LO	-	-	-	-	8.560.921.427.795,00	(8.560.921.427.795,00)	(100,00)
2 Insentif Fiskal-LO	8.436.080.000,00	-	-	8.436.080.000,00	37.997.568.000,00	(29.561.488.000,00)	(77,80)
3 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	976.507.947.700,00	448.228.876.000,00	471.079.975.000,00	953.656.848.700,00	-	953.656.848.700,00	100,00
4 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	3.978.828.515.369,00	-	-	3.978.828.515.369,00	-	3.978.828.515.369,00	100,00
5 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	3.661.591.213.439,00	-	-	3.661.591.213.439,00	-	3.661.591.213.439,00	100,00
Jumlah	8.625.363.756.508,00	448.228.876.000,00	471.079.975.000,00	8.602.512.657.508,00	8.598.918.995.795,00	3.593.661.713,00	0,04

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan-LO

Rp0,00

Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.560.921.427.795,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp8.560.921.427.795,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	-	-	-	-	793.712.697.000,00	(793.712.697.000,00)	(100,00)
2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	-	-	-	-	3.819.010.791.028,00	(3.819.010.791.028,00)	(100,00)
3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	-	-	-	-	473.940.472.839,00	(473.940.472.839,00)	(100,00)
4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	-	-	-	-	3.474.257.466.928,00	(3.474.257.466.928,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	8.560.921.427.795,00	(8.560.921.427.795,00)	(100,00)

5.4.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Rp0,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp793.712.697.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp793.712.697.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LO	-	-	-	-	47.337.147.000,00	(47.337.147.000,00)	(100,00)
2 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi - LO	-	-	-	-	428.922.392.000,00	(428.922.392.000,00)	(100,00)
3 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LO	-	-	-	-	311.033.590.000,00	(311.033.590.000,00)	(100,00)
4 Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	-	-	-	-	3.875.738.000,00	(3.875.738.000,00)	(100,00)
5 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	-	-	-	-	416.264.000,00	(416.264.000,00)	(100,00)
6 Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi – LO	-	-	-	-	1.744.962.000,00	(1.744.962.000,00)	(100,00)
7 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi – LO	-	-	-	-	299.440.000,00	(299.440.000,00)	(100,00)
8 Bagi Hasil Dari Minerba – LO	-	-	-	-	83.164.000,00	(83.164.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	793.712.697.000,00	(793.712.697.000,00)	(100,00)

A



5.4.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Rp0,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.819.010.791.028,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.819.010.791.028,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 DAU	-	-	-	-	3.550.426.222.000,00	(3.550.426.222.000,00)	(100,00)
2 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	-	-	-	-	62.181.181.028,00	(62.181.181.028,00)	(100,00)
3 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-	-	-	187.324.934.000,00	(187.324.934.000,00)	(100,00)
4 DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	-	19.078.454.000,00	(19.078.454.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	3.819.010.791.028,00	(3.819.010.791.028,00)	(100,00)

5.4.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Rp0,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp473.940.472.839,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp473.940.472.839,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 DAK Bidang Pendidikan – LO	-	-	-	-	264.965.344.449,00	(264.965.344.449,00)	(100,00)
2 DAK Bidang Kesehatan – LO	-	-	-	-	40.866.296.330,00	(40.866.296.330,00)	(100,00)
3 DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LO	-	-	-	-	12.845.424.770,00	(12.845.424.770,00)	(100,00)
4 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi – LO	-	-	-	-	4.203.097.231,00	(4.203.097.231,00)	(100,00)
5 DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LO	-	-	-	-	34.887.433.699,00	(34.887.433.699,00)	(100,00)
6 DAK Bidang Pertanian – LO	-	-	-	-	38.482.249.589,00	(38.482.249.589,00)	(100,00)
7 DAK Bidang Air Minum – LO	-	-	-	-	59.040.205.500,00	(59.040.205.500,00)	(100,00)
8 DAK Bidang Pariwisata	-	-	-	-	3.710.771.899,00	(3.710.771.899,00)	(100,00)
9 DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	-	14.939.649.372,00	(14.939.649.372,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	473.940.472.839,00	(473.940.472.839,00)	(100,00)

5.4.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Rp0,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.474.257.466.928,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.474.257.466.928,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD-LO	-	-	-	-	1.322.069.021.439,00	(1.322.069.021.439,00)	(100,00)
2 Bantuan Operasional Sekolah -LO	-	-	-	-	2.099.515.123.235,00	(2.099.515.123.235,00)	(100,00)
3 Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)-LO	-	-	-	-	33.834.592.742,00	(33.834.592.742,00)	(100,00)
4 Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan-LO	-	-	-	-	10.343.179.000,00	(10.343.179.000,00)	(100,00)
5 Ddana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	-	-	-	-	2.850.000.000,00	(2.850.000.000,00)	(100,00)
6 Bantuan Biaya Pengolahan Layanan Sampah-LO	-	-	-	-	1.367.855.300,00	(1.367.855.300,00)	(100,00)
7 Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	-	-	-	-	340.234.100,00	(340.234.100,00)	(100,00)
8 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya-LO	-	-	-	-	3.937.461.112,00	(3.937.461.112,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	3.474.257.466.928,00	(3.474.257.466.928,00)	(100,00)



5.4.1.2.1.2 Insentif Fiskal-LO

Rp8.436.080.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp8.436.080.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37.997.568.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp29.561.488.000,00), atau (77,80%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Insentif Fiskal-LO	-	-	-	-	37.997.568.000,00	(37.997.568.000,00)	(100,00)
2 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	8.436.080.000,00	-	-	8.436.080.000,00	-	8.436.080.000,00	100,00
3 Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan-LO	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	8.436.080.000,00	-	-	8.436.080.000,00	37.997.568.000,00	(29.561.488.000,00)	(77,80)

5.4.1.2.1.3 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO

Rp953.656.848.700,00

Dana Bagi Hasil (DBH)-LO terealisasi sebesar Rp953.656.848.700,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp953.656.848.700,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 DBH Pajak-LO	973.009.523.700,00	441.789.356.000,00	464.507.145.000,00	950.291.734.700,00	-	950.291.734.700,00	100,00
2 DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	3.498.424.000,00	6.439.520.000,00	6.572.830.000,00	3.365.114.000,00	-	3.365.114.000,00	100,00
Jumlah	976.507.947.700,00	448.228.876.000,00	471.079.975.000,00	953.656.848.700,00	-	953.656.848.700,00	100,00

5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)-LO

Rp3.978.828.515.369,00

Dana Alokasi Umum (DAU)-LO terealisasi sebesar Rp3.978.828.515.369,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.978.828.515.369,00, atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	3.642.269.672.369,00	-	-	3.642.269.672.369,00	-	3.642.269.672.369,00	100,00
2 DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	336.558.843.000,00	-	-	336.558.843.000,00	-	336.558.843.000,00	100,00
Jumlah	3.978.828.515.369,00	-	-	3.978.828.515.369,00	-	3.978.828.515.369,00	100,00

5.4.1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO

Rp3.661.591.213.439,00

Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp3.661.591.213.439,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.661.591.213.439,00, atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 DAK Fisik-LO	142.445.000.400,00	-	-	142.445.000.400,00	-	-	100,00
2 DAK Non Fisik-LO	3.519.146.213.039,00	-	-	3.519.146.213.039,00	-	-	100,00
Jumlah	3.661.591.213.439,00	-	-	3.661.591.213.439,00	-	-	100,00

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO

Rp1.425.259.230.347,02

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp1.425.259.230.347,02, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.395.921.294.178,41 mengalami **kenaikan** sebesar Rp29.337.936.168,61 atau 2,10% dengan rincian sebagai berikut :



	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Hibah- LO	25.505.460.000,00	1.236.783.043.775,00	3.302.717.258,98	1.258.985.786.516,02	1.395.177.617.696,41	(136.191.831.180,39)	(9,76)
2 Dana Darurat- LO	-	-	-	-	-	-	-
3 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO	137.967.883.033,00	28.305.560.798,00	-	166.273.443.831,00	743.676.482,00	165.529.767.349,00	22.258,30
Jumlah	163.473.343.033,00	1.265.088.604.573,00	3.302.717.258,98	1.425.259.230.347,02	1.395.921.294.178,41	29.337.936.168,61	2,10

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp1.425.259.230.347,02 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA	163.473.343.033,00
Mutasi Tambah	
Hibah Berupa Aset	565.537.326.594,00
Hibah Berupa Bahan Habis Pakai	647.997.850.810,00
Bantuan Pemerintah berupa uang yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa	23.247.866.371,00
Aset Hasil Usaha Mandiri	28.305.560.798,00
Total Penambahan	1.265.088.604.573,00
Mutasi Kurang	
Penyusutan atas Hibah Berupa Aset	3.302.717.258,98
Total Pengurangan	3.302.717.258,98
Pendapatan-LO	1.425.259.230.347,02

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO **Rp1.258.985.786.516,02**

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp1.258.985.786.516,02, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.395.177.617.696,41 mengalami **penurunan** sebesar (136.191.831.180,40) atau (9,76%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO	-	1.174.870.780.465,65	2.979.748.655,65	1.171.891.031.810,00	1.228.918.796.567,64	(57.027.764.757,64)	(4,64)
2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah	-	19.855.857.230,92	39.691.653,33	19.816.165.577,59	47.794.193.610,65	(27.978.028.033,06)	(58,54)
3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO	-	21.810.704.776,00	72.507.500,00	21.738.197.276,00	62.819.451.023,56	(41.081.253.747,56)	(65,40)
4 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO	25.505.460.000,00	19.110.707.447,43	210.769.450,00	44.405.397.997,43	55.294.773.146,56	(10.889.375.149,14)	(19,69)
5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO	-	1.134.993.855,00	-	1.134.993.855,00	350.403.348,00	784.590.507,00	223,91
Jumlah	25.505.460.000,00	1.236.783.043.775,00	3.302.717.258,98	1.258.985.786.516,02	1.395.177.617.696,41	(136.191.831.180,40)	(9,76)



5.4.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO

Rp1.171.891.031.810,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.171.891.031.810,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.228.918.796.567,64 mengalami **penurunan** sebesar (Rp57.027.764.757,64) atau (4,64%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	297.359.690.259,00	6.337.710,80	297.353.352.548,20	136.051.951.961,22	161.301.400.586,98	118,56
2	Dinas Kesehatan	-	629.470.306.554,53	1.426.597.525,00	628.043.709.029,53	577.205.264.491,14	50.838.444.538,39	8,81
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	5.606.376.700,36		5.606.376.700,36	31.077.772,00	5.575.298.928,36	17.939,83
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	55.690.010,76	-	55.690.010,76	1.094.310.425,00	(1.038.620.414,24)	(94,91)
5	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	202.589.604.341,00	1.407.353.419,85	201.182.250.921,15	495.781.253.306,00	(294.599.002.384,85)	(59,42)
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-				1.075.621.474,00	(1.075.621.474,00)	(100,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	589.885.000,00	-	589.885.000,00	8.619.889.950,00	(8.030.004.950,00)	(93,16)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-				1.058.169.898,00	(1.058.169.898,00)	(100,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-				6.431.985.086,67	(6.431.985.086,67)	(100,00)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil		4.058.736.000,00		4.058.736.000,00		4.058.736.000,00	100,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan		292.593.000,00	139.460.000,00	153.133.000,00	-	153.133.000,00	100,00
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		24.331.785.676,00		24.331.785.676,00	-	24.331.785.676,00	100,00
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		10.516.112.924,00	-	10.516.112.924,00		10.516.112.924,00	100,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-				179.147.083,31	(179.147.083,31)	(100,00)
15	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	-				1.390.125.120,30	(1.390.125.120,30)	(100,00)
Jumlah		-	1.174.870.780.465,65	2.979.748.655,65	1.171.891.031.810,00	1.228.918.796.567,64	(57.027.764.757,64)	(4,64)

Adapun keterangan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Hibah Tahun 2025	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	297.353.352.548,20	Hibah Peralatan Mesin, Monumen dan Instalasi dari Kementerian Pendidikan
2	Dinas Kesehatan	628.043.709.029,53	Hibah Peralatan Mesin dan Barang Habis Pakai Kesehatan dari Kementerian Kesehatan
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	5.606.376.700,36	Hibah Renovasi Ruang Lab TB dan Obat-Obatan dari Kementerian Kesehatan
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	55.690.010,76	Hibah Barang Habis Pakai dari BKKBN dan RS Wijayakusuma
5	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	201.182.250.921,15	Hibah Tanah, Jalan dan Jembatan dari Kementerian PU
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	589.885.000,00	Hibah Barang Habis Pakai dari BNPB



No	Nama SKPD	Hibah Tahun 2025	Keterangan
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.058.736.000,00	Hibah Barang Habis Pakai Blanko KTP- El dari Kementerian Dalam Negeri
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	153.133.000,00	Hibah Alat Angkutan, Komputer dan Gedung Bangunan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24.331.785.676,00	Hibah Bangunan Gedung dari Kementerian Pekerjaan Umum
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.516.112.924,00	Hibah Bangunan Gedung dari Kementerian Pekerjaan Umum
Jumlah		1.171.891.031.810,00	

5.4.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO **Rp19.816.165.577,59**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp19.816.165.577,59, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp47.794.193.610,65 mengalami **penurunan** sebesar (Rp27.978.028.033,06) atau (58,54%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	8.850.719.504	-	8.850.719.504,00	8.068.785.516,00	781.933.988,00	9,69
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	1.920.111.537,72	-	1.920.111.537,72	-	1.920.111.537,72	100,00
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	4.907.228.457,60	39.691.653,33	4.867.536.804,27	3.618.103.719,80	1.249.433.084,47	34,53
4	RSUD dr. Adyatma, MPH	-	1.082.829.015,00	-	1.082.829.015,00	1.570.088.508,80	(487.259.493,80)	(31,03)
5	RSUD dr. Rehatta	-	1.128.886.511,10	-	1.128.886.511,10	607.286.678,90	521.599.832,20	85,89
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	184.781.135,50	-	184.781.135,50	659.077.497,00	(474.296.361,50)	(71,96)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	8.480.670,00	-	8.480.670,00	-	8.480.670,00	100,00
8	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	583.582.600,00	-	583.582.600,00	-	583.582.600,00	100,00
9	Dinas Sosial	-	740.000.000,00	-	740.000.000,00	216.018.000,00	523.982.000,00	242,56
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	31.830.950.849,49	(31.830.950.849,49)	(100,00)
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	20.000.000,00	(20.000.000,00)	(100,00)
12	Sekretariat Daerah	-	187.018.950,00	-	187.018.950,00	1.203.882.840,66	(1.016.863.890,66)	(84,47)
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	262.218.850,00	-	262.218.850,00	-	262.218.850,00	100,00
Jumlah		-	19.855.857.230,92	39.691.653,33	19.816.165.577,59	47.794.193.610,65	(27.978.028.033,06)	(58,54)

Adapun keterangan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Hibah Tahun 2025	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.850.719.504,00	Hibah Tanah dari Kabupaten Pemalang, Sragen dan Banjarnegara
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.920.111.537,72	Hibah Barang Habis Pakai kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/kota
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	4.867.536.804,27	Hibah Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, Hibah Barang Habis Pakai Obat-Obatan dari Kabupaten Banyumas dan Kota Pekalongan
4	RSUD dr. Adyatma, MPH	1.082.829.015,00	Hibah Barang Habis Pakai Obat-Obatan dari Pemerintah Kota Semarang
5	RSUD dr. Rehatta	1.128.886.511,10	Hibah Barang Habis Pakai, Obat-Obatan dan Bahan Laboratorium dari Pemerintah Kabupaten Jepara
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	184.781.135,50	Hibah Peralatan dan Mesin, Obat-Obatan dari Pemerintah Kota Semarang



No	Nama SKPD	Hibah Tahun 2025	Keterangan
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	8.480.670,00	Hibah Obat-Obatan dari Pemerintah Kabupaten Klaten
8	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	583.582.600,00	Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Jepara
9	Dinas Sosial	740.000.000,00	Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Kudus
10	Sekretariat Daerah	187.018.950,00	Hibah Alat Kantor Rumah Tangga dari Pemerintah Kabupaten Jepara
11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	262.218.850,00	Hibah Alat Angkutan dari Pemerintah Kabupaten Grobogan
Jumlah		19.816.165.577,59	

5.4.1.3.1.3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan

Dalam Negeri-LO

Rp21.738.197.276,00

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp21.738.197.276,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp62.819.451.023,56 mengalami **penurunan** sebesar (41.081.253.747,56) atau (65,40%) dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	18.813.861.998,00	72.507.500,00	18.741.354.498,00	55.228.638.318,66	(36.487.283.820,66)	(66,07)
2 RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	2.220.233.992,00	-	2.220.233.992,00	6.307.386.310,00	(4.087.152.318,00)	(64,80)
3 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	119.000,00	-	119.000,00	-	119.000,00	100,00
4 RSUD dr. Adyatma, MPH	-	533.456.786,00	-	533.456.786,00	786.179.294,90	(252.722.508,90)	(32,15)
5 Dinas Sosial	-	243.033.000,00	-	243.033.000,00	469.447.100,00	(226.414.100,00)	(48,23)
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	27.800.000,00	(27.800.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	21.810.704.776,00	72.507.500,00	21.738.197.276,00	62.819.451.023,56	(41.081.253.747,56)	(65,40)

Adapun keterangan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Hibah Tahun 2025	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.741.354.498,00	Hibah Peralatan Mesin dan Bangunan dari Komite Sekolah dan Masyarakat
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	2.220.233.992,00	Hibah Alat Kantor Rumah Tangga dari KSM Paru, THT dan Binrois Moewardi. Hibah Bahan Medis dan Obat-Obatan dari Beberapa Kelompok Masyarakat
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	119.000,00	Hibah Alat kedokteran Gigi dari Perorangan
4	RSUD dr. Adyatma, MPH	533.456.786,00	Hibah Peralatan Mesin dan Barang Habis Pakai Obat-Obatan
5	Dinas Sosial	243.033.000,00	Hibah Peralatan dan Mesin serta Bahan Habis Pakai Makanan dari Kelompok Masyarakat
Jumlah		21.738.197.276,00	

5.4.1.3.1.4 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi

Dalam Negeri/Luar Negeri- LO

Rp44.405.397.997,43

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri terealisasi sebesar, Rp44.405.397.997,43 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp55.294.773.146,56 mengalami **penurunan** sebesar (Rp10.889.375.149,14) atau (19,69%) dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	2.118.992.000,00	-	2.118.992.000,00	7.648.976.836,40	(5.529.984.836,40)	(72,30)
2	Dinas Kesehatan	-	835.669.450,00	210.769.450,00	624.900.000,00	-	624.900.000,00	100,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	8.012.661.883,28	-	8.012.661.883,28	13.733.881.157,68	(5.721.219.274,40)	(41,66)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	366.500.000,00	-	366.500.000,00	2.755.348.000,00	(2.388.848.000,00)	(86,70)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	-	219.219.254,15	-	219.219.254,15	-	219.219.254,15	100,00
6	RSUD dr. Rehatta	-	-	-	-	193.140,00	(193.140,00)	(100,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	-	-	-	80.669.503,00	(80.669.503,00)	(100,00)
8	RSJD Dr. Arif Zainuddin	-	43.794.000,00	-	43.794.000,00	-	43.794.000,00	100,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	300.508.200,00	-	300.508.200,00	43.952.509,48	256.555.690,52	583,71
10	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	185.000.000,00	-	185.000.000,00	-	185.000.000,00	100,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
12	Dinas Sosial	-	138.796.000,00	-	138.796.000,00	41.410.000,00	97.386.000,00	235,18
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	524.600.000,00	-	524.600.000,00	-	524.600.000,00	100,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	9.500.000,00	-	9.500.000,00	-	9.500.000,00	100,00
15	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	4.486.656.660,00	-	4.486.656.660,00	-	4.486.656.660,00	100,00
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	38.500.000,00	-	38.500.000,00	-	38.500.000,00	100,00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.505.460.000,00	1.317.100.000,00	-	26.822.560.000,00	26.438.842.000,00	383.718.000,00	1,45
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	103.938.000,00	-	103.938.000,00	4.481.500.000,00	(4.377.562.000,00)	(97,68)
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	399.873.000,00	-	399.873.000,00	-	399.873.000,00	100,00
21	Badan Penghubung	-	9.399.000,00	-	9.399.000,00	-	9.399.000,00	100,00
	Jumlah	25.505.460.000,00	19.110.707.447,43	210.769.450,00	44.405.397.997,43	55.294.773.146,56	(10.889.375.149,14)	(19,69)

Adapun keterangan Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Hibah Tahun 2025	Keterangan
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.118.992.000,00	Hibah Peralatan Mesin dan Bangunan dari Badan, Lembaga dan Organisasi
2	Dinas Kesehatan	624.900.000,00	Hibah Peralatan dan Mesin dari Bank Jateng, TBCCJI dan USAID Bebas TB serta Hibah Barang Habis Pakai dari Medikalab Indo Jaya
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	8.012.661.883,28	Hibah Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Kantor Rumah Tangga, Alat Laboratorium dan Bahan Habis Pakai Obat-Obatan Serta Bahan Tidak Habis Pakai dari Badan Lembaga Organisasi Dalam Negeri
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	366.500.000,00	Hibah Peralatan dan Mesin dari BTN, PT BSI dan PT BRI KC Purwokerto
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	219.219.254,15	Hibah Barang Habis Pakai obat-obatan

4



No	Nama SKPD	Hibah Tahun 2025	Keterangan
6	RSJD Dr. Arif Zainuddin	43.794.000,00	Hibah Kompter dan Alat Kantor Rumah Tangga dari Banka Jateng
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	300.508.200,00	Hibah Alat Kedokteran Kesehatan, Alat Kantor Rumah Tangga dan Bangunan Gedung dari Lembaga/ Organisasi Swasta
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	185.000.000,00	Hibah Panel Surya
9	Dinas Sosial	138.796.000,00	Hibah Peralatan dan Mesin serta Bangunan Gedung dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	524.600.000,00	Hibah Peralatan Mesin dan Bibit dari Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia
11	Dinas Ketahanan Pangan	9.500.000,00	Hibah Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dari Bank Jateng
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.486.656.660,00	Hibah Videotron dari Bank Jateng
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	38.500.000,00	Hibah Peralatan Olahraga dari Bank Jateng
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.822.560.000,00	Hibah Peralatan dan Mesin dari Bank Jateng
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	103.938.000,00	Hibah Alat kantor Rumah Tangga, Alat Angkutan dari Bank Jateng dan Baznas
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	399.873.000,00	Hibah Peralatan Komputer dari Bank Jateng dan Hibah Bangunan Gedung dari Baznas
17	Badan Penghubung	9.399.000,00	Hibah Peralatan dari Bank Jateng
Jumlah		44.405.397.997,43	

5.4.1.3.1.5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO

Rp1.134.993.855,00

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis terealisasi sebesar Rp1.134.993.855,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp350.403.348,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp784.590.507,00 atau 223,91% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	901.968.855	-	901.968.855,00	295.043.710,00	606.925.145,00	205,71
2 RSJD Dr. Arif Zainuddin	-	2.325.000	-	2.325.000,00	48.562.000,00	(46.237.000,00)	(95,21)
3 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	230.700.000	-	230.700.000,00	-	230.700.000,00	100,00
4 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	6.797.638,00	(6.797.638,00)	(100,00)
Jumlah	-	1.134.993.855,00	-	1.134.993.855,00	350.403.348,00	784.590.507,00	223,91

Adapun keterangan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebagai berikut:

No	Nama SKPD	Hibah Tahun 2025	Keterangan
1	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	901.968.855,00	Hibah Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Kantor Rumah Tangga, Komputer dan Barang Habis Pakai dari Pihak ke-3
2	RSJD Dr. Arif Zainuddin	2.325.000,00	Hibah Komputer, Alat kantor Rumah Tangga, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Bahan Perpustakaan dari Pihak Ke 3
3	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	230.700.000,00	Hibah Kendaraan Ambulance dari Korpri
Jumlah		1.134.993.855,00	



5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

Rp166.273.443.831,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp166.273.443.831,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp743.676.482,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp165.529.767.349,00 atau 22.258,30% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	28.305.560.798,00	-	28.305.560.798,00	-	28.305.560.798,00	100,00
2 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	137.967.883.033,00	-	-	137.967.883.033,00	743.676.482,00	137.224.206.551,00	18.452,14
Jumlah	137.967.883.033,00	28.305.560.798,00	-	166.273.443.831,00	743.676.482,00	165.529.767.349,00	22.258,30

Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan naik sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya pengembalian Hibah KPU dan Bawaslu untuk pelaksanaan pemilu Tahun 2024

5.4.2 BEBAN DAERAH

Rp24.906.574.658.360,18

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp24.906.574.658.360,18, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.026.225.118.572,09 mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.119.650.460.211,91) atau (14,19%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Operasional	15.480.092.183.316,00	25.090.116.141.064,07	22.302.074.155.091,89	18.268.134.169.288,18	19.474.787.264.518,09	(1.308.167.787.752,22)	(6,72)
2 Beban Transfer	6.588.994.469.941,00	464.771.347.637,00	415.325.328.506,00	6.638.440.489.072,00	9.551.437.854.054,00	(2.912.997.364.982,00)	(30,50)
Jumlah	22.069.086.653.257,00	25.554.887.488.701,07	22.717.399.483.597,89	24.906.574.658.360,18	29.026.225.118.572,09	(4.119.650.460.211,91)	(14,19)

Realisasi Beban Daerah sebesar Rp24.906.574.658.360,18, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD) 20.071.831.954.294,00

Belanja Daerah (BLUD) 1.997.254.698.963,00

Total Belanja Daerah

22.069.086.653.257,00

Penambahan

Saldo Akhir Utang CALK Neraca 5.3.2.1.3 608.255.159.858,00

Reklasifikasi dari Beban Persediaan KK Persediaan Pelepasan ke Hibah 666.387.738.704,18

Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap KK Aset Pelepasan Koreksi BM 37.421.000,00

Aset Ekstrakomtabel KK Aset Pelepasan Ke Aset Ekstrakomtabel 16.099.980.474,00

Hibah Barang berupa Persediaan KK Persediaan Tambah Hibah 647.997.850.810,00

Hibah Barang Berupa Aset KK Aset Lainnya Pelepasan Hibah 94.404.688.476,00



	dll diluar	
	Penghapusan	
Saldo Penyisihan Piutang Tahun Berkenaan	CALK Neraca 5.3.1.1.10	511.148.338.754,81
Koreksi Kurang Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	KK Penyisihan Piutang	252.150.250.183,63
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	CALK Neraca 5.3.1.1.2 Nota Piutang Pajak	438.676.162.892,00
Saldo Awal Persediaan	CALK Neraca 5.3.1.1.9	315.883.508.388,02
Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	CALK Neraca 5.3.1.1.8	5.086.493.552,91
Beban dari Usaha Mandiri	KK Usaha Mandiri Sekolah	26.388.799.918,00
Beban dari Bantuan Pemerintah berupa uang	KK Bantuan Pemerintah Sekolah	23.247.866.371,00
Setoran Bunga Tahun Lalu		23.114,00
Saldo Awal RFID	CALK Neraca 5.3.1.5.7 Sekretariat Daerah	60.568.458,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	KK Penyusutan	21.495.444.982.636,80
Mutasi Keluar	KK Penyusutan	15.321.181.599,44
Reklas Ke Aset tetap	KK Penyusutan	33.372.240.507,40
Reklas ke Aset Lainnya	KK Penyusutan	141.047.102.490,77
Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	KK Penyusutan	2.859.010.297,13
Penjualan	KK Penyusutan	105.075.194.055,28
Hibah dan Lain-Lain	KK Penyusutan	28.472.639.454,72
Koreksi	KK Penyusutan	127.470.286.704,98
Total Penambahan		25.554.887.488.701,07
Pengurangan		
Saldo Awal Utang	CALK Neraca 5.3.2.1.3.1	507.157.043.738,00
Reklasifikasi ke beban hibah	KK Persediaan Pelepasan ke Hibah	666.387.738.704,17
Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	KK Aset Tetap	307.876.217.962,00
Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	KK Aset Tidak Berwujud	534.832.730,00
Penyusutan Aset Tetap yang Dhibahkan	KK Penyusutan Aset Lainnya Pelepasan Hibah dll diluar Penghapusan Aset	28.472.639.454,73



Saldo Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	CALK Neraca 5.3.1.1.10	535.649.149.114,94
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	KK Penyisihan Piutang	41.491.242.640,00
Saldo Akhir Persediaan	CALK Neraca 5.3.1.1.9	297.727.493.001,12
Penyesuaian Hibah Persediaan yang menjadi Aset Tetap	Penyesuaian Hibah Persediaan yang menjadi Aset Tetap BPBD	628.650.000,00
Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	CALK Neraca 5.3.1.1.11	4.989.015.590,64
Bunga Tahun ini yang Belum Disetor		888.799,00
Hibah	KK Penyusutan	3.302.717.258,98
Mutasi Masuk	KK Penyusutan	15.321.181.599,44
Reklas Dari Aset Tetap	KK Penyusutan	165.028.998.589,54
Reklas Dari Aset Lainnya	KK Penyusutan	6.345.383.663,67
Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	KK Penyusutan	7.500.000,00
Reklas Dari ATB	KK Penyusutan	564.561.008,62
Koreksi	KK Penyusutan	115.209.913.229,44
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	KK Penyusutan	20.020.704.316.513,60
Total Pengurangan		22.717.399.483.597,89
Beban Daerah		24.906.574.658.360,18

Keterangan :

1. Saldo Penyisihan Piutang, Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya dan Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa hanya untuk Penyisihan yang mengalami kenaikan untuk yang mengalami penurunan diakui sebagai surplus kegiatan non operasional lainnya.
2. Saldo Hutang yang mengurangi beban diluar Saldo Hutang Belanja Modal.
Belanja Daerah-LO tidak termasuk belanja operasional dari Pendapatan-LO dari pihak ke tiga diluar mekanisme APBD yang dikelola secara swakelola sebesar Rp37.646.878.944,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Dinas Kesehatan sebesar Rp33.340.752.632,00
 2. RSUD Dr. Adhyatma MPH sebesar Rp0,00
 3. RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp626.908.282,00
 4. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp230.700.000,00
 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp1.695.592.190,00
 6. Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp1.711.663.840,00.
 7. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp41.262.000,00.



5.4.2.1 BEBAN OPERASIONAL

Rp18.268.134.169.288,18

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp18.268.134.169.288,18, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.474.787.264.518,09 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.206.653.095.229,91) atau (6,20%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Pegawai	7.060.692.834.988,00	-	-	7.060.692.834.988,00	7.023.084.524.845,00	37.608.310.143,00	0,54
2 Beban Barang dan Jasa	6.306.083.040.496,00	1.178.286.324.306,92	1.369.976.552.018,93	6.114.392.812.783,99	6.099.893.594.198,24	14.499.218.585,75	0,24
3 Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4 Beban Subsidi	12.291.564.636,00	-	-	12.291.564.636,00	1.399.999.100,00	10.891.565.536,00	777,97
5 Beban Hibah	2.068.441.743.196,00	760.792.427.180,18	28.472.639.454,73	2.800.761.530.921,45	4.664.175.033.195,08	(1.863.413.502.273,63)	(39,95)
6 Beban Bantuan Sosial	32.583.000.000,00	-	-	32.583.000.000,00	45.008.996.459,00	(12.425.996.459,00)	(27,61)
7 Beban Penyisihan Piutang	-	1.201.974.751.830,44	577.140.391.754,94	624.834.360.075,51	141.638.386.323,25	483.195.973.752,25	341,15
8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	21.949.062.637.746,53	20.326.484.571.863,29	1.622.578.065.883,24	1.499.586.730.397,52	122.991.335.485,72	8,20
Jumlah	15.480.092.183.316,00	25.090.116.141.064,07	22.302.074.155.091,89	18.268.134.169.288,18	19.474.787.264.518,09	(1.206.653.095.229,91)	(6,20)

Realisasi Beban Operasional sebesar Rp18.268.134.169.288,18 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD) 13.482.837.484.353,00

Belanja Daerah (BLUD) 1.997.254.698.963,00

Total Belanja Daerah

15.480.092.183.316,00

Penambahan

Saldo Akhir Utang 143.483.812.221,00

Reklasifikasi dari Beban Persediaan 666.387.738.704,18

Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap 37.421.000,00

Aset Ekstrakomtabel 16.099.980.474,00

Hibah Barang berupa Persediaan 647.997.850.810,00

Hibah Barang Berupa Aset 94.404.688.476,00

Saldo Penyisihan Piutang Tahun Berkenaan 511.148.338.754,81

Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya 252.150.250.183,63

Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluaarsa 438.676.162.892,00

Saldo Awal Persediaan 315.883.508.388,02

Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka 5.086.493.552,91

Beban dari Usaha Mandiri 26.388.799.918,00

Beban dari Bantuan Pemerintah 23.247.866.371,00

Setoran Bunga Tahun Lalu 23.114,00

Saldo Awal RFID 60.568.458,00

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 21.495.444.982.636,80

Mutasi Keluar 15.321.181.599,44

Reklas Ke Aset tetap 33.372.240.507,40

Reklas ke Aset Lainnya 141.047.102.490,77

Reklas Ke Aset Ekstrakomtabel 2.859.010.297,13



Penjualan	105.075.194.055,28	
Hibah dan LainBelanja DaerahLain	28.472.639.454,72	
Koreksi	127.470.286.704,98	
Total Penambahan		25.090.116.141.064,07
Pengurangan		
Saldo Awal Utang	91.831.715.232,00	
Reklasifikasi ke beban hibah	666.387.738.704,17	
Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	307.876.217.962,00	
Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	534.832.730,00	
Penyusutan Aset Tetap yang Dihilangkan	28.472.639.454,73	
Saldo Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	535.649.149.114,94	
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	41.491.242.640,00	
Saldo Akhir Persediaan	297.727.493.001,12	
Penyesuaian Hibah Persediaan yang menjadi Aset Tetap	628.650.000,00	
Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	4.989.015.590,64	
Bunga Tahun ini yang Belum Disetor	888.799,00	
Hibah	3.302.717.258,98	
Mutasi Masuk	15.321.181.599,44	
Reklas Dari Aset Tetap	165.028.998.589,54	
Reklas Dari Aset Lainnya	6.345.383.663,67	
Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	7.500.000,00	
Reklas Dari ATB	564.561.008,62	
Koreksi	115.209.913.229,44	
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	20.020.704.316.513,60	
Total Pengurangan		22.302.074.155.091,89
Beban Daerah		18.268.134.169.288,18

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Rp7.060.692.834.988,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp7.060.692.834.988,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.023.084.524.845,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp37.608.310.143,00 atau 0,54% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.662.974.520.044,00	-	-	3.662.974.520.044,00	3.594.629.734.827,00	68.344.785.217,00	1,90
2 Beban Tambahan Penghasilan ASN	3.222.732.844.614,00	-	-	3.222.732.844.614,00	1.869.688.741.019,00	1.353.044.103.595,00	72,37
3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.244.190.000,00	-	-	3.244.190.000,00	1.405.509.725.131,00	(1.402.265.535.131,00)	(99,77)
4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	146.700.126.696,00	-	-	146.700.126.696,00	132.534.438.978,00	14.165.687.718,00	10,69
5 Beban Gaji dan	1.519.812.634,00	-	-	1.519.812.634,00	983.377.690,00	536.434.944,00	54,55



6	Tunjangan KDH/WKDH						
	Beban	23.521.341.000,00	-	-	23.521.341.000,00	19.738.507.200,00	3.782.833.800,00
	Penerimaan Lainnya						
	Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH						
	Jumlah	7.060.692.834.988,00	-	-	7.060.692.834.988,00	7.023.084.524.845,00	37.608.310.143,00

Realisasi Beban Pegawai sebesar Rp7.060.692.834.988,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD) 6.923.383.156.050,00

Belanja Daerah (BLUD) 137.309.678.938,00

Total Belanja Daerah

7.060.692.834.988,00

Beban Daerah

7.060.692.834.988,00

5.4.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Rp3.662.974.520.044,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp3.662.974.520.044,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.594.629.734.827,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp68.344.785.217,00 atau 1,90% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.604.878.910.767,00	-	-	2.604.878.910.767,00	2.556.547.871.794,00	48.331.038.973,00	1,89
2	Dinas Kesehatan	43.915.873.388,00	-	-	43.915.873.388,00	42.753.215.313,00	1.162.658.075,00	2,72
3	RSUD Dr. Moewardi	140.478.477.497,00	-	-	140.478.477.497,00	138.585.525.289,00	1.892.952.208,00	1,37
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	120.023.921.974,00	-	-	120.023.921.974,00	117.210.641.761,00	2.813.280.213,00	2,40
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	78.473.529.865,00	-	-	78.473.529.865,00	77.004.542.156,00	1.468.987.709,00	1,91
6	RSUD dr. Rehatta	31.401.787.989,00	-	-	31.401.787.989,00	26.506.884.632,00	4.894.903.357,00	18,47
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	39.887.508.401,00	-	-	39.887.508.401,00	37.499.500.970,00	2.388.007.431,00	6,37
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	37.768.525.758,00	-	-	37.768.525.758,00	37.678.948.104,00	89.577.654,00	0,24
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	28.997.563.679,00	-	-	28.997.563.679,00	28.276.041.285,00	721.522.394,00	2,55
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	31.306.739.529,00	-	-	31.306.739.529,00	32.218.723.533,00	(911.984.004,00)	(2,83)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	33.504.976.855,00	-	-	33.504.976.855,00	33.627.082.557,00	(122.105.702,00)	(0,36)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.665.925.944,00	-	-	5.665.925.944,00	5.648.705.720,00	17.220.224,00	0,30
13	Satuan Polisi Pamong Praja	5.404.769.176,00	-	-	5.404.769.176,00	5.043.207.021,00	361.562.155,00	7,17
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.849.751.919,00	-	-	2.849.751.919,00	2.835.717.481,00	14.034.438,00	0,49
15	Dinas Sosial	42.510.237.537,00	-	-	42.510.237.537,00	42.211.457.067,00	298.780.470,00	0,71
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.297.270.691,00	-	-	29.297.270.691,00	29.836.918.379,00	(539.647.688,00)	(1,81)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.179.904.347,00	-	-	5.179.904.347,00	4.494.694.088,00	685.210.259,00	15,24
18	Dinas Ketahanan Pangan	6.136.474.324,00	-	-	6.136.474.324,00	6.399.361.974,00	(262.887.650,00)	(4,11)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.475.614.460,00	-	-	55.475.614.460,00	55.084.105.533,00	391.508.927,00	0,71
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,	5.649.882.002,00	-	-	5.649.882.002,00	5.570.176.777,00	79.705.225,00	1,43



		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Kependudukan dan Catatan Sipil							
21	Dinas Perhubungan	21.028.782.710,00	-	-	21.028.782.710,00	19.712.377.249,00	1.316.405.461,00	6,68
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.486.969.907,00	-	-	8.486.969.907,00	8.449.747.822,00	37.222.085,00	0,44
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.465.295.877,00	-	-	6.465.295.877,00	6.611.823.824,00	(146.527.947,00)	(2,22)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.110.587.610,00	-	-	6.110.587.610,00	5.651.007.112,00	459.580.498,00	8,13
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	11.145.144.951,00	-	-	11.145.144.951,00	10.843.716.091,00	301.428.860,00	2,78
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.584.807.078,00	-	-	11.584.807.078,00	12.260.435.558,00	(675.628.480,00)	(5,51)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.865.271.848,00	-	-	18.865.271.848,00	18.088.919.723,00	776.352.125,00	4,29
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14.975.938.266,00	-	-	14.975.938.266,00	14.706.395.034,00	269.543.232,00	1,83
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	39.045.717.427,00	-	-	39.045.717.427,00	39.264.799.113,00	(219.081.686,00)	(0,56)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	15.068.923.704,00	-	-	15.068.923.704,00	13.400.742.991,00	1.668.180.713,00	12,45
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.599.001.647,00	-	-	13.599.001.647,00	13.643.541.018,00	(44.539.371,00)	(0,33)
32	Sekretariat Daerah	37.571.668.261,00	-	-	37.571.668.261,00	37.173.574.950,00	398.093.311,00	1,07
33	Sekretariat DPRD	8.530.494.514,00	-	-	8.530.494.514,00	8.326.827.834,00	203.666.680,00	2,45
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.089.319.193,00	-	-	9.089.319.193,00	9.205.694.694,00	(116.375.501,00)	(1,26)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	40.105.911.621,00	-	-	40.105.911.621,00	39.898.301.334,00	207.610.287,00	0,52
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.845.309.113,00	-	-	8.845.309.113,00	8.638.749.520,00	206.559.593,00	2,39
37	Badan Kepegawaian Daerah	10.740.929.105,00	-	-	10.740.929.105,00	10.442.176.249,00	298.752.856,00	2,86
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	11.167.500.462,00	-	-	11.167.500.462,00	11.939.500.263,00	(771.999.801,00)	(6,47)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.245.684.225,00	-	-	4.245.684.225,00	3.997.667.153,00	248.017.072,00	6,20
40	Badan Penghubung	3.508.195.552,00	-	-	3.508.195.552,00	3.437.762.040,00	70.433.512,00	2,05
41	Inspektorat	10.147.855.551,00	-	-	10.147.855.551,00	9.993.104.631,00	154.750.920,00	1,55
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.837.565.320,00	-	-	3.837.565.320,00	3.909.549.190,00	(71.983.870,00)	(1,84)
	Jumlah	3.662.974.520.044,00	-	-	3.662.974.520.044,00	3.594.629.734.827,00	68.344.785.217,00	1,90

5.4.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Rp3.222.732.844.614,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp3.222.732.844.614,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.869.688.741.019,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.353.044.103.595,00 atau 72,37% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.234.652.535.128,00	-	-	2.234.652.535.128,00	855.798.983.033,00	1.378.853.552.095,00	161,12
2	Dinas Kesehatan	54.860.402.147,00	-	-	54.860.402.147,00	47.674.726.347,00	7.185.675.800,00	15,07
3	RSUD Dr. Moewardi	88.975.845.310,00	-	-	88.975.845.310,00	91.310.778.888,00	(2.334.933.578,00)	(2,56)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	55.404.396.844,00	-	-	55.404.396.844,00	56.317.776.389,00	(913.379.545,00)	(1,62)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	49.138.553.884,00	-	-	49.138.553.884,00	49.119.564.510,00	18.989.374,00	0,04
6	RSUD dr. Rehatta	22.073.883.010,00	-	-	22.073.883.010,00	22.047.866.409,00	26.016.601,00	0,12
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	37.535.800.736,00	-	-	37.535.800.736,00	39.135.506.727,00	(1.599.705.991,00)	(4,09)
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	36.072.272.562,00	-	-	36.072.272.562,00	37.006.833.210,00	(934.560.648,00)	(2,53)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	27.934.211.918,00	-	-	27.934.211.918,00	28.717.769.762,00	(783.557.844,00)	(2,73)

A



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	33.265.035.883,00	-	-	33.265.035.883,00	37.109.272.445,00	(3.844.236.562,00)	(10,36)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	34.242.539.201,00	-	-	34.242.539.201,00	37.134.348.276,00	(2.891.809.075,00)	(7,79)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.033.009.128,00	-	-	7.033.009.128,00	7.516.943.484,00	(483.934.356,00)	(6,44)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	6.039.658.826,00	-	-	6.039.658.826,00	6.237.572.876,00	(197.914.050,00)	(3,17)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.762.048.570,00	-	-	3.762.048.570,00	4.023.343.972,00	(261.295.402,00)	(6,49)
15	Dinas Sosial	48.725.752.399,00	-	-	48.725.752.399,00	51.759.484.219,00	(3.033.731.820,00)	(5,86)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.751.785.493,00	-	-	31.751.785.493,00	34.563.694.761,00	(2.811.909.268,00)	(8,14)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.682.435.393,00	-	-	5.682.435.393,00	6.616.198.875,00	(933.763.482,00)	(14,11)
18	Dinas Ketahanan Pangan	7.369.459.696,00	-	-	7.369.459.696,00	8.091.807.162,00	(722.347.466,00)	(8,93)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58.238.987.683,00	-	-	58.238.987.683,00	61.698.358.278,00	(3.459.370.595,00)	(5,61)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	7.582.693.120,00	-	-	7.582.693.120,00	7.853.142.363,00	(270.449.243,00)	(3,44)
21	Dinas Perhubungan	22.101.516.868,00	-	-	22.101.516.868,00	23.337.876.407,00	(1.236.359.539,00)	(5,30)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.603.174.388,00	-	-	9.603.174.388,00	10.109.657.706,00	(506.483.318,00)	(5,01)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.750.701.016,00	-	-	7.750.701.016,00	8.391.858.169,00	(641.157.153,00)	(7,64)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.856.334.278,00	-	-	7.856.334.278,00	8.070.861.688,00	(214.527.410,00)	(2,66)
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.049.725.901,00	-	-	12.049.725.901,00	12.976.657.076,00	(926.931.175,00)	(7,14)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.511.953.338,00	-	-	12.511.953.338,00	13.991.340.550,00	(1.479.387.212,00)	(10,57)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.979.834.915,00	-	-	21.979.834.915,00	23.267.714.155,00	(1.287.879.240,00)	(5,54)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14.784.622.272,00	-	-	14.784.622.272,00	15.496.840.036,00	(712.217.764,00)	(4,60)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	37.448.129.224,00	-	-	37.448.129.224,00	40.440.483.124,00	(2.992.353.900,00)	(7,40)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.591.774.783,00	-	-	18.591.774.783,00	18.882.858.312,00	(291.083.529,00)	(1,54)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.482.468.803,00	-	-	15.482.468.803,00	16.697.354.239,00	(1.214.885.436,00)	(7,28)
32	Sekretariat Daerah	49.019.892.107,00	-	-	49.019.892.107,00	50.704.517.703,00	(1.684.625.596,00)	(3,32)
33	Sekretariat DPRD	9.568.697.287,00	-	-	9.568.697.287,00	9.649.423.521,00	(80.726.234,00)	(0,84)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.008.847.796,00	-	-	11.008.847.796,00	11.606.981.882,00	(598.134.086,00)	(5,15)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	59.993.392.530,00	-	-	59.993.392.530,00	50.020.518.362,00	9.972.874.168,00	19,94
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.930.087.306,00	-	-	10.930.087.306,00	11.369.730.278,00	(439.642.972,00)	(3,87)
37	Badan Kepegawaian Daerah	13.311.475.765,00	-	-	13.311.475.765,00	13.578.541.145,00	(267.065.380,00)	(1,97)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.243.931.792,00	-	-	12.243.931.792,00	13.566.705.258,00	(1.322.773.466,00)	(9,75)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.582.042.443,00	-	-	4.582.042.443,00	4.758.644.240,00	(176.601.797,00)	(3,71)
40	Badan Penghubung	5.121.268.284,00	-	-	5.121.268.284,00	5.245.500.342,00	(124.232.058,00)	(2,37)
41	Inspektorat	11.935.056.058,00	-	-	11.935.056.058,00	12.639.977.924,00	(704.921.866,00)	(5,58)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.516.610.529,00	-	-	4.516.610.529,00	5.150.726.916,00	(634.116.387,00)	(12,31)
Jumlah		3.222.732.844.614,00	-	-	3.222.732.844.614,00	1.869.688.741.019,00	1.353.044.103.595,00	72,37

5.4.2.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya ASN

Rp3.244.190.000,00

Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp3.244.190.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.405.509.725.131,00

4



mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.402.265.535.131,00) atau (99,77%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	1.348.529.659.200,00	(1.348.529.659.200,00)	(100,00)
2 Dinas Kesehatan	-	-	-	-	9.393.249.569,00	(9.393.249.569,00)	(100,00)
3 RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	1.662.250.000,00	(1.662.250.000,00)	(100,00)
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	890.675.000,00	-	-	890.675.000,00	1.270.550.000,00	(379.875.000,00)	(29,90)
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	-	-	-	-	2.366.515.000,00	(2.366.515.000,00)	(100,00)
6 RSUD dr. Rehatta	-	-	-	-	285.450.000,00	(285.450.000,00)	(100,00)
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	3.619.541.875,00	(3.619.541.875,00)	(100,00)
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	474.100.000,00	-	-	474.100.000,00	665.700.000,00	(191.600.000,00)	(28,78)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.879.415.000,00	-	-	1.879.415.000,00	2.008.260.000,00	(128.845.000,00)	(6,42)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	-	1.801.902.000,00	(1.801.902.000,00)	(100,00)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-	841.910.000,00	(841.910.000,00)	(100,00)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	437.760.000,00	(437.760.000,00)	(100,00)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	295.200.000,00	(295.200.000,00)	(100,00)
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	216.000.000,00	(216.000.000,00)	(100,00)
15 Dinas Sosial	-	-	-	-	986.980.000,00	(986.980.000,00)	(100,00)
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	78.135.000,00	(78.135.000,00)	(100,00)
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	290.280.000,00	(290.280.000,00)	(100,00)
18 Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	325.410.000,00	(325.410.000,00)	(100,00)
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	656.200.000,00	(656.200.000,00)	(100,00)
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-	344.360.000,00	(344.360.000,00)	(100,00)
21 Dinas Perhubungan	-	-	-	-	676.550.000,00	(676.550.000,00)	(100,00)
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	362.600.000,00	(362.600.000,00)	(100,00)
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	438.080.000,00	(438.080.000,00)	(100,00)
24 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-	729.680.000,00	(729.680.000,00)	(100,00)
25 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-	222.680.000,00	(222.680.000,00)	(100,00)
26 Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	917.280.000,00	(917.280.000,00)	(100,00)
27 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	295.800.000,00	(295.800.000,00)	(100,00)
28 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-	708.800.000,00	(708.800.000,00)	(100,00)
29 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	1.203.915.000,00	(1.203.915.000,00)	(100,00)
30 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	980.870.000,00	(980.870.000,00)	(100,00)
31 Sekretariat Daerah	-	-	-	-	2.033.783.716,00	(2.033.783.716,00)	(100,00)
32 Sekretariat DPRD	-	-	-	-	744.490.000,00	(744.490.000,00)	(100,00)
33 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	307.920.000,00	(307.920.000,00)	(100,00)
34 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-	17.053.083.771,00	(17.053.083.771,00)	(100,00)
35 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	1.079.280.000,00	(1.079.280.000,00)	(100,00)
36 Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	537.520.000,00	(537.520.000,00)	(100,00)
37 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	430.480.000,00	(430.480.000,00)	(100,00)
38 Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	218.860.000,00	(218.860.000,00)	(100,00)
39 Badan Penghubung	-	-	-	-	36.600.000,00	(36.600.000,00)	(100,00)
40 Inspektorat	-	-	-	-	238.780.000,00	(238.780.000,00)	(100,00)
41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	217.360.000,00	(217.360.000,00)	(100,00)
Jumlah	3.244.190.000,00	-	-	3.244.190.000,00	1.405.509.725.131,00	(1.402.265.535.131,00)	(99,77)

5.4.2.1.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Rp146.700.126.696,00

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp146.700.126.696,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp132.534.438.978,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.165.687.718,00 atau 10,69% dengan rincian sebagai berikut :



	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Sekretariat DPRD	146.700.126.696,00	-	-	146.700.126.696,00	132.534.438.978,00	14.165.687.718,00	10,69
Jumlah	146.700.126.696,00	-	-	146.700.126.696,00	132.534.438.978,00	14.165.687.718,00	10,69

5.4.2.1.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Rp1.519.812.634,00

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp1.519.812.634,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp983.377.690,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp536.434.944,00 atau 54,55% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Sekretariat Daerah	1.519.812.634,00	-	-	1.519.812.634,00	983.377.690,00	536.434.944,00	54,55
Jumlah	1.519.812.634,00	-	-	1.519.812.634,00	983.377.690,00	536.434.944,00	54,55

5.4.2.1.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD

Serta KDH/WKDH

Rp23.521.341.000,00

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp23.521.341.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.738.507.200,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.782.833.800,00 atau 19,16% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Sekretariat Daerah	22.844.541.000,00	-	-	22.844.541.000,00	19.127.707.200,00	3.716.833.800,00	19,43
2 Sekretariat DPRD	676.800.000,00	-	-	676.800.000,00	610.800.000,00	66.000.000,00	10,81
Jumlah	23.521.341.000,00	-	-	23.521.341.000,00	19.738.507.200,00	3.782.833.800,00	19,16

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Rp6.114.392.812.783,99

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp6.114.392.812.783,99, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.099.893.594.198,24 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.499.218.585,75 atau 0,24% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Barang	1.565.866.396.751,00	1.109.949.433.316,66	1.020.608.850.757,79	1.655.206.979.309,87	1.584.572.836.692,64	70.634.142.617,23	4,46
2 Beban Jasa	2.717.307.557.410,00	20.572.617.545,91	25.082.443.795,64	2.712.797.731.160,27	2.690.543.315.809,57	22.254.415.350,70	0,83
3 Beban Pemeliharaan	596.554.075.632,00	18.604.947.129,00	289.672.760.130,00	325.486.262.631,00	333.417.424.060,00	(7.931.161.429,00)	(2,38)
4 Beban Perjalanan Dinas	282.344.539.966,00	1.486.532.138,00	9.900.000,00	283.821.172.104,00	485.503.261.912,00	(201.682.089.808,00)	(41,54)
5 Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	328.354.227.038,00	452.760.164,00	-	328.806.987.202,00	188.795.949.543,00	140.011.037.659,00	74,16
6 Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	817.060.806.181,03	(817.060.806.181,03)	(100,00)
7 Belanja Barang dan Jasa BOSP	815.656.243.699,00	27.220.034.013,35	34.602.597.335,50	808.273.680.376,85	-	808.273.680.376,85	100,00
Jumlah	6.306.083.040.496,00	1.178.286.324.306,92	1.369.976.552.018,93	6.114.392.812.783,99	6.099.893.594.198,24	14.499.218.585,75	0,24

Realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp6.114.392.812.783,99 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD) 4.446.138.020.471,00

Belanja Daerah (BLUD) 1.859.945.020.025,00

Total Belanja Daerah

6.306.083.040.496,00

Penambahan

A



Saldo Akhir Utang	143.483.812.221,00	
Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap	37.421.000,00	
Aset Ekstrakomtabel	16.099.980.474,00	
Hibah Barang berupa Persediaan	647.997.850.810,00	
Saldo Awal Persediaan	315.883.508.388,01	
Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	5.086.493.552,91	
Beban dari Usaha Mandiri	26.388.799.918,00	
Beban dari Bantuan Pemerintah	23.247.866.371,00	
Beban Akibat Penyesuaian Perlakuan Investasi	-	
Setoran Bunga Tahun Lalu	23.114,00	
Saldo Awal RFID	60.568.458,00	
Total Penambahan		1.178.286.324.306,92
Pengurangan		
Saldo Awal Utang	91.831.715.232,00	
Reklasifikasi ke beban hibah	666.387.738.704,17	
Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	307.876.217.962,00	
Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	534.832.730,00	
Saldo Akhir Persediaan	297.727.493.001,12	
Penyesuaian Hibah Persediaan yang menjadi Aset Tetap	628.650.000,00	
Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	4.989.015.590,64	
Bunga Tahun ini yang Belum Disetor	888.799,00	
Total Pengurangan		1.369.976.552.018,93
Beban Daerah		6.114.392.812.783,99

5.4.2.1.2.1 Beban Barang

Rp1.655.206.979.309,87

Beban Barang terealisasi sebesar Rp1.655.206.979.309,87, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.584.572.836.692,64 mengalami **kenaikan** sebesar Rp70.634.142.617,23 atau 4,46% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77.773.812.566,00	53.842.007.352,20	10.527.579.998,45	121.088.239.919,75	188.659.832.733,89	(67.571.592.814,13)	(35,82)
2 Dinas Kesehatan	48.787.493.299,00	707.445.923.683,57	730.439.152.718,74	25.794.264.263,83	24.121.442.345,32	1.672.821.918,51	6,93
3 RSUD Dr. Moewardi	452.828.578.681,00	197.831.383.499,81	130.886.895.191,94	519.773.066.988,87	489.231.473.969,26	30.541.593.019,61	6,24
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	275.996.129.231,00	64.456.530.710,87	37.392.608.942,09	303.060.050.999,79	272.033.388.210,31	31.026.662.789,48	11,41
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	68.461.690.782,00	14.402.360.290,59	9.496.896.101,40	73.367.154.971,18	76.152.618.867,81	(2.785.463.896,63)	(3,66)
6 RSUD dr. Rehatta	14.845.134.971,00	5.727.240.954,89	2.952.778.841,61	17.619.597.084,28	18.319.005.646,75	(699.408.562,47)	(3,82)
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	23.783.476.857,00	3.637.492.698,84	3.204.301.651,56	24.216.667.904,28	20.089.857.392,36	4.126.810.511,92	20,54
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	13.436.031.212,00	1.296.664.743,43	1.191.973.365,58	13.540.722.589,85	14.032.810.111,59	(492.087.521,74)	(3,51)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	17.955.415.167,00	2.804.618.079,67	4.324.779.010,74	16.435.254.235,93	13.820.526.067,44	2.614.728.168,49	18,92
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	72.662.282.059,00	2.499.275.448,60	24.623.762.953,60	50.537.794.554,00	47.238.444.581,90	3.299.349.972,10	6,98
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	12.711.615.387,00	1.308.684.845,00	1.401.066.150,00	12.619.234.082,00	17.276.393.496,00	(4.657.159.414,00)	(26,96)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.653.595.691,00	1.384.400,00	3.479.000,00	2.651.501.091,00	4.340.668.793,00	(1.689.167.702,00)	(38,91)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
13	Satuan Polisi Pamong Praja	816.141.700,00	56.489.000,00	88.183.500,00	784.447.200,00	1.651.662.300,00	(867.215.100,00)	(52,51)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.282.227.526,00	11.645.697.878,40	12.662.513.147,00	1.265.412.257,40	2.077.192.689,00	(811.780.431,60)	(39,08)
15	Dinas Sosial	69.329.805.881,00	201.759.426,00	1.665.928.360,15	67.865.636.946,85	58.882.263.308,00	8.983.373.638,85	15,26
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.914.387.655,00	78.128.100,00	28.678.100,00	7.963.837.655,00	10.666.915.667,63	(2.703.078.012,63)	(25,34)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.358.958.470,00	6.521.000,00	9.250.000,00	2.356.229.470,00	1.904.709.149,00	451.520.321,00	23,71
18	Dinas Ketahanan Pangan	8.948.981.959,00	2.579.249.692,00	9.521.903.919,00	2.006.327.732,00	4.385.601.305,80	(2.379.273.573,80)	(54,25)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.184.389.847,00	1.788.256.087,17	3.601.584.742,23	7.371.061.191,94	14.023.288.010,93	(6.652.226.818,99)	(47,44)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.266.217.590,00	4.071.520.000,00	4.149.084.500,00	2.188.653.090,00	2.027.620.250,00	161.032.840,00	7,94
21	Dinas Perhubungan	9.180.770.393,00	8.301.601.214,00	1.816.285.278,00	15.666.086.329,00	4.890.402.154,00	10.775.684.175,00	220,34
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.283.543.896,00	20.655.000,00	329.642.500,00	2.974.556.396,00	3.477.774.335,00	(503.217.939,00)	(14,47)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.869.417.370,00	65.353.551,00	595.984,00	1.934.174.937,00	5.789.567.222,00	(3.855.392.285,00)	(66,59)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	590.582.850,00	75.290.466,00	85.137.100,00	580.736.216,00	958.721.753,00	(377.985.537,00)	(39,43)
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.969.939.905,00	280.186.840,00	48.076.500,00	16.202.050.245,00	25.469.210.940,00	(9.267.160.695,00)	(36,39)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.249.732.508,00	13.659.725,00	13.653.285,00	1.249.738.948,00	1.355.374.954,00	(105.636.006,00)	(7,79)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.546.318.855,00	1.156.296.080,35	1.201.325.884,97	4.501.289.050,38	6.042.915.349,15	(1.541.626.298,77)	(25,51)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	19.842.345.306,00	17.776.726.294,00	15.957.091.334,76	21.661.980.265,24	23.622.461.224,86	(1.960.480.959,62)	(8,30)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	131.001.477.698,00	1.895.095.285,77	8.178.827.785,00	124.717.745.198,77	54.029.185.345,63	70.688.559.853,13	130,83
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.098.615.950,00	6.251.742,00	539.239.900,00	2.565.627.792,00	13.372.823.443,00	(10.807.195.651,00)	(80,81)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	36.542.273.490,00	399.421.771,00	334.525.467,00	36.607.169.794,00	7.844.011.181,00	28.763.158.613,00	366,69
32	Sekretariat Daerah	26.689.378.211,00	68.507.858,00	120.832.538,00	26.637.053.531,00	18.171.627.882,00	8.465.425.649,00	46,59
33	Sekretariat DPRD	76.834.372.101,00	15.913.800,00	150.266.948,00	76.700.018.953,00	77.564.488.614,00	(864.469.661,00)	(1,11)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.757.367.800,00	45.755.000,00	30.549.500,00	2.772.573.300,00	4.405.414.722,01	(1.632.841.422,01)	(37,06)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	19.295.972.825,00	3.370.863.377,50	3.276.045.684,97	19.390.790.517,53	30.267.885.940,00	(10.877.095.422,47)	(35,94)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.636.985.130,00	266.395.650,00	53.813.000,00	7.849.567.780,00	9.428.185.116,00	(1.578.617.336,00)	(16,74)
37	Badan Kepegawaian Daerah	1.513.959.103,00	30.460.947,00	27.744.000,00	1.516.676.050,00	3.261.201.167,00	(1.744.525.117,00)	(53,49)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.108.603.008,00	395.997.374,00	253.137.774,00	12.251.462.608,00	6.001.602.656,00	6.249.859.952,00	104,14
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	986.648.300,00	2.607.000,00	3.905.000,00	985.350.300,00	1.620.497.400,00	(635.147.100,00)	(39,19)
40	Badan Penghubung	2.144.899.900,00	57.324.600,00	1.761.400,00	2.200.463.100,00	2.224.713.473,00	(24.250.373,00)	(1,09)
41	Inspektorat	662.747.310,00	12.914.850,00	13.295.700,00	662.366.460,00	1.196.070.825,00	(533.704.365,00)	(44,62)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.064.078.311,00	10.967.000,00	698.000,00	3.074.347.311,00	2.642.986.100,00	431.361.211,00	16,32
Jumlah		1.565.866.396.751,00	1.109.949.433.316,66	1.020.608.850.757,79	1.655.206.979.309,87	1.584.572.836.692,64	70.634.142.617,23	4,46



Belanja barang naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya kenaikan Dana Transfer DBHCHT yang digunakan untuk pengadaan obat-obatan pada RSJD dan belanja untuk paket sembako murah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Realisasi Beban Barang sebesar Rp1.655.206.979.309,87 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD)	711.913.166.446,00	
Belanja Daerah (BLUD)	853.953.230.305,00	
Total Belanja Daerah		1.565.866.396.751,00

Penambahan

Saldo Akhir Utang	124.964.734.921,00	
Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap	37.421.000,00	
Aset Ekstrakomtabel	16.099.980.474,00	
Hibah Barang berupa Persediaan	647.997.850.810,00	
Saldo Awal Persediaan	288.663.474.374,66	
Beban dari Usaha Mandiri	21.650.300.135,00	
Beban dari Bantuan Pemerintah	10.475.103.144,00	
Saldo Awal RFID	60.568.458,00	
Total Penambahan		1.109.949.433.316,66

Pengurangan

Saldo Awal Utang	84.606.853.191,00	
Reklasifikasi ke beban hibah	666.387.738.704,17	
Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	4.129.531.647,00	
Saldo Akhir Persediaan	264.856.077.215,62	
Penyesuaian Hibah Persediaan yang menjadi Aset Tetap	628.650.000,00	
Total Pengurangan		1.020.608.850.757,79
Beban Daerah		1.655.206.979.309,87

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa **Rp2.712.797.731.160,27**

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp2.712.797.731.160,27, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.690.543.315.809,57 mengalami **kenaikan** sebesar Rp22.254.415.350,70 atau 0,83% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	511.164.505.587,00	12.761.979.490,91	17.083.624.768,93	506.842.860.308,98	533.873.715.524,94	(27.030.855.215,96)	(5,06)
2 Dinas Kesehatan	391.059.036.716,00	86.437.923,90	192.317.891,05	390.953.156.748,85	382.706.058.889,25	8.247.097.859,60	2,15
3 RSUD Dr. Moewardi	496.559.701.822,00	2.344.689.359,48	1.881.726.256,00	497.022.664.925,48	449.704.867.480,62	47.317.797.444,85	10,52
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	250.369.030.678,00	1.524.625.757,04	1.417.906.652,24	250.475.749.782,79	243.919.181.207,83	6.556.568.574,96	2,69
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	78.099.885.789,00	211.768.369,88	211.126.149,25	78.100.528.009,64	77.373.138.286,63	727.389.723,02	0,94
6 RSUD dr. Rehatta	29.461.126.823,00	-	27.775.715,00	29.433.351.108,00	29.183.224.555,00	250.126.553,00	0,86
7 RSJD Dr. Amino	29.355.009.799,00	171.146.335,00	165.198.933,00	29.360.957.201,00	28.648.483.705,00	712.473.496,00	2,49



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Gondohutomo							
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	22.965.854.182,00	96.993.446,99	58.379.409,09	23.004.468.219,90	25.678.101.238,50	(2.673.633.018,60)	(10,41)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	27.780.139.820,00	154.781.934,76	37.104.725,46	27.897.817.029,30	28.154.547.222,34	(256.730.193,04)	(0,91)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	24.625.335.336,00	44.329.246,58	41.795.694,66	24.627.868.887,92	27.121.443.926,52	(2.493.575.038,60)	(9,19)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	42.276.587.719,00	228.873.610,63	239.034.610,58	42.266.426.719,05	45.574.433.714,80	(3.308.006.995,75)	(7,26)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.904.196.944,00	99.783.319,46	146.775.459,87	9.857.204.803,59	6.357.840.813,27	3.499.363.990,32	55,04
13	Satuan Polisi Pamong Praja	3.393.130.689,00	73.099.350,42	57.411.991,68	3.408.818.047,74	3.187.200.605,84	221.617.441,90	6,95
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.810.137.399,00	83.010.937,38	46.400.792,46	3.846.747.543,92	3.849.104.594,53	(2.357.050,62)	(0,06)
15	Dinas Sosial	43.656.149.291,00	44.204.270,44	64.671.507,05	43.635.682.054,39	35.167.967.351,11	8.467.714.703,28	24,08
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.985.838.286,00	1.052.394,75	150.800.252,59	12.836.090.428,16	16.540.719.938,15	(3.704.629.509,99)	(22,40)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.156.388.344,00	32.861.059,29	41.094.766,08	4.148.154.637,21	3.694.840.113,30	453.314.523,91	12,27
18	Dinas Ketahanan Pangan	7.949.187.175,00	6.572.344,89	-	7.955.759.519,89	6.637.224.838,87	1.318.534.681,02	19,87
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.116.223.592,00	194.431.540,32	186.509.230,57	11.124.145.901,75	14.051.432.913,91	(2.927.287.012,16)	(20,83)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.402.782.925,00	74.542.265,11	74.046.833,00	4.403.278.357,11	3.529.162.070,99	874.116.286,12	24,77
21	Dinas Perhubungan	129.130.890.387,00	213.150.426,23	211.865.311,48	129.132.175.501,75	125.268.067.164,37	3.864.108.337,38	3,08
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.005.945.090,00	-	-	44.005.945.090,00	30.890.919.200,00	13.115.025.890,00	42,46
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.011.198.786,00	-	-	11.011.198.786,00	21.892.952.090,94	(10.881.753.304,94)	(49,70)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.441.965.024,00	-	117.809.850,00	4.324.155.174,00	4.530.943.628,00	(206.788.454,00)	(4,56)
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	42.630.878.748,00	178.310.277,56	250.152.158,34	42.559.036.867,22	104.533.775.528,87	(61.974.738.661,65)	(59,29)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.864.467.091,00	15.326.924,03	17.634.792,35	3.862.159.222,68	3.614.907.697,59	247.251.525,09	6,84
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.153.228.727,00	94.289.411,00	65.738.697,92	17.181.779.440,08	17.939.485.925,68	(757.706.485,60)	(4,22)
28	Dinas Peternakan dan	13.134.407.995,00	17.361.978,08	-	13.151.769.973,08	12.195.965.737,37	955.804.235,72	7,84

4



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
29 Kesehatan Hewan							
Dinas Pertanian dan Perkebunan	25.686.870.075,00	115.665.989,52	193.356.520,21	25.609.179.544,31	19.825.038.420,16	5.784.141.124,15	29,18
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.707.657.676,00	128.147.590,10	78.549.640,24	10.757.255.625,86	12.214.050.482,22	(1.456.794.856,36)	(11,93)
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.989.254.862,00	132.061.600,13	-	22.121.316.462,13	25.163.022.161,09	(3.041.705.698,96)	(12,09)
32 Sekretariat Daerah	56.289.754.418,00	253.666.709,76	558.892.773,03	55.984.528.354,73	41.452.878.471,58	14.531.649.883,15	35,06
33 Sekretariat DPRD	154.086.628.190,00	440.432.084,41	574.647.879,86	153.952.412.394,55	126.697.758.057,57	27.254.654.336,98	21,51
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.320.135.979,00	-	-	11.320.135.979,00	9.849.367.399,00	1.470.768.580,00	14,93
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	93.691.382.787,00	296.195.344,74	313.671.338,15	93.673.906.793,59	100.660.912.767,79	(6.987.005.974,20)	(6,94)
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18.683.721.130,00	180.792.204,10	182.858.239,76	18.681.655.094,34	19.783.769.110,30	(1.102.114.015,96)	(5,57)
37 Badan Kepegawaian Daerah	4.321.331.741,00	-	24.975.000,00	4.296.356.741,00	8.604.043.861,00	(4.307.687.120,00)	(50,07)
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.684.438.292,00	12.589.671,70	12.612.430,37	23.684.415.533,33	16.791.741.781,32	6.892.673.752,01	41,05
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.621.023.838,00			3.621.023.838,00	4.028.277.025,00	(407.253.187,00)	(10,11)
40 Badan Penghubung	8.464.561.398,00	109.363.038,20	169.690.756,63	8.404.233.679,57	7.732.631.966,68	671.601.712,89	8,69
41 Inspektorat	3.289.220.595,00	132.044.997,54	134.865.494,72	3.286.400.097,82	3.245.573.254,50	40.826.843,32	1,26
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.008.345.665,00	18.036.341,58	51.421.274,02	10.974.960.732,56	8.674.545.087,14	2.300.415.645,42	26,52
Jumlah	2.717.307.557.410,00	20.572.617.545,91	25.082.443.795,64	2.712.797.731.160,27	2.690.543.315.809,57	22.254.415.350,70	0,83

Realisasi Beban Jasa sebesar Rp2.712.797.731.160,27, dapat dirinci dengan perhitungan sebagai berikut:

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD) 1.784.318.444.092,00

Belanja Daerah (BLUD) 932.989.113.318,00

Total Belanja Daerah

2.717.307.557.410,00

Penambahan

Saldo Akhir Utang 2.965.240.030,00

Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka 5.086.493.552,91

Beban dari Usaha Mandiri 3.636.240.609,00

Beban dari Bantuan Pemerintah 8.884.620.240,00

Setoran Bunga Tahun Lalu 23.114,00

Total Penambahan

20.572.617.545,91

Pengurangan

Saldo Awal Utang 2.835.020.169,00

Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap 16.920.896.607,00

Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB 336.622.630,00

Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka 4.989.015.590,64

A



Bunga Tahun ini yang Belum Disetor

888.799,00

Total Pengurangan

25.082.443.795,64

Beban Daerah

2.712.797.731.160,27

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Rp325.486.262.631,00

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp325.486.262.631,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp333.417.424.060,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp7.931.161.429,00) atau (2,38%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	297.375.743.432,00	3.061.234.859,00	256.423.232.907,00	44.013.745.384,00	68.199.877.918,00	(24.186.132.534,00)	(35,46)
2 Dinas Kesehatan	4.629.338.089,00	-	34.809.600,00	4.594.528.489,00	3.304.911.398,00	1.289.617.091,00	39,02
3 RSUD Dr. Moewardi	23.673.033.365,00	15.536.319.670,00	-	39.209.353.035,00	32.959.002.717,00	6.250.350.318,00	18,96
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	32.085.998.596,00	-	4.377.316.872,00	27.708.681.724,00	32.035.186.989,00	(4.326.505.265,00)	(13,51)
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	5.211.383.313,00	-	-	5.211.383.313,00	6.932.737.827,00	(1.721.354.514,00)	(24,83)
6 RSUD dr. Rehatta	4.603.169.140,00	-	628.578.140,00	3.974.591.000,00	3.172.104.840,00	802.486.160,00	25,30
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1.766.377.100,00	-	27.000.000,00	1.739.377.100,00	1.934.681.120,00	(195.304.020,00)	(10,09)
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	1.322.623.271,00	7.392.600,00	-	1.330.015.871,00	1.799.163.794,00	(469.147.923,00)	(26,08)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.878.734.122,00	-	-	1.878.734.122,00	1.606.171.479,00	272.562.643,00	16,97
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	105.147.692.640,00	-	-	105.147.692.640,00	85.926.602.414,00	19.221.090.226,00	22,37
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	23.282.567.099,00	-	1.781.034.000,00	21.501.533.099,00	24.108.474.416,00	(2.606.941.317,00)	(10,81)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	566.949.914,00	-	-	566.949.914,00	686.716.971,00	(119.767.057,00)	(17,44)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	285.240.391,00	-	-	285.240.391,00	460.360.971,00	(175.120.580,00)	(38,04)
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	918.681.273,00	-	692.665.570,00	226.015.703,00	598.459.303,00	(372.443.600,00)	(62,23)
15 Dinas Sosial	22.865.982.818,00	-	19.196.285.531,00	3.669.697.287,00	3.585.882.538,00	83.814.749,00	2,34
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.142.923.640,00	-	442.905.597,00	1.700.018.043,00	1.513.012.297,00	187.005.746,00	12,36
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	264.689.808,00	-	-	264.689.808,00	419.801.062,00	(155.111.254,00)	(36,95)
18 Dinas Ketahanan Pangan	844.244.250,00	-	195.058.400,00	649.185.850,00	588.742.280,00	60.443.570,00	10,27
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.595.871.012,00	-	156.528.912,00	1.439.342.100,00	2.849.859.338,00	(1.410.517.238,00)	(49,49)
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	458.070.787,00	-	29.108.800,00	428.961.987,00	490.070.678,00	(61.108.691,00)	(12,47)
21 Dinas Perhubungan	4.312.340.791,00	-	-	4.312.340.791,00	3.696.760.340,00	615.580.451,00	16,65
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	2.735.376.190,00	-	-	2.735.376.190,00	2.142.275.413,00	593.100.777,00	27,69
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.073.184.394,00	-	-	1.073.184.394,00	1.462.108.518,00	(388.924.124,00)	(26,60)
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	518.416.362,00	-	44.476.000,00	473.940.362,00	528.509.281,00	(54.568.919,00)	(10,33)
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.091.682.564,00	-	-	4.091.682.564,00	1.802.985.746,00	2.288.696.818,00	126,94
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	477.028.349,00	-	-	477.028.349,00	692.599.339,00	(215.570.990,00)	(31,12)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.928.978.860,00	-	363.134.332,00	1.565.844.528,00	2.210.803.279,00	(644.958.751,00)	(29,17)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.333.216.060,00	-	1.623.270.450,00	1.709.945.610,00	2.806.797.390,00	(1.096.851.780,00)	(39,08)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.457.470.907,00	-	770.477.442,00	1.686.993.465,00	1.128.818.182,00	558.175.283,00	49,45
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.327.258.931,00	-	331.955.147,00	995.303.784,00	1.954.882.624,00	(959.578.840,00)	(49,09)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.448.790.853,00	-	-	2.448.790.853,00	3.673.448.333,00	(1.224.657.480,00)	(33,34)
32	Sekretariat Daerah	11.231.220.535,00	-	-	11.231.220.535,00	8.592.928.731,00	2.638.291.804,00	30,70
33	Sekretariat DPRD	5.841.204.809,00	-	702.551.170,00	5.138.653.639,00	5.888.340.366,00	(749.686.727,00)	(12,73)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.698.004.036,00	-	-	2.698.004.036,00	2.742.666.455,00	(44.662.419,00)	(1,63)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.786.387.068,00	-	-	7.786.387.068,00	10.444.143.894,00	(2.657.756.826,00)	(25,45)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.546.869.559,00	-	602.612.280,00	4.944.257.279,00	4.221.718.101,00	722.539.178,00	17,11
37	Badan Kepegawaian Daerah	660.337.573,00	-	-	660.337.573,00	760.860.393,00	(100.522.820,00)	(13,21)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.584.941.383,00	-	579.520.064,00	3.005.421.319,00	2.228.908.394,00	776.512.925,00	34,84
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	888.671.435,00	-	89.654.700,00	799.016.735,00	701.021.001,00	97.995.734,00	13,98
40	Badan Penghubung	868.809.956,00	-	182.046.216,00	686.763.740,00	617.829.046,00	68.934.694,00	11,16
41	Inspektorat	1.360.883.941,00	-	398.538.000,00	962.345.941,00	1.368.859.356,00	(406.513.415,00)	(29,70)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	463.687.016,00	-	-	463.687.016,00	578.339.528,00	(114.652.512,00)	(19,82)
Jumlah		596.554.075.632,00	18.604.947.129,00	289.672.760.130,00	325.486.262.631,00	333.417.424.060,00	(7.931.161.429,00)	(2,38)

Beban pemeliharaan naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perbaikan gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan, Panti Pelayanan Sosial dan pemeliharaan sarana dan prasarana GOR Jatidiri pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Realisasi Beban Pemeliharaan sebesar Rp325.486.262.631,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD) 527.578.497.265,00

Belanja Daerah (BLUD) 68.975.578.367,00

Total Belanja Daerah 596.554.075.632,00

Penambahan

Saldo Akhir Utang 15.543.712.270,00

Beban dari Usaha Mandiri 601.678.406,00

Beban dari Bantuan Pemerintah 2.459.556.453,00

Total Penambahan 18.604.947.129,00

Pengurangan

Saldo Awal Utang 4.379.941.872,00

Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap 285.094.608.158,00

Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB 198.210.100,00

Total Pengurangan 289.672.760.130,00

Beban Daerah 325.486.262.631,00

A



5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Rp283.821.172.104,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp283.821.172.104,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp485.503.261.912,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp201.682.089.808,00) atau (41,54%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	15.476.666.228,00	1.476.407.138,00	-	16.953.073.366,00	48.730.484.852,00	(31.777.411.486,00)	(65,21)
2	RSUD Dr. Moewardi	4.816.706.017,00	-	-	4.816.706.017,00	8.326.322.524,00	(3.509.616.507,00)	(42,15)
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	517.125.545,00	-	-	517.125.545,00	1.063.166.835,00	(546.041.290,00)	(51,36)
4	RSUD dr. Adyatma, MPH	788.463.452,00	-	-	788.463.452,00	1.281.241.831,00	(492.778.379,00)	(38,46)
5	RSUD dr. Rehatta	386.545.195,00	-	-	386.545.195,00	701.975.852,00	(315.430.657,00)	(44,93)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	301.387.275,00	-	-	301.387.275,00	494.929.665,00	(193.542.390,00)	(39,11)
7	RSUD dr. Arif Zainuddin	577.909.225,00	-	-	577.909.225,00	897.724.277,00	(319.815.052,00)	(35,63)
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	805.423.925,00	185.000,00	9.900.000,00	795.708.925,00	1.570.351.450,00	(774.642.525,00)	(49,33)
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	651.106.218,00	9.940.000,00	-	661.046.218,00	1.016.473.469,00	(355.427.251,00)	(34,97)
10	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	3.771.059.567,00	-	-	3.771.059.567,00	9.526.321.743,00	(5.755.262.176,00)	(60,41)
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.241.770.220,00	-	-	5.241.770.220,00	12.965.438.861,00	(7.723.668.641,00)	(59,57)
12	Satuan Polisi Pamong Praja	2.278.625.347,00	-	-	2.278.625.347,00	5.721.158.906,00	(3.442.533.559,00)	(60,17)
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.240.949.276,00	-	-	2.240.949.276,00	4.980.189.887,00	(2.739.240.611,00)	(55,00)
14	Dinas Sosial	1.163.804.404,00	-	-	1.163.804.404,00	2.599.740.753,00	(1.435.936.349,00)	(55,23)
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.905.693.030,00	-	-	6.905.693.030,00	8.460.112.106,00	(1.554.419.076,00)	(18,37)
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.627.208.654,00	-	-	4.627.208.654,00	11.654.204.935,00	(7.026.996.281,00)	(60,30)
17	Dinas Ketahanan Pangan	1.146.773.868,00	-	-	1.146.773.868,00	3.216.481.450,00	(2.069.707.582,00)	(64,35)
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.377.953.763,00	-	-	1.377.953.763,00	3.580.940.344,00	(2.202.986.581,00)	(61,52)
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.742.584.444,00	-	-	2.742.584.444,00	12.912.015.338,00	(10.169.430.894,00)	(78,76)
20	Dinas Perhubungan	2.631.777.510,00	-	-	2.631.777.510,00	4.064.293.843,00	(1.432.516.333,00)	(35,25)
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.294.406.560,00	-	-	2.294.406.560,00	4.817.944.951,00	(2.523.538.391,00)	(52,38)
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.588.640.987,00	-	-	3.588.640.987,00	7.909.721.726,00	(4.321.080.739,00)	(54,63)
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.384.774.119,00	-	-	2.384.774.119,00	15.900.181.734,00	(13.515.407.615,00)	(85,00)
24	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.341.028.559,00	-	-	1.341.028.559,00	2.987.809.976,00	(1.646.781.417,00)	(55,12)
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.593.366.633,00	-	-	5.593.366.633,00	15.310.683.289,00	(9.717.316.656,00)	(63,47)
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	640.120.624,00	-	-	640.120.624,00	1.605.303.982,00	(965.183.358,00)	(60,12)
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.445.872.222,00	-	-	2.445.872.222,00	5.761.806.971,00	(3.315.934.749,00)	(57,55)
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.288.981.386,00	-	-	2.288.981.386,00	4.557.003.550,00	(2.268.022.164,00)	(49,77)
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.964.941.648,00	-	-	8.964.941.648,00	12.044.533.214,00	(3.079.591.566,00)	(25,57)



		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.867.465.087,00	-	-	2.867.465.087,00	10.783.901.958,00	(7.916.436.871,00)	(73,41)
31	Sekretariat Daerah	3.458.240.144,00	-	-	3.458.240.144,00	11.341.115.119,00	(7.882.874.975,00)	(69,51)
32	Sekretariat DPRD	20.205.983.583,00	-	-	20.205.983.583,00	27.362.320.081,00	(7.156.336.498,00)	(26,15)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	130.119.137.813,00	-	-	130.119.137.813,00	150.159.698.001,00	(20.040.560.188,00)	(13,35)
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.573.782.349,00	-	-	3.573.782.349,00	7.301.998.866,00	(3.728.216.517,00)	(51,06)
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.342.451.227,00	-	-	8.342.451.227,00	15.341.235.204,00	(6.998.783.977,00)	(45,62)
36	Badan Kepegawaian Daerah	5.063.998.997,00	-	-	5.063.998.997,00	10.623.116.533,00	(5.559.117.536,00)	(52,33)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.527.612.029,00	-	-	2.527.612.029,00	6.443.730.260,00	(3.916.118.231,00)	(60,77)
38	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.990.578.707,00	-	-	5.990.578.707,00	10.819.367.289,00	(4.828.788.582,00)	(44,63)
39	Badan Penghubung	1.363.070.420,00	-	-	1.363.070.420,00	3.024.917.894,00	(1.661.847.474,00)	(54,94)
40	Inspektorat	608.213.030,00	-	-	608.213.030,00	1.093.819.856,00	(485.606.826,00)	(44,40)
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.222.393.254,00	-	-	6.222.393.254,00	9.012.629.108,00	(2.790.235.854,00)	(30,96)
42	Dinas Kesehatan	4.009.947.425,00	-	-	4.009.947.425,00	7.536.853.429,00	(3.526.906.004,00)	(46,80)
Jumlah		282.344.539.966,00	1.486.532.138,00	9.900.000,00	283.821.172.104,00	485.503.261.912,00	(201.682.089.808,00)	(41,54)

Perjalanan dinas mengalami penurunan dikarenakan adanya pergeseran yang dilakukan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

Realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp283.821.172.104,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD) 278.394.574.631,00

Belanja Daerah (BLUD) 3.949.965.335,00

Total Belanja Daerah 282.344.539.966,00

Penambahan

Saldo Akhir Utang 10.125.000,00

Beban dari Usaha Mandiri 224.705.954,00

Beban dari Bantuan Pemerintah 1.251.701.184,00

Total Penambahan 1.486.532.138,00

Pengurangan

Saldo Awal Utang 9.900.000,00

Total Pengurangan 9.900.000,00

Beban Daerah 283.821.172.104,00

5.4.2.1.2.5 Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan

kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga Rp328.806.987.202,00

Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp328.806.987.202,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp188.795.949.543,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp140.011.037.659,00 atau 74,16% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.227.333.000,00	452.760.164,00		6.680.093.164,00	8.119.385.851,00	(1.439.292.687,00)	(17,73)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
2	Dinas Kesehatan	364.432.750,00	-	-	364.432.750,00	275.700.000,00	88.732.750,00	32,18
3	RSUD Dr. Moewardi	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	38.000.000,00	(28.400.000,00)	(74,74)
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
5	RSUD dr. Arif Zainuddin	8.500.000,00	-	-	8.500.000,00	8.015.400,00	484.600,00	6,05
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	56.032.700,00	-	-	56.032.700,00	39.910.000,00	16.122.700,00	40,40
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	208.300.000,00	(88.300.000,00)	(42,39)
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	82.800.000,00	-	-	82.800.000,00	18.000.000,00	64.800.000,00	360,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	28.000.000,00	(10.000.000,00)	(35,71)
11	Dinas Sosial	149.204.680.000,00	-	-	149.204.680.000,00	170.219.570.000,00	(21.014.890.000,00)	(12,35)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	50.400.000,00	-	-	50.400.000,00	93.280.000,00	(42.880.000,00)	(45,97)
13	Dinas Ketahanan Pangan	103.850.000,00	-	-	103.850.000,00	130.125.000,00	(26.275.000,00)	(20,19)
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	384.863.662,00	-	-	384.863.662,00	756.174.292,00	(371.310.630,00)	(49,10)
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	842.215.000,00	-	-	842.215.000,00	280.300.000,00	561.915.000,00	200,47
16	Dinas Perhubungan	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	166.250.000,00	-	-	166.250.000,00	212.000.000,00	(45.750.000,00)	(21,58)
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.425.000,00	-	-	19.425.000,00	55.440.000,00	(36.015.000,00)	(64,96)
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	164.280.617.000,00	-	-	164.280.617.000,00	6.508.550.000,00	157.772.067.000,00	2.424,07
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	112.697.000,00	-	-	112.697.000,00	59.850.000,00	52.847.000,00	88,30
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.500.000,00	-	-	16.500.000,00	13.500.000,00	3.000.000,00	22,22
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.871.444.750,00	-	-	1.871.444.750,00	531.400.000,00	1.340.044.750,00	252,17
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.584.789.876,00	-	-	1.584.789.876,00	714.999.000,00	869.790.876,00	121,65
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00	10.000.000,00	(7.950.000,00)	(79,50)
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	542.170.300,00	-	-	542.170.300,00	215.200.000,00	326.970.300,00	151,94
26	Sekretariat Daerah	63.687.500,00	-	-	63.687.500,00	50.050.000,00	13.637.500,00	27,25
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.323.500,00	-	-	4.323.500,00	-	4.323.500,00	100,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	1.673.000.000,00	-	-	1.673.000.000,00	-	1.673.000.000,00	100,00
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(100,00)
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	465.565.000,00	-	-	465.565.000,00	136.700.000,00	328.865.000,00	240,57
31	Badan Penghubung	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	33,33
Jumlah		328.354.227.038,00	452.760.164,00	-	328.806.987.202,00	188.795.949.543,00	140.011.037.659,00	74,16

Barang/Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan untuk pemberian penghargaan kepada pemenang PON dan PEPARNAS Tahun 2024 untuk atlet dan pelatih pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; Pemberian pemenang lomba desa dan kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil; Pemberian Penghargaan Anugerah Karya Riset Pembangunan (AKRP) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Realisasi Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp328.806.987.202,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :



Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD)	328.277.094.338,00	
Belanja Daerah (BLUD)	77.132.700,00	
Total Belanja Daerah		328.354.227.038,00

Penambahan

Beban dari Usaha Mandiri	275.874.814,00	
Beban dari Bantuan Pemerintah	176.885.350,00	
Total Penambahan		452.760.164,00
Beban Daerah		328.806.987.202,00

5.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOS

Rp0,00

Beban Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp817.060.806.181,03 mengalami **penurunan** sebesar (Rp817.060.806.181,03) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	817.060.806.181,03	(817.060.806.181,03)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	817.060.806.181,03	(817.060.806.181,03)	(100,00)

5.4.2.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BOSP

Rp808.273.680.376,85

Beban Barang dan Jasa BOSP terealisasi sebesar Rp808.273.680.376,85, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp808.273.680.376,85 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	815.656.243.699,00	27.220.034.013,35	34.602.597.335,50	808.273.680.376,85	-	808.273.680.376,85	100,00
Jumlah	815.656.243.699,00	27.220.034.013,35	34.602.597.335,50	808.273.680.376,85	-	808.273.680.376,85	100,00

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp808.273.680.376,86 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD)	815.656.243.699,00	
Total Belanja Daerah		815.656.243.699,00

Penambahan

Saldo Awal Persediaan	27.220.034.013,35	
Total Penambahan		27.220.034.013,35

Pengurangan

Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	1.731.181.550,00	
Saldo Akhir Persediaan	32.871.415.785,50	
Total Pengurangan		34.602.597.335,50
Beban Daerah		808.273.680.376,85



5.4.2.1.3 Beban Subsidi

Rp12.291.564.636,00

Beban Subsidi terealisasi sebesar Rp12.291.564.636,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.399.999.100,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.891.565.536,00 atau 777,97% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Subsidi kepada BUMN	2.424.635.550,00	-	-	2.424.635.550,00	-	2.424.635.550,00	100,00
2 Beban Subsidi kepada BUMD	9.866.929.086,00	-	-	9.866.929.086,00	1.399.999.100,00	8.466.929.986,00	604,78
Jumlah	12.291.564.636,00	-	-	12.291.564.636,00	1.399.999.100,00	10.891.565.536,00	777,97

5.4.2.1.3.1 Beban Subsidi kepada BUMN

Rp2.424.635.550,00

Beban Subsidi kepada BUMN terealisasi sebesar Rp2.424.635.550,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.424.635.550,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Ketahanan Pangan	2.424.635.550,00	-	-	2.424.635.550,00	-	2.424.635.550,00	100,00
Jumlah	2.424.635.550,00	-	-	2.424.635.550,00	-	2.424.635.550,00	100,00

Subsidi kepada BUMN merupakan imbal jasa penjaminan bagi Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) yang mengajukan kredit ke PT BPR BKK Kab Pemalang, Tegal, dan Demak

5.4.2.1.3.2 Beban Subsidi kepada BUMD

Rp9.866.929.086,00

Beban Subsidi kepada BUMD terealisasi sebesar Rp9.866.929.086,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.399.999.100,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.466.929.986,00 atau 604,78% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	36.000.000,00	-	-	36.000.000,00	-	36.000.000,00	100,00
2 Dinas Ketahanan Pangan	9.830.929.086,00	-	-	9.830.929.086,00	1.399.999.100,00	8.430.929.986,00	602,21
Jumlah	9.866.929.086,00	-	-	9.866.929.086,00	1.399.999.100,00	8.466.929.986,00	604,78

Subsidi kepada BUMD merupakan kebijakan penambahan alokasi dalam rangka memperluas sasaran penerima manfaat yang masuk dalam bagian program prioritas daerah pada Dinas Ketahanan Pangan. Subsidi diberikan untuk harga pangan intervensi pada masyarakat rawan pangan, harga pangan tingkat produsen dan konsumen, harga pangan lokal dan harga promosi organik

5.4.2.1.4 Beban Hibah

Rp2.800.761.530.921,45

Beban Hibah terealisasi sebesar Rp2.800.761.530.921,45, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.664.175.033.195,08 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.863.413.502.273,63) atau (39,95%) dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	339.782.470.000,00	69.083.127.703,00	-	408.865.597.703,00	2.135.849.038.656,67	(1.726.983.440.953,67)	(80,86)
2 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	659.194.080.077,18	28.472.639.454,73	630.721.440.622,45	692.296.497.068,30	(61.575.056.445,85)	(8,89)



	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
3 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	624.844.636.650,00	32.515.219.400,00	-	657.359.856.050,00	763.947.623.524,11	(106.587.767.474,11)	(13,95)
4 Beban Hibah Dana BOS	1.065.728.454.546,00	-	-	1.065.728.454.546,00	1.036.753.274.946,00	28.975.179.600,00	2,79
5 Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	38.086.182.000,00	-	-	38.086.182.000,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81
Jumlah	2.068.441.743.196,00	760.792.427.180,18	28.472.639.454,73	2.800.761.530.921,45	4.664.175.033.195,08	(1.863.413.502.273,63)	(39,95)

Realisasi Beban Hibah sebesar Rp2.800.761.530.921,45, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD) 2.068.441.743.196,00

Total Belanja Daerah

2.068.441.743.196,00

Penambahan

Reklasifikasi dari Beban Persediaan 666.387.738.704,18

Hibah Barang Berupa Aset 94.404.688.476,00

Total Penambahan

760.792.427.180,18

Pengurangan

Penyusutan Aset Tetap yang Dihilangkan 28.472.639.454,73

Total Pengurangan

28.472.639.454,73

Beban Daerah

2.800.761.530.921,45

5.4.2.1.4.1 Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat

Rp408.865.597.703,00

Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp Rp408.865.597.703,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.135.849.038.656,67 mengalami **penurunan** sebesar (Rp (Rp1.726.983.440.953,67) atau (80,86%) dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	66.330.000	(66.330.000,00)	(100,00)
2 RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	508.000.000	(508.000.000,00)	(100,00)
3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	7.092.622.000,00	-	7.092.622.000,00	1.073.944.200.517	(1.066.851.578.517,00)	(99,34)
4 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-	33.774.036.580	(33.774.036.580,00)	(100,00)
5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.082.470.000,00	-	-	31.082.470.000,00	708.739.472.000,00	(677.657.002.000,00)	(95,61)
6 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	48.316.500.000,00	-	48.316.500.000,00	-	48.316.500.000,00	100,00
7 Dinas Komunikasi dan Informatika	4.250.000.000,00	-	-	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	-	-
8 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	13.674.005.703,00	-	13.674.005.703,00	10.030.332.893,00	3.643.672.810,00	36,33
9 Sekretariat Daerah	304.450.000.000,00	-	-	304.450.000.000,00	304.536.666.666,67	(86.666.666,67)	(0,03)
Jumlah	339.782.470.000,00	69.083.127.703,00	-	408.865.597.703,00	2.135.849.038.656,67	(1.726.983.440.953,67)	(80,86)

5.4.2.1.4.2 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Rp630.721.440.622,45

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp630.721.440.622,45, apabila

4



dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp692.296.497.068,30 mengalami **penurunan** sebesar (Rp61.575.056.445,85) atau (8,89%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurun an (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	-	621.977.362.314,18	323.174.288,06	621.654.188.026,12	681.442.044.989,75	(59.787.856.963,63)	(8,77)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	1.242.000.000,00		1.242.000.000,00		1.242.000.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	11.250.000,00		11.250.000,00		11.250.000,00	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	96.600.000,00		96.600.000,00	96.600.000,00	-	-
5	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	2.096.263.463,00		2.096.263.463,00	1.438.701.696,00	657.561.767,00	45,71
6	Dinas Sosial	-	541.608.000,00	541.608.000,00	-	-	-	-
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	286.801.302,08	(286.801.302,08)	(100,00)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	3.875.160.000,00		3.875.160.000,00		3.875.160.000,00	100,00
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	27.534.937.500,00	27.534.937.500,00	-	-	-	-
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	6.077.105.948,80	(6.077.105.948,80)	(100,00)
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	58.868.800,00	-	58.868.800,00	-	58.868.800,00	100,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.760.030.000,00	72.919.666,67	1.687.110.333,33	2.955.243.131,67	(1.268.132.798,34)	(42,91)
Jumlah		-	659.194.080.077,18	28.472.639.454,73	630.721.440.622,45	692.296.497.068,30	(61.575.056.445,85)	(8,89)

5.4.2.1.4.3 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Rp657.359.856.050,00

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp657.359.856.050,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp763.947.623.524,11 mengalami **penurunan** sebesar (Rp106.587.767.474,11) atau (13,95%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	266.764.310.692,00	-	-	266.764.310.692,00	284.400.286.698,00	(17.635.976.006,00)	(6,20)
2	Dinas Kesehatan	450.000.000,00	-	-	450.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	50,00
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	-	-	-	85.800,00	(85.800,00)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	14.999.812.000,00	-	14.999.812.000,00	26.513.775.885,00	(11.513.963.885,00)	(43,43)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	224.089.999,00	-	-	224.089.999,00	1.449.833.634,00	(1.225.743.635,00)	(84,54)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	99.669.738.000,00	-	-	99.669.738.000,00	84.817.555.000,00	14.852.183.000,00	17,51

A



		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
7	Dinas Sosial	769.000.000,00	90.000.000,00	-	859.000.000,00	1.301.928.000,00	(442.928.000,00)	(34,02)
8	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-
	Badan	-	293.668.088,00	-	293.668.088,00	335.017.750,00	(41.349.662,00)	(12,34)
9	Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Dinas	386.831.315,00	2.925.264.700,00	-	3.312.096.015,00	25.029.920.556,00	(21.717.824.541,00)	(86,77)
	Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-
10	Hidup dan Kehutanan	-	6.999.247.007,00	-	6.999.247.007,00	7.503.806.375,00	(504.559.368,00)	(6,72)
	Dinas	-	-	-	-	-	-	-
	Ketahanan	-	-	-	-	-	-	-
11	Pangan	82.125.000.000,00	-	-	82.125.000.000,00	138.653.255.000,00	(56.528.255.000,00)	(40,77)
	Dinas Pemuda	-	-	-	-	-	-	-
12	Olahraga dan	-	-	-	-	-	-	-
	Pariwisata	-	-	-	-	8.511.000.000,00	(8.511.000.000,00)	(100,00)
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.524.216.030,00	25.000.000,00	-	2.549.216.030,00	3.919.125.922,00	(1.369.909.892,00)	(34,95)
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	57.622.600.000,00	-	-	57.622.600.000,00	48.268.167.500,00	9.354.432.500,00	19,38
	Dinas	-	-	-	-	-	-	-
	Peternakan dan	-	-	-	-	-	-	-
15	Kesehatan	9.997.572.424,00	6.651.068.905,00	-	16.648.641.329,00	29.369.210.906,11	(12.720.569.577,11)	(43,31)
	Hewan	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.254.278.190,00	531.158.700,00	-	1.785.436.890,00	8.606.154.498,00	(6.820.717.608,00)	(79,25)
	Dinas Energi	-	-	-	-	-	-	-
17	dan Sumber Daya Mineral	5.725.000.000,00	-	-	5.725.000.000,00	865.000.000,00	4.860.000.000,00	561,85
	Dinas	-	-	-	-	-	-	-
	Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-
18	dan Perdagangan	97.332.000.000,00	-	-	97.332.000.000,00	94.103.500.000,00	3.228.500.000,00	3,43
	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-
	Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	624.844.636.650,00	32.515.219.400,00	-	657.359.856.050,00	763.947.623.524,11	(106.587.767.474,11)	(13,95)

5.4.2.1.4.4 Beban Hibah Dana BOS

Rp1.065.728.454.546,00

Beban Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp1.065.728.454.546,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.036.753.274.946,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp28.975.179.600,00 atau 2,79% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.065.728.454.546,00	-	-	1.065.728.454.546,00	1.036.753.274.946,00	28.975.179.600,00	2,79
	Jumlah	1.065.728.454.546,00	-	-	1.065.728.454.546,00	1.036.753.274.946,00	28.975.179.600,00	2,79

5.4.2.1.4.5 Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Rp38.086.182.000,00

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp38.086.182.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp35.328.599.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.757.583.000,00 atau 7,81% rincian sebagai berikut:

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.086.182.000,00	-	-	38.086.182.000,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81
	Jumlah	38.086.182.000,00	-	-	38.086.182.000,00	35.328.599.000,00	2.757.583.000,00	7,81

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Rp32.583.000.000,00

Beban Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp32.583.000.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45.008.996.459,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp12.425.996.459,00) atau (27,61%) dengan rincian sebagai berikut :



	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Bantuan Sosial kepada Individu	32.583.000.000,00	-	-	32.583.000.000,00	44.433.400.750,00	(11.850.400.750,00)	(26,67)
2 Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	575.595.709,00	(575.595.709,00)	(100,00)
Jumlah	32.583.000.000,00	-	-	32.583.000.000,00	45.008.996.459,00	(12.425.996.459,00)	(27,61)

5.4.2.1.5.1 Beban Bantuan Sosial kepada Individu

Rp32.583.000.000,00

Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Individu terealisasi sebesar Rp32.583.000.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp44.433.400.750,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp11.850.400.750,00) atau (26,67%) dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.983.000.000,00	-	-	14.983.000.000,00	14.430.000.000,00	553.000.000,00	3,83
2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	17.600.000.000,00	-	-	17.600.000.000,00	28.750.000.000,00	(11.150.000.000,00)	(38,78)
3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	1.253.400.750,00	(1.253.400.750,00)	(100,00)
Jumlah	32.583.000.000,00	-	-	32.583.000.000,00	44.433.400.750,00	(11.850.400.750,00)	(26,67)

5.4.2.1.5.2 Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Rp0,00

Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp575.595.709,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp575.595.709,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	575.595.709,00	(575.595.709,00)	(100,00)
Jumlah	-	-	-	-	575.595.709,00	(575.595.709,00)	(100,00)

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Rp624.834.360.075,50

Beban Penyisihan Piutang terealisasi sebesar Rp624.834.360.075,50, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp141.638.386.323,25 mengalami **kenaikan** sebesar Rp483.195.973.752,25 atau 241,15% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	624.438.231.649,25	140.862.452.549,11	483.575.779.100,14	343,30
2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	339.169.060,51	723.371.786,31	(384.202.725,80)	(53,11)
3 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.959.365,74	52.561.987,83	4.397.377,91	8,37
Jumlah	624.834.360.075,50	141.638.386.323,25	483.195.973.752,25	341,15

Realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp Rp624.834.360.075,50, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan

Saldo Penyisihan Piutang Tahun Berkenaan	511.148.338.754,81
Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	252.150.250.183,63
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluaarsa	438.676.162.892,00



Total Penambahan	1.201.974.751.830,44
Pengurangan	
Saldo Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	535.649.149.114,94
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	41.491.242.640,00
Total Pengurangan	577.140.391.754,94
Beban Daerah	624.834.360.075,50

5.4.2.1.6.1 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah **Rp624.438.231.649,25**

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp624.438.231.649,25, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp140.862.452.549,11 mengalami **kenaikan** sebesar Rp483.575.779.100,14 atau 343,30% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	624.438.231.649,25	140.862.430.437,50	483.575.801.211,75	343,30
2 Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	-	22.111,61	(22.111,61)	(100,00)
Jumlah	624.438.231.649,25	140.862.452.549,11	483.575.779.100,14	343,30

5.4.2.1.6.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah **Rp339.169.060,51**

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp339.169.060,51, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp723.371.786,31 mengalami **penurunan** sebesar (Rp384.202.725,80) atau (53,11%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	327.989.360,51	722.260.781,66	(394.271.421,15)	(54,59)
2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	11.179.700,00	1.111.004,65	10.068.695,35	906,27
Jumlah	339.169.060,51	723.371.786,31	(384.202.725,80)	(53,11)

5.4.2.1.6.2.1 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum **Rp327.989.360,51**

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp327.989.360,51, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp722.260.781,66 mengalami **penurunan** sebesar (Rp394.271.421,15) atau (54,59%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Kesehatan	-	86.667,96	(86.667,96)	(100,00)
2 RSUD Dr. Moewardi	-	12.985.942,63	(12.985.942,63)	(100,00)
3 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	160.767.388,31	237.945.731,40	(77.178.343,09)	(32,44)
4 RSUD dr. Adyatma, MPH	110.012.920,95	371.285.946,67	(261.273.025,72)	(70,37)
5 RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	37.486.192,00	97.317.569,00	(59.831.377,00)	(61,48)
6 RSJD Dr. Arif Zainudin	18.868.092,71	-	18.868.092,71	100,00
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	854.766,54	2.638.924,00	(1.784.157,46)	(67,61)
Jumlah	327.989.360,51	722.260.781,66	(394.271.421,15)	(54,59)

5.4.2.1.6.2.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha **Rp11.179.700,00**

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp11.179.700,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.111.004,65 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.068.695,35 atau 906,27% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.179.700,00	965.300,00	10.214.400,00	1.058,16
2 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	145.704,65	(145.704,65)	(100,00)
Jumlah	11.179.700,00	1.111.004,65	10.068.695,35	906,27



5.4.2.1.6.3 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah

Rp56.959.365,74

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp56.959.365,74, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp52.561.987,83 sehingga mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.397.377,90, atau 8,37% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	56.959.365,74	52.561.987,83	4.397.377,90	8,37
Jumlah	56.959.365,74	52.561.987,83	4.397.377,90	8,37

5.4.2.1.6.3.1 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD

Rp56.959.365,74

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp56.959.365,74, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp52.561.987,83 sehingga mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.397.377,91, atau 8,37% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 RSUD Dr. Moewardi	556.418,23	-	556.418,23	100,00
2 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	15.000,00	1.804.767,78	(1.789.767,78)	(99,17)
3 RSUD dr. Adyatma, MPH	40.371.962,50	38.050.895,00	2.321.067,50	6,10
4 RSUD dr. Rehatta	16.015.985,00	12.680.947,80	3.335.037,20	26,30
5 RSUD dr. Arif Zainuddin	-	25.377,25	(25.377,25)	(100,00)
6 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	0,01	-	0,01	100,00
Jumlah	56.959.365,74	52.561.987,83	4.397.377,91	8,37

5.4.2.1.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Rp1.622.578.065.883,24

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp1.622.578.065.883,24, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.499.586.730.397,52 mengalami **kenaikan** sebesar Rp122.991.335.485,72 atau 8,20% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Peralatan dan Mesin	739.525.682.116,53	701.869.869.856,91	37.655.812.259,62	5,37
2 Beban Gedung dan Bangunan	212.217.305.731,21	197.508.053.163,99	14.709.252.567,22	7,45
3 Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan	660.409.987.387,66	590.509.132.937,36	69.900.854.450,30	11,84
4 Beban Aset Tetap Lainnya	358.493.575,75	282.597.775,74	75.895.800,01	26,86
5 Beban Penyusutan Aset Lainnya	1.760.000,00	384.729.947,52	(382.969.947,52)	(99,54)
6 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.374.612.456,37	4.409.282.946,79	(34.670.490,42)	(0,79)
7 Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	5.230.655.545,53	4.584.766.346,68	645.889.198,85	14,09
8 Beban Penyusutan Properti Investasi	459.569.070,19	38.297.422,53	421.271.647,66	1.100,00
Jumlah	1.622.578.065.883,24	1.499.586.730.397,52	122.991.335.485,72	8,20

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.622.578.065.883,24 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan

21.495.444.982.636,80

Penambahan

Mutasi Keluar	15.321.181.599,44
Reklas Ke Aset tetap	33.372.240.507,40
Reklas ke Aset Lainnya	141.047.102.490,77
Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	2.859.010.297,13
Penjualan	105.075.194.055,28
Hibah dan LainBelanja DaerahLain	28.472.639.454,73
Koreksi	127.470.286.704,98



Total Penambahan	453.617.655.109,73
Pengurangan	
Hibah	3.302.717.258,98
Mutasi Masuk	15.321.181.599,44
Reklas Dari Aset Tetap	165.028.998.589,54
Reklas Dari Aset Lainnya	6.345.383.663,67
Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	7.500.000,00
Reklas Dari ATB	564.561.008,62
Koreksi	115.209.913.229,44
Total Pengurangan	305.780.255.349,69
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	20.020.704.316.513,60
Beban Daerah	1.622.578.065.883,24

5.4.2.1.7.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin **Rp739.525.682.116,53**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp739.525.682.116,53, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp701.869.869.856,91 mengalami **kenaikan** sebesar Rp37.655.812.259,62 atau 5,37% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Alat Besar	15.337.422.148,78	20.490.552.128,60	(5.153.129.979,82)	(25,15)
2 Beban Penyusutan Alat Angkutan	40.690.952.211,31	37.703.155.676,88	2.987.796.534,43	7,92
3 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	22.998.395.876,47	27.051.056.484,06	(4.052.660.607,59)	(14,98)
4 Beban Penyusutan Alat Pertanian	5.580.963.367,97	5.109.218.891,31	471.744.476,66	9,23
5 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	175.709.275.485,22	173.967.956.741,33	1.741.318.743,89	1,00
6 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.586.047.177,19	22.781.027.353,54	(194.980.176,35)	(0,86)
7 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	192.939.443.582,71	187.657.564.776,37	5.281.878.806,34	2,81
8 Beban Penyusutan Alat Laboratorium	63.821.919.848,79	59.860.418.408,17	3.961.501.440,62	6,62
9 Beban Penyusutan Alat Persenjataan	423.359.188,86	231.176.434,87	192.182.753,99	83,13
10 Beban Penyusutan Komputer	166.031.524.928,80	137.613.392.787,56	28.418.132.141,24	20,65
11 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	33.744.768,86	38.773.268,86	(5.028.500,00)	(12,97)
12 Beban Penyusutan Alat Pengeboran	16.816.771,47	16.269.929,80	546.841,67	3,36
13 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	92.223.758,34	80.184.051,95	12.039.706,39	15,02
14 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	2.118.000,00	2.118.000,00	-	-
15 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	884.281.264,90	884.394.709,11	(113.444,21)	(0,01)
16 Beban Penyusutan Alat Peraga	18.912.536.872,40	15.198.896.578,39	3.713.640.294,01	24,43
17 Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	697.015.691,72	564.469.750,10	132.545.941,62	23,48
18 Beban Penyusutan Rambu-rambu	2.269.630.132,18	1.825.044.950,65	444.585.181,53	24,36
19 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	10.498.011.040,56	10.794.198.935,36	(296.187.894,80)	(2,74)
Jumlah	739.525.682.116,53	701.869.869.856,91	37.655.812.259,62	5,37

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp739.525.682.116,53 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	7.836.982.692.077,80
Penambahan	
Mutasi Keluar	9.269.985.399,54
Reklas Ke Aset tetap	12.593.789.074,77
Reklas ke Aset Lainnya	81.934.424.034,19
Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	23.070.826,54



Koreksi	871.714.769,02	
Total Penambahan		104.692.984.104,06
Pengurangan		
Hibah	1.777.713.041,64	
Mutasi Masuk	9.269.985.399,54	
Reklas Dari Aset Tetap	12.578.695.077,09	
Reklas Dari Aset Lainnya	1.445.573.570,32	
Koreksi	1.590.457.993,21	
Total Pengurangan		26.662.425.081,80
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		7.175.487.568.983,53
Beban Daerah		739.525.682.116,53

5.4.2.1.7.1.1 Beban Penyusutan Alat Besar Rp15.337.422.148,78

Beban Penyusutan Alat Besar terealisasi sebesar Rp15.337.422.148,78, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp20.490.552.128,60 mengalami **penurunan** sebesar (Rp5.153.129.979,82) atau 25,15 % dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.650.392.790,10	1.736.758.202,69	(86.365.412,59)	(4,97)
2 Dinas Kesehatan	237.357.372,74	229.443.091,48	7.914.281,26	3,45
3 RSUD Dr. Moewardi	280.682.473,96	1.501.511.056,67	(1.220.828.582,71)	(81,31)
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	882.556.800,00	906.609.506,24	(24.052.706,24)	(2,65)
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	311.689.275,00	580.412.712,50	(268.723.437,50)	(46,30)
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	454.431.737,50	454.431.737,50	-	-
7 RSUD dr. Arif Zainuddin	533.182.607,62	533.182.607,63	(0,01)	(0,00)
8 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	149.789.886,79	149.789.886,79	-	-
9 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.235.835.034,76	7.952.785.190,62	(2.716.950.155,86)	(34,16)
10 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.606.949.759,00	2.004.114.119,82	(397.164.360,82)	(19,82)
11 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	71.885.112,50	71.885.112,50	-	-
12 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	460.801.025,84	593.684.427,92	(132.883.402,08)	(22,38)
13 Dinas Sosial	31.914.287,26	32.673.662,25	(759.374,99)	(2,32)
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.542.140,00	3.268.095,00	3.274.045,00	100,18
15 Dinas Ketahanan Pangan	49.864.937,50	49.864.937,50	-	-
16 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.137.471,00	17.093.721,00	(2.956.250,00)	(17,29)
17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	25.000.000,00	20.833.333,33	4.166.666,67	20,00
18 Dinas Perhubungan	50.593.937,50	51.531.050,00	(937.112,50)	(1,82)
19 Dinas Komunikasi dan Informatika	337.301.362,50	337.301.362,50	-	-
20 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	95.383.750,00	95.383.750,00	-	-
21 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.730.281,25	77.730.281,25	-	-
22 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	62.744.120,67	62.744.120,67	-	-
23 Dinas Kelautan dan Perikanan	280.814.983,33	301.030.561,47	(20.215.578,14)	(6,72)
24 Dinas Pertanian dan Perkebunan	415.763.954,17	392.288.954,15	23.475.000,02	5,98
25 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	56.203.787,50	57.537.120,83	(1.333.333,33)	(2,32)
26 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	75.761.187,50	148.017.437,50	(72.256.250,00)	(48,82)
27 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	97.537.036,25	96.642.244,58	894.791,67	0,93
28 Sekretariat Daerah	849.212.328,50	956.212.641,00	(107.000.312,50)	(11,19)
29 Sekretariat DPRD	420.477.202,51	444.185.077,50	(23.707.874,99)	(5,34)
30 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.199.172,92	28.067.787,50	5.131.385,42	18,28
31 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	198.581.122,91	325.074.581,62	(126.493.458,71)	(38,91)
32 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	111.737.937,50	111.737.937,50	-	-
33 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	129.209.784,70	124.568.331,59	4.641.453,11	3,73
34 Badan Penghubung	37.249.987,50	37.249.987,50	-	-
35 Inspektorat	4.907.500,00	4.907.500,00	-	-
Jumlah	15.337.422.148,78	20.490.552.128,60	(5.153.129.979,82)	(25,15)

5.4.2.1.7.1.2 Beban Penyusutan Alat Angkutan Rp40.690.952.211,31

Beban Penyusutan Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp40.690.952.211,31, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37.703.155.676,88 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.987.796.534,43 atau 7,92% dengan rincian sebagai berikut :



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.327.742.922,19	8.011.410.421,51	(683.667.499,32)	(8,53)
2 Dinas Kesehatan	3.251.750.583,19	3.110.624.539,46	141.126.043,73	4,54
3 RSUD Dr. Moewardi	991.455.753,49	854.842.228,98	136.613.524,51	15,98
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	824.188.064,59	639.171.200,00	185.016.864,59	28,95
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	377.488.308,33	334.976.850,00	42.511.458,33	12,69
6 RSUD dr. Rehatta	417.324.132,38	411.316.830,29	6.007.302,09	1,46
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	413.487.373,33	323.781.790,00	89.705.583,33	27,71
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	454.501.627,41	447.428.710,75	7.072.916,66	1,58
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	383.029.583,34	376.325.000,00	6.704.583,34	1,78
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.629.880.875,00	2.662.795.208,33	(32.914.333,33)	(1,24)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.189.180.271,25	2.142.319.499,37	46.860.771,88	2,19
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	57.687.500,00	57.687.500,00	-	-
13 Satuan Polisi Pamong Praja	183.481.520,83	181.366.312,50	2.115.208,33	1,17
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	785.555.750,93	1.055.990.224,90	(270.434.473,97)	(25,61)
15 Dinas Sosial	466.984.487,60	457.582.693,75	9.401.793,85	2,05
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	713.752.208,34	768.577.341,67	(54.825.133,33)	(7,13)
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	4.730.250,00	(4.730.250,00)	(100,00)
18 Dinas Ketahanan Pangan	109.805.416,66	104.130.000,00	5.675.416,66	5,45
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	411.184.564,14	235.875.213,61	175.309.350,53	74,32
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	70.603.750,00	70.603.750,00	-	-
21 Dinas Perhubungan	390.458.610,42	235.235.693,75	155.222.916,67	65,99
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	428.412.625,00	428.412.625,00	-	-
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	59.172.125,00	59.172.125,00	-	-
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	112.503.593,75	112.503.593,75	-	-
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	244.380.208,33	175.281.250,00	69.098.958,33	39,42
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	135.573.687,50	135.573.687,50	-	-
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	776.809.187,92	1.112.811.792,72	(336.002.604,80)	(30,19)
28 Dinas Pertanian dan Perkebunan	721.749.707,84	688.625.234,21	33.124.473,63	4,81
29 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	460.585.657,79	479.755.032,80	(19.169.375,01)	(4,00)
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	636.770.462,50	599.914.179,17	36.856.283,33	6,14
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	92.406.250,00	92.406.250,00	-	-
32 Sekretariat Daerah	5.049.106.275,05	3.263.391.627,30	1.785.714.647,75	54,72
33 Sekretariat DPRD	2.996.725.646,26	1.907.327.968,75	1.089.397.677,51	57,12
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	408.776.500,00	408.776.500,00	-	-
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.266.862.887,49	3.336.528.260,43	(69.665.372,94)	(2,09)
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	767.109.416,67	680.349.625,00	86.759.791,67	12,75
37 Badan Kepegawaian Daerah	79.940.625,00	62.500.000,00	17.440.625,00	27,91
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	175.977.083,33	121.486.041,67	54.491.041,66	44,85
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	253.506.500,00	253.506.500,00	-	-
40 Badan Penghubung	1.219.271.905,96	948.107.322,63	271.164.583,33	28,60
41 Inspektorat	283.640.125,00	277.826.364,58	5.813.760,42	2,09
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.128.437,50	72.128.437,50	-	-
Jumlah	40.690.952.211,31	37.703.155.676,88	2.987.796.534,43	7,92

5.4.2.1.7.1.3 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur

Rp22.998.395.876,47

Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur terealisasi sebesar Rp22.998.395.876,47, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp27.051.056.484,06 mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.052.660.607,59) atau (14,98%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.957.623.374,85	24.657.666.549,03	(3.700.043.174,18)	(15,01)
2 Dinas Kesehatan	249.582.308,29	561.194.300,00	(311.611.991,71)	(55,53)
3 RSUD Dr. Moewardi	127.193.745,00	111.971.158,33	15.222.586,67	13,60
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	331.550.253,50	295.385.120,44	36.165.133,06	12,24
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	21.828.578,83	22.189.210,50	(360.631,67)	(1,63)
6 RSUD dr. Rehatta	9.506.495,00	8.214.632,50	1.291.862,50	15,73
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1.283.918,40	5.922.552,40	(4.638.634,00)	(78,32)
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	38.041.953,34	10.553.010,00	27.488.943,34	260,48
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	7.657.407,50	141.671.707,50	(134.014.300,00)	(94,59)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	201.852.290,90	125.680.663,19	76.171.627,71	60,61
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	36.872.433,52	27.827.433,73	9.044.999,79	32,50
12 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.611.715,00	64.611.715,00	-	-
13 Dinas Sosial	2.301.666,67	3.610.000,00	(1.308.333,33)	(36,24)
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	185.076.324,00	70.680.891,57	114.395.432,43	161,85
15 Dinas Ketahanan Pangan	10.555.500,00	10.955.500,00	(400.000,00)	(3,65)
16 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.313.800,00	18.228.216,68	2.085.583,32	11,44
17 Dinas Perhubungan	35.067.500,00	44.059.166,67	(8.991.666,67)	(20,41)
18 Dinas Komunikasi dan Informatika	6.754.940,00	6.388.640,00	366.300,00	5,73
19 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.805.706,50	10.805.706,50	-	-
20 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	19.611.870,00	15.930.000,00	3.681.870,00	23,11



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.730.755,70	134.730.755,70	-	-
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	43.580.350,00	48.503.408,32	(4.923.058,32)	(10,15)
23 Dinas Pertanian dan Perkebunan	24.766.260,00	40.199.593,33	(15.433.333,33)	(38,39)
24 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	72.802.930,00	66.613.563,33	6.189.366,67	9,29
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	143.061.838,00	196.920.136,17	(53.858.298,17)	(27,35)
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	170.503.759,80	272.452.943,17	(101.949.183,37)	(37,42)
27 Sekretariat Daerah	3.416.825,01	5.102.200,00	(1.685.374,99)	(33,03)
28 Sekretariat DPRD	137.000,00	-	137.000,00	100,00
29 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	395.160,00	395.160,00	-	-
30 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	64.581.666,66	70.265.000,00	(5.683.333,34)	(8,09)
31 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.832.550,00	1.832.550,00	-	-
32 Badan Penghubung	495.000,00	495.000,00	-	-
Jumlah	22.998.395.876,47	27.051.056.484,06	(4.052.660.607,59)	(14,98)

5.4.2.1.7.1.4 Beban Penyusutan Alat Pertanian

Rp5.580.963.367,97

Beban Penyusutan Alat Pertanian terealisasi sebesar Rp5.580.963.367,97, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.109.218.891,31 mengalami **kenaikan** sebesar Rp471.744.476,66 atau 9,23% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.474.646.632,10	1.416.988.282,32	57.658.349,78	4,07
2 Dinas Kesehatan	1.450.000,00	2.900.000,00	(1.450.000,00)	(50,00)
3 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	842.187,50	1.443.750,00	(601.562,50)	(41,67)
4 RSUD dr. Adyatma, MPH	23.125.000,00	23.125.000,00	-	-
5 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.749.025,00	3.749.025,00	-	-
6 RSUD dr. Arif Zainuddin	2.829.375,00	2.829.375,00	-	-
7 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.600.000,00	-	3.600.000,00	100,00
8 Dinas Sosial	3.112.500,00	3.112.500,00	-	-
9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25.580.000,00	21.355.833,32	4.224.166,68	19,78
10 Dinas Ketahanan Pangan	117.375.000,00	91.125.000,00	26.250.000,00	28,81
11 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16.850.000,00	16.850.000,00	-	-
12 Dinas Komunikasi dan Informatika	249.750,00	124.875,00	124.875,00	100,00
13 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.320.675,00	-	4.320.675,00	100,00
14 Dinas Kelautan dan Perikanan	42.331.606,67	37.194.573,34	5.137.033,33	13,81
15 Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.578.400.659,07	3.219.618.323,83	358.782.335,24	11,14
16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	282.017.624,30	268.802.353,50	13.215.270,80	4,92
17 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	483.333,33	-	483.333,33	100,00
Jumlah	5.580.963.367,97	5.109.218.891,31	471.744.476,66	9,23

5.4.2.1.7.1.5 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Rp175.709.275.485,22

Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp175.709.275.485,22, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp173.967.956.741,33 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.741.318.743,89 atau 1,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	126.055.931.517,06	125.064.549.210,52	991.382.306,54	0,79
2 Dinas Kesehatan	3.109.033.915,75	3.186.083.418,75	(77.049.503,00)	(2,42)
3 RSUD Dr. Moewardi	5.459.849.363,97	5.288.350.970,82	171.498.393,15	3,24
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	6.765.824.051,40	8.305.557.268,15	(1.539.733.216,75)	(18,54)
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	3.384.992.509,87	3.209.637.986,47	175.354.523,40	5,46
6 RSUD dr. Rehatta	1.199.445.280,23	733.929.528,68	465.515.751,55	63,43
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	582.615.431,53	996.349.351,71	(413.733.920,18)	(41,52)
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	2.410.684.340,42	1.714.624.261,61	696.060.078,81	40,60
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	533.936.442,63	837.697.772,44	(303.761.329,81)	(36,26)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.700.657.276,83	2.050.541.892,45	650.115.384,38	31,70
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	507.241.130,04	343.939.963,22	163.301.166,82	47,48
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.013.788,00	181.816.074,65	(11.802.286,65)	(6,49)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	17.945.000,05	43.628.666,67	(25.683.666,62)	(58,87)
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	385.148.969,66	379.175.566,68	5.973.402,98	1,58
15 Dinas Sosial	1.145.602.816,55	639.035.394,54	506.567.422,01	79,27
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.188.000.771,11	829.685.888,54	358.314.882,57	43,19
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	156.589.279,08	93.111.145,66	63.478.133,42	68,17
18 Dinas Ketahanan Pangan	252.235.694,84	609.084.417,36	(356.848.722,52)	(58,59)
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	447.527.838,12	533.895.337,33	(86.367.499,21)	(16,18)



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	83.196.577,33	92.788.141,34	(9.591.564,01)	(10,34)
21 Dinas Perhubungan	503.210.623,57	574.267.779,14	(71.057.155,57)	(12,37)
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	1.511.510.270,33	1.407.998.945,39	103.511.324,94	7,35
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	720.623.884,33	832.830.684,29	(112.206.799,96)	(13,47)
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.992.746,71	60.139.246,69	2.853.500,02	4,74
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.721.944.749,80	3.396.019.249,77	325.925.500,03	9,60
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	211.428.702,94	200.057.172,26	11.371.530,68	5,68
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	421.837.041,29	369.799.046,95	52.037.994,34	14,07
28 Dinas Pertanian dan Perkebunan	306.793.999,09	450.641.834,73	(143.847.835,64)	(31,92)
29 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	563.007.434,93	676.465.871,59	(113.458.436,66)	(16,77)
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	564.437.484,53	919.630.895,20	(355.193.410,67)	(38,62)
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	650.200.711,69	496.851.436,32	153.349.275,37	30,86
32 Sekretariat Daerah	1.814.775.657,61	1.079.256.782,04	735.518.875,57	68,15
33 Sekretariat DPRD	3.746.279.485,49	4.513.731.617,65	(767.452.132,16)	(17,00)
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	272.859.482,26	400.072.182,13	(127.212.699,87)	(31,80)
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.483.578.835,17	1.323.675.669,56	159.903.165,61	12,08
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	408.659.446,43	166.706.613,04	241.952.833,39	145,14
37 Badan Kepegawaian Daerah	218.701.360,37	260.349.173,77	(41.647.813,40)	(16,00)
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	995.152.195,19	772.935.036,10	222.217.159,09	28,75
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	173.828.400,00	162.515.233,32	11.313.166,68	6,96
40 Badan Penghubung	131.548.011,92	125.993.633,23	5.554.378,69	4,41
41 Inspektorat	434.126.644,13	496.718.256,11	(62.591.611,98)	(12,60)
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	235.306.322,97	147.818.124,46	87.488.198,51	59,19
Jumlah	175.709.275.485,22	173.967.956.741,33	1.741.318.743,89	1,00

5.4.2.1.7.1.6 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar Rp22.586.047.177,19

Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terealisasi sebesar Rp22.586.047.177,19, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.781.027.353,54 mengalami **penurunan** sebesar (Rp194.980.176,35) atau (0,86%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.129.705.601,31	14.119.753.214,24	(990.047.612,93)	(7,01)
2 Dinas Kesehatan	431.428.305,58	372.109.829,94	59.318.475,64	15,94
3 RSUD Dr. Moewardi	174.631.616,65	217.303.800,03	(42.672.183,38)	(19,64)
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	270.878.074,67	589.790.353,85	(318.912.279,18)	(54,07)
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	174.793.348,88	251.151.608,83	(76.358.259,95)	(30,40)
6 RSUD dr. Rehatta	12.379.600,00	19.153.380,00	(6.773.780,00)	(35,37)
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	61.594.883,35	35.092.733,33	26.502.150,02	75,52
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	123.282.888,53	108.567.220,15	14.715.668,38	13,55
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	88.113.313,94	88.995.447,27	(882.133,33)	(0,99)
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	945.914.110,87	862.803.632,00	83.110.478,87	9,63
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	56.080.500,00	45.563.333,35	10.517.166,65	23,08
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	108.661.800,00	61.060.200,00	47.601.600,00	77,96
13 Satuan Polisi Pamong Praja	59.712.900,00	39.788.333,33	19.924.566,67	50,08
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.963.310,00	14.411.310,00	(8.448.000,00)	(58,62)
15 Dinas Sosial	44.981.033,34	17.680.166,67	27.300.866,67	154,42
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77.701.975,86	51.230.809,21	26.471.166,65	51,67
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15.233.970,00	9.647.303,34	5.586.666,66	57,91
18 Dinas Ketahanan Pangan	116.827.140,94	34.219.307,59	82.607.833,35	241,41
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	136.008.516,67	151.819.625,00	(15.811.108,33)	(10,41)
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	31.141.640,00	41.050.106,68	(9.908.466,68)	(24,14)
21 Dinas Perhubungan	61.279.200,00	65.195.710,00	(3.916.510,00)	(6,01)
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	1.791.849.512,20	1.809.633.930,70	(17.784.418,50)	(0,98)
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	182.848.000,00	190.269.183,35	(7.421.183,35)	(3,90)
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.447.100,00	15.847.100,00	2.600.000,00	16,41
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	758.636.822,60	716.548.931,26	42.087.891,34	5,87
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.754.100,00	3.225.200,01	8.528.899,99	264,45
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	42.757.279,47	42.476.071,14	281.208,33	0,66
28 Dinas Pertanian dan Perkebunan	71.998.871,34	62.262.371,33	9.736.500,01	15,64
29 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	77.748.900,00	76.818.900,00	930.000,00	1,21
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	91.130.914,80	124.990.901,47	(33.859.986,67)	(27,09)
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	425.999.283,14	278.473.341,45	147.525.941,69	52,98
32 Sekretariat Daerah	1.798.052.464,27	1.441.974.727,42	356.077.736,85	24,69
33 Sekretariat DPRD	233.563.933,34	259.882.500,00	(26.318.566,66)	(10,13)
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38.654.043,32	21.094.043,33	17.559.999,99	83,25
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	29.039.420,00	54.196.920,00	(25.157.500,00)	(46,42)
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	320.810.666,66	274.264.500,00	46.546.166,66	16,97



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
37 Badan Kepegawaian Daerah	9.205.960,00	20.370.980,00	(11.165.020,00)	(54,81)
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	358.455.483,57	106.396.904,89	252.058.578,68	236,90
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	10.954.000,00	10.188.000,00	766.000,00	7,52
40 Badan Penghubung	128.346.005,74	16.574.455,71	111.771.550,03	674,36
41 Inspektorat	37.165.486,15	21.018.833,33	16.146.652,82	76,82
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.315.200,00	38.132.133,34	(15.816.933,34)	(41,48)
Jumlah	22.586.047.177,19	22.781.027.353,54	(194.980.176,35)	(0,86)

5.4.2.1.7.1.7 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan **Rp192.939.443.582,71**

Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan terealisasi sebesar Rp192.939.443.582,71, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp187.657.564.776,37 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.281.878.806,34 atau 2,81% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	932.633.047,66	1.160.557.228,72	(227.924.181,06)	(19,64)
2 Dinas Kesehatan	13.276.727.261,96	13.101.956.949,78	174.770.312,18	1,33
3 RSUD Dr. Moewardi	96.252.664.298,04	100.302.099.635,28	(4.049.435.337,24)	(4,04)
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	47.640.346.502,62	37.928.017.580,39	9.712.328.922,23	25,61
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	18.156.670.803,34	20.026.619.497,37	(1.869.948.694,03)	(9,34)
6 RSUD dr. Rehatta	4.767.735.130,46	4.227.794.737,21	539.940.393,25	12,77
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	4.929.559.674,10	5.675.259.272,73	(745.699.598,63)	(13,14)
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	3.476.741.945,59	2.150.041.609,71	1.326.700.335,88	61,71
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	3.238.789.407,97	2.764.861.971,67	473.927.436,30	17,14
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.054.323,90	870.206,40	184.117,50	21,16
11 Dinas Sosial	36.576.999,87	28.034.766,61	8.542.233,26	30,47
12 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.000,00	-	300.000,00	100,00
13 Dinas Perhubungan	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-
14 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.992.000,00	1.992.000,00	-	-
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	400.000,00	(400.000,00)	(100,00)
16 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	2.100.000,00	(2.100.000,00)	(100,00)
17 Dinas Kelautan dan Perikanan	1.655.500,00	1.655.500,00	-	-
18 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	186.094.560,00	218.119.360,00	(32.024.800,00)	(14,68)
19 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	500.000,00	(500.000,00)	(100,00)
20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	971.927,20	6.448.593,84	(5.476.666,64)	(84,93)
21 Sekretariat Daerah	23.975.000,00	23.975.000,00	-	-
22 Sekretariat DPRD	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-
23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	655.000,00	655.000,00	-	-
24 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	18.185.666,66	(18.185.666,66)	(100,00)
25 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.910.200,00	12.030.200,00	(3.120.000,00)	(25,93)
26 Badan Riset dan Inovasi Daerah	160.000,00	160.000,00	-	-
Jumlah	192.939.443.582,71	187.657.564.776,37	5.281.878.806,34	2,81

5.4.2.1.7.1.8 Beban Penyusutan Alat Laboratorium **Rp63.821.919.848,79**

Beban Penyusutan Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp63.821.919.848,79, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp59.860.418.408,17 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.961.501.440,62 atau 6,62% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.901.576.561,62	34.319.311.975,62	3.582.264.586,00	10,44
2 Dinas Kesehatan	4.641.926.749,30	4.748.571.228,55	(106.644.479,25)	(2,25)
3 RSUD Dr. Moewardi	7.335.194.197,42	7.066.908.810,58	268.285.386,84	3,80
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	5.681.862.706,28	5.043.615.160,68	638.247.545,60	12,65
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	913.378.194,38	942.434.632,56	(29.056.438,18)	(3,08)
6 RSUD dr. Rehatta	114.708.916,77	113.169.753,63	1.539.163,14	1,36
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	119.530.032,47	117.256.816,36	2.273.216,11	1,94
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	97.032.579,14	244.252.366,67	(147.219.787,53)	(60,27)
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	264.969.019,09	262.422.612,83	2.546.406,26	0,97
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.008.294.006,36	950.924.418,79	57.369.587,57	6,03
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	179.790.354,71	201.635.293,61	(21.844.938,90)	(10,83)
12 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.205.500,00	13.022.864,58	(6.817.364,58)	(52,35)
13 Dinas Sosial	1.044.353,33	1.534.183,33	(489.830,00)	(31,93)
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	580.386.096,83	341.687.425,79	238.698.671,04	69,86
15 Dinas Ketahanan Pangan	197.860.379,26	200.775.951,48	(2.915.572,22)	(1,45)
16 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	411.305.935,28	371.350.495,17	39.955.440,11	10,76



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.981.000,00	2.981.000,00	-	-
18 Dinas Komunikasi dan Informatika	499.500,00	249.750,00	249.750,00	100,00
19 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.781.517,95	4.715.684,55	65.833,40	1,40
20 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25.387.916,67	25.387.916,66	0,01	0,00
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	80.000,00	13.333,33	66.666,67	500,00
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	148.519.114,76	145.025.500,26	3.493.614,50	2,41
23 Dinas Pertanian dan Perkebunan	419.599.829,17	294.285.329,13	125.314.500,04	42,58
24 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.236.419.210,38	1.648.780.903,49	(412.361.693,11)	(25,01)
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	815.678.242,40	757.239.849,41	58.438.392,99	7,72
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.698.790.295,64	2.038.123.504,16	(339.333.208,52)	(16,65)
27 Sekretariat DPRD	663.333,34	386.944,44	276.388,90	71,43
28 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.029.999,99	1.029.166,61	833,38	0,08
29 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.424.306,25	3.325.535,90	9.098.770,35	273,60
Jumlah	63.821.919.848,79	59.860.418.408,17	3.961.501.440,62	6,62

5.4.2.1.7.1.9 Beban Penyusutan Alat Persenjataan

Rp423.359.188,86

Beban Penyusutan Alat Persenjataan terealisasi sebesar Rp423.359.188,86, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp231.176.434,87 mengalami **kenaikan** sebesar Rp192.182.753,99 atau 83,13% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	251.354.980,61	189.781.231,49	61.573.749,12	32,44
2 Satuan Polisi Pamong Praja	8.260.000,00	8.260.000,00	-	-
3 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.450.000,00	18.450.000,00	-	-
4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.022.125,00	204.425,00	817.700,00	400,00
5 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.502.743,75	-	3.502.743,75	100,00
6 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
7 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	137.769.339,50	11.480.778,38	126.288.561,12	1.100,00
Jumlah	423.359.188,86	231.176.434,87	192.182.753,99	83,13

5.4.2.1.7.1.10 Beban Penyusutan Komputer

Rp166.031.524.928,80

Beban Penyusutan Komputer terealisasi sebesar Rp166.031.524.928,80, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp137.613.392.787,56 mengalami **kenaikan** sebesar Rp28.418.132.141,24 atau 20,65% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	116.637.527.312,66	96.167.444.074,62	20.470.083.238,04	21,29
2 Dinas Kesehatan	1.541.920.127,29	1.567.596.734,82	(25.676.607,53)	(1,64)
3 RSUD Dr. Moewardi	5.385.182.977,82	4.423.812.433,44	961.370.544,38	21,73
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	7.118.450.615,73	6.463.823.818,99	654.626.796,74	10,13
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	3.407.037.598,40	1.821.316.156,54	1.585.721.441,86	87,06
6 RSUD dr. Rehatta	351.572.835,69	291.464.746,65	60.108.089,04	20,62
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	379.642.578,06	324.203.823,82	55.438.754,24	17,10
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	501.143.188,77	408.559.922,45	92.583.266,32	22,66
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	519.475.767,06	444.122.285,98	75.353.481,08	16,97
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.441.841.930,22	1.167.163.135,39	274.678.794,83	23,53
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	574.007.395,84	361.601.208,38	212.406.187,46	58,74
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	241.255.494,17	194.576.327,50	46.679.166,67	23,99
13 Satuan Polisi Pamong Praja	58.214.026,04	52.321.250,00	5.892.776,04	11,26
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.181.137,46	40.476.658,35	2.704.479,11	6,68
15 Dinas Sosial	583.131.021,58	344.765.493,97	238.365.527,61	69,14
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	907.191.500,06	649.935.500,08	257.255.999,98	39,58
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	109.191.279,13	92.772.391,62	16.418.887,51	17,70
18 Dinas Ketahanan Pangan	245.668.303,83	211.884.532,94	33.783.770,89	15,94
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	514.695.423,56	459.752.402,76	54.943.020,80	11,95
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	30.687.375,00	21.313.500,00	9.373.875,00	43,98
21 Dinas Perhubungan	98.509.291,67	82.972.916,66	15.536.375,01	18,72
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	13.107.919.071,69	11.887.204.080,51	1.220.714.991,18	10,27
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	317.085.270,81	294.319.750,00	22.765.520,81	7,73
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	170.577.557,96	154.525.860,00	16.051.697,96	10,39
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	142.841.018,17	132.758.518,16	10.082.500,01	7,59
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	156.367.454,93	129.867.092,48	26.500.362,45	20,41
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	236.297.822,61	258.759.144,70	(22.461.322,09)	(8,68)



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
28 Dinas Pertanian dan Perkebunan	144.906.688,38	127.031.895,83	17.874.792,55	14,07
29 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	463.661.144,17	470.774.501,67	(7.113.357,50)	(1,51)
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	481.600.966,52	440.259.739,85	41.341.226,67	9,39
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	753.403.433,02	558.621.665,61	194.781.767,41	34,87
32 Sekretariat Daerah	1.470.904.686,21	1.083.001.445,47	387.903.240,74	35,82
33 Sekretariat DPRD	1.287.397.385,45	1.190.631.958,32	96.765.427,13	8,13
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	834.919.625,86	679.542.843,50	155.376.782,36	22,86
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.864.290.938,14	3.047.719.708,18	816.571.229,96	26,79
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	415.016.579,14	265.332.258,32	149.684.320,82	56,41
37 Badan Kepegawaian Daerah	420.388.666,61	415.093.000,00	5.295.666,61	1,28
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	521.433.499,48	381.432.339,17	140.001.160,31	36,70
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	277.368.000,00	244.829.250,00	32.538.750,00	13,29
40 Badan Penghubung	32.551.041,67	24.322.916,67	8.228.125,00	33,83
41 Inspektorat	82.161.041,69	84.218.750,00	(2.057.708,31)	(2,44)
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	160.905.856,25	151.266.754,16	9.639.102,09	6,37
Jumlah	166.031.524.928,80	137.613.392.787,56	28.418.132.141,24	20,65

5.4.2.1.7.1.11 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi **Rp33.744.768,86**

Beban Penyusutan Alat Eksplorasi terealisasi sebesar Rp33.744.768,86, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp38.773.268,86 mengalami **penurunan** sebesar (Rp5.028.500,00) atau (12,97%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.564.768,86	37.669.268,86	(4.104.500,00)	(10,90)
2 Dinas Kesehatan	180.000,00	180.000,00	-	-
3 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	924.000,00	(924.000,00)	(100,00)
Jumlah	33.744.768,86	38.773.268,86	(5.028.500,00)	(12,97)

5.4.2.1.7.1.12 Beban Penyusutan Alat Pengeboran **Rp16.816.771,47**

Beban Penyusutan Alat Pengeboran terealisasi sebesar Rp16.816.771,47, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.269.929,80 mengalami **kenaikan** sebesar Rp546.841,67 atau 3,36% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.816.771,47	16.269.929,80	546.841,67	3,36
Jumlah	16.816.771,47	16.269.929,80	546.841,67	3,36

5.4.2.1.7.1.13 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian **Rp92.223.758,34**

Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian terealisasi sebesar Rp92.223.758,34, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp80.184.051,95 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.039.706,39 atau 15,02% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84.386.438,34	72.346.731,95	12.039.706,39	16,64
2 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.837.320,00	7.837.320,00	-	-
Jumlah	92.223.758,34	80.184.051,95	12.039.706,39	15,02

5.4.2.1.7.1.14 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi **Rp2.118.000,00**

Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi terealisasi sebesar Rp2.118.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.118.000,00 sehingga **tidak mengalami kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.118.000,00	2.118.000,00	-	-
Jumlah	2.118.000,00	2.118.000,00	-	-

5.4.2.1.7.1.15 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja **Rp884.281.264,90**

Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja terealisasi sebesar Rp884.281.264,90, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp884.394.709,11 mengalami **penurunan** sebesar (Rp113.444,21) atau (0,01%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	774.398.602,46	738.726.891,68	35.671.710,78	4,83
2 Dinas Kesehatan	11.524.420,00	12.885.416,67	(1.360.996,67)	(10,56)
3 RSUD dr. Arif Zainuddin	572.916,67	1.375.000,00	(802.083,33)	(58,33)
4 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	7.380.000,00	7.380.000,00	-	-
5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.239.400,00	4.014.400,00	1.225.000,00	30,52
6 Dinas Ketahanan Pangan	200.000,00	33.333,33	166.666,67	500,00
7 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.869.000,00	2.806.500,00	2.062.500,00	73,49
8 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	39.066.589,10	39.066.589,10	-	-
9 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.487.500,00	3.487.500,00	-	-
10 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	37.330.336,67	74.619.078,33	(37.288.741,66)	(49,97)
11 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	212.500,00	-	212.500,00	100,00
Jumlah	884.281.264,90	884.394.709,11	(113.444,21)	(0,01)

5.4.2.1.7.1.16 Beban Penyusutan Alat Peraga **Rp18.912.536.872,40**

Beban Penyusutan Alat Peraga terealisasi sebesar Rp18.912.536.872,40, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.198.896.578,39 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.713.640.294,01 atau 24,43% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.655.065.411,67	14.997.862.900,99	3.657.202.510,68	24,38
2 Dinas Kesehatan	5.953.430,00	5.953.430,00	-	-
3 RSUD Dr. Moewardi	133.587.769,20	133.587.769,20	-	-
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	63.649.038,23	33.556.588,20	30.092.450,03	89,68
5 RSUD dr. Rehatta	1.215.000,00	101.250,00	1.113.750,00	1.100,00
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.666.400,00	2.666.400,00	-	-
7 RSUD dr. Arif Zainuddin	4.120.000,00	4.120.000,00	-	-
8 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.982.500,00	9.982.500,00	-	-
9 Dinas Sosial	1.460.000,00	1.460.000,00	-	-
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.837.323,30	9.605.740,00	25.231.583,30	262,67
Jumlah	18.912.536.872,40	15.198.896.578,39	3.713.640.294,01	24,43

5.4.2.1.7.1.17 Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi **Rp697.015.691,72**

Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi terealisasi sebesar Rp697.015.691,72, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp564.469.750,10 mengalami **kenaikan** sebesar Rp132.545.941,62 atau 23,48% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	470.073.291,72	432.402.812,61	37.670.479,11	8,71
2 Dinas Kesehatan	2.812.500,00	2.812.500,00	-	-
3 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	11.875.000,00	11.875.000,00	-	-
4 RSUD dr. Adyatma, MPH	8.226.750,00	8.226.750,00	-	-
5 RSUD dr. Arif Zainuddin	28.750,00	-	28.750,00	100,00
6 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	11.625.000,00	11.625.000,00	-	-
7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	165.962.000,00	71.865.062,49	94.096.937,51	130,94
8 Dinas Kelautan dan Perikanan	3.100.150,00	2.975.375,00	124.775,00	4,19
9 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.368.500,00	5.743.500,00	625.000,00	10,88
10 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	16.943.750,00	16.943.750,00	-	-
Jumlah	697.015.691,72	564.469.750,10	132.545.941,62	23,48



5.4.2.1.7.1.18 Beban Penyusutan Rambu-Rambu

Rp2.269.630.132,18

Beban Penyusutan Rambu-Rambu terealisasi sebesar Rp2.269.630.132,18, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.825.044.950,65 mengalami **kenaikan** sebesar Rp444.585.181,53 atau 24,36% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.597.833,15	33.289.161,25	308.671,90	0,93
2 RSUD dr. Rehatta	2.585.287,50	2.585.287,50	-	-
3 RSUD dr. Arif Zainuddin	1.187.500,00	296.875,00	890.625,00	300,00
4 Dinas Perhubungan	2.188.336.744,88	1.760.191.762,90	428.144.981,98	24,32
5 Dinas Komunikasi dan Informatika	1.200.000,00	8.192.125,00	(6.992.125,00)	(85,35)
6 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	22.414.266,85	13.074.989,00	9.339.277,85	71,43
7 Dinas Kelautan dan Perikanan	1.375.000,00	1.375.000,00	-	-
8 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	838.500,00	838.500,00	-	-
9 Sekretariat DPRD	1.181.250,00	787.500,00	393.750,00	50,00
10 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.499.999,80	-	12.499.999,80	100,00
11 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.413.750,00	4.413.750,00	-	-
Jumlah	2.269.630.132,18	1.825.044.950,65	444.585.181,53	24,36

5.4.2.1.7.1.19 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga

Rp10.498.011.040,56

Beban Penyusutan Peralatan

Olahraga terealisasi sebesar Rp10.498.011.040,56, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.794.198.935,36 mengalami **penurunan** sebesar (Rp296.187.894,80) atau (2,74%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.221.352.548,92	1.078.214.277,94	143.138.270,98	13,28
2 Dinas Kesehatan	3.750.000,00	3.750.000,00	-	-
3 RSUD Dr. Moewardi	2.417.083,33	-	2.417.083,33	100,00
4 RSUD dr. Adyatma, MPH	2.712.500,00	2.712.500,00	-	-
5 RSUD dr. Rehatta	1.158.732,50	1.158.732,50	-	-
6 RSUD dr. Arif Zainuddin	6.673.750,00	6.673.750,00	-	-
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	4.852.604,17	5.150.520,83	(297.916,66)	(5,78)
8 Dinas Sosial	1.850.000,00	1.868.750,00	(18.750,00)	(1,00)
9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	104.166,67	1.250.000,00	(1.145.833,33)	(91,67)
10 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.407.291,67	11.412.500,00	(2.005.208,33)	(17,57)
11 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9.178.882.059,13	9.669.474.570,75	(490.592.511,62)	(5,07)
12 Dinas Kelautan dan Perikanan	28.989.887,50	-	28.989.887,50	100,00
13 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.987.500,00	1.987.500,00	-	-
14 Sekretariat Daerah	31.122.916,67	7.795.833,34	23.327.083,33	299,23
15 Sekretariat DPRD	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-
Jumlah	10.498.011.040,56	10.794.198.935,36	(296.187.894,80)	(2,74)

5.4.2.1.7.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Rp212.217.305.731,21

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp212.217.305.731,21, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp197.508.053.163,99 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.709.252.567,22 atau 7,45% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung	208.310.290.942,14	193.649.341.723,95	14.660.949.218,19	7,57
2 Beban Penyusutan Monumen	777.134.327,34	794.504.073,76	(17.369.746,42)	(2,19)
3 Beban Penyusutan Bangunan Menara	60.642.818,67	94.950.153,48	(34.307.334,81)	(36,13)
4 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.069.237.643,06	2.969.257.212,80	99.980.430,26	3,37
Jumlah	212.217.305.731,21	197.508.053.163,99	14.709.252.567,22	7,45

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp212.217.305.731,21 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan

2.837.792.215.131,30

Penambahan

Mutasi Keluar

6.051.196.199,90



Reklas Ke Aset tetap	3.331.354.570,11	
Reklas ke Aset Lainnya	2.218.597.274,51	
Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	2.835.939.470,59	
Koreksi	61.598.390.503,12	
Total Penambahan		76.035.478.018,23
Pengurangan		
Hibah	116.484.130,82	
Mutasi Masuk	6.051.196.199,90	
Reklas Dari Aset Tetap	12.019.870.371,96	
Reklas Dari Aset Lainnya	395.085.929,69	
Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	7.500.000,00	
Koreksi	31.452.378.011,33	
Total Pengurangan		50.042.514.643,70
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		2.651.567.872.774,62
Beban Daerah		212.217.305.731,21

5.4.2.1.7.2.1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Rp208.310.290.942,14

Beban Penyusutan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp208.310.290.942,14, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp193.649.341.723,95 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.660.949.218,19 atau 7,57% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	107.160.201.284,69	100.604.889.779,88	6.555.311.504,81	6,52
2 Dinas Kesehatan	2.730.951.313,26	2.548.641.946,31	182.309.366,95	7,15
3 RSUD Dr. Moewardi	15.982.078.223,98	11.852.300.201,84	4.129.778.022,14	34,84
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	7.395.528.581,69	7.391.205.728,36	4.322.853,33	0,06
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	3.421.224.372,51	3.367.794.575,28	53.429.797,23	1,59
6 RSUD dr. Rehatta	1.819.873.459,72	1.811.398.105,14	8.475.354,58	0,47
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.281.421.822,58	1.917.593.043,09	363.828.779,49	18,97
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	2.289.587.003,47	2.029.724.405,55	259.862.597,92	12,80
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.866.831.194,12	1.358.149.320,14	508.681.873,98	37,45
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	4.014.950.233,39	3.680.478.171,58	334.472.061,81	9,09
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	795.648.219,66	597.044.672,78	198.603.546,88	33,26
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	206.931.937,11	211.829.916,38	(4.897.979,27)	(2,31)
13 Satuan Polisi Pamong Praja	401.838.967,41	379.202.928,21	22.636.039,20	5,97
14 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	187.418.194,34	177.924.895,57	9.493.298,77	5,34
15 Dinas Sosial	3.849.288.824,42	3.656.064.742,28	193.224.082,14	5,29
16 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.205.931.756,94	1.166.788.833,58	39.142.923,36	3,35
17 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	404.293.972,63	401.466.570,56	2.827.402,07	0,70
18 Dinas Ketahanan Pangan	345.398.786,25	288.562.621,19	56.836.165,06	19,70
19 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.295.725.968,24	2.274.749.991,94	20.975.976,30	0,92
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	214.146.187,61	214.146.187,63	(0,02)	(0,00)
21 Dinas Perhubungan	3.215.455.938,84	3.103.721.756,18	111.734.182,66	3,60
22 Dinas Komunikasi dan Informatika	378.264.223,09	378.264.223,09	-	-
23 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	252.635.182,86	251.097.899,93	1.537.282,93	0,61
24 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	209.475.952,74	209.203.093,85	272.858,89	0,13
25 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.416.343.721,67	14.882.804.728,68	533.538.992,99	3,58
26 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	606.270.322,84	520.145.527,66	86.124.795,18	16,56
27 Dinas Kelautan dan Perikanan	2.903.806.324,73	2.474.698.779,56	429.107.545,17	17,34
28 Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.552.695.081,21	3.307.265.465,32	245.429.615,89	7,42
29 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.040.663.119,40	1.909.151.975,58	131.511.143,82	6,89
30 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.026.633.397,33	924.554.445,53	102.078.951,80	11,04
31 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.890.795.986,82	1.851.891.073,83	38.904.912,99	2,10
32 Sekretariat Daerah	2.049.731.779,00	2.143.995.511,85	(94.263.732,85)	(4,40)
33 Sekretariat DPRD	2.802.373.561,05	2.777.661.384,70	24.712.176,35	0,89
34 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	474.654.445,55	465.550.752,68	9.103.692,87	1,96
35 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.951.292.292,65	4.941.308.592,55	9.983.700,10	0,20
36 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.200.237.604,66	5.215.687.552,94	(15.449.948,28)	(0,30)
37 Badan Kepegawaian Daerah	201.060.023,10	187.222.304,32	13.837.718,78	7,39
38 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.131.342.110,02	1.091.975.659,50	39.366.450,52	3,61



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
39 Badan Riset dan Inovasi Daerah	205.813.615,69	202.373.006,52	3.440.609,17	1,70
41 Badan Penghubung	441.678.236,20	399.227.529,59	42.450.706,61	10,63
40 Inspektorat	349.845.162,80	347.780.199,08	2.064.963,72	0,59
42 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	139.952.555,87	133.803.623,72	6.148.932,15	4,60
Jumlah	208.310.290.942,14	193.649.341.723,95	14.660.949.218,19	7,57

5.4.2.1.7.2.2 Beban Penyusutan Monumen

Rp777.134.327,34

Beban Penyusutan Monumen terealisasi sebesar Rp777.134.327,34, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp794.504.073,76 mengalami **penurunan** sebesar (Rp17.369.746,42) atau (2,19%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	250.739.932,99	268.215.588,40	(17.475.655,41)	(6,52)
2 Dinas Kesehatan	2.883.240,00	2.883.240,00	-	-
3 RSUD dr. Rehatta	5.318.220,00	5.318.220,00	-	-
4 RSUD dr. Arif Zainuddin	16.281.052,00	16.281.052,00	-	-
5 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	30.000,00	30.000,00	-	-
6 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.720.180,00	5.720.180,00	-	-
7 Dinas Sosial	758.288,99	652.380,00	105.908,99	16,23
8 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.800.000,00	2.800.000,00	-	-
9 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.464.324,32	6.464.324,32	-	-
10 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	76.982.516,40	76.982.516,40	-	-
11 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	156.000,00	156.000,00	-	-
12 Sekretariat DPRD	350.946.719,84	350.946.719,84	-	-
13 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.938.700,00	16.938.700,00	-	-
14 Badan Penghubung	41.115.152,80	41.115.152,80	-	-
Jumlah	777.134.327,34	794.504.073,76	(17.369.746,42)	(2,19)

5.4.2.1.7.2.3 Beban Penyusutan Bangunan Menara

Rp60.642.818,67

Beban Penyusutan Bangunan Menara terealisasi sebesar Rp60.642.818,67, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp94.950.153,48 mengalami **penurunan** sebesar (Rp34.307.334,81) atau (36,13%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.295.025,00	18.295.025,00	-	-
2 Dinas Perhubungan	7.731.636,30	7.731.636,30	-	-
3 Dinas Kelautan dan Perikanan	4.203.701,86	5.141.670,00	(937.968,14)	(18,24)
4 Dinas Pertanian dan Perkebunan	29.722.455,51	63.068.422,18	(33.345.966,67)	(52,87)
5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	690.000,00	690.000,00	-	-
6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	23.400,00	(23.400,00)	(100,00)
Jumlah	60.642.818,67	94.950.153,48	(34.307.334,81)	(36,13)

5.4.2.1.7.2.4 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Rp3.069.237.643,06

Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti terealisasi sebesar Rp3.069.237.643,06, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.969.257.212,80 mengalami **kenaikan** sebesar Rp99.980.430,26 atau 3,37% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.480.874.043,64	1.443.400.112,31	37.473.931,33	2,60
2 Dinas Kesehatan	98.663.334,80	98.663.334,80	-	-
3 RSUD Dr. Moewardi	13.998.267,43	8.843.180,00	5.155.087,43	58,29
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	10.164.000,00	10.164.000,00	-	-
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	25.144.686,84	25.144.686,84	-	-
6 RSUD dr. Rehatta	88.221.918,00	88.221.918,00	-	-
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.517.160,00	3.517.160,00	-	-
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	9.821.400,00	2.455.350,00	7.366.050,00	300,00
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	33.014.386,58	32.043.836,96	970.549,62	3,03
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	258.792.870,12	14.625.673,34	244.167.196,78	1.669,44
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.790.160,00	2.790.160,00	-	-
12 Dinas Sosial	78.946.258,31	64.043.119,21	14.903.139,10	23,27



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.071.517,00	16.201.675,33	1.869.841,67	11,54
14 Dinas Ketahanan Pangan	9.293.200,00	9.293.200,00	-	-
15 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	40.136.520,00	40.136.520,00	-	-
16 Dinas Perhubungan	27.640.452,51	27.640.452,51	-	-
17 Dinas Komunikasi dan Informatika	15.869.891,44	15.869.891,44	-	-
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.794.656,00	2.794.656,00	-	-
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.200.400,00	2.200.400,00	-	-
20 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	185.776.397,66	185.646.766,50	129.631,16	0,07
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.131.735,66	7.131.735,66	-	-
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	121.644.249,77	118.926.945,31	2.717.304,46	2,28
23 Dinas Pertanian dan Perkebunan	271.484.623,01	257.430.127,32	14.054.495,69	5,46
24 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	90.111.041,01	89.495.191,00	615.850,01	0,69
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.772.410,00	9.772.410,00	-	-
26 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.130.450,00	1.130.450,00	-	-
27 Sekretariat DPRD	8.346.416,00	7.604.149,33	742.266,67	9,76
28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.884.400,00	1.884.400,00	-	-
29 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	35.814.650,64	35.814.650,64	-	-
30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	76.528.735,64	306.713.649,30	(230.184.913,66)	(75,05)
31 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	36.738.211,00	36.738.211,00	-	-
32 Inspektorat	286.200,00	286.200,00	-	-
33 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.633.000,00	2.633.000,00	-	-
Jumlah	3.069.237.643,06	2.969.257.212,80	99.980.430,26	3,37

5.4.2.1.7.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan **Rp660.409.987.387,66**

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan terealisasi sebesar Rp660.409.987.387,66, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp590.509.132.937,36 mengalami **kenaikan** sebesar Rp69.900.854.450,30 atau 11,84% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Jalan dan Jembatan	590.680.256.451,21	528.702.524.691,82	61.977.731.759,39	11,72
2 Bangunan Air	55.294.195.838,16	49.392.195.544,20	5.902.000.293,96	11,95
3 Instalasi	4.521.728.103,43	4.524.232.025,42	(2.503.921,99)	(0,06)
4 Jaringan	9.913.806.994,86	7.890.180.675,92	2.023.626.318,94	25,65
Jumlah	660.409.987.387,66	590.509.132.937,36	69.900.854.450,30	11,84

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sebesar Rp660.409.987.387,66, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 9.723.664.295.695,34

Penambahan

Reklas Ke Aset tetap 11.101.713.198,85
Reklas ke Aset Lainnya 56.329.520.173,45
Koreksi 64.675.396.432,84

Total Penambahan 132.106.629.805,14

Pengurangan

Hibah 1.408.520.086,52
Reklas Dari Aset Tetap 68.649.450,00
Reklas Dari Aset Lainnya 4.499.950.163,66
Koreksi 79.222.004.316,01

Total Pengurangan 85.199.124.016,19

Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 9.110.161.814.096,63

Beban Daerah 660.409.987.387,66



5.4.2.1.7.3.1 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan

Rp590.680.256.451,21

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp590.680.256.451,21, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp528.702.524.691,82 mengalami **kenaikan** sebesar Rp61.977.731.759,39 atau 11,72% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	730.453.582,61	1.037.546.206,43	(307.092.623,82)	(29,60)
2 RSUD Dr. Moewardi	19.049.020,00	19.049.020,00	-	-
3 RSUD dr. Rehatta	90.944.892,51	245.137.075,00	(154.192.182,49)	(62,90)
4 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	6.788.500,00	6.788.500,00	-	-
5 RSUD dr. Arif Zainuddin	676.770.647,20	617.274.397,20	59.496.250,00	9,64
6 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	2.226.600,00	(2.226.600,00)	(100,00)
7 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	581.333.385.950,22	519.098.056.839,53	62.235.329.110,69	11,99
8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.342.828.992,50	1.676.604.401,84	(333.775.409,34)	(19,91)
9 Dinas Perhubungan	2.256.961.797,50	2.185.286.186,16	71.675.611,34	3,28
10 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.816.926.610,52	1.771.037.950,86	45.888.659,66	2,59
11 Dinas Kelautan dan Perikanan	1.552.068.193,69	1.243.717.216,54	308.350.977,15	24,79
12 Dinas Pertanian dan Perkebunan	501.393.118,30	442.193.108,12	59.200.010,18	13,39
13 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	352.685.146,16	357.607.190,14	(4.922.043,98)	(1,38)
Jumlah	590.680.256.451,21	528.702.524.691,82	61.977.731.759,39	11,72

5.4.2.1.7.3.2 Beban Penyusutan Bangunan Air

Rp55.294.195.838,16

Beban Penyusutan Bangunan Air terealisasi sebesar Rp55.294.195.838,16, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp49.392.195.544,20 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.902.000.293,96 atau 11,95% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	475.150.321,85	496.846.594,29	(21.696.272,44)	(4,37)
2 Dinas Kesehatan	23.622.633,33	23.622.633,34	(0,01)	(0,00)
3 RSUD Dr. Moewardi	61.842.264,94	61.842.264,94	-	-
4 RSUD dr. Adyatma, MPH	29.853.207,94	30.497.400,03	(644.192,09)	(2,11)
5 RSUD dr. Rehatta	92.759.415,00	93.292.748,32	(533.333,32)	(0,57)
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.284.300,00	3.284.300,00	-	-
7 RSUD dr. Arif Zainuddin	3.190.525,00	3.190.525,00	-	-
8 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	35.451.020,84	35.451.020,83	0,01	0,00
9 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.102.378.480,48	3.100.193.903,24	2.184.577,24	0,07
10 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	37.690.729.295,97	38.213.510.947,71	(522.781.651,74)	(1,37)
11 Satuan Polisi Pamong Praja	5.306.666,67	5.306.666,67	-	-
12 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.225.000,00	2.225.000,00	-	-
13 Dinas Sosial	84.774.964,00	77.371.526,72	7.403.437,28	9,57
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.254.250,00	1.254.250,00	-	-
15 Dinas Ketahanan Pangan	647.500,00	647.500,00	-	-
16 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	218.719.566,48	237.357.024,82	(18.637.458,34)	(7,85)
17 Dinas Perhubungan	240.152.711,41	216.016.686,72	24.136.024,69	11,17
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.397.005,00	5.397.005,00	-	-
19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.859.800,00	2.859.800,00	-	-
20 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	403.404.422,55	415.551.727,23	(12.147.304,68)	(2,92)
21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.831.451,61	5.831.451,62	(0,01)	(0,00)
22 Dinas Kelautan dan Perikanan	11.371.222.817,48	4.991.297.850,51	6.379.924.966,97	127,82
23 Dinas Pertanian dan Perkebunan	524.001.713,97	460.037.442,05	63.964.271,92	13,90
24 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	112.316.255,19	112.055.236,77	261.018,42	0,23
25 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	745.129.483,79	747.965.040,01	(2.835.556,22)	(0,38)
26 Sekretariat Daerah	2.071.473,37	172.622,79	1.898.850,58	1.100,00
27 Sekretariat DPRD	23.161.758,33	23.161.758,35	(0,02)	(0,00)
28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.387.654,67	4.884.738,94	1.502.915,73	30,77
29 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.141.666,67	6.141.666,67	-	-
30 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.928.211,62	14.928.211,63	(0,01)	(0,00)
Jumlah	55.294.195.838,16	49.392.195.544,20	5.902.000.293,96	11,95

5.4.2.1.7.3.3 Beban Penyusutan Instalasi

Rp4.521.728.103,43

Beban Penyusutan Instalasi terealisasi sebesar Rp4.521.728.103,43, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.524.232.025,42 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.503.921,99) atau (0,06%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	458.629.190,61	426.163.900,86	32.465.289,75	7,62
2 Dinas Kesehatan	115.427.348,01	118.031.514,73	(2.604.166,72)	(2,21)



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
3 RSUD Dr. Moewardi	1.439.732.377,27	1.430.090.543,19	9.641.834,08	0,67
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	13.357.693,58	12.199.613,75	1.158.079,83	9,49
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	538.221.002,89	538.221.002,89	-	-
6 RSUD dr. Rehatta	131.132.714,68	128.401.189,07	2.731.525,61	2,13
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	32.137.933,33	32.137.933,35	(0,02)	(0,00)
8 RSUD dr. Arif Zainuddin	221.787.291,45	211.535.230,36	10.252.061,09	4,85
9 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	248.841.545,05	177.712.551,94	71.128.993,11	40,02
10 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	31.029.010,00	34.181.291,92	(3.152.281,92)	(9,22)
11 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	16.169.245,81	16.169.245,83	(0,02)	(0,00)
12 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	978.560,00	81.546,67	897.013,33	1.100,00
13 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.285.825,00	2.285.825,00	-	-
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.593.411,67	23.593.411,64	0,03	0,00
15 Dinas Ketahanan Pangan	362.500,00	362.500,00	-	-
16 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.708.990,33	49.732.690,32	(14.023.699,99)	(28,20)
17 Dinas Perhubungan	216.803.268,55	285.575.166,95	(68.771.898,40)	(24,08)
18 Dinas Komunikasi dan Informatika	45.947.104,16	45.947.104,16	-	-
19 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	841.645,25	841.645,25	-	-
20 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.219.400,00	6.990.502,80	(5.771.102,80)	(82,56)
21 Dinas Kelautan dan Perikanan	79.922.984,89	74.756.894,05	5.166.090,84	6,91
22 Dinas Pertanian dan Perkebunan	56.958.304,63	33.835.791,42	23.122.513,21	68,34
23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	84.613.294,01	84.124.775,21	488.518,80	0,58
24 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	651.189.546,18	725.555.620,95	(74.366.074,77)	(10,25)
25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.847.692,50	1.847.692,50	-	-
26 Sekretariat DPRD	24.376.233,75	24.376.233,75	-	-
27 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.398.339,87	6.398.339,86	0,01	0,00
28 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.049.794,55	10.916.411,58	9.133.382,97	83,67
29 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	22.165.855,41	22.165.855,42	(0,01)	(0,00)
Jumlah	4.521.728.103,43	4.524.232.025,42	(2.503.921,99)	(0,06)

5.4.2.1.7.3.4 Beban Penyusutan Jaringan

Rp9.913.806.994,86

Beban Penyusutan Jaringan terealisasi sebesar Rp9.913.806.994,86 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.890.180.675,92 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.023.626.318,94 atau 25,65% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	574.182.635,51	577.474.702,09	(3.292.066,58)	(0,57)
2 Dinas Kesehatan	22.179.095,50	23.179.564,27	(1.000.468,77)	(4,32)
3 RSUD Dr. Moewardi	13.322.081,02	13.322.081,02	-	-
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	137.350.932,50	137.350.932,50	-	-
5 RSUD dr. Rehatta	74.170.236,84	62.119.856,32	12.050.380,52	19,40
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	45.037.275,50	45.037.275,50	-	-
7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	6.404.325,00	533.693,75	5.870.631,25	1.100,00
8 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	7.651.341.820,17	5.554.575.543,83	2.096.766.276,34	37,75
9 Dinas Sosial	16.666,66	16.666,67	(0,01)	(0,00)
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	580.920,00	580.920,00	-	-
11 Dinas Ketahanan Pangan	2.390.293,33	2.390.293,35	(0,02)	(0,00)
12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	46.655.160,84	46.655.160,84	-	-
13 Dinas Perhubungan	432.228.390,15	518.186.093,72	(85.957.703,57)	(16,59)
14 Dinas Komunikasi dan Informatika	2.849.585,00	2.849.585,00	-	-
15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143.621,83	143.621,82	0,01	0,00
16 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	624.500,00	699.231,80	(74.731,80)	(10,69)
17 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	417.500,00	417.500,00	-	-
18 Dinas Kelautan dan Perikanan	18.867.649,56	19.699.784,95	(832.135,39)	(4,22)
19 Dinas Pertanian dan Perkebunan	31.167.708,36	31.167.708,30	0,06	0,00
20 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	26.808.894,36	26.712.763,29	96.131,07	0,36
21 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	762.507.779,59	762.507.773,75	5,84	0,00
22 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.901.417,49	6.901.417,50	(0,01)	(0,00)
23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.779.643,75	36.779.643,75	-	-
24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.858.186,90	15.858.186,90	-	-
25 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.020.675,00	5.020.675,00	-	-
Jumlah	9.913.806.994,86	7.890.180.675,92	2.023.626.318,94	25,65

5.4.2.1.7.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Rp358.493.575,75

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp358.493.575,75, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp282.597.775,74 mengalami **kenaikan** sebesar Rp75.895.800,01 atau 26,86% dengan rincian sebagai berikut :



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	358.493.575,75	282.597.775,74	75.895.800,01	26,86
Jumlah	358.493.575,75	282.597.775,74	75.895.800,01	26,86

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp358.493.575,75 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	3.661.294.620,40
Pengurangan	
Reklas Dari Aset Lainnya	4.774.000,00
Koreksi	3.637.333,33
Total Pengurangan	8.411.333,33
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	3.294.389.711,32
Beban Daerah	358.493.575,75

5.4.2.1.7.4.1 Beban Penyusutan Barang Bercorak

Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Rp358.493.575,75

Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga terealisasi sebesar Rp358.493.575,75, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp282.597.775,74 mengalami **penurunan** sebesar Rp75.895.800,01 atau 26,86% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	356.693.575,75	256.664.975,74	100.028.600,01	38,97
2 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	3.600.000,00	(3.600.000,00)	(100,00)
3 Dinas Sosial	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-
4 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	15.432.800,00	(15.432.800,00)	(100,00)
5 Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	5.100.000,00	(5.100.000,00)	(100,00)
Jumlah	358.493.575,75	282.597.775,74	75.895.800,01	26,86

5.4.2.1.7.5 Beban Penyusutan Aset Lainnya

Rp1.760.000,00

Beban Penyusutan Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp1.760.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp384.729.947,52 mengalami **penurunan** sebesar (Rp382.969.947,52) atau (99,54%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga- Sewa	1.760.000,00	384.729.947,52	(382.969.947,52)	(99,54)
Jumlah	1.760.000,00	384.729.947,52	(382.969.947,52)	(99,54)

Realisasi Beban Penyusutan Aset lainnya sebesar Rp1.760.000,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan	
Reklas Ke Aset tetap	30.080.000,00
Total Penambahan	30.080.000,00
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	28.320.000,00
Beban Daerah	1.760.000,00



5.4.2.1.7.5.1 Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa **Rp1.760.000,00**

Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa terealisasi sebesar Rp1.760.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp384.729.947,52 mengalami **penurunan** sebesar (Rp382.969.947,52) atau (99,54%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.760.000,00	1.920.000,00	(160.000,00)	(8,33)
2 Dinas Sosial	-	297.000,00	(297.000,00)	(100,00)
3 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	234.911.727,27	(234.911.727,27)	(100,00)
4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	3.931.067,58	(3.931.067,58)	(100,00)
5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	1.775.000,00	(1.775.000,00)	(100,00)
6 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	141.895.152,67	(141.895.152,67)	(100,00)
Jumlah	1.760.000,00	384.729.947,52	(382.969.947,52)	(99,54)

5.4.2.1.7.6 Beban Amortisasi Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud **Rp4.374.612.456,37**

Beban Penyusutan Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud terealisasi sebesar Rp4.374.612.456,37, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.409.282.946,79 mengalami **penurunan** sebesar (Rp34.670.490,42) atau (0,79%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	63.936.000,00	63.936.000,00	-	-
2 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-	-	-
3 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-	-	-
4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	3.651.590.921,87	3.679.637.899,79	(28.046.977,92)	(0,76)
5 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	628.004.472,00	617.166.922,00	10.837.550,00	1,76
6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya	31.081.062,50	48.542.125,00	(17.461.062,50)	(35,97)
Jumlah	4.374.612.456,37	4.409.282.946,79	(34.670.490,42)	(0,79)

Realisasi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.374.612.456,37 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	42.827.396.148,62
Penambahan	
Reklas ke Aset Lainnya	564.561.008,62
Total Penambahan	564.561.008,62
Pengurangan	
Reklas Dari Aset Tetap	5.500.000,00
Koreksi	2.941.435.575,61
Total Pengurangan	2.946.935.575,61
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	36.070.409.125,26
Beban Daerah	4.374.612.456,37

5.4.2.1.7.6.1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise **Rp63.936.000,00**

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise terealisasi sebesar Rp63.936.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp63.936.000,00 sehingga **tidak mengalami kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 RSUD dr. Adyatma, MPH	63.936.000,00	63.936.000,00	-	-
Jumlah	63.936.000,00	63.936.000,00	-	-



5.4.2.1.7.6.2 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software Rp3.651.590.921,87

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software terealisasi sebesar Rp3.651.590.921,87, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.679.637.899,79 mengalami **penurunan** sebesar (Rp28.046.977,92) atau (0,76%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123.716.352,59	285.082.960,87	(161.366.608,28)	(56,60)
2 Dinas Kesehatan	348.755.950,48	433.856.620,49	(85.100.670,01)	(19,61)
3 RSUD Dr. Moewardi	252.787.688,89	297.788.688,89	(45.001.000,00)	(15,11)
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	12.976.548,00	12.976.548,00	-	-
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
6 RSUD dr. Rehatta	338.666.676,67	330.543.760,00	8.122.916,67	2,46
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	47.637.576,92	45.577.125,00	2.060.451,92	4,52
8 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	853.383,33	-	853.383,33	100,00
9 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	95.902.153,34	97.301.970,00	(1.399.816,66)	(1,44)
10 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	88.500.762,50	64.023.975,00	24.476.787,50	38,23
11 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	229.578.085,79	191.825.074,19	37.753.011,60	19,68
12 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.384.615,39	6.551.282,05	1.833.333,34	27,98
13 Dinas Sosial	8.333.333,33	11.666.666,67	(3.333.333,34)	(28,57)
14 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	188.883.234,53	177.386.706,54	11.496.527,99	6,48
15 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	28.689.271,84	39.279.629,89	(10.590.358,05)	(26,96)
16 Dinas Ketahanan Pangan	493.950,00	76.439.000,00	(75.945.050,00)	(99,35)
17 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.818.233,33	-	35.818.233,33	100,00
18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	94.533.503,72	90.361.187,50	4.172.316,22	4,62
19 Dinas Perhubungan	36.358.046,25	12.194.926,53	24.163.119,72	198,14
20 Dinas Komunikasi dan Informatika	78.176.189,83	42.367.040,00	35.809.149,83	84,52
21 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	13.567.365,39	26.975.630,13	(13.408.264,74)	(49,71)
22 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150.376.527,21	32.048.226,26	118.328.300,95	369,22
23 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	214.852.333,62	241.222.807,74	(26.370.474,12)	(10,93)
24 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.254.080,00	-	8.254.080,00	100,00
25 Dinas Pertanian dan Perkebunan	30.464.565,96	18.750.000,00	11.714.565,96	62,48
26 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.176.150,83	39.707.142,86	(30.530.992,03)	(76,89)
27 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.332.083,34	-	3.332.083,34	100,00
28 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	67.190.332,51	38.098.176,95	29.092.155,56	76,36
29 Sekretariat Daerah	212.661.868,35	18.260.408,48	194.401.459,87	1.064,61
30 Sekretariat DPRD	23.097.325,49	42.838.125,49	(19.740.800,00)	(46,08)
31 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.656.116,67	9.000.000,00	20.656.116,67	229,51
32 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	128.650.264,02	44.364.744,58	84.285.519,44	189,98
33 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	194.525.833,34	198.460.000,00	(3.934.166,66)	(1,98)
34 Badan Kepegawaian Daerah	360.984.159,19	578.233.190,08	(217.249.030,89)	(37,57)
35 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.028.625,00	6.514.312,50	6.514.312,50	100,00
36 Badan Riset dan Inovasi Daerah	45.015.732,26	6.658.833,33	38.356.898,93	576,03
37 Badan Penghubung	38.643.928,89	34.040.960,45	4.602.968,44	13,52
38 Inspektorat	22.316.550,00	65.444.675,00	(43.128.125,00)	(65,90)
39 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	62.751.523,07	59.797.504,32	2.954.018,75	4,94
Jumlah	3.651.590.921,87	3.679.637.899,79	(28.046.977,92)	(0,76)

5.4.2.1.7.6.3 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian Rp628.004.472,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian terealisasi sebesar Rp628.004.472,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp617.166.922,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.837.550,00 atau 1,76% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	607.010.672,00	579.293.722,00	27.716.950,00	4,78
2 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	20.993.800,00	37.873.200,00	(16.879.400,00)	(44,57)
Jumlah	628.004.472,00	617.166.922,00	10.837.550,00	1,76

5.4.2.1.7.6.4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp31.081.062,50

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya terealisasi sebesar Rp31.081.062,50, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp48.542.125,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp17.461.062,50) atau (35,97%) dengan rincian sebagai berikut :



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.615.000,00	3.490.000,00	125.000,00	3,58
2 Dinas Kesehatan	4.940.000,00	-	4.940.000,00	100,00
3 Dinas Perhubungan	22.526.062,50	45.052.125,00	(22.526.062,50)	(50,00)
Jumlah	31.081.062,50	48.542.125,00	(17.461.062,50)	(35,97)

5.4.2.1.7.7 Beban Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain Rp5.230.655.545,53

Beban Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain terealisasi sebesar Rp5.230.655.545,53, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.584.766.346,68 mengalami **kenaikan** sebesar Rp645.889.198,85 atau 14,09% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	-	-	-	-
2 Beban Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	5.230.655.545,53	4.584.766.346,68	645.889.198,85	14,09
Jumlah	5.230.655.545,53	4.584.766.346,68	645.889.198,85	14,09

Realisasi Beban Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp5.230.655.545,53, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 1.029.351.329.915,85

Penambahan

Reklas Ke Aset tetap	6.315.303.663,67
Penjualan	105.075.194.055,28
Hibah dan LainBelanja DaerahLain	28.472.639.454,73
Koreksi	324.785.000,00

Total Penambahan 140.187.922.173,68

Pengurangan

Reklas Dari Aset Tetap	140.356.283.690,49
Reklas Dari ATB	564.561.008,62

Total Pengurangan 140.920.844.699,11

Saldo Awal Akumulasi Penyusutan 1.023.387.751.844,89

Beban Daerah 5.230.655.545,53

5.4.2.1.7.7.1 Beban Penyusutan Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Rp5.230.655.545,53

Beban Penyusutan Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terealisasi sebesar Rp5.230.655.545,53, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.584.766.346,68 mengalami **kenaikan** sebesar Rp645.889.198,85 atau 14,09% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.124.632,12	26.350.317,32	7.774.314,80	29,50
2 Dinas Kesehatan	1.003.734.841,30	1.035.093.054,35	(31.358.213,05)	(3,03)
3 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	4.046.361.351,25	3.201.342.308,73	845.019.042,52	26,40
4 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	11.324.560,00	11.999.560,00	(675.000,00)	(5,63)
5 Dinas Ketahanan Pangan	708.154,18	849.785,02	(141.630,84)	(16,67)
6 Dinas Perhubungan	9.941.957,34	4.970.978,67	4.970.978,67	100,00
7 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.045.735,55	13.231.295,82	(9.185.560,27)	(69,42)
8 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.846.978,96	8.571.667,60	(2.724.688,64)	(31,79)
9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.697.405,12	10.384.588,46	(1.687.183,34)	(16,25)
10 Sekretariat Daerah	-	53.437.500,00	(53.437.500,00)	(100,00)
11 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	1.065.000,00	(1.065.000,00)	(100,00)
12 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	105.739.200,56	215.901.540,71	(110.162.340,15)	(51,02)
13 Badan Penghubung	130.729,15	1.568.750,00	(1.438.020,85)	(91,67)
Jumlah	5.230.655.545,53	4.584.766.346,68	645.889.198,85	14,09



5.4.2.1.7.8 Beban Penyusutan Properti Investasi

Rp459.569.070,19

Beban Penyusutan Properti Investasi terealisasi sebesar Rp459.569.070,19, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp38.297.422,53 mengalami **kenaikan** sebesar Rp421.271.647,66 atau 1.100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	455.461.160,19	37.955.096,69	417.506.063,50	1.100,00
2 Beban Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.502.000,00	342.325,84	1.159.674,16	338,76
3 Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Air	2.605.910,00	-	2.605.910,00	100,00
Jumlah	459.569.070,19	38.297.422,53	421.271.647,66	1.100,00

Realisasi Beban Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp459.569.070,19 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	21.165.759.047,51
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	20.706.189.977,32
Beban Daerah	459.569.070,19

5.4.2.1.7.8.1 Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan

Rp455.461.160,19

Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp455.461.160,19, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37.955.096,69 mengalami **kenaikan** sebesar Rp417.506.063,50 atau 1.100,00% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Sosial	324.000,00	27.000,00	297.000,00	1.100,00
2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	252.159.428,83	21.013.285,72	231.146.143,11	1.100,00
3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.288.437,36	357.369,78	3.931.067,58	1.100,00
4 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.260.000,00	355.000,00	3.905.000,00	1.100,00
5 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	194.429.294,00	16.202.441,19	178.226.852,81	1.100,00
Jumlah	455.461.160,19	37.955.096,69	417.506.063,50	1.100,00

5.4.2.1.7.8.2 Beban Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti

Rp1.502.000,00

Beban Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti terealisasi sebesar Rp1.502.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp342.325,84 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.159.674,16 atau 338,76% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.502.000,00	342.325,84	1.159.674,16	338,76
Jumlah	1.502.000,00	342.325,84	1.159.674,16	338,76

5.4.2.1.7.8.3 Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Air

Rp 2.605.910,00

Beban Penyusutan Properti Investasi Bangunan Air terealisasi sebesar Rp 2.605.910,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.605.910,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.605.910,00	-	2.605.910,00	100,00
Jumlah	2.605.910,00	-	2.605.910,00	100,00

5.4.2.2 BEBAN TRANSFER

Rp6.638.440.489.072,00

Beban Transfer terealisasi sebesar Rp6.638.440.489.072,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.551.437.854.054,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.912.997.364.982,00) atau



(30,50%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Bagi Hasil	4.084.034.975.804,00	464.771.347.637,00	415.325.328.506,00	4.133.480.994.935,00	6.526.031.425.930,00	(2.392.550.430.995,00)	(36,66)
2 Beban Bantuan Keuangan	2.504.959.494.137,00	-	-	2.504.959.494.137,00	3.025.406.428.124,00	(520.446.933.987,00)	(17,20)
Jumlah	6.588.994.469.941,00	464.771.347.637,00	415.325.328.506,00	6.638.440.489.072,00	9.551.437.854.054,00	(2.912.997.364.982,00)	(30,50)

Realisasi Beban Transfer sebesar Rp6.638.428.089.072,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD) 6.588.994.469.941,00
Total Belanja Daerah 6.588.994.469.941,00

Penambahan

Saldo Akhir Utang 464.771.347.637,00
Total Penambahan 464.771.347.637,00

Pengurangan

Saldo Awal Utang 415.325.328.506,00
Total Pengurangan 415.325.328.506,00
Beban Daerah 6.638.440.489.072,00

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil Rp4.133.480.994.935,00

Beban Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp4.133.480.994.935,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.526.031.425.930,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.392.550.430.995,00) atau (36,66%) dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.084.034.975.804,00	464.771.347.637,00	415.325.328.506,00	4.133.480.994.935,00	6.526.031.425.930,00	(2.392.550.430.995,00)	(36,66)
Jumlah	4.084.034.975.804,00	464.771.347.637,00	415.325.328.506,00	4.133.480.994.935,00	6.526.031.425.930,00	(2.392.550.430.995,00)	(36,66)

5.4.2.2.1.1 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Rp4.133.480.994.935,00

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa terealisasi sebesar Rp4.133.480.994.935,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.526.031.425.930,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.392.550.430.995,00) atau (36,66%) dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Kabupaten Semarang	125.439.229.708,00	15.379.183.838,00	13.284.383.848,00	127.534.029.698,00	210.763.972.917,00	(83.229.943.219,00)	(39,49)
2 Kabupaten Kendal	121.404.561.134,00	13.969.780.713,00	13.118.005.707,00	122.256.336.140,00	189.294.893.425,00	(67.038.557.285,00)	(35,41)
3 Kabupaten Demak	131.270.431.705,00	15.139.227.536,00	13.356.404.423,00	133.053.254.818,00	209.885.134.247,00	(76.831.879.429,00)	(36,61)
4 Kabupaten Grobogan	141.766.230.648,00	15.149.770.687,00	12.880.399.943,00	144.035.601.392,00	215.300.845.891,00	(71.265.244.499,00)	(33,10)
5 Kabupaten Pati	146.078.507.181,00	16.926.468.033,00	16.451.751.196,00	146.553.224.018,00	241.903.342.970,00	(95.350.118.952,00)	(39,42)
6 Kabupaten Kudus	112.599.774.237,00	13.724.169.201,00	12.667.990.191,00	113.655.953.247,00	183.926.630.681,00	(70.270.677.434,00)	(38,21)



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Catatan atas Laporan Keuangan-LO
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
7	Kabupaten Jepara	130.663.957.384,00	15.175.811.334,00	14.163.777.208,00	131.675.991.510,00	207.604.430.035,00	(75.928.438.525,00)	(36,57)
8	Kabupaten Rembang	69.900.355.806,00	8.106.050.709,00	8.613.841.673,00	69.392.564.842,00	130.201.921.661,00	(60.809.356.819,00)	(46,70)
9	Kabupaten Blora	93.149.509.713,00	9.106.068.256,00	8.394.489.424,00	93.861.088.545,00	140.092.446.495,00	(46.231.357.950,00)	(33,00)
10	Kabupaten Pekalongan	102.273.558.003,00	10.252.326.660,00	8.433.061.835,00	104.092.822.828,00	148.871.957.058,00	(44.779.134.230,00)	(30,08)
11	Kabupaten Batang	93.835.829.426,00	9.696.466.639,00	9.277.853.350,00	94.254.442.715,00	143.887.415.815,00	(49.632.973.100,00)	(34,49)
12	Kabupaten Pemalang	135.550.547.295,00	14.029.597.205,00	11.807.936.241,00	137.772.208.259,00	198.012.525.544,00	(60.240.317.285,00)	(30,42)
13	Kabupaten Tegal	154.873.323.614,00	16.315.489.447,00	14.798.408.069,00	156.390.404.992,00	233.464.096.475,00	(77.073.691.483,00)	(33,01)
14	Kabupaten Brebek	173.208.138.520,00	17.144.255.410,00	16.125.644.657,00	174.226.749.273,00	255.925.866.307,00	(81.699.117.034,00)	(31,92)
15	Kabupaten Banyumas	173.630.003.883,00	19.859.482.073,00	16.886.079.712,00	176.603.406.244,00	275.034.488.051,00	(98.431.081.807,00)	(35,79)
16	Kabupaten Cilacap	185.205.155.241,00	20.635.689.527,00	17.909.368.547,00	187.931.476.221,00	282.729.043.101,00	(94.797.566.880,00)	(33,53)
17	Kabupaten Purbalingga	99.411.763.040,00	9.718.765.985,00	7.751.364.405,00	101.379.164.620,00	141.195.086.825,00	(39.815.922.205,00)	(28,20)
18	Kabupaten Banjarnegara	100.137.723.482,00	9.627.892.693,00	8.396.532.072,00	101.369.084.103,00	146.949.392.798,00	(45.580.308.695,00)	(31,02)
19	Kabupaten Magelang	129.910.254.195,00	13.867.213.390,00	11.453.643.762,00	132.323.823.823,00	203.037.753.051,00	(70.713.929.228,00)	(34,83)
20	Kabupaten Temanggung	84.221.871.572,00	7.991.949.073,00	6.862.854.722,00	85.350.965.923,00	128.233.975.605,00	(42.883.009.682,00)	(33,44)
21	Kabupaten Wonosobo	86.873.498.177,00	8.073.002.693,00	6.167.940.036,00	88.778.560.834,00	127.338.478.751,00	(38.559.917.917,00)	(30,28)
22	Kabupaten Purworejo	85.869.941.637,00	8.289.669.402,00	7.767.172.625,00	86.392.438.414,00	127.566.564.036,00	(41.174.125.622,00)	(32,28)
23	Kabupaten Kebumen	129.339.182.267,00	12.910.973.094,00	10.733.320.624,00	131.516.834.737,00	186.502.188.362,00	(54.985.353.625,00)	(29,48)
24	Kabupaten Klaten	147.485.148.963,00	18.091.407.397,00	13.969.379.755,00	151.607.176.605,00	228.277.405.470,00	(76.670.228.865,00)	(33,59)
25	Kabupaten Boyolali	117.814.358.787,00	13.325.073.428,00	11.008.705.337,00	120.130.726.878,00	182.705.254.131,00	(62.574.527.253,00)	(34,25)
26	Kabupaten Sragen	118.614.664.580,00	14.605.789.509,00	9.805.958.239,00	123.414.495.850,00	194.293.570.706,00	(70.879.074.856,00)	(36,48)
27	Kabupaten Sukoharjo	120.472.202.465,00	14.998.603.721,00	14.000.104.048,00	121.470.702.138,00	201.121.846.808,00	(79.651.144.670,00)	(39,60)
28	Kabupaten Karanganyar	116.173.900.726,00	14.200.613.071,00	12.265.068.549,00	118.109.445.248,00	191.733.201.070,00	(73.623.755.822,00)	(38,40)
29	Kabupaten Wonogiri	103.830.489.599,00	10.731.336.625,00	7.867.799.025,00	106.694.027.199,00	156.759.314.757,00	(50.065.287.558,00)	(31,94)
30	Kota Semarang	279.028.263.571,00	47.282.524.945,00	51.353.262.468,00	274.957.526.048,00	596.391.777.148,00	(321.434.251.100,00)	(53,90)
31	Kota Pekalongan	51.343.814.084,00	4.766.838.546,00	4.402.647.632,00	51.708.004.998,00	76.554.632.898,00	(24.846.627.900,00)	(32,46)
32	Kota Surakarta	94.878.157.181,00	13.860.732.725,00	12.504.500.963,00	96.234.388.943,00	174.178.210.053,00	(77.943.821.110,00)	(44,75)
33	Kota Salatiga	44.234.941.060,00	4.288.594.469,00	4.416.374.330,00	44.107.161.199,00	70.784.030.283,00	(26.676.869.084,00)	(37,69)
34	Kota Tegal	49.199.377.241,00	4.693.456.092,00	4.348.816.029,00	49.544.017.304,00	73.598.590.184,00	(24.054.572.880,00)	(32,68)
35	Kota Magelang	34.346.309.679,00	2.837.073.511,00	2.080.487.861,00	35.102.895.329,00	51.911.142.321,00	(16.808.246.992,00)	(32,38)
	Jumlah	4.084.034.975.804,00	464.771.347.637,00	415.325.328.506,00	4.133.480.994.935,00	6.526.031.425.930,00	(2.392.550.430.995,00)	(36,66)

Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp4.133.468.594.935,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD) 4.084.034.975.804,00

Belanja Daerah (BLUD) -

Total Belanja Daerah

4.084.034.975.804,00

Penambahan

Saldo Akhir Utang 464.758.947.637,00

Total Penambahan

464.758.947.637,00

Pengurangan

Saldo Awal Utang 415.325.328.506,00

Total Pengurangan

415.325.328.506,00

Beban Daerah

4.133.468.594.935,00

A



5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan

Rp2.504.959.494.137,00

Beban Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp2.504.959.494.137,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.025.406.428.124,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp520.446.933.987,00) atau (17,20%) dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
2 Beban Bantuan Keuangan antar Daerah	-	-	-	-	-	-	-
3 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	542.528.545.137,00	-	-	542.528.545.137,00	1.045.686.246.124,00	(503.157.700.987,00)	(48,12)
4 Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
5 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.962.430.949.000,00	-	-	1.962.430.949.000,00	1.979.720.182.000,00	(17.289.233.000,00)	(0,87)
Jumlah	2.504.959.494.137,00	-	-	2.504.959.494.137,00	3.025.406.428.124,00	(520.446.933.987,00)	(17,20)

5.4.2.2.2.1 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota

Rp542.528.545.137,00

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp542.528.545.137,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.045.686.246.124,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp503.157.700.987,00) atau (48,12%) dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Kabupaten Semarang	50.029.229.991,00	-	-	50.029.229.991,00	38.569.432.136,00	11.459.797.855,00	29,71
2 Kabupaten Kendal	4.934.830.000,00	-	-	4.934.830.000,00	20.498.405.846,00	(15.563.575.846,00)	(75,93)
3 Kabupaten Demak	63.882.866.717,00	-	-	63.882.866.717,00	46.206.818.600,00	17.676.048.117,00	38,25
4 Kabupaten Grobogan	11.100.304.000,00	-	-	11.100.304.000,00	24.234.190.000,00	(13.133.886.000,00)	(54,20)
5 Kabupaten Pati	18.402.017.743,00	-	-	18.402.017.743,00	28.670.690.373,00	(10.268.672.630,00)	(35,82)
6 Kabupaten Kudus	11.666.896.830,00	-	-	11.666.896.830,00	15.539.244.500,00	(3.872.347.670,00)	(24,92)
7 Kabupaten Jepara	20.500.231.781,00	-	-	20.500.231.781,00	45.392.524.634,00	(24.892.292.853,00)	(54,84)
8 Kabupaten Rembang	1.001.000.000,00	-	-	1.001.000.000,00	44.248.149.500,00	(43.247.149.500,00)	(97,74)
9 Kabupaten Blora	47.808.306.602,00	-	-	47.808.306.602,00	57.697.584.762,00	(9.889.278.160,00)	(17,14)
10 Kabupaten Pekalongan	9.961.067.613,00	-	-	9.961.067.613,00	38.476.758.851,00	(28.515.691.238,00)	(74,11)
11 Kabupaten Batang	8.079.315.297,00	-	-	8.079.315.297,00	6.096.409.000,00	1.982.906.297,00	32,53
12 Kabupaten Pemalang	981.000.000,00	-	-	981.000.000,00	19.042.046.340,00	(18.061.046.340,00)	(94,85)
13 Kabupaten Tegal	8.748.661.166,00	-	-	8.748.661.166,00	23.182.098.500,00	(14.433.437.334,00)	(62,26)
14 Kabupaten Brebes	15.521.928.196,00	-	-	15.521.928.196,00	55.449.287.170,00	(39.927.358.974,00)	(72,01)
15 Kabupaten Banyumas	9.184.200.885,00	-	-	9.184.200.885,00	21.590.289.925,00	(12.406.089.040,00)	(57,46)
16 Kabupaten Cilacap	15.758.217.008,00	-	-	15.758.217.008,00	17.658.621.000,00	(1.900.403.992,00)	(10,76)
17 Kabupaten Purbalingga	5.975.140.399,00	-	-	5.975.140.399,00	7.112.788.000,00	(1.137.647.601,00)	(15,99)
18 Kabupaten Banjarnegara	11.512.738.000,00	-	-	11.512.738.000,00	53.085.735.000,00	(41.572.997.000,00)	(78,31)
19 Kabupaten Magelang	5.283.063.000,00	-	-	5.283.063.000,00	37.894.514.652,00	(32.611.451.652,00)	(86,06)
20 Kabupaten Temanggung	14.685.167.062,00	-	-	14.685.167.062,00	59.521.364.000,00	(44.836.196.938,00)	(75,33)

A



		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
21	Kabupaten Wonosobo	47.086.515.200,00	-	-	47.086.515.200,00	57.545.230.500,00	(10.458.715.300,00)	(18,17)
22	Kabupaten Purworejo	14.596.049.800,00	-	-	14.596.049.800,00	22.978.010.200,00	(8.381.960.400,00)	(36,48)
23	Kabupaten Kebumen	28.396.934.262,00	-	-	28.396.934.262,00	86.528.970.500,00	(58.132.036.238,00)	(67,18)
24	Kabupaten Klaten	4.720.758.000,00	-	-	4.720.758.000,00	31.710.767.500,00	(26.990.009.500,00)	(85,11)
25	Kabupaten Boyolali	8.589.075.000,00	-	-	8.589.075.000,00	6.370.723.500,00	2.218.351.500,00	34,82
26	Kabupaten Sragen	20.999.968.000,00	-	-	20.999.968.000,00	18.197.132.500,00	2.802.835.500,00	15,40
27	Kabupaten Sukoharjo	2.664.740.000,00	-	-	2.664.740.000,00	17.983.398.000,00	(15.318.658.000,00)	(85,18)
28	Kabupaten Karanganyar	34.567.106.475,00	-	-	34.567.106.475,00	64.728.188.000,00	(30.161.081.525,00)	(46,60)
29	Kabupaten Wonogiri	5.955.700.000,00	-	-	5.955.700.000,00	26.695.463.000,00	(20.739.763.000,00)	(77,69)
30	Kota Semarang	14.564.933.339,00	-	-	14.564.933.339,00	8.966.172.320,00	5.598.761.019,00	62,44
31	Kota Pekalongan	3.879.249.953,00	-	-	3.879.249.953,00	20.387.693.500,00	(16.508.443.547,00)	(80,97)
32	Kota Surakarta	4.193.620.000,00	-	-	4.193.620.000,00	3.432.607.500,00	761.012.500,00	22,17
33	Kota Salatiga	10.068.663.000,00	-	-	10.068.663.000,00	9.659.516.350,00	409.146.650,00	4,24
34	Kota Tegal	946.500.000,00	-	-	946.500.000,00	6.730.666.465,00	(5.784.166.465,00)	(85,94)
35	Kota Magelang	6.282.549.818,00	-	-	6.282.549.818,00	3.604.753.500,00	2.677.796.318,00	74,29
	Jumlah	542.528.545.137,00	-	-	542.528.545.137,00	1.045.686.246.124,00	(503.157.700.987,00)	(48,12)

5.4.2.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota kepada Desa

Rp1.962.430.949.000,00

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp1.962.430.949.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.979.720.182.000,00, mengalami **penurunan** sebesar (Rp17.289.233.000,00) atau (0,87%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Kabupaten Semarang	34.723.500.000,00	-	-	34.723.500.000,00	37.180.000.000,00	(2.456.500.000,00)	(6,61)
2	Kabupaten Kendal	89.417.500.000,00	-	-	89.417.500.000,00	73.720.000.000,00	15.697.500.000,00	21,29
3	Kabupaten Demak	54.657.500.000,00	-	-	54.657.500.000,00	55.058.750.000,00	(401.250.000,00)	(0,73)
4	Kabupaten Grobogan	110.580.000.000,00	-	-	110.580.000.000,00	140.331.378.000,00	(29.751.378.000,00)	(21,20)
5	Kabupaten Pati	202.676.500.000,00	-	-	202.676.500.000,00	180.349.330.000,00	22.327.170.000,00	12,38
6	Kabupaten Kudus	23.317.949.000,00	-	-	23.317.949.000,00	15.980.000.000,00	7.337.949.000,00	45,92
7	Kabupaten Jepara	60.150.000.000,00	-	-	60.150.000.000,00	62.825.000.000,00	(2.675.000.000,00)	(4,26)
8	Kabupaten Rembang	31.017.500.000,00	-	-	31.017.500.000,00	27.327.500.000,00	3.690.000.000,00	13,50
9	Kabupaten Blora	94.131.000.000,00	-	-	94.131.000.000,00	82.083.000.000,00	12.048.000.000,00	14,68
10	Kabupaten Pekalongan	31.031.500.000,00	-	-	31.031.500.000,00	40.882.300.000,00	(9.850.800.000,00)	(24,10)
11	Kabupaten Batang	61.497.500.000,00	-	-	61.497.500.000,00	46.335.000.000,00	15.162.500.000,00	32,72
12	Kabupaten Pemalang	106.825.000.000,00	-	-	106.825.000.000,00	83.867.250.000,00	22.957.750.000,00	27,37
13	Kabupaten Tegal	51.740.000.000,00	-	-	51.740.000.000,00	51.105.000.000,00	635.000.000,00	1,24
14	Kabupaten Brebes	111.322.500.000,00	-	-	111.322.500.000,00	106.057.500.000,00	5.265.000.000,00	4,96
15	Kabupaten Banyumas	58.686.500.000,00	-	-	58.686.500.000,00	74.082.500.000,00	(15.396.000.000,00)	(20,78)
16	Kabupaten Cilacap	43.264.000.000,00	-	-	43.264.000.000,00	48.992.500.000,00	(5.728.500.000,00)	(11,69)
17	Kabupaten Purbalingga	47.214.500.000,00	-	-	47.214.500.000,00	52.868.750.000,00	(5.654.250.000,00)	(10,69)
18	Kabupaten Banjarnegara	45.170.000.000,00	-	-	45.170.000.000,00	55.307.000.000,00	(10.137.000.000,00)	(18,33)
19	Kabupaten Magelang	117.698.000.000,00	-	-	117.698.000.000,00	95.985.345.000,00	21.712.655.000,00	22,62
20	Kabupaten Temanggung	55.222.500.000,00	-	-	55.222.500.000,00	52.180.000.000,00	3.042.500.000,00	5,83
21	Kabupaten Wonosobo	73.774.000.000,00	-	-	73.774.000.000,00	94.566.250.000,00	(20.792.250.000,00)	(21,99)
22	Kabupaten Purworejo	40.577.500.000,00	-	-	40.577.500.000,00	35.935.751.000,00	4.641.749.000,00	12,92



		LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
23	Kabupaten Kebumen	45.691.500.000,00	-	-	45.691.500.000,00	47.327.500.000,00	(1.636.000.000,00)	(3,46)
24	Kabupaten Klaten	95.070.000.000,00	-	-	95.070.000.000,00	104.925.000.000,00	(9.855.000.000,00)	(9,39)
25	Kabupaten Boyolali	33.517.000.000,00	-	-	33.517.000.000,00	20.855.000.000,00	12.662.000.000,00	60,71
26	Kabupaten Sragen	42.452.500.000,00	-	-	42.452.500.000,00	51.103.750.000,00	(8.651.250.000,00)	(16,93)
27	Kabupaten Sukoharjo	47.642.500.000,00	-	-	47.642.500.000,00	69.680.000.000,00	(22.037.500.000,00)	(31,63)
28	Kabupaten Karanganyar	108.522.500.000,00	-	-	108.522.500.000,00	127.715.578.000,00	(19.193.078.000,00)	(15,03)
29	Kabupaten Wonogiri	44.840.000.000,00	-	-	44.840.000.000,00	45.093.250.000,00	(253.250.000,00)	(0,56)
	Jumlah	1.962.430.949.000,00	-	-	1.962.430.949.000,00	1.979.720.182.000,00	(17.289.233.000,00)	(0,87)

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (Rp6.387.465.015,26)

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terealisasi sebesar (Rp6.387.465.015,26) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp64.047.771.553,77) mengalami **kenaikan** sebesar Rp57.660.306.538,52 atau 90,03% dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Surplus Non Operasional	3.741.730.029,52	149.081.468.027,08	(145.339.737.997,55)	(97,49)
2 Defisit Non Operasional	10.129.195.044,78	213.129.239.580,85	(203.000.044.536,07)	(95,25)
Jumlah	(6.387.465.015,26)	(64.047.771.553,77)	57.660.306.538,52	(90,03)

Realisasi Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar (Rp6.387.465.015,26) dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan

Penyisihan Piutang Awal	24.510.547.173,17
Koreksi Penyisihan Piutang	927.563.224,87
Penjualan Aset Lainnya	(115.049.420.687,00)
Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	(4.903.768.725,32)
Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	22.398.814.323,13
Total Penambahan	(72.116.264.691,15)

Pengurangan

Penyisihan Piutang Akhir	16.938.232.487,38
Koreksi Penyisihan Piutang	538.831.840,87
Penyisihan Piutang yang dihapuskan dan kadaluarsa	6.848.911.148,00
Penjualan Aset Lainnya	(105.075.194.055,28)
Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	19.769.219.215,40
Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	(4.748.800.312,26)
Total Pengurangan	(65.728.799.675,89)
Beban Daerah	(6.387.465.015,26)

5.4.3.1 SURPLUS NON OPERASIONAL Rp3.741.730.029,52

Surplus Non Operasional terealisasi sebesar Rp3.741.730.029,52, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp149.081.468.027,08 mengalami **kenaikan** sebesar (Rp145.339.737.997,55) atau (97,49%) dengan rincian sebagai berikut:



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	3.741.730.029,52	149.081.468.027,08	(145.339.737.997,55)	(97,49)
Jumlah	3.741.730.029,52	149.081.468.027,08	(145.339.737.997,55)	(97,49)

Realisasi Surplus Non Operasional sebesar Rp3.741.730.029,52, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan

Penyisihan Piutang Awal	24.510.547.173,17
Koreksi Penyisihan Piutang	927.563.224,87
Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	22.398.814.323,13
Total Penambahan	47.836.924.721,17

Pengurangan

Penyisihan Piutang Akhir	16.938.232.487,38
Koreksi Kurang Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	538.831.840,87
Penyisihan Piutang yang dihapuskan dan kadaluarsa	6.848.911.148,00
Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	19.769.219.215,40
Total Pengurangan	44.095.194.691,65
Beban Daerah	3.741.730.029,52

5.4.3.1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya – LO **Rp3.741.730.029,52**

Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp3.741.730.029,52, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp149.081.468.027,08 mengalami **kenaikan** sebesar (Rp145.339.737.997,55) atau (97,49%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	3.741.730.029,52	149.081.468.027,08	(145.339.737.997,55)	(97,49)
Jumlah	3.741.730.029,52	149.081.468.027,08	(145.339.737.997,55)	(97,49)

Realisasi Surplus dari kegiatan Non Operasional lainnya-LO sebesar Rp3.741.730.029,52, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan

Penyisihan Piutang Awal	24.510.547.173,17
Koreksi Penyisihan Piutang	927.563.224,87
Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	22.398.814.323,13
Total Penambahan	47.836.924.721,17

Pengurangan

Penyisihan Piutang Akhir	16.938.232.487,38
Koreksi Penyisihan Piutang	538.831.840,87
Penyisihan Piutang yang dihapuskan dan kadaluarsa	6.848.911.148,00
Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	19.769.219.215,40
Total Pengurangan	44.095.194.691,65
Beban Daerah	3.741.730.029,52



5.4.3.1.1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO

Rp3.741.730.029,52

Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp3.741.730.029,52, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp149.081.468.027,08 mengalami **kenaikan** sebesar (Rp 145.339.737.997,55) atau (97,49%) dengan rincian sebagai berikut:

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	93.976.869,01	(93.976.869,01)	(100,00)
2 Dinas Kesehatan	41.051.064,33	-	41.051.064,33	100,00
3 RSUD Dr. Moewardi	761.298.085,07	1.810.484,01	759.487.601,06	41.949,42
4 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.166.033,43	-	1.166.033,43	100,00
5 RSUD dr. Rehatta	7.674.651,98	1.188.479,39	6.486.172,59	545,75
6 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	5.291,00	-	5.291,00	100,00
7 RSUD dr. Arif Zainuddin	23.391,50	936.403.884,26	(936.380.492,76)	(100,00)
8 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	20.547,95	(20.547,95)	(100,00)
9 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	145.704,65	10.033,75	135.670,90	1.352,15
10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.575.755,00	-	2.575.755,00	100,00
11 Dinas Ketahanan Pangan	100.000,00	-	100.000,00	100,00
12 Dinas Perhubungan	1.566.920.854,46	-	1.566.920.854,46	100,00
13 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	92.809.368,33	-	92.809.368,33	100,00
14 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	926.484.471,61	-	926.484.471,61	100,00
15 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	243.378.407,16	1.247.627.232,50	(1.004.248.825,36)	(80,49)
16 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	98.096.951,00	146.800.430.496,21	(146.702.333.545,21)	(99,93)
Jumlah	3.741.730.029,52	149.081.468.027,08	(145.339.737.997,55)	(97,49)

5.4.3.2 DEFISIT NON OPERASIONAL

Rp10.129.195.044,78

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp10.129.195.044,78 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp213.129.239.580,85 mengalami **penurunan** sebesar (Rp.203.000.044.536,07) atau (95,25%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	9.974.226.631,72	5.085.523.970,88	4.888.702.660,84	96,13
2 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	154.968.413,06	208.043.715.609,97	(207.888.747.196,91)	(99,93)
Jumlah	10.129.195.044,78	213.129.239.580,85	(203.000.044.536,07)	(95,25)

Defisit Non Operasional sebesar Rp10.129.195.044,78 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan

Penjualan Aset Lainnya 115.049.420.687,00

Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap 4.903.768.725,32

Total Penambahan 119.953.189.412,32

Pengurangan

Penjualan Aset Lainnya 105.075.194.055,28

Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap 4.748.800.312,26

Total Pengurangan 109.823.994.367,54

Beban Daerah 10.129.195.044,78

5.4.3.2.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO

Rp9.974.226.631,72

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO terealisasi sebesar Rp9.974.226.631,72 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.085.523.970,88 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.888.702.660,84 atau 96,13% dengan rincian sebagai berikut :



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	9.974.226.631,72	2.360.523.970,88	7.613.702.660,84	322,54
2 Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	2.725.000.000,00	(2.725.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	9.974.226.631,72	5.085.523.970,88	4.888.702.660,84	96,13

5.4.3.2.1.1 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO **Rp9.974.226.631,72**

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO terealisasi sebesar Rp9.974.226.631,72 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.360.523.970,88 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.613.702.660,84 atau 322,54% dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.329.659.887,84	470.054.749,74	859.605.138,10	182,87
2 Dinas Kesehatan	13.290.596,66	-	13.290.596,66	100,00
3 RSUD Dr. Moewardi	226.309.590,00	194.892.078,33	31.417.511,67	16,12
4 RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	358.263.622,08	-	358.263.622,08	100,00
5 RSUD dr. Adyatma, MPH	153.961.907,92	268.718.992,67	(114.757.084,75)	(42,71)
6 RSUD dr. Rehatta	-	24.744.250,00	(24.744.250,00)	(100,00)
7 RSJD Dr. Amino Gondohutomo	644.309.262,87	-	644.309.262,87	100,00
8 RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	4.222.356,79	(4.222.356,79)	(100,00)
9 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	357.975.348,33	4.019.166,67	353.956.181,66	8.806,71
10 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	20.411.000,00	-	20.411.000,00	100,00
11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.536.000,00	-	3.536.000,00	100,00
12 Dinas Sosial	389.962.742,98	-	389.962.742,98	100,00
13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.314.666,67	-	1.314.666,67	100,00
14 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	75.000,00	-	75.000,00	100,00
15 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.185.366.472,04	-	1.185.366.472,04	100,00
16 Dinas Perhubungan	-	452.296.882,97	(452.296.882,97)	(100,00)
17 Dinas Pertanian dan Perkebunan	197.677.358,33	-	197.677.358,33	100,00
18 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.176.322.711,24	577.552.140,00	1.598.770.571,24	276,82
19 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.876.247.052,98	3.576.152,71	1.872.670.900,27	52.365,52
20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan	190.505.261,47	-	190.505.261,47	100,00
21 Sekretariat Daerah	34.223.375,00	329.531.250,00	(295.307.875,00)	(89,61)
22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	166.666,67	-	166.666,67	100,00
23 Badan Pengelola Pendapatan Daerah	32.500,00	-	32.500,00	100,00
24 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	233.612.369,79	-	233.612.369,79	100,00
25 Badan Pengelola Sumber Daya Manusia	284.604.800,00	-	284.604.800,00	100,00
26 Badan Perhubungan	296.398.438,85	30.915.951,00	265.482.487,85	858,72
Jumlah	9.974.226.631,72	2.360.523.970,88	7.613.702.660,84	322,54

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp9.974.226.631,72 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan

Penjualan Aset Lainnya	115.049.420.687,00	
Total Penambahan		115.049.420.687,00

Pengurangan

Penjualan Aset Lainnya	105.075.194.055,28	
Total Pengurangan		105.075.194.055,28
Beban Daerah		9.974.226.631,72

5.4.3.2.1.2 Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO **Rp0,00**

Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.725.000.000,00 sehingga mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.725.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :



	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	2.725.000.000	(2.725.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	-	2.725.000.000,00	(2.725.000.000,00)	(100,00)

5.4.3.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO **Rp154.968.413,06**

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp154.968.413,06, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp208.043.715.609,97 mengalami **penurunan** sebesar (Rp.207.888.747.196,91) atau (99,93%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya – LO	154.968.413,06	208.043.715.609,97	(207.888.747.196,91)	(99,93)
Jumlah	154.968.413,06	208.043.715.609,97	(207.888.747.196,91)	(99,93)

5.4.3.2.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO **Rp154.968.413,06**

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp154.968.413,06 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp208.043.715.609,97 mengalami **kenaikan** sebesar (Rp.207.888.747.196,91) atau (99,93%) dengan rincian sebagai berikut :

	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	93.982.975,92	14.000.000,00	79.982.975,92	571,31
2 Dinas Sosial	292.835,47	-	292.835,47	100,00
3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	54.919.560,00	7.352.898,66	47.566.661,34	646,91
4 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	1.009.260,00	(1.009.260,00)	(100,00)
5 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	208.021.353.451,31	(208.021.353.451,31)	(100,00)
6 Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.773.041,67	-	5.773.041,67	100,00
Jumlah	154.968.413,06	208.043.715.609,97	(207.888.747.196,91)	(99,93)

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya-LO sebesar Rp154.968.413,06 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan

Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap 4.903.768.725,32

Total Penambahan 4.903.768.725,32

Pengurangan

Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap 4.748.800.312,26

Total Pengurangan 4.748.800.312,26

Beban Daerah 154.968.413,06

5.4.4 POS LUAR BIASA **(Rp7.192.800.000,00)**

Pos Luar Biasa terealisasi sebesar (Rp7.192.800.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp10.225.800.500,00) mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.033.000.500,00) atau (29,66%) dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-
2 Beban Luar Biasa	(7.192.800.000,00)	-	-	(7.192.800.000,00)	(10.225.800.500,00)	(3.033.000.500,00)	(29,66)
Jumlah	(7.192.800.000,00)	-	-	(7.192.800.000,00)	(10.225.800.500,00)	(3.033.000.500,00)	(29,66)



5.4.4.1 BEBAN LUAR BIASA

Rp7.192.800.000,00

Beban Luar Biasa bersumber dari Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp7.192.800.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.225.800.500,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.033.000.500,00) atau (29,66%) dengan rincian sebagai berikut:

	LRA 2025 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Tak Terduga	7.192.800.000,00	-	-	7.192.800.000,00	10.225.800.500,00	(3.033.000.500,00)	(29,66)
Jumlah	7.192.800.000,00	-	-	7.192.800.000,00	10.225.800.500,00	(3.033.000.500,00)	(29,66)



5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2025 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2025.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Rp1.683.803.928.145,00

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.683.803.928.145,00, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Arus Masuk Kas	23.760.083.381.402,00	26.376.642.368.402,00
2.	Arus Keluar Kas	22.076.279.453.257,00	25.454.042.400.809,00
Jumlah		1.683.803.928.145,00	922.599.967.593,00

5.5.1.1. Arus Masuk Kas

Rp23.760.083.381.402,00

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp23.760.083.381.402,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp26.376.642.368.402,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	11.438.451.030.063,00	14.210.241.533.541,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.673.385.019.574,00	2.318.821.514.818,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	546.657.345.508,00	687.813.166.201,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	312.752.886.716,00	431.983.440.927,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak	973.009.523.700,00	889.020.058.000,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.498.424.000,00	7.212.510.000,00
7	Dana Alokasi Umum	3.978.828.515.369,00	3.819.010.791.028,00
8	Dana Alokasi Khusus	3.661.591.213.439,00	3.948.197.939.767,00
9	Insentif Fiskal	8.436.080.000,00	37.997.568.000,00
10	Pendapatan Hibah	25.505.460.000,00	25.600.169.638,00
11	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	137.967.883.033,00	743.676.482,00
Jumlah		23.760.083.381.402,00	26.376.642.368.402,00

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi tahun 2025 sebesar Rp23.760.083.381.402,00 sedangkan total pada LRA tahun 2025 (5.1.1) sebesar Rp23.761.968.977.877,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp1.885.596.475,00. Perbedaan tersebut terjadi karena pada total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi tidak termasuk pendapatan yang termasuk dalam arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp1.885.596.475,00 (5.5.2.1).



5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Rp11.438.451.030.063,00

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp11.438.451.030.063,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp14.210.241.533.541,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	3.960.139.868.900,00	5.474.932.909.600,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.741.611.744.500,00	3.068.323.586.500,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.690.646.253.813,00	2.693.880.376.743,00
4	Pajak Air Permukaan	20.925.885.996,00	18.993.373.282,00
5	Pajak Rokok	3.001.754.723.736,00	2.954.059.323.916,00
6	Pajak Alat Berat (PAB)	134.045.500,00	51.963.500,00
7	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	23.238.507.618,00	-
Jumlah		11.438.451.030.063,00	14.210.241.533.541,00

5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Rp2.673.385.019.574,00

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.673.385.019.574,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp2.318.821.514.818,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.559.393.583.760,00	2.217.602.631.575,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	-	2.051.144.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	50.284.681.535,00
4	Retribusi Tempat Pelelangan	-	92.042.000,00
5	Retribusi Terminal	-	315.420.000,00
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	5.160.417.195,00
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	9.154.865.000,00	7.927.263.000,00
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	11.368.920.000,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	-	2.266.141.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	15.346.487.178,00
11	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	10.723.607.278,00	-
12	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan	12.662.500,00	-
13	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	6.026.009.500,00	-
14	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	11.855.310.000,00	-
15	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	5.113.405.700,00	-
16	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	16.047.506.362,00	-
17	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	46.959.047.398,00	-
18	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	8.099.022.076,00	6.406.367.335,00
Jumlah		2.673.385.019.574,00	2.318.821.514.818,00



5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan **Rp546.657.345.508,00**

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp546.657.345.508,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2024 sebesar Rp687.813.166.201,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bagian Laba PT Jateng Agro Berdikari	4.712.725.152,00	1.668.816.220,00
2	Bagian Laba PT BPD Jateng	417.903.370.127,00	550.244.937.092,00
3	Bagian Laba PT BPR BKK (PERSERODA) Se-Jawa Tengah	58.679.974.552,00	70.945.400.423,00
4	Bagian Laba PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	10.340.882.136,00	7.444.261.200,00
5	Bagian Laba PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	12.334.438.119,00	10.715.302.586,00
6	Bagian Laba PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	-	1.839.800.755,00
7	Bagian Laba PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	5.788.118.477,00	3.878.979.438,00
8	Bagian Laba PT Jamkrida	8.206.599.101,00	6.978.397.022,00
9	Bagian Laba PT Jateng Petro Energi	28.691.237.844,00	34.097.271.465,00
Jumlah		546.657.345.508,00	687.813.166.201,00

5.5.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah **Rp312.752.886.716,00**

Arus Masuk Kas dari Lain-Lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp312.752.886.716,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2024 sebesar Rp431.983.440.927,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	15.238.790,00	411.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.502.314.827,00	2.531.327.437,00
3	Hasil Kerja Sama Daerah	572.000,00	-
4	Penerimaan Jasa Giro	13.723.294.067,00	18.876.876.300,00
5	Penerimaan Bunga	14.374.219.008,00	32.911.785.082,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.700.000,00	1.800.000,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain	97.583.966.225,00	67.056.903.649,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.246.408.417,00	2.642.694.739,00
9	Pendapatan Denda Pajak	113.450.318.619,00	241.621.801.355,00
10	Pendapatan Denda Retribusi	42.955.007,00	62.417.887,00
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	474.991.000,00
12	Pendapatan dari Pengembalian	1.795.000,00	2.979.350.614,00
13	Pendapatan BLUD	65.780.604.756,00	62.793.535.998,00
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	2.545.866,00
15	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/kontrak	27.500.000,00	27.000.000,00
Jumlah		312.752.886.716,00	431.983.440.927,00

5.5.1.1.5. Dana Bagi Hasil Pajak **Rp973.009.523.700,00**

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp973.009.523.700,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2024 sebesar Rp889.020.058.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	43.534.435.100,00	42.401.279.000,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPND dan PPh Pasal 21	529.801.160.600,00	528.584.330.000,00
3	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	399.673.928.000,00	318.034.449.000,00
Jumlah		973.009.523.700,00	889.020.058.000,00

5.5.1.1.6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp3.498.424.000,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.498.424.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp7.212.510.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	2.234.862.000,00	3.875.740.000,00
2	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi (DR)	47.016.000,00	-
3	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	135.793.000,00	131.523.000,00
4	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	28.000,00	44.000,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	270.579.000,00	1.000.329.000,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	591.284.000,00	1.744.962.000,00
7	Bagi Hasil dari Panas Bumi	218.862.000,00	459.912.000,00
Jumlah		3.498.424.000,00	7.212.510.000,00

5.5.1.1.7. Dana Alokasi Umum Rp3.978.828.515.369,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.978.828.515.369,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp3.819.010.791.028,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	3.642.269.672.369,00	3.550.426.222.000,00
2	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	97.130.383.000,00	62.181.181.028,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	185.898.217.000,00	187.324.934.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	-	19.078.454.000,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	53.530.243.000,00	-
Jumlah		3.978.828.515.369,00	3.819.010.791.028,00

5.5.1.1.8. Dana Alokasi Khusus Rp3.661.591.213.439,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp3.661.591.213.439,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp3.948.197.939.767,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	142.445.000.400,00	473.940.472.839,00
-	DAK Bidang Pendidikan	68.857.015.403,00	264.965.344.449,00
-	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	-	14.939.649.372,00
-	DAK Bidang Pertanian	-	38.482.249.589,00
-	DAK Bidang Pariwisata	-	3.710.771.899,00



No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
-	DAK Bidang Kesehatan	15.555.919.997,00	40.866.296.330,00
-	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	-	12.845.424.770,00
-	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	-	4.203.097.231,00
-	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	-	34.887.433.699,00
-	DAK Bidang Air Minum	58.032.065.000,00	59.040.205.500,00
2	Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik	3.519.146.213.039,00	3.474.257.466.928,00
-	Tambahan Penghasilan Guru	1.138.845.000,00	11.793.826.000,00
-	Bantuan Operasional Sekolah	2.140.007.610.800,00	2.099.515.123.235,00
-	Tunjangan Profesi Guru – PNSD	1.345.412.496.530,00	1.310.275.195.439,00
-	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	23.823.159.267,00	33.834.592.742,00
-	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	-	10.343.179.000,00
-	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.930.299.748,00	2.850.000.000,00
-	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya	4.944.719.044,00	3.937.461.112,00
-	Fasilitasi Penanaman Modal	-	1.367.855.300,00
-	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	352.442.650,00	340.234.100,00
-	Ketahanan Pangan dan Pertanian	536.640.000,00	-
Jumlah		3.661.591.213.439,00	3.948.197.939.767,00

5.5.1.1.9. Insentif Fiskal

Rp8.436.080.000,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Insentif Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8.436.080.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp37.997.568.000,00.

5.5.1.1.10. Pendapatan Hibah

Rp25.505.460.000,00

Arus Masuk Kas berupa Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp25.505.460.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp25.600.169.638,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	25.505.460.000,00	25.593.372.000,00
2	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	6.797.638,00
Jumlah		25.505.460.000,00	25.600.169.638,00

5.5.1.1.11. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

Rp137.967.883.033,00

Arus Masuk Kas berupa Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp137.967.883.033,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp743.676.482,00.

5.5.1.2. Arus Keluar Kas

Rp22.076.279.453.257,00

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp22.076.279.453.257,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp25.454.042.400.809,00 dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Belanja Pegawai	7.060.692.834.988,00	7.023.084.524.845,00
2	Belanja Barang dan Jasa	6.306.083.040.496,00	6.234.228.358.506,00
3	Belanja Subsidi	12.291.564.636,00	1.399.999.100,00
4	Belanja Hibah	2.068.441.743.196,00	2.780.143.423.054,00
5	Belanja Bantuan Sosial	32.583.000.000,00	45.008.996.459,00
6	Belanja Tidak Terduga	7.192.800.000,00	10.225.800.500,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	4.084.034.975.804,00	6.334.544.870.221,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	2.504.959.494.137,00	3.025.406.428.124,00
Jumlah		22.076.279.453.257,00	25.454.042.400.809,00

5.5.1.2.1. Belanja Pegawai **Rp7.060.692.834.988,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.060.692.834.988,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp7.023.084.524.845,00.

5.5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa **Rp6.306.083.040.496,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp6.306.083.040.496,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp6.234.228.358.506,00.

5.5.1.2.3. Belanja Subsidi **Rp12.291.564.636,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Subsidi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp12.291.564.636,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp1.399.999.100,00.

5.5.1.2.4. Belanja Hibah **Rp2.068.441.743.196,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.068.441.743.196,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp2.780.143.423.054,00.

5.5.1.2.5. Belanja Bantuan Sosial **Rp32.583.000.000,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp32.583.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp45.008.996.459,00.

5.5.1.2.6. Belanja Tidak Terduga **Rp7.192.800.000,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.192.800.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp10.225.800.500,00.

5.5.1.2.7. Belanja Bagi Hasil **Rp4.084.034.975.804,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Bagi Hasil periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp4.084.034.975.804,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp6.334.544.870.221,00.



5.5.1.2.8. Belanja Bantuan Keuangan

Rp2.504.959.494.137,00

Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.504.959.494.137,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp3.025.406.428.124,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten /Kota	542.528.545.137,00	1.045.686.246.124,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	1.962.430.949.000,00	1.979.720.182.000,00
Jumlah		2.504.959.494.137,00	3.025.406.428.124,00

5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan

(Rp1.793.673.079.524,00)

Arus kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.793.673.079.524,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar (Rp1.731.006.838.977,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	1.885.596.475,00	2.077.258.017,00
2	Arus Keluar Kas	1.795.558.675.999,00	1.733.084.096.994,00
Jumlah		(1.793.673.079.524,00)	(1.731.006.838.977,00)

5.5.2.1. Arus Masuk Kas

Rp1.885.596.475,00

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.885.596.475,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp2.077.258.017,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.307.830.775,00	1.032.980.021,00
2	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	369.477.200,00	406.282.000,00
3	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	92.703.000,00	500.834.700,00
4	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	-	137.161.296,00
5	Pendapatan Penjualan atas Aset Lain-Lain	115.585.500,00	-
Jumlah		1.885.596.475,00	2.077.258.017,00

5.5.2.1.1. Penjualan Peralatan dan Mesin

Rp1.307.830.775,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.307.830.775,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp1.032.980.021,00.

5.5.2.1.2. Penjualan Gedung dan Bangunan

Rp369.477.200,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp369.477.200,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp406.282.000,00.



5.5.2.1.3. Penjualan Aset Tetap Lainnya

Rp92.703.000,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp92.703.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp500.834.700,00.

5.5.2.1.4. Penjualan Aset Lainnya

Rp0,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp137.161.296,00.

5.5.2.1.5. Penjualan Aset Lain-Lain

Rp115.585.500,00

Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp115.585.500,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.5.2.2. Arus Keluar Kas

Rp1.795.558.675.999,00

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.795.558.675.999,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp1.733.084.096.994,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Belanja Tanah	12.461.205.439,00	12.221.207.440,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	636.745.519.547,00	855.982.713.753,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	205.077.624.565,00	411.044.257.004,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	815.425.857.816,00	366.478.924.044,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	124.550.819.262,00	86.434.858.953,00
6.	Belanja Aset Lainnya	1.297.649.370,00	922.135.800,00
Jumlah		1.795.558.675.999,00	1.733.084.096.994,00

5.5.2.2.1. Belanja Tanah

Rp12.461.205.439,00

Arus Keluar Kas untuk Belanja Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp12.461.205.439,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp12.221.207.440,00.

5.5.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Rp636.745.519.547,00

Arus Keluar Kas untuk Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp636.745.519.547,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp855.982.713.753,00.

5.5.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Rp205.077.624.565,00

Arus Keluar Kas untuk Belanja Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp205.077.624.565,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp411.044.257.004,00.

5.5.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp815.425.857.816,00

Arus Keluar Kas untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp815.425.857.816,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp366.478.924.044,00.



5.5.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Rp124.550.819.262,00

Arus Keluar Kas untuk Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp124.550.819.262,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp86.434.858.953,00.

5.5.2.2.6. Belanja Aset Lainnya

Rp1.297.649.370,00

Arus Keluar Kas untuk Belanja Aset Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.297.649.370,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp922.135.800,00.

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

Rp98.096.951,00

Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp98.096.951,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp485.234.127.700,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	98.096.951,00	505.934.127.700,00
2	Arus Keluar Kas	-	20.700.000.000,00
Jumlah		98.096.951,00	485.234.127.700,00

5.5.3.1. Arus Masuk Kas

Rp98.096.951,00

Total Arus Masuk dari aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp98.096.951,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp505.934.127.700,00 terdiri dari:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	-	505.869.400.000,00
2	Penerimaan Kembali Pokok Piutang	98.096.951,00	64.727.700,00
Jumlah		98.096.951,00	505.934.127.700,00

5.5.3.1.1. Pencairan Dana Cadangan

Rp0,00

Arus Masuk Kas dari Pencairan dana cadangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 adalah Rp505.869.400.000,00.

5.5.3.1.2. Penerimaan Kembali Pokok Piutang

Rp98.096.951,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pinjaman Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp98.096.951,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp64.727.700,00 yang merupakan penerimaan atas pokok dana bergulir dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	9.500.000,00	-
2	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	8.500.000,00	6.950.000,00
3	Penerimaan Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan)	-	500.000,00
4	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	63.146.455,00	57.277.700,00
5	Penerimaan Dana Bergulir Gerakan Mapan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	2.000.000,00	-



No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
6	Penerimaan Pembayaran Dana Talangan Kabupaten Cilacap	14.950.496,00	-
Jumlah		98.096.951,00	64.727.700,00

5.5.3.2. Arus Keluar Kas

Rp0,00

Total Arus Keluar untuk aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp20.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	20.700.000.000,00
Jumlah		-	20.700.000.000,00

5.5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Rp0,00

Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp20.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)	-	20.700.000.000,00
Jumlah		-	20.700.000.000,00

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

Rp6.616.400,00

Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp6.616.400,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp147.526.130,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	824.429.575.414,00	837.302.066.409,00
2	Arus Keluar Kas	824.422.959.014,00	837.154.540.279,00
Jumlah		6.616.400,00	147.526.130,00

5.5.4.1. Arus Masuk Kas

Rp824.429.575.414,00

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp824.429.575.414,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp837.302.066.409,00 terdiri dari:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	824.281.764.914,00	836.950.837.427,00
2	Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	141.221.000,00	348.056.200,00
3	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	-	3.172.782,00
4	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	6.589.500,00	-
Jumlah		824.429.575.414,00	837.302.066.409,00



5.5.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga

Rp824.281.764.914,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp824.281.764.914,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp836.950.837.427,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pajak-pajak	451.873.654.551,00	479.185.649.791,00
2	IWP	152.150.211.014,00	159.500.116.108,00
3	BPJS	220.257.899.349,00	198.265.071.528,00
Jumlah		824.281.764.914,00	836.950.837.427,00

5.5.4.1.2. Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

Tahun Anggaran Sebelumnya

Rp141.221.000,00

Arus Masuk Kas dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp141.221.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp348.056.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.093.500,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	3.846.000,00
3	Dinas Perhubungan	106.366.000,00	307.695.800,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.983.000,00	18.159.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	12.135.900,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.778.500,00	6.219.500,00
Jumlah		141.221.000,00	348.056.200,00

5.5.4.1.3. Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun Anggaran Sebelumnya

Rp0,00

Arus Masuk Kas dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp3.172.782,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	3.172.782,00
Jumlah		-	3.172.782,00

5.5.4.1.4. Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah

Rp6.589.500,00

Koreksi saldo kas di Bendahara Sekolah pada tahun 2025 sebesar Rp6.589.500,00 dan untuk tahun 2024 sebesar Rp0,00, merupakan koreksi atas SiLPA tahun 2022 pada kas Bendahara Sekolah.

5.5.4.2. Arus Keluar Kas

Rp824.422.959.014,00

Total Arus Keluar dari Aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp824.422.959.014,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp837.154.540.279,00 dengan rincian sebagai berikut:



No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	824.281.764.914,00	836.950.837.427,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan	141.193.000,00	141.221.000,00
3	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	1.100,00	62.481.852,00
Jumlah		824.422.959.014,00	837.154.540.279,00

5.5.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) **Rp824.281.764.914,00**

Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp824.281.764.914,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp836.950.837.427,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pajak-pajak	451.873.654.551,00	479.185.649.791,00
2	IWP	152.150.211.014,00	159.500.116.108,00
3	BPJS	220.257.899.349,00	198.265.071.528,00
Jumlah		824.281.764.914,00	836.950.837.427,00

5.5.4.2.2. Kas di Bendahara Penerimaan-Tahun Berjalan **Rp141.193.000,00**

Arus Keluar Kas berupa kas di Bendahara Penerimaan - Tahun Berjalan yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum dipertanggungjawabkan dan disetor ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp141.193.000,00 dan untuk tahun 2024 sebesar Rp141.221.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.014.000,00	4.093.500,00
2	Dinas Kesehatan	12.675.000,00	-
3	Dinas Perhubungan	115.357.000,00	106.366.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.434.500,00	14.983.000,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.400.000,00	-
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	312.500,00	15.778.500,00
Jumlah		141.193.000,00	141.221.000,00

5.5.4.2.3. Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah **Rp1.100,00**

Koreksi saldo kas di Bendahara Sekolah pada tahun 2025 sebesar Rp1.100,00, merupakan koreksi atas SiLPA tahun 2024 pada kas Bendahara Sekolah dan untuk tahun 2024 sebesar Rp62.481.852,00.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Setara Kas **(Rp109.764.438.028,00)**

Kenaikan kas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar (Rp109.764.438.028,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2024 sebesar (Rp323.025.217.554,00) yang berasal dari:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	1.683.803.928.145,00	922.599.967.593,00
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(1.793.673.079.524,00)	(1.731.006.838.977,00)
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	98.096.951,00	485.234.127.700,00
4.	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	6.616.400,00	147.526.130,00
Jumlah		(109.764.438.028,00)	(323.025.217.554,00)



5.5.6. Saldo Akhir Kas

Rp467.045.535.400,00

Saldo Akhir Kas posisi per 31 Desember 2025 sebesar Rp467.045.535.400,00 sedangkan untuk tahun 2024 sebesar Rp576.809.973.428,00 yaitu jumlah dari saldo awal per 1 Januari 2025 ditambah kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun Anggaran 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Saldo Awal Kas BUD	130.694.126.408,00	275.800.966.203,00
2	Saldo Awal Kas BLUD	435.442.781.537,00	610.166.143.275,00
3	Saldo Awal Kas Dana BOS	3.218.476.872,00	5.903.585.397,00
4	Saldo Awal Kas Dana Lainnya	7.454.588.611,00	7.964.496.107,00
5	Kenaikan/Penurunan Kas	(109.764.438.028,00)	(323.025.217.554,00)
Jumlah		467.045.535.400,00	576.809.973.428,00

5.5.7. Saldo Akhir Kas

Rp479.270.048.280,93

Saldo Akhir Kas merupakan gabungan Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Sekolah dan Kas Lainnya pada posisi per 31 Desember 2025 sebesar Rp479.270.048.280,93 dan untuk tahun 2024 sebesar Rp587.530.474.411,09 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Kas Di Kas Daerah	28.219.099.330,00	130.694.126.408,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	214.503.000,00	141.221.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	585.782.732,00
4	Kas di BLUD	432.067.616.212,93	438.815.860.716,09
5	Kas Dana BOS	1.517.881.717,00	3.218.476.872,00
6	Kas Lainnya	17.250.948.021,00	14.075.006.683,00
Jumlah		479.270.048.280,93	587.530.474.411,09

Dari saldo akhir kas sebesar Rp479.270.048.280,93 tersebut, berupa SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp476.180.140.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp12.089.908.280,93 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)
1	Kas di Bendahara Penerimaan (Non SiLPA) - Uang Muka	73.310.000,00
2	Kas di BLUD (Non SiLPA) - Uang Titipan Pasien dan Uang Muka	3.252.913.096,93
3	Kas Dana BOS (Non SiLPA) - Utang Pajak Dana BOS	41.425.018,00
4	Kas Lainnya (Non SiLPA) - Utang Pajak Dana BOSDA/BOP	11.174.587,00
5	Kas Lainnya (Non SiLPA) - Kas Dana Usaha Mandiri	8.446.131.376,00
6	Kas Lainnya (Non SiLPA) - Utang Pajak Kas Dana Usaha Mandiri	134.800,00
7	Kas Lainnya (Non SiLPA) - Kas Dana Bantuan Pemerintah	258.231.003,00
8	Koreksi Kas BOS TA 2025	6.589.500,00
9	Koreksi Kas BOP TA 2025	(1.100,00)
Jumlah		12.089.908.280,93



5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Ekuitas Awal	39.704.505.567.071,59	40.503.023.207.483,67	(798.517.640.412,08)	(1,97)
2	Surplus/Defisit-LO	1.068.899.283.349,48	(909.509.506.457,97)	1.978.408.789.807,45	(217,52)
3	RK-PPKD	-	-	-	-
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	1.244.208.492.853,42	110.991.866.045,89	1.133.216.626.807,53	1.020,99
	Ekuitas Akhir	42.017.613.343.274,49	39.704.505.567.071,59	2.313.107.776.202,90	5,83

5.6.1 Ekuitas Awal

Rp39.704.505.567.071,59

Saldo ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp39.704.505.567.071,59 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.640.677.235.717,17	8.116.593.372.397,70	524.083.863.319,47	6,46
2	Dinas Kesehatan	367.739.690.324,63	452.184.726.785,90	(84.445.036.461,27)	(18,67)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.309.471.788.987,96	1.332.529.691.782,52	(23.057.902.794,56)	(1,73)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	971.963.381.341,43	844.874.301.449,65	127.089.079.891,78	15,04
5	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang	342.797.214.043,72	376.215.826.730,58	(33.418.612.686,86)	(8,88)
6	RSUD Dr. Rehatta Jepara	806.199.970.891,01	763.527.772.215,71	42.672.198.675,30	5,59
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	219.865.211.491,29	209.594.486.770,44	10.270.724.720,85	4,90
8	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	189.455.944.652,88	180.351.980.804,77	9.103.963.848,11	5,05
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	100.812.091.013,79	96.232.170.800,31	4.579.920.213,48	4,76
10	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	5.018.751.000.573,52	5.798.774.709.282,03	(780.023.708.708,51)	(13,45)
11	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.843.867.701.635,55	5.917.373.783.752,05	(73.506.082.116,50)	(1,24)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	27.919.956.443,68	27.447.242.807,87	472.713.635,81	1,72
13	Satuan Polisi Pamong Praja	17.812.093.071,33	17.577.293.427,55	234.799.643,78	1,34
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.549.604.880,16	16.993.894.995,80	555.709.884,36	3,27
15	Dinas Sosial	259.526.923.100,12	243.023.880.407,56	16.503.042.692,56	6,79
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.807.880.324,59	17.809.296.736,50	5.998.583.588,09	33,68
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	128.141.267.272,87	133.716.134.959,62	(5.574.867.686,75)	(4,17)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.995.300.451,53	11.487.228.286,90	508.072.164,63	4,42
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	187.745.237.708,70	184.333.819.091,16	3.411.418.617,54	1,85
20	Dinas Ketahanan Pangan	22.307.437.706,13	22.244.674.211,56	62.763.494,57	0,28



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Capil	15.896.654.756,98	16.082.006.480,45	(185.351.723,47)	(1,15)
22	Dinas Perhubungan	355.598.934.022,99	356.959.772.910,19	(1.360.838.887,20)	(0,38)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	57.601.287.045,02	73.627.310.522,81	(16.026.023.477,79)	(21,77)
24	Dinas Koperasi dan UMKM	57.592.389.727,15	59.015.569.203,92	(1.423.179.476,77)	(2,41)
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.197.909.502,79	13.607.628.838,41	(409.719.335,62)	(3,01)
26	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	837.403.679.701,11	915.818.176.349,29	(78.414.496.648,18)	(8,56)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.595.754.461,30	31.465.541.676,11	6.130.212.785,19	19,48
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	465.365.772.496,45	418.327.066.521,41	47.038.705.975,04	11,24
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	989.913.668.890,57	976.817.793.089,05	13.095.875.801,52	1,34
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	467.268.976.455,84	481.892.675.547,73	(14.623.699.091,89)	(3,03)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	109.860.538.927,16	111.364.795.468,51	(1.504.256.541,35)	(1,35)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	97.480.509.481,21	90.143.754.122,33	7.336.755.358,88	8,14
33	Sekretariat Daerah	240.554.542.108,40	237.713.715.555,09	2.840.826.553,31	1,20
34	Sekretariat DPRD	153.852.046.651,92	162.945.834.581,61	(9.093.787.929,69)	(5,58)
35	Inspektorat	9.402.906.843,02	9.582.101.555,62	(179.194.712,60)	(1,87)
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	127.402.752.156,01	128.162.790.050,90	(760.037.894,89)	(0,59)
37	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.547.538.978,86	8.754.169.502,03	(206.630.523,17)	(2,36)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.639.716.041.916,27	2.399.496.502.333,03	240.219.539.583,24	10,01
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.318.378.432.533,88	9.053.768.304.600,50	(735.389.872.066,62)	(8,12)
40	Badan Kepegawaian Daerah	12.888.751.184,99	13.956.146.664,49	(1.067.395.479,50)	(7,65)
41	Badan Pengembangan SDM Daerah	155.611.042.881,05	155.524.413.375,19	86.629.505,86	0,06
42	Badan Penghubung	24.968.504.716,56	25.110.850.838,82	(142.346.122,26)	(0,57)
Jumlah		39.704.505.567.071,59	40.503.023.207.483,67	(798.517.640.412,08)	(1,97)

5.6.2 Surplus/Defisit – LO

Rp1.068.899.283.349,48

Surplus/Defisit – LO sebesar Rp1.068.899.283.349,48 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(7.789.420.512.540,25)	(7.977.629.684.731,34)	188.209.172.191,09	(2,36)
2	Dinas Kesehatan	(518.597.208.054,38)	(624.114.986.413,88)	105.517.778.359,50	(16,91)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(328.891.292.127,76)	(301.543.344.488,08)	(27.347.947.639,68)	9,07
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	98.829.281.752,72	10.497.150.006,91	88.332.131.745,81	841,49
5	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang	(139.933.239.552,67)	(141.144.789.523,86)	1.211.549.971,19	(0,86)
6	RSUD Dr. Rehatta Jepara	(50.170.444.694,77)	(51.031.975.829,70)	861.531.134,93	(1,69)



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(81.726.637.535,72)	(80.359.524.141,15)	(1.367.113.394,57)	1,70
8	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	(77.919.756.194,57)	(81.160.544.218,95)	3.240.788.024,38	(3,99)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(52.237.054.471,19)	(54.328.702.859,02)	2.091.648.387,83	(3,85)
10	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(670.024.918.797,91)	(1.381.083.095.140,43)	711.058.176.342,52	(51,49)
11	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(189.176.369.763,70)	(247.133.708.858,50)	57.957.339.094,80	(23,45)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(47.057.081.004,16)	(61.908.372.573,16)	14.851.291.569,00	(23,99)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(18.499.091.365,74)	(22.182.689.178,22)	3.683.597.812,48	(16,61)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(196.415.037.229,22)	(858.201.565.827,64)	661.786.528.598,42	(77,11)
15	Dinas Sosial	(368.760.136.434,60)	(376.963.019.001,78)	8.202.882.567,18	(2,18)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(16.884.057.991,94)	(11.664.398.058,58)	(5.209.182.433,37)	44,66
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(84.217.998.754,47)	(101.149.544.506,62)	16.931.545.752,15	(16,74)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(19.545.460.295,89)	(21.374.092.028,37)	1.828.631.732,48	(8,56)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(190.964.273.239,17)	(184.130.802.247,46)	(6.833.470.991,71)	3,71
20	Dinas Ketahanan Pangan	(46.074.369.284,68)	(40.605.233.297,43)	(5.469.135.987,25)	13,47
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	(24.096.175.099,77)	(24.713.203.188,47)	617.028.088,70	(2,50)
22	Dinas Perhubungan	(163.446.892.649,68)	(155.122.806.956,20)	(8.324.085.693,48)	5,37
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	(89.031.060.323,24)	(84.175.500.379,79)	(4.855.559.943,45)	5,77
24	Dinas Koperasi dan UMKM	(31.737.826.693,59)	(61.843.891.855,77)	30.106.065.162,18	(48,68)
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(21.452.914.780,45)	(23.417.894.661,62)	1.964.979.881,17	(8,39)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(366.480.040.461,30)	(346.445.886.294,07)	(20.034.154.167,23)	5,78
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(31.639.211.350,86)	(43.388.097.036,81)	11.748.885.685,95	(27,08)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(68.053.479.434,99)	(45.725.741.123,96)	(22.327.738.311,03)	48,83
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(268.408.484.684,09)	(207.334.283.693,15)	(61.074.200.990,94)	29,46
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(104.718.862.676,22)	(123.779.909.774,89)	18.793.229.438,67	(15,18)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(45.201.907.039,71)	(84.094.650.502,27)	38.892.743.462,56	(46,25)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(99.924.674.361,78)	(81.238.850.699,46)	(18.685.823.662,32)	23,00
33	Sekretariat Daerah	(639.266.248.204,77)	(612.599.017.800,28)	(26.667.230.404,49)	4,35
34	Sekretariat DPRD	(542.364.229.638,40)	(522.848.077.309,69)	(19.516.152.328,71)	3,73
35	Inspektorat	(34.430.866.071,59)	(38.993.195.876,60)	4.562.329.805,01	(11,70)
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(42.574.754.002,03)	(47.271.629.523,89)	4.696.875.521,86	(9,94)
37	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(17.028.399.208,95)	(19.366.815.536,17)	2.338.416.327,22	(12,07)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.345.071.978.717,58	14.426.947.088.575,24	(3.060.375.259.837,41)	(21,21)



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.199.664.906.656,71	(100.832.768.973,29)	3.300.497.675.629,99	(3.273,24)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(35.439.868.057,27)	(44.250.891.723,17)	8.811.023.665,90	(19,91)
41	Badan Pengembangan SDM Daerah	(40.754.557.881,78)	(40.484.750.823,14)	(269.807.058,64)	0,67
42	Badan Penghubung	(22.101.491.824,25)	(21.315.808.383,26)	(785.683.440,99)	3,69
Jumlah		1.068.899.283.349,48	(909.509.506.457,97)	1.978.408.789.807,45	(217,52)

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan

Rp1.244.208.492.853,42

Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp1.244.208.492.853,42 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Kas	106.112.372,00	150.631.529,00	(44.519.157,00)	(29,56)
2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	(93.804.451.417,03)	174.033.862.795,00	(267.838.314.212,03)	(153,90)
3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	210.270.276.159,63	(368.533.529,11)	210.638.809.688,73	(57.155,94)
4	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	(86.301.463.526,47)	-	(86.301.463.526,47)	-
5	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	1.196.803.684.772,00	(6.497.922.576,00)	1.203.301.607.348,00	(18.518,25)
6	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	17.734.307.389,90	(50.440.374.414,20)	68.174.681.804,10	(135,16)
7	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	(295.188.244.821,00)	(11.872.738.748,00)	(283.315.506.073,00)	2.386,27
8	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	(2.941.435.575,61)	(1.906.262.518,40)	(1.035.173.057,21)	54,30
9	Koreksii/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	324.785.000,00	7.888.103.507,60	(7.563.318.507,60)	(95,88)
10	Koreksi/Penyesuaian Properti Investasi	297.204.922.500,00	-	297.204.922.500,00	-
11	Koreksi/Penyesuaian Utang	-	5.100.000,00	(5.100.000,00)	(100,00)
Jumlah		1.244.208.492.853,42	110.991.866.045,89	1.133.216.626.807,53	1.020,99

5.6.3.1 Koreksi/Penyesuaian Kas

Rp106.112.372,00

Koreksi/Penyesuaian Kas sebesar Rp106.112.372,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106.112.372,00	150.631.529,00	(44.519.157,00)	(29,55)
Jumlah		106.112.372,00	150.631.529,00	(44.519.157,00)	(29,55)

Koreksi/Penyesuaian Kas disebabkan oleh:

1. Koreksi/Penyesuaian Kas pada Dinas Pendidikan disebabkan karena koreksi atas kesalahan pengakuan saldo kas di Bendahara Sekolah atas dana BOS, BOP, Usaha Mandiri Tahun 2024 serta pengembalian belanja Pegawai sampai dengan 2024 yang disetorkan ke RKUD pada tahun 2025 sebesar Rp106.112.372,00 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA SEKOLAH	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
SMKN 2 PURWODADI	351.584.014		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat



NAMA SEKOLAH	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
			pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI 2 PATI	134.800		Sisa kas yang tercatat pada akhir tahun 2024 adalah Rp10.916.000,00 tidak sesuai dengan saldo pada kas tunai Bendahara USMAN yakni Rp11.050.800,00, sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI 3 JEPARA	12.094.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI 1 BANGSRI	3.947.500		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI 1 KARANGDADAP	1.100.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI 1 WARUNGASEM		(500)	Sisa kas yang tercatat pada akhir tahun 2024 adalah Rp97.470.500,00 tidak sesuai dengan saldo pada kas tunai Bendahara USMAN yakni Rp97.470.000,00, akibat kesalahan pencatatan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 BUMIJAWA	5.223.486		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan



NAMA SEKOLAH	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
			sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 WARUREJA		(890.000)	Sisa kas yang tercatat pada akhir tahun 2024 adalah Rp9.490.046,00 tidak sesuai dengan saldo pada kas tunai Bendahara USMAN yakni Rp8.600.046,00, sesuai dengan SILPA di LRA sekolah sehingga perlu dilakukan koreksi
SMKN 1 PURWOJATI	154.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 2 PURWOKERTO	542.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI 1 WANAREJA	5.450.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI NUSAWUNGU	668.450		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI JAWA TENGAH DI PURBALINGGA	1.955.500		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.



NAMA SEKOLAH	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
SMKN 2 BAWANG	17.189.176		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI BANSARI	21.394.500		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI 1 KALIKAJAR	8.491.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 2 PURWOREJO	666.917		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 AMBAL	16.076.375		Terdapat penambahan saldo dari Unit Produksi yang belum melaporkan pada akhir tahun 2024 yang seharusnya menambah saldo tersebut yang di tahun 2025 digunakan sebagai tambahan untuk belanja, oleh karena itu perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 KARANGANYAR	23.114		Terdapat jasa giro sebesar Rp 23.114,00 pada rekening yang belum dicatatkan pada pelaporan sebelumnya yang seharusnya menambah saldo di bank, karena uang tersebut disetorkan pada 21 Februari 2025, sehingga perlu dilakukan koreksi saldo awal tahun 2025.
SMK N 1 MUSUK	3.205.100		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran



NAMA SEKOLAH	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
			2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 BANYUDONO	392.790		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI 1 SAMBI	3.758.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 KEMUSU	2.785.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 KALIJAMBE	6.400.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 TANON	2.105.500		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 GONDANG	5.941.600		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat



NAMA SEKOLAH	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
			pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 4 SUKOHARJO	1.330.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 5 SUKOHARJO	1.493.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 6 SUKOHARJO	12.896.500		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 SURAKARTA	44.897.000		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 3 SURAKARTA	18.628.905		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya, karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 5 SURAKARTA	133.748.913		Dilakukan pengakuan atas sisa saldo Unit Usaha Mandiri Tahun Anggaran 2024 yang belum tercatat pada periode sebelumnya,



NAMA SEKOLAH	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
			karena unit tersebut merupakan unit usaha mandiri yang baru terbentuk pada periode berjalan sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI TEMBARAK	4.500		Sisa kas akhir tahun 2022 yang berasal dari sisa belanja modal pada tahun 2021 yang tidak dapat dibelanjakan di akhir tahun 2021, sehingga menambah saldo akhir tahun 2024 yang menjadi saldo awal tahun 2025, oleh karena itu perlu dilakukan koreksi.
SMK NEGERI 1 ALIAN	6.586.000		Sisa kas yang tercatat pada akhir tahun 2024 adalah Rp0,00 tidak sesuai dengan saldo pada kas Bendahara BOS yakni Rp6.586.000,00, akibat kesalahan persepsi bendahara dan operator ARKAS, yang menimbulkan perbedaan pencatatan sisa kas pada aplikasi ARKAS, sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 2 WONOGIRI		(1.000)	Sisa kas yang tercatat pada akhir tahun 2024 adalah Rp1.000,00 tidak sesuai dengan saldo pada kas Bendahara BOS yakni Rp0,00, tidak ada sisa kas di akhir 2023 dan 2024 sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 WARUREJA		(300)	Pengakuan saldo akhir 2024 sebesar Rp16.587.000,00 tidak sesuai dengan kas di Bendahara BOP sebesar Rp16.856.700,00 akibat adanya uang pribadi bendahara, sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMAN 1 KERSANA		(800)	Pengakuan saldo akhir 2024 sebesar Rp20.481.000,00 tidak sesuai dengan kas di Bendahara BOP sebesar Rp20.480.200,00 akibat adanya uang pribadi bendahara, sehingga perlu dilakukan koreksi.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN-INDUK		(583.862.668,00)	Koreksi kurang atas pengembalian belanja Pegawai sampai dengan 2024 yang disetorkan ke RKUD pada tahun 2025.
Jumlah	690.867.640,00	(584.755.268,00)	



5.6.3.2 Koreksi/Penyesuaian Piutang

(Rp93.804.451.417,03)

Koreksi/Penyesuaian Piutang sebesar (Rp93.804.451.417,03) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	175.530.162.303,97	127.134.667.096,00	48.395.495.207,97	38,07
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(1.632.025,00)	(277.665.962,00)	276.033.937,00	(99,41)
3	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang	(66.957.233,00)	(6.127.901,00)	(60.829.332,00)	992,66
4	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	(191.769.936,00)	(80.974.840,00)	(110.795.096,00)	136,83
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(19.500,00)	(106.900,00)	87.400,00	(81,76)
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	(188.882.571,00)	-	(188.882.571,00)	-
7	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(670.132.428.000,00)	-	(670.132.428.000,00)	-
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	401.247.075.544,00	47.264.071.302,00	353.983.004.242,00	748,95
Jumlah		(93.804.451.417,03)	174.033.862.795,00	(267.838.314.212,03)	(153,90)

Penyebab Koreksi/Penyesuaian Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar Rp175.530.162.303,97 disebabkan oleh koreksi tambah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp175.681.742.266,97 dan koreksi kurang Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar (Rp151.579.963,00) dengan rincian sebagai berikut :

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pasien Umum-Pasien TB-MDR	7.309.314,00	(1.107.500,00)	1. Koreksi Tambah : piutang tahun 2024 yang dicatat pada tahun 2025 2. Koreksi Kurang : hasil verifikasi dari pihak TB MDR
Pasien Umum-Pasien Pernyataan Utang	27.540.942,00	-	Koreksi Tambah : piutang tahun 2024 yang dicatat pada tahun 2025
Pasien Perorangan	323.454.352,97	-	Koreksi Tambah : piutang tahun 2024 yang dicatat pada tahun 2025
Pasien Jaminan-BPJS	174.026.872.657,00	(311.600,00)	1. Koreksi Tambah : piutang tahun 2024 yang dicatat pada tahun 2025 2. Koreksi Kurang : biaya transfer
Pasien Jaminan-JAMKESDA KAB	36.802.801,00	-	Koreksi Tambah : piutang tahun 2024 yang dicatat pada tahun 2025
Pasien Jaminan-Inhealth	76.666.572,00	-	Koreksi Tambah : piutang tahun 2024 yang dicatat pada tahun 2025
Pasien Jaminan-Jaminan Perusahaan	599.181.272,00	(15.565.246,00)	1. Koreksi Tambah : piutang tahun 2024 yang dicatat pada tahun 2025 2. Koreksi Kurang : karena korsi klaim dan dubel klaim
Pasien Jaminan-Jasa Raharja	583.914.356,00	(102.360.617,00)	1. Koreksi Tambah : piutang tahun 2024 yang dicatat pada tahun 2025 2. Koreksi Kurang : Plafon maksimal dan dubel tagih
Pasien Jaminan-Covid	-	(32.235.000,00)	Koreksi Kurang : hasil verifikasi dari kemenkes
Jumlah	175.681.742.266,97	(151.579.963,00)	

2. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar (Rp1.632.025,00) karena adanya koreksi kurang atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar (Rp1.632.025,00) dengan rincian sebagai berikut :



DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Penjamin Lain (Jasa Raharja)	-	(1.632.025,00)	Koreksi Kurang atas ketidaksesuaian antara pengajuan klaim dan hasil verifikasi pihak P2M Dinas Kesehatan
Jumlah	-	(1.632.025,00)	

3. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang sebesar (Rp66.957.233,00) karena adanya koreksi tambah Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp31.841,00 dan koreksi kurang atas piutang yang sama sebesar (Rp66.989.074,00) dengan rincian sebagai berikut :

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pasien Umum	-	(497,00)	Koreksi Kurang atas pelunasan di bulan Desember 2024
PT Kereta Api Indonesia	-	(2.900,00)	Koreksi Kurang atas Biaya Administrasi Bank
BPJS Kesehatan	-	(2.900,00)	Koreksi Kurang atas Biaya Administrasi Bank
Jasa Raharja	31.813,00	(28.687.963,00)	1. Koreksi Tambah : Terdapat lebih bayar pada saat pelunasan di tahun 2024. 2. Koreksi Kurang : Tidak ditanggung oleh Jasa Raharja
BPJS Ketenagakerjaan	28,00	(38.294.814,00)	1. Koreksi Tambah : Terdapat lebih bayar pada saat pelunasan di tahun 2024. 2. Koreksi Kurang : Tidak ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan
Jumlah	31.841,00	(66.989.074,00)	

4. Koreksi kurang ekuitas di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta sebesar (Rp191.769.936,00) merupakan koreksi atas biaya biad, biaya administrasi serta pembayaran Piutang Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD dengan PT. Pilar Cadas Putra melalui KPKNL.

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
PT Pilar Cadas Putra	80.957.340,00	(272.727.276,00)	1. Koreksi Tambah : Terdapat kesalahan pencatatan koreksi piutang tahun 2024 atas biaya biad dan administrasi pembayaran piutang melalui KPKNL 2. Koreksi Kurang : Terdapat penyelesaian piutang oleh KPKNL yang ditransfer langsung ke RKUD
Jumlah	80.957.340,00	(272.727.276,00)	

5. Koreksi kurang ekuitas di RSJD Dr. RM Soedjarwadi sebesar (Rp19.500,00) merupakan koreksi kurang atas Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dengan rincian sebagai berikut :

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Klaim IPWL Rawat Inap dan Rawat Jalan	-	(19.500,00)	Koreksi Kurang atas biaya transfer klaim yang cair
Jumlah	-	(19.500,00)	



6. Koreksi kurang ekuitas di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar (Rp188.882.571,00) merupakan koreksi kurang atas Piutang Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat sebagai berikut:

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tempat Pelelangan Ikan	-	(188.882.571,00)	Kesalahan pencatatan yang didasarkan pada hasil inventarisasi dan koordinasi pencatatan piutang pada Tempat Pelelangan Ikan
Jumlah	-	(188.882.571,00)	

7. Koreksi kurang ekuitas di BAPENDA sebesar (Rp670.132.428.000,00) karena adanya koreksi tambah Piutang Pajak Daerah sebesar Rp133.200.866.000,00 dan koreksi kurang atas piutang yang sama sebesar (Rp803.333.294.000,00) sebagai berikut:

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pajak Kendaraan Bermotor	133.200.866.000,00	(803.333.294.000,00)	1. Koreksi Tambah : Terdapat kesalahan pencatatan koreksi piutang tahun 2024 atas pajak kendaraan bermotor 2. Koreksi Kurang : Terdapat kesalahan pencatatan koreksi piutang tahun 2024 atas pajak kendaraan bermotor
Jumlah	133.200.866.000,00	(803.333.294.000,00)	

8. Koreksi tambah ekuitas di BPKAD selaku SKPKD sebesar Rp402.047.573.000,00 dan koreksi kurang ekuitas sebesar (Rp800.497.456,00) karena:

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pemerintah Pusat	402.047.573.000,00	(518.943.000,00)	Koreksi tambah ekuitas atas pengakuan kurang lebih salur atas Dana Transfer Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024 berdasarkan PMK Nomor 120 Tahun 2025
KUD Wijaya Kusuma	-	(17.009.000,00)	Koreksi kurang atas piutang Dana Bergulir-Biro Perekonomian atas pembayaran sebelum tahun 2017
Kabupaten Cilacap	-	(264.545.456,00)	Koreksi Piutang Dana Talangan Kepada Kabupaten Cilacap atas pembayaran di Tahun 2024
Jumlah	402.047.573.000,00	(800.497.456,00)	

5.6.3.3 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang

Rp210.280.730.703,63

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang sebesar (Rp210.280.730.703,63) merupakan koreksi penghitungan Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(908.381.761,00)	(635.679.097,48)	(272.702.663,52)	42,90
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	8.160,13	1.315.241,87	(1.307.081,74)	(99,38)
3	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	191.769.936,00	80.974.840,00	110.795.096,00	136,83
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	97,50	534,50	(437,00)	(81,76)
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	188.882.571,00	-	188.882.571,00	-
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	210.516.442.700,00	-	210.516.442.700,00	-



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	281.554.456,00	184.854.952,00	96.699.504,00	52,31
Jumlah		210.270.276.159,63	(368.533.529,11)	210.638.809.688,73	(57.155,94)

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar (Rp908.381.761,00) karena penyesuaian pengakuan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar Rp8.160,13 karena penyesuaian pengakuan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
3. Koreksi tambah ekuitas di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta sebesar Rp191.769.936,00 karena penyesuaian pengakuan Piutang Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD atas pembayaran piutang PT. Pilar Cadas Putra melalui KPKNL.
4. Koreksi tambah ekuitas di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten sebesar Rp97,50 karena penyesuaian pengakuan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
5. Koreksi tambah ekuitas di Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp188.882.571,00 penyesuaian pengakuan Piutang pada Tempat Pelelangan Ikan.
6. Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp210.516.442.700,00 penyesuaian pengakuan Piutang Pajak Daerah.
7. Koreksi tambah ekuitas di BPKAD sebesar Rp281.554.456,00 merupakan koreksi penyesuaian atas penyelesaian Piutang Dana Talangan kepada Kabupaten Cilacap di tahun 2024 sebesar Rp264.545.456,00 dan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp17.009.000,00.

5.6.3.4 Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen (Rp86.301.463.526,47)

Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen sebesar (Rp86.301.463.526,47) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(86.301.463.526,47)	-	(86.301.463.526,47)	-
Jumlah		(86.301.463.526,47)	-	(86.301.463.526,47)	-

5.6.3.5 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Rp1.196.803.684.772,00

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp1.196.803.684.772,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20.967.722.632,00	11.660.531.309,00	9.307.191.323,00	79,82
2	Dinas Kesehatan	10.354.495.306,00	1.642.340.081,00	8.712.155.225,00	530,47
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	433.948.087,00	(473.589.265,00)	907.537.352,00	(191,63)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(1.214.904.700,00)	-	(1.214.904.700,00)	-
5	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang	(1.544.016.025,00)	(469.616.104,00)	(1.074.399.921,00)	228,78
6	RSUD Dr. Rehatta Jepara	1.263.259.000,00	295.000.000,00	968.259.000,00	328,22
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	379.900.000,00	174.616.104,00	205.283.896,00	117,56
8	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	-	(526.143.153,00)	526.143.153,00	(100,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.035.187.652,00	-	1.035.187.652,00	-



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
10	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	15.021.758.210,00	2.547.623.920,00	12.474.134.290,00	489,64
11	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.124.783.640.769,00	(29.745.487.020,00)	1.154.529.127.789,00	(3.881,36)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-	(393.792.937,00)	393.792.937,00	(100,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	(444.650.000,00)	444.650.000,00	(100,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	(55.726.900,00)	55.726.900,00	(100,00)
15	Dinas Sosial	3.744.189.756,00	19.045.573.900,00	(15.301.384.144,00)	(80,34)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93.462.000,00	78.076.900,00	15.385.100,00	19,71
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.152.511.300,00)	(14.383.588.999,00)	13.231.077.699,00	(91,99)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	41.537.134,00	16.000.000,00	25.537.134,00	159,61
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.173.447.300,00	318.010.928,00	855.436.372,00	269,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	(579.876.087,00)	2.378.014.000,00	(2.957.890.087,00)	(124,38)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	549.703.500,00	-	549.703.500,00	-
22	Dinas Perhubungan	(19.193.394.763,00)	2.512.504.880,00	(21.705.899.643,00)	(863,91)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.607.200,00	(2.240.981.830,00)	2.288.589.030,00	(102,12)
24	Dinas Koperasi dan UMKM	461.184.880,00	(210.289.649,00)	671.474.529,00	(319,31)
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	(24.000.000,00)	24.000.000,00	(100,00)
26	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	32.000.000,00	98.000.000,00	(66.000.000,00)	(67,35)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	239.412.000,00	976.747.000,00	(737.335.000,00)	(75,49)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	15.435.130.100,00	(91.900.000,00)	15.527.030.100,00	(16.895,57)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	43.157.011.260,00	(2.589.689.969,00)	45.746.701.229,00	(1.766,49)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(88.221.601.612,00)	(203.971.000,00)	(88.017.630.612,00)	43.152,03
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	505.618.130,00	(90.487.460,00)	596.105.590,00	(658,77)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	(40.275.000,00)	40.275.000,00	(100,00)
33	Sekretariat Daerah	1.755.016.350,00	(254.905.500,00)	2.009.921.850,00	(788,50)
34	Sekretariat DPRD	11.628.054.954,00	-	11.628.054.954,00	-
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	(539.271.800,00)	539.271.800,00	(100,00)
36	Badan Riset dan Inovasi Daerah	86.672.839.913,00	52.454.000,00	86.620.385.913,00	165.135,90
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(3.373.792.074,00)	(456.867.756,00)	(2.916.924.318,00)	638,46
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(27.535.173.800,00)	4.913.536.914,00	(32.448.710.714,00)	(660,39)
39	Badan Kepegawaian Daerah	353.841.000,00	-	353.841.000,00	-
40	Badan Penghubung	(511.012.000,00)	28.281.830,00	(539.293.830,00)	(1.906,86)
Jumlah		1.196.803.684.772,00	(6.497.922.576,00)	1.203.301.607.348,00	(18.518,25)

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap ini dikarenakan beberapa alasan dengan rincian sebagai berikut:
(Penjelasan lebih rinci atas Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap terlampir)



NO.	JENIS ASET TETAP	KOREKSI TAMBAH	KOREKSI KURANG	MUTASI MASUK ASET DARI SKPD LAIN	MUTASI KELUAR ASET KE SKPD LAIN
1	Tanah	1.207.752.774.724,00	(45.068.527.643,00)	95.009.839.913,00	(95.009.839.913,00)
2	Peralatan dan Mesin	14.793.913.117,00	(6.876.325.258,00)	10.639.534.656,00	(10.639.534.656,00)
	Alat Besar	894.000.000,00	-	176.544.000,00	(176.544.000,00)
	Alat Angkutan	1.481.855.800,00	(207.895.000,00)	5.878.642.019,00	(5.878.642.019,00)
	Alat Bengkel dan Alat Ukur	55.346.800,00	(107.856.250,00)	341.000.000,00	(341.000.000,00)
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.890.829.020,00	(145.313.500,00)	3.489.782.093,00	(3.489.782.093,00)
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	13.274.500,00	-	64.541.694,00	(64.541.694,00)
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.833.731.466,00	-	138.336.000,00	(138.336.000,00)
	Alat Laboratorium	196.678.531,00	(3.527.661.925,00)	80.087.000,00	(80.087.000,00)
	Komputer	179.384.500,00	(1.436.089.405,00)	470.601.850,00	(470.601.850,00)
	Alat Keselamatan Kerja	3.000.000,00	-	-	-
	Alat Peraga	49.312.500,00	(1.365.523.178,00)	-	-
	Peralatan Proses/Produksi	3.500.000,00	(85.986.000,00)	-	-
	Rambu-rambu	193.000.000,00	-	-	-
3	Gedung dan Bangunan	218.873.857.421,00	(201.581.560.653,00)	20.657.151.631,00	(20.657.151.631,00)
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	100.156.721.825,00	(71.156.048.026,00)	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	331.093.500,00	(265.293.500,00)	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	545.000.000,00	(45.341.280,00)	-	-
	Jumlah	1.542.453.360.587,00	(324.993.096.360,00)	126.306.526.200,00	(126.306.526.200,00)

5.6.3.6 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

Rp17.734.307.389,90

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp17.734.307.389,90 merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.448.826.485,34	692.528.288,81	31.756.298.196,53	4.585,56
2	Dinas Kesehatan	6.937.640,00	518.924.644,61	(511.987.004,61)	(98,66)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	151.964.091,99	473.589.265,00	(321.625.173,01)	(67,91)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.098.488.356,25	-	1.098.488.356,25	-
5	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.544.016.025,00	469.616.104,00	1.074.399.921,00	228,78
6	RSUD Dr. Rehatta Jepara	(601.842.656,25)	(295.000.000,00)	(306.842.656,25)	104,01
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(379.900.000,00)	(174.616.104,00)	(205.283.896,00)	117,56
8	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	-	9.845.911,06	(9.845.911,06)	(100,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(1.035.187.652,00)	-	(1.035.187.652,00)	-
10	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	79.311.417,25	(1.711.980,08)	81.023.397,33	(4.732,73)
11	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(19.865.014.934,00)	407.867.500,00	(20.272.882.434,00)	(4.970,46)



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	148.417.096,02	407.923.436,97	(259.506.340,95)	(63,62)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	444.650.000,00	(444.650.000,00)	(100,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	75.748.775,00	(75.748.775,00)	(100,00)
15	Dinas Sosial	(2.541.752.188,25)	(2.849.505.610,66)	307.753.422,41	(10,80)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	(78.076.900,00)	78.076.900,00	(100,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	993.527.543,96	357.407.257,87	636.120.286,09	177,98
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(41.537.134,00)	(16.000.000,00)	(25.537.134,00)	159,61
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(356.065.681,84)	(94.668.020,00)	(261.397.661,84)	276,12
20	Dinas Ketahanan Pangan	586.307.658,01	(328.820.270,00)	915.127.928,01	(278,31)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	(545.238.833,33)	-	(545.238.833,33)	-
22	Dinas Perhubungan	2.584.684.342,13	(1.527.204.811,00)	4.111.889.153,13	(269,24)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	(47.607.200,00)	1.879.861.830,00	(1.927.469.030,00)	(102,53)
24	Dinas Koperasi dan UMKM	(210.607.761,87)	210.289.649,00	(420.897.410,87)	(200,15)
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(100,00)
26	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	108.000.000,00	(51.516.905.734,37)	51.624.905.734,37	(100,21)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(200.434.486,26)	(976.747.000,00)	776.312.513,74	(79,48)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	322.438.797,65	99.000.000,00	223.438.797,65	225,70
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	213.716.471,48	258.511.997,67	(44.795.526,19)	(17,33)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	306.090.108,55	203.971.000,00	102.119.108,55	50,07
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(517.701.913,31)	193.651.238,92	(711.353.152,23)	(367,34)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(800.948.303,83)	40.275.000,00	(841.223.303,83)	(2.088,70)
33	Sekretariat Daerah	327.460.303,33	252.765.500,00	74.694.803,33	29,55
34	Sekretariat DPRD	(3.166.694.673,84)	-	(3.166.694.673,84)	-
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	539.271.800,00	(539.271.800,00)	(100,00)
36	Badan Riset dan Inovasi Daerah	-	(52.454.000,00)	52.454.000,00	(100,00)
37	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.046.432.128,37	456.867.756,00	1.589.564.372,37	347,93
38	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.530.784.862,02	(516.949.109,00)	5.047.733.971,02	(976,45)
39	Badan Kepegawaian Daerah	(9.235.996,67)	-	(9.235.996,67)	-
40	Badan Penghubung	556.673.478,00	(28.281.830,00)	584.955.308,00	(2.068,31)
Jumlah		17.734.307.389,90	(50.440.374.414,20)	68.174.681.804,10	(135,16)



5.6.3.7 Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya

(Rp295.188.244.821,00)

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya sebesar (Rp295.188.244.821,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(83.720.000,00)	(932.593.380,00)	848.873.380,00	(91,02)
2	Dinas Kesehatan	74.800.000,00	(1.915.643.888,00)	1.990.443.888,00	(103,90)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	(427.643.000,00)	427.643.000,00	(100,00)
4	RSUD Dr. Rehatta Jepara	17.000.000,00	-	17.000.000,00	-
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.120.300,00	-	5.120.300,00	-
6	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	70.235.000,00	(3.028.108.000,00)	3.098.343.000,00	(102,32)
7	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	40.000.000,00	(378.255.000,00)	418.255.000,00	(110,57)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	128.925.000,00	-	128.925.000,00	-
9	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	214.909.400,00	(159.770.000,00)	374.679.400,00	(234,51)
11	Dinas Perhubungan	223.108.600,00	-	223.108.600,00	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	509.419.899,00	-	509.419.899,00	-
13	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.600.000,00	-	117.600.000,00	-
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	37.533.750,00	(501.030.560,00)	538.564.310,00	(107,49)
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	129.274.480,00	-	129.274.480,00	-
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	49.300.650,00	-	49.300.650,00	-
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan	111.990.000,00	-	111.990.000,00	-
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	49.733.550,00	(1.108.440.000,00)	1.158.173.550,00	(104,49)
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	442.558.900,00	-	442.558.900,00	-
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(39.785.000,00)	(3.222.582.275,00)	3.182.797.275,00	(98,77)
21	Sekretariat Daerah	127.791.000,00	1.649.530.535,00	(1.521.739.535,00)	(92,25)
22	Inspektorat	49.824.500,00	-	49.824.500,00	-
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	123.936.700,00	(24.560.000,00)	148.496.700,00	(604,63)
24	Badan Riset dan Inovasi Daerah	138.550.000,00	24.560.000,00	113.990.000,00	464,13
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	509.973.450,00	49.395.000,00	460.578.450,00	932,44
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(298.564.050.000,00)	(2.425.000.000,00)	(296.139.050.000,00)	12.211,92
27	Badan Kepegawaian Daerah	140.525.000,00	517.401.820,00	(376.876.820,00)	(72,84)
28	Badan Pengembangan SDM Daerah	187.200.000,00	-	187.200.000,00	-



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
	Jumlah	(295.188.244.821,00)	(11.872.738.748,00)	(283.315.506.073,00)	2.386,27

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya ini dikarenakan beberapa alasan dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Koreksi		Keterangan 2025
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	201.280.000,00	(285.000.000,00)	Kesalahan pencatatan aset di SMAN 1 Purwokerto
Dinas Kesehatan	74.800.000,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
RSUD Dr. Rehatta Jepara	17.000.000,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.120.300,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	70.235.000,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	40.000.000,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Satuan Polisi Pamong Praja	128.925.000,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	214.909.400,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Dinas Perhubungan	223.108.600,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Dinas Komunikasi dan Informatika	509.419.899,00	-	Masuk dalam usulan penghapusan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.600.000,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	37.533.750,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	129.274.480,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang



SKPD	Koreksi		Keterangan 2025
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
			belum tercatat di SIM aset
Dinas Kelautan dan Perikanan	49.300.650,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Dinas Pertanian dan Perkebunan	111.990.000,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	49.733.550,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	442.558.900,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	(39.785.000,00)	Koreksi Penghapusan Peralatan Mesin Rusak Berat karena terdapat aset tetap yang seharusnya masuk ke aset persediaan pakai habis
Sekretariat Daerah	127.791.000,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Inspektorat	49.824.500,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	123.936.700,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Badan Riset dan Inovasi Daerah	138.550.000,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	509.973.450,00	-	Hasil inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	219.950.000,00	(298.784.000.000,00)	1. Koreksi Kurang : Terdapat 1 bidang tanah yang terdiri dari beberapa sertifikat dan merupakan aset Properti Investasi 2. Koreksi Tambah : Hasil



SKPD	Koreksi		Keterangan 2025
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
			inventaris aset, ditemukan software yang belum tercatat di SIM aset
Badan Kepegawaian Daerah	140.525.000,00	-	Hasil inventaris Aset, ditemukan software belum tercatat di Sim Aset
Badan Pengembangan SDM Daerah	187.200.000,00	-	Hasil inventaris Aset, ditemukan software belum tercatat di Sim Aset
Jumlah	3.920.540.179,00	(299.108.785.000,00)	

5.6.3.8 Koreksi/Penyesuaian Amortisasi (Rp2.941.435.575,61)

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi sebesar (Rp2.941.435.575,61) merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset tak berwujud dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(176.749.000,00)	-	(176.749.000,00)	-
2	Dinas Kesehatan	(41.140.000,00)	-	(41.140.000,00)	-
3	RSUD Dr. Rehatta Jepara	(17.000.000,00)	-	(17.000.000,00)	-
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(4.096.240,00)	-	(4.096.240,00)	-
5	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(57.358.583,33)	(48.675.000,00)	(8.683.583,33)	17,84
6	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(35.250.000,00)	-	(35.250.000,00)	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	(128.925.000,00)	-	(128.925.000,00)	-
8	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	(2.333.333,33)	2.333.333,33	(100,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(107.756.886,67)	-	(107.756.886,67)	-
10	Dinas Perhubungan	(139.123.620,00)	-	(139.123.620,00)	-
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	(389.931.811,12)	-	(389.931.811,12)	-
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(103.080.000,00)	-	(103.080.000,00)	-
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(107.813.872,00)	-	(107.813.872,00)	-
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	(49.300.650,00)	-	(49.300.650,00)	-
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(78.497.666,67)	-	(78.497.666,67)	-
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(13.262.280,00)	-	(13.262.280,00)	-
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(438.893.608,33)	-	(438.893.608,33)	-
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	(195.469.193,33)	195.469.193,33	(100,00)
19	Sekretariat Daerah	(77.282.413,33)	(1.294.906.818,41)	1.217.624.405,08	(94,03)
20	Inspektorat	(49.824.500,00)	-	(49.824.500,00)	-
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	24.560.000,00	(24.560.000,00)	(100,00)



No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
22	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(83.212.500,00)	(24.560.000,00)	(58.652.500,00)	238,81
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(380.761.527,50)	(15.641.750,00)	(365.119.777,50)	2.334,26
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(190.653.333,33)	-	(190.653.333,33)	-
25	Badan Kepegawaian Daerah	(84.322.083,33)	(349.236.423,33)	264.914.340,00	(75,86)
26	Badan Pengembangan SDM Daerah	(187.200.000,00)	-	(187.200.000,00)	-
Jumlah		(2.941.435.575,61)	(1.906.262.518,40)	(1.035.173.057,21)	54,30

5.6.3.9 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya **Rp324.785.000,00**

Koreksi/Penyesuaian penyusutan aset lainnya sebesar Rp324.785.000,00 merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	285.000.000,00	932.593.380,00	(647.593.380,00)	(69,44)
2	Dinas Kesehatan	-	1.915.643.888,00	(1.915.643.888,00)	(100,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	34.211.440,00	(34.211.440,00)	(100,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	20.770.100,00	(20.770.100,00)	(100,00)
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	59.288.616,26	(59.288.616,26)	(100,00)
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.785.000,00	3.442.304.416,67	(3.402.519.416,67)	(98,84)
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.483.291.666,67	(1.483.291.666,67)	(100,00)
Jumlah		324.785.000,00	7.888.103.507,60	(7.563.318.507,60)	(95,88)

5.6.3.10 Koreksi/Penyesuaian Properti Investasi **Rp297.204.922.500,00**

Koreksi/Penyesuaian Properti Investasi sebesar Rp297.204.922.500,00 merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian Hutang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	297.204.922.500,00	-	297.204.922.500,00	-
Jumlah		297.204.922.500,00	-	297.204.922.500,00	-

Koreksi tambah ekuitas di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp297.204.922.500,00 disebabkan oleh koreksi tambah Properti Investasi Tanah sebesar Rp298.784.000.000,00 dan koreksi kurang Properti Investasi Tanah sebesar (Rp1.579.077.500,00) dengan rincian sebagai berikut :

SKPD	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	298.784.000.000,00	- 1.579.077.500,00	1. Koreksi Tambah atas 1 Bidang Tanah yang seharusnya dicatat menjadi 8 Bidang Tanah di Kawasan PRPP, Kota Semarang 2. Koreksi Kurang atas <i>double</i> catat dengan 1 Bidang Tanah milik Dinas Pertanian dan Perkebunan di Desa Tragung, Kandeman, Kabupaten Batang
Jumlah	298.784.000.000,00	- 1.579.077.500,00	



5.6.3.11 Koreksi/Penyesuaian Utang

Rp0,00

Koreksi/Penyesuaian Utang sebesar Rp0,00 merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian Hutang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Rehatta Jepara	-	5.100.000,00	(5.100.000,00)	(100,00)
	Jumlah	-	5.100.000,00	(5.100.000,00)	(100,00)

5.6.4 Ekuitas Akhir

Rp42.017.613.343.274,49

Ekuitas akhir sebesar Rp42.017.613.343.274,49 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Ekuitas Akhir	42.017.613.343.274,49	39.704.505.567.071,59	2.313.107.776.202,90	5,83
	Jumlah	42.017.613.343.274,49	39.704.505.567.071,59	2.313.107.776.202,90	5,83



BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM

Luas dan batas wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km² atau sebesar 25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia. Secara administrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan. Provinsi Jawa Tengah juga dibagi atas 8 wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) Barlingmas cakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong, dan Bregasmalang. Secara administrasi wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY dan Samudera Hindia pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, dan Laut Jawa pada bagian utara. Wilayah Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Letak dan kondisi geografis Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur. Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara topografi sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

Kondisi geologis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, serta gromosol yang tersebar di seluruh wilayah, jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Potensi sumber daya mineral yang tersebar di Jawa Tengah meliputi 32 jenis mineral non logam (Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite, Batuapung, Trass, Diatome,



Marmer, Batu gamping, Dolomit, Basal, Andesit, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, Kalsit, Zeolit, Sirtu, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

Kondisi hidrologi Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain.

Suhu udara di Jawa Tengah tahun 2025 berkisar antara 22,0°C sampai dengan 35,2°C. Kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 74,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap yaitu sebesar 4.661 mm³ dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Banjarnegara sebanyak 249 hari.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk Hasil Pendataan Long Form Sensus Penduduk 2020 (LFSP2020) dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 tercatat 38.233.933 jiwa, bertambah 8342.650 jiwa selama satu tahun dibanding jumlah penduduk tahun 2024.

Jumlah penduduk yang paling banyak berada di Kabupaten Brebes 2.087.331 jiwa atau 5,45% penduduk Provinsi Jawa Tengah, diikuti Kabupaten Cilacap 2.046.392 jiwa (5,35%) dan Kabupaten Banyumas 1.865.270 jiwa (4,88%). Tiga kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk terendah adalah Kota Magelang 122.674 jiwa (0,32%), Kota Salatiga 203.554 jiwa (0,53%), dan Kota Tegal 288.817 jiwa (0,76%).

Tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 tercatat 1.113,47 jiwa/km², meningkat dibanding tahun sebelumnya 1.103,53 jiwa/km². Wilayah terpadat di Kota Surakarta 11.324,46 jiwa/km², meningkat dibanding tahun lalu 11.302,31 jiwa/km², diikuti Kota Tegal 7.390,40 jiwa/km² dan Kota Pekalongan 7.025,19 jiwa/km². Wilayah dengan kepadatan paling rendah yaitu Kabupaten Blora 467,06 jiwa/km², diikuti oleh Kabupaten Wonogiri 554,66 jiwa/km² dan Kabupaten Rembang 645,85 jiwa/km².

Berdasarkan usia, penduduk Jawa Tengah tahun 2024 yang berada pada usia produktif, yakni usia 15-64 tahun 26,22 juta jiwa penduduk (69,20%). Usia produktif merupakan usia kerja yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun berjumlah 11,67 juta jiwa.

Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dengan jumlah penduduk usia produktif, dengan hasil 44,50 yang artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) memiliki tanggungan sebanyak 44 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Sementara itu, proporsi anak balita usia 0-4 tahun sebesar 7,44% dari jumlah penduduk. Meskipun secara jumlah tidak besar, namun tetap menjadi perhatian pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi dan penanganan stunting. Hal ini sejalan dengan program prioritas penanganan stunting yaitu ibu hamil dan anak-anak usia 0-2 tahun, atau disebut sebagai hari pertama kelahiran (1.000 HPK).



Jika dilihat menurut jenis kelamin, tahun 2024 komposisi wanita usia subur, yaitu rentang usia 15-49 tahun sebanyak 9,66 juta jiwa (51,26% dari total penduduk wanita). Proporsi yang besar dari wanita usia subur membutuhkan perhatian yang lebih dalam hal pemenuhan fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan reproduksi.

6.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman sebelum merdeka didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

1) Jaman Penjajahan Belanda

Berdasarkan *Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland - Indie* (Decentralisatie Wet 1903), maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas *Gewest* (Karesidenan), *Afdeeling/Regentschap* (Kabupaten), *District / Standgeemente* (Kota praja), dan *Oderdistrict* (Kecamatan).

2) Jaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh Jawa kecuali *Vorstenkondeh* (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah *Syuu* (Karesidenan), *Si* (Kotapraja), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Distrik), *Son Conder Distrik* dan *Ku* (Kelurahan).

3) Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah tanggal 19 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jawa Tengah.

6.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sejak merdeka sampai dengan sekarang telah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan sebanyak 16 (enam belas) kali yaitu :

1. R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945;
2. KRT Mr Wongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949;
3. R. Boedijono, Tahun 1949 s/d 1954;
4. RMT. Mangunnegoro, Tahun 1954 s/d 1958;
5. R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960;
6. Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966;
7. Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974;
8. Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983;
9. H.M. Ismail, Tahun 1983 s/d 1993;
10. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998;
11. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d Agustus 2007;
12. H. Ali Mufiz, Agustus 2007 s/d 22 Agustus 2008;
13. H. Bibit Waluyo, Agustus 2008 s/d Agustus 2013;
14. H. Ganjar Pranowo, Agustus 2013 s/d 2018;
15. H. Ganjar Pranowo, Agustus 2018 s/d 2023;
16. Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M September 2023 s/d Februari 2025; dan
17. Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K Februari 2025 s/d sekarang



DPRD Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun 1955 sampai sekarang dipimpin 11 (sebelas) orang, yaitu:

1. H. Imam Sofwan, Tahun 1955 s/d 1971;
2. Parwoto, Tahun 1971 s/d 1977;
3. H. Widarto, Tahun 1977 s/d 1982;
4. Ir. H. Soekorahardjo, Tahun 1982 s/d 1992;
5. Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo, Tahun 1992 s/d 1997;
6. Alip Pandoyo, Tahun 1997 s/d 1999;
7. Mardijo, Tahun 1999 s/d 2004;
8. H. Murdoko SH, Tahun 2004 s/d 2012;
9. Drs. Rukma Setya Budi MM, Tahun 2012 s/d 2019;
10. H. Bambang Kusriyanto. B.Sc, Tahun 2019 s/d 2023;
11. H. SUMANTO, SH Tahun 2023 s/d 2025; dan
12. H. SUMANTO, SH Tahun 2025 s/d sekarang.

6.4 VISI, MISI & PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Kebijakan dan rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026. Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 yang menetapkan tujuan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 adalah mewujudkan “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari”. Tujuan ini diukur dengan tiga indikator tujuan yaitu PDRB per Kapita, Rasio Gini, dan Angka Kemiskinan. Sasaran yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah tersebut meliputi:

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan, diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Nilai Tukar Petani;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Pembangunan Gender, dan Indeks Pembangunan Keluarga;
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana;
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya, berdasarkan kebijakan dalam RPD Tahun 2024-2026, ditetapkan arah dan tema pembangunan daerah tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter”. Tema pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat Prioritas Daerah (PD) tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;



3. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Seiring dengan dilantikannya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk periode tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dilakukan penyesuaian dengan arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2025. Hal ini dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.1/640 SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dalam surat edaran tersebut disampaikan bahwa semua daerah agar dapat menyesuaikan dan mengakomodir visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta kebijakan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah yang kemudian ditetapkan sebagai visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 dan tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah “Jawa Tengah Sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut didukung dengan 6 (enam) misi yaitu:

1. Meningkatkan layanan dasar yang inklusif untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mandiri, kompetitif dan berwawasan global;
2. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian perkotaan dan pedesaan berbasis sektor unggulan yang inovatif, mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai integritas;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah, serta mengembangkan pembiayaan pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025-2029. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah “Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Transformasi Ekonomi Berbasis Lingkungan dan Transformasi Sosial didukung Tata Kelola Berkelanjutan”. Tujuan pembangunan daerah ini diukur keberhasilannya dengan indikator Tingkat Kemiskinan, PDRB per Kapita, dan Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut, ditetapkan sasaran pembangunan daerah yaitu:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan, berintegritas dan kolaboratif, serta stabilitas pembangunan daerah, diukur dengan indikator Indeks Integritas Nasional, Indeks Demokrasi Indonesia, dan Otonomi Fiskal Daerah;
2. Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, inklusif dan berbasis lingkungan, diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;



3. Terwujudnya sumber daya manusia berdaya saing dan berkarakter, diukur dengan indikator Indeks Modal Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

6.5 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONALNYA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026



14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
17. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.



BAB 7 PENUTUP

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut disampaikan Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dapat berguna bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.



GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LETHFI